



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

Peraturan Bupati Lampung Timur
Nomor 17 Tahun 2025

RKPD 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2026

**LAMPUNG
TIMUR
MAKMUR**



Hj. ELA SITI NURYAMAH, S.Sos. I, M.A.P.

Bupati Lampung Timur

HL. AZWAR HADI, S.E., M.Si

Wakil Bupati Lampung Timur



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026



**PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2025**



**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 132);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanun 2025;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 01);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, terhitung sejak 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak 2021 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
11. Urusan pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan.

19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 berpedoman pada visi, misi dan program bupati yang dijabarkan dari RPD kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. Prioritas pembangunan daerah;
 - c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. Program Strategis Nasional; dan
 - e. Kesepakatan rapat koordinasi teknis pembangunan Nasional tahun 2025.

- (3) RKPD tahun 2026 berpedoman pada RKP tahun 2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD Provinsi Tahun 2026
- (4) Penyusunan RKPD Tahun 2026 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2026 dan bahan evaluasi pembangunan Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026



DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI	i
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.5 Sistematika Penyusunan	I-9
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-27
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-66
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-123
2.1.5 Standar Pelayanan Minimum (SPM)	II-135
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-146
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-220
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-221
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-223
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional.....	III-1
3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Provinsi Lampung	III-6
3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kabupaten Lampung Timur... ..	III-10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-22
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-22
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-25
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-31





BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1.1	Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMN 2025-2029 Dan RKP 2026	IV-1
4.1.2	Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung Dan RKPD Tahun 2026 Provinsi Lampung.....	IV-3
4.1.3	Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RPJPD Lampung Timur 2025-2025	IV-5
4.1.4	Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Lampung Timur 2025-2025	IV-6
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026.....	IV-22
4.2.1	Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	IV-22
4.2.2	Hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan ...	IV-32
4.2.3	Pemetaan Tema, Sasaran dan Program Pembangunan Tahun 2026	IV-65
4.3	Pemetaan Program Pendukung Prioritas	IV-96
4.3.1	Pemetaan Program terhadap Prioritas Nasional, Provinsi Lampung dan Daerah	IV-96
4.3.2	Pemetaan Program terhadap pencapaian SPM	IV-106

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1	Indikator Kinerja Utama	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Daerah	VI-3
6.3	Indikator Kinerja Kunci Daerah.....	VI-9

BAB VII. PENUTUP





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan antar dokumen perencanaan	I - 9
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur	II - 2
Gambar 2.2. Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Timur	II - 3
Gambar 2.3. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Lampung Timur	II - 5
Gambar 2.4. Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Lampung Timur	II - 7
Gambar 2.5. Peta Topografi Kabupaten Lampung Timur	II - 8
Gambar 2.6. Peta Sebaran Struktur Geologi di Kabupaten Lampung Timur..	II - 10
Gambar 2.7. Peta Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur	II - 11
Gambar 2.8. Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Lampung Timur	II - 18
Gambar 2.9. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Timur.....	II - 19
Gambar 2.10. Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Lampung Timur	II - 20
Gambar 2.11. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lampung Timur	II - 21
Gambar 2.12. Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Lampung Timur.....	II - 21
Gambar 2.13. Peta Risiko Bencana Abrasi dan Gelombang Ekstreim Kabupaten Lampung Timur.....	II - 22
Gambar 2.14. Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Lampung Timur...	II - 22
Gambar 2.15. Sebaran Keluarga Miskin Ekstrim per Kecamatan 2024.....	II - 34
Gambar 2.16. Pantai Mutiara Baru	II - 125
Gambar 2.17. Taman Nasional Way Kambas	II - 126
Gambar 3.1. Komoditas dengan Andil Inflasi Terbesar September-Oktober 2024.....	III - 18
Gambar 3.2. Perkembangan Komposisi Belanja Daerah Tahun 2021-2026...	III - 29



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Timur.....	II - 3
Tabel 2.2.	Curah Hujan di Kabupaten Lampung Timur.....	II - 4
Tabel 2.3.	Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Lampung Timur	II - 7
Tabel 2.4.	Tinggi Wilayah Kabupaten Lampung Timur.....	II - 8
Tabel 2.5.	Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur	II - 9
Tabel 2.6.	Luas Formasi Geologi Kabupaten Lampung Timur.....	II - 9
Tabel 2.7.	Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur.....	II - 11
Tabel 2.8.	Luas Peruntukan Lahan Kabupaten Lampung Timur	II - 12
Tabel 2.9.	Luas Risiko Bencana Kabupaten Lampung Timur (Ha).....	II - 18
Tabel 2.10.	Luas Kawasan Lindung.....	II - 23
Tabel 2.11.	Data Kependudukan Kabupaten Lampung Timur	II - 25
Tabel 2.12.	Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik Kabupaten Lampung Timur	II - 46
Tabel 2.13.	Desa Lokus Stunting Kabupaten Lampung Timur	II - 52
Tabel 2.14.	Desa Lokus AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023	II - 62
Tabel 2.15.	Potensi Budaya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.....	II - 65
Tabel 2.16.	Sarana Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.....	II - 66
Tabel 2.17.	Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Lampung Timur	II - 67
Tabel 2.18.	Rasio Jumlah Guru terhadap Murid Kabupaten Lampung Timur.	II - 67
Tabel 2.19.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur	II - 70
Tabel 2.20.	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur.....	II - 71
Tabel 2.21.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.....	II - 76
Tabel 2.22.	Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Menurut Kepolisian Resort Lampung TimurTahun 2024	II - 80
Tabel 2.23.	Jumlah Rambu Jalan Raya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2024	II - 93
Tabel 2.24.	Jumlah Omset Usaha Koperasi Menurut Kelompok Koperasi (Rupiah)	II - 98
Tabel 2.25.	Jumlah Pemuda di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.....	II -100
Tabel 2.26.	Hasil Perolehan Medali Porprov Lampung Tahun 2022.....	II -100
Tabel 2.27.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya	II -103
Tabel 2.28.	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan.....	II -103
Tabel 2.29.	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran di Kabupaten Lampung Timur (kuintal)	II -107
Tabel 2.30.	Jumlah Bangunan Sarana Perdagangan Menurut Lokasi Pasar dan Jenis Bangunan yang Dikelola oleh Kantor Pengelolaan Pasar di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.....	II -111
Tabel 2.31.	Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024	II -112
Tabel 2.32.	Jumlah Perusahaan/Unit Usaha Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Industri di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024	II -113
Tabel 2.33.	Capaian/Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.....	II -115
Tabel 2.34.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur	II -118



Tabel 2.35. Data PNS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024	II -118
Tabel 2.36. Data PPPK Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024	II -119
Tabel 2.37. Komposisi ASN Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	II -122
Tabel 2.38. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur	II -122
Tabel 2.39. Panjang Jalan Berdasarkan Tingkat Kewenangan di Kabupaten Lampung Timur (km)	II -127
Tabel 2.40. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) Tahun 2022	II -127
Tabel 2.41. Distribusi Listrik PT. PLN pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Lampung Timur	II -129
Tabel 2.42. Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024.....	II -136
Tabel 2.43. Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	II -137
Tabel 2.44. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	II -139
Tabel 2.45. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	II -140
Tabel 2.46. Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOL PP Tahun 2024.....	II -140
Tabel 2.47. Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPBD Tahun 2024	II -141
Tabel 2.48. Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	II -145
Tabel 2.49. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lampung Timur TA 2024.....	II -146
Tabel 3.1. Perkembangan Inflasi Month to Date Tahun 2024	III - 17
Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 s.d Tahun 2026	III - 24
Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 s.d Tahun 2026	III - 28
Tabel 3.4. Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah	III - 29
Tabel 3.5. Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah	III - 30
Tabel 3.6. Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah	III - 30
Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 s.d Tahun 2026.....	III - 31
Tabel 4.1. Indikator Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	IV - 3
Tabel 4.2. Indikator Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026	IV - 4
Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV - 11
Tabel 4.4. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan.....	IV - 17
Tabel 4.5. Integrasi Program Prioritas ke dalam Program Perangkat Daerah	IV - 22
Tabel 4.6. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2026	IV - 28
Tabel 4.7. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026.....	IV - 29
Tabel 4.8. Hasil Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan.....	IV - 38
Tabel 4.9. Pemetaan Program Priotas Pembangunan Tahun 2026.....	IV - 70
Tabel 4.10. Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Lampung Timur Terhadap Prioritas Provinsi Lampung dan Prioritas Nasional Tahun 2026	IV - 81
Tabel 4.11. Pemetaan Program Unggulan Daerah.....	IV - 92
Tabel 4.12. Pemetaan Program Pembangunan yang mendukung Prioritas Kabupaten Lampung Timur 2026	IV - 102
Tabel 4.13. Pemetaan Program Pembangunan yang mendukung Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2026.....	IV - 104



Tabel 4.14. Pemetaan Program Pembangunan yang mendukung Prioritas
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 IV - 106

Tabel 4.15. Pemetaan Program Pembangunan dalam Rangka Pencapaian
SPM Tahun 2026 IV - 112

Tabel 5.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pagu Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026..... V - 2

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2026 VI - 2

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Daerah Per Aspek Kinerja..... VI - 4

Tabel 6.3. Indikator Kinerja Kunci Daerah Per Urusan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah..... VI - 10





DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Timur menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024	II - 26
Grafik 2.2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024.....	II - 27
Grafik 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional	II - 28
Grafik 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024	II - 28
Grafik 2.5. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah)	II - 29
Grafik 2.6. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah)	II - 29
Grafik 2.7. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten /Kota di Provinsi Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah)	II - 30
Grafik 2.8. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten /Kota di Provinsi Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah)	II - 30
Grafik 2.9. Laju Inflasi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional	II - 31
Grafik 2.10. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional	II - 32
Grafik 2.11. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024	II - 32
Grafik 2.12. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur	II - 33
Grafik 2.13. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional	II - 35
Grafik 2.14. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023..	II - 35
Grafik 2.15. Nilai Tukar Petani Kabupaten Lampung Timur	II - 36
Grafik 2.16. Nilai Tukar Petani (NTP) per Subsektor Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024	II - 36
Grafik 2.17. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur	II - 37
Grafik 2.18. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional	II - 37
Grafik 2.19. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024	II - 38
Grafik 2.20. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional	II - 39
Grafik 2.21. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024	II - 39
Grafik 2.22. Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional	II - 39
Grafik 2.23. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024	II - 40
Grafik 2.24. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional	II - 40
Grafik 2.25. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024	II - 41
Grafik 2.26. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional	II - 41





Grafik 2.27. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024	II - 42
Grafik 2.28. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	II - 42
Grafik 2.29. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Tahun 2024	II - 43
Grafik 2.30. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Lampung Timur	II - 43
Grafik 2.31. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lampung Timur	II - 44
Grafik 2.32. Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2024	II - 44
Grafik 2.33. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2024	II - 45
Grafik 2.34. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Lampung Timur	II - 47
Grafik 2.35. Angka dan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Lampung Timur ...	II - 48
Grafik 2.36. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur	II - 49
Grafik 2.37. Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten Lampung Timur	II - 51
Grafik 2.38. Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023	II - 51
Grafik 2.39. Prevalensi <i>Wasting</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023	II - 56
Grafik 2.40. Prevalensi Status Gizi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 ...	II - 57
Grafik 2.41. Persentase Penemuan dan Pengobatan TB Kabupaten Lampung Timur	II - 58
Grafik 2.42. Insiden HIV per 1000 Penduduk Kabupaten Lampung Timur	II - 59
Grafik 2.43. <i>Incidence Rate</i> Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Lampung Timur	II - 60
Grafik 2.44. Perkembangan Malaria Positif Terkonfirmasi di Kabupaten Lampung Timur	II - 61
Grafik 2.45. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional	II - 63
Grafik 2.46. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023	II - 64
Grafik 2.47. Indeks Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Nasional	II - 64
Grafik 2.48. Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Lampung Timur	II - 65
Grafik 2.49. Angka Melanjutkan dan Angka Putus Sekolah Kabupaten Lampung Timur	II - 66
Grafik 2.50. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kabupaten Lampung Timur	II - 68
Grafik 2.51. Capaian Desa Siaga Mandiri Dibandingkan Target Kabupaten Lampung Timur	II - 69
Grafik 2.52. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Kecukupan Air Minum	II - 73
Grafik 2.53. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Terlindungi	II - 74
Grafik 2.54. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	II - 74
Grafik 2.55. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Aman	II - 75
Grafik 2.56. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023	II - 76
Grafik 2.57. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023	II - 77



Grafik 2.58. Persentase Rumah yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak di Kabupaten Lampung Timur.....	II - 77
Grafik 2.59. Persentase Rumah Tangga yang Tinggal di Hunia Kumuh	II - 78
Grafik 2.60. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak.....	II - 78
Grafik 2.61. Jumlah Kesejahteraan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, dan Persentase Penyelesaian Kesejahteraan Menurut Kepolisian Resort Lampung Timur Tahun 2024	II - 79
Grafik 2.62. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri di Kabupaten Lampung Timur	II - 81
Grafik 2.63. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Lampung Timur.....	II - 82
Grafik 2.64. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Timur.....	II - 82
Grafik 2.65. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024.....	II - 83
Grafik 2.66. Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional.....	II - 85
Grafik 2.67. Jumlah Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan Kabupaten Lampung Timur	II - 87
Grafik 2.68. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur.....	II - 87
Grafik 2.69. Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur	II - 88
Grafik 2.70. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung.....	II - 89
Grafik 2.71. Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Lampung Timur (ton).....	II - 90
Grafik 2.72. Capaian Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II - 91
Grafik 2.73. Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024	II - 92
Grafik 2.74. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Kabupaten Lampung Timur.....	II - 92
Grafik 2.75. Indeks Pembangunan Keluarga	II - 93
Grafik 2.76. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Jumlah Korban Kecelakaan Kabupaten Lampung Timur	II - 95
Grafik 2.77. Jumlah Base Transceiver Station di Kabupaten Lampung Timur.....	II - 96
Grafik 2.78. Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Lampung Timur II.....	II - 97
Grafik 2.79. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024	II - 97
Grafik 2.80. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Timur.....	II - 98
Grafik 2.81. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II - 99
Grafik 2.82. Nilai Investasi dan Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Lampung Timur.....	II - 99
Grafik 2.83. Indeks Partisipasi Olahraga	II - 101
Grafik 2.84. Produksi Perikanan Kabupaten Lampung Timur (ton)	II - 104
Grafik 2.85. Jumlah Wisatawan Kabupaten Lampung Timur	II - 104
Grafik 2.86. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur	II - 105
Grafik 2.87. Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Padi Kabupaten Lampung Timur	II - 105



Grafik 2.88. Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Jagung Kabupaten Lampung Timur	II - 106
Grafik 2.89. Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Ubi Kayu Kabupaten Lampung Timur	II - 106
Grafik 2.90. Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Timur (ton)	II - 108
Grafik 2.91. Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Lampung Timur (ekor).....	II - 109
Grafik 2.92. Produksi Daging Kabupaten Lampung Timur (kg)	II - 109
Grafik 2.93. Populasi Unggas Kabupaten Lampung Timur (ekor).....	II - 110
Grafik 2.94. Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Lampung Timur (kg)	II - 110
Grafik 2.95. Produksi Telur Kabupaten Lampung Timur (ton).....	II - 110
Grafik 2.96. Persentase Peningkatan Omzet Perdagangan Kabupaten Lampung Timur	II - 111
Grafik 2.97. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur ..	II - 112
Grafik 2.98. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur	II - 114
Grafik 2.99. Kinerja Propempera.....	II - 116
Grafik 2.100. Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024.....	II - 121
Grafik 2.101. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lampung Timur	II - 124
Grafik 2.102. Perkembangan Deviden BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	II - 124
Grafik 2.103. Kondisi Jalan Kabupaten Lampung Timur (km)	II - 127
Grafik 2.104. Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Timur	II - 128
Grafik 2.105. Kondisi Jembatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 ..	II - 128
Grafik 2.106. Proporsi Penduduk Lampung yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	II - 130
Grafik 2.107. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung dan Nasional	II - 131
Grafik 2.108. Indeks Pendidikan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional.....	II - 132
Grafik 2.109. Indeks Pendidikan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025	II - 132
Grafik 2.110. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024	II - 133
Grafik 2.111. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional.....	II - 133
Grafik 2.112. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur Menurut Jenis Kelamin	II - 134
Grafik 2.113. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	II - 134
Grafik 2.114. Rasio Ketergantungan Kabupaten Lampung Timur	II - 135
Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Year to Year Tahun 2024.....	III - 16
Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi Month to Month Tahun 2024	III - 17



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menggambarkan program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu selama satu tahun, yang merupakan penjabaran serta pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun berkenaan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029. Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD 2025-2029.

Merujuk dokumen RPJMD 2025-2029, konstruksi visi Pasangan Kepala Daerah periode 2025-2030, Bupati Hj. Ela Siti Nuryamah, M.E., M.E.P., dan Wakil Bupati Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si, sebagai berikut:



Masyarakat Kabupaten Lampung Timur berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan daerah dapat digunakan sebagai inspirasi, peta jalan atau langkah strategis, pengumpulan energi masyarakat untuk pembangunan daerah, dan identitas diri masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih makmur, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 mengadopsi utuh visi Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2025-2029 yang merupakan janji politik yang telah disampaikan pada saat kampanye. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 akan menjadi





inspirasi, peta jalan, langkah strategis, dan pengumpulan energi masyarakat dalam semangat *Sakai Sambayan Membangun Lampung Timur* untuk terwujudnya:

LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS

Merujuk visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, penyusunan RKPD juga melibatkan berbagai pihak yang berkaitan seperti pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari berbagai sektor dan masyarakat. RKPD disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan guna mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memastikan implementasinya. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, Penyusunan RKPD mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran daerah, sehingga program-program yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam penyusunan RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa alur dan tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi:

1) Persiapan penyusunan RKPD

Persiapan penyusunan RKPD, meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2) Penyusunan rancangan awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup:

- a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;





- j. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

3) Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten disempurnakan berdasarkan:

- a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan
- b. Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten/kota, bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten dalam rangka:

- a. Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- b. Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

5) Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

6) Penetapan RKPD.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan. Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten dijadikan sebagai:

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten;
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten.

Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 dilaksanakan sebagai wujud implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Permendagri ini menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan. Penyusunan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran,





pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan capaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan situasi terkini. Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Dengan demikian, RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 berperan sebagai instrumen operasional yang memastikan kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan implementasi tahunan, guna mencapai tujuan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);





7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 132);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanun 2025;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);





19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);





32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 8);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang selaras dengan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen RKPD menjadi fundamental karena merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan yang memastikan keselarasan, koordinasi, dan sinkronisasi antara kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan lainnya. Beberapa dokumen yang saling terkait dalam proses tersebut meliputi:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD 2026. Berdasarkan tahapan pembangunan jangka panjang, periode 2025-2030 menjadi tahapan pertama pembangunan jangka panjang 2025-2045, dengan arah kebijakan penguatan modal dasar pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur 2025-2045 merupakan kerangka kerja pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dalam periode lima tahunan, dalam rangka pencapaian visi daerah. Tahapan dan arah kebijakan yang ditetapkan mencerminkan urgensi pembangunan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan relatif berbeda, namun tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Pentahapan arah kebijakan tersebut akan menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengahnya. Pentahapan pembangunan tersebut dilakukan secara berkesinambungan, terukur dan konsisten untuk mencapai visi jangka panjang daerah.

2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Kepala Daerah terpilih berkomitmen untuk menjadikan Tahun 2026 menjadi tonggak pertama pembuktian janji politik kepada masyarakat. Ditengah suasana efisiensi APBN dan tekanan ekonomi global, Kepala Daerah terus berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan dan aspirasi masyarakat sesuai skala prioritas dengan mengembangkan alternatif pembiayaan daerah yang diyakini akan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah di tahun 2026 yang akan datang.

Pembangunan tahun 2026 akan fokus pada pelaksanaan dan pencapaian target program unggulan daerah dan Program Hasil Terbaik Cepat. Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat arah pembangunan daerah dengan fokus pada pelaksanaan nyata dan pencapaian target program unggulan daerah. Fokus



pembangunan tahun 2026 juga menjadi bentuk komitmen daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan jangka menengah, memastikan setiap target dalam RPJMD dapat tercapai sesuai arah visi dan misi kepala daerah. Dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, optimalisasi sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan seluruh program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di tahun 2026 mampu mengakselerasi terwujudnya visi Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas.

3. KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara)

KUA-PPAS adalah dokumen yang menjabarkan prioritas pembangunan dari RKPD ke dalam rencana keuangan daerah. KUA memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sementara PPAS memuat plafon anggaran sementara untuk program dan kegiatan prioritas. Hubungan antara dokumen RKPD dengan KUA-PPAS adalah RKPD menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS hal tersebut dikarenakan RKPD menetapkan rencana kerja tahunan, sementara KUA-PPAS menerjemahkan rencana kerja tersebut ke dalam alokasi anggaran yang terukur dan terencana.

Selain itu, RKPD akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Program dan kegiatan yang ada dalam RKPD akan dialokasikan anggarannya dalam APBD. Oleh karena itu RKPD menjadi dasar dalam penyusunan anggaran yang realistis dan terarah.

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Lampung

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan memuat prioritas nasional serta program-program strategis yang harus dilaksanakan. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, RKPD disusun dengan mengacu pada arah kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP. Selain itu, penyusunan RKPD juga memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung. Sinergi antara RKP, RKPD Provinsi, dan RKPD Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah berjalan selaras dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun provinsi.

5. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

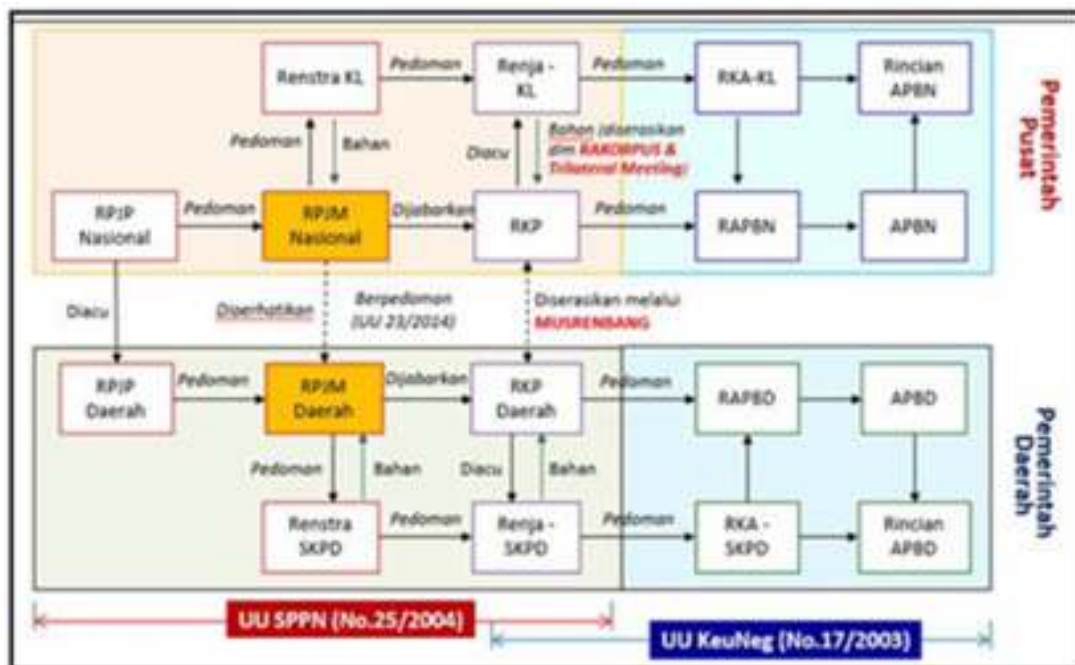
Hasil evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD yang baru. Dengan demikian, hasil evaluasi tersebut dapat mengarah pada perbaikan atau penyesuaian kebijakan dan program dalam RKPD yang akan datang.

Dokumen RKPD berhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang terstruktur, terintegrasi, dan berkesinambungan. Keseluruhan dokumen ini saling terkait dan membentuk suatu siklus perencanaan yang terus berlanjut dan selaras, untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat daerah maupun nasional. Berikut ini gambar yang menunjukkan hubungan antar dokumen perencanaan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004



(SPPN) dan UU No. 17 Tahun 2003 (Keuangan Negara), dengan pembagian peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Undang-undang 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 adalah untuk menentukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur adalah:

1. Memberikan arah dan acuan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2026;
3. Menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
4. Sebagai panduan operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Lampung Timur pada tahun anggaran 2026.

1.5. Sistematika Penyusunan

RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup beberapa pembahasan mengenai:

1.1. Latar Belakang

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Kabupaten, RKPD Provinsi Lampung dan RKP/program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini mencakup beberapa pembahasan mengenai:

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.





BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini mencakup beberapa pembahasan mengenai:

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKPD Provinsi Lampung, dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini mencakup beberapa pembahasan mengenai:

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai rencana kerja beserta pendanaan daerah berupa program dan kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini membahas mengenai evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, termasuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan analisis terhadap capaian pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Pada bab ini menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Kabupaten Lampung Timur.





BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Kemudian pada Tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan definitif. Selanjutnya pada Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan definitif.

Pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 Desa dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 257 desa. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 264 desa definitif.

Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu ***Bumei Tuwah Bepadan***, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

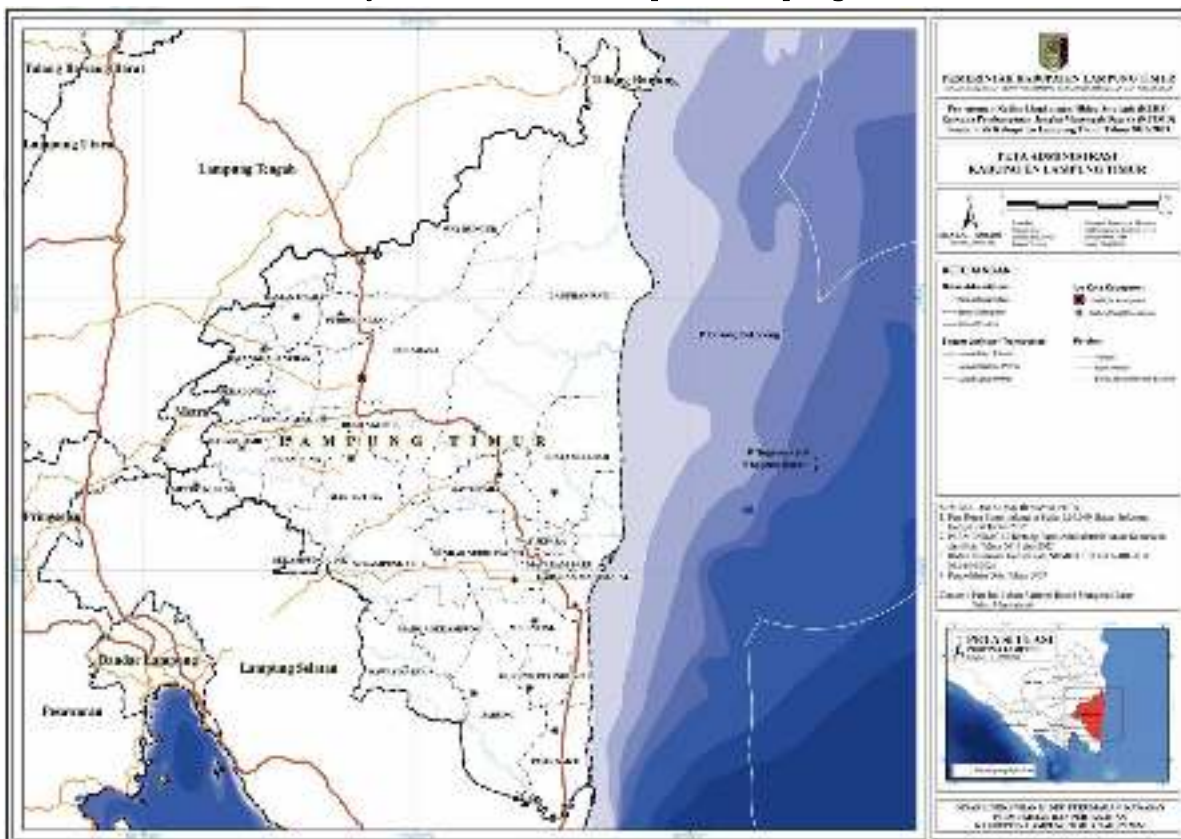
Secara astronomis Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi: 105015' BT-106020'BT dan 4037'LS-5037' LS, dengan luas wilayah kurang lebih 3.860,92 km²



berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Data Wilayah Administrasi, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2024

Secara administratif wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan/laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

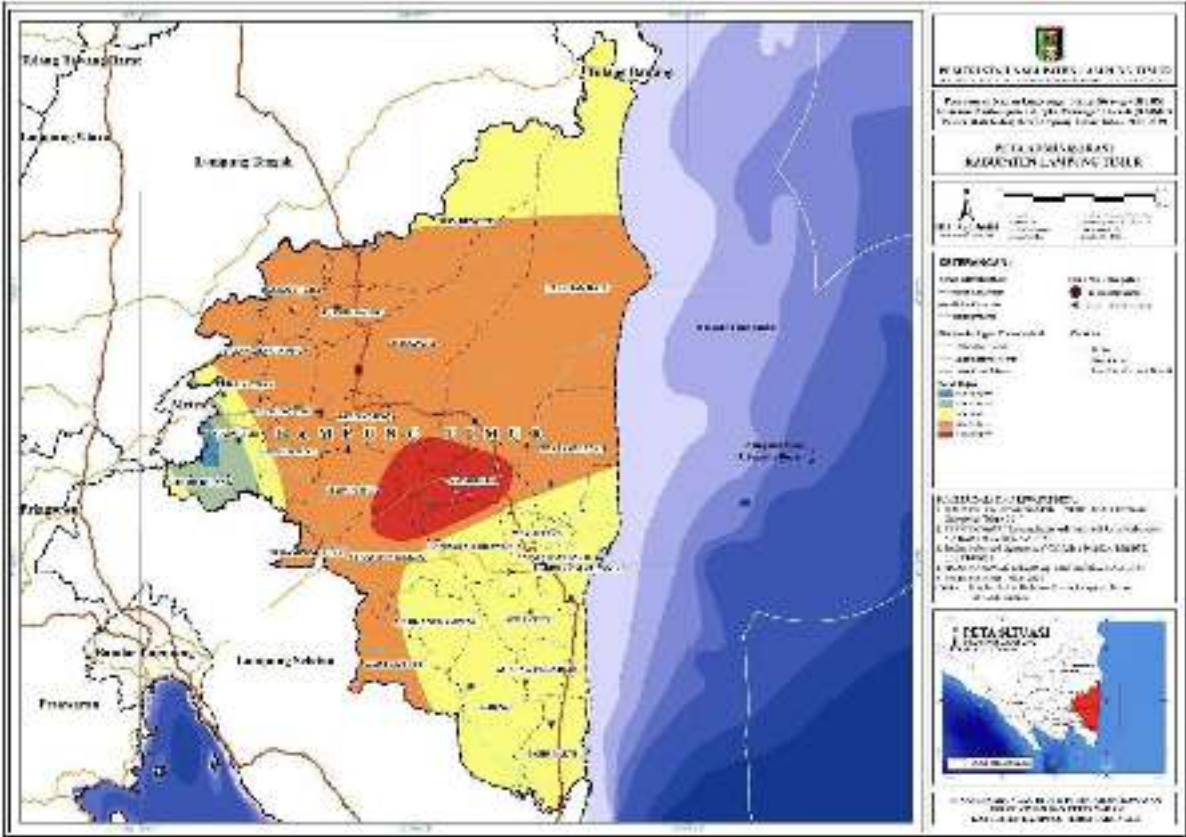
- Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa.
- Wilayah perairan/laut yang mencakup wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.1.1.1 Klimatologi

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 26,7°C dan kelembaban udara rata-rata 82,76 persen selama satu tahun.



Gambar 2.2
Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2024

Tabel 2.1
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Timur

Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/s)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	26,5	83,2	2,1	1012,2	600,5	17	4,8
Februari	26,6	74,9	1,8	1010,9	174,8	12	3,7
Maret	27	81,6	1,7	1010,7	249,6	9	4,5
April	27,5	81,9	1,6	1011,1	168,5	8	5,6
Mei	27,2	84	1,4	1011,3	153,1	9	4,6
Juni	26,8	85,8	1,4	1011,3	100	13	4,4
Juli	26,6	81,1	2	1011	80,4	9	3,8
Agustus	26,4	84	1,9	1011,5	298,1	12	3,9
September	26,5	83,6	2	1012,3	169,9	11	4,1
Oktober	26,9	83,6	1,9	1012	168,4	9	4,3
November	27	83,5	2	1011,3	145,4	8	3,7
Desember	26,4	85,9	1,9	1010,7	117	11	3,2

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2024





Tabel 2.2
Curah Hujan di Kabupaten Lampung Timur

No.	Curah Hujan	Luas (Ha)
1.	1500-1600 mm	1,395.28
2.	1600-1700 mm	8,393.72
3.	1700-1800 mm	142,485.88
4.	1800-1900 mm	212,997.64
5.	1900-2000 mm	20,540.23

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2024

2.1.1.1.2 Hidrologi

a. Sungai

Di Kabupaten Lampung Timur dilalui 2 (dua) sungai utama yaitu Way Sekampung dan Way Seputih dengan anak sungai yang tersebar. Kabupaten Lampung Timur merupakan penerima, sedangkan hulu sungai berada di kabupaten lain. Satuan Wilayah Sungai utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih–Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. SWS Seputih-Sekampung sendiri terbagi menjadi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS), 3 (tiga) DAS masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu: DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Jepara-Kambas, dan 1 (satu) DAS Bandar Lampung-Kalianda.

Way Sekampung adalah salah satu sungai terbesar yang mengalir di bagian paling selatan Kabupaten Lampung Timur. Aliran sungai ini memisahkan Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan. Way Sekampung berhulu sungai di kaki bukit Gunung Rindingan, Kabupaten Tanggamus dan bermuara di Laut Jawa, dengan total panjang aliran hulu hingga Laut Jawa sepanjang 265 kilometer, untuk Lampung Timur sebesar 174 km, dengan lebar antara 3,7-21 m, dengan jumlah anak sungai sebanyak 22 aliran anak sungai.

Way Sekampung merupakan salah satu sungai terpanjang di provinsi Lampung, dengan panjang dari hulu sampai ke hilir 174 km. Way Sekampung mempunyai karakteristik fisik bentuk sungai berkelok- kelok (*meandering*), dengan jumlah cabang anak sungai sebanyak 22 buah, permukaan sungai di bagian hulu hingga tengah memilki lebar berkisar 50-60 m, kedalaman bervariasi 3,2–4,5 m, kecepatan aliran rata- rata umumnya rendah, kurang dari 0,2 m/detik. Adapun di bagian hilir hingga muara sungai memiliki lebar permukaan 70 hingga 144 m, dan mulut muara sungai memiliki lebar hingga 128 m.

DAS Sungai Way Seputih seluas 1.296,29 km², debit rata-rata minimal tahunan 3,78 m³/detik dan volume air tahunannya 119,206 juta m³. Panjang Way Seputih di bagian Lampung Timur berkisar 15,5 km, dengan 36 aliran anak sungai. DAS Way Seputih diapit oleh dua sungai utama yakni; Way Pengubuan dan Way Pegadungan. Untuk Way Pegadungan,

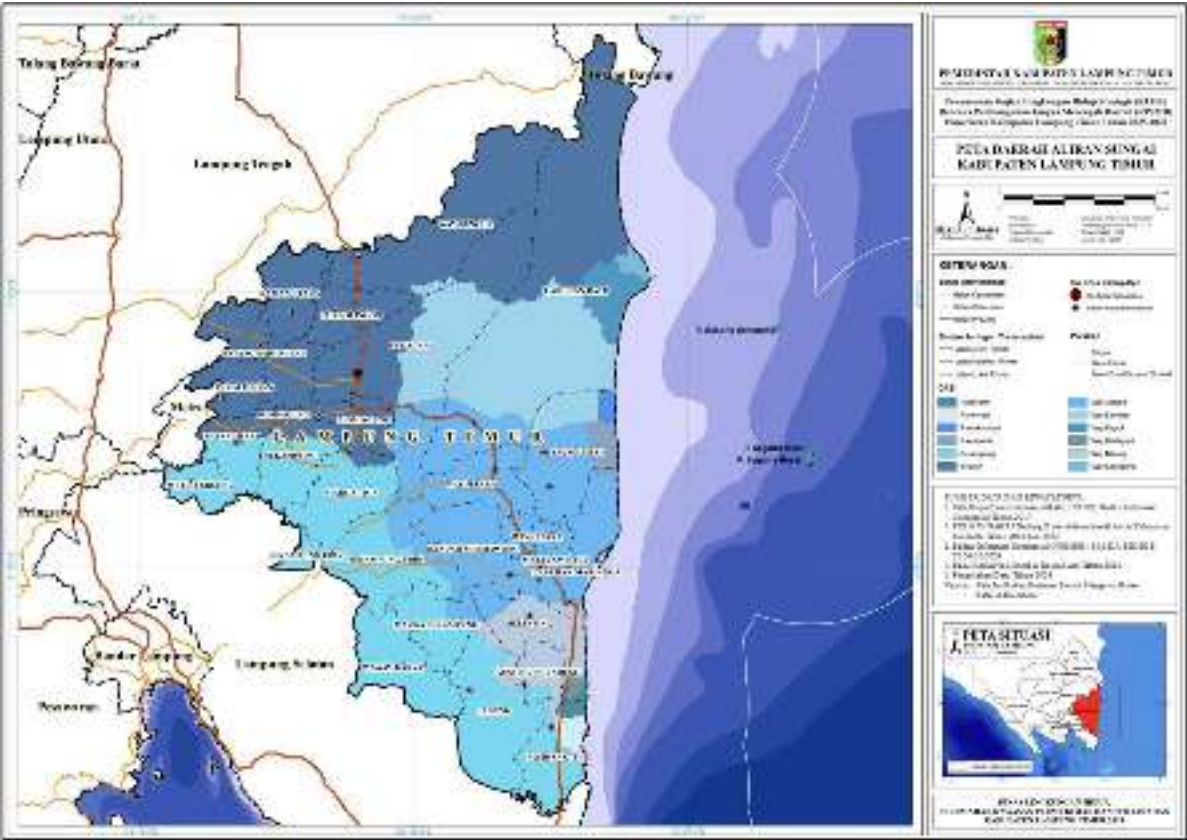




sebagian besar memisahkan antara Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.

Secara administratif DAS Way Seputih di bagian hulu terletak di Kabupaten Lampung Tengah, meliputi dua kecamatan, yakni Kecamatan Padang Jaya dan Kecamatan Padang Ratu. Di bagian hilir, Way Seputih termasuk dalam kecamatan Way Bungur Lampung Timur, setempat dikenal dengan daerah cabang, sebagai muara sungai way seputih yang berbatasan langsung dengan wilayah Taman Nasional Way Kambas Lampung Timur, Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang.

Gambar 2.3
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2024

b. Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai yaitu Way Abar, Way Jepara, Way Jejawai. Aliran irigasi dari danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selehah, dan Labuhan Ratu. Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin/Way Kawat, yang letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan.



Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan
- Adanya kawasan permukiman baik di desa maupun di kota
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa

c. Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah di sekitarnya menjadi tergenang air jika topografi di sekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah.

Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara, dan Braja Selehah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpasan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang, yang terbesar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting, dan Gunung Pelindung.

Daerah rawa belakang biasanya merupakan daerah potensi banjir dengan jenis tanahnya adalah tanah-tanah organik (gambut) dengan kedalaman tanah 90 cm yang mempunyai kandungan air permukaan banyak dan menunjukkan drainase yang jelek. Banjir dapat terjadi karena morfologinya yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian muka tanah lebih rendah atau sama dengan elevasi muka air laut pasang rata-rata.

d. Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumber daya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), di mana sungai mudah tercemar. Produktivitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunnya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batuan ini mampu untuk bertindak sebagai akuifer.

Berdasarkan hasil survey mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai, dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat. Dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 m dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 m. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat.

Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20-30 m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8-14 m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7-13 m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada daerah elevasi ini berkisar antara 0,7-3 m. Pada musim kemarau air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat terbatas jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup tebal.

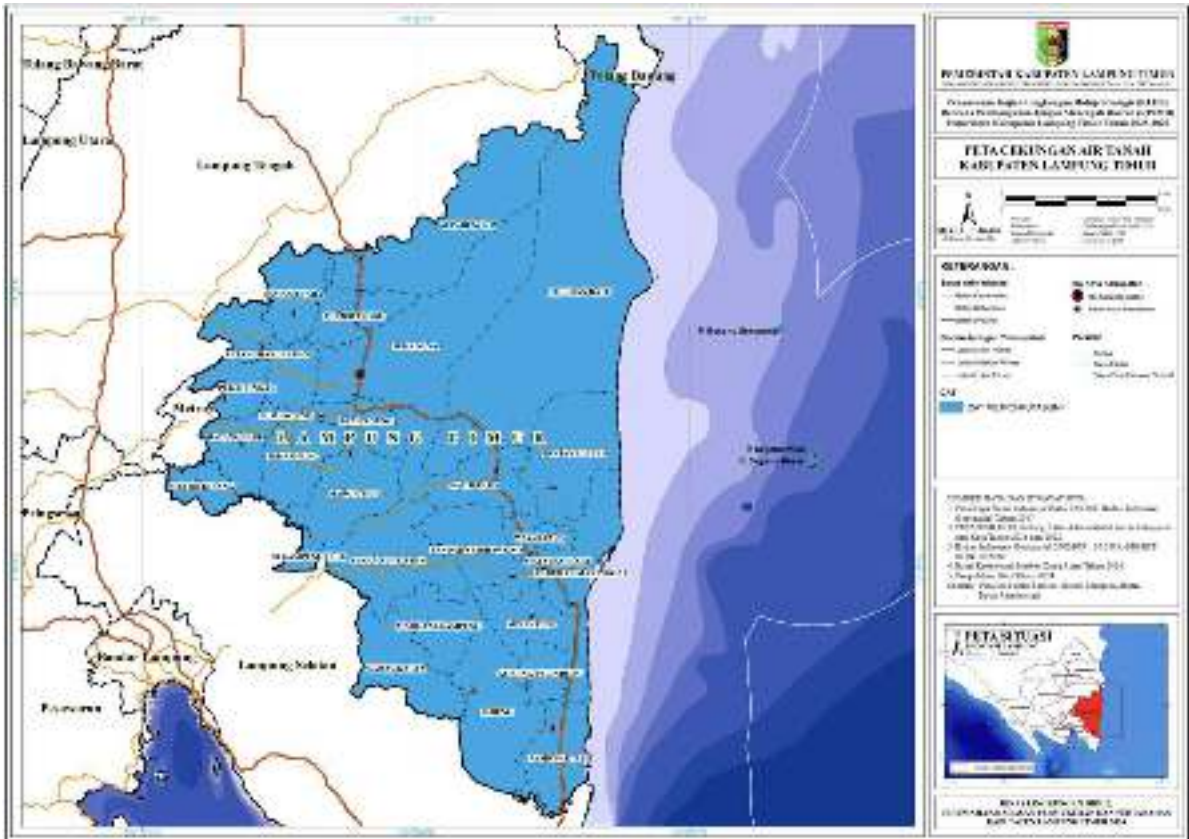
Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 m dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8-7 m, dengan muka air tanah bebas (TKA/*static water level*) berkisar antara 0,2-4 m. Pada musim kemarau air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.

Tabel 2.3
Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Lampung Timur

CAT	Luas (Ha)
CAT Metro-Kotabumi	385.447,48

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2024

Gambar 2.4
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Lampung Timur



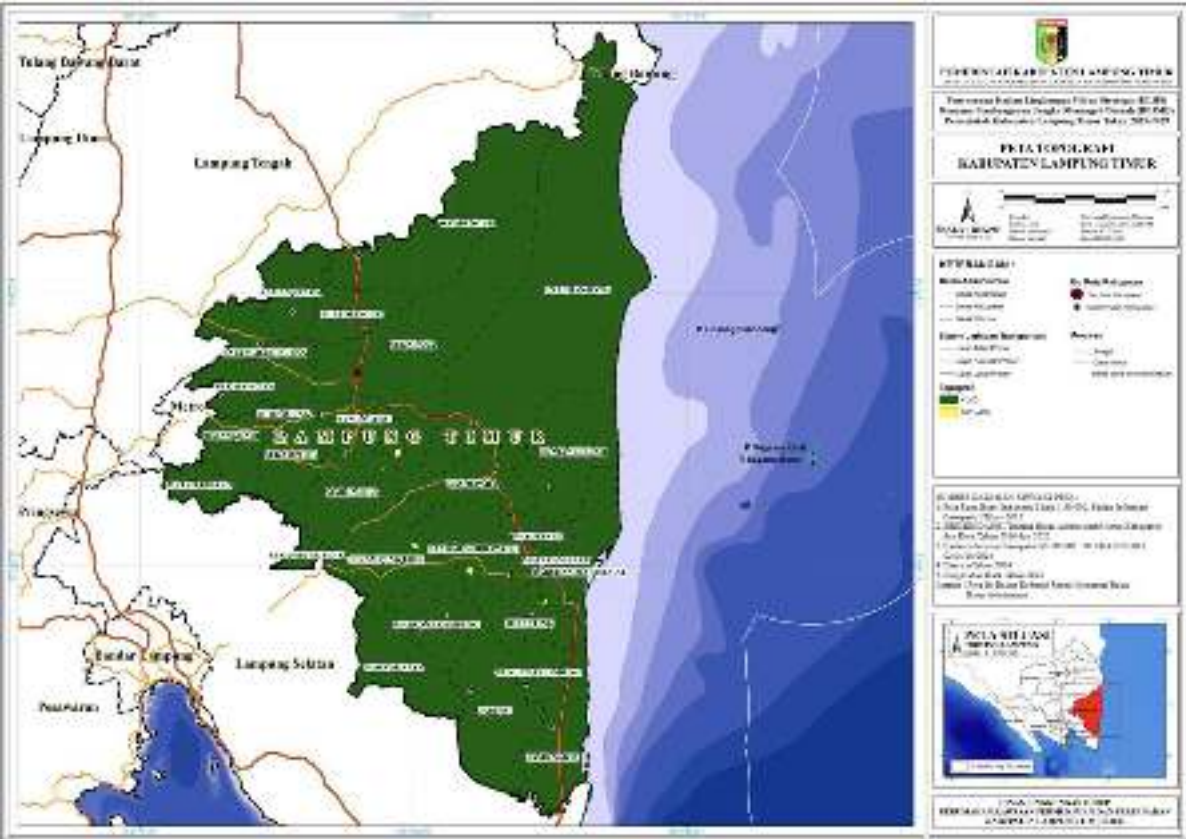
Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2024



2.1.1.1.3 Topografi

Kondisi topografi di Kabupaten Lampung Timur secara umum meliputi kelas kelerengan datar, berombak, bergelombang, dan berbukit kecil. Karakteristik topografi Kabupaten Lampung Timur sebagian besar wilayah berada pada ketinggian rendah. Berdasarkan data ketinggian, wilayah ini dapat dikategorikan menjadi dua zona utama, yaitu daerah dengan ketinggian kurang dari 200 mdpl dan daerah dengan ketinggian antara 200-400 mdpl. Zona dengan ketinggian kurang dari 200 mdpl mendominasi luas wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Gambar 2.5
Peta Topografi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DEM Nasional, 2024

Tabel 2.4
Tinggi Wilayah Kabupaten Lampung Timur

Ketinggian	Luas (Ha)
<200 mdpl	385.164,93
200-400 mdpl	290,10

Sumber: DEM Nasional, 2024





2.1.1.1.4 Geologi

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk endapan aluvium kuarter. Daerah bertimbulan rendah sampai sedang, dengan bukit-bukit bulat menggelombang sesuai untuk satuan sedimen yang berumur tersier dan kuarter. Pada tabel berikut memperlihatkan susunan stratigrafi wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.5
Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur

Batuan Kuarter	
(Qal)	Alluvium: bongkah, kerikil, pasir, tanah, lumpur, lempung
(Qbs)	Basalt Sukadana: basalt berongga
(Qak)	Pasir Kuarsa: pasir kuarsa halus
(Qs)	Endapan Rawa: pasir, lanau, lumpur, lempung, mengandung sisa tanaman
Batuan Tersier	
(Qpt)	Formasi Terbanggi: batu pasir dengan sisipan batu lempung
(Qty)	Formasi Lampung: tuffa berbatu apung, tuffa riolitik, batu lempung tuffaan, batu

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

Tabel 2.6
Luas Formasi Geologi Kabupaten Lampung Timur

No	Formasi Geologi	Luas (Ha)
1	Alluvium (Qal)	47.654,78
2	Lampung formation (Qty)	100.277,12
3	Old alluvial (Qat)	107,69
4	Quartz sands (Qak)	1,204.95
5	Sukadana basalt (Qbs)	89,492.36
6	Swamp deposits (Qs)	25,755.48
7	Terbanggi formation (Qpt)	121.279,99

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

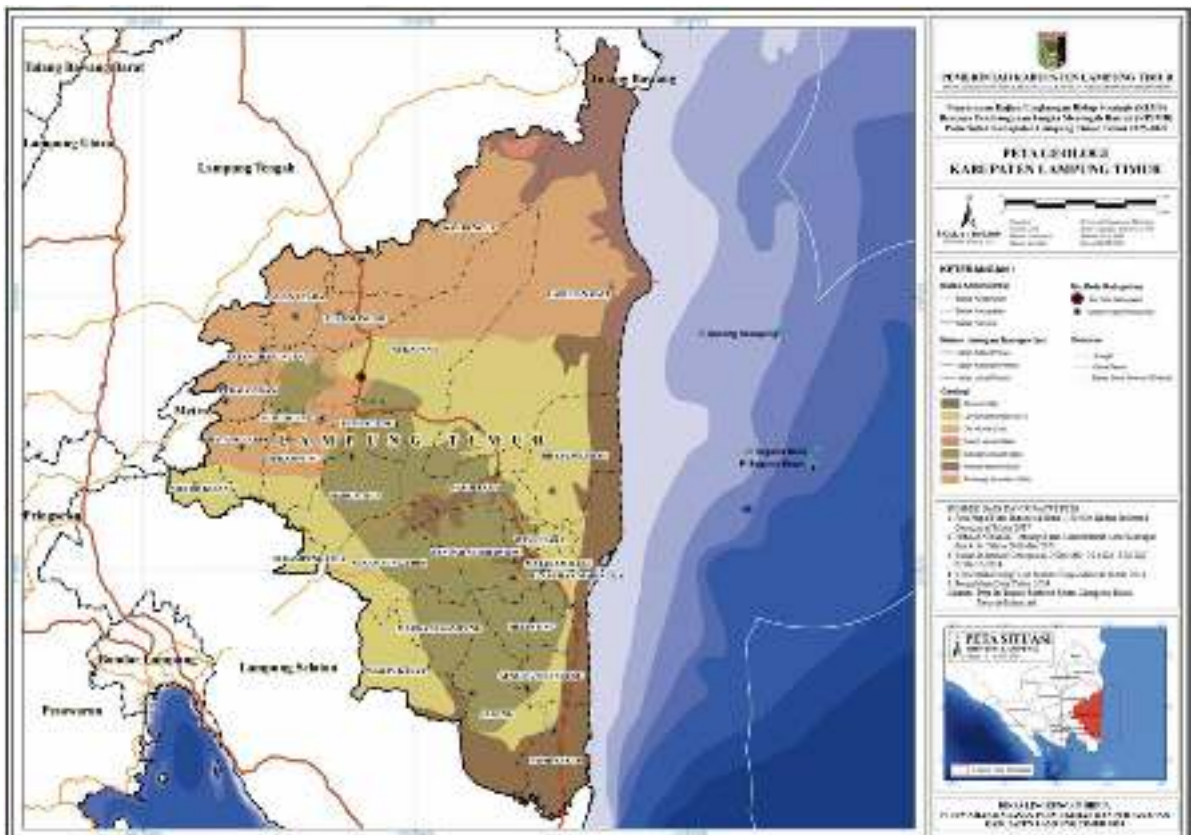
Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan litologinya Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

- Endapan permukaan (alluvium) terdiri dari dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada di daerah pesisir dan muara sungai.
- Batuan gunung api (formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw), tufa Lampung (Qlv), dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada Kecamatan Labuhan Ratu yakni 33.340,90 hektar dan luas terkecil pada Kecamatan Raman Utara (22,26 hektar).



- c. Batuan sedimen (formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), formasi Telisa (Ttmp), sebagian besar formasi Baturaja (Tmbg) dan formasi lingsing (Kls). Sebagian besar terdapat di utara didominasi di Kecamatan Way Bungur (37.638 Ha) dan sedikit di selatan.
- d. Batuan beku (basalt Sukadana) yang terbentuk dari basalt Sukadana (Qb), batuan terobosan miosen seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Luas terbesar terdapat di Kecamatan Sukadana (27.528,42 hektar) dan luasan terkecil terdapat di Kecamatan Waway Karya (75,77 hektar)

Gambar 2.6
Peta Sebaran Struktur Geologi di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024



2.1.1.1.5 Jenis Tanah dan Peruntukan Lahan

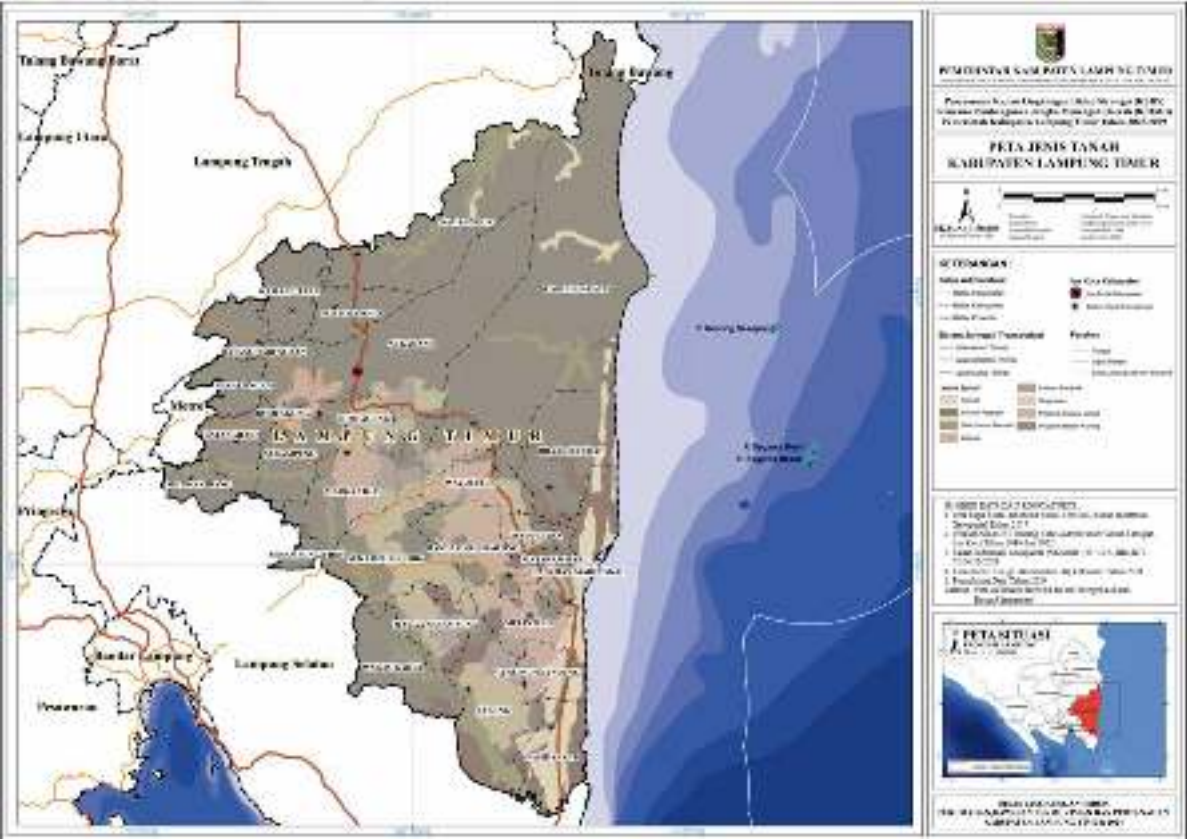
Jenis tanah di wilayah Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh jenis tanah Podsolik Merah Kuning seluas 238.976,87 Ha. Kemudian jenis tanah yang paling sedikit dijumpai di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu jenis tanah organosol seluas 2.466,12 Ha. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Alluvial	141.258,02
2	Alluvial Regosol	61.132,31
3	Glei Humus Rendah	41.732,35
4	Latosol	39.540,23
5	Latosol Podsolik	25.826,67
6	Organosol	664,99
7	Podsolik Kelabu Coklat	13.982,10
8	Podsolik Merah Kuning	61.983,01

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

Gambar 2.7
Peta Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024



Pola peruntukan lahan masih didominasi oleh Pertanian Lahan Kering Campur yaitu sebesar 25% dari seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur atau seluas 95.265,89 hektar. Luas penggunaan lahan kedua ditempati oleh Semak Belukar Rawa, yaitu sebesar 69.249,75 hektar. Lebih detail rincian luas lahan menurut peruntukan lahan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Luas Peruntukan Lahan Kabupaten Lampung Timur

No.	Peruntukan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	15.340,46
2	Hutan Mangrove Primer	2,46
3	Hutan Mangrove Sekunder	2.460,75
4	Hutan Rawa Sekunder	37.328,94
5	Lahan Terbuka	49,44
6	Perkebunan	4.924,17
7	Permukiman	46.069,28
8	Pertanian Lahan Kering	66.277,07
9	Pertanian Lahan Kering Campur	95.265,89
10	Rawa	4.461,50
11	Sawah	35.308,16
12	Semak Belukar Rawa	69.249,75
13	Tambak	7886,08
14	Tubuh Air	1188,83

Sumber: BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/10/2024

2.1.1.1.6 Struktur Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a. Sistem pusat kegiatan;
- b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem pusat kegiatan Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi atau PKWp, berada di Perkotaan Sukadana yang berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan.
- b. Pusat Kegiatan Lokal atau PKL, meliputi:
 - Perkotaan Way Jepara yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura; dan
 - Perkotaan Labuhan Maringgai yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan pusat pengembangan perikanan.





c. Pusat Kegiatan Lokal promosi atau PKLp, meliputi:

- Perkotaan Pekalongan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata, sentra pembibitan buah- buahan, tanaman hias, dan perkebunan, serta permukiman perkotaan;
- Perkotaan Sekampung Udik yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman; dan
- Perkotaan Bandar Sribhawono yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman.

d. Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK meliputi:

- Perkotaan Jabung yang berfungsi sebagai pertanian dan perkebunan, permukiman dan lindung;
- Perkotaan Purbolinggo yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata dan sentra pembibitan padi;
- Perkotaan Marga Tiga yang berfungsi sebagai pertanian lahan kering pertambangan dan perkebunan;
- Perkotaan Pasir Sakti yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman dan pertambangan;
- Perkotaan Sekampung yang berfungsi sebagai pertanian lahan basah dan permukiman;
- Perkotaan Raman Utara yang berfungsi sebagai pertanian lahan basah, permukiman dan lindung;
- Perkotaan Melinting yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan permukiman, lindung, dan pariwisata;
- Perkotaan Gunung Pelindung yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman, pertambangan dan lindung;
- Perkotaan Marga Sekampung yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, dan lindung;
- Perkotaan Batanghari yang berfungsi sebagai pertanian dan perkebunan, permukiman, dan lindung;
- Perkotaan Metro Kibang yang berfungsi sebagai permukiman, dan perkebunan campur;
- Perkotaan Batanghari Nuban yang berfungsi sebagai pertanian, dan permukiman;
- Perkotaan Bumi Agung yang berfungsi sebagai pertanian, dan permukiman;
- Perkotaan Labuhan Ratu yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, pariwisata, agrowisata; dan
- Perkotaan Mataram Baru yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman, lindung, dan pariwisata.

e. Pusat Pelayanan Lingkungan atau PPL, meliputi:

- PPL Waway Karya yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman;
- PPL Braja Selebah yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman; dan
- PPL Way Bungur yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman.





2.1.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, memiliki kebijakan pembentukan struktur ruang sebagai berikut:

- a. Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan, yang meliputi:
 - 1) Pengembangan PKWp Sukadana,
 - 2) Pengembangan PKL Perkotaan Way Jepara dan perkotaan Labuhan Maringgai,
 - 3) Pengembangan PKLp Perkotaan Pekalongan, Perkotaan Sekampung Udik dan Perkotaan Bandar Sribhawono, Pengembangan PPK Perkotaan Jabung, Perkotaan Purbolinggo, Perkotaan Marga Tiga, Perkotaan Pasir Sakti, Perkotaan Sekampung, Perkotaan Raman Utara, Perkotaan Melinting, Perkotaan Gunung Pelindung, Perkotaan Marga Sekampung, Perkotaan Batanghari, Perkotaan Metro Kibang, Perkotaan Batanghari Nuban, Perkotaan Bumi Agung, Perkotaan Labuhan Ratu dan Perkotaan Mataram Baru.
 - 4) Pengembangan PPL Perdesaan Waway Karya, Perdesaan Braja Selebah dan Perdesaan Way Bungur
- b. Perwujudan Sistem Prasarana Utama, yang meliputi:
 - 1) Sistem Transportasi Darat;
 - jaringan jalan, yang meliputi jalan yang menghubungkan antar ibukota Kecamatan; pengembangan jalan lokal tersebar di seluruh kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung dari tiap-tiap pusat kegiatan; dan pengembangan jalan lingkar kabupaten terdiri dari ruas jalan Bumi Tinggi–Pasar Sukadana–Muara Jaya; jalan kota Sukadana Mataram Marga–kantor pemda–Jalan Lintas Pantai Timur.
 - jaringan prasarana lalu lintas, yang meliputi pembangunan terminal Tipe B di Kecamatan Sukadana; pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Way Jepara, dan Kecamatan Sekampung Udik; pengembangan terminal tipe C Mataram Baru sesuai dengan kriteria yang berlaku; dan Rest area di Kecamatan Labuhan Ratu.
 - jaringan pelayanan lalu lintas, yang meliputi pengembangan trayek angkutan barang menghubungkan lintas pantai timur Sumatra- Jawa, mulai dari Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, dan Kecamatan Way Bungur; pengembangan trayek yang menghubungkan antara Sumatera Selatan–Lampung Timur–Bandar Lampung; pengembangan trayek Tulang Bawang–Lampung Timur, Lampung Selatan–Lampung Timur, Kota Metro–Lampung Timur, Lampung Tengah–Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung–Lampung Timur; dan pengembangan trayek Kecamatan Pekalongan–Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara–Kecamatan Sukadana.





- 2) Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian, yang meliputi pengembangan jalur Pringsewu-Rejosari-Tegineneng-Metro-Sukadana; dan pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Sukadana.
 - 3) Sistem Jaringan Transportasi Laut, yang meliputi pengembangan pelabuhan pengumpan berada di Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Way Penet dan Pelabuhan Way Sekampung; dan pengembangan pelayanan dari Pelabuhan Labuhan Maringgai-Pelabuhan Tanjung Priok.
 - 4) Sistem Jaringan Transportasi Udara, yang meliputi peningkatan bandar udara khusus Nusantara Tropical Fruit, dan penyusunan rencana induk bandar udara.
- c. Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya, yang meliputi:
- 1) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan, yang meliputi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selehah; jaringan pipa gas transmisi melalui Kecamatan Raman Utara-Batanghari Nuban-Sukadana-Labuhan Ratu- Braja Selehah-Labuhan Maringgai; jaringan pipa gas distribusi melalui Kecamatan Labuhan Maringgai-Mataram Baru-Bandar Sribhawono- Sekampung Udik-Kota Bandar Lampung; pengembangan Gardu Induk (GI) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono dengan besar tegangan 70-150 Kv (tujuh puluh hingga seratus lima puluh kilovolt); pengembangan Gardu Distribusi (GD) terdapat di Kecamatan Sukadana yang berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan menengah 70-150 KV tujuh puluh hingga seratus lima puluh kilo volt) menjadi tegangan rendah 380/220 V (tiga ratus delapan puluh per dua ratus dua puluh volt); pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari pembangkit menuju gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono melalui Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Bandar Sribhawono; pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Metro melalui Kecamatan Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Tiga, Sekampung, Batanghari; pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Kecamatan Sukadana melalui Kecamatan Sribhawono, Mataram Baru, Way Jepara, Sukadana; dan pengembangan jaringan tegangan rendah, merupakan jaringan distribusi dari GD ke konsumen.
 - 2) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, yang meliputi peningkatan jaringan telekomunikasi dengan sistem sambungan kabel di wilayah- wilayah yang belum terlayani; rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sistem nirkabel khususnya di kawasan perkotaan; dan penataan dan efisiensi penempatan Base Transceiver Station (BTS) meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.
 - 3) Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air, yang meliputi pengembangan pengelolaan Sungai Way Sekampung sebagai sumber air baku untuk air bersih; pengembangan sumber mata air di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Jabung, dan Danau Way Jepara; pengembangan sumber mata air dari Danau Beringin Indah di Kecamatan Sukadana; peningkatan pelayanan air minum pada kecamatan-

kecamatan yang sudah terlayani seperti Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Jabung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Purbolinggo; peningkatan kualitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Timur; peningkatan kuantitas air bersih melalui pembuatan bangunan penangkap air dan sumur bor di kawasan-kawasan perkotaan; pengembangan PDAM Way Guruh sebagai pengelola distribusi air minum; dan pembangunan embung pada kawasan rawan banjir seperti di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara.

4) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, yang meliputi:

- sistem persampahan, yang meliputi penyusunan rencana induk pengolahan persampahan; pengembangan optimalisasi TPA Regional
- di Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Melinting; pengembangan TPS eksisting yang ada di Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Sribhawono, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Braja Selehah dan Kecamatan Labuhan Ratu; dan pengembangan sarana pengangkutan sampah di Kabupaten Lampung Timur.
- sistem air minum, yang meliputi peningkatan kualitas air tanah untuk mengoptimalkan produksi air minum penduduk; pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Sukadana.; dan pengembangan distribusi air minum/air bersih melalui jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama.
- sistem pengelolaan air limbah, yang meliputi pengelolaan limbah rumah tangga secara terpadu di kawasan permukiman melalui sistem saluran tertutup; sosialisasi program pemanfaatan *septic tank* sebagai sarana pembuangan limbah rumah tangga; pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah tangga secara komunal di kawasan-kawasan tertentu; pembangunan IPLT pembuangan limbah industri di Kecamatan Sribhawono; dan pengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) terdapat di kawasan industri.
- sistem jaringan drainase, yang meliputi:
 - a) pengembangan jaringan drainase primer terdiri atas sungai dan anak sungai meliputi: Sungai Seputih, Sungai Wako, Sungai Kapuk, Sungai Kambas Jepara, Sungai Jepara, Sungai Nibung, dan Sungai Sekampung



- b) normalisasi dan pengerukan secara berkala pada jaringan- jaringan yang mengalami sedimentasi;
 - c) optimalisasi drainase dengan mengupayakan perlindungan daerah hulu;
 - d) pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada di Kabupaten Lampung Timur;
 - e) pembangunan prasarana drainase pada kecamatan yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa dan perkantoran, pusat permukiman kota, pusat pendidikan dan pusat pengembangan permukiman desa; dan
 - f) pembangunan prasarana drainase di kawasan yang rawan terjadi banjir seperti di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara.
- jalur dan ruang evakuasi bencana, yang meliputi:
- a) pengembangan jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan utama yang diberi rambu untuk arah evakuasi;
 - b) pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Bandar Sribowono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara;
 - c) pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan longsor Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pasir Sakti;
 - d) pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan abrasi Kecamatan Labuhan Maringgai;
 - e) pembangunan rambu-rambu/petunjuk arah evakuasi pada jalur evakuasi bencana; dan pengembangan sistem peringatan dini ketika terjadi bencana.

2.1.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana diidentifikasi berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki potensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang di sebabkan oleh alam di antaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut di atas harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah hendaknya tidak menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan-kawasan yang



terdeliniasi sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan tergantung pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut.

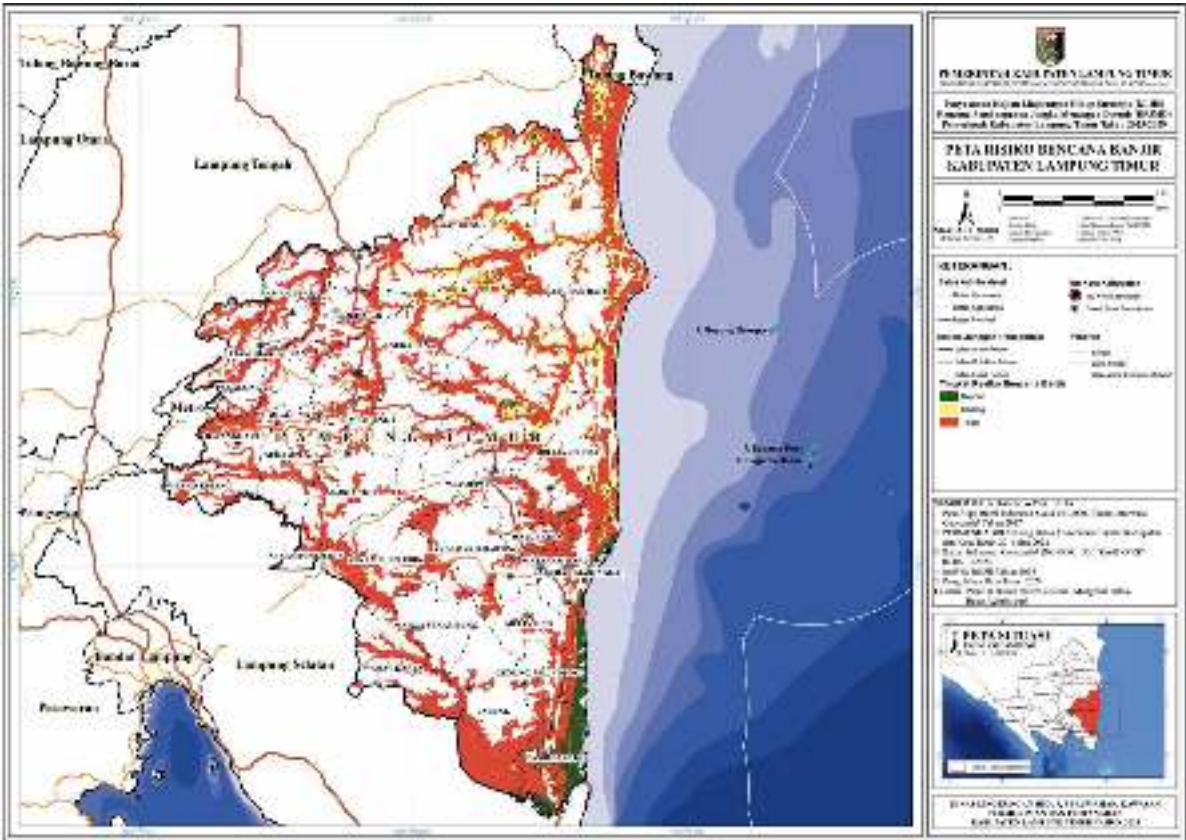
Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pada tahun 2023, IKD Kabupaten Lampung Timur mencapai 0,26, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 0,22. Capaian ini menunjukkan tingkat kapasitas daerah pada kategori "Rendah". Capaian IKD Kabupaten Lampung Timur masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung yang sebesar 0,48.

Tabel 2.9
Luas Risiko Bencana Kabupaten Lampung Timur (Ha)

No.	Bencana	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Banjir	8.310,80	13.852,40	126.577,17
2	Tanah Longsor	202,35	-	-
3	Gempa Bumi	295.033,01	34.266,89	58.757,05
4	Kekeringan	7.330,06	28,23	380.640,61
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	102.214,46	31,60	197.756,87

Sumber: InaRISK BNPB, 2024

Gambar 2.8
Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Lampung Timur

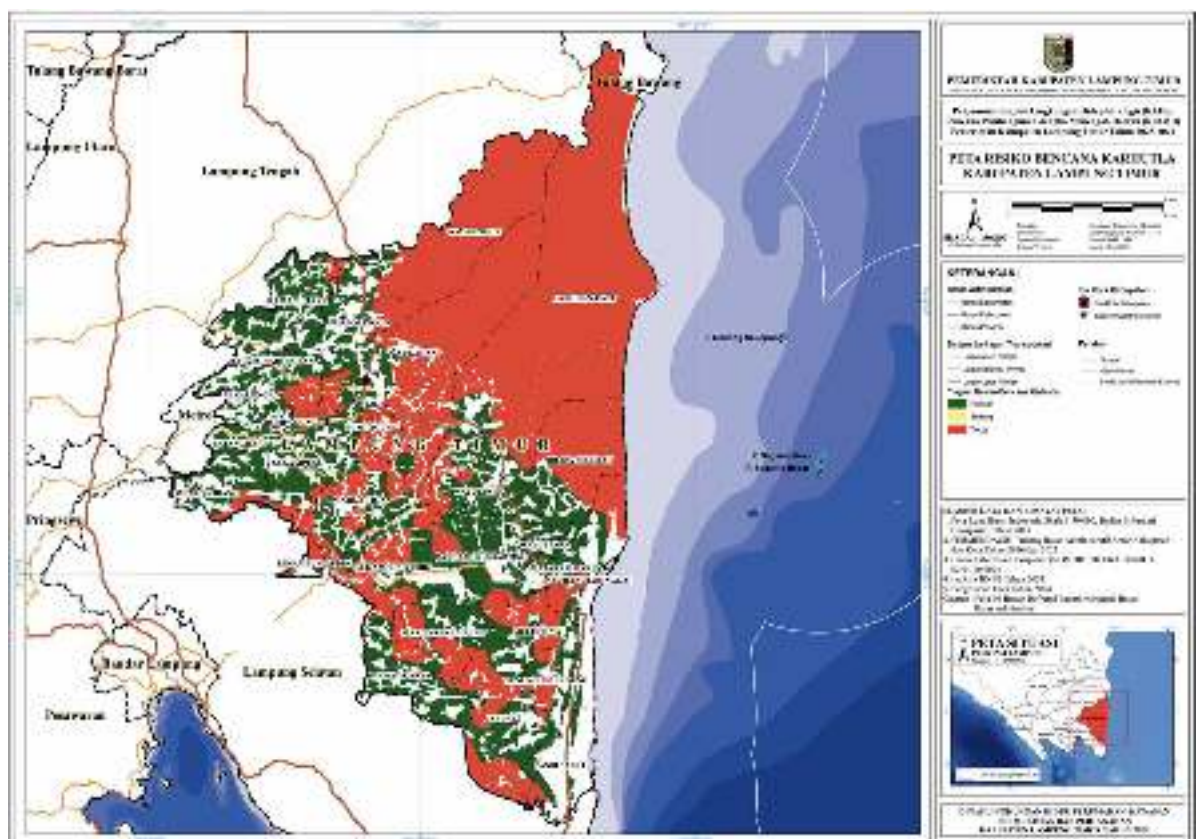


Sumber: InaRISK BNPB, 2024

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI, 2023), Lampung Timur berada di posisi 30 daerah yang berisiko untuk multi bahaya dengan skor sebesar 166,4 atau berkategori tinggi. Indeks risiko bencana banjir berkategori tinggi dengan skor 36, kawasan rawan banjir dan genangan pada wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat di Kecamatan Way Bungur, Purbolinggo, Raman Utara, Sukadana, Bumi Agung, Sekampung, Batanghari, Margatiga, Labuhan Ratu, Way Jepara, Braja Slebah, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Gunung Pelindung, Pasir Sakti, Jabung, Waway Karya, Marga Sekampung, dan Sekampung Udik.

Indeks risiko bencana kebakaran hutan dan lahan berkategori tinggi dengan skor 24, kawasan rawan kebakaran hutan terdapat di Taman Nasional Way Kambas.

Gambar 2.9
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Timur

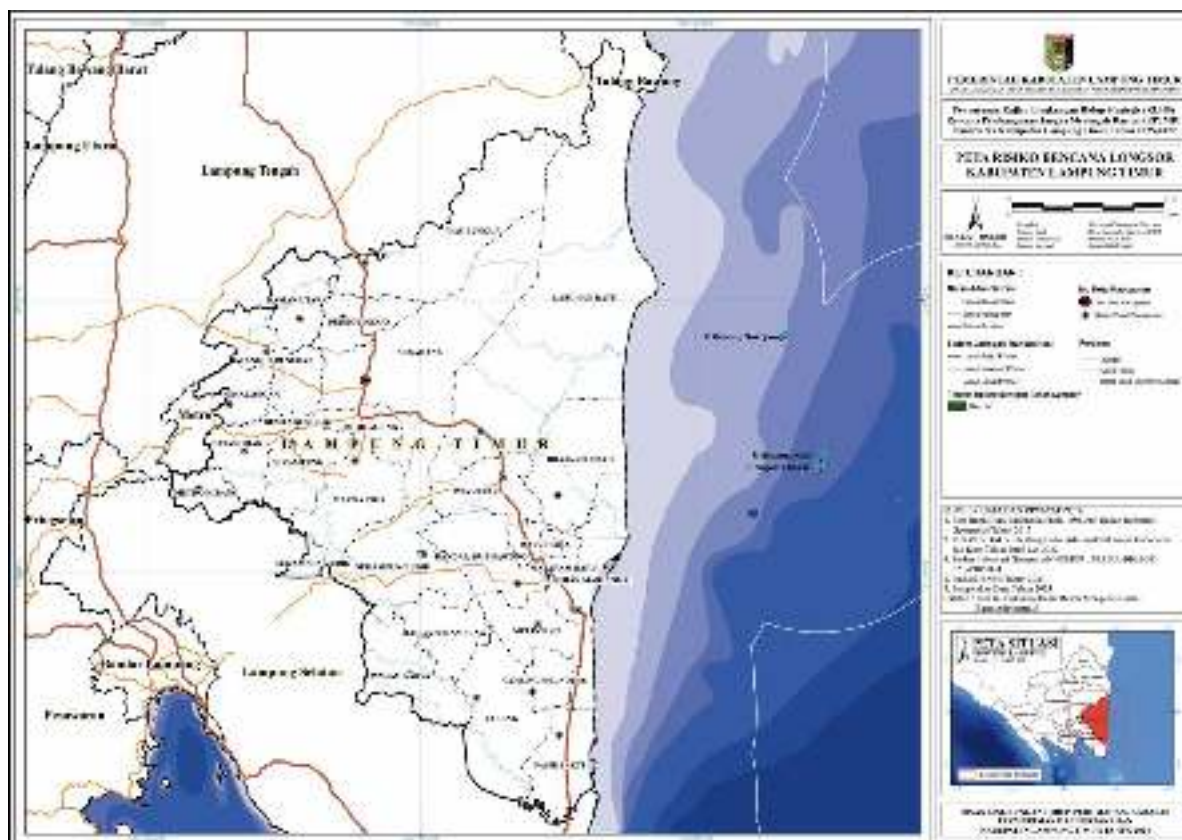


Sumber: InaRISK BNPB, 2024



Indeks risiko bencana tanah longsor berkategori tinggi dengan skor 24, kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Jabung, Marga Sekampung, dan Sekampung Udik.

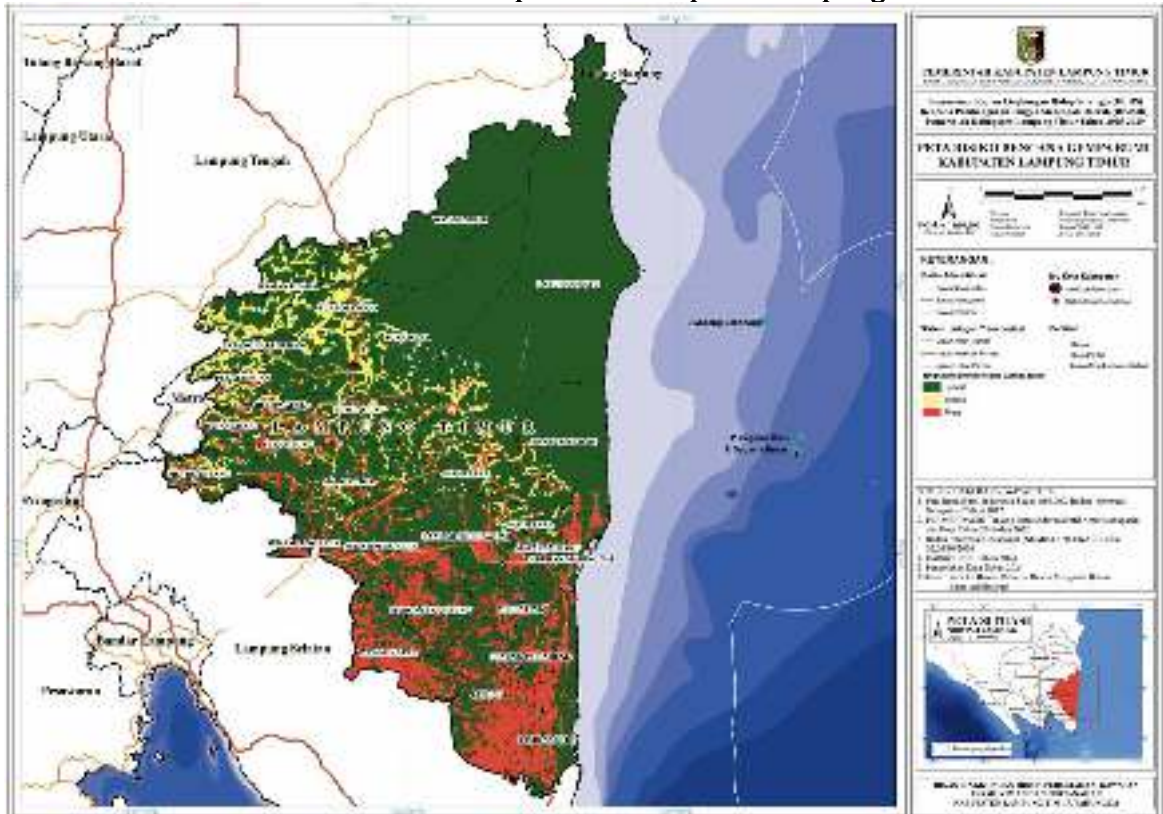
Gambar 2.10
Peta Risiko Bencana Longsor Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2023

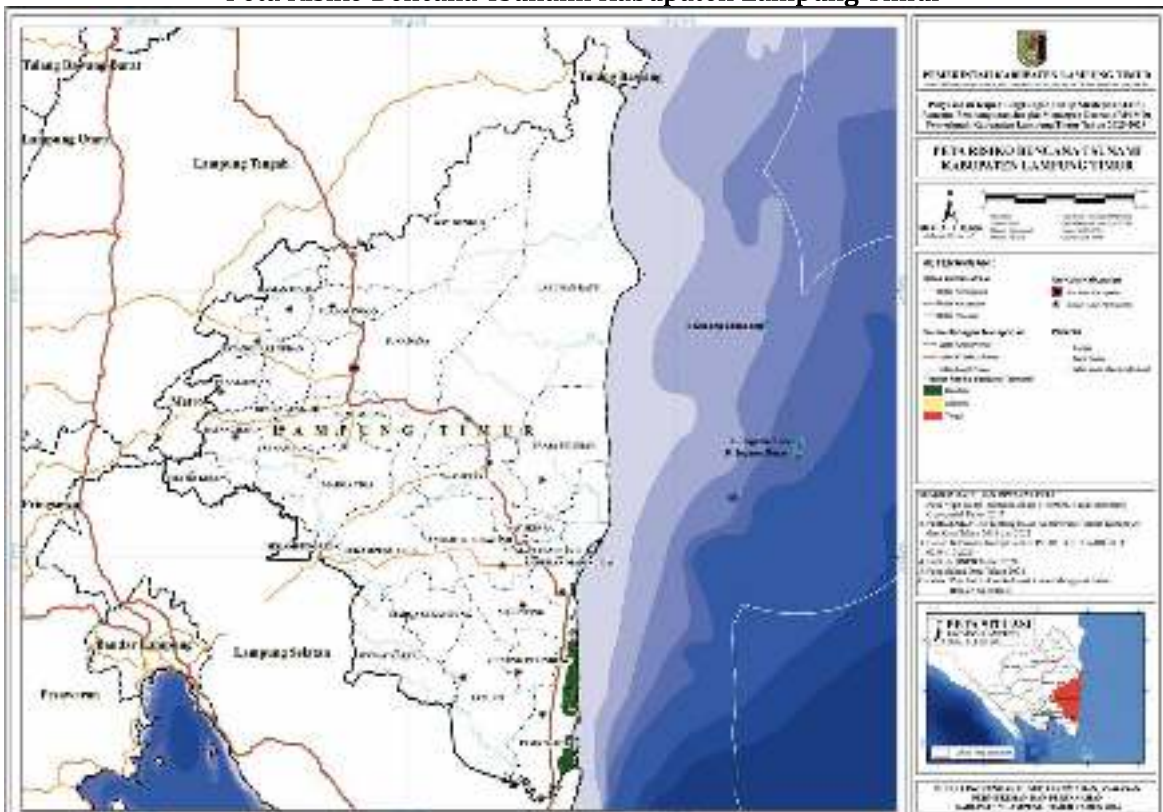
Indeks risiko bencana gempa bumi berkategori tinggi dengan skor 21,6, indeks risiko bencana tsunami berkategori tinggi dengan skor 16, indeks risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi berkategori tinggi dengan skor 24, indeks risiko bencana kekeringan berkategori tinggi dengan skor 24, dan indeks risiko bencana cuaca ekstrim berkategori tinggi dengan skor 13,6.

Gambar 2.11
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2024

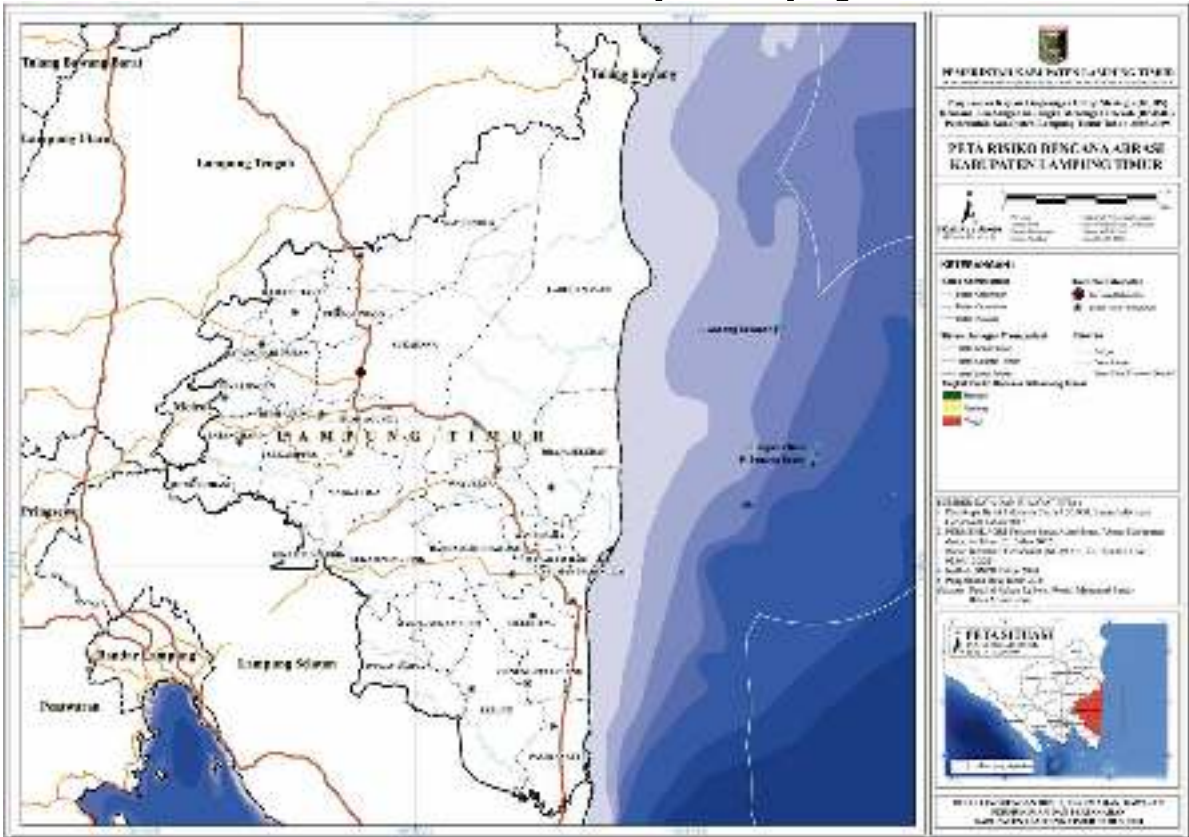
Gambar 2.12
Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2024

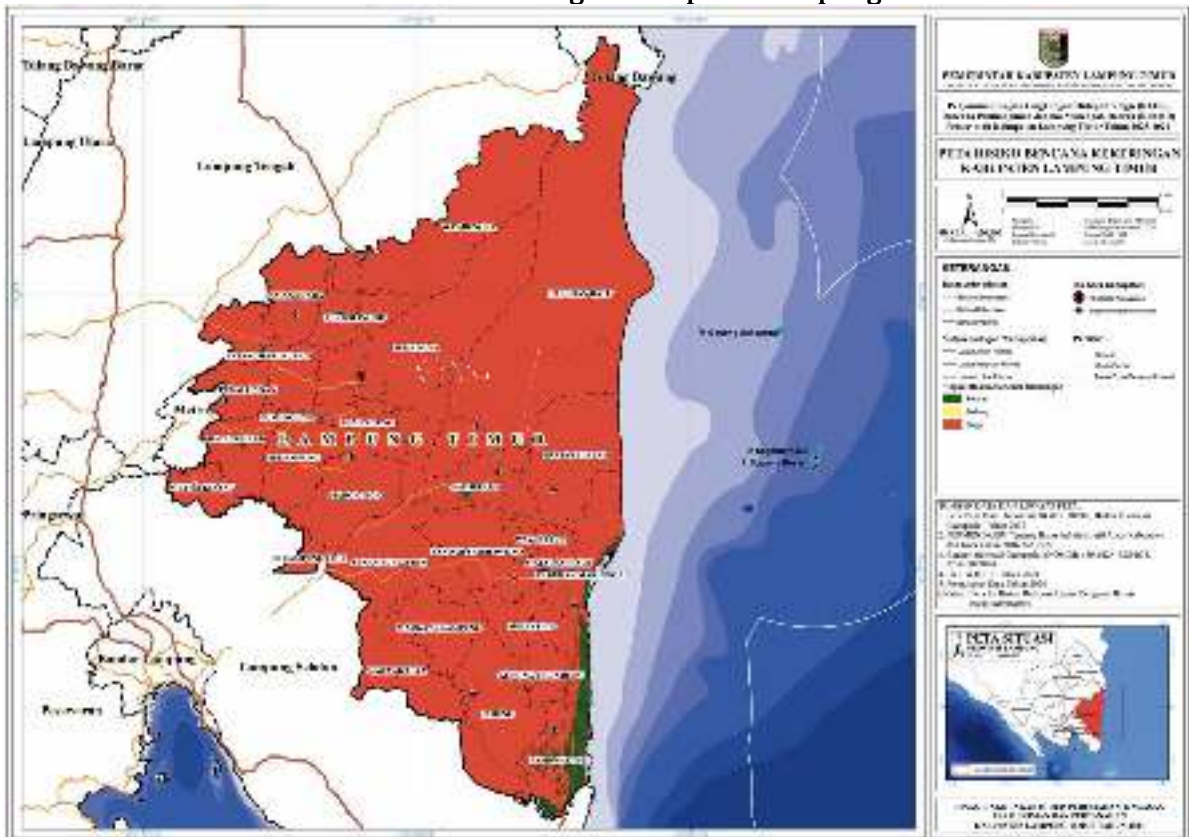


Gambar 2.13
Peta Risiko Bencana Abrasi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Gambar 2.14
Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2023



2.1.1.1.9 Kawasan Lindung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung di Kabupaten Lampung Timur meliputi:

Tabel 2.10
Luas Kawasan Lindung

No	Peruntukan	Luasan ($\pm$ Ha)	Lokasi
1	Kawasan Lindung		
a	Hutan Lindung		
	Hutan Lindung Gunung Balak Register 38	22.292,50	Kec. Way Jepara, Jabung, Bandar Sribhawono dan Sekampung Udik
	Hutan Lindung Muara Sekampung Register 15	1.488,36	Kec. Marga Sekampung, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, dan Melinting
b	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya		
	- Kawasan Bergambut	11.068,00	Kec. Braja Selebah, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Way Bungur, Way Jepara
	- Kawasan Resapan Air	39.144,00	Kec. Bandar Sribhawono, Jabung, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Melinting, Pasir Sakti, Sekampung Udik, dan Way Jepara
c	Kawasan Perlindungan Setempat		
	- Kawasan Sempadan Pantai	5.588,00	Kec. Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti
	- Kawasan Sempadan Sungai	11.087,00	di seluruh DAS, meliputi Kec. Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selebah, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Marga Tiga, Metro Kibang, Pasir Sakti, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Bungur, Way Jepara
	- Kawasan Sekitar Danau/Waduk	358,00	Sekitar Danau Way Jepara dan Danau Beringin Indah



No	Peruntukan	Luasan ($\pm$ Ha)	Lokasi
	- Kawasan Sekitar Mata Air	3.413,00	Sekitar sumber-sumber mata air di Kec. Bandar Sribhawono, Jabung, dan Danau Way Jepara
	- RTH di Kawasan Perkotaan		
	✓ RTH Publik berupa taman kota, tempat pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan dan pantai	45.149,00	
	✓ RTH Privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta	18.060,00	
d	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya		
	- Suaka Margasatwa		Kawasan perlindungan penyu di TNWK dan Pulau Segama
	- Kawasan Pantai Berhutan Bakau	3.203,00	Kec. Labuhan Maringgai
	- Kawasan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut	125.621,30	TNWK
	- Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		Taman Wisata Swadaya Pekalongan, Danau Jepara, Danau Beringin Indah Sukadana, Danau Kemuning Sribhawono, Way Curup Mataram Baru, Pantai
	- Kawasan Budaya dan Ilmu Pengetahuan		Taman Purbakala Pugung Raharjo, Museum Budaya Sukadana, Bangunan Adat Sesat Agung Sukadana, Desa Tradisional Wana Melinting, Rumah Tradisional Gedong Wani Marga Tiga, Rumah Tradisional Keratuan Pugung
	- Kawasan Rawan Bencana Alam	15.985,00	
	✓ Kawasan Rawan Tanah Longsor	7.333,00	Kec. Sekampung Udik, Marga Sekampung, Waway Karya, Jabung, dan Pasir Sakti
	✓ Kawasan Rawan Abrasi	1.949,00	Kec. Labuhan Maringgai
	✓ Kawasan Rawan Banjir	15.983,00	Kec. Bandar Sribhawono, Braja Selebah, Sekampung, Mataram Baru, Melinting, Sekampung Udik, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Raman Utara
	✓ Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	123.621,00	TNWK



No	Peruntukan	Luasan (±Ha)	Lokasi
	✓ Kawasan Rawan Angin Puting Beliung		Kec. Sukadana, Pasir Sakti, Pekalongan, Sekampung, dan Purbolinggo
	✓ Kawasan Rawan Gelombang Tinggi	7.879,00	Kec. Labuhan Maringgai, Pulau Segama Besar, Pulau Segama Kecil, Pulau Gosong Sekopong, Pulau Batang Besar, dan Pulau Batang Kecil

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

2.1.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.122.605 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 0,0077 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur sebesar 104 persen, yang menunjukkan bahwa terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Tabel 2.11
Data Kependudukan Kabupaten Lampung Timur

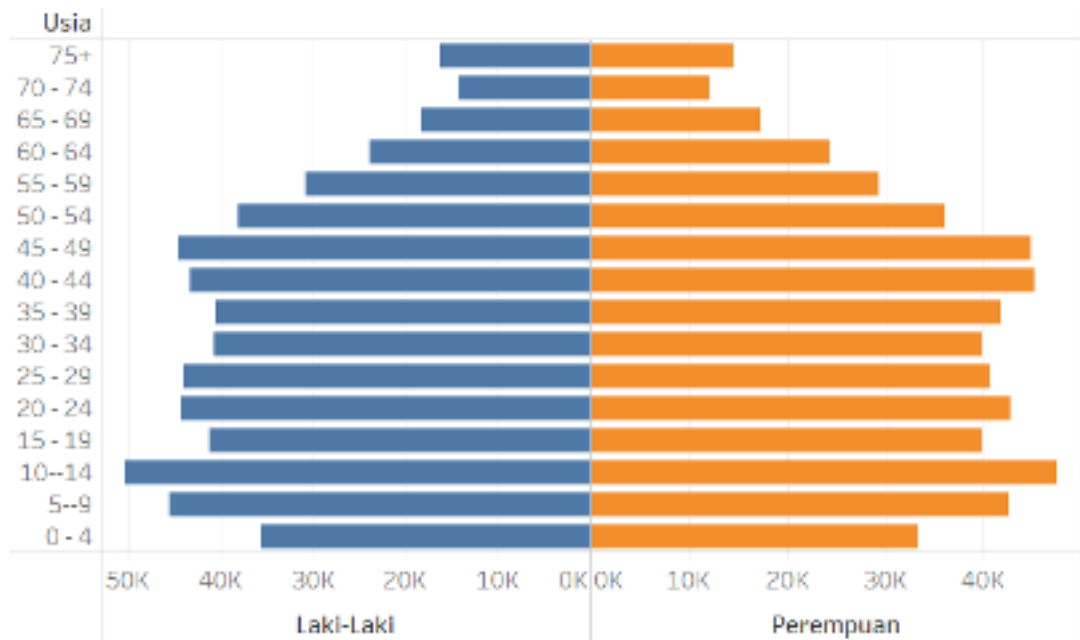
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	1.051.994	1.118.115	1.127.946	1.114.016	1.122.605
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,73	0,93	0,9	0,01	0,0077
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	287,3	289,32	291,65	209,2	209,2
Rasio Jenis Kelamin (L/P)	104,26	104	103,62	104	104
Rasio Ketergantungan	45,81	46,00	46,22	44,54	44,81

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, 2025

Komposisi penduduk tahun 2024 menunjukkan mayoritas penduduk Lampung Timur didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu 69,05 persen atau lebih dari 775 ribu jiwa, kemudian kelompok usia anak sebesar 22,70 persen atau sebanyak 254 ribu jiwa dan kelompok usia lanjut 8,25 persen atau sebanyak 92 ribu jiwa.



Grafik 2.1
Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Timur menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024



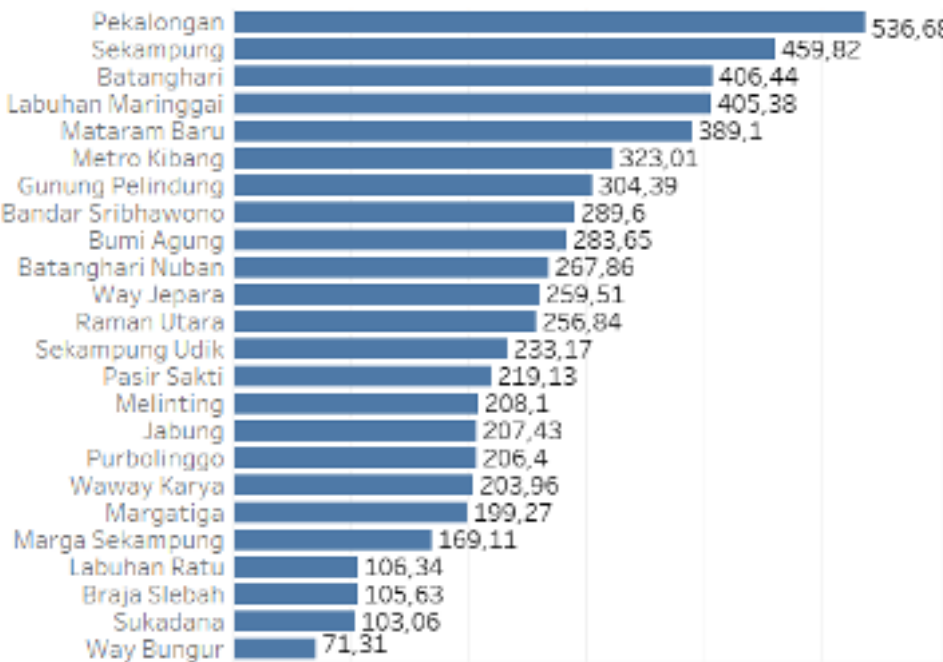
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Besarnya kelompok usia produktif, memiliki efek yang signifikan dalam konteks ekonomi dan masyarakat. Kelompok usia produktif yang besar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Mereka mewakili angkatan kerja yang aktif dan produktif, yang dapat meningkatkan produksi, investasi, dan konsumsi. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi, kelompok usia produktif dapat menyediakan tenaga kerja yang memadai untuk industri dan sektor ekonomi yang berbeda. Ini dapat berdampak positif pada peningkatan produktivitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Persebaran penduduk berpengaruh signifikan terhadap berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Timur mencapai 209,2 jiwa/km², yang berarti setiap kilometer persegi dihuni sekitar 293 orang. Kecamatan Pekalongan, dengan luas wilayah 63,10 km², merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 53.738 jiwa atau sekitar 536,68 jiwa/km². Sebaliknya, Kecamatan Way Bungur, yang memiliki luas wilayah 304,59 km², menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu 71,31 jiwa/km².



Grafik 2.2
Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

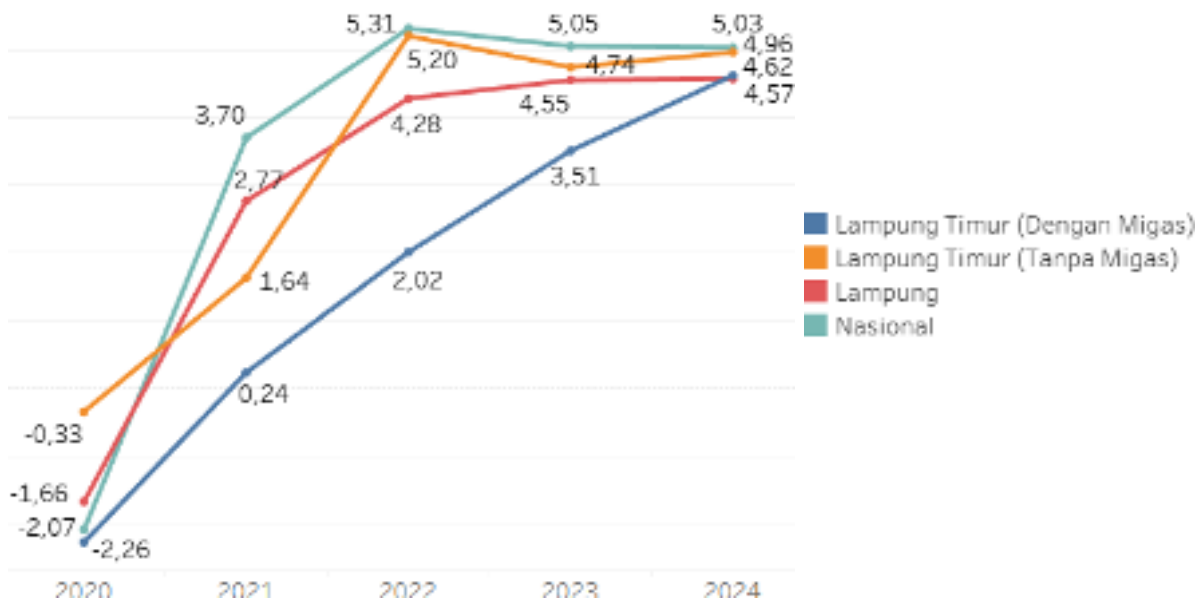
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi yang tercermin dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu tertentu. PDRB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah atau dapat diartikan sebagai akumulasi nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut.

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan pertumbuhan yang meningkat. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 2,26 persen akibat dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan secara luas. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan angka positif, menandakan pemulihan dan peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian, seperti peningkatan investasi, peningkatan produksi dan nilai tambah produk lokal, serta pembangunan infrastruktur yang memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.





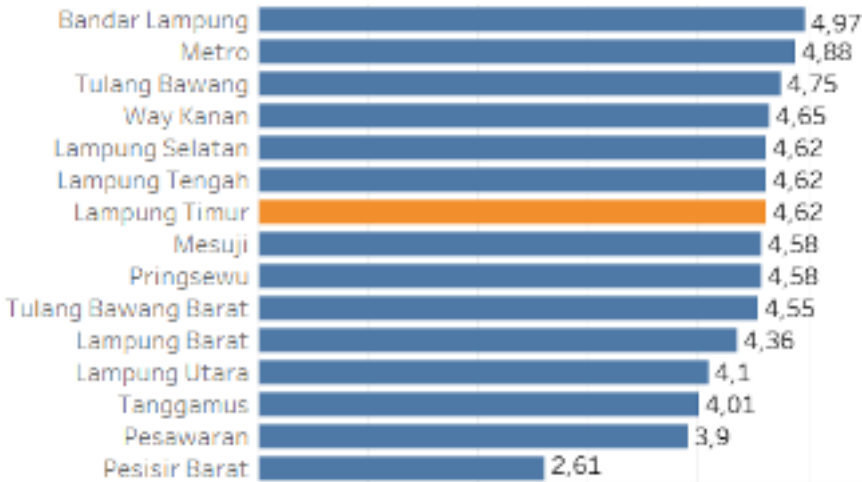
Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 tertinggi ke-7 di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung yaitu sebesar 4,62 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kota Bandar Lampung yang mencapai 4,97 persen di tahun 2024.

Grafik 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

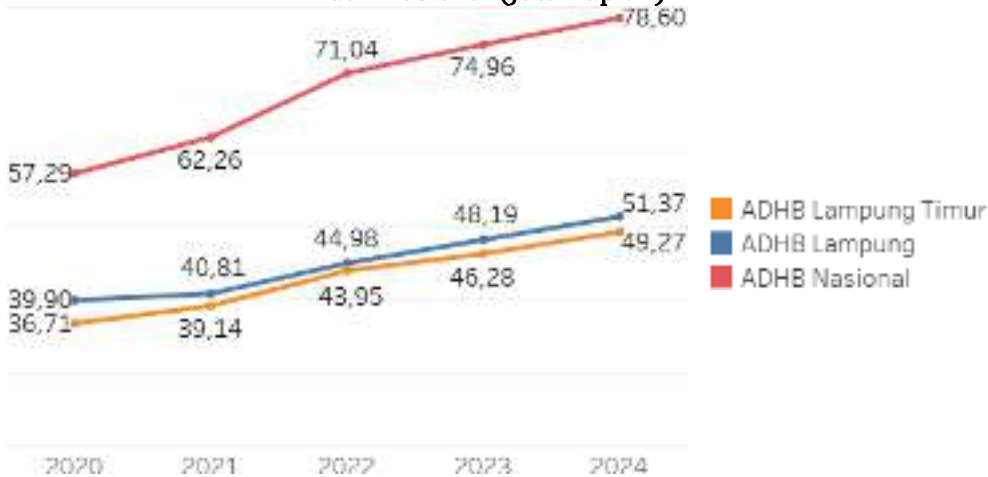
2.1.2.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.





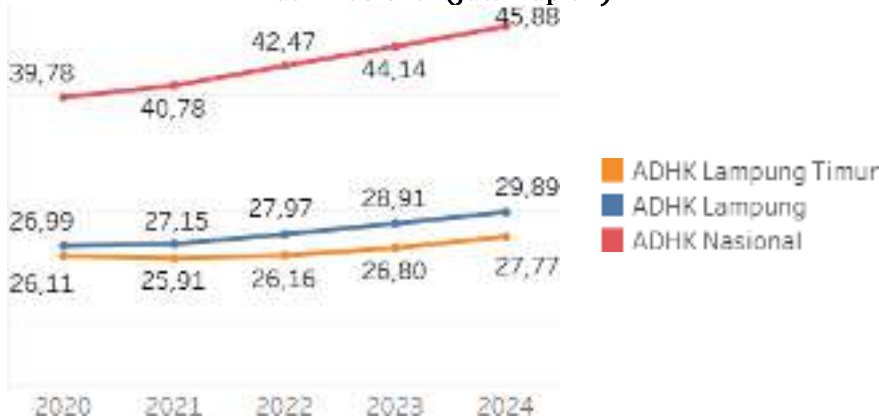
Grafik 2.5
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah)



Sumber: BPS, 2025

Pada tahun 2020 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Lampung Timur, sebelum kembali meningkat pada tahun 2021-2024. PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga mengalami penurunan pada tahun 2020-2021, sebelum kembali meningkat pada tahun 2022-2024.

Grafik 2.6
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah)



Sumber: BPS, 2025

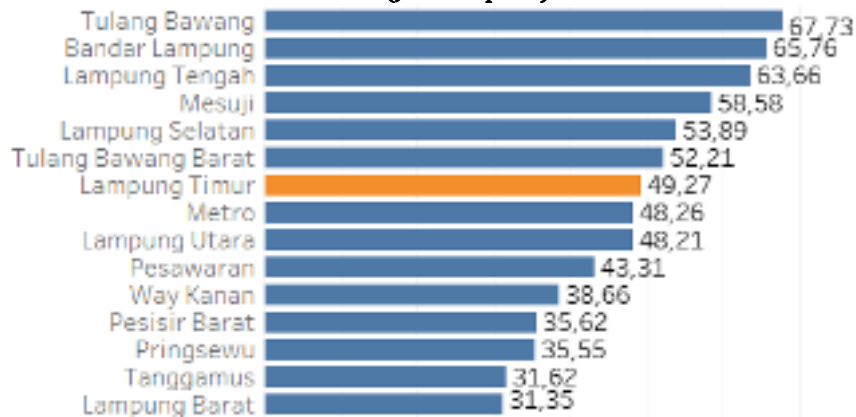
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-7, sedangkan PDRB per kapita ADHK berada pada posisi ke-9.





Grafik 2.7

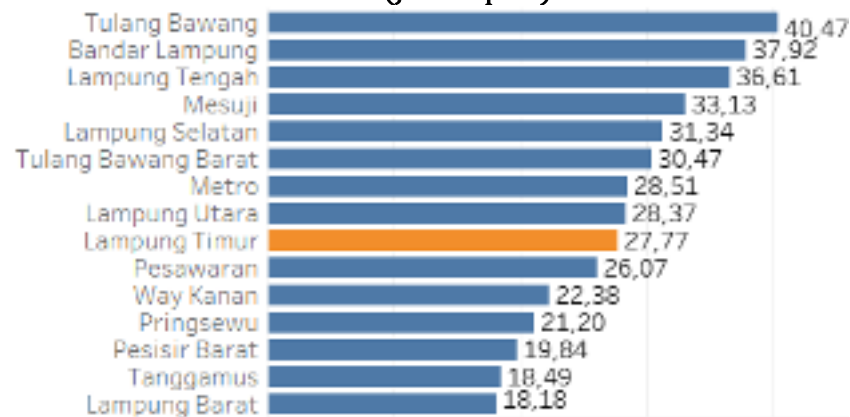
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik 2.8

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan rata-rata harga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Inflasi terjadi jika Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami peningkatan, sedangkan penurunan IHK disebut deflasi. Secara teori, inflasi berkaitan erat dengan interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun, dalam praktiknya, inflasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti sistem distribusi, kelancaran arus barang dan jasa, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai salah satu indikator utama dalam pengendalian ekonomi makro, inflasi memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek perekonomian, sehingga pengelolaannya menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

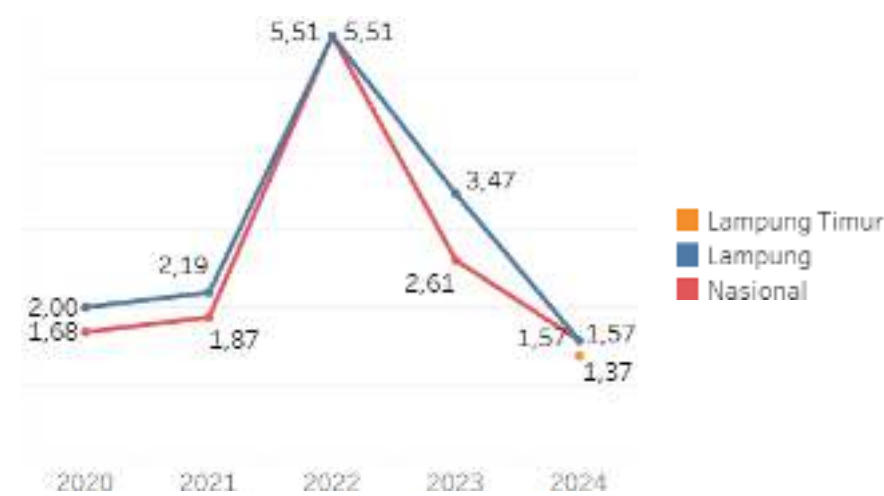
Sampai dengan tahun 2018, data inflasi Kabupaten Lampung Timur tersedia, akan tetapi mulai tahun 2019 sampai 2023, inflasi di Provinsi Lampung hanya tersedia data inflasi gabungan antara Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sebagai acuan inflasi Kabupaten/Kota. Namun mulai tahun 2024, terdapat penambahan 2 (dua) kabupaten sebagai wilayah perhitungan inflasi di Provinsi Lampung yaitu Lampung Timur dan Mesuji. Pada





tahun 2024, laju inflasi Kabupaten Lampung Timur mencapai 1,37 persen, di bawah capaian Provinsi Lampung dan Nasional yang sebesar 1,57 persen.

Grafik 2.9
Laju Inflasi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2025

2.1.2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan di Lampung Timur pada periode 2020 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Lampung Timur meningkat mencapai 15,08 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2020 yang sebesar 14,62 persen. Tingkat kemiskinan Lampung Timur selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung.

Peningkatan kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur pada 2021 diduga terjadi karena pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada tatanan kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor perekonomian. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian dan secara langsung berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat maupun kondisi kemiskinan.



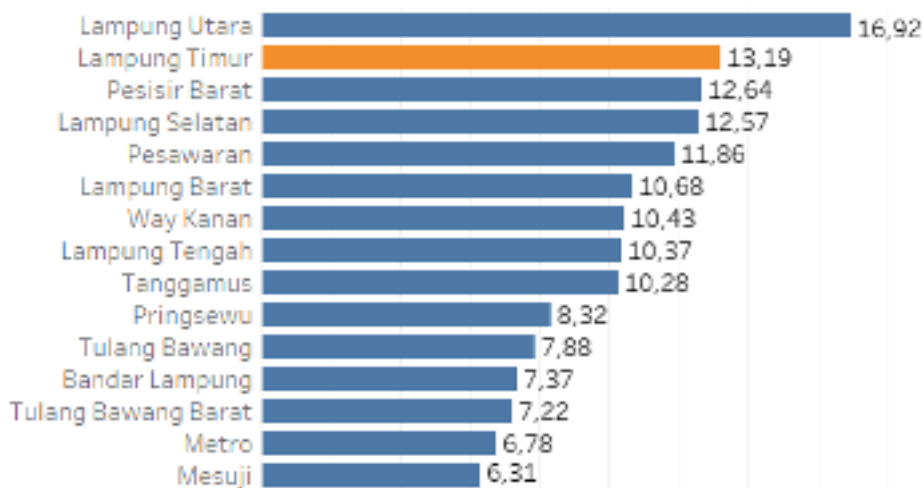
Grafik 2.10
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Seiring dengan kecenderungan penurunan Pandemi COVID-19 yang disertai dengan peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi, persentase kemiskinan di Provinsi Lampung menurun hingga mencapai 10,69 persen pada tahun 2024, demikian pula kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur yang mengalami penurunan hingga mencapai 13,19 persen. Akan tetapi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, kemiskinan Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi terbesar kedua setelah Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 2.11
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024

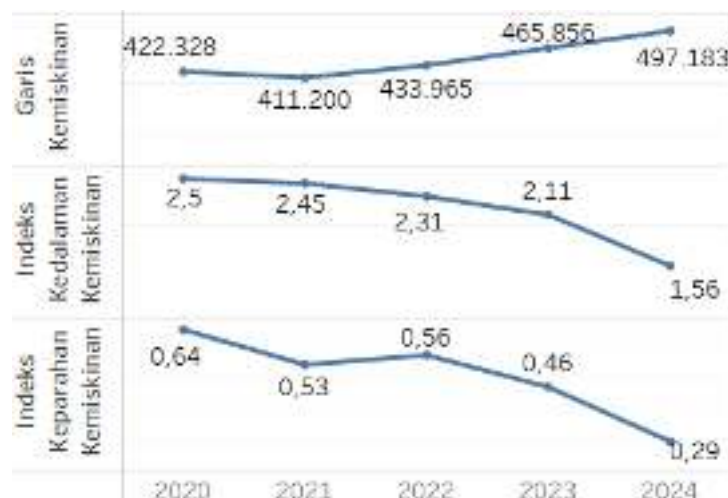


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Bila ditinjau dari Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan, terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Grafik 2.12
Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Lampung Timur



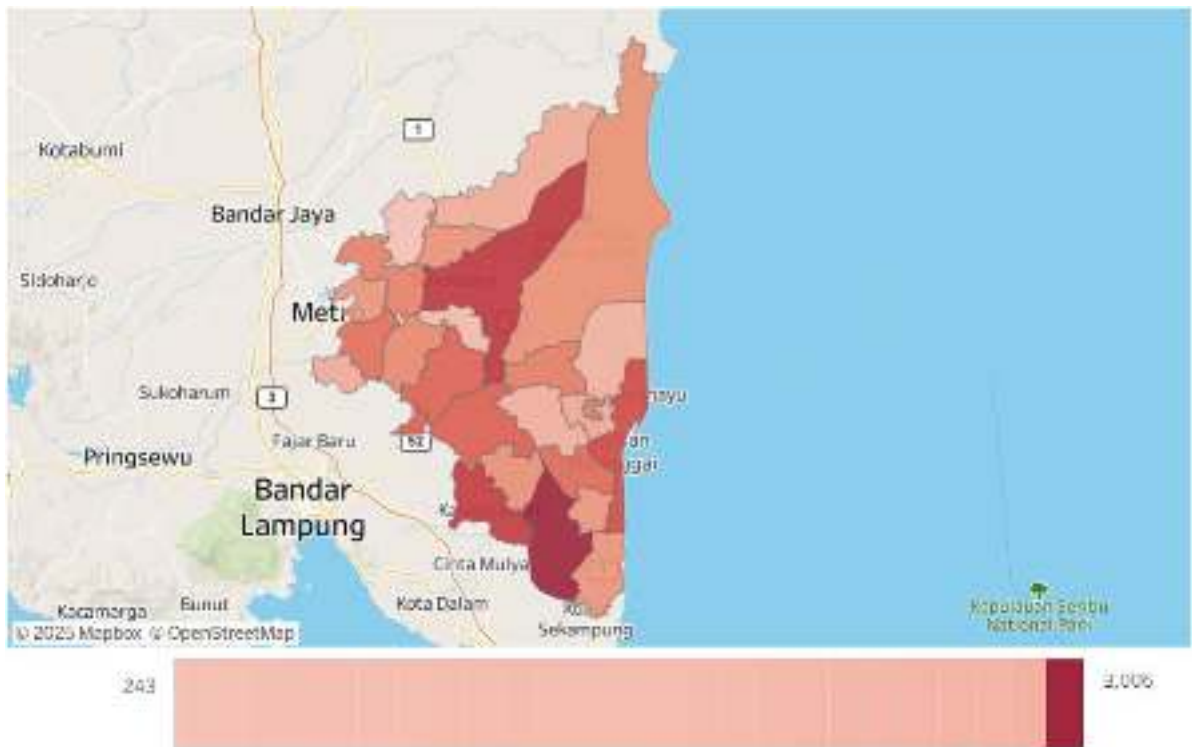
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2023, indeks P1 tercatat sebesar 2,11 turun menjadi 1,56 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin dekat dari garis kemiskinan. Dengan semakin berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya.

Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan penurunan, pada tahun 2023, indeks P2 di Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 0,46, turun menjadi 0,29 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara penduduk miskin semakin berkurang.

Terkait dengan data kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2024 jumlah keluarga miskin ekstrim mencapai 30.376 KK atau ekuivalen dengan 126.404 jiwa. Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Sekampung Udik merupakan kantong wilayah kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Timur, sedangkan Kecamatan dengan jumlah keluarga miskin ekstrim terendah adalah Kecamatan Bumi Agung.

Gambar 2.15
Sebaran Keluarga Miskin Ekstrim per Kecamatan 2024

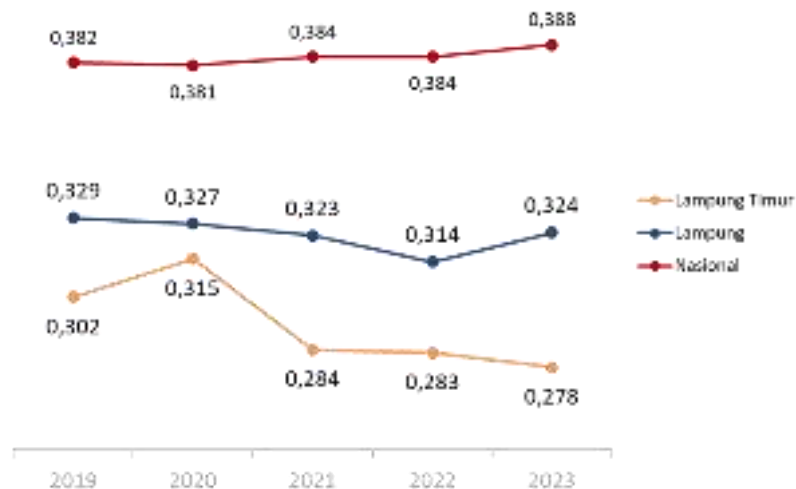


Sumber: Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2025

2.1.2.1.5 Ketimpangan Pendapatan

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui indeks gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai indeks gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang). Dalam konteks pembangunan daerah, Rasio Gini menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang merata apabila tidak diikuti oleh distribusi pendapatan yang seimbang. Oleh karena itu, penurunan ketimpangan pendapatan menjadi salah satu prioritas dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Pada tahun 2023, nilai Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur mencapai 0,315, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,283.

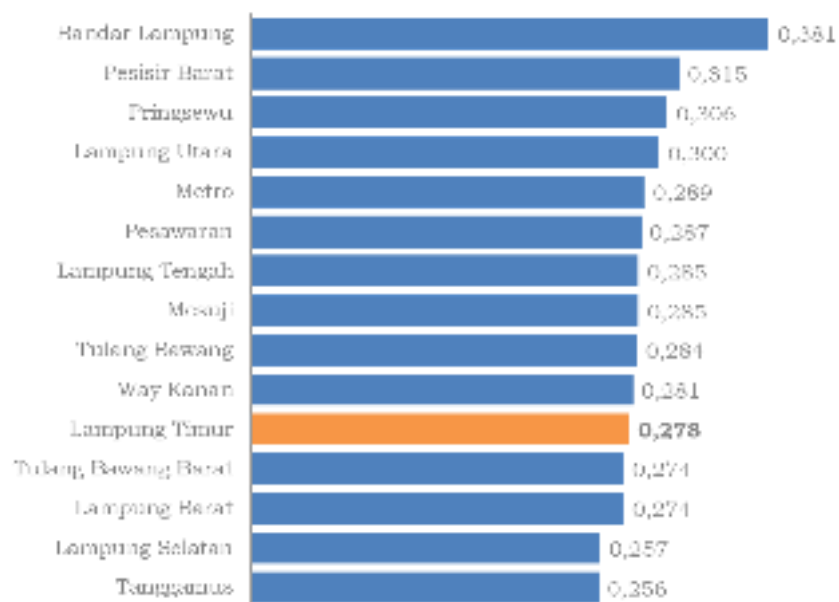
Grafik 2.13
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2024

Jika dibandingkan dengan capaian indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi kelima dengan indeks gini terendah di Provinsi Lampung.

Grafik 2.14
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023

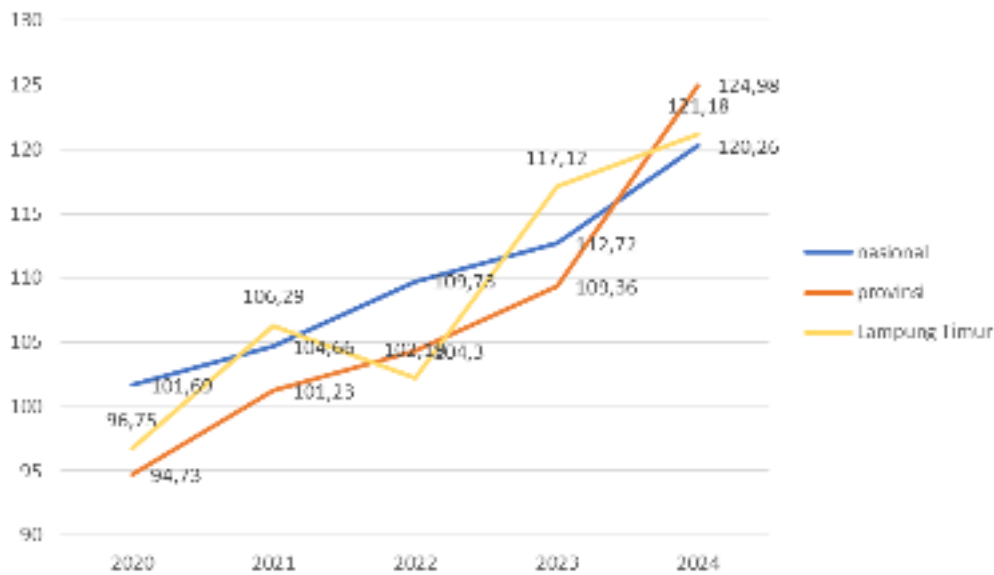


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.1.2.1.6 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) mengacu pada perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Peningkatan nilai tukar petani bisa menjadi indikasi kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.

Grafik 2.15
Nilai Tukar Petani Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

NTP Kabupaten Lampung Timur pada September 2024 mencapai 121,18, meningkat dibandingkan capaian Desember 2023 yang sebesar 117,12. Capaian ini masih berada di bawah capaian Provinsi yang sebesar 124,98, namun sudah melampaui capaian Nasional yang sebesar 120,26. Subsektor dengan NTP tertinggi pada April 2024 yaitu perkebunan rakyat dan hortikultura dengan NTP masing-masing mencapai 146,85 dan 123,02.

Grafik 2.16
Nilai Tukar Petani (NTP) per Subsektor Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

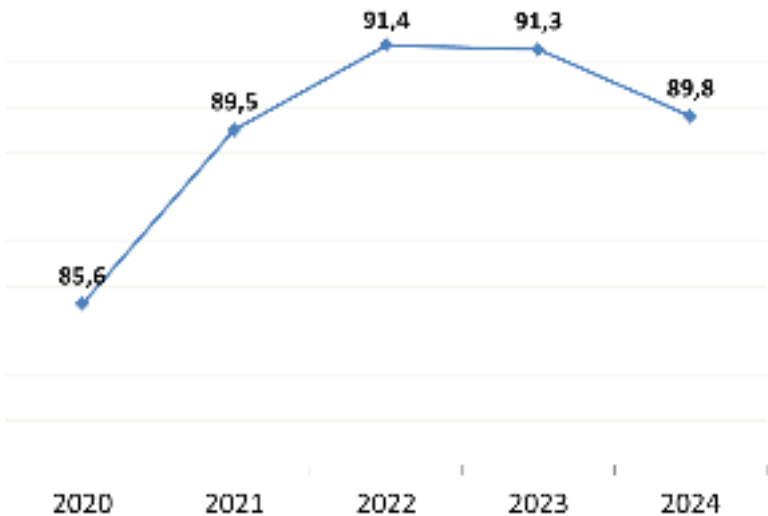


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

2.1.2.1.7 Pola Pangan Harapan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin menuntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Grafik 2.17
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur



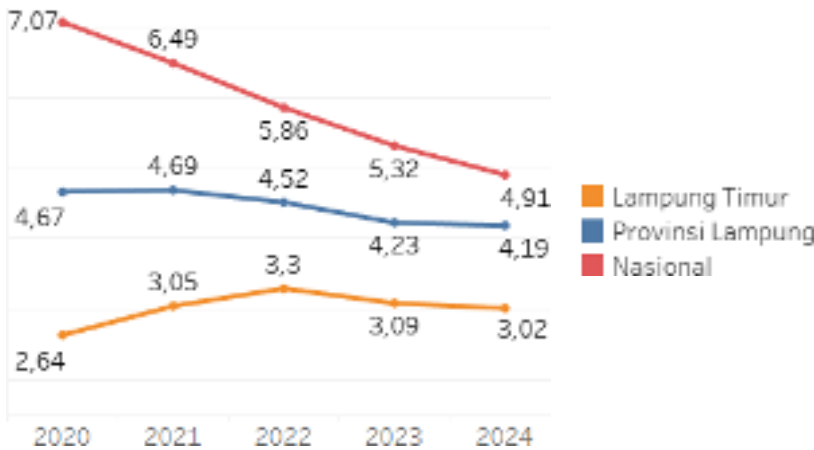
Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2025

Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur di atas menunjukkan tingkat ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang relatif tinggi yang menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki akses yang baik terhadap makanan yang cukup dan beragam, serta dapat memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka. Pada tahun 2024 skor pangan Kabupaten Lampung Timur sebesar 89,8, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan dari 91,3 pada tahun 2023.

2.1.2.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

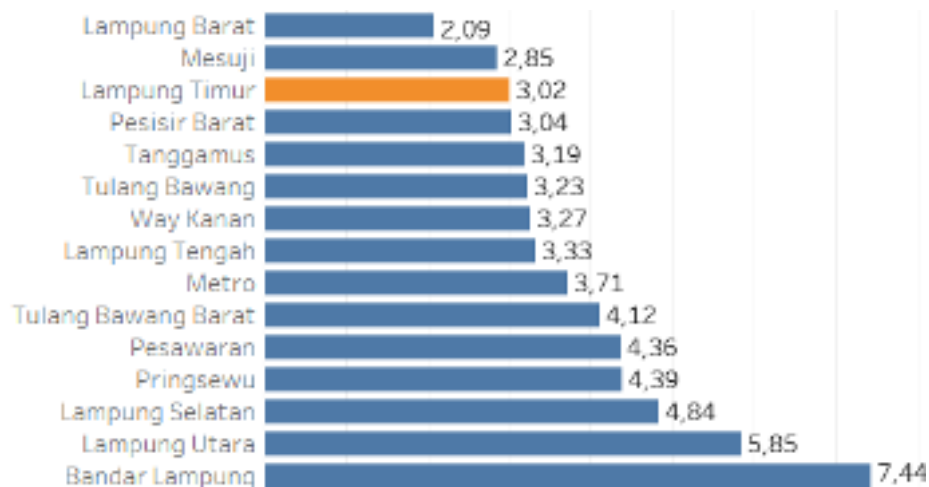
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Timur pada periode 2020-2024 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2022, TPT Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2023 dan 2024, TPT Kabupaten Lampung Timur kembali mengalami penurunan hingga mencapai 3,02 persen di tahun 2024, di bawah TPT Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-3 dengan TPT terendah.

Grafik 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Grafik 2.19
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

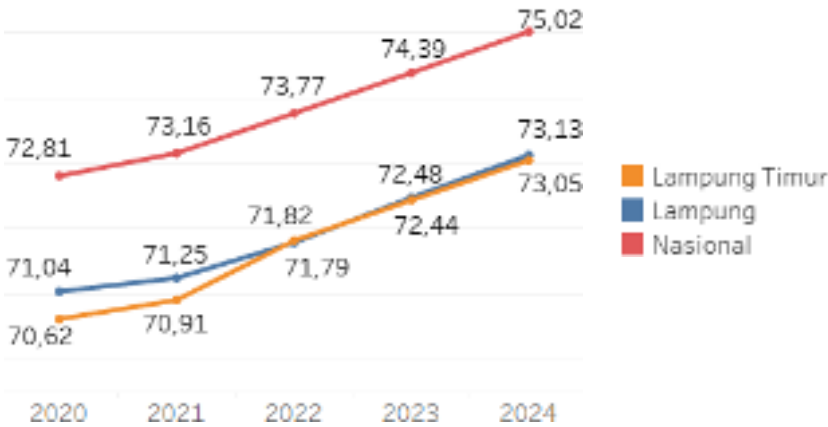
2.1.2.1.9 Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Lampung Timur dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. IPM Kabupaten Lampung Timur pada periode 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Lampung Timur mencapai 73,05.

Bila ditinjau dari pencapaian IPM kabupaten kota se-Provinsi Lampung, pencapaian IPM sebagian besar kabupaten/kota sudah berada pada status “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-5 dengan IPM tertinggi di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.



Grafik 2.20
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2025

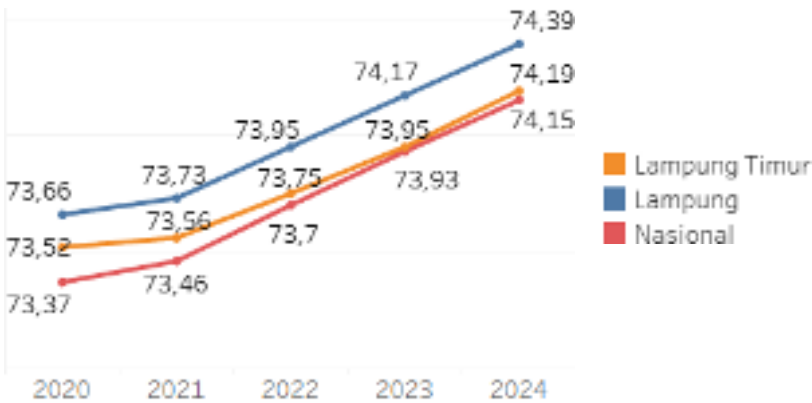
Grafik 2.21
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Perkembangan AHH Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2024, AHH Kabupaten Lampung Timur mencapai 74,19 tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, serta menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Lampung Timur.

Grafik 2.22
Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



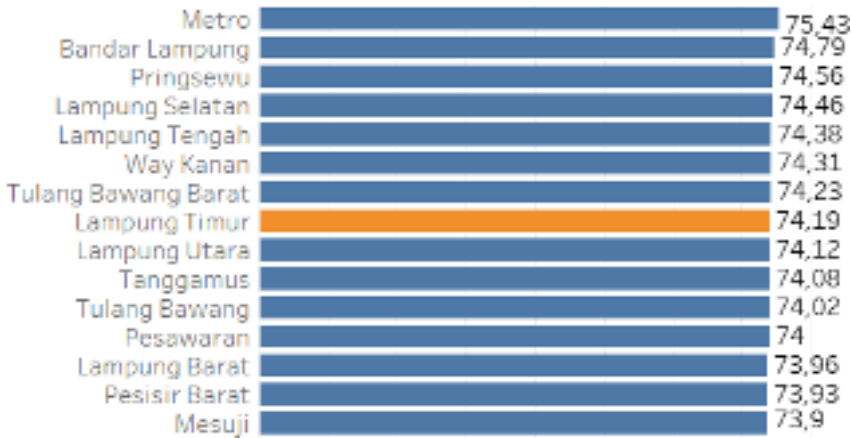
Sumber: BPS, 2025





Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-8 dengan AHH tertinggi di Provinsi Lampung.

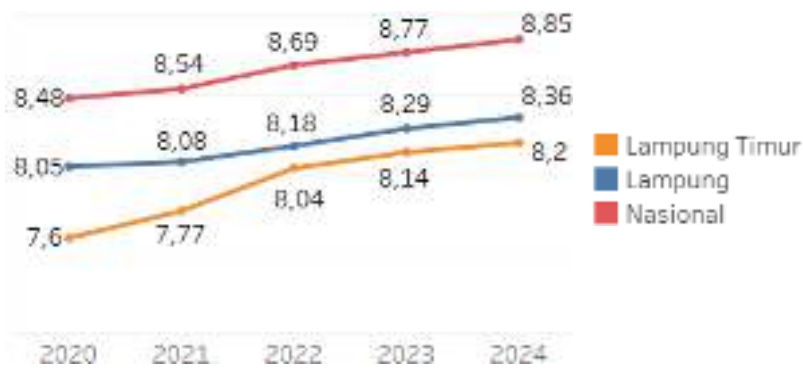
Grafik 2.23
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS, 2025

Perkembangan RLS Kabupaten Lampung Timur pada periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan, artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. RLS Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 8,2 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Timur usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas 8 (SMP kelas II) sampai kelas 9 (SMP kelas III).

Grafik 2.24
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



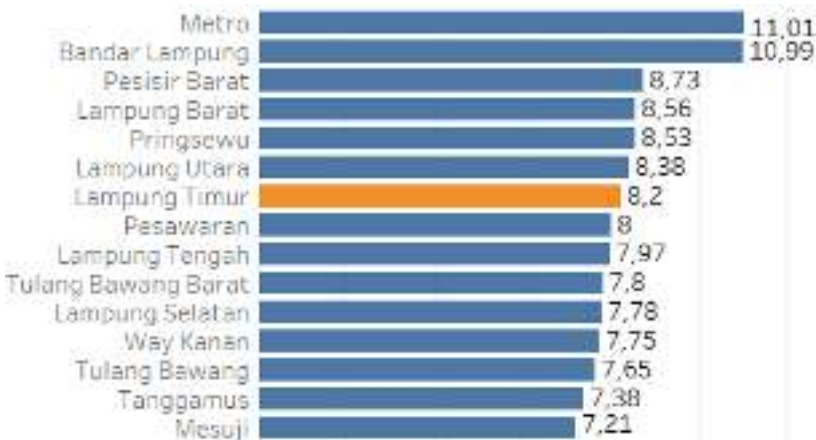
Sumber: BPS, 2025

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-7 untuk rata-rata lama sekolah tertinggi.





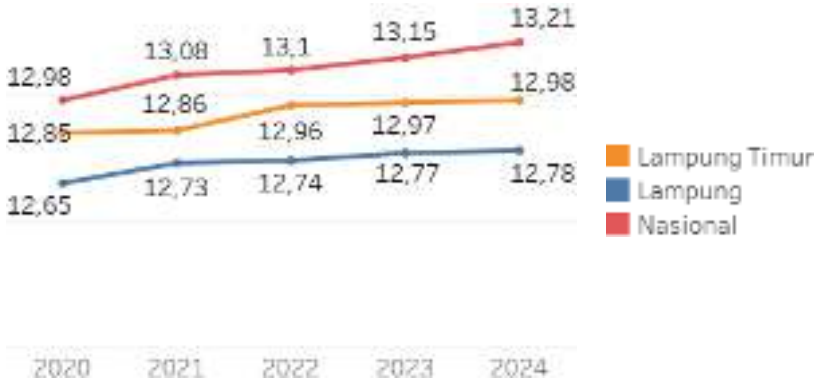
Grafik 2.25
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Perkembangan HLS Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan pada periode 2020-2024. Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Lampung Timur mencapai 12,98 tahun, mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya dan sudah melampaui capaian Provinsi Lampung. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2024 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1.

Grafik 2.26
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



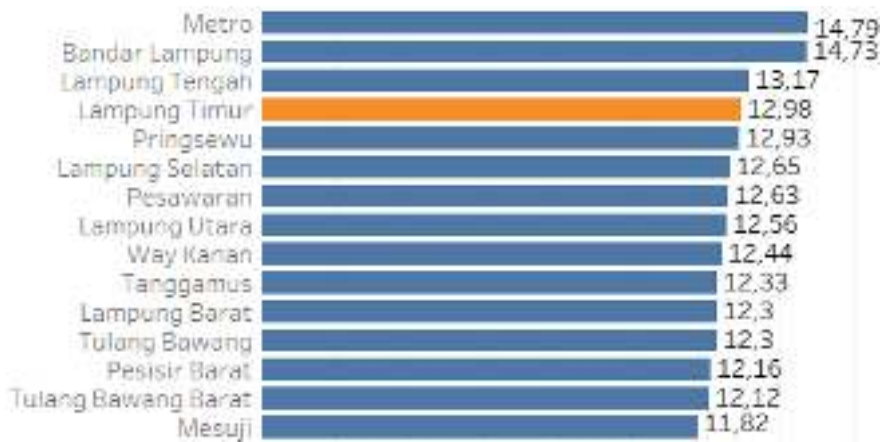
Sumber: BPS, 2025

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-4 untuk harapan lama sekolah tertinggi setelah Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Tengah.





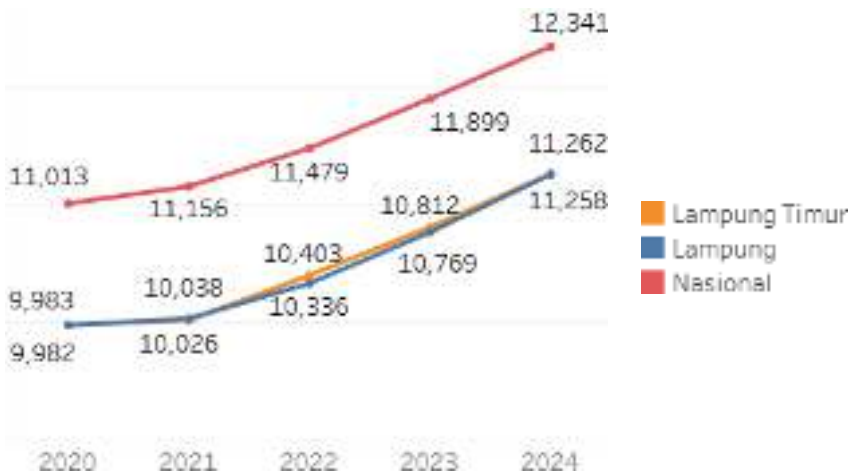
Grafik 2.27
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Perkembangan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan pada periode 2020-2024. Peningkatan ini merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji yang diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh, dan lain lain. Faktor pendorong lain yang meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa sehingga memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Grafik 2.28
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)



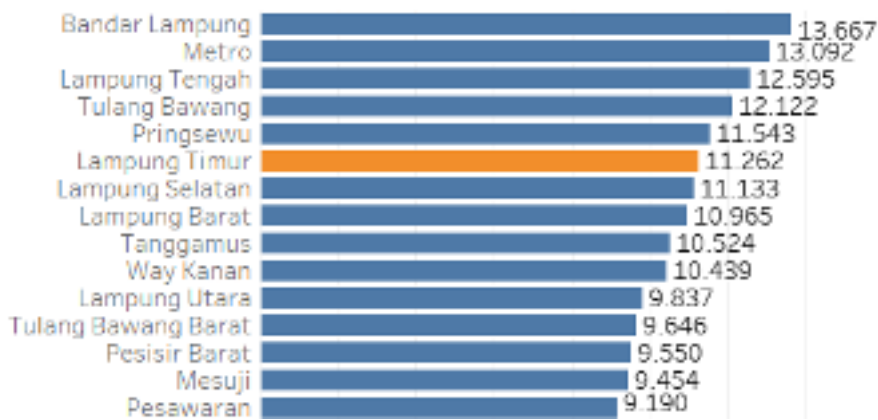
Sumber: BPS, 2025

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-6 untuk pengeluaran per kapita tertinggi dan sudah melampaui capaian Provinsi Lampung.





Grafik 2.29
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Ribu
Rupiah/Orang/Tahun) Tahun 2024



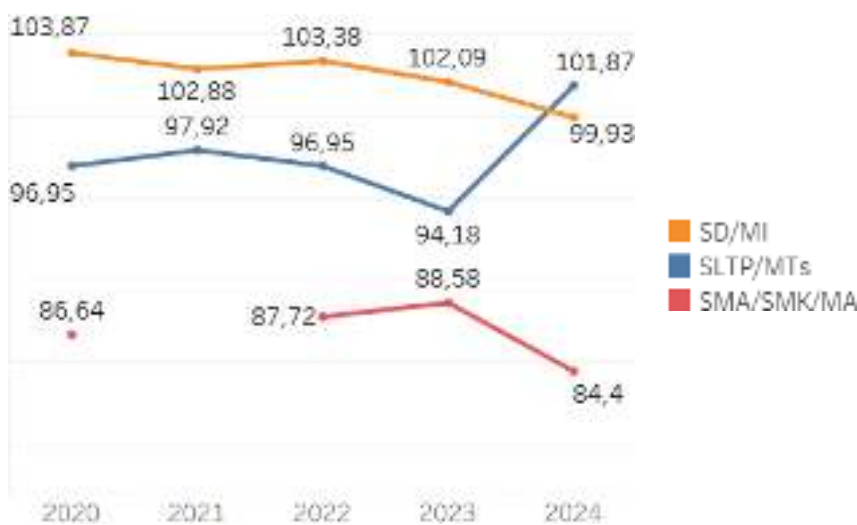
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Capaian APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Grafik 2.30
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Keterangan: Data APK SMA/SMK/MA tahun 2021 tidak tersedia

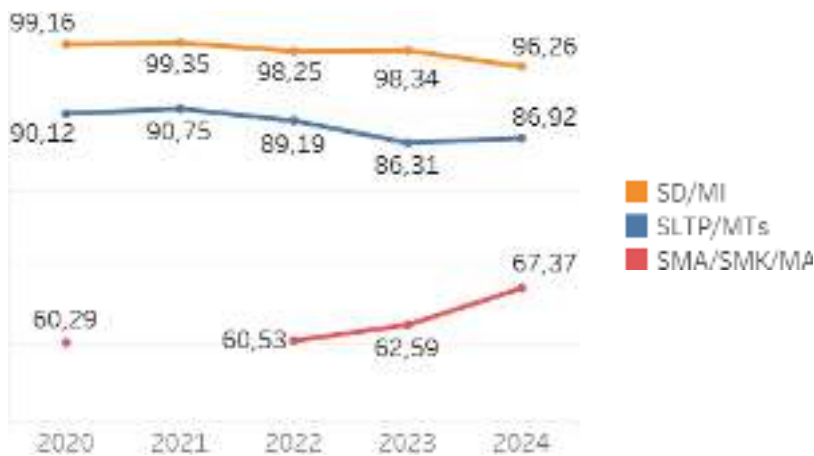
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan APK, APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, nilai APM





umumnya lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

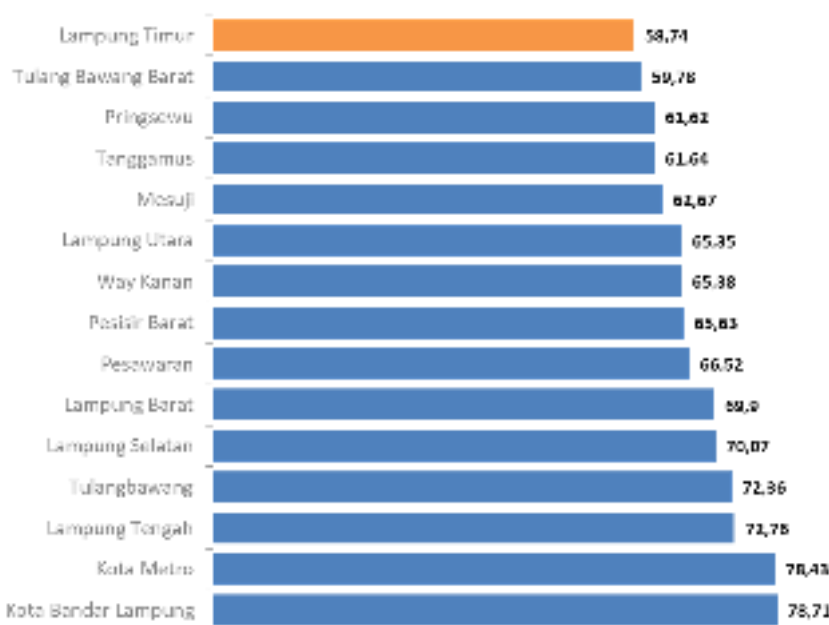
Grafik 2.31
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur; 2025
Keterangan: Data APM SMA/SMK/MA tahun 2021 tidak tersedia

APK dan APM SD/MI Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami penurunan pada periode 2020-2024, sama halnya dengan APK dan APM SLTP/MTs yang cenderung mengalami penurunan pada periode 2020-2023, sebelum meningkat di tahun 2024. APM SMA/SMK/MA cenderung mengalami peningkatan pada periode 2020-2024, sama halnya dengan APK SMA/SMK MA yang mengalami peningkatan pada periode 2020-2023, sebelum menurun di tahun 2024. Selain nilai tersebut, kesejahteraan sosial pada bidang pendidikan harus mempertimbangkan tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat.

Grafik 2.32
Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2024



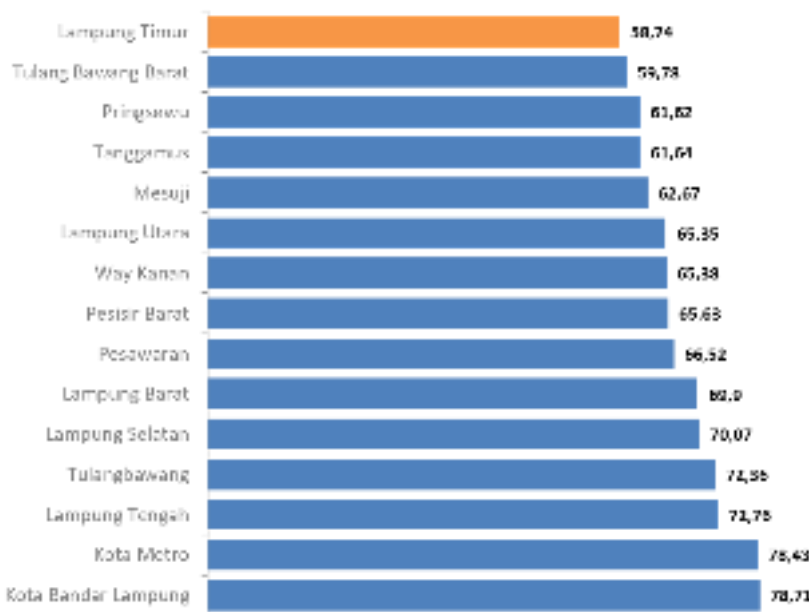
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur; 2025





Berdasarkan Grafik 2.32, tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar 58,74, menempatkan daerah ini pada posisi terendah di antara kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Capaian ini masih tertinggal jauh dibandingkan Kota Bandar Lampung yang memiliki tingkat kegemaran membaca tertinggi sebesar 78,71, disusul Kota Metro sebesar 74,83, dan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 72,76. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat di Kabupaten Lampung Timur masih perlu ditingkatkan melalui berbagai program penguatan literasi, penyediaan sarana baca yang memadai, serta pemberdayaan perpustakaan sekolah maupun desa. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di daerah. Selain itu berikut ini indeks pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Grafik 2.33
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Berdasarkan Grafik 2.33, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar 45,11, yang merupakan nilai terendah dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Angka ini menunjukkan masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat di Lampung Timur jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti Kota Metro yang mencatat indeks tertinggi sebesar 94,41, Tulangbawang sebesar 80,25, dan Kota Bandar Lampung sebesar 76,74. Rendahnya capaian ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih optimal dalam meningkatkan budaya baca dan kemampuan literasi masyarakat melalui program-program strategis, seperti pemberdayaan perpustakaan desa, penguatan komunitas literasi, serta peningkatan akses bahan bacaan yang berkualitas. Percepatan pembangunan literasi diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih cerdas dan berdaya saing.





Mulai tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI menetapkan bahwa Ujian Nasional (UN) diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kedua asesmen baru ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), dan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi). Merujuk data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks pada jenjang SD mencapai 59,56 persen dan jenjang SMP mencapai 66,28 persen. Untuk persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan, pada jenjang SD sebesar 50,28 persen dan jenjang SMP sebesar 62,5 persen.

Tabel 2.12
Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik Kabupaten Lampung Timur

No	Jenjang	Capaian Kemampuan Literasi (%)				Capaian Kemampuan Numerasi (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	SD	46,45	48,33	51,96	59,56	55,00	59,42	64,69	66,28
2	SMP	34,13	36,2	41,2	50,28	51,68	52,09	58,48	62,5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.2.2.2 Kesehatan

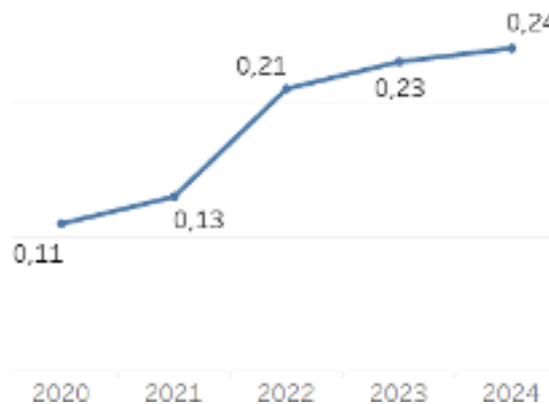
2.1.2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah serangkaian parameter atau variabel yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kesehatan keluarga secara menyeluruh. IKS bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan keluarga dari segi kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan.

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Lampung Timur cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, IKS Kabupaten Lampung Timur mencapai 0,24 persen, meningkat bila dibanding capaian tahun 2022 yang sebesar 0,23 persen. Perkembangan capaian IKS dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut.



Grafik 2.34
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Kendala masih rendahnya capaian IKS adalah keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) dan pemanfaatan anggaran integrasi tidak optimal, cakupan *entry* data di Puskesmas rendah karena masalah di teknis aplikasi pusat.

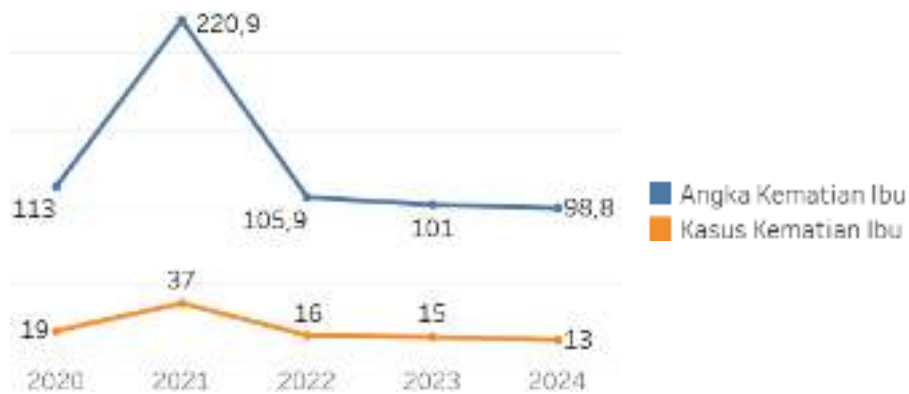
2.1.2.2.2.2 Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kematian ibu dalam setiap kelahiran hidup yang terjadi dalam suatu populasi atau wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. AKI merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat karena dapat mencerminkan tingkat kesehatan dan aksesibilitas sistem perawatan kesehatan bagi perempuan. AKI dinyatakan dalam bentuk angka per seribu atau per seratus ribu kelahiran hidup. Semakin rendah AKI, semakin baik pelayanan kesehatan ibu dan semakin tinggi harapan hidup ibu.

Faktor-faktor yang memengaruhi AKI meliputi aksesibilitas perawatan kesehatan, pendidikan, status sosial-ekonomi, budaya, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, setiap negara harus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas perawatan kesehatan ibu guna mengurangi angka kematian ibu secara signifikan. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 sebanyak 13 kasus atau 98,8 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2023 (15 kasus atau 101 per 100.000 kelahiran hidup), namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan AKI Provinsi Lampung (71,02 per 100.000 kelahiran hidup), namun telah mencapai target Nasional (183 per 100.000 kelahiran hidup).

Sistem pencatatan dan pelaporan kasus kematian ibu telah dilakukan berbasis elektronik yakni menggunakan aplikasi *Maternal Death Notification* (MDN), sehingga jumlah kasus kematian yang dilaporkan merupakan kasus kematian ibu yang terjadi di manapun sesuai alamat KTP Lampung Timur, walaupun tidak berdomisili di Kabupaten Lampung Timur. Perkembangan angka kematian ibu dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.35
Angka dan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Grafik menunjukkan bahwa angka dan kasus kematian ibu mengalami lonjakan drastis pada tahun 2021, dengan angka kematian ibu mencapai 220,9 dan 37 kasus kematian. Lonjakan ini bisa dikaitkan dengan memburuknya status gizi ibu pada periode tersebut, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti krisis ekonomi, pembatasan akses pelayanan kesehatan selama pandemi, atau terganggunya distribusi makanan bergizi. Ibu hamil dengan status gizi buruk—seperti kekurangan energi kronik (KEK), anemia, atau defisiensi mikronutrien penting—lebih berisiko mengalami komplikasi seperti perdarahan, infeksi, preeklampsia, dan kelahiran prematur, yang merupakan penyebab utama kematian ibu. Menariknya, setelah tahun 2021, angka dan kasus kematian ibu menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten hingga tahun 2024, yang dapat mencerminkan perbaikan dalam status gizi dan pelayanan kesehatan ibu. Misalnya, pada tahun 2024, angka kematian ibu turun menjadi 98,8 dan kasus kematian menjadi 13. Penurunan ini kemungkinan besar didukung oleh peningkatan intervensi gizi pada ibu hamil, seperti suplementasi zat besi dan asam folat, peningkatan cakupan pemeriksaan kehamilan, serta edukasi gizi yang lebih baik di tingkat komunitas. Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa peningkatan status gizi ibu berkontribusi besar dalam menurunkan angka kematian ibu secara berkelanjutan.

Penyebab kasus kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sebagian besar disebabkan oleh perdarahan, hipertensi, kelainan jantung dan pembuluh darah, dan lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan kematian ibu antara lain mengoptimalkan program P4K dan Bank Darah Desa, tata laksana ibu hamil anemia secara komprehensif dengan melibatkan lintas program, melaksanakan OJT kegawatdaruratan maternal neonatal bagi dokter dan perawat serta bidan puskesmas, pertemuan tentang ANC terpadu dengan lintas sektor dan lintas profesi, pengadaan BMHP untuk penanganan gawat darurat maternal, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK, monitoring dan evaluasi ke puskesmas dan bidan praktek mandiri, survey penyeliaan fasilitatif ke puskesmas dan bidan praktek mandiri dan tindak lanjutnya, audit maternal perinatal, pelaksanaan kasus rujukan ibu bersalin, dan koordinasi dan advokasi secara rutin untuk meningkatkan peran sektor terkait dalam upaya penurunan kasus kematian ibu.

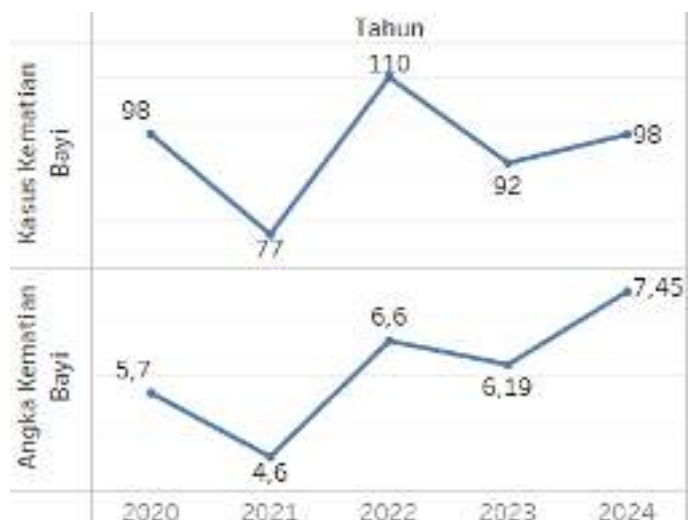
2.1.2.2.3 Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun dalam suatu populasi atau wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. AKB umumnya dinyatakan dalam bentuk angka per seribu atau per seratus ribu kelahiran hidup. AKB merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat karena mencerminkan tingkat kesehatan bayi dan kualitas sistem perawatan kesehatan maternal dan neonatal. Semakin rendah AKB, semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dan bayi, serta meningkatnya harapan hidup bayi.

Faktor-faktor yang memengaruhi AKB meliputi aksesibilitas perawatan kesehatan yang berkualitas, akses terhadap imunisasi, pendidikan ibu, status sosial-ekonomi, sanitasi yang baik, gizi yang memadai, dan faktor lingkungan. Upaya untuk mengurangi AKB melibatkan perbaikan akses terhadap perawatan kesehatan, peningkatan kesadaran ibu tentang perawatan bayi, pencegahan penyakit menular, imunisasi, peningkatan gizi, serta perbaikan sanitasi dan lingkungan.

Pemantauan AKB secara berkala sangat penting untuk mengidentifikasi masalah kesehatan tertentu yang mempengaruhi bayi dan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan masyarakat yang telah dilakukan. Pada tahun 2024 kasus kematian bayi berjumlah 98 kasus atau 7,45 per 1000 kelahiran hidup, meningkat bila dibandingkan kematian bayi tahun 2023 yang berjumlah 92 kasus atau 6,19 per 1000 kelahiran hidup. Capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan AKB Provinsi Lampung (4,6 per 1000 kelahiran hidup), namun telah mencapai target Nasional (16 per 1000 kelahiran hidup).

Grafik 2.36
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Data pada grafik menunjukkan fluktuasi angka dan kasus kematian bayi dari tahun 2020 hingga 2024, yang dapat dikaitkan erat dengan status gizi. Kematian bayi umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi gizi, baik pada ibu selama kehamilan maupun pada bayi setelah lahir. Bayi yang mengalami kekurangan gizi memiliki daya tahan tubuh yang rendah, sehingga lebih rentan terhadap penyakit infeksi seperti diare, pneumonia, dan sepsis, yang

merupakan penyebab utama kematian pada usia dini. Pada tahun 2021, tercatat angka kematian bayi terendah, yaitu 77 kasus dengan angka kematian sebesar 4,6 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini bisa menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat perbaikan dalam status gizi atau adanya intervensi gizi yang lebih efektif, seperti peningkatan pemberian ASI eksklusif, program makanan tambahan, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih optimal. Sebaliknya, peningkatan signifikan jumlah kematian bayi pada tahun 2022 (110 kasus) dan 2024 (98 kasus) yang disertai dengan naiknya angka kematian bayi (masing-masing 6,6 dan 7,45) dapat mengindikasikan adanya kemunduran dalam status gizi masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya akses terhadap makanan bergizi, krisis ekonomi, atau terganggunya layanan kesehatan dasar. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat upaya perbaikan gizi masyarakat melalui pemantauan status gizi secara berkala, edukasi gizi kepada ibu hamil dan menyusui, serta pelaksanaan program intervensi gizi yang menasar kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.

Bila dilihat berdasarkan penyebab, sebagian besar kasus kematian bayi pada tahun 2024 disebabkan oleh Asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Tingginya angka kematian bayi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah belum maksimalnya deteksi faktor risiko pada bayi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti layanan *antenatal care* (ANC) yang belum sepenuhnya memenuhi standar, keterbatasan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, serta kurangnya obat-obatan untuk kondisi gawat darurat. Selain itu, belum semua tenaga kesehatan memiliki pelatihan kegawatdaruratan maternal dan perinatal yang memadai, sementara kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) masih perlu ditingkatkan. Sistem rujukan dan kesiapan layanan kesehatan rujukan juga belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fasilitas PICU/NICU di RSUD Sukadana serta dukungan lintas sektor yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi.

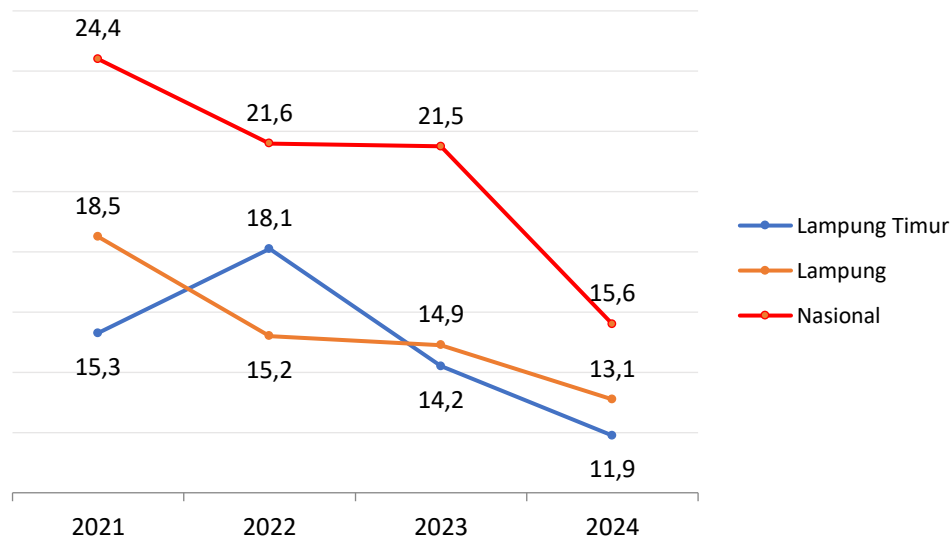
2.1.2.2.4 Prevalensi *Stunting*

Stunting adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD. Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2018, *stunting* di Kabupaten Lampung Timur mencapai 24,71 persen. Sedangkan berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, *stunting* di Kabupaten Lampung Timur mencapai 18,1 persen, namun angka tersebut menurun pada tahun 2023, di mana berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia, *stunting* balita di Kabupaten Lampung Timur sebesar 14,2 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-8 prevalensi *stunting* terendah di Provinsi Lampung. Hal ini merupakan pencapaian hasil yang baik dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Konvergensi Penurunan *Stunting* Kabupaten Lampung Timur serta kerjasama antar sektor/lembaga/pemangku kepentingan di Kabupaten Lampung



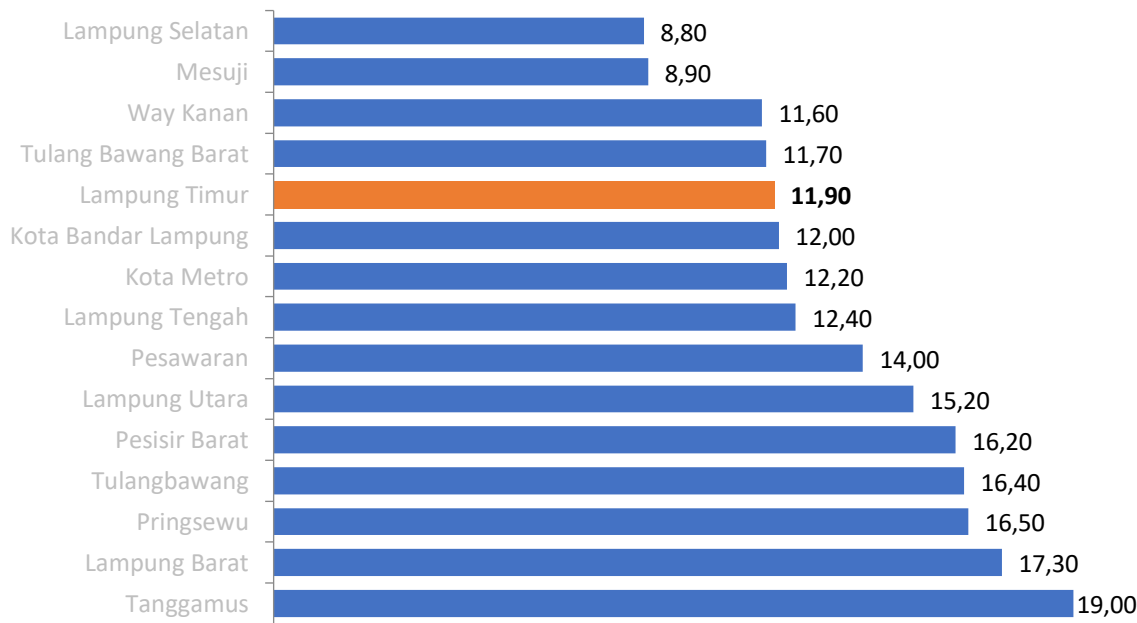
Timur. Gambaran perkembangan *stunting* di Kabupaten Lampung Timur dibandingkan dengan angka *stunting* di Provinsi Lampung dan Nasional adalah sebagai berikut.

Grafik 2.37
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Lampung Timur



Sumber: *Riskesmas dan SSGI, 2024*

Grafik 2.38
Prevalensi *Stunting* Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025*

Sedangkan berdasarkan sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 sebesar 1,4 persen, tahun 2022 sebesar 2,03 persen, tahun 2023 sebesar 2,2 persen dan tahun 2024 sebesar 2,1 persen dengan prevalensi tertinggi adalah Puskesmas Way Mili (14,80%), Puskesmas Margototo dan Wana (13,57%), dan Puskesmas Rejo Katon (6,13%). Ada perbedaan yang cukup signifikan





antara angka EPPGBM dengan hasil survey yang dikarenakan pendataan yang belum lengkap, namun data EPPGBM berbasis *by name by address* yang dapat menjadi rujukan dalam melakukan intervensi kegiatan. Di Kabupaten Lampung Timur telah ditetapkan lokus penanganan *stunting* yang dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2024 sebanyak 90 desa yang tersebar di 20 kecamatan.

Tabel 2.13
Desa Lokus Stunting Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Desa		Lokasi Fokus Stunting per Tahun						Jumlah
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Sukadana	1	Surabaya Udik	1						
		2	Negara Nabung	1						
		3	Putra Aji Dua				1			
		4	Pakuan Aji				1			
		5	Bumi Nabung Udik	1						
		6	Sukadana Timur	1						
		7	Putra Aji I						1	
		8	Sukadana Selatan				1			
		9	Sukadana Jaya				1			
2	Jabung	10	Belimbing Sari					1		
		11	Negara Batin				1			
		12	Gunung Mekar					1		
		13	Gunung Sugih Kecil					1		
3	Labuhan Maringgai	14	Sri Gading		1					
		15	Sukorahayu				1			
4	Way Jepara	16	Sumberjo				1			
		17	Sri Rejosari				1			
		18	Labuhan Ratu Dua			1				
		19	Braja Asri						1	
		20	Braja Sakti				1			
		21	Labuhan Ratu Danau			1				
		22	Braja Caka				1			
		23	Braja Dewa				1			
5	Sekampung	24	Giri Kelopo Mulyo						1	
		25	Sumber Gede					1		



No	Kecamatan	Desa		Lokasi Fokus Stunting per Tahun						Jumlah
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		5								
		26	Sambikarto						1	
		27	Trimulyo					1		
		28	Wonokarto				1			
6	Pekalongan	29	Adirejo		1					
		30	Gondang Rejo		1					
		31	Siraman		1					
		32	Pekalongan		1					
7	Metro Kibang	33	Sumber Agung		1	1				
		34	Purbo Sembodo		1					
		35	Kibang			1				
		36	Margo Jaya		1					
		37	Margo Toto			1				
		38	Margo Sari		1					
		39	Jaya Asri			1				
8	Purbolinggo	40	Taman Bogo					1		
		41	Tambah Dadi			1				
		42	Taman Fajar					1		
		43	Tegal Gondo					1		
		44	Tambah Luhur					1		
		45	Tanjung Inten					1		
9	Raman Utara	46	Kota Raman				1			
		47	Rejo Binangun		1					
		48	Rantau Fajar			1				
		49	Raman Fajar			1				
		50	Rejo Katon			1				
		51	Rama Puja				1			
10	Batanghari	52	Buana Sakti			1				
		53	Balai Kencono			1				



No	Kecamatan	Desa		Lokasi Fokus Stunting per Tahun					Jumlah
				2019	2020	2021	2022	2023	
		54	Rejo Agung			1			
		55	Adi Warno			1			
		56	Nampi Rejo		1				
		57	Banar Joyo		1				
		58	Telogo Rejo			1			
		59	Sumber Rejo		1				
		60	Purwodadi Mekar					1	
11	Marga Tiga	61	Sukaraja Tiga				1		
		62	Negeri Jemanten	1					
		63	Negeri Katon					1	
		64	Tanjung Harapan					1	
		65	Negeri Tua	1					
		66	Surya Mataram					1	
12	Sekampung Udik	67	Sidorejo						1
13	Waway Karya	68	Ngesti Karya	1					
		69	Mekar Karya		1				
		70	Tanjung Wangi	1					
		71	Tri Tunggal	1					
14	Batanghari Nuban	72	Sukacari				1		
		73	Negara Ratu				1		
		74	Trisno Mulyo				1		
		75	Cempaka Nuban						1
		76	Kedaton II (Dua)				1		
		77	Kedaton I (Satu)						1
		78	Tulung Balak				1		
15	Bumi Agung	79	Marga Mulya				1		
		80	Nyampir				1		
16	Gunung Pelindung	81	Negeri Agung						1
		88	Pempen					1	



No	Kecamatan	Desa		Lokasi Fokus Stunting per Tahun						Jumla h
				201 9	2020	202 1	202 2	202 3	202 4	
		2								
		8 3	Pelindung Jaya		1					
		8 4	Way Mili						1	
		8 5	Nibung					1		
17	Labuhan Ratu	8 6	Labuhan Ratu Lima				1			
18	Marga Sekampung	8 7	Bungkuk				1			
		8 8	Peniangan				1			
		8 9	Gunung Raya	1						
Kabupaten				10	15	15	25	15	10	89

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam penurunan *stunting* baik intervensi spesifik maupun sensitif antara lain melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 264 desa, penerapan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan *stunting*, 214 desa telah terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF), 76 persen sasaran telah memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting* di lokasi prioritas, standarisasi pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu, dan publikasi data *stunting* tingkat kabupaten.

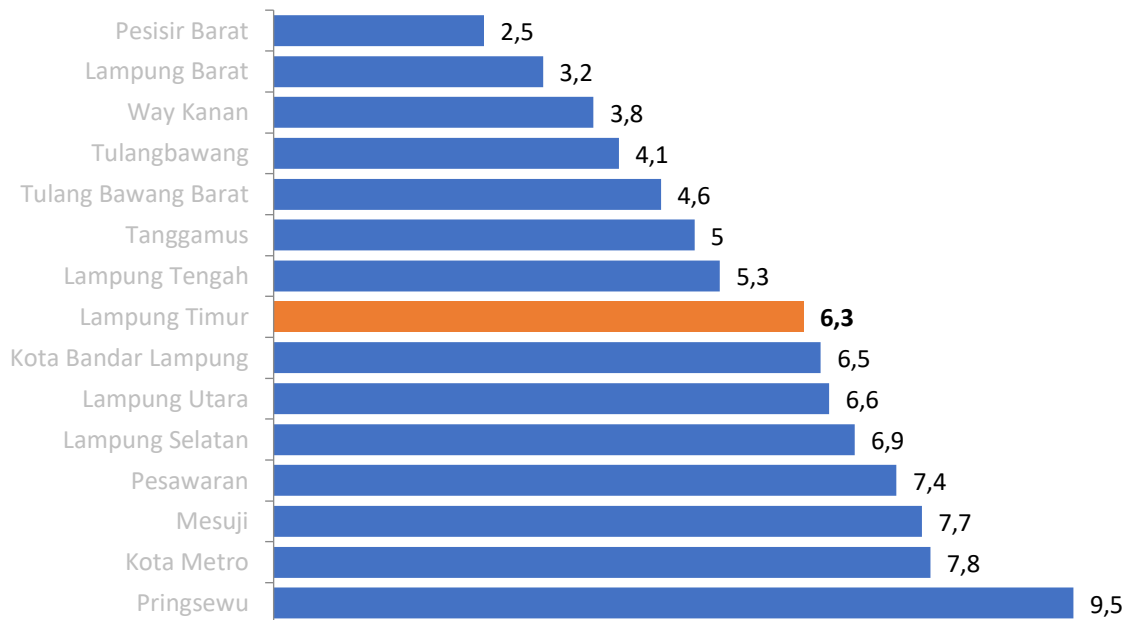
2.1.2.2.2.5 Prevalensi Wasting

Gizi kurang merupakan salah satu indikator masalah gizi. Indikator gizi kurang diukur menurut tinggi badan (BB/TB)/ *wasting*. *Wasting* memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama, misalnya terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang menyebabkan anak menjadi kurus.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2018 menyebutkan bahwa persentase gizi kurang di Indonesia sebesar 17,7%. Sedangkan berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia, *wasting* Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 sebesar 6,3 persen, menurun dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang sebesar 8,9 persen. Capaian prevalensi *wasting* Kabupaten Lampung Timur berada di atas prevalensi *wasting* Provinsi Lampung yang sebesar 5,9 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-4 dengan prevalensi *wasting* terendah di Provinsi Lampung.



Grafik 2.39
Prevalensi *Wasting* Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



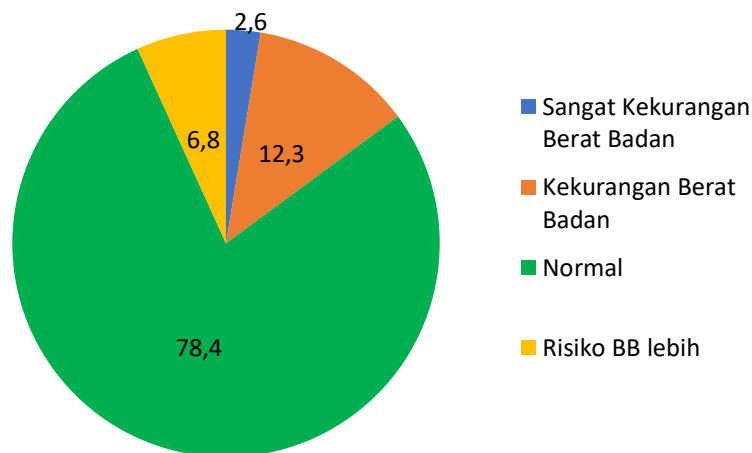
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan *wasting* antara lain pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, pemantauan gizi balita melalui e-PPGBM, penguatan kapasitas petugas gizi, pelacakan dan konfirmasi masalah gizi, penguatan monitoring dan evaluasi program gizi, pengadaan sarana prasarana yakni timbangan balita dan peningkatan kapasitas kader posyandu.

2.1.2.2.2.6 Prevalensi Status Gizi

Prevalensi Status Gizi adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan proporsi atau persentase penduduk pada suatu wilayah tertentu yang memiliki kondisi status gizi tertentu pada periode waktu tertentu. Prevalensi status gizi biasanya dihitung berdasarkan indikator berat badan, tinggi badan, atau parameter *antropometri* lainnya, yang kemudian dikategorikan ke dalam beberapa kelompok seperti sangat kekurangan berat badan, kekurangan berat badan, status gizi normal, dan risiko kelebihan berat badan. Data prevalensi status gizi berfungsi sebagai salah satu indikator penting dalam melihat kondisi kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal kecukupan asupan gizi, pola makan, dan status kesehatan lingkungan. Informasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan intervensi perbaikan gizi, pencegahan stunting, penanganan masalah kekurangan gizi, serta pengendalian risiko obesitas pada masyarakat.

Grafik 2.40
Prevalensi Status Gizi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Berdasarkan Grafik 2.38, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 memiliki status gizi dalam kategori normal, yaitu sebesar 78,4%. Meskipun demikian, masih terdapat penduduk yang mengalami masalah status gizi, antara lain 12,3% berada pada kategori kekurangan berat badan, 2,6% tergolong sangat kekurangan berat badan, dan 6,8% memiliki risiko berat badan lebih. Data ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum status gizi penduduk Lampung Timur relatif baik, namun upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya untuk menurunkan angka kekurangan gizi dan mencegah peningkatan risiko kelebihan berat badan. Hal ini penting untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lampung Timur.

2.1.2.2.2.7 Kasus Tuberkulosis

Saat ini tuberkulosis masih merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di dunia. Berdasarkan Global TB Report, Indonesia merupakan negara dengan estimasi kasus TB tertinggi kedua setelah India, dengan kontribusi mencapai 10 persen dari total kasus global. Persentase penemuan dan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 hanya sebesar 39,7 persen dari target 90 persen, meningkat bila dibandingkan capaian tahun 2023 yakni 30,7 persen. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan (*success rate*) semua kasus tuberkulosis pada tahun 2024 sebesar 94,27 persen, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 98 persen, namun sudah melampaui target nasional (90 persen).

Grafik 2.41
Persentase Penemuan dan Pengobatan TB dan Persentase Keberhasilan Pengobatan TB
Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Rendahnya persentase penemuan dan pengobatan TB disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah belum meratanya ketersediaan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) di seluruh puskesmas. Selain itu, upaya penjangkaran aktif masih terbatas akibat kendala anggaran operasional. Sistem pencatatan dan pelaporan juga masih lemah, terutama karena data dari fasilitas kesehatan swasta dan luar wilayah belum sepenuhnya dilaporkan. Di sisi lain, keterlibatan serta peran aktif lembaga masyarakat dan kader kesehatan dalam penanggulangan TB masih belum optimal, sehingga upaya deteksi dan penanganan kasus belum berjalan secara maksimal.

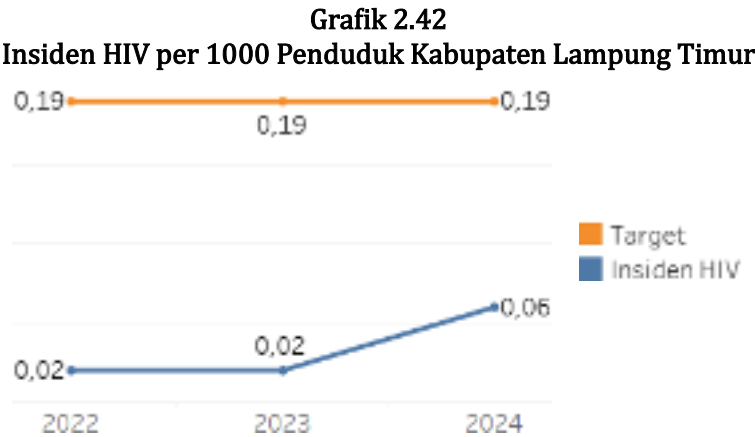
2.1.2.2.2.8 Kasus HIV/AIDS

HIV/ AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang secara epidemi mempunyai fenomena seperti gunung es di mana keadaan yang sebenarnya jauh lebih besar daripada yang tercatat dan dilaporkan. Hal ini sebagai akibat dari sistem pelaporan yang belum sempurna, masih tingginya stigma di masyarakat terhadap penyakit ini sehingga masih banyak masyarakat yang menyembunyikan penyakitnya serta penjangkaran kasus di layanan kesehatan yang masih sangat terbatas. Kondisi epidemi di Lampung Timur bergerak rendah ke epidemi terkonsentrasi, sehingga sasaran bukan hanya pada orang berisiko tetapi pada populasi berisiko yaitu ibu hamil, pasien TBC, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dan populasi kunci.

Salah satu strategi penanganan HIV adalah penemuan kasus sedini mungkin sehingga dapat ditatalaksana dengan baik. Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 menargetkan insiden HIV per 1000 penduduk sebesar 0,19 per 1000 penduduk. Insiden HIV per 1000 penduduk yang terinfeksi HIV adalah jumlah kasus HIV yang ditemukan selama periode waktu tertentu per 1000 penduduk. Pada tahun 2024 ditemukan 73 kasus HIV baru



(0,06 per 1000 penduduk). Capaian Insiden HIV per 1000 penduduk belum mencapai target yang sebesar 0,19 per 1000 penduduk. Perkembangan insiden HIV per 100.000 penduduk dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Kendala capaian yang masih rendah antara lain sulitnya memetakan populasi kunci yang menjadi sasaran HIV, stigma masyarakat terhadap HIV dan peran lintas sektoral yang belum maksimal. Berbagai upaya terkait program HIV AIDS dan Penanggulangan Infeksi Menular Sexual (PIMS) di antaranya dengan mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) baik di lingkungan masyarakat dan petugas kesehatan, mempercepat pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dan PIMS pada kelompok resiko tertular, ibu dan anak, memudahkan ODHA untuk memperoleh obat Anti Retroviral (ARV), layanan IMS, memberikan dukungan baik melalui petugas kesehatan maupun lembaga yang aktif terhadap HIV AIDS dan pembentukan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB)/perawatan dukungan dan pengobatan di Puskesmas Tambah Subur, Braja Harjosari, dan Mataram Baru sejak akhir tahun 2016 dan pada akhir tahun 2020 menambah 3 layanan baru yaitu Puskesmas Pasir Sakti, Puskesmas Trimulyo, dan Puskesmas Pugung Raharjo.

Upaya penemuan kasus HIV/ AIDS di Kabupaten Lampung Timur juga dilakukan secara aktif, baik oleh tenaga kesehatan maupun oleh tenaga non kesehatan. Upaya penemuan kasus oleh tenaga non kesehatan dilakukan oleh kader maupun masyarakat peduli HIV di antaranya dilakukan oleh kelompok yang tergabung dalam *Community TB HIV Care*, juga melalui pemberdayaan peran serta masyarakat melalui kelompok kunci. Bentuk nyata dari kegiatan penemuan kasus melalui pemberdayaan peran serta masyarakat tersebut adalah dengan terlibatnya ODHA, pemilik warung, pemilik karaoke, serta beberapa mucikari dalam penjangkaran kasus.

2.1.2.2.2.9 Kasus Demam Berdarah (DBD)

Penyakit DBD termasuk di antara emerging diseases yang sampai saat ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Penyakit ini dapat muncul di sepanjang tahun dan dapat menyerang semua umur dan sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang spesifik.

Jumlah kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 berjumlah 828 kasus (*Incidence Rate/IR* 71,8 per 100.000 penduduk),



meningkat bila dibanding tahun 2023 dengan jumlah kasus 361 kasus (*Incidence Rate*/IR 31,82 per 100.000 penduduk). IR DBD tersebut melampaui IR DBD yang diharapkan yakni <10 per 100.000 penduduk. Perkembangan *Incidence Rate* (IR) DBD Kabupaten Lampung Timur selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2.43
***Incidence Rate* Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Lampung Timur**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Peningkatan kasus DBD ini diduga berkaitan dengan faktor pola iklim serta siklus lima tahunan DBD yang secara historis memengaruhi tren kasus. Meskipun jumlah kasus meningkat, seluruh penderita DBD telah mendapatkan penatalaksanaan sesuai standar yang berlaku. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kasus DBD antara lain penyebarluasan informasi DBD di forum-forum pertemuan lintas sektoral, antisipasi musim penularan melalui kolaborasi lintas program dan lintas sektoral, pengendalian sebelum musim penularan melalui optimalisasi gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M *plus* dan larvasida dengan lintas sektoral terkait dan penyuluhan, mengoptimalkan penyelidikan epidemiologi kasus DBD dan atau *suspect* DBD oleh petugas puskesmas, pelaksanaan *fogging* dan penanggulangan fokus pada titik kasus temuan DBD, kegiatan monitoring dengan pengumpulan data dan informasi, membuat surat edaran tentang kewaspadaan peningkatan DBD sebelum musim penularan dan tata laksana kasus serta rujukan kasus DBD ke rumah sakit.

2.1.2.2.2.10 Kasus Malaria

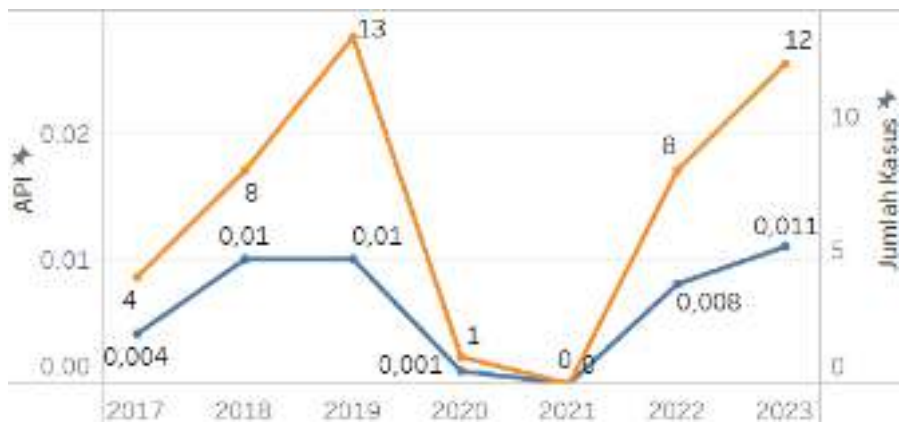
Sasaran program malaria adalah penemuan dan pengobatan kasus dengan kegiatan utama terdiri dari (1) peningkatan kualitas dan akses terhadap penemuan dini dan pengobatan malaria; (2) penjaminan kualitas diagnosis malaria melalui pemeriksaan laboratorium melalui *Rapid Diagnostic Test* (RDT); (3) perlindungan terhadap kelompok rentan terhadap ibu hamil dan balita di daerah endemis tinggi; (4) penguatan penanganan KLB dan *surveillance*; (5) intervensi vektor termasuk *surveillance* vektor; dan (6) penguatan sistem pengelolaan logistik malaria.

Kabupaten Lampung Timur telah mendapatkan sertifikat sebagai daerah Eliminasi Malaria sejak tanggal 12 November 2017. Sistem informasi Elektronik Malaria (SISMAL) dapat menginformasikan penderita malaria yang sedang sakit/dirawat di luar Lampung Timur dan telah terjalin konektivitas sistem informasi di Provinsi Lampung maupun luar Provinsi Lampung. Jika ada penderita malaria yang sedang dirawat di luar Kabupaten



Lampung Timur, maka Fasilitas Kesehatan/Dinas Kesehatan setempat akan menginformasikan kepada Dinas Kesehatan Lampung Timur dan selanjutnya akan dilakukan penyelidikan epidemiologi sesuai alamat untuk memastikan sumber penularan, vektor malaria, dan pemetaan daerah reseptif malaria. Perkembangan kasus malaria positif di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut.

Grafik 2.44
Perkembangan Malaria Positif Terkonfirmasi di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Perkembangan malaria positif di Kabupaten Lampung Timur meningkat tajam setelah 0 kasus pada tahun 2021 menjadi 8 kasus pada tahun 2022 dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 12 kasus. Namun berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi menunjukkan bahwa semua kasus positif malaria di Kabupaten Lampung Timur yang ditemukan merupakan kasus *import* (terinfeksi di luar wilayah Lampung Timur). Oleh karena itu, harus diwaspadai dengan meningkatkan upaya skrining dengan menjaring sebanyak mungkin *suspect* dan melakukan penyelidikan epidemiologi pada semua kasus terkonfirmasi positif. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga agar masyarakat di Kabupaten Lampung Timur terbebas dari penyakit malaria dan mempertahankan status sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang berhasil mengeliminasi malaria sebagaimana dinyatakan melalui sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2017.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia yang mencapai *ending* AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria (ATM) pada tahun 2030, Kabupaten Lampung Timur memiliki komitmen yang kuat dalam pencegahan dan pengendalian ATM tersebut. Pada tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur telah memulai upaya koordinasi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari keterlibatan perangkat daerah terkait, Pemerintah Desa, maupun dari lembaga lainnya antara lain BAZNAS, dalam upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria (ATM) di Kabupaten Lampung Timur.

Adapun upaya koordinasi dan kolaborasi yang telah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 antara lain pemetaan anggaran yang dapat digunakan dalam pencegahan dan pengendalian ATM pada beberapa perangkat daerah terkait, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ATM, melakukan sosialisasi terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian ATM yang dilakukan melalui kolaborasi perangkat daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa dengan Dinas Kesehatan, menetapkan 25 desa percontohan





dalam pencegahan dan pengendalian ATM dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk memastikan adanya pemanfaatan dana desa dalam kegiatan pencegahan pengendalian ATM di desa tersebut serta berkoordinasi dengan BAZNAS (Badan Amil dan Zakat Nasional) Lampung Timur dan CSR terkait dengan program bantuan untuk intervensi pencegahan dan pengendalian ATM di Kabupaten Lampung Timur. Berikut nama-nama desa yang menjadi lokus ATM di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023.

Tabel 2.14
Desa Lokus AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

No.	Kecamatan	Puskesmas	Desa
1	Pasir Sakti	Pasir Sakti	1 Pasir Sakti
			2 Sumur Kucing
			3 Purworejo
			4 Kedung ringin
			5 Mulyosari
2	Mataram Baru	Mataram Baru	1 Mataram Baru
			2 Mandala Sari
			3 Tulung Pasik
			4 Rajabasa Baru
			5 Kebun Damar
3	Bandar Sribhawono	Sribhawono	1 Bandar Agung
			2 Sri menanti
			3 Sribhawono
			4 Sadar Sriwijaya
			5 Sri pendowo
4	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	Gunung Pasir
			1 Jaya
			2 Pugung Raharjo
			3 Bojong
			4 Banjar Agung
5	Way Bungur	Tambah Subur	5 Mengandung Sari
			1 Toto Mulyo
			2 Taman Negeri
			3 Tegal Ombo
			4 Tanjung Qencono
			5 Tanjung Tirto

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.1.2.2.2.11 Penyakit Tidak Menular

Dilihat dari beban penyakit (*diseases burden*) yang diukur dengan *Disability Adjusted Life Years* (DALYs), telah terjadi transisi epidemiologi dalam tiga dekade terakhir; penyakit menular/KIA/gizi telah menurun dari 51,3 persen pada tahun 1990 menjadi 23,6 persen pada tahun 2017, penyakit tidak menular (PTM) naik dari 39,8 persen pada tahun 1990 menjadi 69,9 persen pada tahun 2017, serta cedera turun dari 8,9 persen pada tahun 1990 menjadi 6,5 persen pada tahun 2017. Indonesia mengalami beban ganda, di satu sisi PTM naik dengan signifikan, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas (Kementerian Kesehatan, 2020).

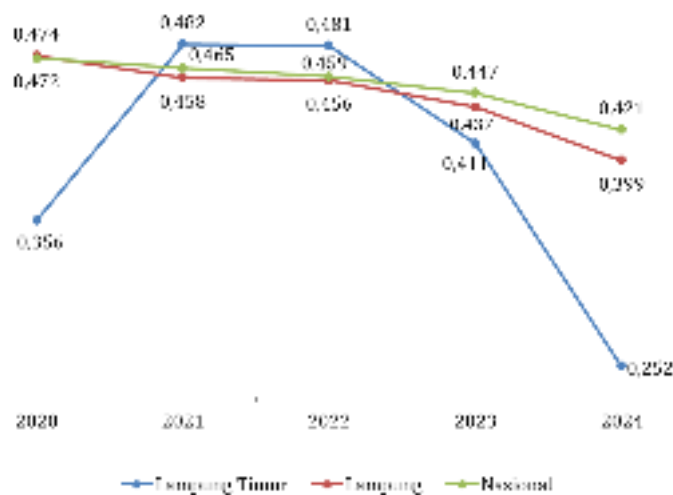


Hasil Survey Kesehatan Indonesia Tahun 2023 melaporkan bahwa di Provinsi Lampung prevalensi kanker berdasarkan diagnosa dokter mencapai 1,2 persen, prevalensi diabetes mellitus penduduk >15 tahun berdasarkan diagnosa dokter mencapai 1,6 persen, penyakit jantung berdasarkan diagnosa dokter mencapai 0,58 persen, dan prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosa dokter mencapai 7,4 persen. Untuk menanggulangi masalah PTM, maka upaya intervensi yang komprehensif dan holistik harus dilakukan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan *continuum of care*.

2.1.2.2.3 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal lantaran ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Indeks ketimpangan gender Kabupaten Lampung Timur kurun waktu delapan tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif.

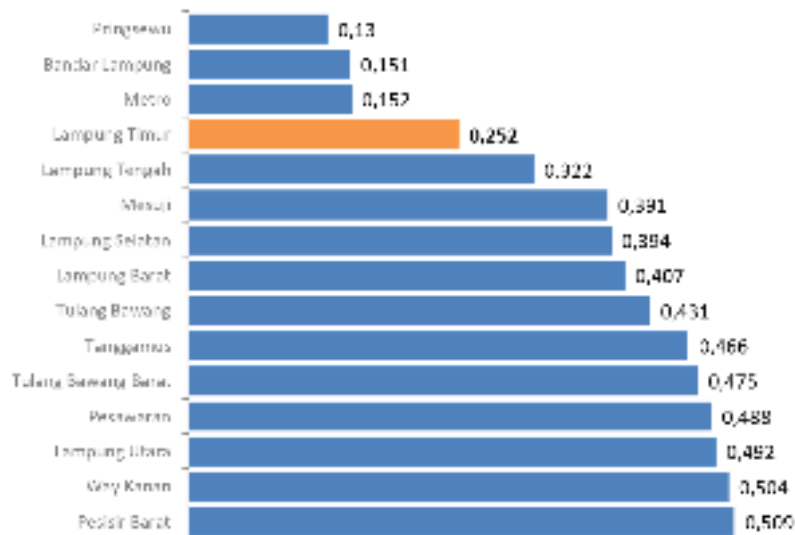
Grafik 2.45
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Pada tahun 2024 indeks ketimpangan gender Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,252, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,411 dan sudah lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-4 dengan Indeks Ketimpangan Gender terendah.

Grafik 2.46
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024

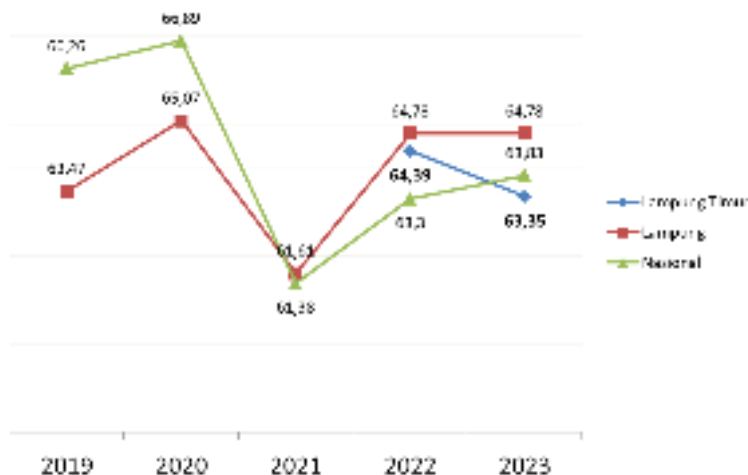


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.2.2.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Terkait dengan perlindungan anak, Indikator yang dapat menggambarkan perlindungan anak adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA). Terkait data ini, Kabupaten Lampung Timur memiliki skor 63,35 poin pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 64,39 poin, maka mengalami penurunan sebesar 1,04 poin. Pada tahun 2022 capaian IPA Kabupaten Lampung Timur berada di atas capaian nasional.

Grafik 2.47
Indeks Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber: Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2024, diolah

Keterangan: Data IPA Kabupaten Lampung Timur tahun 2019-2021 tidak tersedia

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1 Seni Budaya

Pemeliharaan kebudayaan merupakan upaya mempertahankan objek kebudayaan agar tetap berada pada sistem budaya masyarakat. sedangkan pengembangan kebudayaan



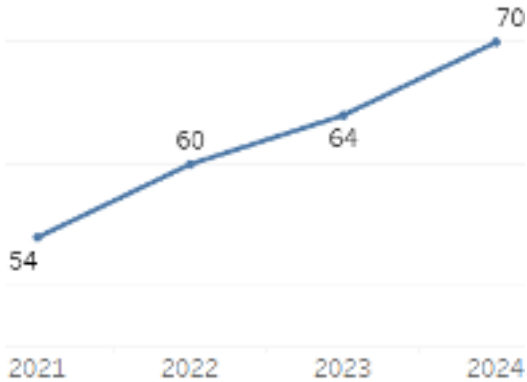
adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada objek kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang. Penguatan objek kebudayaan dilakukan dengan cara: penyebaran; penelitian; pengayaan keberagaman; revitalisasi; adaptasi; reaktualisasi; rekayasa; pembudayaan; dan/atau internalisasi. Pemanfaatan melalui pendayagunaan dilakukan untuk memenuhi kepentingan meliputi: agama; sosial; ekonomi; pendidikan; ilmu pengetahuan dan teknologi; kebudayaan; dan pariwisata. Persentase tingkat pelestarian warisan budaya Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan pada periode 2021-2024. Pada tahun 2024, tingkat pelestarian warisan budaya Kabupaten Lampung Timur mencapai 70 persen.

Tabel 2.15
Potensi Budaya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

No.	Jenis Potensi Budaya	Jumlah
1	Bangunan Cagar Budaya	13
2	Benda Cagar Budaya	35
3	Situs Cagar Budaya	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2023

Grafik 2.48
Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.2.3.2 Olahraga

Kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas, dan lain-lain.

Olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas fisik (kesehatan) dan karakter bangsa, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, meningkatkan roda ekonomi. Pembangunan olahraga daerah merupakan bagian dalam sistem keolahragaan nasional yang saling mengait antar subsistem secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan,





teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Penyediaan prasarana dan sarana olahraga memiliki arti penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Belum semua desa memiliki prasarana dan sarana olahraga. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga perlu memperhatikan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Prasarana dan sarana keolahragaan belum sepenuhnya memadai, lengkap dan terstandardisasi.

Tabel 2.16
Sarana Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

No.	Sarana Olahraga	Jumlah
1	GOR Bumi Tuwah Bepadan	1
2	Stadion Mini Purbolinggo	1

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur; 2024

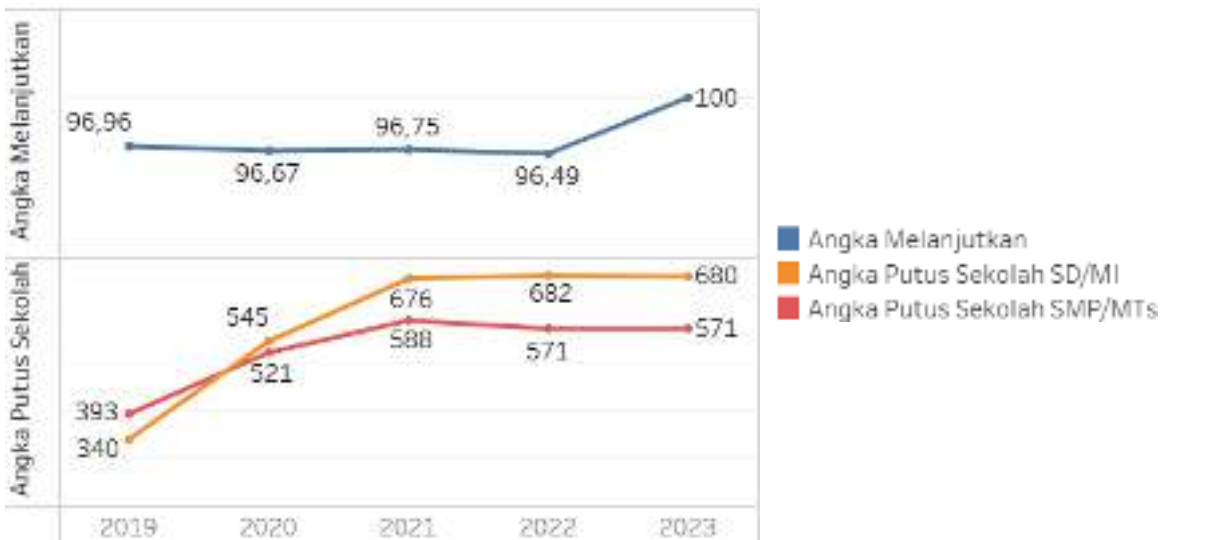
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya.

Grafik 2.49
Angka Melanjutkan dan Angka Putus Sekolah Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur; 2024

Angka kelulusan baik pada tingkat SD/MI dan SMP di tahun 2019 hingga 2023 mencapai angka 100%, Angka kelulusan tersebut dihitung berdasarkan jumlah siswa yang





berhasil lulus ujian dibandingkan dengan siswa yang mengikuti ujian. Dari angka kelulusan tersebut, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke jenjang SMP cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan capaian 100 persen pada tahun 2023.

Angka putus sekolah pada jenjang SD/MI pada tahun 2019 adalah sebanyak 340 orang, kemudian pada tahun 2023 angka putus sekolah naik cukup tinggi menjadi 680 orang. Pada jenjang SMP/MTs, angka putus sekolah pada tahun 2019 sebanyak 393 orang, kemudian pada tahun 2023 angka putus sekolah naik cukup tinggi menjadi 571 orang. Sedangkan jumlah anak tidak sekolah pada tahun 2023 mencapai 18.589 anak.

Rasio ketersediaan sekolah adalah perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio berarti semakin banyak siswa yang harus dilayani oleh sebuah sekolah. Tahun 2020 pada jenjang SD/MI rasio ketersediaan sekolah adalah 1:215,5 turun menjadi 1:146,90 pada tahun 2024. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2020 adalah 1:338,7 turun menjadi 1:218,21 pada tahun 2024.

Tabel 2.17
Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Lampung Timur

Rasio Ketersediaan Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	1:215,5	1:62,45	1:151,84	1:150,19	1:146,90
SMP/MTS	1:338,7	1:48,55	1:209,96	1:219,06	1:218,21

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur; 2024

Rasio jumlah guru yang merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid (penduduk usia sekolah) pada jenjang pendidikan tertentu, menunjukkan banyaknya siswa yang harus dilayani oleh seorang guru. Rasio jumlah guru di Kabupaten Lampung Timur tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 pada jenjang SD/MI rasio jumlah guru dan muridnya adalah 1:16,07 turun menjadi 1:14,10 pada tahun 2024. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, rasio guru dan murid tahun 2020 adalah 1:15,59 meningkat menjadi 1:16,14 pada tahun 2024.

Tabel 2.18
Rasio Jumlah Guru terhadap Murid Kabupaten Lampung Timur

Rasio Jumlah Guru terhadap Murid	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	1:16,07	1:16,07	1:15,11	1:15,03	1:14,10
SMP/MTS	1:15,59	1:15,59	1:13,71	1:15,91	1:16,14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur; 2025

2.1.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kehidupan dan usia harapan hidup manusia, kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Peningkatan kualitas



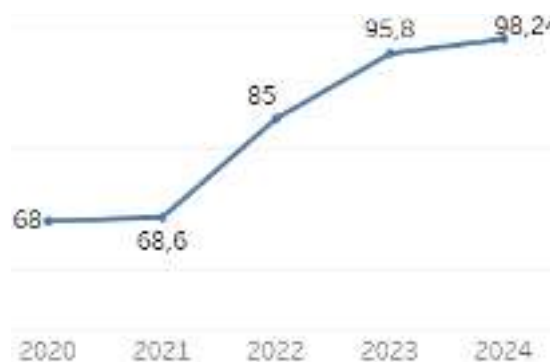


penduduk secara fisik dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk dan status kesehatan penduduk. Kesehatan merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dipercaya menjadi penyebab langsung maupun tak langsung keberhasilan bidang-bidang lain.

2.1.3.1.2.1 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2024 mencapai 98,24 persen, meningkat dari capaian tahun 2023 yaitu 95,8 persen, mendekati angka Provinsi Lampung (98,7 persen) dan telah mencapai target Kabupaten (75 persen).

Grafik 2.50
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Berdasarkan data dari BPJS, Cakupan Keaktifan JKN Kab Lampung Timur semester II tahun 2024 tercatat sebesar 62,57%. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat selisih antara cakupan kepesertaan JKN yaitu kepesertaan JKN aktif dengan peserta JKN yang tidak aktif sebesar 35,67%.

2.1.3.1.2.2 Persentase Desa Siaga Aktif dengan Strata Purnama Mandiri

Program Desa Siaga Aktif adalah program yang dilaksanakan di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tingkat desa melalui partisipasi aktif masyarakat dan upaya terkoordinasi antara berbagai pihak terkait. Program Desa Siaga Aktif, desa-desa diberikan penilaian berdasarkan sejumlah indikator dan kriteria tertentu untuk menentukan tingkat keaktifan desa dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Indikator-indikator tersebut mencakup aspek seperti pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, partisipasi masyarakat, upaya promosi kesehatan, dan pemantauan kesehatan.

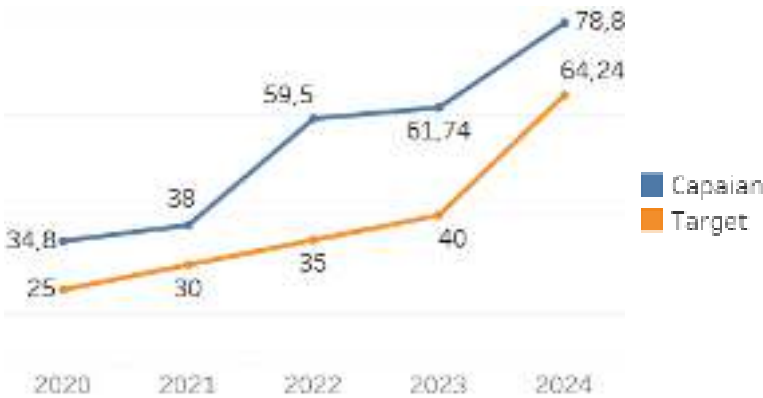
Perkembangan capaian persentase desa siaga purnama mandiri dalam 4 (empat) tahun terakhir telah melampaui target kabupaten. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari upaya aktif tim Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur melakukan pembinaan dan





pendampingan ke desa serta meningkatkan advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait. Indikator kinerja persentase desa siaga aktif strata purnama mandiri di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 78,8 persen dari target kabupaten 64,24 persen atau 203 dari 264 desa, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 61,74 persen.

Grafik 2.51
Capaian Desa Siaga Mandiri Dibandingkan Target Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.3.1.2.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya. Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perkembangan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.





Tabel 2.19
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur

No.	Tenaga Kesehatan	Tahun					Rasio Nakes per 100.000 Penduduk
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tenaga Medis						
	a. Dokter Spesialis	37	43	50	57	47	4,2
	b. Dokter Umum	144	124	134	139	155	13,8
	c. Dokter Gigi	10	12	11	15	16	1,4
2	Tenaga Kebidanan/Keperawatan						
	a. Bidan	801	762	905	846	978	87,1
	b. Perawat	639	594	633	595	687	61,2
3	Tenaga Kefarmasian (apoteker, tenaga teknis kefarmasian)	82	75	84	89	170	15,1
4	Tenaga Kesehatan Masyarakat	69	59	66	64	84	7,5
5	Tenaga Kesehatan Lingkungan	49	54	54	55	68	6,1
6	Tenaga Gizi	44	43	50	51	57	5,1
7	Tenaga Analis	59	76	71	73	74	6,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Selanjutnya, jumlah tenaga medis yang terdiri dari dokter umum dan dokter gigi mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan jumlah dokter umum sebanyak 155 orang dan dokter gigi sebanyak 16 orang. Sementara itu, jumlah dokter spesialis pada tahun 2024 turun dari tahun sebelumnya menjadi 47 orang dari 57 orang di tahun 2023.

Berdasarkan data pada tabel di atas tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Timur masih banyak yang belum sesuai standar ketenagaan minimal dan analisis beban kerja. Kabupaten Lampung Timur masih banyak membutuhkan SDM kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker dan tenaga farmasi, tenaga gizi, analis kesehatan, sanitarian, epidemiologi kesehatan, pranata laboratorium kesehatan, perekam medis dan administrator kesehatan untuk puskesmas. Tenaga kesehatan strategis jumlahnya belum sesuai kebutuhan masyarakat serta distribusi ketenagaan/pegawai belum merata pada wilayah wilayah puskesmas sehingga terjadi kesenjangan, demikian juga dengan kompetensi dan kualitas SDM kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi.

Sedangkan kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 201 tentang Puskesmas mengamanatkan bahwa Puskesmas harus memenuhi standar ketenagaan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Jenis ketenagaan dimaksud meliputi dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisisionis, apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian dan ATML. Pada tahun 2023, di Kabupaten Lampung Timur terdapat 12 Puskesmas (35,29%) yang telah memenuhi standar 9 jenis tenaga. Walaupun belum memenuhi target 100% standar minimal pemenuhan tenaga di Puskesmas, namun persentase tersebut meningkat bila dibanding tahun 2022 (23,53%) dan tahun 2021 (14,7%).





Tabel 2.20
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur

Sarana Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit Umum	3	3	3	3	3
Rumah Sakit Khusus	2	2	2	2	2
Puskesmas Rawat Inap	15	15	15	15	15
Puskesmas Non Rawat Inap	19	19	19	19 (2 Puskesmas baru)	21
Puskesmas Pembantu	87	87	88	88	
Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1	1	1	1	
Poliklinik	20	20	24	26	
Posyandu	1270	1304	1313	1316	
Pos Kesehatan Desa	268	268	267	267	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung tetap yaitu sebanyak 5 (lima) Rumah Sakit terdiri dari 1 (satu) RSUD, 2 (dua) Rumah Sakit Umum Swasta, dan 2 (dua) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak. Pada tahun 2024, jumlah Puskesmas di Kabupaten lampung timur berjumlah 36 Puskesmas, terdiri dari 15 Puskesmas Rawat Inap, 21 Puskesmas Non Rawat Inap. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur telah terakreditasi.

Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 adalah 3 (tiga) Puskesmas per 100.000 atau 1:31.184 penduduk, sedangkan rasio Puskesmas terhadap kecamatan adalah 1:1,5 Puskesmas yang berarti bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur terdapat minimal satu Puskesmas bahkan ada yang dua Puskesmas. Selain Puskesmas, sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Lampung Timur terdapat 88 Puskesmas Pembantu dari 264 desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur dan 1316 Posyandu aktif.

2.1.3.1.2.4 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut

Di Kabupaten Lampung Timur terdapat 1 (satu) rumah sakit daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana. Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana adalah rumah sakit tipe C milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Sukadana dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 521/Menkes/SK/XIV/2005 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan resmi menjadi RSUD PPK-BLUD Penuh tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan SK Bupati Lampung Timur Nomor B.351/28/SK/2012 serta terakreditasi untuk ketiga kali dengan predikat paripurna berdasarkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor 024/SERT-AKR/LAM-KPRS/Set/X/2022 pada tanggal 19 Oktober 2022.



Peran RSUD Sukadana sangat strategis dalam upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur. Peran tersebut utamanya dalam pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Berdasarkan angka kunjungan pada tahun 2023, rawat jalan yang tercatat yaitu 37.145 dan kunjungan rawat inap tercatat yaitu 5765. Angka kunjungan tersebut terdapat peningkatan pemanfaatan RSUD Sukadana oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.

Adapun jenis layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yaitu Poliklinik Anak, Poliklinik Kebidanan dan Kandungan, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Bedah, Poliklinik Syaraf, Poliklinik Mata, Poliklinik THT, Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah, Poliklinik Gigi dan Mulut, Poliklinik Paru, Poliklinik Jiwa, Poliklinik Rehabilitasi Medik, Pelayanan Psikologi, Radiologi, dan Hemodialisa dan Laboratorium.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengamanatkan bahwa rumah sakit tipe C harus memberikan pelayanan paling sedikit meliputi pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang non klinik, dan pelayanan rawat inap. Untuk sumber daya manusia terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, tenaga non kesehatan. Sedangkan untuk peralatan paling sedikit terdiri peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.

Fokus Kementrian Kesehatan dalam transformasi layanan rujukan menitikberatkan kepada pengembangan layanan dalam menangani 9 penyakit prioritas. Transformasi layanan rujukan dilakukan melalui program jejaring rujukan dan pengelompokan rumah sakit menjadi 3 kategori, yaitu Rumah Sakit Madya, Rumah Sakit Utama, dan Rumah Sakit Paripurna. Masing-masing kategori memiliki kapasitas yang berbeda. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1277/2024 telah mengamanahkan RSUD Sukadana sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA), serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1495/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Sumber daya Air (Irigasi)

Terkait dengan kinerja sistem irigasi dalam daerah irigasi permukaan, jumlah daerah irigasi adalah sebanyak 56 daerah irigasi. Untuk luas daerah irigasi sesuai Permen PUPR adalah seluas 4.902,56 hektar dengan luas sawah/fungsional seluas 4.861,44 hektar. Sistem irigasi yang baik dan efisien berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan nasional, serta kesejahteraan masyarakat. Kinerja sistem irigasi dapat diukur melalui Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI), yang dinilai berdasarkan beberapa

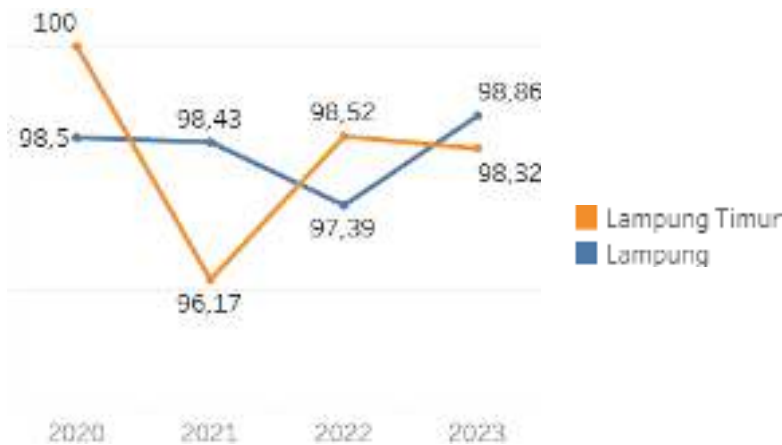


aspek, seperti kondisi prasarana fisik, produktivitas tanam, serta manajemen dan organisasi pengelola irigasi. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur, IKS Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten pada tahun 2024 mencapai 47,32 persen.

2.1.3.1.3.2 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Keberadaan fasilitas air minum di Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan sudah relatif baik karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki fasilitas air minum. Jenis air minum yang dianggap higienis atau air bersih yang aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan standar kesehatan adalah jenis air kemasan, air leding, sumur terlindung, dan mata air terlindung.

Grafik 2.52
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Kecukupan Air Minum



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

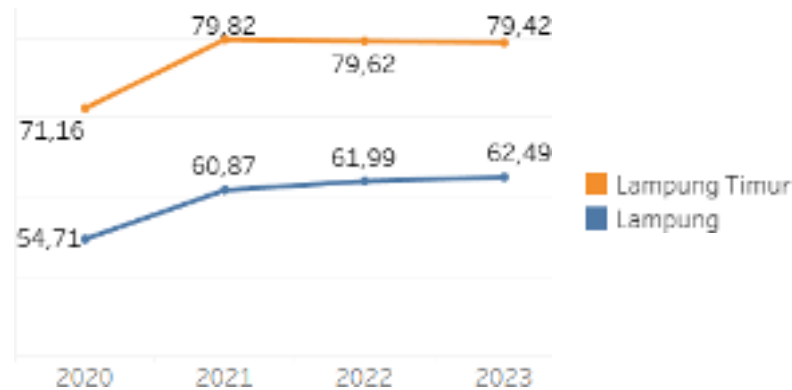
Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap kecukupan air minum di Kabupaten Lampung Timur, setelah mencapai 100 persen pada tahun 2020, turun menjadi 96,32 persen pada tahun 2023, capaian ini berada di bawah capaian Provinsi Lampung yang sebesar 98,86 persen.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum terlindungi di Kabupaten Lampung Timur mencapai 79,42 persen pada tahun 2023, menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 79,62 persen, capaian ini sudah lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Lampung yang sebesar 62,49 persen.





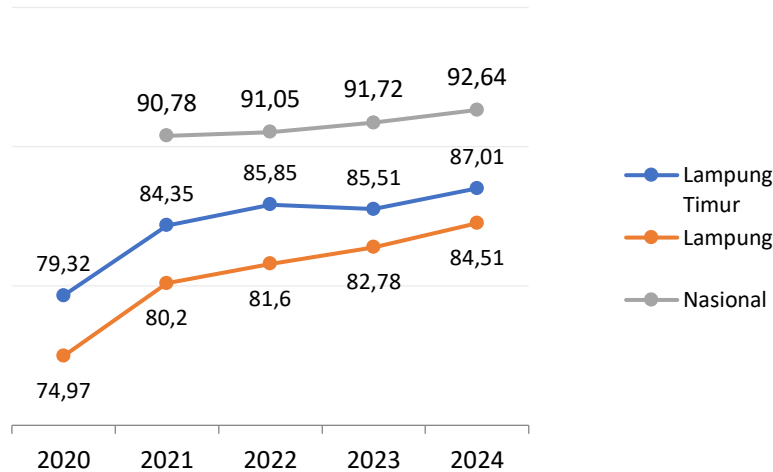
Grafik 2.53
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Terlindungi



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Lampung Timur mencapai 87,01 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 85,51 persen, capaian ini masih berada di bawah capaian Nasional yang sebesar 92,64 persen, namun sudah melampaui capaian Provinsi Lampung yang sebesar 84,51 persen.

Grafik 2.54
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak



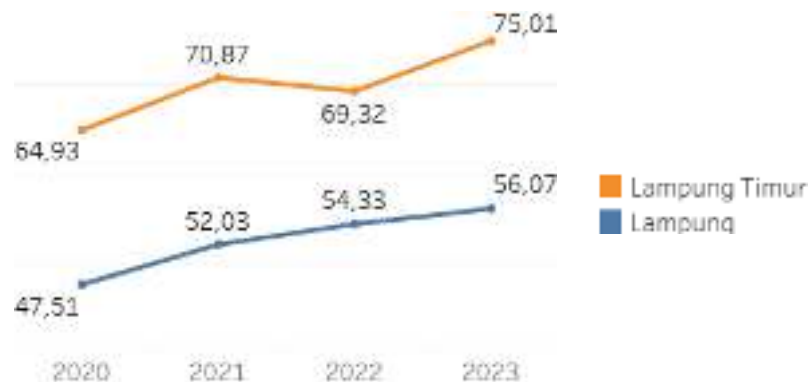
Sumber: BPS, 2025

Keterangan: Data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak Nasional tahun 2020 tidak tersedia

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 75,01 persen, meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 69,32 persen, capaian ini sudah melampaui capaian Provinsi Lampung yang sebesar 56,07 persen.



Grafik 2.55
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Aman



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

2.1.3.1.3.3 Sistem Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur, akses air limbah layak aman di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 88,55%, menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 89 persen. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, salah satu arahan untuk pengelolaan sistem jaringan sarana persampahan adalah penyusunan *masterplan* pengelolaan limbah perkotaan khususnya pada lokasi kawasan perkotaan dan kawasan industri. Berdasarkan dokumen RPPLH Tahun 2020, semua limbah yang ada pada akhirnya bermuara di pesisir laut, sehingga perairan di sekitaran muara merupakan penerima beban cemaran yang signifikan, yang akhirnya tersedimentasi dan mengalir ke perairan laut. Kondisi kawasan pesisir, tepatnya di sebelah selatan TNWK, di sepanjang garis pantai mulai dari Tanjung Penet hingga sampai ke muara sungai Way Sekampung telah terjadi degradasi lingkungan yang cukup parah, sehingga bentang alam yang semula berasal dari rawa-rawa dan hutan mangrove menjadi lahan pertanian padi dan sekarang menjadi tambak udang dan ikan, termasuk keberadaan pemukiman masyarakat. Jika tidak segera ditindaklanjuti dikhawatirkan akan terjadi peningkatan potensi bencana alam, terlebih dengan adanya perubahan iklim yang terjadi saat ini.

2.1.3.1.3.4 Penataan Ruang

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seperti yang tersebut pada pasal 3, bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, yang mana masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan kawasan lainnya.



Pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031. Terkait dengan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW, ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.21
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW

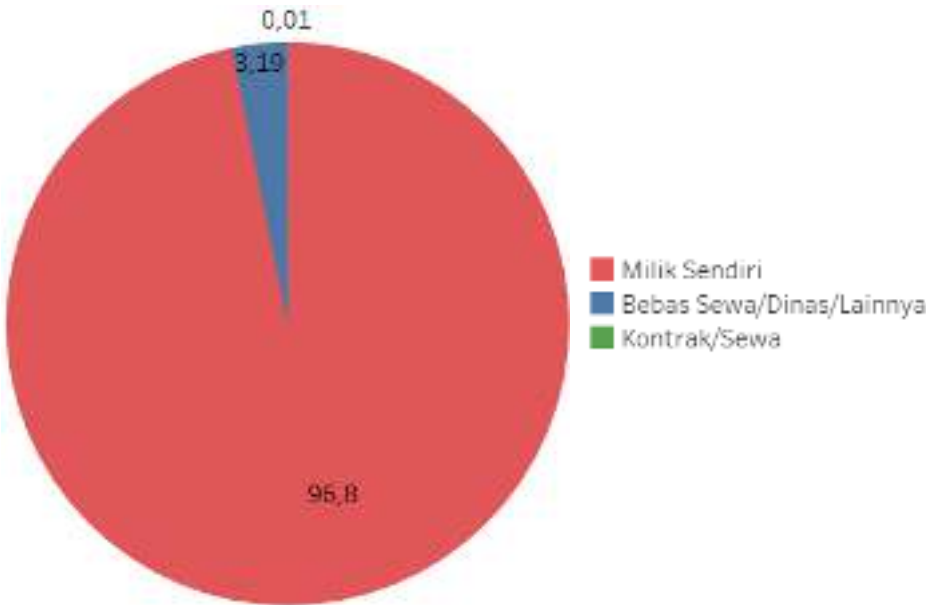
Tahun	Capaian (%)	Target RPJMD (%)	%
2020	54,84	60	91
2021	100	80	125
2022	74,19	55	135
2023	50,70	56	91
2024	11,79	58	20,33

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Jadi, selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah merupakan tempat awal pengembangan kehidupan. Berdasarkan status kepemilikan bangunan perumahan di Kabupaten Lampung Timur, 96,8 persen bangunan rumah merupakan bangunan milik masyarakat sendiri. Ini mencerminkan bahwa hampir seluruh masyarakat telah terpenuhi kebutuhan pokoknya terkait kebutuhan papan atau perumahan.

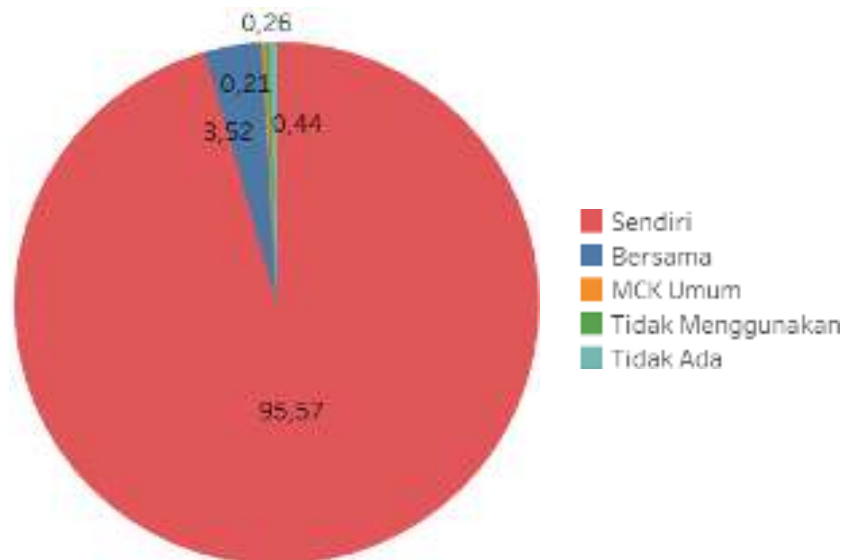
Grafik 2.56
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024



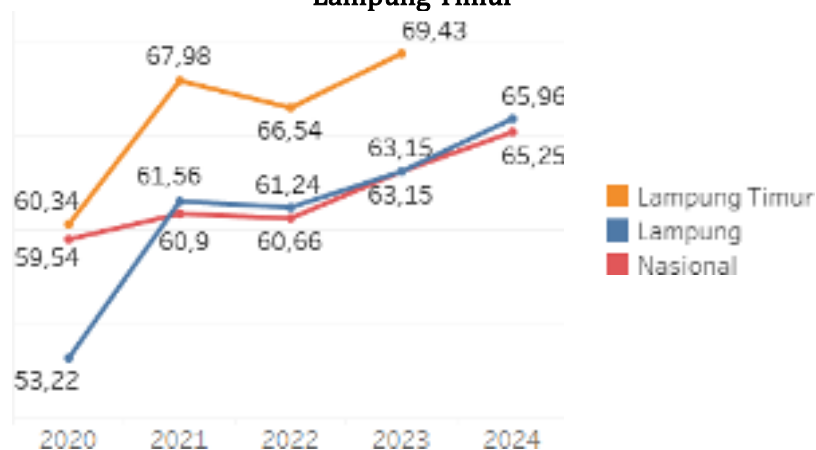
Grafik 2.57
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan penggunaan fasilitas tempat buang air besar, rumah tangga yang berfasilitas tempat buang air besar milik sendiri telah mencapai 95,57 persen pada tahun 2023, sedangkan 3,52 persen lainnya menggunakan fasilitas tempat buang air besar bersama, 0,21 persen menggunakan MCK umum, 0,26 persen tidak menggunakan, dan 0,21 persen tidak ada fasilitas tempat buang air besar.

Grafik 2.58
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Keterangan: Data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 belum tersedia

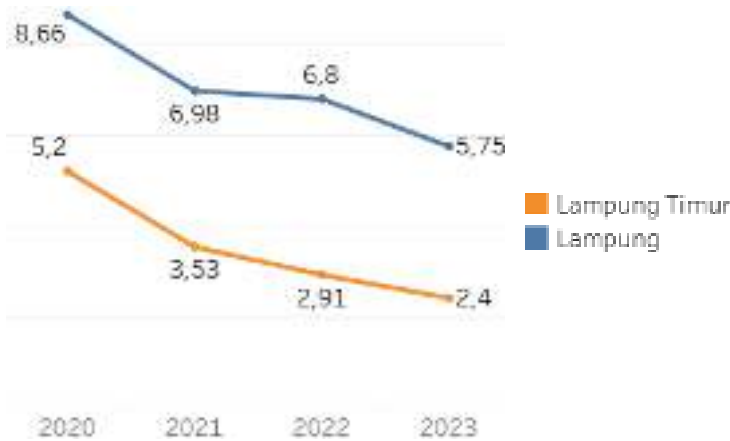
Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu tiga tahun terakhir relatif terus meningkat. Pada tahun 2023, rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak sebesar 69,43 persen, sudah melampaui capaian Provinsi Lampung dan Nasional yang sebesar 63,15 persen. Sesuai literatur, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni



apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita; memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap, dinding terluas berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu, dan lantai terluas berupa marmer/granit, kramik/parket/vinil/karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/papan/ semen/bata merah.

Perkembangan persentase rumah tangga yang tinggal di hunian kumuh di Kabupaten Lampung Timur pada periode 2020-2023 cenderung menurun hingga mencapai 2,4 persen pada tahun 2023, sudah lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Lampung yang sebesar 5,75 persen.

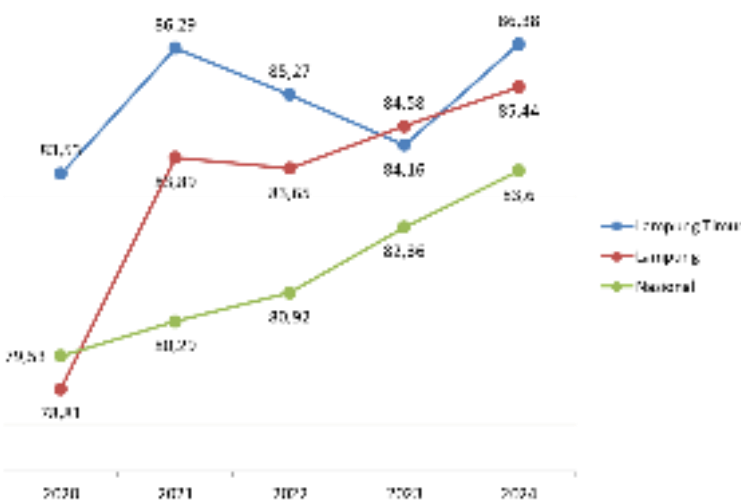
Grafik 2.59
Persentase Rumah Tangga yang Tinggal di Hunian Kumuh



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Lampung Timur pada periode 2020-2024 cenderung mengalami fluktuasi hingga mencapai 86,38 persen di tahun 2024, sudah melampaui capaian Provinsi Lampung (85,44 persen) dan Nasional (83,6 persen).

Grafik 2.60
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak



Sumber: BPS, 2025

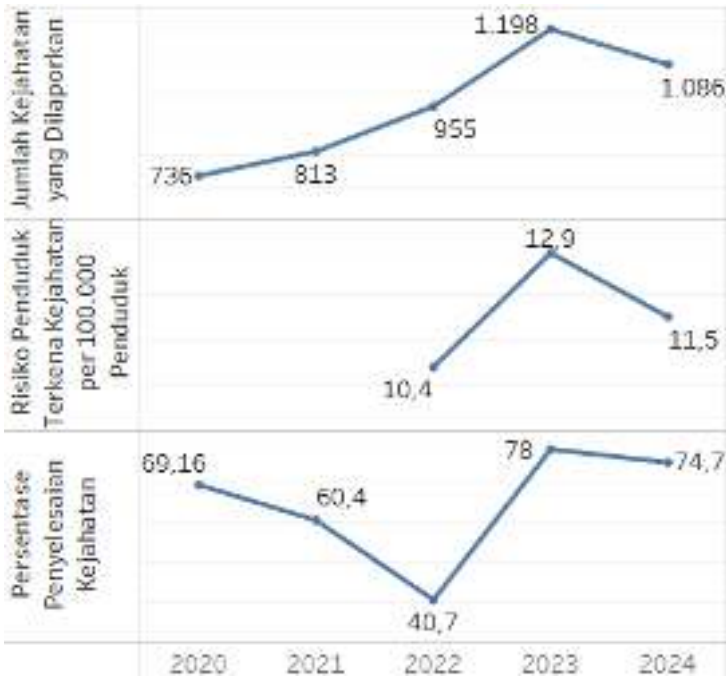


Keterangan: Data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 belum tersedia

2.1.3.1.5 Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui pembentukan anggota linmas di setiap desa, pembinaan dan pemberdayaan tokoh masyarakat melalui forum kebangsaan, fasilitasi forum kerukunan antar umat beragama, fasilitasi forum Forkopimcam, dan pembinaan terhadap ormas yang dilakukan setiap tahunnya. Jumlah kejahatan yang dilaporkan di Polres Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 1.086 kasus, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.198 kasus. Risiko penduduk terkena kejahatan juga mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu sebesar 11,5 per 100.000 penduduk. Meskipun begitu, persentase penyelesaian kejahatan menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 78 persen menjadi 74,7 persen. Di luar kasus lainnya, untuk jumlah tindak pidana yang terbesar berdasarkan data pada tahun 2024 adalah kasus pencurian dengan pemberatan yaitu sebanyak 279 kasus atau mencapai 25,64 persen dari total kasus yang ada.

Grafik 2.61
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, dan Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Resort Lampung Timur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025
Keterangan: Data risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk di Kabupaten Lampung Timur tahun 2020-2021 tidak tersedia





Tabel 2.22
Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Menurut Kepolisian Resort Lampung Timur
Tahun 2024

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Pidana	Proses Penyelesaian Tindak Pidana
Aniaya Berat	2	2
Curanmor	26	7
Korupsi	2	3
Lain-Lain Kejahatan/Pelanggaran	1	2
Pembakaran	1	0
Pembalakan Liar	0	0
Pembunuhan	5	5
Pemerasan/Premanisme	3	2
Penculikan	0	0
Pencurian dengan Kekerasan	35	22
Pencurian dengan Pemberatan	279	145
Pengerusakan	2	5
Penggelapan	44	22
Penipuan	73	67
Perdagangan Orang	1	0
Perjudian	21	9
Perkosaan	3	6
Pertanahan	3	5
Senjata Api/Bahan Peledak/Senjata Tajam	14	10
Teror Bom	0	0
Uang Palsu	0	0
Lainnya	573	501

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

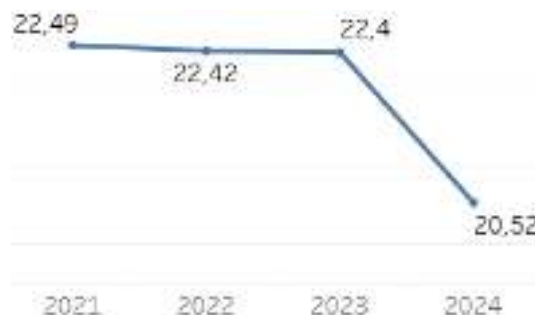
2.1.3.1.6 Sosial

Kesejahteraan sosial, dalam pengertian yang sangat luas, mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang layak ini tidak hanya diukur dari segi materi dan ekonomi, tetapi juga dari segi sosial, mental, dan spiritual. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif adalah individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Persentase PSKS Kewenangan Kabupaten yang aktif pada periode 2021-2024 konsisten dengan capaian 100 persen.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. PPKS membutuhkan pelayanan sosial karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Perkembangan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri di Kabupaten Lampung Timur cenderung menurun pada periode 2021-2024 hingga mencapai 20,52 persen pada tahun 2024.



Grafik 2.62
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, 2025

Jumlah penerima bantuan sosial berupa sembako di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 73.910 penerima, sedangkan Program Keluarga Harapan yang terrealisasi mencapai 43.662.

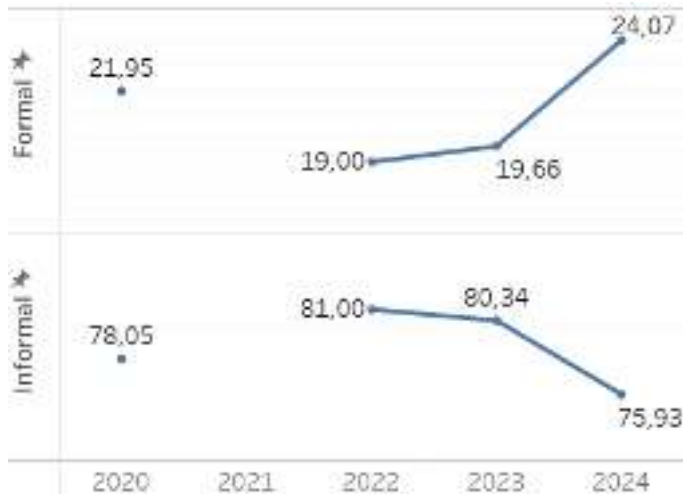
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Ketenagakerjaan

Angkatan kerja di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar berpendidikan setara Sekolah Menengah Atas, mencapai 34,5 persen di tahun 2024. Angkatan kerja yang berpendidikan perguruan tinggi merupakan angkatan kerja yang paling sedikit, hanya sebesar 7,57 persen. Struktur lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu didominasi oleh kategori pertanian. Persentase penduduk bekerja di pertanian mencapai 49,24 persen. Persentase terbesar berikutnya adalah kategori jasa sebesar 37,45 persen dan kategori manufaktur sebesar 13,31 persen.

Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga dikategorikan sebagai kegiatan informal. Pada tahun 2023, penduduk yang bekerja di kegiatan informal mencapai 80,34 persen sebelum terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 75,93 persen. Sedangkan persentase penduduk yang bekerja di kegiatan formal meningkat dari tahun 2023 sebesar 19,66 persen menjadi 24,07 persen pada tahun 2024.

Grafik 2.63
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur; 2025 (diolah)
Keterangan: Data persentase penduduk bekerja menurut kegiatan formal/informal tahun 2021 tidak tersedia

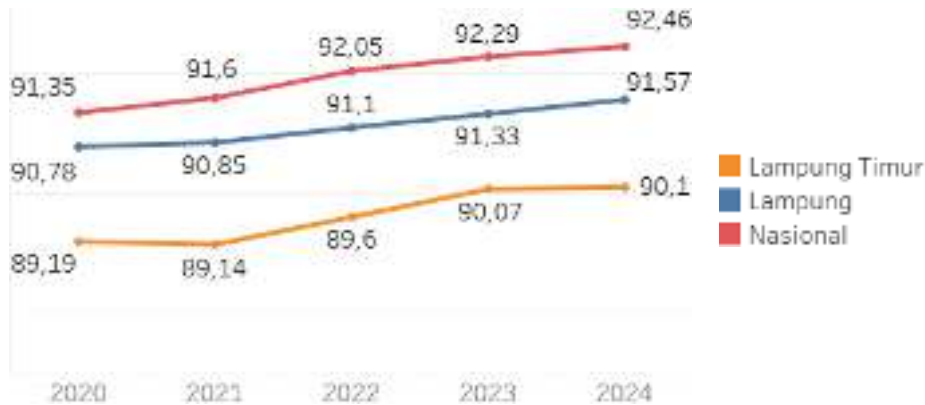
Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur, pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2024 mencapai 84,07 persen. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 79,67 persen.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.3.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

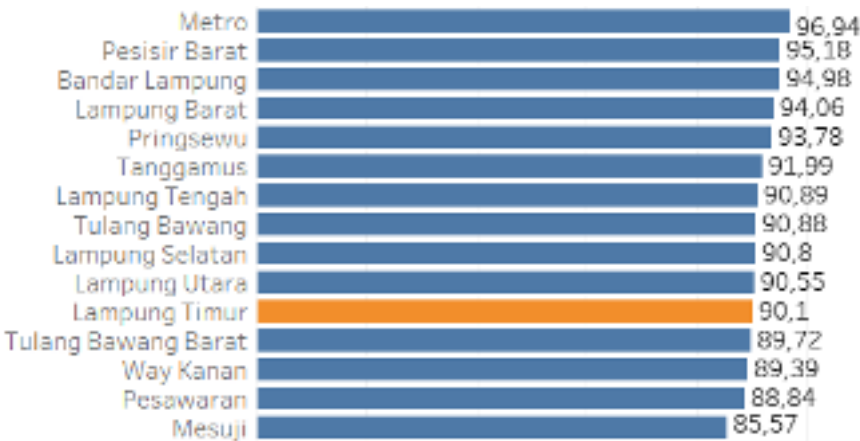
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Perkembangan IPG Kabupaten Lampung Timur pada periode 2020-2024 cenderung meningkat. IPG Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 mencapai 90,1, masih berada di bawah IPG Provinsi dan Nasional yang masing-masing sebesar 91,57 dan 92,46. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-5 dengan IPG terendah.

Grafik 2.64
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS, 2025

Grafik 2.65
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.3.2.2.2 Indeks Kualitas Keluarga

Peningkatan kualitas keluarga sangat penting dilakukan demi mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Penerapan kesetaraan gender dalam keluarga dengan berbagi peran dan menghargai satu sama lain dapat membuat keluarga lebih harmonis dan bahagia. Kualitas keluarga yang baik juga lebih memungkinkan anak-anak untuk tumbuh sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik sehingga membantu anak-anak untuk mencapai potensi mereka dan menjadi kontributor yang lebih baik bagi masyarakat. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dibentuk oleh lima dimensi yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya.

IKK Kabupaten Lampung Timur mencapai 74,7 persen pada tahun 2021, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 71,9 persen. Capaian IKK Kabupaten Lampung Timur sudah melampaui capaian Provinsi Lampung dan Nasional pada tahun 2021.

2.1.3.2.2.3 Desa Ramah Anak

Desa Ramah Anak adalah konsep yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak-anak di tingkat desa atau komunitas. Inisiatif Desa Ramah Anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memenuhi kebutuhan mereka, dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tumbuh dan



berkembang secara optimal. Berikut adalah beberapa karakteristik dan komponen penting dari Desa Ramah Anak:

- 1) Partisipasi Anak: Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pendapat dan kebutuhan anak-anak harus didengarkan dan dihormati dalam proses pembuatan kebijakan dan perencanaan di tingkat desa.
- 2) Lingkungan Fisik yang Aman: Desa Ramah Anak harus menyediakan lingkungan fisik yang aman bagi anak-anak. Ini meliputi infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang aman, taman bermain, sekolah yang layak, dan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai.
- 3) Pendidikan Berkualitas: Desa Ramah Anak harus menyediakan akses pendidikan berkualitas yang setara bagi semua anak. Ini meliputi adanya sekolah yang memadai, guru yang terlatih, dan program pendidikan yang inklusif, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka.
- 4) Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan: Desa Ramah Anak harus menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi anak-anak. Ini termasuk akses yang mudah ke fasilitas kesehatan, pemeriksaan rutin, imunisasi, pelayanan kesehatan reproduksi, dan layanan psikososial yang mendukung kesejahteraan emosional anak-anak.
- 5) Perlindungan dan Keadilan: Desa Ramah Anak harus memiliki sistem perlindungan anak yang efektif. Hal ini mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, perlindungan terhadap eksploitasi, pekerja anak, dan anak jalanan, serta mendukung korban kekerasan dalam pemulihan mereka.
- 6) Pemberdayaan Masyarakat: Desa Ramah Anak mendorong pemberdayaan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Masyarakat harus terlibat dalam mendukung anak-anak, termasuk dalam pengambilan keputusan, memberikan dukungan sosial, dan melibatkan diri dalam kegiatan dan program yang mendukung anak-anak.
- 7) Akses Informasi dan Komunikasi: Desa Ramah Anak harus memastikan akses anak-anak terhadap informasi dan komunikasi yang penting bagi perkembangan mereka. Ini melibatkan akses ke teknologi informasi, media yang bermanfaat, dan program literasi media yang mendukung pemahaman anak-anak tentang dunia yang mereka hadapi.

Sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berkomitmen untuk meningkatkan jumlah Desa Ramah Anak, dan pada tahun 2021, 264 desa atau seluruh desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur telah masuk dalam kategori sebagai Desa Layak Anak, sebagaimana ditampilkan pada grafik di atas. Sejak tahun 2022 hingga tahun 2024, Kabupaten Lampung Timur telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPPA RI dengan tingkat nindya.

2.1.3.2.2.4 Ketidacukupan Konsumsi Pangan

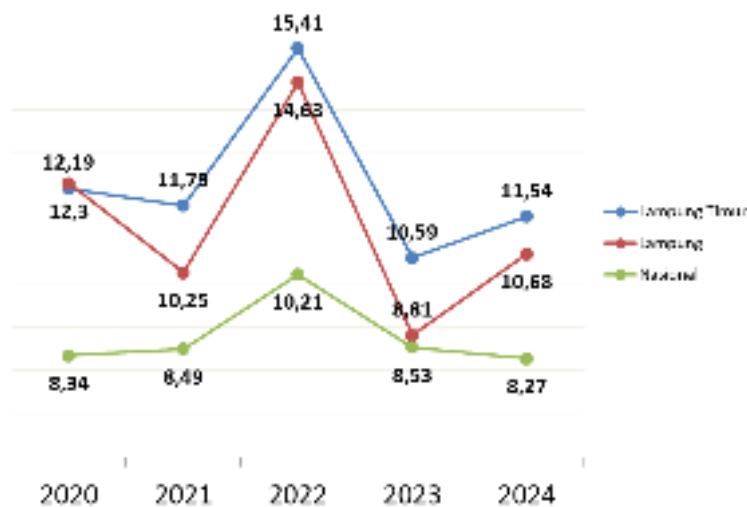
Salah satu tujuan SDGs dalam hal hak atas pangan adalah tujuan mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan, dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidacukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari





waktu ke waktu adalah *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Capaian PoU Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 sebesar 11,54 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 10,59 persen pada tahun 2023. Capaian Kabupaten Lampung Timur masih berada di atas capaian Provinsi Lampung dan Nasional.

Grafik 2.66
Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: DPPPAPKB Kabupaten Lampung Timur, 2024

Berdasarkan data peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 terdapat satu desa kerentanan pangan prioritas 2 yaitu desa wana kecamatan Melinting. Dukungan kegiatan penurunan PoU dikabupaten Lampung Timur pada kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota melalui pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan gerakan pangan murah (GPM) yang difokuskan pada lokasi yang termasuk dalam wilayah stunting maupun wilayah dalam kategori kemiskinan Ekstrim.

2.1.3.2.2.5 Penanganan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

Penanganan pada kekerasan terhadap anak dan perempuan sangat penting untuk melindungi dan mendukung korban serta mencegah kekerasan tersebut terjadi. Penanganan pada korban kekerasan anak dan perempuan mencakup serangkaian langkah dan layanan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan kepada korban. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam penanganan korban kekerasan anak dan perempuan:

- 1) Keamanan dan Perlindungan: Prioritas utama adalah memberikan lingkungan yang aman bagi korban kekerasan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi pemindahan ke

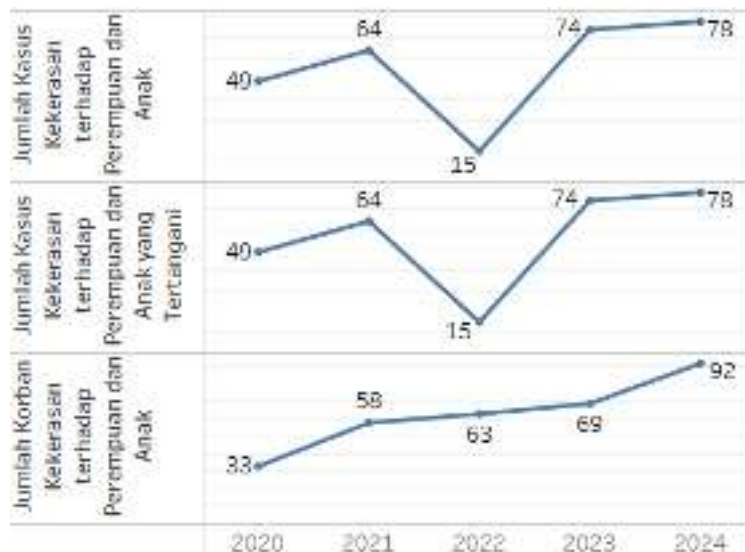


tempat perlindungan sementara atau rumah aman, pengawalan keamanan, atau perlindungan jarak jauh melalui telepon atau teknologi lainnya.

- 2) Pemeriksaan Medis: Korban kekerasan perlu menjalani pemeriksaan medis untuk mengidentifikasi cedera fisik, mengumpulkan bukti forensik, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Pemeriksaan medis ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dalam penanganan korban kekerasan.
- 3) Bantuan Psikososial dan Konseling: Korban kekerasan anak dan perempuan sering mengalami dampak psikologis yang serius. Dalam penanganan mereka, penting untuk menyediakan dukungan psikososial dan konseling oleh profesional terlatih yang dapat membantu korban memulihkan diri, mengelola trauma, dan membangun kembali kepercayaan diri.
- 4) Dukungan Hukum: Korban kekerasan perlu mendapatkan akses ke layanan hukum yang tepat. Ini mencakup bantuan hukum dalam melaporkan kekerasan, mendapatkan perintah perlindungan, dan menghadiri proses peradilan jika diperlukan. Korban harus diberikan informasi tentang hak-hak mereka dan didampingi oleh advokat atau pendamping hukum yang berpengalaman.
- 5) Pendidikan dan Keterampilan: Korban kekerasan anak dan perempuan perlu mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang dapat membantu mereka pulih dan menjadi mandiri. Ini meliputi program pendidikan lanjutan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk pencarian pekerjaan sehingga mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik.
- 6) Pendampingan dan *Follow-up*: Korban kekerasan membutuhkan pendampingan jangka panjang dan *follow-up* untuk memastikan pemulihan mereka yang berkelanjutan. Tim yang terlatih, seperti pekerja sosial atau konselor, dapat memberikan dukungan, memantau perkembangan, dan membantu korban mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam proses pemulihan.
- 7) Pendidikan dan Pencegahan: Selain penanganan korban, penting juga untuk melibatkan pendidikan dan pencegahan agar kekerasan tidak terjadi lagi. Ini meliputi program pendidikan di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran, mempromosikan kesetaraan gender, mengajarkan keterampilan pengelolaan konflik, dan mengubah sikap yang mendukung kekerasan.

Berdasarkan grafik di bawah, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024 mencapai 78 kasus, jumlah ini meningkat dibandingkan dari capaian tahun 2023 yaitu dengan bertambah 4 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani sama dengan jumlah kasus yang dilaporkan, sehingga dapat dikatakan bahwa semua kasus tersebut berhasil tertangani. Lebih lanjut, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2024, jumlah korban mencapai 92 orang. Peningkatan ini memerlukan kajian yang cukup serius terkait penyebabnya yang kemudian untuk dapat dilakukan intervensi yang tepat.

Grafik 2.67
Jumlah Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Simfoni PPA Kementerian PPA RI, 2025

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Indeks Ketahanan Pangan disusun berdasarkan sembilan indikator yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur pada grafik di bawah menunjukkan terpenuhinya pangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2024 mencapai 85,22.

Grafik 2.68
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

2.1.3.2.4 Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pertanahan yang menyebutkan bahwa ada 9 (sembilan) Urusan Pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut adalah izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa tanah garapan, ganti rugi, penetapan subyek obyek redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah.

Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Berdasarkan data, luas lahan bersertifikat di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 mencapai 1.678.959 meter persegi atau mencapai 82,62%. Untuk jumlah kasus pertanahan yang diselesaikan pada tahun 2021 adalah sebanyak 4 kasus pertanahan, naik satu kasus bila dibandingkan tahun 2020 sebanyak 3 kasus.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

2.1.3.2.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjelaskan bahwa IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Nilai IKLH bersifat komparatif yang memiliki makna bahwa nilai satu daerah relatif terhadap daerah lainnya.

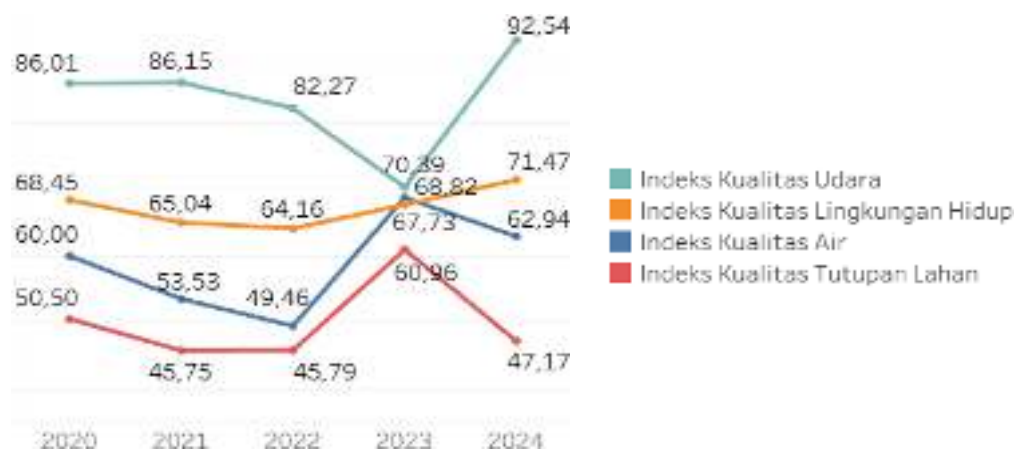
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan pada tahun 2020-2022 sebelum kembali meningkat di tahun 2023-2024 hingga mencapai 71,47. Berdasarkan capaian tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup





Kabupaten Lampung Timur jika diklasifikasikan ke dalam kategori baik, kategori tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada kategori sedang.

Grafik 2.69
Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DLHPKPP Kabupaten Lampung Timur, 2025

Indeks Kualitas Udara secara konsisten meningkat pada tahun 2019-2021, sebelum turun menjadi 70,39 di tahun 2023. Pada capaian tahun 2024 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan menjadi 92,54, diklasifikasikan ke dalam kategori baik

Indeks Kualitas Air menurun secara signifikan pada tahun 2019-2022 sebelum kembali meningkat menjadi 68,82 di tahun 2023. Indeks Kualitas Air Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 62,94 namun masih dapat mempertahankan Lampung Timur ke dalam kategori sedang.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan menurun pada tahun 2019-2021 dan kembali meningkat di tahun 2022-2023 hingga mencapai 60,96. Pada tahun 2024 Indeks Kualitas Tutupan Lahan kembali mengalami penurunan menjadi 47,17. Penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dipengaruhi oleh fungsi lahan dan pengurangan vegetasi pantai yang disebabkan oleh perubahan alam yaitu erosi dan abrasi.

2.1.3.2.5.2 Emisi Gas Rumah Kaca

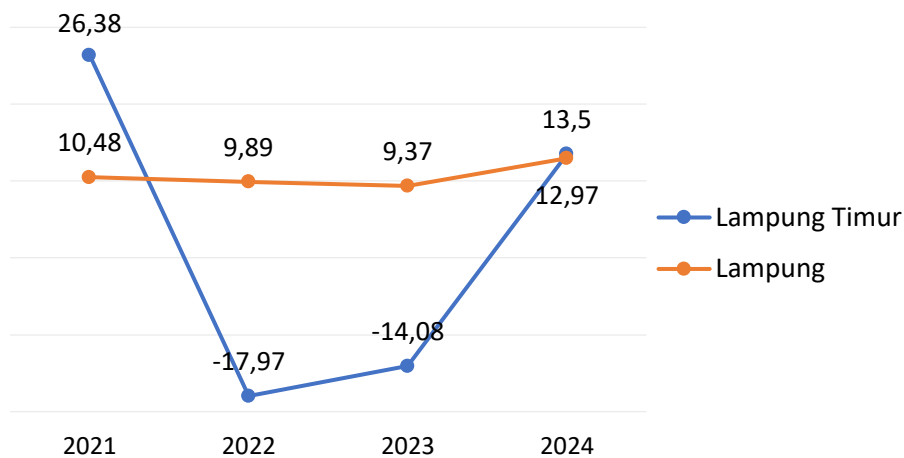
Merujuk data Pemerintah Provinsi Lampung, perubahan iklim merupakan isu yang sedang gencar untuk diperjuangkan bersama di seluruh negara. Perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global/*global warming* yang terjadi karena konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer semakin tinggi. Emisi GRK menyebabkan *global warming* dan mendorong terjadinya perubahan-perubahan iklim sehingga membawa banyak dampak negatif yang ditandai dengan naiknya suhu permukaan bumi. Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketidakseimbangan pada alam dan ekosistem.

Penurunan Emisi GRK Kabupaten Lampung Timur mencapai 13,5 persen pada tahun 2022, mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai -14,08



persen. Capaian penurunan emisi GRK Kabupaten Lampung Timur sudah melampaui capaian Provinsi Lampung yang sebesar 12,97 persen.

Grafik 2.70
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung



Sumber: DLHPKPP Kabupaten Lampung Timur, 2024

Komitmen penurunan emisi GRK sejalan dengan dengan tujuan SDGs yang juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung. Melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 juta ton CO₂e atau sebesar 38,59 % dari total Business As Usual/BAU Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 juta ton CO₂e.

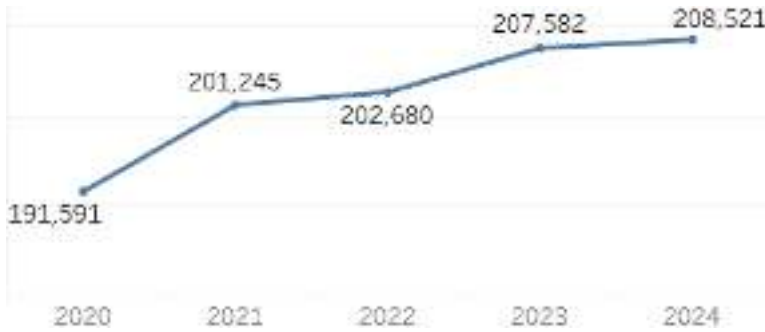
Terbaru, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melakukan Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) dan telah menentukan estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 8,40% berdasarkan Business As Usual (BAU) baseline tahun 2030. Dengan target penurunan sebesar 8,40% pada tahun 2030, maka besar emisi yang direncanakan dapat diturunkan pada tahun 2030 yakni sebesar 2.320.958,83 ton CO₂e dari skenario BAU baseline 27.629.786,24 ton CO₂e.

2.1.3.2.5.3 Kondisi Persampahan

Meningkatnya timbunan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas penduduk dari waktu ke waktu menyebabkan timbunan sampah banyak yang belum terkelola. Saat ini, pengelolaan sampah masih sebatas pada penanganan konvensional yaitu sampah ditaruh di tempat terbuka untuk dibiarkan membusuk dengan sendirinya atau dengan pola angkut-kumpul-buang. Saat ini operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Timur masih belum optimal. Kabupaten Lampung Timur saat ini memiliki 1 TPA yang kapasitasnya nantinya tidak akan memenuhi daya tampung timbunan sampah yang terus meningkat. Kondisi ini tentunya dapat memperburuk kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Timur, jika tidak segera dilakukan penanganan yang baik, maka sampah akan menjadi masalah yang serius di kemudian hari.



Grafik 2.71
Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Lampung Timur (ton)



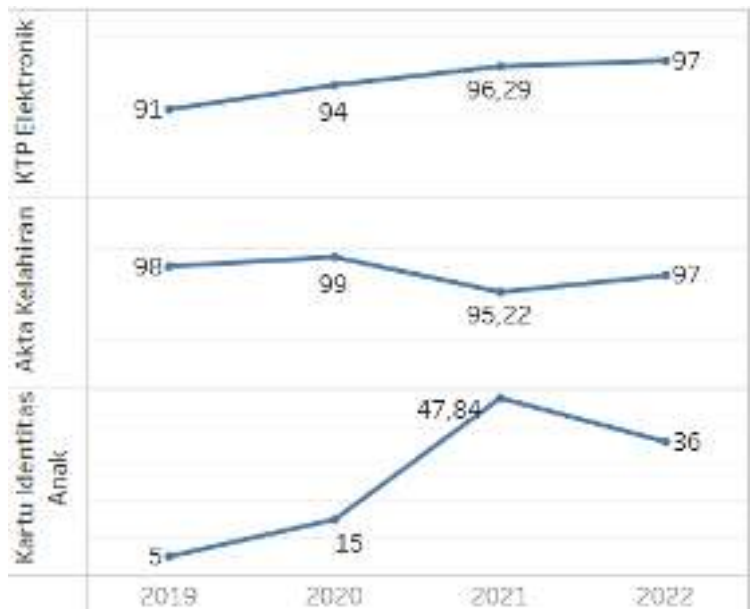
Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025

Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Lampung Timur terus meningkat di setiap tahunnya hingga mencapai 208.521.2 ton pada tahun 2024, jumlah timbulan sampah ini meningkat hampir 1000 ton dari timbulan sampah di 2023 yang mencapai 207.581,7 ton. Sarana dan prasarana persampahan yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 terdiri dari 2 bentor, 1 *excavator*, 8 *dump truck*, dan 16 bak sampah.

2.1.3.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2022 persentase penduduk yang memiliki KTP dan akta kelahiran telah mencapai 97 persen. Sedangkan capaian Kartu Identitas Anak sebesar 36 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 47,84 persen.

Grafik 2.72
Capaian Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

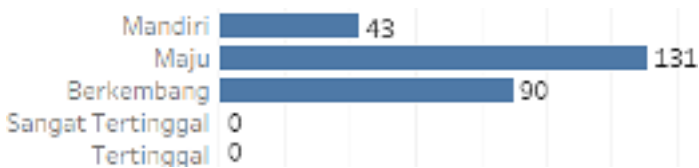




program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Terkait dengan Indeks Desa Membangun, pada tahun 2023, dapat dikatakan desa di Lampung Timur berada dalam status berkembang. Ini merupakan sebuah peningkatan, setelah sebelumnya pada tahun 2022 terdapat 4 desa yang masih berstatus sebagai desa tertinggal, yaitu di 2 desa di Kecamatan Way Jepara, dan 2 desa di wilayah Kecamatan Marga Sekampung.

Desa berstatus mandiri di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 43 desa, meningkat sebanyak 30 desa dari tahun sebelumnya. Sebagian besar desa di Kabupaten Lampung Timur berstatus desa maju, meningkat dari tahun sebelumnya yang didominasi desa berkembang. Desa maju di Kabupaten Lampung Timur mencapai 41,62 persen, atau sebanyak 131 desa. Disusul oleh desa yang berstatus desa berkembang yaitu mencapai 34,1 persen, atau mencapai 90 desa.

Grafik 2.73
Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

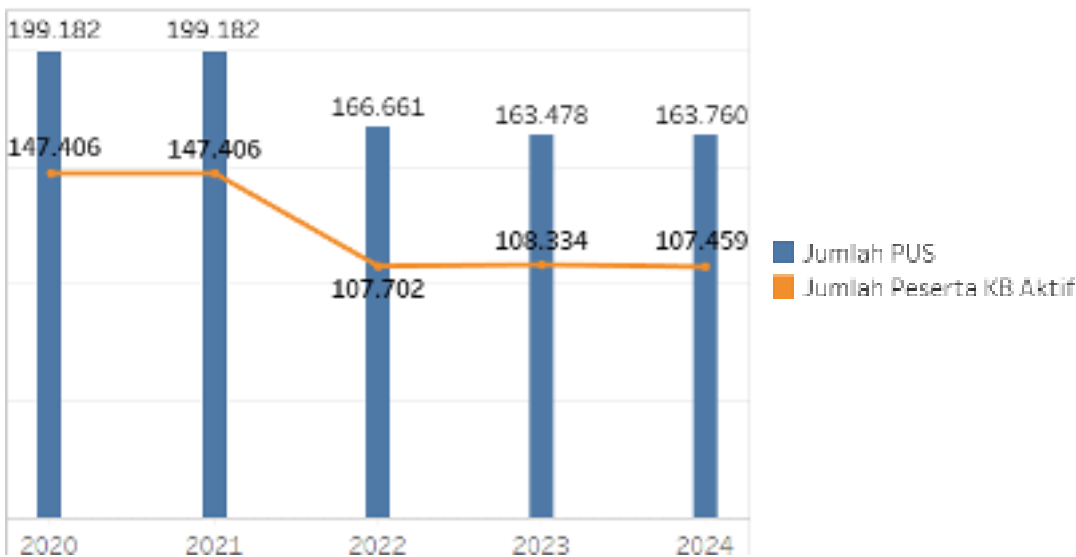


Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2025

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 163.760 pasangan. Dari jumlah pasangan PUS tersebut, jumlah peserta KB aktif baru mencapai 65,62 persen. Jumlah PUS dan jumlah peserta KB aktif dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.74
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Kabupaten Lampung Timur

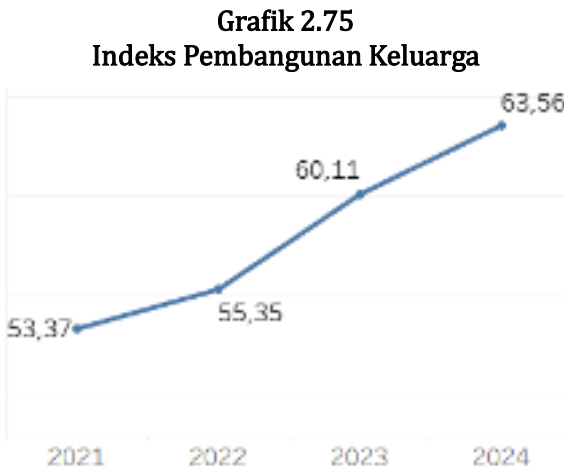




Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

PLKB/PKB hanya berjumlah sebanyak 71 orang untuk melayani 264 desa di wilayah Kabupaten Lampung Timur, jika dirasiokan petugas lapangan KB/penyuluh (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan mencapai 1:3,71 yang artinya setiap 1 petugas melayan 3-4 desa.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran kualitas keluarga yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga. iBangga bertujuan untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan, memberikan gambaran pembangunan keluarga di Indonesia, dan membantu merumuskan kebijakan/kegiatan/program pembangunan keluarga. iBangga Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 63,56, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 60,11.



Sumber: Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk, 2025

2.1.3.2.9 Perhubungan

Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, Pemerintah Kabupaten dituntut senantiasa memperhatikan 3 hal utama, yakni: keselamatan, kenyamanan dan keamanan dari berbagai moda transportasi, baik pada transportasi jalan, kereta api, angkutan penyeberangan dan transportasi laut, meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Terkait dengan hal tersebut, ketersediaan rambu-rambu menjadi sangat penting dalam rangka menunjang keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat.

Tabel 2.23
Jumlah Rambu Jalan Raya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Jenis Rambu	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Purbolinggo	Rambu Petunjuk	17	2	6	25
		Rambu Peringatan	44	7	6	57



No.	Kecamatan	Jenis Rambu	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
		Rambu larangan	3	2	2	7
2.	Batanghari Nuban	Rambu Petunjuk	1	-	-	1
		Rambu Peringatan	22	-	-	22
		Rambu larangan	-	-	-	-
3.	Raman Utara	Rambu Petunjuk	3	-	-	3
		Rambu Peringatan	23	-	-	23
		Rambu larangan	2	-	-	2
4.	Bumi Agung	Rambu Petunjuk	11	4	6	22
		Rambu Peringatan	-	-	1	1
		Rambu larangan	-	-	-	-
5.	Sekampung	Rambu Petunjuk	2	10	2	14
		Rambu Peringatan	2	-	-	2
		Rambu larangan	1	-	-	1
6.	Bandar Sribawono	Rambu Petunjuk	1	-	-	1
		Rambu Peringatan	4	-	-	4
		Rambu larangan	-	-	-	-
7.	Melinting	Rambu Petunjuk	7	-	3	10
		Rambu Peringatan	23	1	-	24
		Rambu larangan	-	-	-	-
8.	Braja Selehah	Rambu Petunjuk	-	38	-	38
		Rambu Peringatan	-	-	-	-
		Rambu larangan	-	-	-	-
9.	Labuhan Ratu	Rambu Petunjuk	-	41	-	41
		Rambu Peringatan	-	-	-	-
		Rambu larangan	-	-	-	-
10.	Way Jepara	Rambu Petunjuk	14	-	-	14
		Rambu Peringatan	-	-	-	-
		Rambu larangan	-	-	-	-
11.	Batang Hari	Rambu Petunjuk				
		Rambu Peringatan				
		Rambu larangan				
12.	Metro Kibang	Rambu Petunjuk	20	-	-	20
		Rambu Peringatan	-	-	-	-
		Rambu larangan	-	-	-	-
13.	Pekalongan	Rambu Petunjuk	7	5	5	17
		Rambu Peringatan	5	3	1	9
		Rambu larangan	-	-	-	-
15.	Margatiga	Rambu Petunjuk	5	3	3	11
		Rambu Peringatan	-	-	1	1
		Rambu larangan	1	-	2	3
16.	Waway Karya	Rambu Petunjuk				
		Rambu Peringatan				
		Rambu larangan				
17.	Marga Sekampung	Rambu Petunjuk				
		Rambu Peringatan				
		Rambu larangan				
18.	Labuhan Maringgai	Rambu Petunjuk	3	2	2	7
		Rambu Peringatan	2	-	-	2
		Rambu larangan	-	-	-	-
19.	Mataram Baru	Rambu Petunjuk				
		Rambu Peringatan				
		Rambu larangan				
20.	Pasir Sakti	Rambu Petunjuk	4	-	1	5
		Rambu Peringatan	1	-	3	4
		Rambu larangan	-	-	1	1
21.	Jabung	Rambu Petunjuk				
		Rambu Peringatan				
		Rambu larangan				
22.	Sekampung Udik	Rambu Petunjuk				
		Rambu Peringatan				
		Rambu larangan				

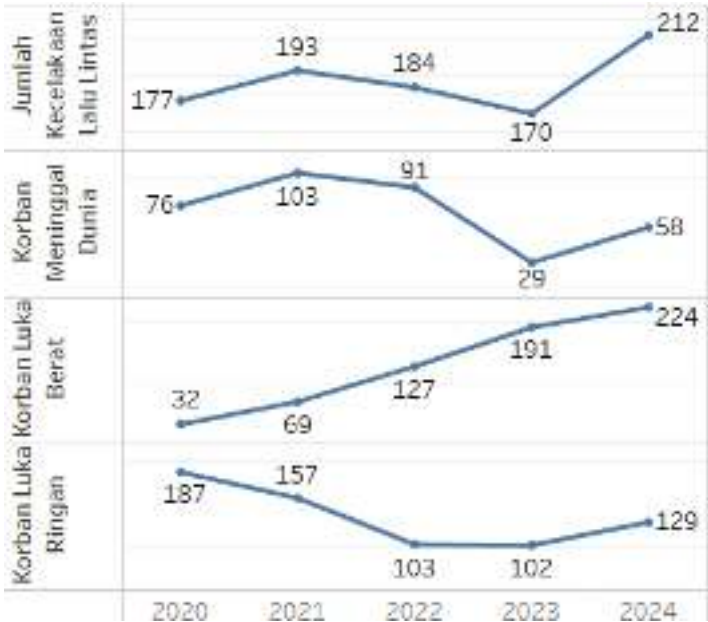


No.	Kecamatan	Jenis Rambu	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
23.	Gunung Pelindung	Rambu Petunjuk	1	2	2	5
		Rambu Peringatan	4	-	-	4
		Rambu larangan	-	-	-	-
24.	Sukadana	Rambu Petunjuk	4	4	9	17
		Rambu Peringatan	-	-	-	-
		Rambu larangan	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Berdasarkan data Polres Lampung Timur, jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan kepolisian sektor dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagaimana ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.76
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Jumlah Korban Kecelakaan
Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi guna operasionalisasi e-Gov dan publikasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah tersedia selama ini, yaitu





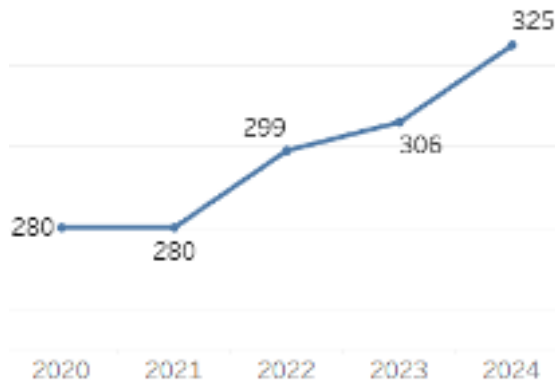
www.lampungtimurkab.go.id yang memuat ragam informasi terkait Kabupaten Lampung Timur dan dapat secara mudah diakses.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada tahun 2024, berdasarkan hasil evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencapai 2,84 meningkat dari skor 2023 yang sebesar 2,27. Skor tersebut mendapatkan predikat baik.

Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di instansi pemerintah seluruh Indonesia (termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Timur).

Untuk prasarana komunikasi, khususnya ketersediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2024 sebanyak 325, berikut gambaran jumlah data BTS 5 tahun terakhir, pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.77
Jumlah *Base Transceiver Station* di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur; 2025

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Kegiatan EPSS mencakup penilaian kegiatan statistik sektoral di instansi pemerintahan daerah yang diselenggarakan selama dua tahun terakhir. Untuk Pelaksanaan EPSS tahun 2024 dipilih dua sampel yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur





kembali mendapatkan penghargaan oleh Badan Pusat Statistik RI dalam EPSS Tahun 2024 dengan indeks 2,78 yang masuk dalam kategori "Baik". Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu dari 3 kabupaten di Provinsi Lampung yang mendapatkan penghargaan ini, yang diserahkan oleh BPS RI kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur selaku Walidata.

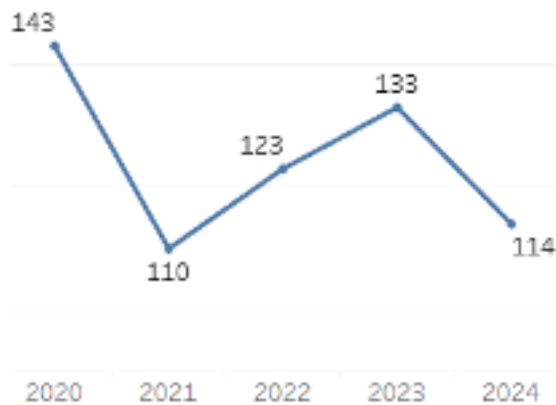
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Telah disahkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Lampung Timur sebagai dasar hukum penyelenggaraan SDI Kabupaten Lampung Timur. Telah disahkan juga Surat Keputusan Bupati Nomor B.118/21-SK/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lampung Timur yang menjabarkan mengenai tugas dan fungsi Pembina Data (BPS), Walidata Utama (KOMINFO), Walidata Pendukung (BAPPEDA) dan produsen Data (OPD terkait).

Alamat domain Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Timur adalah <http://satudata.lampungtimurkab.go.id/>. Portal SDI Kabupaten Lampung Timur akan dilakukan pengembangan berupa peningkatan beberapa fitur serta penambahan data dan metadata statistik sektoral. Status simpul jaringan Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 dengan status koneksi geoportal nasional terhubung dengan status Simpul Jaringan Nasional Berkembang disimbolkan dengan gradasi warna *orange*.

2.1.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu lima tahun terakhir berkecenderungan menurun, setelah mencapai 143 koperasi aktif pada tahun 2020, kemudian turun menjadi 114 unit koperasi aktif pada tahun 2024 yang tersebar di 24 kecamatan.

Grafik 2.78
Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Lampung Timur

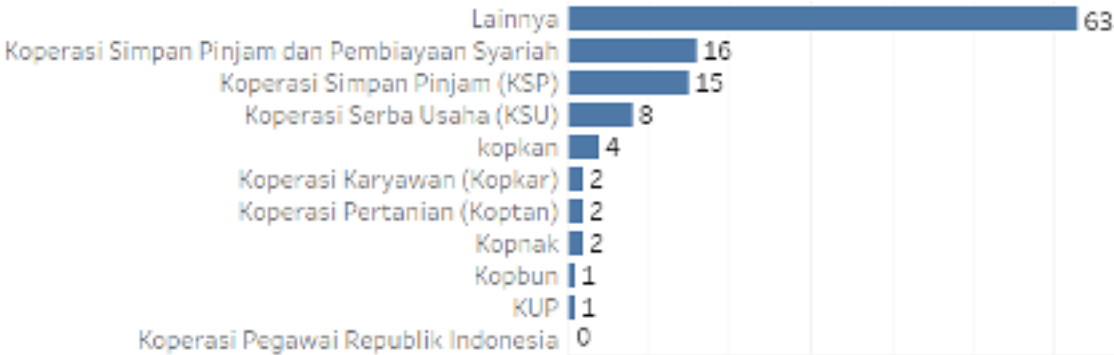


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur; 2025

Grafik 2.79



Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Pada tahun 2024, unit usaha terbesar koperasi adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebanyak 16 unit koperasi yang tersebar di 10 kecamatan, disusul oleh koperasi simpan pinjam sebanyak 15 unit koperasi yang tersebar di 10 kecamatan.

Tabel 2.24
Jumlah Omset Usaha Koperasi Menurut Kelompok Koperasi (Rupiah)

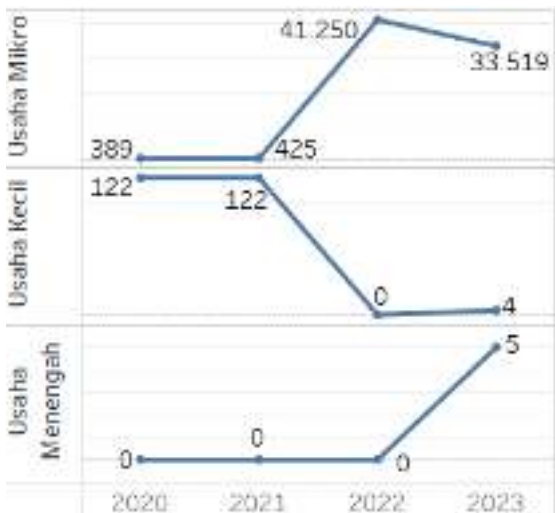
Kelompok Koperasi	2020	2021	2022	2023	2024
Koperasi Unit Desa (KUD)	863.547.043	125.600.000	455.750.000	233.530.000	233.530.000
Koperasi Pegawai Republik Indonesia	202.160.186	0	455.750.000	202.160.186	202.160.186
Koperasi Serba Usaha (KSU)	9.830.286.360	9.812.325.090	9.812.325.190	10.853.269.090	12.450.971.065
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	12.248.157.521	12.872.712.937	18.238.190.491	14.320.416.41	15.142.897.417
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	15.639.386.178	11.175.624.146	44.563.068.04	18.247.932.326	16.451.620.477
Koperasi Pertanian (Koptan)	0	0	239.286.700	8.621.303.305	8.382.016.605
Koperasi Pesantren (Koppontren)	0	0	0	0	0
Koperasi Wanita (Kopwan)	1.717.270.000	644.560.950	1.540.630.00	1.601.598.000	1.718.197.381
Koperasi Lainnya	734.807.817	1.765.852.517	2.976.919.017	8.393.284.090	7.350.568.003
Jumlah	41.235.615.105	36.396.675.640	32.178.221.398	62.473.493.414	61.931.961.134

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025



Terkait dengan omset usaha koperasi di Kabupaten Lampung Timur, total omset koperasi pada tahun 2024 mencapai 61,93 miliar rupiah, unit usaha koperasi dengan omset terbesar adalah unit usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yaitu mencapai 16,45 miliar rupiah.

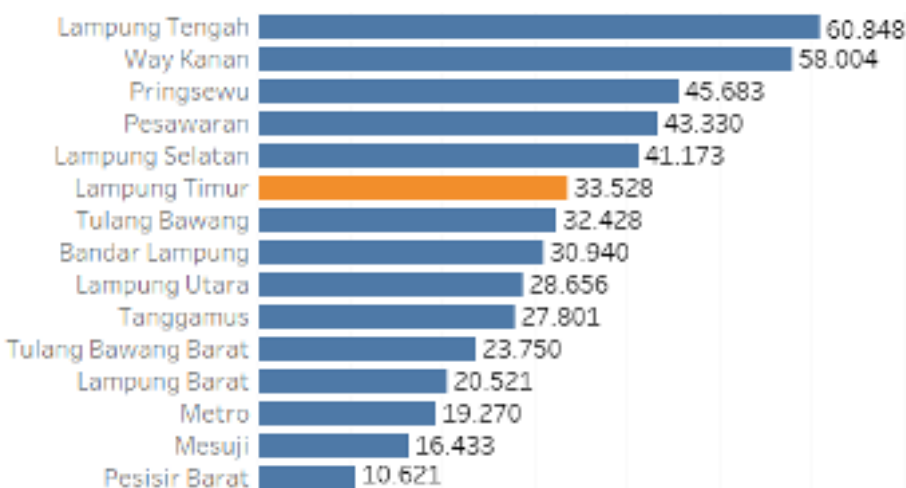
Grafik 2.80
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 33.528 unit usaha, atau terbesar ke-6 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 41.250 unit usaha, akibat terdampak pandemi COVID-19. Usaha mikro dan kecil di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar memasarkan produknya untuk konsumen dalam kabupaten, sebagian kecil untuk konsumen luar kabupaten dan luar Provinsi Lampung.

Grafik 2.81
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Realisasi nilai investasi daerah di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai Rp 463,85 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 119,62 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun 2022 dan melonjak tinggi di tahun 2023.





Grafik 2.82
Nilai Investasi dan Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Lampung Timur, 2025
Keterangan: Data persentase peningkatan investasi tahun 2020 tidak tersedia

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Fasilitasi bagi generasi muda untuk mengembangkan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, mengingat penduduk Lampung Timur yang sebagian berusia produktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara yang memasuki periode penting dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk yang masuk kategori pemuda pada tahun 2024 sebanyak 252.418 jiwa atau 22,48 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, terdapat 25 organisasi kepemudaan yang aktif di tahun 2024.

Tabel 2.25
Jumlah Pemuda di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

Kategori Pemuda	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15-19	41.234	39.767	81.001
20-24	44.234	42.684	86.918
25-29	43.918	40.581	84.499
Total	129.386	123.032	252.418

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. IPP Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencapai 53,17, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 53.



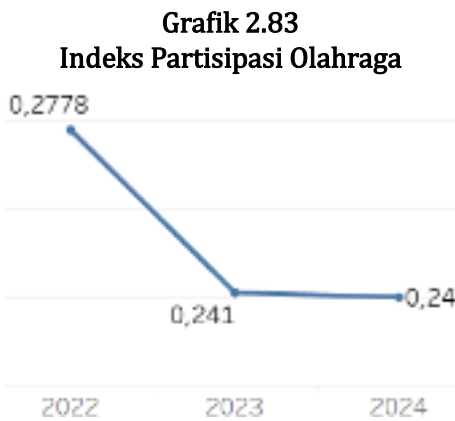
Pada urusan olahraga, terkait dengan capaian medali pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Lampung Tahun 2022, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-7 dari sebelumnya yang berada di posisi ke-9. Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, terdapat 2 cabang olahraga yang ang memperoleh prestasi tingkat Provinsi atau Nasional di tahun 2024.

Tabel 2.26
Hasil Perolehan Medali Porprov Lampung Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Emas	Perak	Perunggu	Total
1	Bandar Lampung	195	178	232	605
2	Metro	100	114	170	384
3	Pesawaran	96	78	120	294
4	Tanggamus	74	57	73	204
5	Pringsewu	73	57	123	253
6	Lampung Selatan	66	92	133	291
7	Lampung Timur	65	72	102	239
8	Lampung Tengah	60	68	98	226
9	Way Kanan	55	51	91	197
10	Lampung Barat	45	32	69	146
11	Lampung Utara	40	58	98	196
12	Pesisir Barat	26	24	44	94
13	Tulang Bawang	15	32	56	103
14	Tulang Bawang Barat	9	7	19	35
15	Mesuji	6	5	21	32
Jumlah		925	925	1449	3299

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur; 2023

Indeks Partisipasi Olahraga adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Indeks ini mencerminkan seberapa besar kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya aktivitas fisik dan olahraga untuk menjaga kesehatan, kebugaran, serta kualitas hidup. Indeks Partisipasi Olahraga Provinsi Lampung pada tahun 2024 mencapai 0,24, menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 0,241.



Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2025

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2026 berkomitmen untuk mendorong kemandirian ekonomi generasi muda melalui program pengembangan

wirausaha. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan konveksi (menjahit) bagi pemuda. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan praktis sekaligus membuka peluang usaha di sektor industri kreatif berbasis konveksi. Kegiatan pelatihan ini akan diikuti oleh 30 peserta terpilih yang berasal dari 23 kecamatan di Lampung Timur, dengan pelaksanaan dibagi dalam dua sesi untuk menjamin efektivitas pembelajaran. Pelatihan akan dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga kursus yang kompeten di bidangnya, sehingga diharapkan mampu menghasilkan wirausaha muda yang terampil, mandiri, dan siap bersaing di pasar kerja maupun membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekitarnya.

Selain itu, mendukung pembangunan sektor olahraga masyarakat sekaligus memanfaatkan potensi pariwisata daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga akan menyelenggarakan kegiatan olahraga massal berupa Lari 10 K dan Senam Bersama di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Kegiatan ini terbuka untuk diikuti seluruh lapisan masyarakat baik dari Lampung Timur maupun dari luar daerah, sehingga diharapkan dapat menjadi sarana mempererat kebersamaan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mendukung gerakan hidup sehat. Pelaksanaan kegiatan akan melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, antara lain PERSANI Lampung Timur, Dinas Perhubungan, PASI Lampung Timur, serta pihak Kepolisian Sektor setempat untuk memastikan kelancaran dan keamanan kegiatan. Di samping itu, kegiatan olahraga masyarakat ini juga diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan dan mempromosikan destinasi wisata unggulan Lampung Timur, khususnya Taman Nasional Way Kambas, sebagai daya tarik wisata alam dan edukasi yang memiliki potensi besar untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

2.1.3.2.14 Kebudayaan

Masyarakat Lampung Timur yang multietnis memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang beragam. Sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kabupaten Lampung Timur secara berkala menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga dan wisatawan serta pemeliharaan benda, situs, dan cagar budaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:

- a. Taman Nasional Purbakala Pugung Raharjo;
- b. Museum Budaya di Kecamatan Sukadana;
- c. Bangunan Adat Sesat Agung dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi di Kecamatan Sukadana;
- d. Desa Tradisional Wana di Kecamatan Melinting;
- e. Rumah tradisional Gedong Wani di Kecamatan Marga Tiga;



- f. Rumah tradisional warisan Keratuan Melinting; dan
- g. Rumah tradisional warisan Keratuan Pugung di Kecamatan Sekampung Udik

2.1.3.2.15 Perpustakaan

Kabupaten Lampung Timur memiliki dua perpustakaan terakreditasi yaitu satu perpustakaan umum dengan predikat C dan satu perpustakaan sekolah dengan predikat C. Terkait dengan pengembangan perpustakaan desa, perkembangan jumlah perpustakaan desa telah mencapai 264 perpustakaan desa pada tahun 2020. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Lampung Timur mencapai 45,11 di tahun 2024, masih di bawah capaian Provinsi Lampung yang sebesar 64,81.

Tabel 2.27
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya

	Lampung Timur	Lampung
Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,2419	0,4260
Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	0,2789	0,5423
Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	0,1685	0,4112
Tingkat Kunjungan Masyarakat per har	0,0276	0,1568
Rasio Perpustakaan Ber-SNP	1	1
Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	0,5671	1
Rasio Anggota Perpustakaan	0,8735	1
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	45,11	64,81

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.3.2.16 Kearsipan

Pada urusan kearsipan, jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku mencapai 31 OPD dari 52 OPD yang ada, atau ketercapaian mencapai 60%.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

CAPAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%)	24	39	39	40	60
Retrival arsip (menit)	30	30	30	30	20
Jumlah arsip yang dikelola (arsip)	17.542	18.542	18.763	19.013	19.195
Jumlah desa sadar arsip (desa)	23	23	23	23	26



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Potensi bidang perikanan di Kabupaten Lampung Timur meliputi perikanan budidaya dan tangkap. Pengembangan sektor perikanan baik tangkap dan budidaya di Kabupaten Lampung Timur memiliki prospek yang cukup baik bagi perekonomian masyarakat dan daerah. Produksi perikanan budidaya dan tangkap pada tahun 2024 mengalami peningkatan produksi, produksi perikanan tangkap mencapai 69.308,57 ton dan produksi perikanan budidaya mencapai 9.172,51 ton. Sektor perikanan budidaya yang banyak dibudidayakan meliputi ikan mas, nila, gurame, patin, lele dan udang vaname. Sedangkan untuk perikanan tangkap, didominasi oleh produksi kepiting, rajungan, dan kerang.



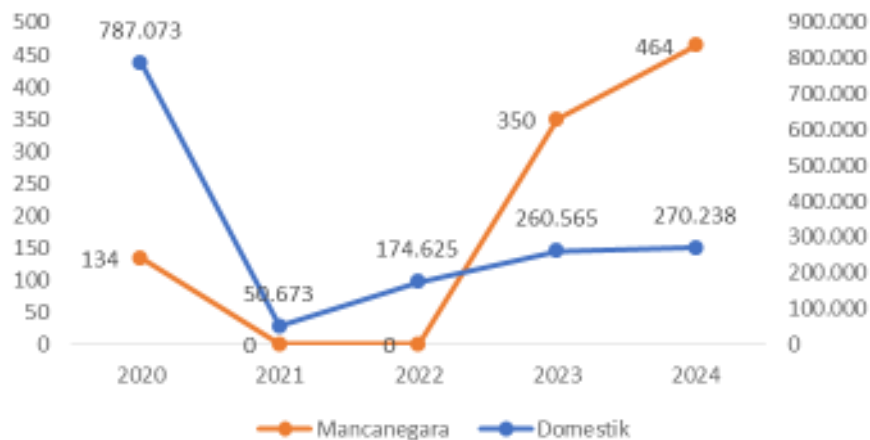
Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pada tahun 2024, terdapat 221 rumah makan/restoran dan 15 hotel non bintang yang beroperasi di Kabupaten Lampung Timur. Selama tahun tersebut, jumlah wisatawan mencapai 270.702 orang, terdiri atas 270.238 wisatawan domestik dan 464 wisatawan mancanegara. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023, menandakan adanya tren pemulihan serta pertumbuhan sektor pariwisata setelah pandemi.

Grafik 2.85
Jumlah Wisatawan Kabupaten Lampung Timur

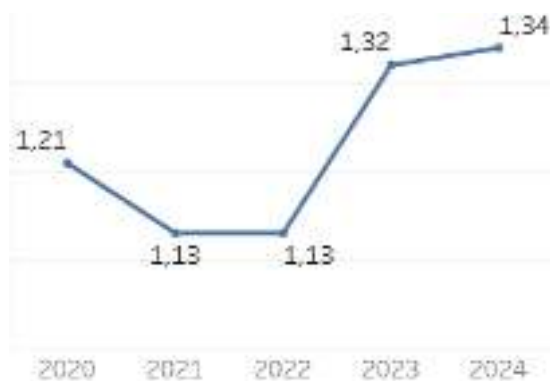




Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur; 2025

Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 1,34 persen, meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 1,32 persen.

Grafik 2.86
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB
Kabupaten Lampung Timur



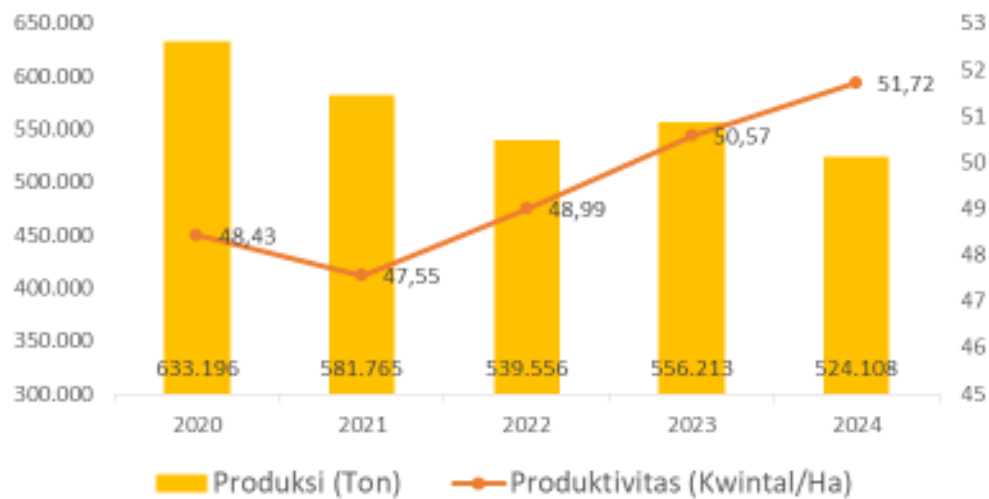
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur; 2025

2.1.3.3.3 Pertanian

2.1.3.3.3.1 Tanaman Pangan

Potensi lahan di wilayah Kabupaten Lampung Timur sangat mendukung untuk budidaya pertanian. Tidak heran jika pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, merupakan sektor utama dan strategis Kabupaten Lampung Timur meskipun saat ini terjadi pergeseran bertahap dari sektor pertanian menuju industri pengolahan. Berdasarkan data, masyarakat Lampung Timur sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Selain itu, sektor pertanian tanaman pangan juga merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan kategori pertanian.

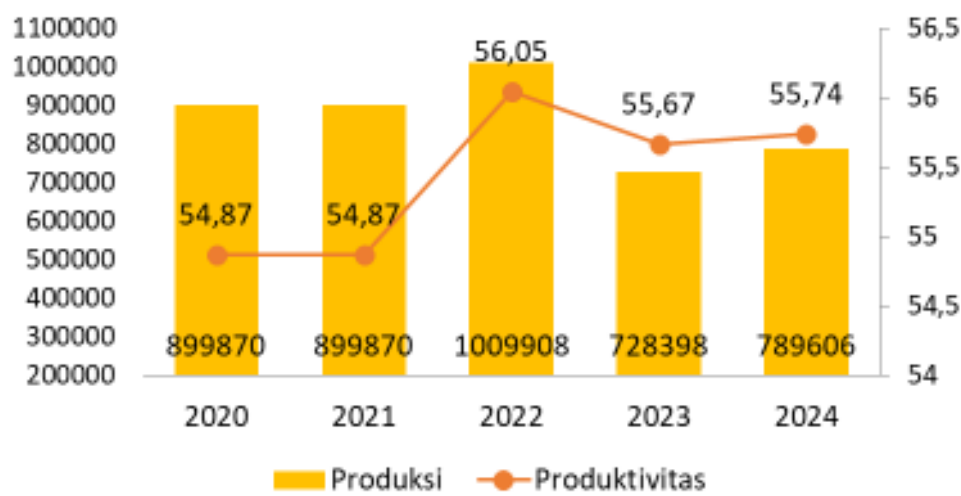
Grafik 2.87
Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Padi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2025

Pada tahun 2024, jumlah total produksi padi (lahan sawah dan lahan kering) mencapai 524.108 ton, turun bila dibandingkan produksi tahun 2023 yang mencapai 556.213 ton. Perkembangan produksi padi pada periode 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan sehingga luas panen padi yang berkurang menyebabkan jumlah produksi yang menurun. Produktivitas padi Kabupaten Lampung Timur mencapai 51,72 kuintal per hektar pada tahun 2024, lebih tinggi bila dibandingkan produktivitas pada tahun 2023 yang mencapai 50,57 kuintal per hektar. Kecamatan Jabung memiliki luas panen terbesar dan sekaligus merupakan produsen padi terbesar di antara kecamatan lain di Kabupaten Lampung Timur dengan produksi mencapai 67.213 ton.

Grafik 2.88
Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Jagung Kabupaten Lampung Timur



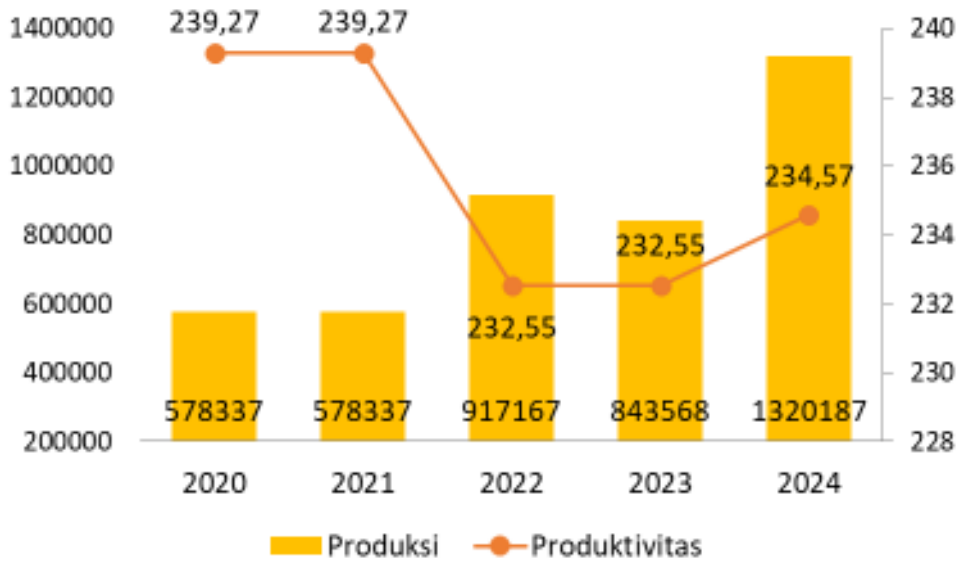
Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2025

Selanjutnya, terkait dengan produksi tanaman pangan lainnya, yaitu produksi jagung, berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2024, produksi jagung di Kabupaten



Lampung Timur mencapai 789.606 ton, meningkat jika dibandingkan produksi tahun 2023 yang mencapai 728.398 ton. Kecamatan Bandar Sribhawono memiliki luas panen terbesar dan sekaligus merupakan produsen jagung terbesar di antara kecamatan lain di Kabupaten Lampung Timur dengan produksi mencapai 157.360 ton.

Grafik 2.89
Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Ubi Kayu Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2025

Selanjutnya, terkait dengan komoditas pertanian tanaman pangan lainnya yaitu ubi kayu. Total produksi ubi kayu pada tahun 2024 mencapai 1.320.187 ton, meningkat dibandingkan produksi tahun 2023 yang mencapai 843.568 ton. Kecamatan Jabung memiliki luas panen terbesar dan sekaligus merupakan produsen ubi kayu terbesar di antara kecamatan lain di Kabupaten Lampung Timur dengan produksi mencapai 200.655 ton.

2.1.3.3.2 Hortikultura

Selain tanaman pangan, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki potensi di sektor hortikultura, khususnya buah-buahan. Komoditas pisang merupakan salah satu produk yang paling besar produksinya dan memiliki daya saing yang cukup baik. Pada tahun 2024, produksi pisang Kabupaten Lampung Timur berhasil mencapai 2.314.198,8 kuintal, dengan produksi terbesar di Kecamatan Way Jepara. Selanjutnya, komoditas jeruk siam saat ini menjadi salah satu komoditas potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Tabel 2.29
Produksi Buah-Buahan dan Sayuran di Kabupaten Lampung Timur (kuintal)

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Alpukat	10.756	40.891	57.883	291.186	193.973
Anggur	-	14	453	2.140	1.949,9
Belimbing	4.261	4.962	2.807	11.550	11.185,6
Buah Naga	-	21.612	19.309	20.485	16.880,6
Duku	8.315	9.062	30.588	52.391	69.856,25
Durian	15.184	66.376	140.808	265.637	347.841,3
Jambu Air	14.153	20.513	103.837	284.838	235.746,3
Jambu Biji	10.362	54.851	53.917	82.913	153.189,9



Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Jeruk Besar	11.944	9	13	17	25,76
Lemon	-	42	576	3.855	6.138
Jeruk Siam	67.518	242.533	220.379	346.849	394.630,8
Lengkeng	-	16.062	31.629	60.974	32.275,9
Mangga	41.305	72.176	28.961	131.657	84.154,8
Manggis	960	3.135	388	4.022	2.150,6
Nanas	14.409	5.710	12.166	29.256	21.327,04
Nangka	31.614	542.286	255.217	107.525	180.580,12
Pepaya	419.114	198.233	115.720	668.743	531.960
Pisang	745.329	890.414	2.878.857	1.849.250,73	2.314.198,8
Rambutan	15.168	42.197	91.858	450.733	338.407,03
Salak	12.773	7.054	5.001	44.374	29.664,15
Sawo	22.432	28.510	24.482	137.597	176.603,32
Sirsak	5.161	8.452	5.671	18.437	18.537
Sukun	5.210	18.921	16.377	82.913	86.420,58
Jengkol	11.463	33.947	13.216	74.574	70.397
Melinjo	10.202	27.374	15.663	25.830	52.528,4
Petai	11.342	15.894	18.093	107.525	107.608,81

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.3.3.3 Kehutanan

Selanjutnya, terkait dengan sektor kehutanan, komoditas unggulan bidang kehutanan adalah kayu jati, akasia, sengon, gmelina, jabon, dan sungkai. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. Kegiatan ini hanya dilakukan pada areal hutan yang memiliki potensi untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan dapat dilaksanakan setelah diperoleh izin usaha.

Terkait dengan kawasan hutan di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-11/2000, kawasan hutan di wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi: Taman Nasional Way Kambas dengan luas 125.621,3 hektar, Hutan Lindung Gunung Balak (Reg 38) dengan luas 22,292,5 hektar, Hutan Lindung Muara Sekampung (Reg 15) dengan luas 1.488,36 hektar, Hutan Produksi Metro Kibang dan Gedung Wani (Reg 37 dan 40) dengan luas 13.175 hektar, Hutan Mangrove di Pantai Timur sepanjang kurang lebih 45 km, dan Hutan Rakyat. Pengembangan hutan mangrove berada di sepanjang pantai timur di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti, merupakan desa pesisir pantai dalam kondisi baik kurang lebih 20 km berada di Desa Margasari, Sriminosari, Karya Tani, Mulyosari, Purworejo, dan Labuhan Ratu.

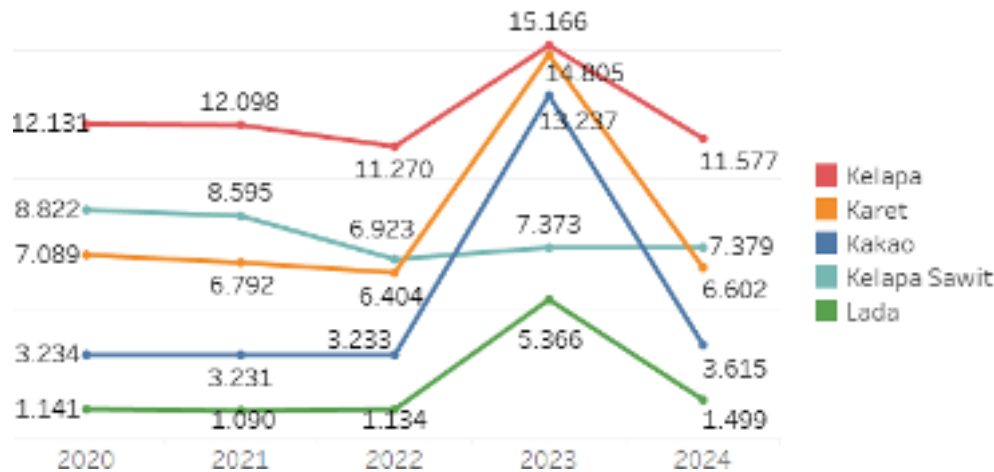
2.1.3.3.4 Perkebunan

Di sektor perkebunan, komoditas unggulan Lampung Timur meliputi lada, kakao, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Komoditas kelapa bersentra di Kecamatan Bandar Sribhawono, Melinting, dan Sekampung Udik. Sedangkan untuk komoditas kelapa sawit berkembang di Kecamatan Waway Karya, Labuhan Maringgai, dan Jabung. Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2020-2024 tersaji pada grafik berikut.

Grafik 2.90



Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Timur (ton)



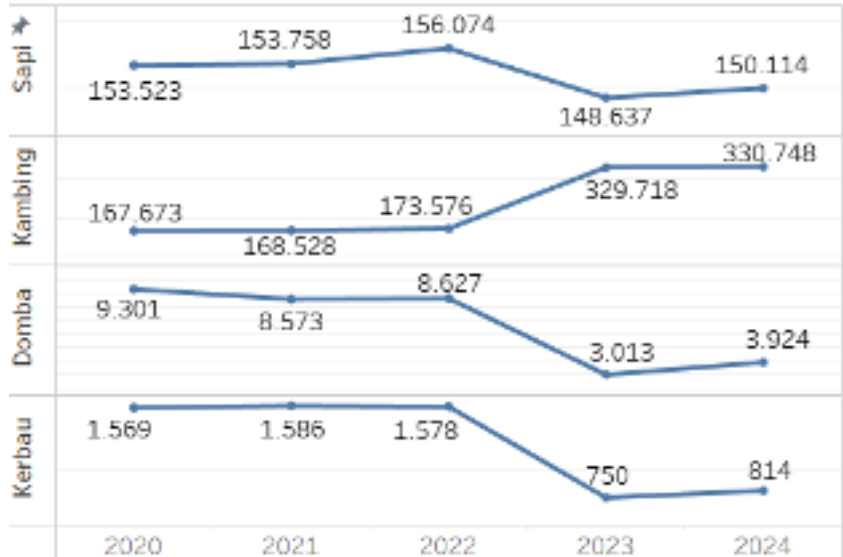
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.3.3.5 Peternakan

Sektor perikanan dan sub sektor peternakan merupakan salah satu bidang usaha yang hampir merata tersebar dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan pada sektor ini mempunyai pengaruh yang cukup besar pada pembangunan ekonomi daerah. Dalam RTRW Nasional menyebutkan bahwa Provinsi Lampung adalah salah satu lumbung ternak nasional. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam pengembangan sektor peternakan dan perikanan.

Saat ini permintaan pasar untuk sapi, baik pasar nasional maupun internasional sebagian telah mampu dipenuhi oleh peternak dari Kabupaten Lampung Timur. Potensi investasi di bidang peternakan adalah belum adanya industri pengolahan ternak berupa pabrik pengolahan hasil peternakan di Kabupaten Lampung Timur. Pada tahun 2024, populasi ternak, termasuk sapi, kambing, domba, dan kerbau, mengalami peningkatan. Namun, produksi daging ternak menurun dengan capaian 2.392,95 ton, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.458,56 ton.

Grafik 2.91
Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Lampung Timur (ekor)



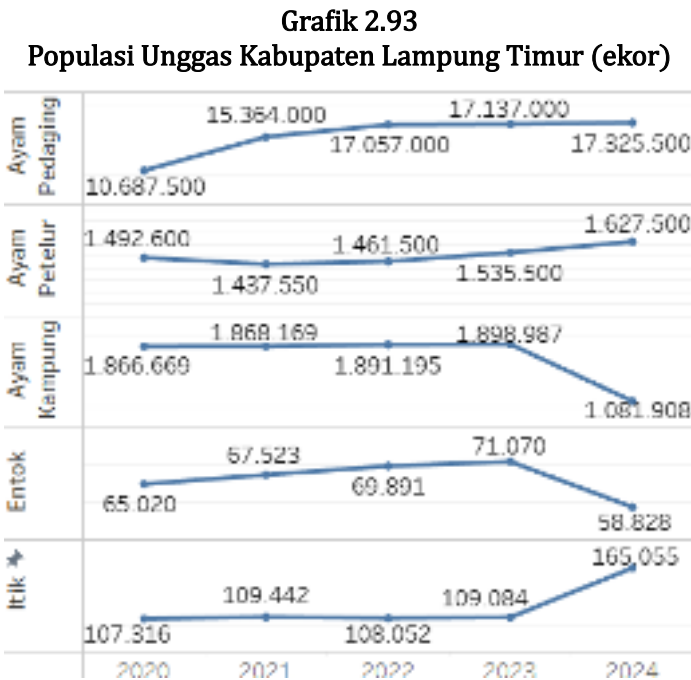


Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2025



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Terkait dengan peternakan unggas di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar dilakukan oleh peternak rakyat skala kecil. Populasi ayam pedaging, ayam petelur, dan itik di Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2020–2024 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan permintaan atas jenis unggas tersebut yang meningkat disertai keuntungan yang semakin besar. Populasi ayam kampung dan entok mengalami penurunan pada tahun 2024, setelah terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, produksi daging unggas pada tahun 2024 mencapai 2.594.957,57 ton atau meningkat dibandingkan produksi tahun 2023 yang mencapai 2.007.936,39. Perkembangan populasi unggas dan produksi daging unggas dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Grafik 2.94
Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Lampung Timur (ton)





Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Terkait dengan produksi telur, pada tahun 2024 produksi telur di Kabupaten Lampung Timur mencapai 34.424,86 ton, meningkat jika dibandingkan dengan produksi tahun 2023 yang mencapai 33.794,96, Lebih jelasnya ditampilkan pada grafik di bawah ini.



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.3.3.4 Perdagangan

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2023, terdapat 9 pasar di Kabupaten Lampung Timur yaitu Pasar Way Jepara, Sekampung, Purbolinggo, Pekalongan, Rajabasa Lama, Sukadana, Raman Utara, Labuhan Maringgai, dan Melinting. Selain itu, terdapat 52 pasar desa sebagai sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.30
Jumlah Bangunan Sarana Perdagangan Menurut Lokasi Pasar dan Jenis Bangunan yang Dikelola oleh Kantor Pengelolaan Pasar di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

Pasar	Ruko	Toko/Kios	Los	Jumlah
Pasar Way Jepara	22	196	258	476
Pasar Sekampung	28	584	104	716
Pasar Purbolinggo		444	133	577
Pasar Pekalongan		324	294	618
Pasar Rajabasa Lama		208	243	451

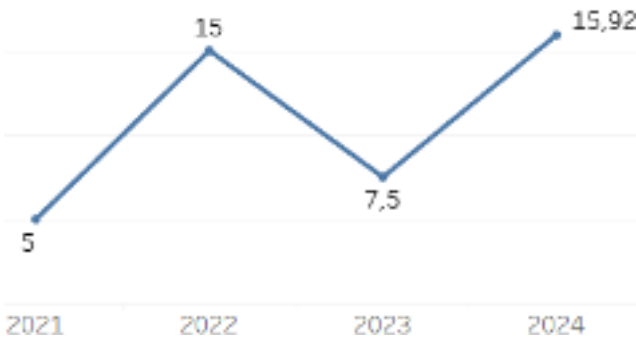


Pasar Sukadana	48	168	78	294
Pasar Raman Utara		170	140	310
Pasar Labuhan Maringgai		146	192	338
Pasar Melinting		21	20	41
Jumlah	98	2261	1462	3821

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur; 2025

Perkembangan persentase peningkatan omzet perdagangan Kabupaten Lampung Timur pada periode 2021-2024 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2024, persentase peningkatan omzet perdagangan Kabupaten Lampung Timur mencapai 15,92 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 7,5 persen.

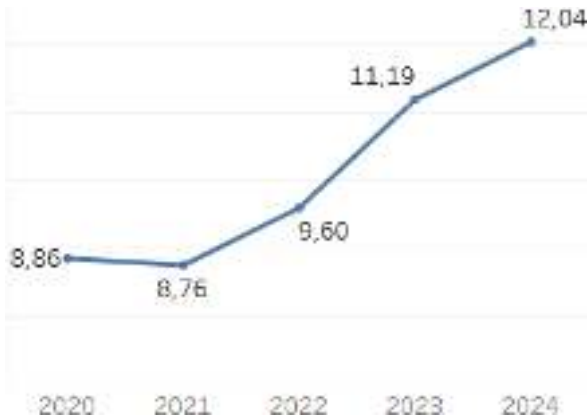
Grafik 2.96
Persentase Peningkatan Omzet Perdagangan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur; 2025

Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2024 mencapai 12,04 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 11,19 persen.

Grafik 2.97
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB
Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur; 2025

2.1.3.3.5 Perindustrian



Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi kemajuan suatu daerah. Suatu daerah dapat meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan jika cukup tersedia industri pengolahan. Kabupaten Lampung Timur dengan potensi yang besar dalam memproduksi bahan mentah khususnya di sektor pertanian dan perikanan, memerlukan ketersediaan industri yang berskala kecil hingga besar. Industri yang berkembang di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar adalah industri yang bergerak pada Industri Hasil Pertanian mencapai 52,24 persen. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan produksi bahan baku hasil pertanian sangat tersedia.

Tabel 2.31
Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

Klasifikasi Industri	Perusahaan/ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Ribu Rupiah)
Industri Hasil Pertanian	2942	3967	60.445.629.400
Industri Logam, Mesin dan Elektronika	618	352	7.760.780.000
Industri Kimia dan Aneka	2072	2853	63.028.125.720
Jumlah	5632	7172	131.234.535.120

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 total unit usaha di Kabupaten Lampung Timur yang sebanyak 5632 dapat menyerap 7172 tenaga kerja. Total nilai investasi usaha di Kabupaten Lampung Timur mencapai Rp 131 triliun. Capaian tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya di mana hanya terdapat 938 unit usaha dengan 2319 tenaga kerja dan nilai investari sebesar Rp 214 miliar. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi mulai membuahkan hasil, tercermin dari meningkatnya jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, serta lonjakan nilai investasi di daerah.

Jumlah industri di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 didominasi oleh industri kecil yang mencapai 5630 industri yang tersebar di 24 kecamatan. Kecamatan yang terbanyak memiliki industri kecil adalah Kecamatan Jabung, sedangkan industri menengah hanya terdapat di Kecamatan Batanghari Nuban sebanyak 2 industri.

Tabel 2.32
Jumlah Perusahaan/Unit Usaha Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Industri di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

Kecamatan	Industri Kecil	Industri Menengah	Jumlah
Metro Kibang	200	-	200
Batanghari	29	-	29
Sekampung	468	-	468
Marga Tiga	388	-	388
Sekampung Udik	273	-	273



Kecamatan	Industri Kecil	Industri Menengah	Jumlah
Jabung	1123	-	1123
Pasir Sakti	155	-	155
Waway Karya	254	-	254
Marga Sekampung	102	-	102
Labuhan Maringgai	348	-	348
Mataram Baru	91	-	91
Bandar Sribhawono	143	-	143
Melinting	86	-	86
Gunung Pelindung	90	-	90
Way Jepara	32	-	32
Braja Selehah	152	-	152
Labuhan Ratu	114	-	114
Sukadana	239	-	239
Bumi Agung	165	-	165
Batanghari Nuban	109	2	111
Pekalongan	353	-	353
Raman Utara	294	-	294
Purbulinggo	267	-	267
Way Bungur	155	-	155
Lampung Timur	5630	2	5632

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, kontribusi sektor industri mencapai 8,81 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 8,08 persen.

Grafik 2.98
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.3.4. Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah





Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara, Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas; dan
- e. Badan.

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan program lingkup Sekretariat Daerah;
- b. penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
- d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur pemerintah daerah;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
- g. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Unsur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Pimpinan: Sekretaris Daerah;
- b. Pembantu Pimpinan: Asisten Sekretariat Daerah;
- c. Pelaksana: Bagian-bagian terdiri dari Subbagian-subbagian; dan
- d. kelompok jabatan fungsional,

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;





- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya,

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya dalam perbaikan dan peningkatan terhadap akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Capaian Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi pada Tahun 2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.33
Capaian/Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

No.	KATEGORI	CAPAIAN KINERJA/ PREDIKA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
2	Nilai SAKIP	C	CC	CC	CC	B
3	Indeks reformasi birokrasi	CC	CC	CC	CC	CC
4	Zona Pelayanan Ombudsman	Hijau	Hijau	Kuning	Hijau	N/A
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik

Sumber: Setdakab Lampung Timur, 2025

2.1.3.4.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur merupakan unsur fasilitasi DPRD Lampung Timur yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Urusan Sekretariat DPRD dituangkan dalam program dan kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur.

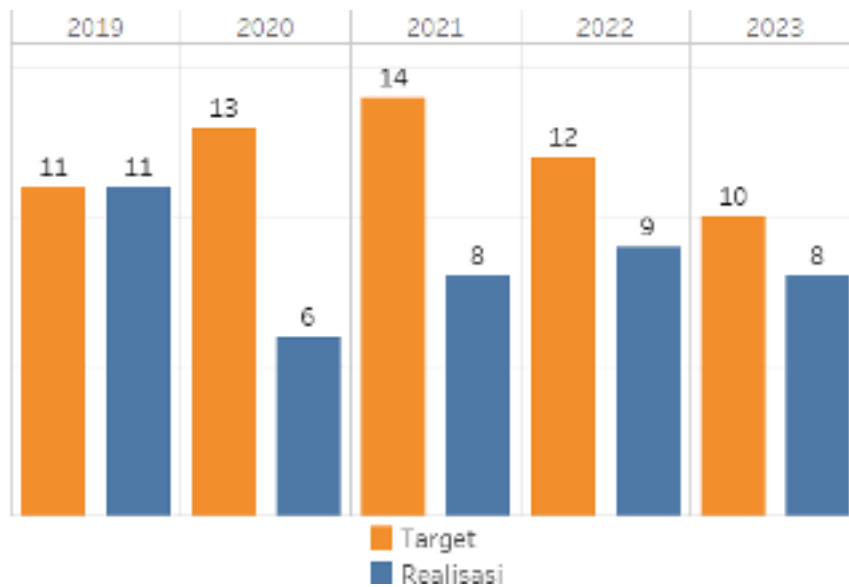
Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran, yaitu a) meningkatnya kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD serta b) terfasilitasinya kinerja DPRD. Pada sasaran pertama, indikator sasarannya adalah skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi DPRD dan skor indeks kepuasan layanan pimpinan dan anggota DPRD. Sementara itu, pada sasaran kedua indikator yang digunakan adalah persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu.

Kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program Propemperda ditampilkan pada Tabel di bawah ini. Propemperda adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang merupakan instrumen pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dan secara operasional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Propemperda dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang



disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Grafik 2.99
Kinerja Propemperda



Sumber: Setdakab Lampung Timur, 2024

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.3.4.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan harus berorientasi pada proses dan substansi. Perencanaan yang berorientasi pada proses dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Keseluruhan pendekatan perencanaan tersebut secara kontinyu telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Di samping perencanaan yang berorientasi pada proses dengan mengacu Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tersebut, perencanaan pembangunan juga harus berorientasi pada substansi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif, dan spasial. Dengan pendekatan ini, perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pelaksanaan perencanaan pembangunan harus menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan



perencanaan pembangunan dengan pendekatan spasial yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

2.1.3.4.2 Keuangan

Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini adalah capaian tertinggi enam tahun berturut-turut. Selanjutnya terkait dengan target dan realisasi kurun waktu 2021-2024, ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.34
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD			
		2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	2.098.247.312.922,78	2.078.761.250.663,56	2.131.663.102.999,38	2.158.889.192.922,17
4.1	Pendapatan Asli Daerah	158.378.912.072,78	195.524.555.581,56	196.136.238.928,38	197.473.678.624,17
4.1.01	Pajak Daerah	66.991.745.470,02	75.357.003.239,91	83.816.436.780,30	80.220.042.311,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	4.025.662.757,00	4.159.841.505,00	4.704.579.364,00	3.749.508.473,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	3.611.400.144,74	2.757.680.393,39	3.020.927.854,18	3.204.913.365,59
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83.750.103.701,02	113.250.030.443,26	104.594.294.929,90	110.299.214.474,58
4.2	Pendapatan Transfer	1.835.290.482.450,00	1.883.236.695.082,00	1.935.526.864.071,00	1.961.415.514.298,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.738.270.346.829,00	1.767.196.903.435,00	1.826.894.762.966,00	1.831.824.446.819,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.474.745.842.597,00	1.499.552.399.235,00	1.557.560.248.866,00	1.560.262.370.019,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	50.432.109.191,00	69.475.098.511,00	75.432.109.191,00	88.946.258.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.030.460.397.080,00	1.039.546.367.447,00	1.077.274.703.452,00	1.193.360.241.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	58.763.525.296,00	50.352.876.912,00	61.763.625.193,00	112.366.030.326,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	335.089.811.030,00	340.178.056.365,00	343.089.811.030,00	165.589.840.693,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	263.524.504.232,00	267.644.504.200,00	269.334.514.100,00	271.562.076.800,00
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	97.020.135.621,00	116.039.791.647,00	108.632.101.105,00	129.591.067.479,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	97.020.135.621,00	116.039.791.647,00	108.632.101.105,00	129.591.067.479,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	104.577.918.400,00	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	104.577.918.400,00	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.02.01	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-

Sumber: LRA, 2024

2.1.3.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat Lampung Timur.

1) ASN Lampung Timur Menurut Status dan Golongan Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan di





pemerintahan. Berikut ini tabel yang menunjukkan data PNS di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024:

Tabel 2.35
Data PNS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

No.	GOL PNS	CPNS	PNS	Jumlah
1	I/a		1	1
2	I/b		0	0
3	I/c		4	4
4	I/d		9	9
Jumlah Golongan I		0	14	14
1	II/a		25	25
2	II/b		45	45
3	II/c		230	230
4	II/d		243	243
Jumlah Golongan II		0	543	543
1	III/a	1	705	705
2	III/b		874	874
3	III/c		690	690
4	III/d		1485	1485
Jumlah Golongan III		1	3754	3755
1	IV/a		625	625
2	IV/b		1130	1130
3	IV/c		137	137
4	IV/d		2	2
5	IV/e		1	1
Jumlah Golongan IV		0	1895	1895
Total		1	6206	6207

Sumber: BKPPD Kabupaten Lampung Timur, 2025

Selanjutnya pada tabel berikut ini memuat data PPPK di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024:

Tabel 2.36
Data PPPK Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

No.	GOL PPPK	PPPK	JML
1	I		0
2	II		0
3	III		0
4	IV		0
5	V	25	25
6	VI		0
7	VII	22	22
8	VIII		0
9	IX	1616	1616
10	X	18	18
11	XI		0
12	XII		0
13	XIII		0
14	XIV		0
15	XV		0
16	XVI		0
17	XVII		0
Total		1681	1681

Sumber: BKPPD Kabupaten Lampung Timur, 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terbagi menjadi dua jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS dan PPPK mempunyai definisi, hak, manajemen, dan proses seleksi yang berbeda, perbedaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) PNS dan PPPK berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan UU NO. 5/2014 dijabarkan bahwa PNS dan PPPK memiliki status yang berbeda. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

b) PNS dan PPPK berdasarkan Hak dan Kewenangan

Seorang ASN tentunya mempunyai hak atau kewenangan yang diberikan dan dilindungi oleh hukum, serta kewajiban yang perlu ditunaikan. Dalam Undang-Undang diatur bahwa PNS dan PPPK memiliki kewajiban yang sama. Sedangkan dari segi hak, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 UU ASN, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi ASN PNS dan PPPK diatur sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- Pengembangan kompetensi bagi PPPK dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

c) PNS dan PPPK berdasarkan Manajemen

Manajemen ASN terbagi atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Manajemen PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Ada beberapa poin manajemen PNS yang tidak ada dalam manajemen PPPK yang kemudian menjadi perbedaan keduanya antara lain pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Calon PNS yang kemudian menjadi PNS dan kemudian mempunyai jabatan dan jenjang karir berupa pangkat dan golongan yang terus berkembang setiap tahun, dapat mengisi jabatan struktural dan fungsional sekaligus. Sedangkan PPPK umumnya hanya dapat mengisi jabatan fungsional saja. Tidak ada jenjang karir karena PPPK adalah pegawai dengan perjanjian kerja dengan masa kerja yang telah ditentukan. Hal inilah yang juga menjadi dasar terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tidak diberikan kepada ASN PPPK.



d) PNS dan PPPK berdasarkan Masa Kerja

PNS dan PPPK juga memiliki perbedaan dalam masa kerjanya. PNS memiliki masa kerja sampai memasuki masa pensiun, yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi dan 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi. Sementara untuk PPPK, masa kerjanya sesuai surat perjanjian yang telah disepakati. Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

e) PNS dan PPPK berdasarkan Proses Seleksi

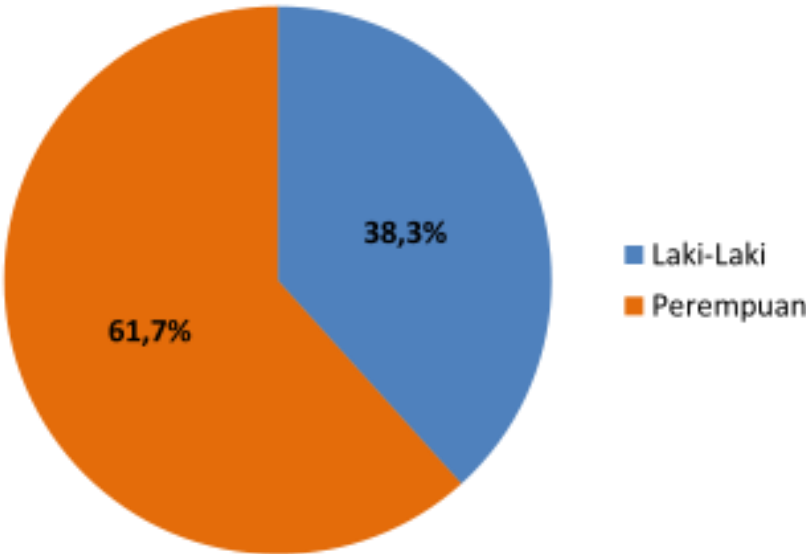
Perbedaan selanjutnya adalah dari proses seleksi CPNS dan PPPK. Untuk mengikuti seleksi CPNS minimal berusia 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Untuk PPPK berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 59 (lima puluh sembilan) tahun, untuk PPPK Guru. Selain itu, dalam seleksi CPNS terdapat tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memiliki 3 materi soal yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan formasi yang diambil. Sementara untuk seleksi PPPK terdapat 4 (empat) materi yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, dan wawancara.

Disamping perbedaan yang telah dijabarkan diatas, seorang CPNS, PNS dan PPPK yang datang dari berbagai macam latar belakang profesi harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Maka dari itu, ASN perlu memiliki nilai-nilai dasar (core values) yang menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

2) ASN Lampung Timur Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur, jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 mencapai 7888 orang, dengan rincian 3020 orang ASN berjenis kelamin laki-laki dan 4868 orang ASN Perempuan. sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.100
Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024





Sumber: BKPPD Kabupaten Lampung Timur, 2025

3) ASN Lampung Timur Menurut Tingkat Pendidikan

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai apabila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir. Kondisi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur menurut tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.37
Komposisi ASN Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Pendidikan	CPNS	PNS	PPPK	Jumlah
1	D-1		5		5
2	D-2		102		102
3	D-3		731	22	753
4	D-4	1	243	1	245
5	S-1		3998	1615	5613
6	S-2		565	18	583
7	S-3		4		4
8	SD		14		14
9	SLTA		531	25	556
10	SLTP		13		13
Total		1	6206	1681	7888

Sumber: BKPPD Kabupaten Lampung Timur, 2025

Sebagian besar tingkat pendidikan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur berpendidikan Sarjana (Strata 1) sebanyak 5613 orang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat potensial untuk memenuhi kinerja yang ditargetkan.

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Terkait dengan penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada capaian Indeks Inovasi Daerah (IID), pada tahun 2024, Kabupaten Lampung Timur memperoleh predikat inovatif dengan skor indeks 53,91, menghasilkan 19 inovasi, dan menempati peringkat 138 nasional. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang memperoleh skor indeks 27,62 dengan predikat kurang inovatif.

Tabel 2.38
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur

Tahun	Jumlah Inovasi	Skor Indeks	Peringkat IID Tingkat Nasional	Kategori
2020	12	1.201	122	Sangat Inovatif
2021	23	42,06	172	Inovatif
2022	16	53,91	103	Inovatif
2023	17	27,62	316	Kurang Inovatif



2024	19	53,39	136	Inovatif

Sumber: BSKDN Kemendagri, 2025

2.1.3.5 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.3.5.1 Inspektorat

Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Kabupaten Lampung Timur berada di level 3 atau integrated, yang berarti APIP Kabupaten Lampung Timur mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Terkait dengan tingkat capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK RI Tahun 2024, kinerja Kabupaten Lampung Timur mencapai 81,13%, atau kedua terendah se-Provinsi Lampung.

2.1.3.6 Unsur Pemerintahan Umum

2.1.3.6.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dapat dilihat dari indeks partisipasi pemilu yang mencapai 47,78 persen atau termasuk kategori rendah. Partisipasi dalam pemilu dengan kategorisasi rendah mendekati konsep pelibatan (*involvement*), yaitu ikut serta dalam sebagian kecil proses pemilu. Daerah yang tergolong involvement merupakan daerah dimana pemilih mulai memiliki atensi terhadap proses-proses Pemilu dan isu-isu kepemiluan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

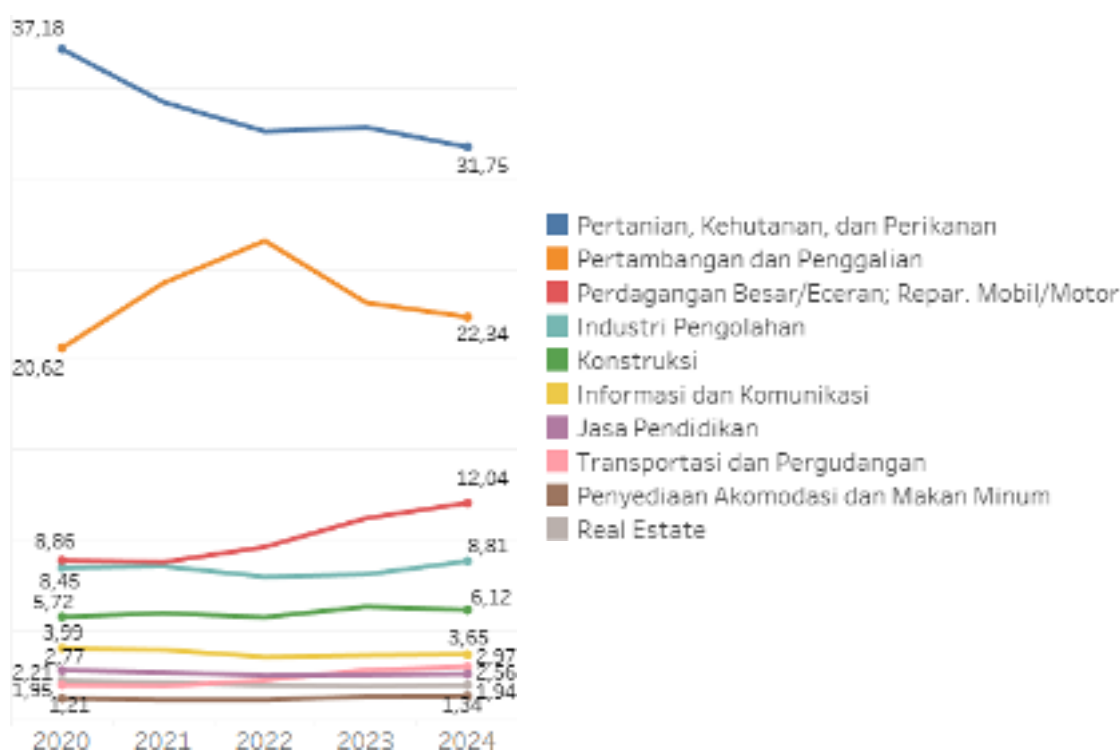
PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 sebesar Rp 56,8 triliun, sedangkan PDRB atas harga konstan (ADHK) sebesar Rp 32 triliun. Nilai PDRB tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan 7 (tujuh) kabupaten lainnya. Jika melihat dari tahun sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur meningkat secara signifikan dengan angka 3,51 persen di tahun 2023 menjadi 4,62 persen pada tahun 2024.

Distribusi persentase PDRB Kabupaten Lampung Timur pada periode 2020-2024 menunjukkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian yang merupakan lapangan usaha dengan distribusi tertinggi perlahan menurun dari tahun ke tahun. Penurunan juga terjadi terhadap sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang mulai mengalami penurunan secara perlahan setiap tahunnya. Namun seiring dengan hal tersebut, distribusi lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan.





Grafik 2.101
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lampung Timur



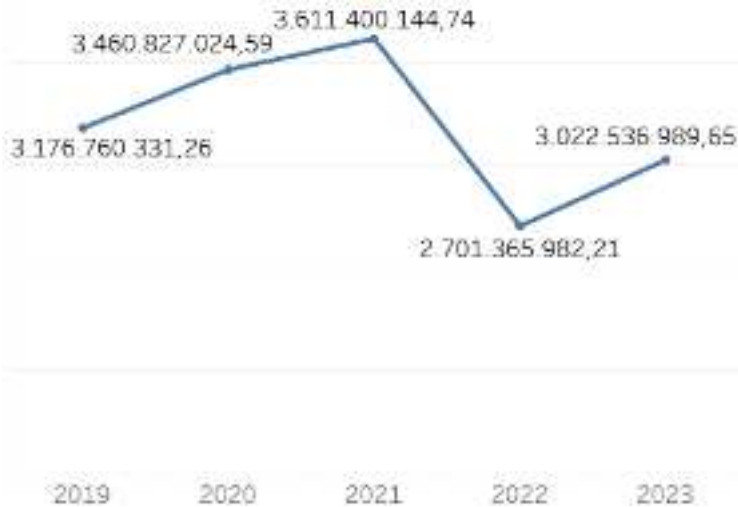
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.4.1.2 Badan Usaha Milik Daerah

Badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, BUMD diatur oleh suatu peraturan daerah (perda). Adapun modal BUMD seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan dari daerah. Badan usaha milik daerah yang sahamnya sebagian besar dimiliki daerah terdiri dari PDAM Way Guruh dan BPR Syariah Lampung Timur. Sedangkan untuk Bank Lampung sahamnya sebagian juga dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Terkait dengan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu delapan tahun terakhir, hanya BPR Syariah Lampung Timur dan Bank Lampung yang dapat memberikan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Grafik 2.102
Perkembangan Deviden BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah





Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2024

Perkembangan kontribusi deviden BUMD terhadap pendapatan asli daerah sangat diperlukan dalam mendorong peningkatan kapasitas fiskal dan menggerakkan ekonomi daerah melalui lembaga pembiayaan. Merujuk data Kementerian Keuangan RI, terkait dengan *Return on Asset* (ROA) BUMD di Indonesia baru mencapai kurang dari 3 persen, sedangkan untuk Provinsi Lampung, dalam rancangan awal RPJPD diperoleh data bahwa ROA BUMD Provinsi Lampung sebesar 1,91 persen.

ROA atau *Return On Assets* secara umum merupakan jenis dari rasio profitabilitas, dimana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk BUMD dalam memperoleh laba lewat aktiva. Dengan adanya rasio ini, kemampuan dari BUMD dinilai sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dalam periode lampau supaya bisa digunakan pada masa atau periode berikutnya. Rasio ini memang sangat penting bagi siapapun yang akan melakukan evaluasi terhadap BUMD yang menggunakan modal atau dananya.

2.1.4.1.3 Pariwisata

Kabupaten Lampung Timur memiliki destinasi wisata yang beragam. Destinasi wisata alam di Kabupaten Lampung Timur antara lain Pantai Kerang Mas, Pantai Mutiara Baru, Pantai Mangrove Sekar Bahari, Pantai Mangrove Pandan Alas, Sumber Mata Air Awet Muda, Beringin Indah, Goa Pandan, Danau Kemuning, Sumur 7, Puncak Pawiki, Wisata Padang Savana, Pantai Cemara, Way Guruh Lehan, Danau Way Jepara, dan Way Guruh.

Destinasi wisata budaya di Kabupaten Lampung Timur antara lain Taman Purbakala Pugung Raharjo dan Desa Tradisional Wana. Untuk destinasi agrowisata antara lain Wisata Omahe Jagung, Tanjung Tirta, Taman Wisata Bunga dan Edukasi Lembah Pawiki, dan Taman lebah madu. Sedangkan destinasi wisata lainnya yaitu Taman Nasional Way Kambas, Dam Negara Batin/Wanaba, Jembatan Merah/Kali Medek, Rest Area Labuhan Ratu VI, Water Pam, Jembatan Kembar, dan Dam Swadaya.

Gambar 2.16
Pantai Mutiara Baru





Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, 2023

Gambar 2.17
Taman Nasional Way Kambas



Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, 2023

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi Lampung Timur kedepan. *Multiplier effect* dari perkembangan pariwisata sangat strategis dalam mendorong perkembangan sektor lainnya khususnya perkembangan sektor ekonomi kreatif, di mana sektor ekonomi kreatif merupakan hilirnya sektor pariwisata daerah. Berdasarkan literatur, ekonomi kreatif berperan dalam perekonomian suatu daerah terutama dalam menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan hasil ekspor, meningkatkan teknologi, menambah kekayaan intelektual, dan peran sosial lainnya. Disayangkan proporsi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur belum dapat dihitung secara akurat, jika merujuk data Provinsi Lampung, proporsi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah sebesar 1,82 persen.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Jalan dan Jembatan



Berdasarkan status dan wewenang pembinaan jalan, sistem jaringan jalan di Kabupaten Lampung Timur dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Jalan Negara/Nasional, yang termasuk Jalan Negara/Nasional di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 430/KPTS/M/2022 adalah 157,01 km.
- b. Jalan Provinsi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/243.a/III.09/HK/2016 adalah 134,93 km.
- c. Jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.261/15-SK/2023 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, mencapai 1.158,33 km.
- d. Jalan desa di Kabupaten Lampung Timur yang terdata adalah 2.196,31 km.

Tabel 2.39
Panjang Jalan Berdasarkan Tingkat Kewenangan di Kabupaten Lampung Timur (km)

Kelas Jalan	Tingkat Kewenangan Pemerintah			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Kelas I	157,01	-	-	157,01
Kelas II	-	-	-	-
Kelas III	-	-	-	-
Kelas III A	-	134,93	1.158,33	1.293,26
Kelas III B	-	-	-	-
Kelas III C	-	-	-	-
Tidak Dirinci	-	-	-	-
Jumlah/Total	157,01	134,93	1.158,33	1.450,27

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2024

Berdasarkan jenis permukaan jalan di Kabupaten Lampung Timur, paling banyak berjenis permukaan jalan aspal, lebih lengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) Tahun 2022

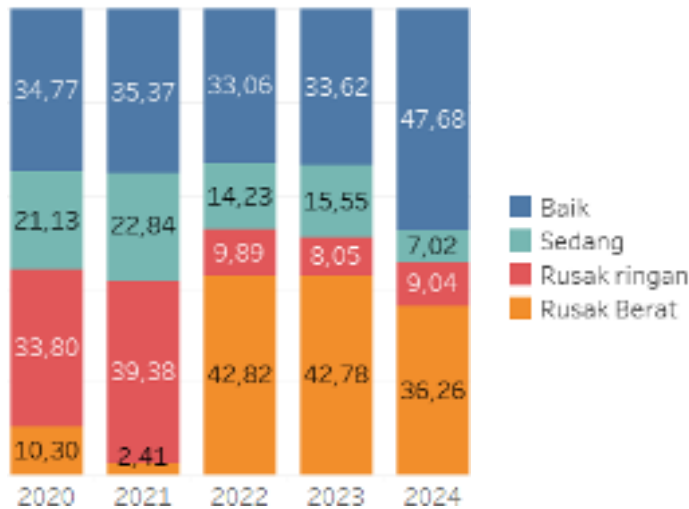
Kelas Jalan	Tingkat Kewenangan Pemerintah			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Aspal (AC, HRS, ATB)	157,01	134,93	750,41	1.042,35
Perkerasan Beton	-	-	8,63	8,63
Lapis Penetrasi/ Latasir/Macadam	-	-	225,56	225,56
Telford/Kerikil/Urpil	-	-	173,74	173,74
Jumlah/Total	157,01	134,93	1.158,33	1.450,28

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2024

Terkait dengan kondisi jalan kabupaten, sebesar 36,26 persen jalan kabupaten berada pada kondisi rusak berat, 47,68 persen pada kondisi baik, dan sisanya berada pada kondisi sedang dan rusak ringan.

Grafik 2.103
Kondisi Jalan Kabupaten Lampung Timur (%)

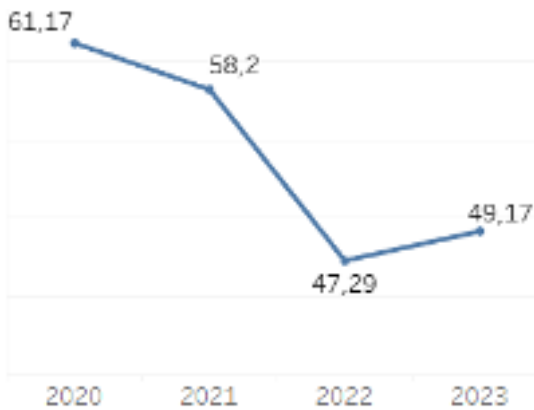




Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2025

Berdasarkan grafik perkembangan kondisi kemantapan jalan kurun waktu lima tahun terakhir di bawah, terjadi penurunan kondisi kemantapan jalan pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan akibat *refocussing* dan realokasi anggaran infrastruktur jalan ke sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang lalu. Kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran infrastruktur jalan adalah kebijakan sesuai regulasi dari pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Pasca pandemi COVID-19, pada tahun 2023, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan, tingkat kemantapan jalan kembali meningkat mencapai 49,17 persen.

Grafik 2.104
Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Timur

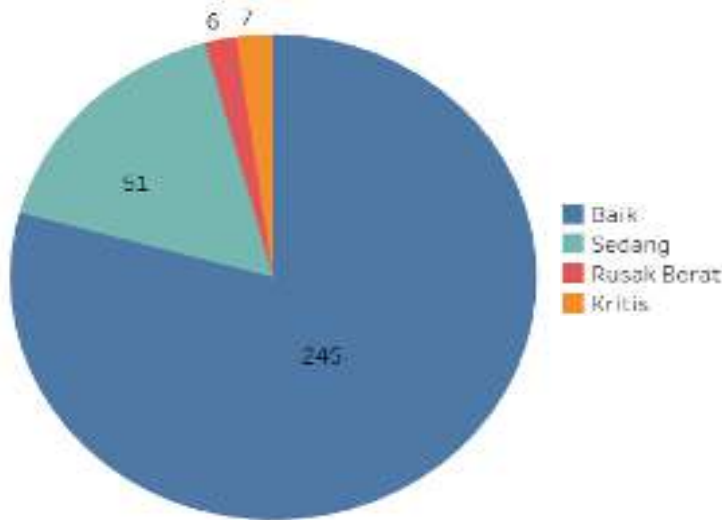


Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2025

Lebih lanjut, untuk jembatan, total jumlah jembatan kewenangan daerah adalah sebanyak 309 unit dengan 79,29 persen berada pada kondisi baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.105
Kondisi Jembatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021





Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2022

2.1.4.2.2 Jaringan Listrik

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada saat ini dilayani oleh 5 (lima) unit Rayon PLN yang ditugaskan untuk melayani distribusi tenaga listrik kepada pelanggan. Di antaranya adalah Rayon Sutami, Rayon Kata Metro, Rayon Sribhawono, Rayon Rumbia, dan Rayon Sukadana. Rayon di lingkungan PT PLN (Persero) Area Metro yang murni melayani pelanggan di bagian wilayah kerja Pemerintah kewenangan Kabupaten Lampung Timur (berdasarkan bentangan jaringan terdekat) adalah Rayon Sribhawono.

Selama tahun 2024, PT PLN (Persero) Rayon Sribhawono mencatat jumlah listrik yang terjual baik pascabayar maupun prabayar sebesar 321 juta KWh. Jumlah listrik yang terjual tersebut mengalami peningkatan sebesar 3 juta KWh atau 0,88 persen dibanding tahun sebelumnya. Terkait distribusi listrik di Kabupaten Lampung Timur terus meningkat kurun waktu sembilan tahun terakhir, sebagaimana ditampilkan tabel di bawah ini.

Tabel 2.41
Distribusi Listrik PT. PLN pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Lampung Timur

Tahun	Daya Terpasang	Produksi Listrik	Listrik Terjual	Dipakai Sendiri	Susut/Hilang
2020	164.458,75	322.537.081,71	291.888.639,00	3.197.801,76	31.270.791,47
2021	176.100,60	332.931.576,50	291.195.837,30	1.567.676,76	39.340.656,97
2022	183.895,65	349.645.008,80	303.576.315,50	2.501.191,35	43.199.889,39
2023	193.691,15	370.448.159,40	318.245.615,40	2.997.158,02	47.971.794,98
2024	200.855,30	377.611.995,01	321.722.990,81	3.091.712,30	37.318.985,10

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam keputusan untuk berinvestasi. Selain faktor-faktor



ekonomi, faktor non ekonomi seperti kondisi politik, stabilitas keamanan, dan penegakan hukum menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menarik minat investasi.

Proses perizinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2009, dan pada tahun 2013 dinaikkan statusnya menjadi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. Sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah diatur standar waktu pelayanan perizinan yang dikelola BPTSPPM yaitu paling lama 14 hari kerja.

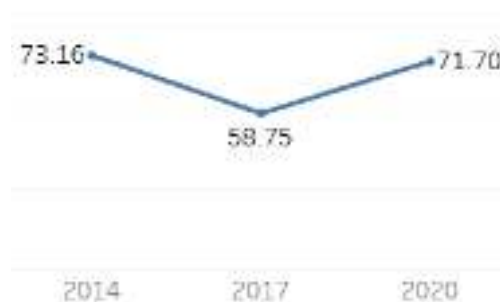
Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek dan menyederhanakan birokrasi perizinan, pada tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan dari diterbitkannya peraturan tersebut adalah untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan terjangkau.

Selain dengan menerbitkan peraturan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi sudah mulai dioptimalkan melalui peluncuran perizinan online yang disebut Sicantik CLOUD yang diharapkan bisa semakin mempermudah dan mempercepat proses perizinan.

2.1.4.3.1 Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Pada dasarnya situasi yang kondusif di daerah adalah untuk meningkatkan persepsi aman di masyarakat. Terkait dengan rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat, berdasarkan data BPS RI, pada tahun 2020 sebesar 71,7 persen penduduk Provinsi Lampung merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Meningkat dibandingkan data tahun 2017, namun turun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 73,16 persen.

Grafik 2.106
Proporsi Penduduk Lampung yang Merasa Aman Berjalan Sendirian
di Area Tempat Tinggalnya



Sumber: BPS RI, 2023

2.1.4.3.2 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Kerukunan bagi orang Indonesia adalah keniscayaan. Kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati,

menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indeks Kerukunan Umat Beragama didapatkan dengan melakukan survey Kerukunan Umat Beragama. Survey ini dilakukan untuk memetakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Tiga dimensi yang digunakan dalam mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu: toleransi (sebagai sikap kesediaan menerima dan menghargai); kesetaraan (pandangan dan sikap hidup terhadap pemeluk agama lain dalam urusan hak dan kewajiban); kerjasama (bentuk nyata dari hubungan sosial antar pemeluk agama). Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Timur merujuk data Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung.

Grafik 2.107
Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber: Badan LITBANG dan Diklat Kementerian Agama RI, 2025

Keterangan: Data IKUB Provinsi Lampung tahun 2020 tidak tersedia

2.1.4.3.3 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2022 mengacu kepada *global competitiveness index* (GCI) 2019, yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Skor IDSD Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 3,37, masih berada di bawah skor IDSD Provinsi Lampung yaitu 3,46. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-9 dengan skor IDSD tertinggi.

Tingkat Penguasaan IPTEK Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat dari pilar ke-12 IDSD yaitu Indeks Kapabilitas Inovasi. Pada tahun 2024, Indeks Kapabilitas Inovasi



Kabupaten Lampung Timur mencapai 1,98, meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 1,53. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-5 dengan Indeks Kapabilitas Inovasi tertinggi.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Indeks Pendidikan

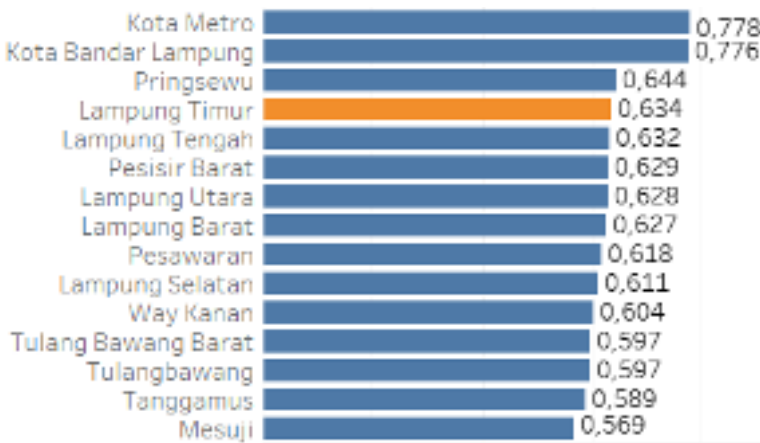
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah adalah indeks pendidikan. Indeks pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan indikator pembentuk yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2020, indeks pendidikan Kabupaten Lampung Timur mencapai 0,610, cenderung mengalami peningkatan dalam waktu lima tahun terakhir hingga mencapai 0,634 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-4 dengan indeks pendidikan tertinggi.

Grafik 2.108
Indeks Pendidikan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.109
Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

2.1.4.4.2 Ketenagakerjaan

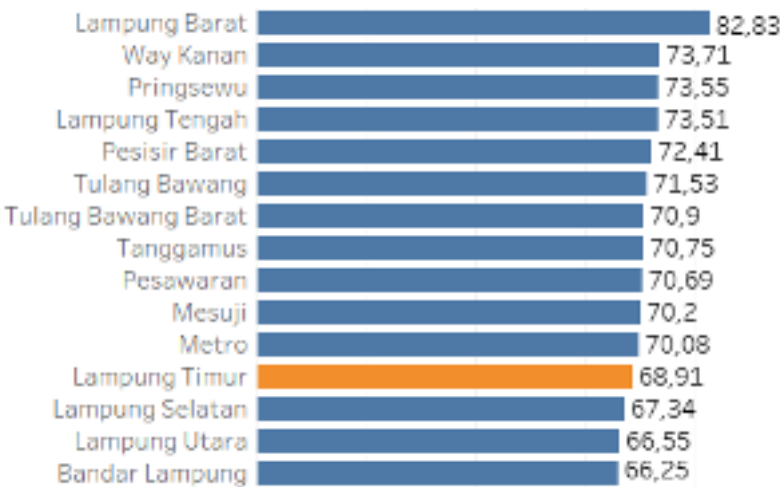




Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Lampung timur di tahun 2024 yaitu jumlah angkatan kerja mencapai 608.326 jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja mencapai 274.518 jiwa. Di antara angkatan kerja, yang mempunyai status pekerja (bekerja) mencapai 589.967 jiwa dan pengangguran (tidak bekerja) sebesar 18.359 jiwa. Untuk jumlah bukan angkatan kerja dibagi atas yang beraktivitas sekolah sebesar 60.132 jiwa, mengurus rumah tangga 181.758 jiwa, dan lainnya sebesar 32.628 jiwa.

Salah satu indikator ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-4 dengan TPAK terendah di Provinsi Lampung.

Grafik 2.110
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024

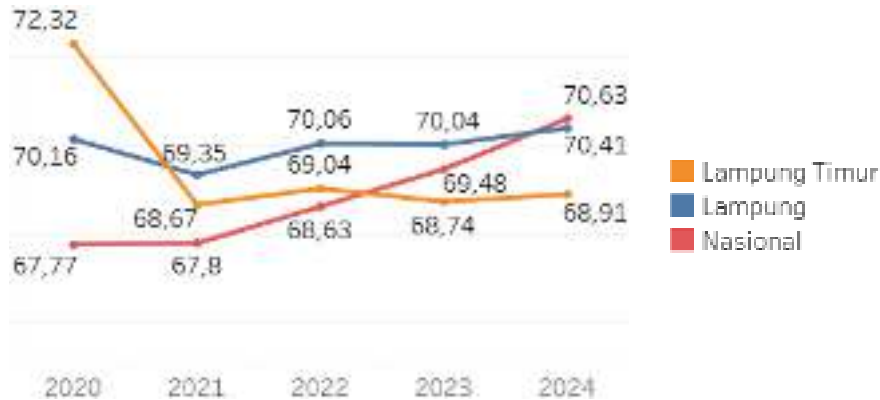


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

TPAK Kabupaten Lampung Timur cenderung meningkat pada setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kecuali pada tahun 2021 yang mengalami penurunan sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Lampung Timur mencapai 68,91 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 68,74 persen.

Grafik 2.111
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional

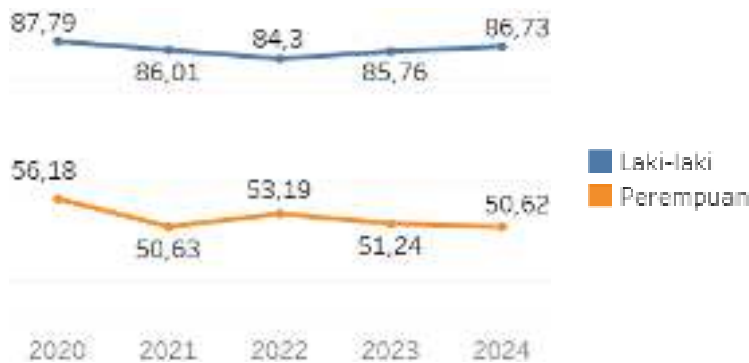




Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

TPAK Perempuan Kabupaten Lampung Timur masih berada jauh di bawah TPAK Laki-Laki. TPAK Perempuan cenderung berfluktuasi, pada lima tahun terakhir TPAK tertinggi terdapat pada tahun 2020, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 dan meningkat pada tahun 2022, selanjutnya kembali menurun pada tahun 2023-2024 dengan capaian paling rendah berada pada tahun terakhir yaitu sebesar 50,62 persen. TPAK Laki-laki mencapai 86,73 persen pada tahun 2024, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 85,76 persen.

Grafik 2.112
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur Menurut Jenis Kelamin

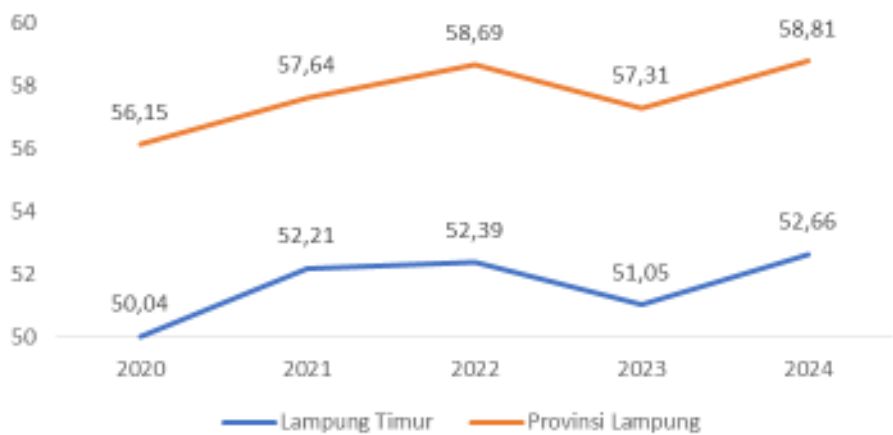


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang atau jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Tingkat produktivitas tenaga kerja mencerminkan efisiensi dan efektivitas tenaga kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tingkat Produktivitas tenaga kerja Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024. Meskipun sempat menurun pada tahun 2023, capaian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 52,66 juta rupiah per tenaga kerja, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kinerja ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi tenaga kerja di daerah, meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 58,81 juta rupiah per tenaga kerja pada tahun yang sama.



Grafik 2.113
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Lampung



Sumber: Pusdatik Kemnaker, 2025

2.1.4.4.3 Rasio Ketergantungan

Untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang berusia produktif terhadap penduduk yang berusia tidak produktif dapat digunakan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Penduduk berusia produktif adalah penduduk angkatan kerja yakni penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia di bawah 15 tahun, penduduk ini secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk yang berusia di atas 65 tahun juga merupakan kelompok penduduk dengan usia tidak produktif, hal ini dikarenakan sudah melewati masa pensiun dan sudah tidak bekerja lagi.

Grafik 2.114
Rasio Ketergantungan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)



Pada tahun 2020, angka rasio ketergantungan Kabupaten Lampung Timur berada pada nilai 45,81 persen, mengalami kecenderungan meningkat hingga tahun 2022 menjadi 46,22 persen, kemudian kembali menurun pada tahun 2023 mencapai rasio sebesar 44,54 persen dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 44,81 persen. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak produktif.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas 29 jenis pelayanan yang apabila dipisahkan berdasarkan urusan pengampu terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan sosial.

2.1.5.1 SPM Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.42
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)
		Indikator Pencapaian	Target (%)	
1.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	67,53
2.	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	95,56
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	15,04

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

2.1.5.2 SPM Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan 12 jenis pelayanan kesehatan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, yaitu: a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. Pelayanan kesehatan balita; e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Realisasi kinerja SPM Bidang Kesehatan yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.43
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator	Target (%)	2021	2022	2023	2024
I	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	90,83	87,38	84,96	83,30
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	89,77	86,11	94,02	85,06



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator	Target (%)	2021	2022	2023	2024
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	100	93,79	90,04	92,64	83,26
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar bulan mendalam kurun waktu satu tahun	100	98,59	79,89	77,41	90,68
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	92,64	95,83	93,66	91,71
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	95,23	82,54	44,05	74,86
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga berusia 60 tahunatau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	80,14	77,96	83	98,20
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	43,92	66,77	38,34	53,95
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita DM ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	55,23	79,76	76,09	76,19



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator	Target (%)	2021	2022	2023	2024
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	82,82	75,14	95,94	92,45
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	58,03	75,14	75,26	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	52,59	75,14	72,24	72,55

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Berdasarkan 12 indikator yang ada, terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya 100 persen yaitu pelayanan kesehatan orang dengan TB. Sebanyak 4 (empat) indikator capaiannya di atas 90 persen yaitu pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. Kemudian 3 (tiga) indikator capaiannya 80-90 persen yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. 3 (tiga) indikator capaiannya antara 70-80 persen yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus, dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Serta 1 (satu) indikator capaiannya masih sangat rendah yaitu pelayanan penderita hipertensi sebesar 53,95 persen. Berdasarkan capaian Kabupaten Lampung Timur tahun 2024, kategori indeks pencapaian SPM Bidang Kesehatan berada di kategori Tuntas Pratama dengan total pencapaian sebesar 83,77 persen.

Upaya agar capaian SPM bidang kesehatan dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan tahapan SPM di antaranya dengan perhitungan yang rasional antara sasaran SPM dengan ketersediaan anggaran, mengoptimalkan perhitungan kebutuhan dengan *costing* SPM, meningkatkan integrasi dan sinergi baik antar program maupun lintas sektor dalam hal penganggaran dan kegiatan, pemenuhan sarana, prasarana, BMHP dan SDM sesuai jumlah sasaran dan standar pelayanan dasar, meningkatkan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi ke FKTP, serta meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan SPM.

2.1.5.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

Pada tahun 2024, capaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur sudah lebih dari 80 persen walaupun masih belum





mencapai target 100 persen. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran dan beberapa kendala teknis lainnya.

Tabel 2.44
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)
		Indikator Pencapaian	Target (%)	
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	88,18
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	88,59

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2025

Diperlukan tindakan yang strategis dan efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti perbaikan perencanaan proyek, penyelesaian perizinan dengan lebih cepat, optimalisasi alokasi anggaran, serta pemantauan yang lebih ketat terhadap perkembangan proyek. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian SPM Bidang PUPR Kabupaten Lampung Timur dapat meningkat pada periode berikutnya.

2.1.5.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat

Pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur adalah seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.45
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)
		Indikator Pencapaian	Target (%)	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	83,33
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.5.5 SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat





Pelayanan dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur terkait Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait dengan 1). Pelayanan informasi rawan bencana; 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 3). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan 4). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Realisasi yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOL PP Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2024
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara	100	100
2		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara	100	100
3		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	100	100
4		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	100	
5		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	100	100
6		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	100	100

Sumber: SATPOL PP Kabupaten Lampung Timur, 2025

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan





Ketentraman dan Ketertiban Umum serta minimnya PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur untuk pelaksanaan penegakan Perda/Perkada di Lampung Timur dikarenakan keterbatasan anggaran.

Lebih lanjut, realisasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPBD Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	100	0	100	0	100
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100	100		0	100
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	100		28,85	100	100
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	100			100	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dan lain-lain)	100	75,20	99,03	85,37	100
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan	100	15,60	100	19,23	100



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
		Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)					
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	100	100	0	100	100
		Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	100	0	100	0	100
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	100	0	0		100
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100			100	100
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	100	0	38,24	86,40	80
		Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	100			24,32	100



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
		Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	100			57,41	59,38
		Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dan lain-lain), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dan lain-lain)	100			92,73	100
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dan seterusnya)	100			100	100
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	100			100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Lampung Timur, 2025

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM antara lain kurangnya sarana dan prasarana pada BPBD Kabupaten Lampung Timur untuk mengcover 24 (dua puluh empat) kecamatan yang sangat luas dan sangat jauh dari pos DAMKAR di Sukadana, masih





banyaknya personil DAMKAR dan Satgas PB yang belum memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta tidak adanya tim relawan bencana sampai dengan tingkat desa.

2.1.5.6 SPM Bidang Sosial

Pelayanan dasar Bidang Sosial diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur antara lain:

- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.48
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;	Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	0	92	100	99,46
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kabupaten/kota;	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	100	0	85,33	97,33	98,33
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	0	92	100	100



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	0	85,33	100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten / kota	100	1000 paket makan an	96	96,67	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, 2025



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Tabel 2.49
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN S.D. TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN S.D. TAHUN 2024		OPD	KET.
2	3	4	5		6		7		12 = (8 + 9 + 10 + 11)		13 = (12 / 7 x 100)		14 = (6 + 12)		15 = (14 / 5 x 100)		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
1	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	25.786.390.000	0 %	0	0 %	552.696.821.000	0 %	520.900.637.000	0	94,25	0 %	520.900.637.000	0	2.020,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan evaluasi kinerja yang tepat waktu.	0 %	8.507.479.000	0 %	0	0 %	45.696.000	0 %	51.070.000	0	111,76	0 %	51.070.000	0	0,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	7.847.000	1 Dokumen	7.847.000	50	100	1 Dokumen	7.847.000	20	7,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.379.000	1 Dokumen	8.379.000	100	100	1 Dokumen	8.379.000	20	27,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.107.000	0 Dokumen	8.107.000	0	100	0 Dokumen	8.107.000	0	27,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01.00.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.975.000	1 Dokumen	6.975.000	100	100	1 Dokumen	6.975.000	20	23,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.034.000	2 Dokumen	13.009.000	200	215,59	2 Dokumen	13.009.000	40	43,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.187.479.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01.00.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	100.000.000	0 Laporan	0	2 Laporan	8.354.000	2 Laporan	6.753.000	100	80,84	2 Laporan	6.753.000	40	6,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi dan laporan keuangan yang akurat/tabel dan tepat waktu.	0 %	4.500.000.000	0 %	0	0 %	549.743.178.000	0 %	518.307.469.000	0	94,28	0 %	518.307.469.000	0	11.517,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	5.123 Orang/bulan	548.827.290.000	4.670 Orang/bulan	518.006.017.000	91,16	94,38	4.670 Orang/bulan	518.006.017.000	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	750.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	761.376.000	0 Dokumen	135.940.000	0	17,85	0 Dokumen	135.940.000	0	18,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	750.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	122.658.000	2 Dokumen	122.658.000	200	100	2 Dokumen	122.658.000	40	16,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.02.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	750.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	11.000.000	0	0	1 Dokumen	11.000.000	20	1,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	750.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	9.488.000	1 Laporan	9.488.000	100	100	1 Laporan	9.488.000	20	1,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.02.00.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	750.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	12.420.000	0 Laporan	12.420.000	0	100	0 Laporan	12.420.000	0	1,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.02.00.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	750.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	9.946.000	1 Dokumen	9.946.000	100	100	1 Dokumen	9.946.000	20	1,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersedianya laporan pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah.	0 %	800.000.000	0 %	0	0 %	428.309.000	0 %	368.883.000	0	86,13	0 %	368.883.000	0	46,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.03.00.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	83.020.000	2 Dokumen	57.170.000	100	68,86	2 Dokumen	57.170.000	40	19,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	500.000.000	0 Laporan	0	2 Laporan	345.289.000	3 Laporan	311.713.000	150	90,28	3 Laporan	311.713.000	60	62,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian dan Bimtek bagi Pegawai.	0 %	742.626.000	0 %	0	0 %	234.793.000	0 %	199.320.000	0	84,89	0 %	199.320.000	0	26,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.05.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	204.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	146.167.000	3 Dokumen	123.167.000	100	84,26	3 Dokumen	123.167.000	60	60,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.05.00.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	88.626.000	0 Orang	0	30 Orang	88.626.000	0 Orang	76.153.000	0	85,93	0 Orang	76.153.000	0	85,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.05.00.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	450.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum dan pelayanan kantor.	0 %	2.685.000.000	0 %	0	0 %	498.941.000	0 %	365.132.000	0	73,18	0 %	365.132.000	0	13,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	100.000.000	0 Paket	0	5 Paket	11.234.000	5 Paket	2.975.000	100	26,48	5 Paket	2.975.000	10	2,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	1.250.000.000	0 Paket	0	17 Paket	261.994.000	19 Paket	246.244.000	111,76	93,99	19 Paket	246.244.000	63,33	19,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	100.000.000	0 Paket	0	14 Paket	18.361.000	14 Paket	9.214.000	100	50,18	14 Paket	9.214.000	35	9,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	50.000.000	0 Paket	0	8 Paket	25.000.000	8 Paket	10.376.000	100	41,5	8 Paket	10.376.000	40	20,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	250.000.000	0 Paket	0	5 Paket	45.163.000	5 Paket	44.922.000	100	99,47	5 Paket	44.922.000	10	17,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	135.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	300.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	51.401.000	100	68,53	1 Laporan	51.401.000	1,67	17,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.00.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	500.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	62.189.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	0 %	60.000.000	0 %	0	0 %	57.280.000	0 %	46.957.000	0	81,98	0 %	46.957.000	0	78,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.07.00.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	60.000.000	0 Unit	0	1 Unit	57.280.000	1 Unit	46.957.000	100	81,98	1 Unit	46.957.000	100	78,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah.	0 %	5.836.285.000	0 %	0	0 %	1.264.845.000	0 %	1.164.678.000	0	92,08	0 %	1.164.678.000	0	19,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	961.285.000	0 Laporan	0	1 Laporan	74.862.000	1 Laporan	13.862.000	100	18,52	1 Laporan	13.862.000	20	1,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4.875.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	1.189.983.000	2 Laporan	1.150.816.000	200	96,71	2 Laporan	1.150.816.000	40	23,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah.	0 %	2.655.000.000	0 %	0	0 %	423.779.000	0 %	397.128.000	0	93,71	0 %	397.128.000	0	14,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	40 Unit	1.930.000.000	0 Unit	0	8 Unit	287.461.000	8 Unit	262.391.000	100	91,28	8 Unit	262.391.000	20	13,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.09.00.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	225.000.000	0 Unit	0	109 Unit	16.800.000	109 Unit	16.737.000	100	99,63	109 Unit	16.737.000	311,43	7,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.09.00.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	119.518.000	2 Unit	118.000.000	200	98,73	2 Unit	118.000.000	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.09.00.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	500.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	94,25	0		2.020,06			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST			SR	ST		

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										82,44	70,74				30,92	18,12		
PREDIKSI KINERJA SUB KEGIATAN										T	S				SR	SR		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK (Paud, SD dan SMP), APM (SD,SMP)	0 %	#####	0 %	0	0 %	251.519.618.000	0 %	261.954.023.000	0	104,15	0 %	261.954.023.000	0	23,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK (PAUD,SD dan SMP),APM (SD,SMP)	0 %	460.873.910.000	0 %	0	0 %	148.707.823.000	0 %	145.299.595.000	0	97,71	0 %	145.299.595.000	0	31,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	3.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	1.815.000.000	0 Unit	0	72 Unit	15.428.700.000	72 Unit	15.096.132.000	100	97,84	72 Unit	15.096.132.000	240	831,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	30 Paket	940.500.000	0 Paket	0	132 Paket	2.425.953.000	214 Paket	2.398.993.000	162,12	98,89	214 Paket	2.398.993.000	713,33	255,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	50 Paket	3.550.000.000	0 Paket	0	16 Paket	542.266.000	16 Paket	529.631.000	100	97,67	16 Paket	529.631.000	32	14,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.26	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	850.000.000	0 Peserta Didik	0	300 Peserta Didik	321.330.000	300 Peserta Didik	212.784.000	100	66,22	300 Peserta Didik	212.784.000	100	25,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	57 Orang	300.000.000	0 Orang	0	57 Orang	85.563.000	57 Orang	81.713.000	100	95,5	57 Orang	81.713.000	100	27,24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naiknaik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	1.200.000.000	0 Orang	0	200 Orang	426.005.000	200 Orang	383.295.000	100	89,97	200 Orang	383.295.000	40	31,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	575 Satuan Pendidikan	500.000.000	0 Satuan Pendidikan	0	576 Satuan Pendidikan	400.000.000	150 Satuan Pendidikan	288.869.000	26,04	72,22	150 Satuan Pendidikan	288.869.000	26,09	57,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	575 Satuan Pendidikan	423.317.500.000	0 Satuan Pendidikan	0	576 Satuan Pendidikan	79.208.400.000	576 Satuan Pendidikan	79.197.294.000	100	99,99	576 Satuan Pendidikan	79.197.294.000	100,17	18,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	575 Orang	750.000.000	0 Orang	0	690 Orang	300.000.000	690 Orang	155.658.000	100	51,89	690 Orang	155.658.000	120	20,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	202.898.000	1 Dokumen	174.398.000	100	85,95	1 Dokumen	174.398.000	50	69,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	400.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	375.000.000	2 Dokumen	347.400.000	100	92,64	2 Dokumen	347.400.000	40	86,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.41	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	2 Komunitas	400.000.000	0 Komunitas	0	5 Komunitas	200.000.000	5 Komunitas	171.768.000	100	85,88	5 Komunitas	171.768.000	250	42,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	30 Ruang	4.212.910.000	0 Ruang	0	40 Ruang	8.295.917.000	40 Ruang	7.877.363.000	100	94,95	40 Ruang	7.877.363.000	133,33	186,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	336 Orang	400.000.000	0 Orang	0	340 Orang	300.000.000	336 Orang	243.872.000	98,82	81,29	336 Orang	243.872.000	100	60,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	537 Satuan Pendidikan	960.000.000	0 Satuan Pendidikan	0	576 Satuan Pendidikan	353.521.000	576 Satuan Pendidikan	284.370.000	100	80,44	576 Satuan Pendidikan	284.370.000	107,26	29,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	19.800.000.000	0 Ruang	0	255 Ruang	35.784.330.000	255 Ruang	33.863.315.000	100	94,63	255 Ruang	33.863.315.000	850	171,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	500.000.000	0 Peserta Didik	0	552 Peserta Didik	350.616.000	543 Peserta Didik	334.416.000	98,37	95,38	543 Peserta Didik	334.416.000	108,6	66,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	25 Paket	725.000.000	0 Paket	0	42 Paket	3.707.324.000	42 Paket	3.658.324.000	100	98,68	42 Paket	3.658.324.000	168	504,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	0 %	166.656.870.000	0 %	0	0 %	84.803.655.000	0 %	82.400.223.000	0	97,17	0 %	82.400.223.000	0	49,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit	2.500.000.000	0 Unit	0	70 Unit	19.029.382.000	70 Unit	18.522.629.000	100	97,34	70 Unit	18.522.629.000	280	740,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	2.835.000.000	0 Ruang	0	61 Ruang	9.138.940.000	61 Ruang	8.868.547.000	100	97,04	61 Ruang	8.868.547.000	203,33	312,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.05	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	30 Paket	350.000.000	0 Paket	0	25 Paket	635.304.000	25 Paket	166.534.000	100	26,21	25 Paket	166.534.000	83,33	47,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.07	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	30 Paket	1.000.000.000	0 Paket	0	8 Paket	397.500.000	8 Paket	386.638.000	100	97,27	8 Paket	386.638.000	26,67	38,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.08	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	500.000.000	0 Peserta Didik	0	312 Peserta Didik	372.000.000	306 Peserta Didik	354.900.000	98,08	95,4	306 Peserta Didik	354.900.000	306	70,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.08	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	1.000.000.000	0 Peserta Didik	0	400 Peserta Didik	344.000.000	400 Peserta Didik	132.303.000	100	38,46	400 Peserta Didik	132.303.000	400	13,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.09	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45 Orang	400.000.000	0 Orang	0	45 Orang	85.563.000	45 Orang	81.233.000	100	94,94	45 Orang	81.233.000	100	20,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naiknaik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	1.150.000.000	0 Orang	0	300 Orang	400.000.000	300 Orang	343.054.000	100	85,76	300 Orang	343.054.000	60	29,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	400 Satuan Pendidikan	500.000.000	0 Satuan Pendidikan	0	184 Satuan Pendidikan	353.250.000	184 Satuan Pendidikan	248.490.000	100	70,34	184 Satuan Pendidikan	248.490.000	46	49,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.49	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	180 Satuan Pendidikan	151.544.370.000	0 Satuan Pendidikan	0	184 Satuan Pendidikan	45.173.000.000	184 Satuan Pendidikan	45.149.011.000	100	99,95	184 Satuan Pendidikan	45.149.011.000	102,22	29,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	180 Orang	500.000.000	0 Orang	0	386 Orang	182.000.000	746 Orang	118.051.000	193,26	64,86	746 Orang	118.051.000	414,44	23,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	92.500.000	1 Dokumen	72.061.000	100	77,9	1 Dokumen	72.061.000	100	36,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	400.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	314.780.000	100	89,94	2 Dokumen	314.780.000	100	78,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.54	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	16 Komunitas	500.000.000	0 Komunitas	0	16 Komunitas	300.000.000	16 Komunitas	251.670.000	100	83,89	16 Komunitas	251.670.000	100	50,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	61 Satuan Pendidikan	960.000.000	0 Satuan Pendidikan	0	184 Satuan Pendidikan	453.976.000	184 Satuan Pendidikan	400.150.000	100	88,14	184 Satuan Pendidikan	400.150.000	301,64	41,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	742.500.000	0 Ruang	0	25 Ruang	6.377.840.000	25 Ruang	5.884.972.000	100	92,27	25 Ruang	5.884.972.000	125	792,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	500.000.000	0 Orang	0	120 Orang	100.000.000	120 Orang	94.750.000	100	94,75	120 Orang	94.750.000	100	18,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	30 Paket	1.075.000.000	0 Paket	0	8 Paket	1.018.400.000	8 Paket	1.010.450.000	100	99,22	8 Paket	1.010.450.000	26,67	94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	0 %	103.885.000.000	0 %	0	0 %	14.505.781.000	0 %	30.982.759.000	0	213,59	0 %	30.982.759.000	0	29,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	30 Unit	1.625.000.000	0 Unit	0	50 Unit	2.124.425.000	50 Unit	1.649.531.000	100	77,65	50 Unit	1.649.531.000	166,67	101,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	6 Paket	795.000.000	0 Paket	0	33 Paket	555.325.000	33 Paket	542.383.000	100	97,67	33 Paket	542.383.000	550	68,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	5 Paket	825.000.000	0 Paket	0	14 Paket	312.631.000	14 Paket	305.331.000	100	97,66	14 Paket	305.331.000	280	37,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	94 Peserta Didik	300.000.000	0 Peserta Didik	0	94 Peserta Didik	75.000.000	94 Peserta Didik	67.860.000	100	90,48	94 Peserta Didik	67.860.000	100	22,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	48 Orang	350.000.000	0 Orang	0	48 Orang	85.563.000	48 Orang	71.038.000	100	83,02	48 Orang	71.038.000	100	20,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naiknaik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	775.000.000	0 Orang	0	125 Orang	565.000.000	125 Orang	546.834.000	100	96,78	125 Orang	546.834.000	25	70,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	500 Satuan Pendidikan	1.500.000.000	0 Satuan Pendidikan	0	841 Satuan Pendidikan	425.000.000	841 Satuan Pendidikan	425.000.000	100	100	841 Satuan Pendidikan	425.000.000	168,2	28,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	500 Satuan Pendidikan	88.925.000.000	0 Satuan Pendidikan	0	841 Satuan Pendidikan	17.250.000	841 Satuan Pendidikan	17.221.068.000	100	99.832,28	841 Satuan Pendidikan	17.221.068.000	168,2	19,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.03	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	115.017.000	100	85,2	1 Dokumen	115.017.000	100	115,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.09	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	1 Komunitas	200.000.000	0 Komunitas	0	1 Komunitas	200.000.000	1 Komunitas	164.620.000	100	82,31	1 Komunitas	164.620.000	100	82,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	30 Ruang	2.700.000.000	0 Ruang	0	27 Ruang	3.331.536.000	27 Ruang	3.271.334.000	100	98,19	27 Ruang	3.271.334.000	90	121,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	6 Paket	1.250.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.07	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	100 Satuan Pendidikan	500.000.000	0 Satuan Pendidikan	0	94 Satuan Pendidikan	425.000.000	94 Satuan									

1.01.02.2.03.00.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	4.040.000.000	0 Ruang	0	46 Ruang	6.254.051.000	46 Ruang	6.177.824.000	100	98,78	46 Ruang	6.177.824.000	153,33	152,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 Tahun	0 %	380.435.785.000	0 %	0	0 %	3.502.359.000	0 %	3.271.446.000	0	93,41	0 %	3.271.446.000	0	0,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.04.00.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40 Orang	375.000.000.000	0 Orang	0	50 Orang	85.357.000	50 Orang	80.395.000	100	94,19	50 Orang	80.395.000	125	0,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.04.00.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	500.000.000	0 Orang	0	50 Orang	144.311.000	50 Orang	140.668.000	100	97,48	50 Orang	140.668.000	125	28,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.04.00.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan	500.000.000	0 Satuan Pendidikan	0	21 Satuan Pendidikan	91.436.000	0 Satuan Pendidikan	82.059.000	0	89,74	0 Satuan Pendidikan	82.059.000	0	16,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.04.00.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan	2.500.000.000	0 Satuan Pendidikan	0	21 Satuan Pendidikan	2.880.600.000	21 Satuan Pendidikan	2.682.215.000	100	93,11	21 Satuan Pendidikan	2.682.215.000	131,25	107,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.04.00.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	85.750.000	1 Dokumen	75.750.000	100	88,34	1 Dokumen	75.750.000	2	75,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.04.00.46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	1.835.785.000	0 Peserta Didik	0	21 Peserta Didik	214.905.000	21 Peserta Didik	210.359.000	100	97,88	21 Peserta Didik	210.359.000	21	11,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	104,15		0	23,56			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											96,08	1.834,64		151,82	108			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	ST		ST	ST			
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 %	90.000.000	0 %	0	0 %	24.252.800.000	0 %	24.166.093.000	0	99,64	0 %	24.166.093.000	0	26.851,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pemerataan Tenaga Pendidik (guru) PNS yang mendapatkan sertifikasi dan Guru Honor yang mendapatkan bantuan transport.	0 %	90.000.000	0 %	0	0 %	24.252.800.000	0 %	24.166.093.000	0	99,64	0 %	24.166.093.000	0	26.851,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.04.2.01.00.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	90.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	24.252.800.000	4 Dokumen	24.166.093.000	200	99,64	4 Dokumen	24.166.093.000	80	26.851,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	99,64		0	26.851,21			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											200	99,64		80	26.851,21			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	ST		T	ST			
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	0 %	250.000.000	0 %	0	0 %	68.260.000	0 %	66.485.000	0	97,4	0 %	66.485.000	0	26,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah usul perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	0 %	250.000.000	0 %	0	0 %	68.260.000	0 %	66.485.000	0	97,4	0 %	66.485.000	0	26,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.05.2.02.00.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	68.260.000	1 Dokumen	66.485.000	100	97,4	1 Dokumen	66.485.000	20	26,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	97,4		0	26,59			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	97,4		20	26,59			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	ST		SR	SR			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Peranekat Daerah	79 %	738.488.131.743	0 %	0	77 %	219.494.681.658	0 %	205.137.375.013	0	93,46	0 %	205.137.375.013	0	27,78	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranekat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan	100 %	1.001.795.200	0 %	0	100 %	156.003.001	0 %	103.128.200	0	66,11	0 %	103.128.200	0	10,29	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	150.280.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	32.000.001	4 Dokumen	25.118.000	100	78,49	4 Dokumen	25.118.000	16	16,71	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50 Dokumen	382.050.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	33.525.700	100	67,05	2 Dokumen	33.525.700	4	8,78	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	163.586.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	27.265.000	1 Dokumen	11.336.000	100	41,58	1 Dokumen	11.336.000	20	6,93	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	56.487.200	0 Dokumen	0	2 Dokumen	9.412.000	1 Dokumen	7.030.000	50	74,69	1 Dokumen	7.030.000	20	12,45	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	79.592.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	13.266.000	1 Dokumen	8.119.500	100	61,21	1 Dokumen	8.119.500	20	10,2	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	55.494.000	0 Laporan	0	2 Laporan	7.247.000	0 Laporan	3.865.000	0	53,33	0 Laporan	3.865.000	0	6,96	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	114.306.000	0 Laporan	0	2 Laporan	16.813.000	2 Laporan	14.134.000	100	84,07	2 Laporan	14.134.000	40	12,37	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100 %	652.632.978.923	0 %	0	100 %	110.272.149.398	100 %	105.962.384.550	100	96,09	100 %	105.962.384.550	100	16,24	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.220 Orang/bulan	846.029.319.117	0 Orang/bulan	0	1.444 Orang/bulan	109.077.954.822	4.410 Orang/bulan	105.005.689.450	305,4	96,27	4.410 Orang/bulan	105.005.689.450	61,08	16,25	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	4.143.480.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	711.875.270	12 Dokumen	614.936.500	100	86,38	12 Dokumen	614.936.500	20	14,84	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	1.879.251.806	0 Dokumen	0	12 Dokumen	340.149.408	12 Dokumen	315.024.600	100	92,61	12 Dokumen	315.024.600	20	16,76	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	108.316.000	0 Dokumen	0	36 Dokumen	90.260.000	5 Dokumen	13.626.000	13,89	15,1	5 Dokumen	13.626.000	8,33	12,58	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	114.400.000	0 Laporan	0	1 Laporan	6.909.900	1 Laporan	6.270.000	100	90,74	1 Laporan	6.270.000	20	5,48	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.06	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	292.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	35.000.000	3 Dokumen	1.950.000	100	5,57	3 Dokumen	1.950.000	15	0,67	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	10 Laporan	66.212.000	0 Laporan	0	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	4.888.000	100	48,88	2 Laporan	4.888.000	20	7,38	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan	0 %	1.095.964.000	0 %	0	100 %	229.450.000	100 %	162.867.488	100	70,98	100 %	162.867.488	0	14,86	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03.00.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan	414.800.000	0 Laporan	0	6 Laporan	130.000.000	6 Laporan	110.579.488	100	85,06	6 Laporan	110.579.488	60	26,66	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03.00.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	170 Laporan	205.444.000	0 Laporan	0	34 Laporan	20.000.000	4 Laporan	3.103.000	11,76	15,52	4 Laporan	3.103.000	2,35	1,51	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03.00.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	74.400.000	0 Laporan	0	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	3.975.000	100	26,5	2 Laporan	3.975.000	16,67	5,34	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	401.320.000	0 Laporan	0	2 Laporan	64.450.000	2 Laporan	45.210.000	100	70,15	2 Laporan	45.210.000	20	11,27	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan	100 %	672.980.000	0 %	0	100 %	47.965.314	100 %	33.797.800	100	70,46	100 %	33.797.800	100	5,02	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.05.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60 Dokumen	80.480.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	18.965.314	12 Dokumen	12.935.400	600	68,21	12 Dokumen	12.935.400	20	16,07	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.05.00.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.020 Dokumen	592.500.000	0 Dokumen	0	170 Dokumen	29.000.000	20 Dokumen	20.862.400	11,76	71,94	20 Dokumen	20.862.400	1,96	3,52	Dinas Kesehatan	

1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan	100 %	2.407.468.000	0 %	0	100 %	444.010.030	100 %	349.643.467	100	76,68	100 %	349.643.467	100	14,52	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	190.000.000	0 Paket	0	4 Paket	20.000.000	4 Paket	19.839.200	100	99,2	4 Paket	19.839.200	6,67	10,44	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	380.000.000	0 Paket	0	8 Paket	92.380.022	8 Paket	90.427.800	100	97,89	8 Paket	90.427.800	44,44	23,8	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	66.808.000	0 Paket	0	4 Paket	10.000.000	4 Paket	9.974.200	100	99,74	4 Paket	9.974.200	6,67	14,93	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	169.074.400	0 Paket	0	12 Paket	30.000.000	12 Paket	19.860.100	100	66,2	12 Paket	19.860.100	20	11,75	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	324.516.000	0 Paket	0	12 Paket	50.000.000	12 Paket	48.872.200	100	97,74	12 Paket	48.872.200	20	15,06	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dokumen	207.360.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	39.900.000	100	99,75	12 Dokumen	39.900.000	20	19,24	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.00.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72 Laporan	160.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	20.000.000	6 Laporan	3.540.000	50	17,7	6 Laporan	3.540.000	8,33	2,21	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552 Laporan	909.709.600	0 Laporan	0	64 Laporan	182.030.008	34 Laporan	117.229.967	53,13	64,4	34 Laporan	117.229.967	6,16	12,89	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50.159.900	0 %	0	100 %	50.159.900	100 %	47.040.000	100	93,78	100 %	47.040.000	100	93,78	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	39 Unit	50.159.900	0 Unit	0	39 Unit	50.159.900	39 Unit	47.040.000	100	93,78	39 Unit	47.040.000	100	93,78	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan	100 %	2.796.785.720	0 %	0	100 %	656.900.000	100 %	525.916.036	100	80,06	100 %	525.916.036	100	18,8	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.162.500.000	0 Laporan	0	12 Laporan	263.000.000	12 Laporan	148.716.236	100	56,55	12 Laporan	148.716.236	20	12,79	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	1.534.285.720	0 Laporan	0	12 Laporan	393.900.000	12 Laporan	377.199.800	100	95,76	12 Laporan	377.199.800	20	23,08	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan	100 %	1.430.000.000	0 %	0	100 %	355.000.000	100 %	233.706.189	100	65,83	100 %	233.706.189	100	16,34	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	400.000.000	0 Unit	0	8 Unit	100.000.000	5 Unit	85.250.749	62,5	85,25	5 Unit	85.250.749	71,43	21,31	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	200.000.000	0 Unit	0	21 Unit	130.000.000	16 Unit	34.499.500	76,19	26,54	16 Unit	34.499.500	53,33	17,25	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	280.000.000	0 Unit	0	61 Unit	50.000.000	55 Unit	39.067.500	90,16	78,14	55 Unit	39.067.500	63,95	13,95	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.00.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	550.000.000	0 Unit	0	1 Unit	75.000.000	1 Unit	74.888.440	100	99,85	1 Unit	74.888.440	16,67	13,62	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	35 %	76.400.000.000	0 %	0	100 %	107.282.644.015	35 %	97.718.891.283	35	91,09	35 %	97.718.891.283	100	127,9	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja	76.400.000.000	0 Unit Kerja	0	35 Unit Kerja	107.282.644.015	35 Unit Kerja	97.718.891.283	100	91,09	35 Unit Kerja	97.718.891.283	100	127,9	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	93,46			0	27,78		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											103,47	69,53			27,31	17,96		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	S			SR	SR		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	738.488.131.743	0 %	0	77 %	219.494.681.658	0 %	205.137.375.013	0	93,46	0 %	205.137.375.013	0	27,78	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan	100 %	1.001.795.200	0 %	0	100 %	156.003.001	0 %	103.128.200	0	66,11	0 %	103.128.200	0	10,29	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	150.280.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	32.000.001	4 Dokumen	25.118.000	100	78,49	4 Dokumen	25.118.000	16	16,71	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50 Dokumen	382.050.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	33.525.700	100	67,05	2 Dokumen	33.525.700	4	8,78	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	163.586.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	27.265.000	1 Dokumen	11.336.000	100	41,58	1 Dokumen	11.336.000	20	6,93	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	56.487.200	0 Dokumen	0	2 Dokumen	9.412.000	1 Dokumen	7.030.000	50	74,69	1 Dokumen	7.030.000	20	12,45	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	79.592.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	13.266.000	1 Dokumen	8.119.500	100	61,21	1 Dokumen	8.119.500	20	10,2	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	55.494.000	0 Laporan	0	2 Laporan	7.247.000	0 Laporan	3.865.000	0	53,33	0 Laporan	3.865.000	0	6,96	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.00.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	114.306.000	0 Laporan	0	2 Laporan	16.813.000	2 Laporan	14.134.000	100	84,07	2 Laporan	14.134.000	40	12,37	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100 %	652.632.978.923	0 %	0	100 %	110.272.149.398	100 %	105.962.384.550	100	96,09	100 %	105.962.384.550	100	16,24	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.220 Orang/bulan	646.029.319.117	0 Orang/bulan	0	1.444 Orang/bulan	109.077.954.822	4.410 Orang/bulan	105.005.689.450	305,4	96,27	4.410 Orang/bulan	105.005.689.450	61,08	16,25	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	4.143.480.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	711.875.270	12 Dokumen	614.936.500	100	86,38	12 Dokumen	614.936.500	20	14,84	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	1.879.251.806	0 Dokumen	0	12 Dokumen	340.149.406	12 Dokumen	315.024.600	100	92,61	12 Dokumen	315.024.600	20	16,76	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	108.316.000	0 Dokumen	0	36 Dokumen	90.260.000	5 Dokumen	13.626.000	13,89	15,1	5 Dokumen	13.626.000	8,33	12,58	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	114.400.000	0 Laporan	0	1 Laporan	6.909.900	1 Laporan	6.270.000	100	90,74	1 Laporan	6.270.000	20	5,48	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.06	Pengelolaan dan Penyalpan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	292.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	35.000.000	3 Dokumen	1.950.000	100	5,57	3 Dokumen	1.950.000	15	0,67	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.00.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	66.212.000	0 Laporan	0	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	4.888.000	100	48,88	2 Laporan	4.888.000	20	7,38	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan	0 %	1.095.964.000	0 %	0	100 %	229.450.000	100 %	162.867.488	100	70,98	100 %	162.867.488	0	14,86	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03.00.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan	414.800.000	0 Laporan	0	6 Laporan	130.000.000	6 Laporan	110.579.488	100	85,06	6 Laporan	110.579.488	60	26,66	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03.00.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	170 Laporan	205.444.000	0 Laporan	0	34 Laporan	20.000.000	4 Laporan	3.103.000	11,76	15,52	4 Laporan	3.103.000	2,35	1,51	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03.00.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	74.400.000	0 Laporan	0	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	3.975.000	100	26,5	2 Laporan	3.975.000	16,67	5,34	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03.00.08	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	401.320.000	0 Laporan	0	2 Laporan	64.450.000	2 Laporan	45.210.000	100	70,15	2 Laporan	45.210.000	20	11,27	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.05	Administrasi Kewaspadaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kewaspadaan pada Dinas Kesehatan	100 %	672.980.000	0 %	0	100 %	47.965.314	100 %	33.797.800	100	70,46	100 %	33.797.800	100	5,02	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.05.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kewaspadaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kewaspadaan	60 Dokumen	80.480.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	18.965.314	12 Dokumen	12.935.400	600	68,21	12 Dokumen	12.935.400	20	16,07	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.05.00.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.020 Dokumen	592.500.000	0 Dokumen	0	170 Dokumen	29.000.000	20 Dokumen	20.862.400	11,76	71,94	20 Dokumen	20.862.400	1,96	3,52	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan	100 %	2.407.468.000	0 %	0	100 %	444.410.030	100 %	349.643.467	100	76,68	100 %	349.643.467	100	14,52	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	190.000.000	0 Paket	0	4 Paket	20.000.000	4 Paket	19.839.200	100	99,2	4 Paket	19.839.200	6,67	10,44	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	380.000.000	0 Paket	0	8 Paket	92.380.022	8 Paket	90.427.800	100	97,89	8 Paket	90.427.800	44,44	23,8	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	66.808.000	0 Paket	0	4 Paket	10.000.000	4 Paket	9.974.200	100	99,74	4 Paket	9.974.200	6,67	14,93	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	169.074.400	0 Paket	0	12 Paket	30.000.000	12 Paket	19.860.100	100	66,2	12 Paket	19.860.100	20	11,75	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	324.516.000	0 Paket	0	12 Paket	50.000.000	12 Paket	48.872.200	100	97,74	12 Paket	48.872.200	20	15,06	Dinas Kesehatan	

1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	207.360.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	39.900.000	100	99,75	12 Dokumen	39.900.000	20	19,24	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72 Laporan	160.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	20.000.000	6 Laporan	3.540.000	50	17,7	6 Laporan	3.540.000	8,33	2,21	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552 Laporan	909.709.600	0 Laporan	0	64 Laporan	182.030.008	34 Laporan	117.229.967	53,13	64,4	34 Laporan	117.229.967	6,16	12,89	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50.159.900	0 %	0	100 %	50.159.900	100 %	47.040.000	100	93,78	100 %	47.040.000	100	93,78	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	39 Unit	50.159.900	0 Unit	0	39 Unit	50.159.900	39 Unit	47.040.000	100	93,78	39 Unit	47.040.000	100	93,78	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan	100 %	2.796.785.720	0 %	0	100 %	656.900.000	100 %	525.916.036	100	80,06	100 %	525.916.036	100	18,8	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.162.500.000	0 Laporan	0	12 Laporan	263.000.000	12 Laporan	148.716.236	100	56,55	12 Laporan	148.716.236	20	12,79	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	1.634.285.720	0 Laporan	0	12 Laporan	393.900.000	12 Laporan	377.199.800	100	95,76	12 Laporan	377.199.800	20	23,08	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan	100 %	1.430.000.000	0 %	0	100 %	355.000.000	100 %	233.706.189	100	65,83	100 %	233.706.189	100	16,34	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	400.000.000	0 Unit	0	8 Unit	100.000.000	5 Unit	85.250.749	62,5	85,25	5 Unit	85.250.749	71,43	21,31	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	200.000.000	0 Unit	0	21 Unit	130.000.000	16 Unit	34.499.500	76,19	26,54	16 Unit	34.499.500	53,33	17,25	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	280.000.000	0 Unit	0	61 Unit	50.000.000	55 Unit	39.067.500	90,16	78,14	55 Unit	39.067.500	63,95	13,95	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	550.000.000	0 Unit	0	1 Unit	75.000.000	1 Unit	74.888.440	100	99,85	1 Unit	74.888.440	16,67	13,62	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	35 %	76.400.000.000	0 %	0	100 %	107.282.644.015	35 %	97.718.891.283	35	91,09	35 %	97.718.891.283	100	127,9	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja	76.400.000.000	0 Unit Kerja	0	35 Unit Kerja	97.718.891.283	35 Unit Kerja	97.718.891.283	100	91,09	35 Unit Kerja	97.718.891.283	100	127,9	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	93,46			0	27,78		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											103,47	69,53			27,31	17,96		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	S			SR	SR		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	100 %	738.488.131.743	0 %	0	77 %	219.494.681.658	0 %	205.137.375.013	0	93,46	0 %	205.137.375.013	0	27,78	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan	100 %	1.001.795.200	0 %	0	100 %	156.003.001	0 %	103.128.200	0	66,11	0 %	103.128.200	0	10,29	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	150.280.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	32.000.000	4 Dokumen	25.118.000	100	78,49	4 Dokumen	25.118.000	16	16,71	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50 Dokumen	382.050.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	33.525.700	100	67,05	2 Dokumen	33.525.700	4	8,78	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	163.586.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	27.265.000	1 Dokumen	11.336.000	100	41,58	1 Dokumen	11.336.000	20	6,93	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	56.487.200	0 Dokumen	0	2 Dokumen	9.412.000	1 Dokumen	7.030.000	50	74,69	1 Dokumen	7.030.000	20	12,45	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	79.592.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	13.266.000	1 Dokumen	8.119.500	100	61,21	1 Dokumen	8.119.500	20	10,2	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	55.494.000	0 Laporan	0	2 Laporan	7.247.000	0 Laporan	3.865.000	0	53,33	0 Laporan	3.865.000	0	6,96	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	114.306.000	0 Laporan	0	2 Laporan	16.813.000	2 Laporan	14.134.000	100	84,07	2 Laporan	14.134.000	40	12,37	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100 %	652.632.978.923	0 %	0	100 %	110.272.149.398	100 %	105.962.384.550	100	96,09	100 %	105.962.384.550	100	16,24	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.220 Orang/bulan	846.029.319.117	0 Orang/bulan	0	1.444 Orang/bulan	109.077.954.822	4.410 Orang/bulan	105.005.689.450	305,4	96,27	4.410 Orang/bulan	105.005.689.450	61,08	16,25	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	4.143.480.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	711.875.270	12 Dokumen	614.936.500	100	86,38	12 Dokumen	614.936.500	20	14,84	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	1.879.251.806	0 Dokumen	0	12 Dokumen	340.149.406	12 Dokumen	315.024.600	100	92,61	12 Dokumen	315.024.600	20	16,76	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	108.316.000	0 Dokumen	0	36 Dokumen	90.260.000	5 Dokumen	13.626.000	13,89	15,1	5 Dokumen	13.626.000	8,33	12,58	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	114.400.000	0 Laporan	0	1 Laporan	6.909.900	1 Laporan	6.270.000	100	90,74	1 Laporan	6.270.000	20	5,48	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	292.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	35.000.000	3 Dokumen	1.950.000	100	5,57	3 Dokumen	1.950.000	15	0,67	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	66.212.000	0 Laporan	0	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	4.888.000	100	48,88	2 Laporan	4.888.000	20	7,38	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan	0 %	1.095.964.000	0 %	0	100 %	229.450.000	100 %	162.867.488	100	70,98	100 %	162.867.488	0	14,86	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan	414.800.000	0 Laporan	0	6 Laporan	130.000.000	6 Laporan	110.579.488	100	85,06	6 Laporan	110.579.488	60	26,66	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	170 Laporan	205.444.000	0 Laporan	0	34 Laporan	20.000.000	4 Laporan	3.103.000	11,76	15,52	4 Laporan	3.103.000	2,35	1,51	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	74.400.000	0 Laporan	0	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	3.975.000	100	26,5	2 Laporan	3.975.000	16,67	5,34	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	401.320.000	0 Laporan	0	2 Laporan	64.450.000	2 Laporan	45.210.000	100	70,15	2 Laporan	45.210.000	20	11,27	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan	100 %	672.980.000	0 %	0	100 %	47.965.314	100 %	33.797.800	100	70,46	100 %	33.797.800	100	5,02	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60 Dokumen	80.480.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	18.965.314	12 Dokumen	12.935.400	600	68,21	12 Dokumen	12.935.400	20	16,07	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.020 Dokumen	592.500.000	0 Dokumen	0	170 Dokumen	29.000.000	20 Dokumen	20.862.400	11,76	71,94	20 Dokumen	20.862.400	1,96	3,52	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan	100 %	2.407.468.000	0 %	0	100 %	444.410.036	100 %	349.643.467	100	78,68	100 %	349.643.467	100	14,52	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	190.000.000	0 Paket	0	4 Paket	20.000.000	4 Paket	19.839.200	100	99,2	4 Paket	19.839.200	6,67	10,44	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	380.000.000	0 Paket	0	8 Paket	92.380.022	8 Paket	90.427.800	100	97,89	8 Paket	90.427.800	44,44	23,8	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	66.808.000	0 Paket	0	4 Paket	10.000.000	4 Paket	9.974.200	100	99,74	4 Paket	9.974.200	6,67	14,93	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	169.074.400	0 Paket	0	12 Paket	30.000.000	12 Paket	19.860.100	100	66,2	12 Paket	19.860.100	20	11,75	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	324.516.000	0 Paket	0	12 Paket	50.000.000	12 Paket	48.872.200	100	97,74	12 Paket	48.872.200	20	15,06	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	207.360.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	39.900.000	100	99,75	12 Dokumen	39.900.000	20	19,24	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72 Laporan	160.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	20.000.000	6 Laporan	3.540.000	50	17,7	6 Laporan	3.540.000	8,33	2,21	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552 Laporan	909.709.600	0 Laporan	0	64 Laporan	182.030.008	34 Laporan	117.229.967	53,13	64,4	34 Laporan	117.229.967	6,16	12,89	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50.159.900	0 %	0	100 %	50.159.900	100 %	47.040.000	100	93,78	100 %	47.040.000	100	93,78	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	39 Unit	50.159.900	0 Unit	0	39 Unit	50.159.900	39 Unit	47.040.000	100	93,78	39 Unit	47.040.000	100	93,78	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan	100 %	2.796.785.720	0 %	0	100 %	656.900.000	100 %	525.916.036	100	80,06	100 %	525.916.036	100	18,8	Dinas Kesehatan	

1.02.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.162.500.000	0 Laporan	0	12 Laporan	263.000.000	12 Laporan	148.716.236	100	56,55	12 Laporan	148.716.236	20	12,79	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	1.634.285.720	0 Laporan	0	12 Laporan	393.900.000	12 Laporan	377.199.800	100	95,76	12 Laporan	377.199.800	20	23,08	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan	100 %	1.430.000.000	0 %	0	100 %	355.000.000	100 %	233.706.189	100	65,83	100 %	233.706.189	100	16,34	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	7 Unit	400.000.000	0 Unit	0	8 Unit	100.000.000	5 Unit	85.250.749	62,5	85,25	5 Unit	85.250.749	71,43	21,31	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertzinannya	30 Unit	200.000.000	0 Unit	0	21 Unit	130.000.000	16 Unit	34.499.500	76,19	26,54	16 Unit	34.499.500	53,33	17,25	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	280.000.000	0 Unit	0	61 Unit	50.000.000	55 Unit	39.067.500	90,16	78,14	55 Unit	39.067.500	63,95	13,95	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi	6 Unit	550.000.000	0 Unit	0	1 Unit	75.000.000	1 Unit	74.888.440	100	99,85	1 Unit	74.888.440	16,67	13,62	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	35 %	76.400.000.000	0 %	0	100 %	107.282.644.015	35 %	97.718.891.283	35	91,09	35 %	97.718.891.283	100	127,9	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.10.00.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja	76.400.000.000	0 Unit Kerja	0	35 Unit Kerja	107.282.644.015	35 Unit Kerja	97.718.891.283	100	91,09	35 Unit Kerja	97.718.891.283	100	127,9	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	93,46			0	27,78		
PREDIKSI KINERJA PROGRAM											SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											103,47	69,53			27,31	17,96		
PREDIKSI KINERJA SUB KEGIATAN											ST	S			SR	SR		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	100 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	100	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dipelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Didukung dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.908.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.000	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.258.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.555	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	116.822 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.822 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jantung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jantung Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	76,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.868.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.342	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Menyediakan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.668.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tanaman kawasan tanpa rokok yang tidak dilemukan aktifitas merokok	4 Tatanan	333.305.800	0 Tatanan	0	2 Tatanan	25.000.000	2 Tatanan	7.293.900	100	29,18	2 Tatanan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	80,37		100	21,04			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,92	52,9		33,32	31,67			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R		SR	SR			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	100	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	6,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Pemelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Didunjungi dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.906.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.080	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.258.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.555	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	116.622 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.622 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.02.009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.868.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.342	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.034	Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.868.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatapan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukannya perokok	4 Tatapan	333.305.800	0 Tatapan	0	2 Tatapan	25.000.000	2 Tatapan	7.293.900	100	29,18	2 Tatapan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.046	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.048	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)

PREDIKAT KINERJA PROGRAM

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)

PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan	100 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	100	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didistribusikan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uj dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.906.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.080	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.258.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	116.622 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.622 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.868.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Keljiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,86	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengungan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.342	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.868.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas rokok	4 Tatanan	333.305.800	0 Tatanan	0	2 Tatanan	25.000.000	2 Tatanan	7.293.900	100	29,18	2 Tatanan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100											

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	100	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat Kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diperoleh	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diperoleh Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.906.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.080	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	262.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.588.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.258.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	116.822 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.822 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.688.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalehguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.360	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diinginkan (Kejadian Tidak Diinginkan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diinginkan (Kejadian Tidak Diinginkan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.868.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatapan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan <i>anywhere</i> rokok	4 Tatapan	333.305.800	0 Tatapan	0	2 Tatapan	25.000.000	2 Tatapan	7.293.900	100	29,18	2 Tatapan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.01	Penyelingkaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.01	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INMI) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	80,37		100	21,04			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,92	52,9		33,32	31,57			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R		SR	SR			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Balita	88 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	113,64	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didistribikan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dipelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Didukung dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.906.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.080	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.558.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.263	116.622 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.622 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.868.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.02.00_24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.342	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_27	Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.668.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_44	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak dilemkan aktifitas merokok	4 Tatanan	333.305.800	0 Tatanan	0	2 Tatanan	25.000.000	2 Tatanan	7.293.900	100	29,18	2 Tatanan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00_02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00_03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	80,37		113,64	21,04			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,92	52,9		33,32	31,57			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R		SR	SR			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	69 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	144,93	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Pemelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar serta pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Didunjungi dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.906.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.080	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.258.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	116.622 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.622 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Remaja	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Remaja Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.688.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyedihgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.342	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.868.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	53.091.1318	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemui aktivitas merokok	4 Tatanan	333.305.800	0 Tatanan	0	2 Tatanan	25.000.000	2 Tatanan	7.293.900	100	29,18	2 Tatanan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03	Penyeleenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INMI) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)												100	80,37		144,93	21,04		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM												ST	T		ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)												66,92	52,9		33,32	31,57		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN												S	R		SR	SR		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	50 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	200	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diperiapkan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit		0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.908.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.748.000	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.258.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	116.822 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.822 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.028.547.343	78,19	83,84	10.164 Orang	1.028.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.868.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.342	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diarahkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diarahkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.868.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan	333.305.800	0 Tatanan	0	2 Tatanan	25.000.000	2 Tatanan	7.293.900	100	29,18	2 Tatanan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Diakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	80,37			200	21,04		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,92	52,9			33,32	31,57		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R			SR	SR		

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	80 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	125	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat Kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didapatkan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.906.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.080	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	262.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.588.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.258.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	116.822 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.822 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.688.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalehguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.360	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diinginkan (Kejadian Tidak Diinginkan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diinginkan (Kejadian Tidak Diinginkan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.868.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	4 Tatanan	333.305.800	0 Tatanan	0	2 Tatanan	25.000.000	2 Tatanan	7.293.900	100	29,18	2 Tatanan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.01	Penyelingkaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.01	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INMI) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	80,37		125	21,04			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,92	52,9		33,32	31,57			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R		SR	SR			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	400	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dipekan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Pemelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Ditunjungi dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.906.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.080	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.558.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.263	116.622 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.622 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.868.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.342	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.668.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak dilemkan aktifitas merokok	4 Tatanan	333.305.800	0 Tatanan	0	2 Tatanan	25.000.000	2 Tatanan	7.293.900	100	29,18	2 Tatanan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	80,37		400	21,04			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,92	52,9		33,32	31,57			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R		SR	SR			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	75 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	133,33	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Pemelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar serta pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Didunjungi dan Dintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.906.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.080	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.356.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.258.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	116.622 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.622 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.688.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyedihguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.342	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.868.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	53.091.1318	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditempati aktifitas merokok	4 Tatanan	333.305.800	0 Tatanan	0	2 Tatanan	25.000.000	2 Tatanan	7.293.900	100	29,18	2 Tatanan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03	Penyeleenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INMI) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)												100	80,37		133,33	21,04		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM												ST	T		ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)												66,92	52,9		33,32	31,57		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN												S	R		SR	SR		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	90 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	111,11	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didistribusikan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit		0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.908.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.000	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.258.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.555	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	116.822 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.822 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.028.547.343	78,19	83,84	10.164 Orang	1.028.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.868.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.342	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diarahkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diarahkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.868.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan	333.305.800	0 Tatanan	0	2 Tatanan	25.000.000	2 Tatanan	7.293.900	100	29,18	2 Tatanan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Diakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	80,37			111,11	21,04		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,92	52,9			33,32	31,57		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R			SR	SR		

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	100	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat Kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diperoleh	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diperoleh Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.906.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.080	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	262.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.258.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	116.822 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.822 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.688.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalehguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.360	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diinginkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diinginkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.868.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis	Jumlah orang dengan Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatapan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan anyarany anyarany	4 Tatapan	333.305.800	0 Tatapan	0	2 Tatapan	25.000.000	2 Tatapan	7.293.900	100	29,18	2 Tatapan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.01	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.01	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INMI) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	80,37		100	21,04			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,92	52,9		33,32	31,57			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R		SR	SR			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	66 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	151,52	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Pemeliharaan Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 :1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.906.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.080	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.558.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	91.711 Orang	216.795.000	98,19	98,79	116.622 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	116.622 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.868.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.02.00_24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.342	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_27	Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.668.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_44	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak dilemkan aktifitas merokok	4 Tatanan	333.305.800	0 Tatanan	0	2 Tatanan	25.000.000	2 Tatanan	7.293.900	100	29,18	2 Tatanan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00_02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00_03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	80,37		151,52	21,04			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,92	52,9		33,32	31,57			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R		SR	SR			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan	96 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	104,17	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Pemelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar serta pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Didunjungi dan Dintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00_26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.906.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.080	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00_05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.258.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	116.622 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.622 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Remaja	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Remaja Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.688.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyedihgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.342	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.959	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diinginkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diinginkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.868.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	53.091.1318	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemui aktivitas merokok	4 Tatanan	333.305.800	0 Tatanan	0	2 Tatanan	25.000.000	2 Tatanan	7.293.900	100	29,18	2 Tatanan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03	Penyeleenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INMI) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)												100	80,37		104,17	21,04		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM												ST	T		ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)												66,92	52,9		33,32	31,57		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN												S	R		SR	SR		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	89 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	112,36	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didistribusikan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit		0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.908.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.000	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.258.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	116.822 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.822 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.028.547.343	78,19	83,84	10.164 Orang	1.028.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.868.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.342	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diarahkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diarahkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.868.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatatan	333.305.800	0 Tatatan	0	2 Tatatan	25.000.000	2 Tatatan	7.293.900	100	29,18	2 Tatatan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Diakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	80,37			112,36	21,04		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,92	52,9			33,32	31,57		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R			SR	SR		

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	94 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	106,38	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat Kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.906.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.080	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.258.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	116.622 Orang	919.050.000	98,19	98,79	116.622 Orang	919.050.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	91.711 Orang	216.795.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.686.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalehguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.260	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0																		

1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatapan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	4 Tatapan	333.305.800	0 Tatapan	0	2 Tatapan	25.000.000	2 Tatapan	7.293.900	100	29,18	2 Tatapan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.01	Penyelingkaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.01	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INMI) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	80,37		106,38	21,04			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,92	52,9		33,32	31,57			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R		SR	SR			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani	100 %	458.627.306.100	0 %	0	100 %	120.056.865.650	100 %	96.492.591.761	100	80,37	100 %	96.492.591.761	100	21,04	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	112.970.628.776	0 %	0	100 %	23.298.176.051	100 %	21.649.727.177	100	92,92	100 %	21.649.727.177	100	19,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	22.151.170.642	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	1.662.400.000	0 Unit	0	2 Unit	1.948.900.677	2 Unit	1.481.620.970	100	76,02	2 Unit	1.481.620.970	28,57	89,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	1.997.819.574	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	13.683.246.501	0 Unit	0	8 Unit	4.671.915.761	8 Unit	4.437.995.636	100	94,99	8 Unit	4.437.995.636	44,44	32,43	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	4.436.425.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	61 Unit	3.369.555.113	0 Unit	0	40 Unit	8.755.517.903	40 Unit	8.138.374.391	100	92,95	40 Unit	8.138.374.391	65,57	241,53	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didistribikan	544 Unit	33.970.324.036	0 Unit	0	230 Unit	3.227.182.800	230 Unit	3.002.687.400	100	93,04	230 Unit	3.002.687.400	42,28	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156 Unit	600.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Pemelihara Sesuai Standar	127 Unit	550.256.000	0 Unit	0	91 Unit	204.653.000	91 Unit	193.475.792	100	94,54	91 Unit	193.475.792	71,65	35,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 :1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	17.558.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai , Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai , Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.281.423.910	0 Paket	0	3 Paket	4.281.423.910	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	3 Paket	4.219.618.448	100	98,56	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Didukung dan Dintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355 Keluarga	4.500.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.00.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	179 Paket	1.059.508.000	0 Paket	0	167 Paket	208.582.000	167 Paket	175.954.540	100	84,36	167 Paket	175.954.540	93,3	16,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah	100 %	339.671.353.839	0 %	0	100 %	95.958.687.914	99,58 %	74.321.865.411	99,58	77,45	99,58 %	74.321.865.411	99,58	21,88	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.846 Orang	4.539.860.400	0 Orang	0	15.230 Orang	1.428.417.600	12.687 Orang	988.790.840	83,3	69,22	12.687 Orang	988.790.840	18,43	21,78	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.509 Orang	6.906.238.800	0 Orang	0	15.230 Orang	1.013.765.000	12.954 Orang	610.181.500	85,06	60,19	12.954 Orang	610.181.500	20,4	8,84	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.116 Orang	1.164.312.800	0 Orang	0	15.238 Orang	463.746.080	12.811 Orang	358.277.700	84,07	77,26	12.811 Orang	358.277.700	16,83	30,77	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.355 Orang	5.903.358.800	0 Orang	0	55.558 Orang	103.246.870	50.378 Orang	33.725.000	90,68	32,66	50.378 Orang	33.725.000	17,84	0,57	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	677.339 Orang	7.474.586.600	0 Orang	0	161.695 Orang	1.502.675.000	151.262 Orang	1.295.610.000	93,55	86,22	151.262 Orang	1.295.610.000	22,33	17,33	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.558.922 Orang	11.024.357.600	0 Orang	0	446.900 Orang	1.878.161.559	334.555 Orang	1.808.576.031	74,86	96,3	334.555 Orang	1.808.576.031	14,81	16,41	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648.401 Orang	4.703.198.200	0 Orang	0	118.766 Orang	930.324.283	91.711 Orang	216.795.000	98,19	98,79	91.711 Orang	216.795.000	17,99	19,54	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815.543 Orang	1.427.180.000	0 Orang	0	170.000 Orang	246.360.000	116.622 Orang	919.050.000	53,95	88	91.711 Orang	216.795.000	11,25	15,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.347 Orang	243.840.000	0 Orang	0	13.340 Orang	1.224.421.455	10.164 Orang	1.026.547.343	76,19	83,84	10.164 Orang	1.026.547.343	19,05	420,99	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.800 Orang	891.591.000	0 Orang	0	1.841 Orang	191.254.279	1.701 Orang	149.312.447	92,4	78,07	1.701 Orang	149.312.447	19,33	16,75	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	73.466 Orang	7.231.119.600	0 Orang	0	16.751 Orang	1.897.885.400	16.751 Orang	1.462.847.850	100	77,08	16.751 Orang	1.462.847.850	22,8	20,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95.184 Orang	4.138.520.400	0 Orang	0	17.033 Orang	868.295.390	12.521 Orang	471.536.800	73,51	54,31	12.521 Orang	471.536.800	13,15	11,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.015 Dokumen	7.874.262.200	0 Dokumen	0	7.547 Dokumen	8.325.639.800	5.786 Dokumen	5.856.740.304	76,67	70,35	5.786 Dokumen	5.856.740.304	72,19	74,38	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	828 Dokumen	2.347.493.600	0 Dokumen	0	34 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.134 Dokumen	8.149.962.200	0 Dokumen	0	4.745 Dokumen	2.227.010.000	4.464 Dokumen	2.116.074.574	94,08	95,02	4.464 Dokumen	2.116.074.574	54,88	25,96	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142 Dokumen	6.868.847.550	0 Dokumen	0	27 Dokumen	381.625.305	17 Dokumen	164.434.000	62,96	43,09	17 Dokumen	164.434.000	11,97	2,39	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Dokumen	405.040.000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	65.734.301	8 Dokumen	9.724.000	28,57	14,79	8 Dokumen	9.724.000	20	2,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.693 Dokumen	24.555.466.250	0 Dokumen	0	2.759 Dokumen	1.238.885.400	1.974 Dokumen	794.114.000	71,55	64,1	1.974 Dokumen	794.114.000	42,06	3,23	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16.351 Orang	194.501.200	0 Orang	0	15.000 Orang	18.530.000	3.699 Orang	0	24,66	0	3.699 Orang	0	22,62	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	189 Orang	3.496.978.200	0 Orang	0	45 Orang	91.500.000	91 Orang	9.124.000	202,22	9,97	91 Orang	9.124.000	48,15	0,26	Dinas Kesehatan	

1.02.02.2.02.00.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	25 Dokumen	24.800.000	96,15	49,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.338 Dokumen	28.937.708.750	0 Dokumen	0	5.340 Dokumen	9.678.726.141	4.703 Dokumen	7.958.526.281	88,07	82,23	4.703 Dokumen	7.958.526.281	41,48	27,5	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41 Dokumen	109.588.146.320	0 Dokumen	0	7 Dokumen	48.976.213.342	7 Dokumen	38.497.755.272	100	78,61	7 Dokumen	38.497.755.272	17,07	35,13	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.27	Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15.130 Orang	74.520.000	0 Orang	0	15.000 Orang	37.260.000	708 Orang	8.650.000	4,72	23,22	708 Orang	8.650.000	4,68	11,61	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600 Paket	301.985.600	0 Paket	0	52 Paket	123.920.000	40 Paket	45.838.920	76,92	36,99	40 Paket	45.838.920	6,67	15,18	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16 Unit	548.037.400	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	16.474.772.380	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.263 Dokumen	52.844.621.614	0 Dokumen	0	3.392 Dokumen	7.507.844.130	3.045 Dokumen	5.618.810.845	89,77	74,84	3.045 Dokumen	5.618.810.845	71,43	10,63	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	142 Dokumen	7.672.381.195	0 Dokumen	0	60 Dokumen	1.343.596.999	55 Dokumen	954.376.536	91,67	71,03	55 Dokumen	954.376.536	38,73	12,44	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	4.367.588.300	0 Unit	0	15 Unit	26.600.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	3.355 Laporan	1.792.589.000	0 Laporan	0	3.134 Laporan	121.725.000	343 Laporan	57.545.000	10,94	47,27	343 Laporan	57.545.000	10,22	3,21	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	281 Dokumen	2.868.397.600	0 Dokumen	0	35 Dokumen	74.000.000	35 Dokumen	49.840.950	100	67,35	35 Dokumen	49.840.950	12,46	1,74	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.323 Orang	545.625.000	0 Orang	0	3.275 Orang	272.600.000	3.006 Orang	232.440.000	91,79	85,27	3.006 Orang	232.440.000	69,54	42,6	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296 Orang	141.125.000	0 Orang	0	286 Orang	132.275.000	302 Orang	89.365.000	105,59	67,56	302 Orang	89.365.000	102,03	63,32	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.764 Orang	232.078.180	0 Orang	0	1.589 Orang	83.693.280	492 Orang	52.911.318	30,96	63,22	492 Orang	52.911.318	27,89	22,8	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak dilemkan aktifitas merokok	4 Tatanan	333.305.800	0 Tatanan	0	2 Tatanan	25.000.000	2 Tatanan	7.293.900	100	29,18	2 Tatanan	7.293.900	50	2,19	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.498 Dokumen	647.950.000	0 Dokumen	0	1.498 Dokumen	647.950.000	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	1.267 Dokumen	486.985.000	84,58	75,16	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	106.650.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.650.000	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	7 Dokumen	22.825.000	58,33	21,4	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.00.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8.067 Dokumen	2.603.156.300	0 Dokumen	0	8.067 Dokumen	2.603.156.300	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	6.811 Dokumen	1.922.440.000	84,43	73,85	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	1.139.397.785	0 %	0	100 %	596.667.685	100 %	392.541.568	100	65,79	100 %	392.541.568	100	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.00.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	410 Dokumen	1.139.397.785	0 Dokumen	0	374 Dokumen	596.667.685	374 Dokumen	392.541.568	100	65,79	374 Dokumen	392.541.568	91,22	34,45	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	4.845.925.700	0 %	0	100 %	203.334.000	100 %	128.457.605	100	63,18	100 %	128.457.605	100	2,65	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04.00.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	119 Unit	4.845.925.700	0 Unit	0	40 Unit	203.334.000	40 Unit	128.457.605	100	63,18	40 Unit	128.457.605	33,61	2,65	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	80,37		100	21,04			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,92	52,9		33,32	31,57			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R		SR	SR			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi	100 %	33.658.716.200	0 %	0	100 %	3.888.142.699	71,56 %	2.888.808.268	71,56	74,3	71,56 %	2.888.808.268	71,56	8,58	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik	100 %	192.000.000	0 %	0	100 %	32.000.000	71,56 %	27.204.800	71,56	85,02	71,56 %	27.204.800	71,56	14,17	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.01.00.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	43 Dokumen	192.000.000	0 Dokumen	0	27 Dokumen	32.000.000	27 Dokumen	27.204.800	100	85,02	27 Dokumen	27.204.800	62,79	14,17	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	100 %	32.088.722.000	0 %	0	100 %	1.769.670.000	79,49 %	1.378.714.357	79,49	77,91	79,49 %	1.378.714.357	79,49	4,3	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.02.00.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	390.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.02.00.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	121 Orang	31.582.052.000	0 Orang	0	39 Orang	1.653.000.000	31 Orang	1.311.665.607	79,49	79,35	31 Orang	1.311.665.607	25,62	4,15	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.02.00.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10 Dokumen	116.670.000	0 Dokumen	0	10 Dokumen	116.670.000	10 Dokumen	67.048.750	100	57,47	10 Dokumen	67.048.750	100	57,47	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan	75 %	1.377.994.200	0 %	0	100 %	2.086.472.699	92 %	1.482.889.111	92	71,07	92 %	1.482.889.111	122,67	107,61	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.03.00.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	699 Orang	1.377.994.200	0 Orang	0	342 Orang	2.086.472.699	315 Orang	1.482.889.111	92,11	71,07	315 Orang	1.482.889.111	45,06	107,61	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											71,56	74,3		71,56	8,58			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											S	S		S	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											74,32	58,58		46,69	36,68			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R		SR	SR			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	59 %	33.658.716.200	0 %	0	100 %	3.888.142.699	71,56 %	2.888.808.268	71,56	74,3	71,56 %	2.888.808.268	121,29	8,58	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik	100 %	192.000.000	0 %	0	100 %	32.000.000	71,56 %	27.204.800	71,56	85,02	71,56 %	27.204.800	71,56	14,17	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.01.00.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	43 Dokumen	192.000.000	0 Dokumen	0	27 Dokumen	32.000.000	27 Dokumen	27.204.800	100	85,02	27 Dokumen	27.204.800	62,79	14,17	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	100 %	32.088.722.000	0 %	0	100 %	1.769.670.000	79,49 %	1.378.714.357	79,49	77,91	79,49 %	1.378.714.357	79,49	4,3	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.02.00.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	390.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.02.00.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	121 Orang	31.582.052.000	0 Orang	0	39 Orang	1.653.000.000	31 Orang	1.311.665.607	79,49	79,35	31 Orang	1.311.665.607	25,62	4,15	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.02.00.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10 Dokumen	116.670.000	0 Dokumen	0	10 Dokumen	116.670.000	10 Dokumen	67.048.750	100	57,47	10 Dokumen	67.048.750	100	57,47	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan	75 %	1.377.994.200	0 %	0	100 %	2.086.472.699	92 %	1.482.889.111	92	71,07	92 %	1.482.889.111	122,67	107,61	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.03.00.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	699 Orang	1.377.994.200	0 Orang	0	342 Orang	2.086.472.699	315 Orang	1.482.889.111	92,11	71,07	315 Orang	1.482.889.111	45,06	107,61	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											71,56	74,3		121,29	8,58			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											S	S		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											74,32	58,58		46,69	36,68			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R		SR	SR			

1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat	98 %	1.599.540.000	0 %	0	90 %	663.831.000	41,34 %	359.402.300	45,93	54,14	41,34 %	359.402.300	42,18	22,47	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin	100 %	126.000.000	0 %	0	100 %	78.730.000	100 %	78.454.500	100	99,65	100 %	78.454.500	100	62,27	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.01.00.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	126.000.000	0 Dokumen	0	30 Dokumen	78.730.000	30 Dokumen	78.454.500	100	99,65	30 Dokumen	78.454.500	100	62,27	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT	70 %	834.236.000	0 %	0	60 %	385.887.000	52,59 %	255.610.300	87,65	66,24	52,59 %	255.610.300	75,13	30,64	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.03.00.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	439 Dokumen	834.236.000	0 Dokumen	0	200 Dokumen	385.887.000	26 Dokumen	255.610.300	13	66,24	26 Dokumen	255.610.300	5,92	30,64	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar	100 %	639.304.000	0 %	0	100 %	199.214.000	89,78 %	25.337.500	89,78	12,72	89,78 %	25.337.500	89,78	3,96	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.06.00.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	193 Unit	639.304.000	0 Unit	0	90 Unit	199.214.000	20 Unit	25.337.500	22,22	12,72	20 Unit	25.337.500	10,36	3,96	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											45,93	54,14						
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	R						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											45,07	59,54						
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	R						
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100 %	1.599.540.000	0 %	0	90 %	663.831.000	41,34 %	359.402.300	45,93	54,14	41,34 %	359.402.300	41,34	22,47	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin	100 %	126.000.000	0 %	0	100 %	78.730.000	100 %	78.454.500	100	99,65	100 %	78.454.500	100	62,27	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.01.00.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	126.000.000	0 Dokumen	0	30 Dokumen	78.730.000	30 Dokumen	78.454.500	100	99,65	30 Dokumen	78.454.500	100	62,27	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT	70 %	834.236.000	0 %	0	60 %	385.887.000	52,59 %	255.610.300	87,65	66,24	52,59 %	255.610.300	75,13	30,64	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.03.00.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	439 Dokumen	834.236.000	0 Dokumen	0	200 Dokumen	385.887.000	26 Dokumen	255.610.300	13	66,24	26 Dokumen	255.610.300	5,92	30,64	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar	100 %	639.304.000	0 %	0	100 %	199.214.000	89,78 %	25.337.500	89,78	12,72	89,78 %	25.337.500	89,78	3,96	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.06.00.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	193 Unit	639.304.000	0 Unit	0	90 Unit	199.214.000	20 Unit	25.337.500	22,22	12,72	20 Unit	25.337.500	10,36	3,96	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											45,93	54,14						
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	R						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											45,07	59,54						
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	R						
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	60 %	1.599.540.000	0 %	0	90 %	663.831.000	41,34 %	359.402.300	45,93	54,14	41,34 %	359.402.300	68,9	22,47	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin	100 %	126.000.000	0 %	0	100 %	78.730.000	100 %	78.454.500	100	99,65	100 %	78.454.500	100	62,27	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.01.00.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	126.000.000	0 Dokumen	0	30 Dokumen	78.730.000	30 Dokumen	78.454.500	100	99,65	30 Dokumen	78.454.500	100	62,27	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT	70 %	834.236.000	0 %	0	60 %	385.887.000	52,59 %	255.610.300	87,65	66,24	52,59 %	255.610.300	75,13	30,64	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.03.00.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	439 Dokumen	834.236.000	0 Dokumen	0	200 Dokumen	385.887.000	26 Dokumen	255.610.300	13	66,24	26 Dokumen	255.610.300	5,92	30,64	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar	100 %	639.304.000	0 %	0	100 %	199.214.000	89,78 %	25.337.500	89,78	12,72	89,78 %	25.337.500	89,78	3,96	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.06.00.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	193 Unit	639.304.000	0 Unit	0	90 Unit	199.214.000	20 Unit	25.337.500	22,22	12,72	20 Unit	25.337.500	10,36	3,96	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											45,93	54,14						
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	R						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											45,07	59,54						
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	R						
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55 %	21.431.061.708	0 %	0	45 %	2.906.807.358	76,89 %	1.687.167.998	170,87	58,04	76,89 %	1.687.167.998	139,8	7,87	Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan gernas	55 %	18.582.007.550	0 %	0	45 %	687.753.200	100 %	249.636.300	222,22	36,3	100 %	249.636.300	181,82	1,34	Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.01.00.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.795 Dokumen	18.582.007.550	0 Dokumen	0	68 Dokumen	687.753.200	50 Dokumen	249.636.300	73,53	36,3	50 Dokumen	249.636.300	2,79	1,34	Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	100 %	665.000.000	0 %	0	100 %	35.000.000	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.02.00.01	Penyelebaran Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelebaran Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	58 Dokumen	665.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	35.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85 %	2.184.054.158	0 %	0	75 %	2.184.054.158	100 %	1.437.531.698	133,33	65,82	100 %	1.437.531.698	117,65	65,82	Dinas Kesehatan	

1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1,615 Dokumen	2.184.054.158	0 Dokumen	0	1.237 Dokumen	2.184.054.158	958 Dokumen	1.437.531.698	77,45	65,82	958 Dokumen	1.437.531.698	59,32	65,82	Dinas Kesehatan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											170,87	58,04			139,8	7,87		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	R			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											50,33	34,04			20,7	22,39		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											82,76	77,53			107,21	20,52		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											T	T			ST	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											68,54	55,3			33,8	30,12		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											S	R			SR	SR		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	76,61 %	89.512.300.000	0 %	0	76,61 %	14.425.492.994	76,61 %	13.263.895.547	100	91,95	76,61 %	13.263.895.547	100	14,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	110 Laporan/Dokumen	11.500.000.000	0 Laporan/Dokumen	0	22 Laporan/Dokumen	1.750.000.000	18 Laporan/Dokumen	1.528.830.625	81,82	87,36	18 Laporan/Dokumen	1.528.830.625	16,36	13,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 Dokumen	10.000.000.000	0 Dokumen	0	19 Dokumen	1.500.000.000	19 Dokumen	1.344.723.425	100	89,65	19 Dokumen	1.344.723.425	20	13,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	500.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	98.764.400	100	98,76	1 Dokumen	98.764.400	20	19,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	750.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	51.119.800	100	51,12	1 Laporan	51.119.800	20	6,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	250.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	34.223.000	100	68,45	1 Laporan	34.223.000	20	13,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan administrasi keuangan	6 Kegiatan	62.422.300.000	0 Kegiatan	0	6 Kegiatan	9.671.492.994	6 Kegiatan	9.270.535.666	100	95,85	6 Kegiatan	9.270.535.666	100	14,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.820 Orang/bulan	53.505.300.000	0 Orang/bulan	0	1.164 Orang/bulan	8.272.852.994	1.164 Orang/bulan	8.163.195.566	100	98,67	1.164 Orang/bulan	8.163.195.566	20	15,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	7.500.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.168.640.000	1 Dokumen	908.470.000	100	77,74	1 Dokumen	908.470.000	20	12,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	667.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	118.870.500	100	79,25	1 Dokumen	118.870.500	20	17,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	200.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	19.999.900	100	100	1 Laporan	19.999.900	20	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	100	100	1 Dokumen	20.000.000	20	13,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	400.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	39.999.700	100	100	1 Laporan	39.999.700	20	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi BMD	2 Kegiatan	500.000.000	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	39.960.000	100	99,9	1 Kegiatan	39.960.000	50	7,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	500.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	39.960.000	100	99,9	1 Laporan	39.960.000	20	7,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian	132 Kegiatan	300.000.000	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	37.003.400	100	61,67	1 Kegiatan	37.003.400	0,76	12,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	37.003.400	100	61,67	1 Dokumen	37.003.400	20	12,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	30 Kegiatan	4.320.000.000	0 Kegiatan	0	6 Kegiatan	469.000.000	6 Kegiatan	500.364.292	100	106,69	6 Kegiatan	500.364.292	20	11,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	45.000.000	0 Paket	0	1 Paket	9.000.000	1 Paket	5.064.200	100	56,27	1 Paket	5.064.200	20	11,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	325.000.000	0 Paket	0	1 Paket	15.000.000	1 Paket	118.652.650	100	791,02	1 Paket	118.652.650	20	36,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.500.000.000	0 Paket	0	1 Paket	200.000.000	1 Paket	193.322.400	100	96,66	1 Paket	193.322.400	20	7,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	5 Paket	600.000.000	0 Paket	0	1 Paket	80.000.000	1 Paket	79.999.900	100	100	1 Paket	79.999.900	20	13,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	350.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	69.960.000	100	82,31	1 Dokumen	69.960.000	20	19,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	500.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	33.365.142	100	41,71	1 Laporan	33.365.142	20	6,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40.000.000	0 %	0	100 %	65.000.000	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	40.000.000	0 Unit	0	1 Unit	65.000.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	20 Kegiatan	6.880.000.000	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	1.539.000.000	4 Kegiatan	1.449.180.692	100	94,16	4 Kegiatan	1.449.180.692	20	21,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	75.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	2.880.000	100	57,8	1 Laporan	2.880.000	20	3,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	700.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	104.204.812	100	80,16	1 Laporan	104.204.812	20	14,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	150.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	27.400.000	100	91,33	1 Laporan	27.400.000	20	18,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5.955.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	1.374.000.000	1 Laporan	1.314.695.880	100	95,68	1 Laporan	1.314.695.880	20	22,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	100 %	3.550.000.000	0 %	0	100 %	831.000.000	100 %	438.020.872	100	52,71	100 %	438.020.872	100	12,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	195 Unit	3.125.000.000	0 Unit	0	39 Unit	586.000.000	39 Unit	313.830.413	100	52,66	39 Unit	313.830.413	20	10,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit	175.000.000	0 Unit	0	1 Unit	15.000.000	1 Unit	4.849.800	100	32,33	1 Unit	4.849.800	20	2,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	250.000.000	0 Unit	0	1 Unit	220.000.000	1 Unit	119.340.659	100	54,25	1 Unit	119.340.659	20	47,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	91,95			100	14,82		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	ST			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											96,15	102,2			19,23	14,14		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	ST			SR	SR		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan jaringan irigasi permukaan kondisi baik	10 %	63.475.000.000	0 %	0	100 %	5.438.950.000	0 %	4.285.428.160	0	78,79	0 %	4.285.428.160	0	6,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola SDA yang diberdayakan	70 Kelompok	35.475.000.000	0 Kelompok	0	40 Kelompok	260.000.000	0 Kelompok	0	0	0	0 Kelompok	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01.075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	243 Lembaga	35.475.000.000	0 Lembaga	0	40 Lembaga	260.000.000	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	3,8 KM	28.000.000.000	0 KM	0	85 KM	5.178.950.000	82,5 KM	4.285.428.160	97,06	82,75	82,5 KM	4.285.428.160	2.171,05	15,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.02.014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	15 KM	20.000.000.000	0 KM	0	2,5 KM	2.643.000.000	2,5 KM	2.380.742.882	100	90,08	2,5 KM	2.380.742.882	16,67	11,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.02.021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	250 KM	5.500.000.000	0 KM	0	80 KM	1.772.550.000	80 KM	1.487.651.878	100	83,93	80 KM	1.487.651.878	32	27,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

1.03.02.2.02.00_32	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	0 Di	0	0 Di	0	56 Di	150.000.000	0 Di	0	0	0	0 Di	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.02.2.02.00_34	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	5 Lembaga	500.000.000	0 Lembaga	0	1 Lembaga	50.000.000	1 Lembaga	49.999.800	100	100	1 Lembaga	49.999.800	20	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.02.2.02.00_35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	2.000.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	563.400.000	1 Dokumen	367.033.600	100	65,15	1 Dokumen	367.033.600	20	18,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	78,79					0	6,75	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	T					SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,67	56,53					14,78	11,22	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R					SR	SR	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga pengguna sumber air minum bersih	74,5 %	42.000.000.000	0 %	0	100 %	8.677.479.939	0 %	5.422.029.204	0	62,48	0 %	5.422.029.204	0	12,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga pengguna sumber air minum bersih	1.720 Rumah Tangga	42.000.000.000	0 Rumah Tangga	0	475 Rumah Tangga	8.677.479.939	0 Rumah Tangga	5.422.029.204	0	62,48	0 Rumah Tangga	5.422.029.204	0	12,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.03.2.01.00_22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	250 Unit	30.000.000.000	0 Unit	0	20 Unit	5.763.479.939	40 Unit	3.491.987.961	200	60,59	40 Unit	3.491.987.961	16	11,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.03.2.01.00_25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen	2.000.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	9.987.100	100	22,19	1 Dokumen	9.987.100	20	0,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.03.2.01.00_26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dipipakan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dipipakan	200 Liter/Detik	5.000.000.000	0 Liter/Detik	0	80 Liter/Detik	115.000.000	80 Liter/Detik	114.088.170	100	99,21	80 Liter/Detik	114.088.170	40	2,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.03.2.01.00_28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	200 Liter/Detik	5.000.000.000	0 Liter/Detik	0	80 Liter/Detik	2.754.000.000	80 Liter/Detik	1.805.965.973	100	65,58	80 Liter/Detik	1.805.965.973	40	36,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	62,48					0	12,91	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	R					SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											125	61,89					29	12,64	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	R					SR	SR	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga berfasilitas tempat BAB	48 %	15.500.000.000	0 %	0	100 %	1.410.787.250	0 %	1.153.270.361	0	81,75	0 %	1.153.270.361	0	7,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas BAB	60 Rumah Tangga	15.500.000.000	0 Rumah Tangga	0	20 Rumah Tangga	1.410.787.250	0 Rumah Tangga	1.153.270.361	0	81,75	0 Rumah Tangga	1.153.270.361	0	7,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.05.2.01.00_22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	60 M3/Hari	15.000.000.000	0 M3/Hari	0	60 M3/Hari	1.385.787.250	60 M3/Hari	1.134.844.596	100	81,89	60 M3/Hari	1.134.844.596	100	7,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.05.2.01.00_41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	5 Dokumen	500.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	18.425.765	100	73,7	1 Dokumen	18.425.765	20	3,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	81,75					0	7,44	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	T					SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	77,8					60	5,63	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	T					R	SR	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang jalan kabupaten berdrainase	27 %	40.000.000.000	0 %	0	100 %	1.896.724.859	0 %	1.111.122.512	0	58,58	0 %	1.111.122.512	0	2,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kawasan Bebas Genangan	8 %	40.000.000.000	0 %	0	8 %	1.896.724.859	0 %	1.111.122.512	0	58,58	0 %	1.111.122.512	0	2,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.06.2.01.00_12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	196.000 M	40.000.000.000	0 M	0	5.000 M	1.896.724.859	5.000 M	1.111.122.512	100	58,58	5.000 M	1.111.122.512	2,55	2,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	58,58					0	2,78	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	R					SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	58,58					2,55	2,78	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	R					SR	SR	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan rumah ber-IMB	25 %	41.000.000.000	0 %	0	100 %	9.623.390.360	100 %	6.430.537.280	100	66,82	100 %	6.430.537.280	400	15,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Tertangani	11 Unit	41.000.000.000	0 Unit	0	6 Unit	9.623.390.360	6 Unit	6.430.537.280	100	66,82	6 Unit	6.430.537.280	54,55	15,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.08.2.01.00_17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	40 Bangunan Gedung	15.000.000.000	0 Bangunan Gedung	0	6 Bangunan Gedung	3.472.205.618	6 Bangunan Gedung	2.573.886.688	100	74,13	6 Bangunan Gedung	2.573.886.688	15	17,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.08.2.01.00_21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	25.000.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.791.184.742	1 Dokumen	3.689.876.792	100	63,72	1 Dokumen	3.689.876.792	6,67	14,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.08.2.01.00_23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	5 Dokumen	1.000.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	360.000.000	1 Dokumen	166.773.800	100	46,33	1 Dokumen	166.773.800	20	16,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	66,82					400	15,68	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	S					SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	61,39					13,89	16,2	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	R					SR	SR	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan kawasan yang ditangani	10 Ha	40.000.000.000	0 Ha	0	8 Ha	16.808.029.668	0 Ha	11.669.157.929	0	69,43	0 Ha	11.669.157.929	0	29,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan tertata	8 Unit	40.000.000.000	0 Unit	0	10 Unit	16.808.029.668	8 Unit	11.669.157.929	80	69,43	8 Unit	11.669.157.929	100	29,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.09.2.01.00_08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	40 Kawasan	40.000.000.000	0 Kawasan	0	9 Kawasan	16.808.029.668	9 Kawasan	11.669.157.929	100	69,43	9 Kawasan	11.669.157.929	22,5	29,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	69,43					0	29,17	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	S					SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	69,43					22,5	29,17	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	S					SR	SR	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan kematapan jalan kabupaten	72 %	976.086.889.000	0 %	0	72 %	267.558.947.811	54,7 %	205.532.521.702	75,97	76,82	54,7 %	205.532.521.702	75,97	21,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	145,8 KM	976.086.889.000	0 KM	0	150 KM	267.558.947.811	144 KM	205.532.521.702	96	76,82	144 KM	205.532.521.702	98,77	21,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01.00_29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	15 Dokumen	5.000.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	240.000.000	2 Dokumen	219.032.500	100	91,26	2 Dokumen	219.032.500	13,33	4,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01.00_33	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.166 KM	660.511.889.000	0 KM	0	85 KM	155.716.692.264	85 KM	107.771.152.122	100	69,21	85 KM	107.771.152.122	7,29	16,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01.00_34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	891 KM	300.000.000.000	0 KM	0	35 KM	91.050.169.347	34,7 KM	84.538.164.698	99,14	92,85	34,7 KM	84.538.164.698	3,89	28,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01.00_39	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	5 Jembatan	1.000.000.000	0 Jembatan	0	1 Jembatan	691.750.000	1 Jembatan	403.381.969	100	58,31	1 Jembatan	403.381.969	20	40,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01.00_40	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	15 Jembatan	75.000.000	0 Jembatan	0	6 Jembatan	5.397.983.000	6 Jembatan	3.253.584.413	100	60,27	6 Jembatan	3.253.584.413	40	4.338,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01.00_43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	5.793 KM	8.500.000.000	0 KM	0	1.158,33 KM	2.900.000.000	1.158,33 KM	2.812.520.349	100	96,98	1.158,33 KM	2.812.520.349	20	33,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01.00_46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,8 KM	1.000.000.000	0 KM	0	25 KM	11.562.353.200	25 KM	6.534.685.651	100	56,52	25 KM	6.534.685.651	3,125	653,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											75,97	76,82					75,97	21,06	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	T					SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											99,88	75,06					461,36	730,56	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	SR					ST	ST	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase cakupan jasa konstruksi terfasilitasi	40 %	2.500.000.000	0 %	0	40 %	1.050.000.000	0 %	187.859.100	0	17,89	0 %	187.859.100	0	7,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi tersertifikasi	150 Orang	2.500.000.000	0 Orang	0	30 Orang	1.050.000.000	0 Orang	187.859.100	0	17,89	0 Orang	187.859.100	0	7,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.11.2.01.00_10	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	794 Orang	1.000.000.000	0 Orang	0	150 Orang	500.000.000	0 Orang	49.131.800	0	9,83	0 Orang	49.131.800	0	4,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

1.03.11.2.01.00.16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	944 Orang	1.500.000.000	0 Orang	0	150 Orang	550.000.000	30 Orang	138.727.300	20	25,22	30 Orang	138.727.300	3,18	9,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	17,89						
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											10	17,53						
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR						
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase peningkatan pemanfaatan ruang sesuai RT/RW	5 %	1.500.000.000	0 %	0	1 %	1.317.165.000	0 %	552.536.537	0	41,95	0 %	552.536.537	0	36,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan rekomendasi Izin pemanfaatan ruang	30 Lokasi	1.500.000.000	0 Lokasi	0	30 Lokasi	1.317.165.000	0 Lokasi	552.536.537	0	41,95	0 Lokasi	552.536.537	0	36,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.12.2.03.00.05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	5 Dokumen	1.500.000.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.317.165.000	5 Dokumen	552.536.537	41,67	41,95	5 Dokumen	552.536.537	100	36,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	41,95						
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											41,67	41,95						
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR						
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											27,6	64,65						
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	R						
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											83,94	62,23						
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											T	R						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 %	1.760.000.000	0 %	0	100 %	383.587.600	134,67 %	368.789.630	134,67	96,14	134,67 %	368.789.630	134,67	20,95	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaannya Data Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	100 %	560.000.000	0 %	0	100 %	159.699.000	134,67 %	159.022.930	134,67	99,58	134,67 %	159.022.930	134,67	28,4	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.01.00.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	159.699.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.01.00.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	60.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.01.00.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.01.00.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.01.00.07	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.01.00.08	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.01.00.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	159.022.930	0	0	1 Dokumen	159.022.930	100	318,05	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.01.00.10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Unit	1.200.000.000	0 Unit	0	0 Unit	223.888.600	8 Unit	209.766.700	0	93,69	8 Unit	209.766.700	0	17,48	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.03.00.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah	1.000.000.000	0 Unit Rumah	0	5 Unit Rumah	203.888.600	6 Unit Rumah	193.491.700	120	94,9	6 Unit Rumah	193.491.700	30	19,35	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.03.00.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	100.000.000	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	0	0	0	0 Unit Rumah	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.03.00.07	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	50.000.000	0 Rumah Tangga	0	1 Rumah Tangga	10.000.000	1 Rumah Tangga	9.925.000	100	99,25	1 Rumah Tangga	9.925.000	100	19,85	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.02.2.03.00.08	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	50.000.000	0 Rumah Tangga	0	1 Rumah Tangga	10.000.000	1 Rumah Tangga	6.350.000	100	63,5	1 Rumah Tangga	6.350.000	100	12,7	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											134,67	96,14						
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	ST						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											26,67	21,47						
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR						
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0 Laporan/Doku men	3.170.000.000	0 Laporan/Doku men	0	2 Laporan/Doku men	1.023.000.000	32 Laporan/Doku men	998.140.110	1,6	97,37	32 Laporan/Doku men	998.140.110	0	31,42	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 150 Ha	0 Laporan/Doku men	570.000.000	0 Laporan/Doku men	0	2 Laporan/Doku men	243.000.000	2 Laporan/Doku men	221.740.258	100	91,25	2 Laporan/Doku men	221.740.258	0	38,9	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.03.2.02.00.08	Penyusunan/Revisi/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	5 Dokumen	500.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	218.000.000	1 Dokumen	209.746.200	100	96,21	1 Dokumen	209.746.200	20	41,95	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.03.2.02.00.10	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	11.994.058	100	47,98	1 Dokumen	11.994.058	100	23,99	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.03.2.02.00.12	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	20.000.000	0 Kelompok Masyarakat	0	0 Kelompok Masyarakat	0	0 Kelompok Masyarakat	0	0	0	0 Kelompok Masyarakat	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	0 Unit	2.600.000.000	0 Unit	0	30 Unit	780.000.000	3 Unit	774.399.852	10	99,28	3 Unit	774.399.852	0	29,78	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.03.2.03.00.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	2.500.000.000	0 Unit Rumah	0	31 Unit Rumah	740.000.000	30 Unit Rumah	736.600.052	96,77	99,54	30 Unit Rumah	736.600.052	30	29,46	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	

1.04.03.2.03.003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	5 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	37.799.800	100	94,5	1 Dokumen	37.799.800	20	37,8	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											1,6	97,37	0		31,42			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	ST	SR		SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											79,35	67,65	34		26,64			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											T	S	SR		SR			
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Kawasan Perumahan Terfasilitasi	0 Lokasi	14.000.000.000	0 Lokasi	0	24 Lokasi	5.118.323.988	30 Lokasi	4.873.710.479	125	95,22	30 Lokasi	4.873.710.479	0	34,81	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya Urusan PSU Perumahan	0 Laporan	14.000.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	5.118.323.988	4 Laporan	4.873.710.479	400	95,22	4 Laporan	4.873.710.479	0	34,81	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.05.2.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100 Lokasi	8.000.000.000	0 Lokasi	0	24 Lokasi	3.095.362.850	24 Lokasi	2.959.700.039	100	95,62	24 Lokasi	2.959.700.039	24	37	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.05.2.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5 Laporan	4.500.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	2.022.961.138	1 Laporan	1.914.010.440	100	94,61	1 Laporan	1.914.010.440	20	42,53	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.05.2.01.007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	8 Lokasi	700.000.000	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	0 Lokasi	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
1.04.05.2.01.008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	24 Lokasi	800.000.000	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	0 Lokasi	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											125	95,22	0		34,81			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	ST	SR		SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											50	47,56	11		19,88			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR	SR		SR			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	20.000.000	0 %	0	0 %	10.882.670.062	0 %	14.314.671.872	0	131,54	0 %	14.314.671.872	0	71.573,36	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Perangkat Daerah	0 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	88.627.398	0 Dokumen	83.106.200	0	93,77	0 Dokumen	83.106.200	0	415,53	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	59.250.998	6 Dokumen	53.249.700	150	89,87	6 Dokumen	53.249.700	120	266,25	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	18.320.700	5 Laporan	18.236.700	83,33	99,54	5 Laporan	18.236.700	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	11.055.700	4 Laporan	11.619.800	133,33	105,1	4 Laporan	11.619.800	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Perangkat Daerah	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	10.006.145.500	0 Laporan/Dokumen	13.222.532.548	0	132,14	0 Laporan/Dokumen	13.222.532.548	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	260 Orang/bulan	12.969.283.748	0	0	260 Orang/bulan	12.969.283.748	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	63.823.500	4 Dokumen	92.056.400	100	144,24	4 Dokumen	92.056.400	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	9.935.170.000	8 Dokumen	155.611.300	160	1,57	8 Dokumen	155.611.300	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	3.014.500	3 Laporan	2.747.200	100	91,13	3 Laporan	2.747.200	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	4.137.500	3 Laporan	2.833.900	100	68,49	3 Laporan	2.833.900	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Perangkat Daerah	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	15.207.300	0 Laporan/Dokumen	17.058.900	0	112,18	0 Laporan/Dokumen	17.058.900	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.03.001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	7.048.800	11 Laporan	11.806.500	91,67	167,5	11 Laporan	11.806.500	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	8.158.500	8 Laporan	5.252.400	66,67	64,38	8 Laporan	5.252.400	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Perangkat Daerah	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	2.451.900	0 Laporan/Dokumen	3.447.000	0	140,58	0 Laporan/Dokumen	3.447.000	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.05.002	Pengadaan Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	462.700	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	769.600	3 Dokumen	1.102.000	150	143,19	3 Dokumen	1.102.000	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	0 Orang	0	165 Orang	450.000	166 Orang	900.000	100,61	200	166 Orang	900.000	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	0 Orang	0	43 Orang	769.600	44 Orang	1.445.000	102,33	187,76	44 Orang	1.445.000	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Perangkat Daerah	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	194.832.674	0 Laporan/Dokumen	190.695.756	0	97,88	0 Laporan/Dokumen	190.695.756	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	4 Paket	12.270.807	3 Paket	11.401.240	75	92,91	3 Paket	11.401.240	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	5 Paket	73.993.421	5 Paket	49.871.859	100	67,4	5 Paket	49.871.859	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	10 Paket	8.017.300	7 Paket	9.478.330	70	118,22	7 Paket	9.478.330	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	35.485.146	3 Paket	19.261.998	100	54,28	3 Paket	19.261.998	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	7 Laporan	65.066.000	12 Laporan	100.682.329	171,43	154,74	12 Laporan	100.682.329	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Perangkat Daerah	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	96.910.080	0 Unit	283.404.600	0	292,44	0 Unit	283.404.600	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	579.600	4 Unit	579.600	100	100	4 Unit	579.600	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	14 Unit	37.581.350	42 Unit	110.625.000	300	294,36	42 Unit	110.625.000	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	9 Unit	58.749.130	19 Unit	172.200.000	211,11	293,11	19 Unit	172.200.000	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Perangkat Daerah	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	119.396.440	0 Laporan/Dokumen	112.728.844	0	94,42	0 Laporan/Dokumen	112.728.844	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	53.259.680	4 Laporan	63.396.844	133,33	119,03	4 Laporan	63.396.844	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	5.906.600	2 Laporan	5.484.000	66,67	92,85	2 Laporan	5.484.000	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	60.230.160	2 Laporan	43.848.000	66,67	72,8	2 Laporan	43.848.000	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Perangkat Daerah	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	359.098.770	0 Unit	401.698.024	0	111,86	0 Unit	401.698.024	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	

1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	0 Unit	0	0	0 Unit	0	11 Unit	177.808.285	33 Unit	206.599.124	300	116,19	33 Unit	206.599.124	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	0	0 Unit	0	5 Unit	103.448.645	15 Unit	122.276.100	300	118,2	15 Unit	122.276.100	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0	0 Unit	0	4 Unit	5.110.000	3 Unit	3.230.000	75	63,21	3 Unit	3.230.000	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0	0 Unit	0	1 Unit	71.731.840	1 Unit	69.592.800	100	97,02	1 Unit	69.592.800	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0	0 Unit	0	2 Unit	1.000.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)												0	131,54			0	71,573.36		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM												SR	ST			SR	ST		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)												116,91	107,24			4	8,88		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN												ST	ST			SR	SR		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatkan kondisi ketertaman dan ketertiban masyarakat	0 %	0	0	0 %	0	0 %	10.168.827.805	0 %	19.169.474.444	0	188,51	0 %	19.169.474.444	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kondisi Ketertaman dan Ketertiban Masyarakat	0 Laporan/Dokumen	0	0	0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	9.943.774.205	0 Laporan/Dokumen	18.761.462.099	0	188,68	0 Laporan/Dokumen	18.761.462.099	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	15.336.000	5 Dokumen	28.966.610	125	188,88	5 Dokumen	28.966.610	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	23.771.700	6 Dokumen	23.931.900	150	100,67	6 Dokumen	23.931.900	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0	0	0 Orang	0	12 Orang	258.223.000	48 Orang	434.736.000	400	168,36	48 Orang	434.736.000	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	6 Laporan	9.611.329.705	11 Laporan	18.258.108.789	183,33	189,96	11 Laporan	18.258.108.789	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	2 Laporan	14.143.800	4 Laporan	14.743.800	200	104,24	4 Laporan	14.743.800	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	3 Laporan	20.970.000	3 Laporan	975.000	100	4,65	3 Laporan	975.000	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatkan Kondisi Ketertaman dan Ketertiban Masyarakat	0 Laporan/Dokumen	0	0	0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	122.506.100	0 Laporan/Dokumen	217.453.300	0	177,5	0 Laporan/Dokumen	217.453.300	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.02.10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	24 Laporan	63.971.400	53 Laporan	106.852.500	220,83	167,03	53 Laporan	106.852.500	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.02.11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, Sesuai SOP	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	24 Laporan	27.012.500	48 Laporan	49.192.800	200	182,11	48 Laporan	49.192.800	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.02.12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	24 Laporan	31.522.200	48 Laporan	61.408.000	200	194,81	48 Laporan	61.408.000	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kondisi Ketertaman dan Ketertiban Masyarakat	0 Laporan/Dokumen	0	0	0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	102.547.500	0 Laporan/Dokumen	190.559.045	0	185,83	0 Laporan/Dokumen	190.559.045	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.03.06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Pengak Perda	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	3 Laporan	102.547.500	7 Laporan	190.559.045	233,33	185,83	7 Laporan	190.559.045	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)												0	188,51			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM												SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)												201,25	148,65			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN												ST	ST			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)												0	160,03			0	35,786.68		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM												SR	ST			SR	ST		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)												159,08	127,95			2	4,44		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN												ST	ST			SR	SR		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	0 %	0	0	0 %	0	100 %	3.963.204.165	86,94 %	4.351.565.837	86,94	109,8	86,94 %	4.351.565.837	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 %	0	0	0 %	0	100 %	32.520.875	56,96 %	21.881.400	56,96	67,28	56,96 %	21.881.400	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.847.514	1 Dokumen	4.718.100	100	60,12	1 Dokumen	4.718.100	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.379.027	1 Dokumen	5.855.100	100	69,88	1 Dokumen	5.855.100	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.331.600	0	0	1 Dokumen	6.331.600	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.106.855	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	1 Laporan	8.187.479	1 Laporan	4.976.600	100	60,78	1 Laporan	4.976.600	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi perkantoran sesuai aturan	0 %	0	0	0 %	0	0 %	2.964.192.777	71,46 %	3.380.533.578	0	114,05	71,46 %	3.380.533.578	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0	0	0 Orang/bulan	0	12 Orang/bulan	2.772.771.283	12 Orang/bulan	3.233.157.678	100	116,6	12 Orang/bulan	3.233.157.678	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	147.540.000	3 Dokumen	106.330.000	100	72,07	3 Dokumen	106.330.000	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	33.480.000	12 Dokumen	34.280.000	100	102,39	12 Dokumen	34.280.000	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	1 Laporan	9.488.194	1 Laporan	5.855.500	100	61,69	1 Laporan	5.855.500	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	913.300	1 Dokumen	912.400	100	99,9	1 Dokumen	912.400	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi perkantoran sesuai aturan	0 %	0	0	0 %	0	0 %	32.160.000	23,45 %	14.300.000	0	44,47	23,45 %	14.300.000	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	12 Laporan	32.160.000	12 Laporan	14.300.000	100	44,47	12 Laporan	14.300.000	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi perkantoran sesuai aturan	0 %	0	0	0 %	0	0 %	211.714.453	28,75 %	192.729.803	0	91,03	28,75 %	192.729.803	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0 Paket	0	1 Paket	5.059.000	1 Paket	5.043.300	100	99,69	1 Paket	5.043.300	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0 Paket	0	1 Paket	57.123.626	1 Paket	46.393.200	100	81,22	1 Paket	46.393.200	1 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	0	0 Paket	0	1 Paket	5.467.556	1 Paket	6.302.500	100	115,27	1 Paket	6.302.500	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

1.05.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	1 Paket	24.229.171	2 Paket	25.610.300	200	105,7	2 Paket	25.610.300	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	20 Laporan	119.835.100	20 Laporan	109.380.503	100	91,28	20 Laporan	109.380.503	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertelb administrasi perkantoran sesuai aturan	0 %	0	0	0	0	0	0 %	585.826.560	63,45 %	569.173.496	0	97,16	63,45 %	569.173.496	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	0	0	0	0	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	100	100	2 Laporan	5.000.000	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0	0	0	0	0	12 Laporan	31.999.120	9 Laporan	36.407.016	75	113,78	9 Laporan	36.407.016	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0	0	0	0	12 Laporan	548.827.440	12 Laporan	527.766.480	100	96,16	12 Laporan	527.766.480	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertelb administrasi perkantoran sesuai aturan	0 %	0	0	0	0	0	0 %	136.789.500	44,47 %	172.947.560	0	126,43	44,47 %	172.947.560	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	0	0	0	0	19 Unit	127.421.100	19 Unit	163.579.160	100	128,38	19 Unit	163.579.160	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0	15 Unit	9.368.400	26 Unit	9.368.400	173,33	100	26 Unit	9.368.400	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													86,94	109,8			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													ST	T			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													97,54	81,88			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN													ST	T			SR	SR		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana yang Tertangani	0 %	0	0	0	0	0	0 %	886.220.488	0 %	1.151.580.447	0	129,94	0 %	1.151.580.447	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan bencana yang tertangani	0 %	0	0	0	0	0	0 %	79.999.894	0 %	51.886.972	0	64,86	0 %	51.886.972	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.01.007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0 Orang	0	0	0	0	0	60 Orang	79.999.894	60 Orang	51.886.972	100	64,86	60 Orang	51.886.972	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan bencana yang tertangani	0 %	0	0	0	0	0	0 %	186.399.367	32 %	464.055.999	0	248,96	32 %	464.055.999	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	16 Unit	34.890.800	0	0	16 Unit	34.890.800	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	0 Kawasan	0	0	0	0	0	0 Kawasan	0	5 Kawasan	42.034.789	0	0	5 Kawasan	42.034.789	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	0 Orang	0	0	0	0	0	0 Orang	0	60 Orang	53.958.700	0	0	60 Orang	53.958.700	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusatops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	0 Laporan	0	0	0	0	0	12 Laporan	186.399.367	12 Laporan	183.345.010	100	98,36	12 Laporan	183.345.010	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legat paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	149.826.700	0	0	1 Dokumen	149.826.700	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan bencana yang tertangani	0 %	0	0	0	0	0	0 %	532.038.927	61,03 %	544.460.876	0	102,33	61,03 %	544.460.876	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0 Dokumen	0	0	0	0	0	1 Dokumen	437.307.438	4 Dokumen	436.203.600	400	99,75	4 Dokumen	436.203.600	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang	0	0	0	0	0	100 Orang	94.731.489	100 Orang	108.257.276	100	114,28	100 Orang	108.257.276	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan bencana yang tertangani	0 %	0	0	0	0	0	0 %	87.782.300	20,7 %	91.176.600	0	103,87	20,7 %	91.176.600	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	0	0	0	0	0	1 Dokumen	87.782.300	1 Dokumen	91.176.600	100	103,87	1 Dokumen	91.176.600	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	129,94			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													88,89	53,46			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN													T	R			SR	SR		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Kebakaran	0 %	0	0	0	0	0	0 %	1.643.518.200	36,8 %	3.944.256.385	0	239,99	36,8 %	3.944.256.385	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan bencana kebakaran yang teratasi	0 %	0	0	0	0	0	0 %	1.643.518.200	135,2 %	3.944.256.385	0	239,99	135,2 %	3.944.256.385	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	0 Dokumen	0	0	0	0	0	12 Dokumen	225.000.000	9 Dokumen	198.931.100	75	88,41	9 Dokumen	198.931.100	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	0	0	0	0	12 Laporan	1.418.518.200	12 Laporan	1.397.676.000	100	98,53	12 Laporan	1.397.676.000	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang	0	0	0	0	0	0 Orang	0	5 Orang	56.021.165	0	0	5 Orang	56.021.165	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Tertkai	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	10 Unit	2.291.628.100	0	0	10 Unit	2.291.628.100	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	239,99			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													43,75	46,74			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN													SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													28,88	159,91			0	0		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM													SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													69,69	0			0	0		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN													T	R			SR	SR		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																			
1.06.01	PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	0 %	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Sosial	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																				
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	0 %	0	0	0	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Sosial		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																				

1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Cakupan warga negara migran terfasilitasi	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0		0 0		0 0 Orang		0 0		0 0	Dinas Sosial	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																			
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas terlantar dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar anti	0 %		0 0 %		0 0 %		0 0 %		0 0		0 %		0 0		0 0	Dinas Sosial	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																			
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0 %		0 0 %		0 0 %		0 0 %		0 0		0 %		0 0		0 0	Dinas Sosial	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																			
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0		0 Orang		0 0		0 0	Dinas Sosial	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																			
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik	0 %		0 0 %		0 0 %		0 0 %		0 0		0 %		0 0		0 0	Dinas Sosial	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR					SR	SR		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	0 %		0 0 %		0 0 %		0 0 %		0 0		0 %		0 0		0 0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	0 %		0 0 %		0 0 %		0 0 %		0 0		0 %		0 0		0 0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender	0 %		0 0 %		0 0 %		0 0 %		0 0		0 %		0 0		0 0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																			
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan	0 %		0 0 %		0 0 %		0 0 %		0 0		0 %		0 0		0 0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																			
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pembangunan Keluarga	0 %		0 0 %		0 0 %		0 0 %		0 0		0 %		0 0		0 0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																			
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan dan penganggaran	0 %		0 0 %		0 0 %		0 0 %		0 0		0 %		0 0		0 0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																			
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak	0 %		0 0 %		0 0 %		0 0 %		0 0		0 %		0 0		0 0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																			
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	0 %		0 0 %		0 0 %		0 0 %		0 0		0 %		0 0		0 0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																			

2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang menerima layanan	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Pengurangan daerah Rawan Pangan	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	0 %	300.000.000	0 %	0	10 %	162.610.799	100 %	65.885.145	1	40,52	100 %	65.885.145	0	21,96	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan	0 Berita Acara	300.000.000	0 Berita Acara	0	10 Berita Acara	162.610.799	2 Berita Acara	65.885.145	20	40,52	2 Berita Acara	65.885.145	0	21,96	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.10.04.2.01.004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Berita Acara	300.000.000	0 Berita Acara	0	10 Berita Acara	162.610.799	2 Berita Acara	65.885.145	20	40,52	2 Berita Acara	65.885.145	20	21,96	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											1	40,52			0	21,96		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											20	40,52			20	21,96		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR		
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	0 %	250.000.000	0 %	0	100 %	117.000.000	100 %	51.982.933	100	44,43	100 %	51.982.933	0	20,79	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Terlaksananya Penerbitan Izin Pertanahan	0 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	0	61 Dokumen	117.000.000	74 Dokumen	51.982.933	121,31	44,43	74 Dokumen	51.982.933	0	20,79	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.10.09.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	115 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	0	61 Dokumen	117.000.000	74 Dokumen	51.982.933	121,31	44,43	74 Dokumen	51.982.933	64,35	20,79	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	44,43			0	20,79		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											121,31	44,43			64,35	20,79		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	SR			R	SR		
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	0 Laporan/Dokumen	200.000.000	0 Laporan/Dokumen	0	1 Laporan/Dokumen	50.000.000	1 Laporan/Dokumen	28.227.910	100	56,46	1 Laporan/Dokumen	28.227.910	0	14,11	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tataguna Tanah yang Sesuai Dengan Peruntukan	0 Laporan	200.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	28.227.910	100	56,46	1 Laporan	28.227.910	0	14,11	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.10.10.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	200.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	28.227.910	100	56,46	1 Laporan	28.227.910	10	14,11	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	56,46			0	14,11		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	R			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	56,46			10	14,11		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	R			SR	SR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	0 Bulan	21.820.300.000	0 Bulan	0	12 Bulan	7.873.016.720	123 Bulan	6.972.494.498	1,025	88,56	123 Bulan	6.972.494.498	0	31,95	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup (Dokumen)	0 Dokumen	207.000.000	0 Dokumen	0	15 Dokumen	46.967.627	18 Dokumen	52.172.488	120	111,08	18 Dokumen	52.172.488	0	25,2	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.11.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	14.047.514	2 Dokumen	14.047.514	100	100	2 Dokumen	14.047.514	20	28,1	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.11.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	60.000.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	8.379.027	2 Dokumen	8.379.027	50	100	2 Dokumen	8.379.027	10	13,97	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	

2.11.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	48.000.000	0 Laporan		0	12 Laporan	16.187.479	12 Laporan	16.187.479	100	100	12 Laporan	16.187.479	33,33	33,72	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	39.000.000	0 Laporan		0	1 Laporan	8.353.607	2 Laporan	13.558.468	200	162,31	2 Laporan	13.558.468	66,67	34,77	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas	0 Orang/bulan	15.835.700.000	0 Orang/bulan		0	12 Orang/bulan	5.660.759.593	78 Orang/bulan	5.305.753.295	650	93,73	78 Orang/bulan	5.305.753.295	0	33,51	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	14.400.000.000	0 Orang/bulan		0	52 Orang/bulan	5.152.819.099	208 Orang/bulan	4.978.482.990	400	96,62	208 Orang/bulan	4.978.482.990	577,78	34,57	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	1.050.000.000	0 Dokumen		0	12 Dokumen	350.452.300	12 Dokumen	218.794.023	100	62,43	12 Dokumen	218.794.023	33,33	20,84	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	285.000.000	0 Dokumen		0	12 Dokumen	126.000.000	11 Dokumen	78.668.246	91,67	62,44	11 Dokumen	78.668.246	30,56	27,6	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	36.700.000	0 Laporan		0	1 Laporan	9.488.194	1 Laporan	9.041.321	100	95,29	1 Laporan	9.041.321	33,33	24,64	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	64.000.000	0 Laporan		0	2 Laporan	22.000.000	2 Laporan	20.766.715	100	94,39	2 Laporan	20.766.715	20	32,45	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	0 Paket	948.000.000	0 Paket		0	12 Paket	493.789.500	50 Paket	277.114.802	416,67	56,12	50 Paket	277.114.802	0	29,23	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	70.000.000	0 Paket		0	12 Paket	30.000.000	13 Paket	17.989.881	108,33	59,97	13 Paket	17.989.881	36,11	25,7	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	297.000.000	0 Paket		0	12 Paket	153.000.000	12 Paket	149.972.148	100	98,02	12 Paket	149.972.148	33,33	50,5	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	105.000.000	0 Paket		0	12 Paket	37.000.000	12 Paket	15.567.618	100	42,07	12 Paket	15.567.618	33,33	14,83	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	118.000.000	0 Paket		0	12 Paket	58.635.000	12 Paket	25.139.074	100	42,87	12 Paket	25.139.074	33,33	21,3	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	98.000.000	0 Paket		0	12 Paket	57.500.000	12 Paket	38.878.463	100	67,61	12 Paket	38.878.463	400	39,67	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	260.000.000	0 Laporan		0	48 Laporan	157.654.500	5 Laporan	29.567.618	10,42	18,75	5 Laporan	29.567.618	13,89	11,37	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Jasa DLHPKPP	0 Laporan	3.361.500.000	0 Laporan		0	12 Laporan	1.099.500.000	27 Laporan	795.414.896	225	72,34	27 Laporan	795.414.896	0	23,66	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	40.000.000	0 Laporan		0	12 Laporan	22.000.000	12 Laporan	8.110.000	100	36,86	12 Laporan	8.110.000	33,33	20,28	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	331.500.000	0 Laporan		0	12 Laporan	118.000.000	12 Laporan	65.504.196	100	55,51	12 Laporan	65.504.196	33,33	19,76	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	2.990.000.000	0 Laporan		0	12 Laporan	959.500.000	12 Laporan	721.800.700	100	75,23	12 Laporan	721.800.700	33,33	24,14	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang DLHPKPP	0 Unit	1.468.100.000	0 Unit		0	12 Unit	572.000.000	44 Unit	542.039.017	366,67	94,76	44 Unit	542.039.017	0	36,92	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	1.082.600.000	0 Unit		0	12 Unit	324.000.000	12 Unit	142.911.793	100	44,11	12 Unit	142.911.793	33,33	13,2	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	125.500.000	0 Unit		0	40 Unit	53.000.000	30 Unit	39.020.000	75	73,62	30 Unit	39.020.000	28,57	31,09	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit		0	2 Unit	195.000.000	4 Unit	360.107.224	200	184,67	4 Unit	360.107.224	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	260.000.000	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											1,025	88,56			0	31,95			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T			SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											105,89	72,73			66,82	22,72			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	S			S	SR			
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	0 %	0	0 %		0	100 %	630.000.000	100 %	536.690.561	100	85,19	100 %	536.690.561	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	1 Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	4.723.416	400	5,9	4 Dokumen	4.723.416	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.02.2.01.006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	4.723.416	100	5,9	1 Dokumen	4.723.416	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen KLHS Kab/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	2 Dokumen	550.000.000	2 Dokumen	531.967.145	100	96,72	2 Dokumen	531.967.145	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	

2.11.02.2.02.00.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	189.494.800	100	94,75	1 Dokumen	189.494.800	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.02.2.02.00.05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	342.472.345	100	97,85	1 Dokumen	342.472.345	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	85,19			0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T			SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	66,17			0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	S			SR	SR	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang Tertangani	0 %	0	0 %	0	100 %	169.042.000	103 %	162.225.689	103	95,97	103 %	162.225.689	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terwujudnya Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	144.042.000	4 Dokumen	132.445.569	100	91,95	4 Dokumen	132.445.569	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.03.2.01.00.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	21.440.921	100	71,47	1 Dokumen	21.440.921	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.03.2.01.00.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	48.389.926	100	96,78	1 Dokumen	48.389.926	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.03.2.01.00.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	64.042.000	2 Dokumen	62.614.722	100	97,77	2 Dokumen	62.614.722	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Lingkungan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	25.000.000	0 Laporan	29.780.120	0	119,12	0 Laporan	29.780.120	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.03.2.02.00.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	29.780.120	100	119,12	1 Laporan	29.780.120	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											103	95,97			0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	ST			SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	96,29			0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	ST			SR	SR	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kabupaten	0 %	2.962.650.000	0 %	0	100 %	931.898.500	136,3 %	800.107.849	136,3	85,86	136,3 %	800.107.849	0	27,01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Lingkungan	0 Laporan	2.962.650.000	0 Laporan	0	2 Laporan	931.898.500	20 Laporan	800.107.849	1	85,86	20 Laporan	800.107.849	0	27,01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.04.2.01.00.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Ha	2.800.000.000	0 Ha	0	7,9 Ha	890.606.000	7,9 Ha	761.407.453	100	85,49	7,9 Ha	761.407.453	32,92	27,19	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.04.2.01.00.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	102 Orang	162.650.000	0 Orang	0	34 Orang	41.292.500	34 Orang	38.700.396	100	93,72	34 Orang	38.700.396	33,33	23,79	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											136,3	85,86			0	27,01	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T			SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	89,61			33,13	25,49	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	T			SR	SR	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Keberhasilan Pengendalian B3 dan Limbah B3	0 %	0	0 %	0	100 %	25.185.000	112 %	15.371.850	112	61,04	112 %	15.371.850	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	0 Laporan	0	0 Laporan	0	20 Laporan	25.185.000	22 Laporan	15.371.850	110	61,04	22 Laporan	15.371.850	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.05.2.01.00.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	0 Laporan	0	0 Laporan	0	20 Laporan	25.185.000	22 Laporan	15.371.850	110	61,04	22 Laporan	15.371.850	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											112	61,04			0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	R			SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											110	61,04			0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	R			SR	SR	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan (%) (TPB) (%)	0 %	0	0 %	0	100 %	140.000.000	141,62 %	94.013.900	141,62	67,15	141,62 %	94.013.900	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terbinanya Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Terkait Izin PPLH (Laporan)	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	24 Dokumen	140.000.000	91 Dokumen	94.013.900	379,17	67,15	91 Dokumen	94.013.900	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.06.2.01.00.01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	24 Dokumen	40.000.000	25 Dokumen	28.091.671	104,17	70,23	25 Dokumen	28.091.671	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.06.2.01.00.09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0 Badan Usaha	0	0 Badan Usaha	0	50 Badan Usaha	100.000.000	66 Badan Usaha	65.922.229	132	65,92	66 Badan Usaha	65.922.229	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											141,62	67,15			0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	S			SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											118,09	68,08			0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	S			SR	SR	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang dilaksanakan	0 %	0	0 %	0	100 %	50.000.000	112,76 %	10.073.927	112,76	20,15	112,76 %	10.073.927	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat / Institusi yang terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	10.073.927	50	20,15	2 Dokumen	10.073.927	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.08.2.01.00.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	4.853.051	25	19,41	1 Dokumen	4.853.051	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
2.11.08.2.01.00.05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	4 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	5.220.876	25	20,88	1 Lembaga	5.220.876	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											112,76	20,15			0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	SR			SR	SR	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											25	20.15					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR					SR	SR		
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0 %	0	0 %	0	100 %	33.427.950	8,97 %	4.716.282	8,97	14,11	8,97 %	4.716.282	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang dinilai Kinerjanya Dalam Rangka PPLH	0 Entitas	0	0 Entitas	0	4 Entitas	33.427.950	1 Entitas	4.716.282	25	14,11	1 Entitas	4.716.282	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.11.09.2.01.00.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0 Entitas	0	0 Entitas	0	4 Entitas	33.427.950	1 Entitas	4.716.282	25	14,11	1 Entitas	4.716.282	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											8,97	14,11					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											25	14,11					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR					SR	SR		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditangani (%) (TPB)	0 %	0	0 %	0	100 %	63.707.500	113,58 %	31.087.462	113,58	48,8	113,58 %	31.087.462	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanki Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (Dokumen)	0 Pengaduan	0	0 Pengaduan	0	10 Pengaduan	63.707.500	6 Pengaduan	31.087.462	60	48,8	6 Pengaduan	31.087.462	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.11.10.2.01.00.04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	0 Pengaduan	0	0 Pengaduan	0	10 Pengaduan	63.707.500	6 Pengaduan	31.087.462	80	48,8	8 Pengaduan	31.087.462	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											113,58	48,8					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	SR					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											80	48,8					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											T	SR					SR	SR		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah (%) (TPB)	0 %	0	0 %	0	100 %	1.596.682.000	119,03 %	1.421.603.755	119,03	89,03	119,03 %	1.421.603.755	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota (Ton)	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.596.682.000	9 Laporan	1.421.603.755	900	89,03	9 Laporan	1.421.603.755	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.11.11.2.01.00.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	18 Kelompok	39.394.000	10 Kelompok	22.883.859	55,56	58,09	10 Kelompok	22.883.859	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.11.11.2.01.00.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	486.782.450	10 Unit	485.183.376	100	99,67	10 Unit	485.183.376	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
2.11.11.2.01.00.15	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	0 Unit	0	0 Unit	0	11 Unit	1.070.505.550	12 Unit	913.536.520	109,09	85,34	12 Unit	913.536.520	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											119,03	89,03					0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T					SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											88,22	81,03					0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											T	T					SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											314,5	67,88					8,42	12,69		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											ST	S					SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											53,26	38,62					6,25	3,01		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											R	SR					SR	SR		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.12	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	0 %	27.622.482.361	0 %	0	0 %	7.166.852.982	0 %	8.705.117.585	0	121,46	0 %	8.705.117.585	0	31,51	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100 %	270.000.000	0 %	0	0 %	23.500.000	0 %	19.264.100	0	81,97	0 %	19.264.100	0	7,13	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	60.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	7.664.200	100	95,8	2 Dokumen	7.664.200	100	12,77	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	5.882.900	100	73,54	1 Dokumen	5.882.900	100	11,77	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.00.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	5.717.000	100	76,23	1 Dokumen	5.717.000	100	19,06	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.00.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	100.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penyusunan administrasi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	0 %	17.455.625.011	0 %	0	0 %	4.307.502.982	0 %	5.649.376.759	0	131,15	0 %	5.649.376.759	0	32,36	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/bulan	15.746.345.011	0 Orang/bulan	0	35 Orang/bulan	4.096.302.982	114 Orang/bulan	5.445.000.719	325,71	132,92	114 Orang/bulan	5.445.000.719	67,06	34,58	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.327.680.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	128.700.000	12 Dokumen	114.890.000	100	89,27	12 Dokumen	114.890.000	100	8,65	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	231.600.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	65.500.000	12 Dokumen	65.640.000	100	100,21	12 Dokumen	65.640.000	100	28,34	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	60.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	7.000.000	2 Laporan	17.004.040	200	242,91	2 Laporan	17.004.040	40	28,34	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.00.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	24 Laporan	60.000.000	0 Laporan	0	18 Laporan	10.000.000	18 Laporan	6.842.000	100	68,42	18 Laporan	6.842.000	75	11,4	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.00.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase penyusunan administrasi dan pelaporan barang milik daerah yang tepat waktu	0 %	117.920.000	0 %	0	0 %	14.550.000	10 %	16.800.000	0	115,46	10 %	16.800.000	0	14,25	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.03.00.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.03.00.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.03.00.08	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	97.920.000	0 Laporan	0	12 Laporan	14.550.000	24 Laporan	16.800.000	200	115,46	24 Laporan	16.800.000	66,67	17,16	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelaporan administrasi umum yang tepat waktu	0 %	3.227.558.431	0 %	0	0 %	1.471.000.000	0 %	1.339.897.432	0	91,09	0 %	1.339.897.432	0	41,51	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

2.12.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	39.976.460	0 Paket	0	12 Paket	7.000.000	15 Paket	7.476.120	125	106,8	15 Paket	7.476.120	25	18,7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.635.600.000	0 Paket	0	6 Paket	850.000.000	15 Paket	822.812.600	250	96,8	15 Paket	822.812.600	125	50,31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	65.178.916	0 Paket	0	10 Paket	28.000.000	18 Paket	32.675.537	180	116,7	18 Paket	32.675.537	30	50,13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	131.460.210	0 Paket	0	12 Paket	10.000.000	18 Paket	11.298.500	150	112,99	18 Paket	11.298.500	30	8,59	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	105.342.845	0 Paket	0	12 Paket	70.000.000	18 Paket	77.292.900	150	110,42	18 Paket	77.292.900	30	73,37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.250.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	506.000.000	42 Laporan	388.341.775	350	76,75	42 Laporan	388.341.775	70	31,07	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terbayar	0 %	5.022.500.000	0 %	0	0 %	1.090.000.000	0 %	1.316.810.629	0	120,81	0 %	1.316.810.629	0	26,22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	500.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	100	100	12 Laporan	150.000.000	300	30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	522.500.000	0 Laporan	0	12 Laporan	105.000.000	18 Laporan	81.811.429	150	77,92	18 Laporan	81.811.429	30	15,66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	4.000.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	835.000.000	15 Laporan	1.084.999.200	125	129,94	15 Laporan	1.084.999.200	25	27,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	0 %	1.528.878.919	0 %	0	0 %	260.300.000	0 %	362.968.665	0	139,44	0 %	362.968.665	0	23,74	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakajanya	60 Unit	1.318.431.920	0 Unit	0	12 Unit	240.000.000	10 Unit	228.868.665	83,33	95,36	10 Unit	228.868.665	16,67	17,36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	102.000.000	0 Unit	0	31 Unit	25.700.000	0	0	0	31 Unit	25.700.000	51,67	25,2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.12.01.2.09.00.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	25 Unit	20.300.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.00.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	108.446.999	0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	108.400.000	0	0	3 Unit	108.400.000	100	99,96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	121,46		0	31,51				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	ST		SR	SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										103,07	69,6		54,55	21,36				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	S		R	SR				
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase meningkatnya layanan pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan	0 %	2.735.500.000	0 %	0	0 %	992.000.000	0 %	1.009.267.900	0	101,74	0 %	1.009.267.900	0	36,9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	0 %	2.735.500.000	0 %	0	0 %	992.000.000	0 %	1.009.267.900	0	101,74	0 %	1.009.267.900	0	36,9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01.00.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Pendaftaran Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	500.000 Dokumen	1.176.000.000	0 Dokumen	0	100.000 Dokumen	177.000.000	133.000 Dokumen	198.733.400	133	112,28	133.000 Dokumen	198.733.400	26,6	16,9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01.00.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	1.479.500.000	0 Laporan	0	12 Laporan	815.000.000	12 Laporan	810.534.500	100	99,45	12 Laporan	810.534.500	100	54,78	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01.00.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	80.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	101,74		0	36,9				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	ST		SR	SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										77,67	70,58		42,2	23,89				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										T	S		SR	SR				
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase meningkatnya layanan pendaftaran dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	0 %	600.000.000	0 %	0	0 %	155.000.000	0 %	179.605.160	0	115,87	0 %	179.605.160	0	29,93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	0 %	600.000.000	0 %	0	0 %	155.000.000	0 %	179.605.160	0	115,87	0 %	179.605.160	0	29,93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01.00.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	60 Dokumen	600.000.000	0 Dokumen	0	50.000 Dokumen	155.000.000	80.000 Dokumen	179.605.160	160	115,87	80.000 Dokumen	179.605.160	133.333,33	29,93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	115,87		0	29,93				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	ST		SR	SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										160	115,87		133.333,33	29,93				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	ST		ST	SR				
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	persentase meningkatnya pengelolaan informasi adminiduk dan pemanfaatan data kependudukan	0 %	1.055.000.000	0 %	0	0 %	270.000.000	0 %	282.218.400	0	104,53	0 %	282.218.400	0	26,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	persentase pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	0 %	520.000.000	0 %	0	0 %	150.000.000	0 %	154.643.900	0	103,1	0 %	154.643.900	0	29,74	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01.00.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	120.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01.00.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	60 Dokumen	400.000.000	0 Dokumen	0	15 Dokumen	150.000.000	11 Dokumen	154.643.900	73,33	103,1	11 Dokumen	154.643.900	18,33	38,66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi adminiduk	0 %	535.000.000	0 %	0	0 %	120.000.000	0 %	127.574.500	0	106,31	0 %	127.574.500	0	23,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.00.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	40.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.00.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60 Laporan	250.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	127.574.500	100	106,31	12 Laporan	127.574.500	20	51,03	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.00.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	65.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.00.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	24 Laporan	180.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	104,53		0	26,75				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	ST		SR	SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										28,89	34,9		6,39	14,95				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		SR	SR				
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	persentase meningkatnya pengelolaan dan penerbitan buku profil kependudukan	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0		0	0				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0		0	0				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	88,72		0	25,02				
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										SR	T		SR	SR				
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0		0	0				
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		SR	SR				
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0		0	0				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0		0	0				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0		0	0				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0		0	0				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		

PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Fertilitas Total (TFR)	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR	SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR	SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi peserta KB aktif	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR	SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR	SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR	SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR	SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																	
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	SR	SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0	0	0			
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN																	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	42.728.533.241	0 %	0	0 %	0	300 %	4.606.910.934	0	0	300 %	4.606.910.934	300	10,78	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	529.000.000	0 %	0	0 %	0	206 %	54.452.353	0	0	206 %	54.452.353	206	10,29	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	115.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	27 Dokumen	7.769.320	0	0	27 Dokumen	7.769.320	385,71	6,76	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	57.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	8.337.253	0	0	4 Dokumen	8.337.253	400	14,63	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.01.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	57.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	8.068.128	0	0	4 Dokumen	8.068.128	400	14,15	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.01.00.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	75.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	6.897.320	0	0	4 Dokumen	6.897.320	400	9,2	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.01.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	75.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	6.962.320	0	0	4 Dokumen	6.962.320	400	9,28	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	75.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	34 Laporan	8.156.192	0	0	34 Laporan	8.156.192	212,5	10,87	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.01.00.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	75.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	44 Laporan	8.261.820	0	0	44 Laporan	8.261.820	628,57	11,02	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	32.315.520.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	25 Dokumen	3.771.352.273	0	0	25 Dokumen	3.771.352.273	2,5	11,67	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	28.238.000.000	0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	136 Orang/bulan	3.489.319.133	0	0	136 Orang/bulan	3.489.319.133	400	12,36	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.948.440.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	217.080.000	0	0	4 Dokumen	217.080.000	400	7,36	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	829.080.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	34.920.000	0	0	4 Dokumen	34.920.000	400	4,21	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	60.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	60.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	8.935.376	0	0	4 Laporan	8.935.376	400	14,89	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.00.06	Pengelolaan dan Penytipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.00.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	90.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	49 Laporan	10.678.096	0	0	49 Laporan	10.678.096	272,22	11,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.00.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16 Dokumen	60.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	34 Dokumen	10.419.668	0	0	34 Dokumen	10.419.668	212,5	17,37	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berwujud Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.03.00.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.03.00.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.03.00.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	30.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.03.00.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Kepegawaian dengan baik	100 %	560.000.000	0 %	0	0 %	0	400 %	0	0	0	400 %	0	400	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.05.00.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	34 Unit	160.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	160.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.05.00.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	240.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	4 Orang	0	0	0	4 Orang	0	50	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.900.116.000	0 %	0	0 %	0	400 %	214.845.994	0	0	400 %	214.845.994	400	7,41	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisiplinkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisiplinkan	1 Paket	85.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	4 Paket	9.922.000	0	0	4 Paket	9.922.000	400	11,67	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisiplinkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisiplinkan	1 Paket	235.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	4 Paket	30.827.250	0	0	4 Paket	30.827.250	400	13,12	Dinas Komunikasi dan Informatika

2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	90.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	166.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	4 Paket	13.954.000	0	0	4 Paket	13.954.000	400	8,41	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	172.500.000	0 Paket	0	0 Paket	0	4 Paket	50.309.598	0	0	4 Paket	50.309.598	400	29,16	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	804.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	47.150.000	0	0	4 Dokumen	47.150.000	400	5,86	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	60.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.227.616.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	62.686.146	0	0	4 Laporan	62.686.146	400	5,11	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan	100 %	4.200.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.07.00.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	900.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.07.00.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	900.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.07.00.03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	500.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.07.00.04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	500.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.07.00.05	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	700.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.07.00.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	700.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia dengan baik	100 %	1.272.600.000	0 %	0	0 %	0	400 %	198.692.644	0	0	400 %	198.692.644	400	15,61	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	60.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	120.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	9.973.543	0	0	4 Laporan	9.973.543	400	8,31	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.032.600.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	188.719.101	0	0	4 Laporan	188.719.101	33,33	18,28	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	801.297.241	0 %	0	0 %	0	300 %	367.564.670	0	0	300 %	367.564.670	300	45,87	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	300.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	34.867.960	0	0	4 Unit	34.867.960	400	11,62	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	1.297.241	0 Unit	0	0 Unit	0	24 Unit	320.040.710	0	0	24 Unit	320.040.710	400	24,670,88	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.00.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	32 Unit	12.656.000	0	0	32 Unit	12.656.000	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.00.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	500.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0	0	300	10,78				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0	0	186,84	541,88				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		ST	ST				
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Informasi Publik	0 %	24.750.000.000	0 %	0	0 %	0	350 %	2.077.664.800	0	0	350 %	2.077.664.800	0	8,39	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi publik yang tersampaikan	0 Dokumen	24.750.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.077.664.800	0	0	4 Dokumen	2.077.664.800	0	8,39	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.00.14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	10.000.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	1.610.459.800	0	0	4 Laporan	1.610.459.800	400	16,1	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.00.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	28 Komunitas	300.000.000	0 Komunitas	0	0 Komunitas	0	112 Komunitas	16.689.900	0	0	112 Komunitas	16.689.900	400	5,56	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.00.16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	300.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.00.17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan	5 Permohonan	750.000.000	0 Permohonan	0	0 Permohonan	0	8 Permohonan	131.841.100	0	0	8 Permohonan	131.841.100	160	17,58	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.00.18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	300.000.000	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.00.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	50 Rekomendasi	1.000.000.000	0 Rekomendasi	0	0 Rekomendasi	0	9 Rekomendasi	116.655.500	0	0	9 Rekomendasi	116.655.500	18	11,67	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.00.20	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	50 Persentase	1.000.000.000	0 Persentase	0	0 Persentase	0	250 Persentase	62.964.900	0	0	250 Persentase	62.964.900	500	6,3	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.00.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/dukis	10 Media	1.500.000.000	0 Media	0	0 Media	0	16 Media	139.053.600	0	0	16 Media	139.053.600	160	9,27	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.00.22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.00.23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	6.000 Konten	9.000.000.000	0 Konten	0	0 Konten	0	0 Konten	0	0	0	0 Konten	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.00.24	Pengujian Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti Bimtek/latihan	10 Orang	300.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0	0	0	8,39				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0	0	148,91	6,04				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		ST	SR				
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi terintegrasi	100 %	24.900.000.000	0 %	0	0 %	0	400 %	1.453.385.846	0	0	400 %	1.453.385.846	400	5,84	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang telah menggunakan Domain dan subdomain resmi	57 Perangkat Daerah	900.000.000	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	204 Perangkat Daerah	23.372.200	0	0	204 Perangkat Daerah	23.372.200	357,89	2,6	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.01.00.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	900.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	23.372.200	0	0	4 Dokumen	23.372.200	400	2,6	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang e-GOV nya terintegrasi	57 Perangkat Daerah	24.000.000.000	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	204 Perangkat Daerah	1.430.013.646	0	0	204 Perangkat Daerah	1.430.013.646	357,89	5,96	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.00.13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	5 Aplikasi	300.000.000	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	8 Aplikasi	23.758.100	0	0	8 Aplikasi	23.758.100	160	7,92	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.00.14	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.00.15	Facilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	600.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.00.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang disusun	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	166.228.500	0	0	4 Dokumen	166.228.500	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.00.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	5 Aplikasi	2.400.000.000	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	3 Aplikasi	13.475.525	0	0	3 Aplikasi	13.475.525	60	0,56	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.00.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Aplikasi	900.000.000	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	5 Aplikasi	69.877.732	0	0	5 Aplikasi	69.877.732	100	7,76	Dinas Komunikasi dan Informatika	

2.16.03.2.02.00.22	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah.	1 Dokumen	1.200.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.00.23	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	5 Unit	300.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	81 Unit	24.945.900	0	0	81 Unit	24.945.900	1,62	8,32	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.00.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	57 Perangkat Daerah	9.000.000.000	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	204 Perangkat Daerah	762.147.781	0	0	204 Perangkat Daerah	762.147.781	357,89	8,47	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.00.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	57 Perangkat Daerah	9.000.000.000	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	153 Perangkat Daerah	369.580.108	0	0	153 Perangkat Daerah	369.580.108	268,42	4,11	Dinas Komunikasi dan Informatika	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					400	5,84	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					ST	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					269,68	3,61	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR					ST	SR	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Administrasi dan Kinerja PEMDA sesuai aturan	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	4.969.208.706	0	0	0 %	4.969.208.706	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	15.745.320	0	0	0 %	15.745.320	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	7.804.320	0	0	2 Dokumen	7.804.320	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	7.941.000	0	0	1 Laporan	7.941.000	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan dan pelaporan yang baik	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	2.897.610.349	0	0	0 %	2.897.610.349	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	35 Orang/bulan	2.546.210.778	0	0	35 Orang/bulan	2.546.210.778	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	8 Dokumen	134.486.336	0	0	8 Dokumen	134.486.336	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	147.401.724	0	0	2 Dokumen	147.401.724	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.02.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	32.903.185	0	0	1 Dokumen	32.903.185	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	8.704.400	0	0	1 Laporan	8.704.400	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.02.00.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	27.903.926	0	0	3 Laporan	27.903.926	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi kantor dapat berjalan baik	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	317.190.038	0	0	0 %	317.190.038	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	5.597.175	0	0	2 Paket	5.597.175	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	11 Paket	66.123.815	0	0	11 Paket	66.123.815	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	15 Paket	11.986.535	0	0	15 Paket	11.986.535	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	49.955.700	0	0	3 Paket	49.955.700	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	3.080.000	0	0	5 Dokumen	3.080.000	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	30 Laporan	180.446.813	0	0	30 Laporan	180.446.813	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	792.852.925	0	0	0 %	792.852.925	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	52 Unit	792.852.925	0	0	52 Unit	792.852.925	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan dan kegiatan kantor dapat berjalan dengan baik	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	492.434.285	0	0	0 %	492.434.285	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.000.000	0	0	1 Laporan	5.000.000	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	27.041.633	0	0	2 Laporan	27.041.633	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	27 Laporan	460.392.652	0	0	27 Laporan	460.392.652	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aktifitas kantor dapat berjalan baik dan lancar	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	453.375.799	0	0	0 %	453.375.799	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	8 Unit	193.085.089	0	0	8 Unit	193.085.089	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	9.690.000	0	0	4 Unit	9.690.000	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	250.600.700	0	0	2 Unit	250.600.700	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0					0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR					SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0					0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR					SR	SR	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah izin yang terbit	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	194.519.408	0	0	0 %	194.519.408	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas fasilitas/insentif kemudahan berusaha	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	14.750.429	0	0	0 %	14.750.429	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02.2.01.00.04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya di harmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	14.750.429	0	0	1 Dokumen	14.750.429	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemetaan peta potensi daerah	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	179.768.979	0	0	0 %	179.768.979	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	179.768.979	0	0	1 Dokumen	179.768.979	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan jumlah calon investor	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	488.243.080	0	0	0 %	488.243.080	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Investasi	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	488.243.080	0	0	0 %	488.243.080	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.2.01.00.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	488.243.080	0	0	3 Dokumen	488.243.080	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	684.051.234	0	0	0 %	684.051.234	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang Terintegrasi	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	684.051.234	0	0	0 %	684.051.234	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.00.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	14.995.732	0	0	1 Dokumen	14.995.732	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.00.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0	10.383 Pelaku Usaha	600.503.945	0	0	10.383 Pelaku Usaha	600.503.945	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.00.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0	7 Pelaku Usaha	29.856.625	0	0	7 Pelaku Usaha	29.856.625	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.00.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	0 Kegiatan Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	0	1 Kegiatan Usaha	38.694.932	0	0	1 Kegiatan Usaha	38.694.932	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase perusahaan menyampaikan LKPM	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	787.086.327	0	0	0 %	787.086.327	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Data perizinan dan non perizinan yang Terintegrasi	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	787.086.327	0	0	0 %	787.086.327	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.00.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0 Kegiatan Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	0	12 Kegiatan Usaha	24.577.965	0	0	12 Kegiatan Usaha	24.577.965	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.00.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0	840 Pelaku Usaha	567.854.562	0	0	840 Pelaku Usaha	567.854.562	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.00.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	0 Kegiatan Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	0	253 Kegiatan Usaha	194.653.800	0	0	253 Kegiatan Usaha	194.653.800	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase cakupan pelayanan perizinan berbasis elektronik	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	787.086.327	0	0	0 %	787.086.327	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Data perizinan dan non perizinan yang Terintegrasi	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	787.086.327	0	0	0 %	787.086.327	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.00.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0 Kegiatan Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	0	12 Kegiatan Usaha	24.577.965	0	0	12 Kegiatan Usaha	24.577.965	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.00.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0	840 Pelaku Usaha	567.854.562	0	0	840 Pelaku Usaha	567.854.562	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.00.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	0 Kegiatan Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	0	253 Kegiatan Usaha	194.653.800	0	0	253 Kegiatan Usaha	194.653.800	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR	
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0	
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR	
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0	
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun rencana pembangunan daerah	0 %	2.200.000.000	0 %	0	0 %	0	150 %	178.984.500	0	0	150 %	178.984.500	0	8,14	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun rencana pembangunan daerah	57 Perangkat Daerah	2.200.000.000	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	78 Perangkat Daerah	178.984.500	0	0	78 Perangkat Daerah	178.984.500	136,84	8,14	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.00.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	50 Persentase	900.000.000	0 Persentase	0	0 Persentase	0	300 Persentase	49.115.000	0	0	300 Persentase	49.115.000	600	5,46	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.00.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1.300.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	129.869.500	0	0	3 Dokumen	129.869.500	300	9,99	Dinas Komunikasi dan Informatika
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	8,14	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			450	7,73	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			ST	SR	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah layanan sistem elektronik yang telah diamankan	57 Unit Kerja	1.800.000.000	0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	112 Unit Kerja	43.077.700	0	0	112 Unit Kerja	43.077.700	196,49	2,39	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang yang telah menggunakan pelayanan persandian dalam rangka pengamanan informasi	57 Perangkat Daerah	1.800.000.000	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	61 Perangkat Daerah	43.077.700	0	0	61 Perangkat Daerah	43.077.700	107,02	2,39	Dinas Komunikasi dan Informatika

2.21.02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	900.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	43.077.700	0	0	3 Dokumen	43.077.700	300	4,79	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	57 Perangkat Daerah	900.000.000	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0	0	0 Perangkat Daerah	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0						
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0						
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR						
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0						
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	SR						
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0						
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR						
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0						
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	SR						
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0						
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR						
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 %	5.750.000.000	0 %	0	0 %	1.154.384.000	0 %	1.033.599.000	0	89,54	0 %	1.033.599.000	0	17,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	0 %	2.000.000.000	0 %	0	0 %	168.115.000	0 %	119.439.000	0	71,05	0 %	119.439.000	0	5,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.02.2.01.001	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan	24 Objek	1.500.000.000	0 Objek	0	24 Objek	168.115.000	26 Objek	119.439.000	108,33	71,05	26 Objek	119.439.000	108,33	7,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.02.2.01.002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200 Orang	500.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang difasilitasi	0 %	3.750.000.000	0 %	0	0 %	986.269.000	0 %	914.160.000	0	92,69	0 %	914.160.000	0	24,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.02.2.02.001	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan	100 Objek	3.750.000.000	0 Objek	0	7 Objek	986.269.000	7 Objek	914.160.000	100	92,69	7 Objek	914.160.000	7	24,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	89,54						
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	T						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											69,44	54,58						
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R						
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 %	5.750.000.000	0 %	0	0 %	1.154.384.000	0 %	1.033.599.000	0	89,54	0 %	1.033.599.000	0	17,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	0 %	2.000.000.000	0 %	0	0 %	168.115.000	0 %	119.439.000	0	71,05	0 %	119.439.000	0	5,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.02.2.01.001	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan	24 Objek	1.500.000.000	0 Objek	0	24 Objek	168.115.000	26 Objek	119.439.000	108,33	71,05	26 Objek	119.439.000	108,33	7,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.02.2.01.002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200 Orang	500.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang difasilitasi	0 %	3.750.000.000	0 %	0	0 %	986.269.000	0 %	914.160.000	0	92,69	0 %	914.160.000	0	24,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.02.2.02.001	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan	100 Objek	3.750.000.000	0 Objek	0	7 Objek	986.269.000	7 Objek	914.160.000	100	92,69	7 Objek	914.160.000	7	24,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	89,54						
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	T						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											69,44	54,58						
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R						
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 %	1.750.000.000	0 %	0	0 %	962.206.000	0 %	793.455.000	0	82,46	0 %	793.455.000	0	45,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian pengembangan dan pemanfaatan kesenian tradisional	0 %	1.750.000.000	0 %	0	0 %	962.206.000	0 %	793.455.000	0	82,46	0 %	793.455.000	0	45,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.03.2.01.001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan(Ditingkatkan Kompetensi)	300 Orang	750.000.000	0 Orang	0	300 Orang	475.218.000	300 Orang	405.252.000	100	85,28	300 Orang	405.252.000	100	54,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.03.2.01.002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	24 Sertifikat	400.000.000	0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	0	0	0 Sertifikat	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.03.2.01.003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	600.000.000	0 Lembaga	0	1 Lembaga	486.988.000	1 Lembaga	388.203.000	100	79,72	1 Lembaga	388.203.000	20	64,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	82,46						
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	T						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											66,67	55						
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	R						
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 %	400.000.000	0 %	0	0 %	82.000.000	0 %	46.232.000	0	56,38	0 %	46.232.000	0	11,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian peninggalan sejarah	0 %	400.000.000	0 %	0	0 %	82.000.000	0 %	46.232.000	0	56,38	0 %	46.232.000	0	11,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.04.2.01.003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	5 Dokumen	400.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	82.000.000	0 Dokumen	46.232.000	0	56,38	0 Dokumen	46.232.000	0	11,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	56,38						
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	R						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	56,38						
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	R						
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0 %	915.000.000	0 %	0	0 %	282.249.000	0 %	123.126.000	0	43,62	0 %	123.126.000	0	13,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya	0 %	915.000.000	0 %	0	0 %	282.249.000	0 %	123.126.000	0	43,62	0 %	123.126.000	0	13,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.05.2.02.002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	5 Objek	915.000.000	0 Objek	0	3 Objek	282.249.000	5 Objek	123.126.000	166,67	43,62	5 Objek	123.126.000	100	13,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	43,62						
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											166,67	43,62						
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	SR						
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	84,11						
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	T						
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											41,36	29,35						
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR						
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	6.397.847.514	0 %	0	100 %	5.599.759.260	100 %	5.295.189.475	100	94,56	100 %	5.295.189.475	100	82,77	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	7.847.514	0 %	0	100 %	7.847.514	50 %	7.843.500	50	99,95	50 %	7.843.500	50	99,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	

2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.847.514	0 Dokumen	0	2 Dokumen	7.847.514	2 Dokumen	7.843.500	100	99,95	2 Dokumen	7.843.500	100	99,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan dinas	100 %	5.085.000.000	0 %	0	100 %	4.457.196.437	75 %	4.306.965.642	75	96,63	75 %	4.306.965.642	75	84,7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	5.000.000.000	0 Orang/bulan	0	136 Orang/bulan	4.373.746.437	136 Orang/bulan	4.226.115.642	100	96,62	136 Orang/bulan	4.226.115.642	400	84,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	65.000.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	64.730.000	12 Dokumen	62.130.000	100	95,98	12 Dokumen	62.130.000	100	95,58	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	18.720.000	12 Dokumen	18.720.000	100	100	12 Dokumen	18.720.000	100	93,6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum dinas	100 %	230.000.000	0 %	0	100 %	172.861.427	100 %	169.717.315	100	98,18	100 %	169.717.315	100	73,79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	0 Paket	0	2 Paket	4.577.085	2 Paket	4.488.000	100	98,05	2 Paket	4.488.000	100	89,76	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	65.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	0 Paket	0	3 Paket	11.199.775	3 Paket	10.530.000	100	94,02	3 Paket	10.530.000	100	70,2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.000.000	0 Paket	0	4 Paket	23.563.101	4 Paket	22.542.300	100	95,67	4 Paket	22.542.300	133,33	90,17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	0 Paket	0	2 Paket	25.871.466	3 Paket	25.870.000	150	99,99	3 Paket	25.870.000	150	129,35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	100.000.000	0 Laporan	0	40 Laporan	107.650.000	38 Laporan	106.287.015	95	98,73	38 Laporan	106.287.015	84,44	106,29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pengadaan BMD dinas	100 %	150.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.07.00.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya jasa penunjang urusan dinas	100 %	560.000.000	0 %	0	100 %	610.149.582	125 %	541.789.190	125	88,8	125 %	541.789.190	125	96,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	52.941.102	12 Laporan	51.448.710	100	97,18	12 Laporan	51.448.710	100	85,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	557.208.480	12 Laporan	490.340.480	100	88	12 Laporan	490.340.480	100	98,07	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan BMD dinas	100 %	365.000.000	0 %	0	100 %	351.704.300	100 %	268.873.828	100	76,45	100 %	268.873.828	100	73,66	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	260.000.000	0 Unit	0	15 Unit	267.089.000	20 Unit	184.526.828	133,33	69,09	20 Unit	184.526.828	133,33	70,97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	30.000.000	0 Unit	0	3 Unit	14.418.900	3 Unit	14.397.000	100	99,85	3 Unit	14.397.000	100	47,99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	0 Unit	0	1 Unit	70.196.400	1 Unit	69.950.000	100	99,65	1 Unit	69.950.000	100	93,27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	94,56		100	82,77			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	ST		ST	T			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											92,4	83,3		112,57	78,47			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	T		ST	T			
2.23.02	PROGRAM PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN	indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	45 indeks	640.000.000	0 indeks	0	13 indeks	342.143.930	45,11 indeks	310.268.375	347	96,68	45,11 indeks	310.268.375	100,24	48,48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	80 indeks	450.000.000	0 indeks	0	78 indeks	209.901.430	76 indeks	195.991.425	97,44	93,37	76 indeks	195.991.425	95	43,55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01.11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	80.000.000	0 Perpustakaan	0	1 Perpustakaan	69.671.430	1 Perpustakaan	68.085.400	100	97,72	1 Perpustakaan	68.085.400	100	85,11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01.12	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	100.000.000	0 Layanan	0	1 Layanan	120.230.000	1 Layanan	108.290.825	100	90,07	1 Layanan	108.290.825	100	108,29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01.13	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100 Perpustakaan	45.000.000	0 Perpustakaan	0	20 Perpustakaan	20.000.000	45 Perpustakaan	19.615.200	225	98,08	45 Perpustakaan	19.615.200	45	43,59	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01.16	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	300 Eksemplar	75.000.000	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0	0	0 Eksemplar	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01.20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	150.000.000	0 Perpustakaan	0	0 Perpustakaan	0	0 Perpustakaan	0	0	0	0 Perpustakaan	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat Kegemaran Membaca	50 indeks	190.000.000	0 indeks	0	35 indeks	132.242.500	58,74 indeks	114.276.950	167,83	86,41	58,74 indeks	114.276.950	117,48	60,15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.02.06	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung social lainnya	2 Orang	80.000.000	0 Orang	0	2 Orang	51.902.500	2 Orang	51.231.300	100	98,71	2 Orang	51.231.300	100	64,04	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.02.07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 Perpustakaan	60.000.000	0 Perpustakaan	0	0 Perpustakaan	0	0 Perpustakaan	0	0	0	0 Perpustakaan	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.02.10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	4 Lokus	50.000.000	0 Lokus	0	4 Lokus	80.340.000	4 Lokus	63.045.650	100	78,47	4 Lokus	63.045.650	100	126,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											347	90,68		100,24	48,48			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	SR		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											78,13	57,88		55,63	53,39			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											T	R		R	R			
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	25 %	50.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pelestarian naskah kuno milik daerah	10 Naskah	50.000.000	0 Naskah	0	0 Naskah	0	0 Naskah	0	0	0	0 Naskah	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.03.2.01.04	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalimmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalimmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	10 Eksemplar	50.000.000	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0	0	0 Eksemplar	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0		0	0			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0		0	0			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR		SR	SR			
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100 %	430.000.000	0 %	0	100 %	319.454.877	100 %	300.726.602	100	94,14	100 %	300.726.602	100	69,94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	jumlah arsip dinamis yang dikelola	100 %	135.000.000	0 %	0	100 %	80.000.000	100 %	79.485.915	100	99,36	100 %	79.485.915	100	58,88	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	300 Berkas	25.000.000	0 Berkas	0	0 Berkas	0	0 Berkas	0	0	0	0 Berkas	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	300 Berkas	35.000.000	0 Berkas	0	300 Berkas	25.000.000	300 Berkas	24.959.000	100	99,84	300 Berkas	24.959.000	100	71,31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	75.000.000	0 Laporan	0	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	54.526.915	100	99,14	2 Laporan	54.526.915	100	72,7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah arsip statis yang dikelola	100 %	175.000.000	0 %	0	100 %	108.681.230	100 %	100.058.000	100	92,07	100 %	100.058.000	100	57,18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.02.2.02.00.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Tertentu kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Tertentu yang Diumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1 Arsip	100.000.000	0 Arsip	0	0 Arsip	0	0 Arsip	0	0	0	0 Arsip	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.02.2.02.04	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	150 Arsip	75.000.000	0 Arsip	0	400 Arsip	108.681.230	630 Arsip	100.058.000	157,5	92,07	630 Arsip	100.058.000	420	133,41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan arsip dalam JIKN	100 %	120.000.000	0 %	0	100 %	130.773.647	100 %	121.182.687	100	92,67	100 %	121.182.687	100	100,99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.02.2.03.00.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	15 Pengguna	55.000.000	0 Pengguna	0	4 Pengguna	55.773.647	5 Pengguna	55.491.075	125	99,49	5 Pengguna	55.491.075	33,33	100,89	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.02.2.03.00.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	65.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	65.691.612	100	87,59	1 Laporan	65.691.612	100	101,06	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	94,14		100	69,94			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	ST		ST	S			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											83,21	68,3		107,62	68,48			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											T	S		ST	S			

RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										136.75	69.85			75.06	50.3		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										ST	S			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										20.8	17.08			26.9	17.12		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR			SR	SR		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA																
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	39.722.500.000	0 %	0	0 %	9.338.055.315	0 %	8.362.029.559	0	89,55	0 %	8.362.029.559	0	21,05	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan evaluasi kinerja yang tepat waktu	0 %	350.000.000	0 %	0	0 %	63.125.482	0 %	43.090.974	0	68,26	0 %	43.090.974	0	12,31	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.01.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	31.230.027	2 Dokumen	16.345.925	100	52,34	2 Dokumen	16.345.925	20	10,9	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.379.027	1 Dokumen	8.105.925	100	96,74	1 Dokumen	8.105.925	20	16,21	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.975.342	1 Dokumen	5.594.242	100	80,2	1 Dokumen	5.594.242	20	11,19	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	8.187.479	1 Laporan	8.014.377	100	97,89	1 Laporan	8.014.377	20	16,03	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	50.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	8.353.607	1 Laporan	5.030.505	100	60,22	1 Laporan	5.030.505	20	10,06	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	0 %	31.400.000.000	0 %	0	0 %	7.425.735.293	0 %	6.864.199.232	0	92,44	0 %	6.864.199.232	0	21,86	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.02.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	30.000.000.000	0 Orang/bulan	0	70 Orang/bulan	6.939.555.015	210 Orang/bulan	6.534.064.168	300	94,16	210 Orang/bulan	6.534.064.168	300	21,78	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.02.01.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1.000.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	386.692.084	1 Dokumen	251.211.985	100	64,96	1 Dokumen	251.211.985	20	25,12	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.02.01.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	50.349.690	100	71,93	1 Dokumen	50.349.690	20	20,14	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.02.01.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	9.806.242	100	98,06	1 Dokumen	9.806.242	20	19,61	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	9.488.194	1 Laporan	9.463.194	100	99,74	1 Laporan	9.463.194	20	18,93	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.02.01.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	9.303.953	100	93,04	1 Dokumen	9.303.953	20	18,61	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersedianya laporan pengamanan dan pengelolaan barang milik daerah	0 %	300.000.000	0 %	0	0 %	67.500.000	0 %	30.077.742	0	44,56	0 %	30.077.742	0	10,03	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.03.01.01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	50.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	9.998.826	100	99,99	1 Laporan	9.998.826	20	20	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.03.01.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	250.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	57.500.000	1 Laporan	20.078.916	100	34,92	1 Laporan	20.078.916	20	8,03	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian bagi pegawai	0 %	50.000.000	0 %	0	0 %	8.500.000	0 %	8.499.426	0	99,99	0 %	8.499.426	0	17	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.05.01.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	8.499.426	100	99,99	1 Dokumen	8.499.426	20	17	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum dan pelayanan kantor	0 %	1.535.000.000	0 %	0	0 %	435.856.500	0 %	300.847.497	0	69,02	0 %	300.847.497	0	19,6	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.06.01.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000	0 Paket	0	1 Paket	5.000.000	1 Paket	4.845.684	100	96,91	1 Paket	4.845.684	20	19,38	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.06.01.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	250.000.000	0 Paket	0	1 Paket	160.477.500	1 Paket	150.603.993	100	93,85	1 Paket	150.603.993	20	60,24	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.06.01.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	60.000.000	0 Paket	0	1 Paket	15.000.000	1 Paket	14.995.469	100	99,97	1 Paket	14.995.469	20	24,99	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.06.01.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000	0 Paket	0	1 Paket	10.000.000	1 Paket	9.994.521	100	99,95	1 Paket	9.994.521	20	19,99	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.06.01.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	150.000.000	0 Paket	0	1 Paket	35.808.000	1 Paket	35.807.650	100	100	1 Paket	35.807.650	20	23,87	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.06.01.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	1.000.000.000	0 Laporan	0	20 Laporan	209.571.000	20 Laporan	84.600.180	100	40,37	20 Laporan	84.600.180	40	8,46	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	0 %	4.812.500.000	0 %	0	0 %	1.114.928.040	0 %	1.019.656.986	0	91,45	0 %	1.019.656.986	0	21,19	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125 Laporan	12.500.000	0 Laporan	0	20 Laporan	2.500.000	20 Laporan	2.500.000	100	100	20 Laporan	2.500.000	16	20	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	300.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	66.433.840	1 Laporan	42.687.206	100	64,26	1 Laporan	42.687.206	20	14,23	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.08.01.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4.000.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	1.045.994.200	1 Laporan	974.469.780	100	93,16	1 Laporan	974.469.780	20	21,65	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah	0 %	1.275.000.000	0 %	0	0 %	222.410.000	0 %	95.657.702	0	43,01	0 %	95.657.702	0	7,5	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.09.01.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	35 Unit	1.000.000.000	0 Unit	0	35 Unit	207.410.000	15 Unit	85.701.458	42,86	41,32	15 Unit	85.701.458	42,86	8,57	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.09.01.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25.000.000	0 Unit	0	5 Unit	5.000.000	1 Unit	330.000	20	6,6	1 Unit	330.000	4	1,32	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01.2.09.01.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	0 Unit	0	1 Unit	10.000.000	1 Unit	9.626.244	100	96,26	1 Unit	9.626.244	100	3,85	Dinas Perikanan dan Peternakan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	89,55			0	21,05		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	T			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										102,42	79,88			34,73	17,7		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	T			SR	SR		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan perikanan tangkap	0 Ton	1.850.000.000	0 Ton	0	0 Ton	565.433.000	0 Ton	522.688.500	0	92,44	0 Ton	522.688.500	0	28,25	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.03.2.01.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.03.2.01.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	100 Unit	1.000.000.000	0 Unit	0	30 Unit	485.000.000	30 Unit	449.195.400	100	92,62	30 Unit	449.195.400	30	44,92	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.03.2.01.01.04	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dan Tersedia	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50 Unit	500.000.000	0 Unit	0	1 Unit	10.000.000	1 Unit	9.333.800	100	93,34	1 Unit	9.333.800	2	1,87	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan nelayan kecil	0 %	250.000.000	0 %	0	0 %	70.433.000	0 %	64.159.300	0	91,09	0 %	64.159.300	0	25,66	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.03.2.02.01.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	250.000.000	0 Orang	0	20 Orang	70.433.000	20 Orang	64.159.300	100	91,09	20 Orang	64.159.300	20	25,66	Dinas Perikanan dan Peternakan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	92,44			0	28,25		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										75	69,26			13	18,11		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										S	S			SR	SR		
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	0 %	200.000.000	0 %	0	0 %	40.433.000	0 %	13.432.764	0	33,22	0 %	13.432.764	0	6,72	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.04.2.02.01.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	50 Kelompok	100.000.000	0 Kelompok	0	10 Kelompok	20.000.000	10 Kelompok	10.999.764	100	55	10 Kelompok	10.999.764	20	11	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.04.2.02.01.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50 Kelompok	100.000.000	0 Kelompok	0	10 Kelompok	20.433.000	4 Kelompok	2.433.000	40	11,91	4 Kelompok	2.433.000	8	2,43	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang terdapat dan terbiasa	Jumlah kelompok budidaya ikan yang terdapat dan terbiasa	0 Kelompok	5.500.000.000	0 Kelompok	0	0 Kelompok	4.766.975.000	0 Kelompok	4.131.780.001	0	86,68	0 Kelompok	4.131.780.001	0	75,12	Dinas Perikanan dan Peternakan

3.25.04.2.04.00.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit	5.000.000.000	0 Unit	0	9 Unit	4.420.000.000	9 Unit	4.093.696.114	100	92,62	9 Unit	4.093.696.114	22,5	81,87	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.25.04.2.04.00.09	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit	500.000.000	0 Unit	0	15 Unit	346.975.000	2 Unit	38.083.887	13,33	10,98	2 Unit	38.083.887	8	7,62	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	86,23			0	72,72		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	T			SR	S		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											63,33	42,63			14,83	25,73		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											R	SR			SR	SR		
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	0 %	500.000.000	0 %	0	0 %	100.000.000	0 %	77.152.000	0	77,15	0 %	77.152.000	0	15,43	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pengawas perikanan tangkap dan budidaya yang terbiasa	0 Kelompok	500.000.000	0 Kelompok	0	0 Kelompok	100.000.000	0 Kelompok	77.152.000	0	77,15	0 Kelompok	77.152.000	0	15,43	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.25.05.2.01.00.07	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengolahan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengolahan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	50 Pelaku Usaha	500.000.000	0 Pelaku Usaha	0	5 Pelaku Usaha	100.000.000	5 Pelaku Usaha	77.152.000	100	77,15	5 Pelaku Usaha	77.152.000	10	15,43	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	77,15			0	15,43		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	T			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	77,15			10	15,43		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	T			SR	SR		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	cakupan usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil yang terdapat dalam Kusuka (satu data KKP)	0 %	1.000.000.000	0 %	0	0 %	587.063.690	0 %	493.281.425	0	84,03	0 %	493.281.425	0	49,33	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan dan hasil produksi pengolahan ikan di lingkungan Timur	0 %	1.000.000.000	0 %	0	0 %	587.063.690	0 %	493.281.425	0	84,03	0 %	493.281.425	0	49,33	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.25.06.2.03.00.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Ton	500.000.000	0 Ton	0	0 Ton	0	0 Ton	0	0	0	0 Ton	0	0	0	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.25.06.2.03.00.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	25 Pelaku Usaha	500.000.000	0 Pelaku Usaha	0	20 Pelaku Usaha	587.063.690	20 Pelaku Usaha	493.281.425	100	84,03	20 Pelaku Usaha	493.281.425	80	98,66	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	84,03			0	49,33		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	T			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											50	42,02			40	49,33		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi peternakan	0 %	5.100.000.000	0 %	0	0 %	7.034.785.000	0 %	2.311.635.000	0	32,86	0 %	2.311.635.000	0	45,33	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pengawasan dan pembinaan produksi benih/bibit pakan dan hijauan ternak	0 %	100.000.000	0 %	0	0 %	150.000.000	0 %	30.861.600	0	20,57	0 %	30.861.600	0	30,86	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.27.02.2.05.00.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	5 Laporan	100.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	30.861.600	100	20,57	1 Laporan	30.861.600	20	30,86	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penambahan jumlah ternak dari daerah lain	10.000 Ekor	5.000.000.000	0 Ekor	0	0 Ekor	6.884.785.000	0 Ekor	2.280.773.400	0	33,13	0 Ekor	2.280.773.400	0	45,62	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.27.02.2.06.00.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	10.000 Ekor	5.000.000.000	0 Ekor	0	5.452 Ekor	6.884.785.000	2.230 Ekor	2.280.773.400	40,9	33,13	2.230 Ekor	2.280.773.400	22,3	45,62	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	32,86			0	45,33		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											70,45	26,85			21,15	38,24		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	SR			SR	SR		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase rata-rata peningkatan populasi ternak	0 %	250.000.000	0 %	0	0 %	22.700.000	0 %	22.435.672	0	98,84	0 %	22.435.672	0	8,97	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tertaksananya pembangunan prasarana pertanian	0 %	250.000.000	0 %	0	0 %	22.700.000	0 %	22.435.672	0	98,84	0 %	22.435.672	0	8,97	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.27.03.2.02.00.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	250.000.000	0 Unit	0	1 Unit	22.700.000	1 Unit	22.435.672	100	98,84	1 Unit	22.435.672	50	8,97	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	98,84			0	8,97		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	98,84			50	8,97		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	ST			SR	SR		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	0 %	1.000.000.000	0 %	0	0 %	100.000.000	0 %	71.774.490	0	71,77	0 %	71.774.490	0	7,18	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis	0 %	500.000.000	0 %	0	0 %	80.000.000	0 %	52.319.741	0	65,4	0 %	52.319.741	0	10,46	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.27.04.2.01.00.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	500.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	52.319.741	100	65,4	1 Laporan	52.319.741	20	10,46	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	0 %	500.000.000	0 %	0	0 %	20.000.000	0 %	19.454.749	0	97,27	0 %	19.454.749	0	3,89	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.27.04.2.03.00.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Laporan	500.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	19.454.749	100	97,27	1 Laporan	19.454.749	20	3,89	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	71,77			0	7,18		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	S			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	81,34			20	7,18		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	T			SR	SR		
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan usaha peternakan berizin	0 %	250.000.000	0 %	0	0 %	65.000.000	0 %	63.064.352	0	97,02	0 %	63.064.352	0	25,23	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Peningkatan pelayanan penerbitan izin usaha peternakan	0 %	250.000.000	0 %	0	0 %	65.000.000	0 %	63.064.352	0	97,02	0 %	63.064.352	0	25,23	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
3.27.06.2.02.00.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	10 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	63.064.352	100	97,02	1 Dokumen	63.064.352	10	25,23	Dinas Perikanan dan Pemekakan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	97,02			0	25,23		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	97,02			10	25,23		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	ST			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	81,1			0	30,39		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	T			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											41,16	33,78			11,24	8,85		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0 %	0	0 %		0	0 %	0	0	0	0 %		0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0				0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0 %	0	0 %		0	0 %	0	0	0	0 %		0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0				0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Pertanian	0 %	0	0 %		0	0 %	0	0	0	0 %		0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0				0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluhan Pertanian	0 %	0	0 %		0	0 %	0	0	0	0 %		0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0				0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																	
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0			0	0		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0				0		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR			SR	SR		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5.01	PERENCANAAN																
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja	100 Persentase	63.052.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	8.381.947.773	0 Persentase	7.919.643.366	0	94,48	0 Persentase	7.919.643.366	0	12,56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 Persentase	851.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	10.601.121	100 Persentase	10.219.300	100	96,4	100 Persentase	10.219.300	100	1,2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen	455.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.447.514	1 Dokumen	5.354.400	100	98,29	1 Dokumen	5.354.400	3,85	1,18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	396.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	5.153.607	1 Laporan	4.864.900	100	94,4	1 Laporan	4.864.900	4,17	1,23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persentase	51.489.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	7.024.263.593	100 Persentase	6.715.408.600	100	95,6	100 Persentase	6.715.408.600	100	13,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225 Orang/bulan	47.595.000.000	0 Orang/bulan	0	45 Orang/bulan	6.611.275.399	45 Orang/bulan	6.394.885.250	100	96,73	45 Orang/bulan	6.394.885.250	20	13,44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150 Dokumen	2.786.000.000	0 Dokumen	0	25 Dokumen	280.400.000	15 Dokumen	190.118.200	60	67,8	15 Dokumen	190.118.200	10	6,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78 Dokumen	743.000.000	0 Dokumen	0	13 Dokumen	94.000.000	3 Dokumen	92.374.850	23,08	98,27	3 Dokumen	92.374.850	3,85	12,43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	88.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	7.888.194	0 Laporan	7.666.400	0	97,19	0 Laporan	7.666.400	0	8,71	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30 Laporan	188.000.000	0 Laporan	0	5 Laporan	15.700.000	1 Laporan	15.565.500	20	99,14	1 Laporan	15.565.500	3,33	8,28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	89.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen	14.798.400	0	98,66	0 Dokumen	14.798.400	0	16,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 Persentase	218.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	22.900.000	25 Persentase	22.899.600	25	100	25 Persentase	22.899.600	25	10,5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Laporan	218.000.000	0 Laporan	0	7 Laporan	22.900.000	2 Laporan	22.899.600	28,57	100	2 Laporan	22.899.600	4,76	10,5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persentase	891.000.000	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	140.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	214.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	252.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	285.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.335.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	374.283.059	25 Persentase	365.923.235	25	97,77	25 Persentase	365.923.235	25	15,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	164.000.000	0 Paket	0	6 Paket	42.620.000	1 Paket	42.615.400	16,67	99,99	1 Paket	42.615.400	2,86	25,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	270 Paket	206.000.000	0 Paket	0	45 Paket	60.000.000	10 Paket	59.868.500	22,22	99,78	10 Paket	59.868.500	3,7	29,06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	214 Paket	325.000.000	0 Paket	0	35 Paket	47.000.000	9 Paket	46.603.500	25,71	99,16	9 Paket	46.603.500	4,21	14,34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	104.000.000	0 Paket	0	6 Paket	25.000.000	1 Paket	24.835.400	16,67	99,34	1 Paket	24.835.400	2,78	23,88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	183.000.000	0 Paket	0	2 Paket	59.280.000	1 Paket	59.217.550	50	99,89	1 Paket	59.217.550	7,69	32,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan	1.209.000.000	0 Laporan	0	50 Laporan	116.383.059	10 Laporan	108.782.985	20	93,47	10 Laporan	108.782.985	3,28	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	144.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	24.000.000	0 Dokumen	23.999.900	0	100	0 Dokumen	23.999.900	0	16,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	1.864.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	126.500.000	0 Persentase	24.550.000	0	19,41	0 Persentase	24.550.000	0	1,32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	1.153.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	87 Unit	711.000.000	0 Unit	0	6 Unit	126.500.000	0 Unit	24.550.000	0	19,41	0 Unit	24.550.000	0	3,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	1.970.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	378.000.000	25 Persentase	367.388.966	25	97,19	25 Persentase	367.388.966	25	18,65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	436.000.000	0 Laporan	0	4 Laporan	65.000.000	1 Laporan	54.496.126	25	83,84	1 Laporan	54.496.126	4,17	12,5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	1.534.000.000	0 Laporan	0	3 Laporan	313.000.000	1 Laporan	312.892.840	33,33	99,97	1 Laporan	312.892.840	5,56	20,4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	3.434.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	445.400.000	25 Persentase	413.253.665	25	92,78	25 Persentase	413.253.665	25	12,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	132 Unit	2.788.000.000	0 Unit	0	22 Unit	347.000.000	6 Unit	314.979.565	27,27	90,77	6 Unit	314.979.565	4,55	11,3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	376 Unit	310.000.000	0 Unit	0	60 Unit	48.400.000	10 Unit	48.399.100	16,67	100	10 Unit	48.399.100	2,66	15,61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	336.000.000	0 Unit	0	2 Unit	50.000.000	0 Unit	49.875.000	0	99,75	0 Unit	49.875.000	0	14,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	94,48			0	12,56				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST	SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											25,38	75,4			3,39	11,43				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR	SR	SR			SR	SR		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persentase	63.052.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	8.381.947.773	0 Persentase	7.919.643.366	0	94,48	0 Persentase	7.919.643.366	0	12,56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 Persentase	851.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	10.601.121	100 Persentase	10.219.300	100	96,4	100 Persentase	10.219.300	100	1,2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen	455.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.447.514	1 Dokumen	5.354.400	100	98,29	1 Dokumen	5.354.400	3,85	1,18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	396.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	5.153.607	1 Laporan	4.864.900	100	94,4	1 Laporan	4.864.900	4,17	1,23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persentase	51.489.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	7.024.263.593	100 Persentase	6.715.408.600	100	95,6	100 Persentase	6.715.408.600	100	13,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.02.01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225 Orang/bulan	47.595.000.000	0 Orang/bulan	0	45 Orang/bulan	6.611.275.395	45 Orang/bulan	6.394.885.250	100	96,73	45 Orang/bulan	6.394.885.250	20	13,44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150 Dokumen	2.786.000.000	0 Dokumen	0	25 Dokumen	280.400.000	15 Dokumen	190.118.200	60	67,8	15 Dokumen	190.118.200	10	6,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78 Dokumen	743.000.000	0 Dokumen	0	13 Dokumen	94.000.000	3 Dokumen	92.374.850	23,08	98,27	3 Dokumen	92.374.850	3,85	12,43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	88.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	7.888.194	0 Laporan	7.666.400	0	97,19	0 Laporan	7.666.400	0	8,71	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30 Laporan	188.000.000	0 Laporan	0	5 Laporan	15.700.000	1 Laporan	15.565.500	20	99,14	1 Laporan	15.565.500	3,33	8,28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	89.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen	14.798.400	0	98,66	0 Dokumen	14.798.400	0	16,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah	100 Persentase	218.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	22.900.000	25 Persentase	22.899.600	25	100	25 Persentase	22.899.600	25	10,5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.03.08	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Laporan	218.000.000	0 Laporan	0	7 Laporan	22.900.000	2 Laporan	22.899.600	28,57	100	2 Laporan	22.899.600	4,76	10,5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persentase	891.000.000	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiin Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiin Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	140.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	214.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	30 Orang	252.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	16 Orang	285.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.335.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	374.283.059	25 Persentase	365.923.235	25	97,77	25 Persentase	365.923.235	25	15,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	164.000.000	0 Paket	0	6 Paket	42.620.000	1 Paket	42.615.400	16,67	99,99	1 Paket	42.615.400	2,86	25,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	270 Paket	206.000.000	0 Paket	0	45 Paket	60.000.000	10 Paket	59.868.500	22,22	99,78	10 Paket	59.868.500	3,7	29,06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	214 Paket	325.000.000	0 Paket	0	35 Paket	47.000.000	9 Paket	46.603.500	25,71	99,16	9 Paket	46.603.500	4,21	14,34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	104.000.000	0 Paket	0	6 Paket	25.000.000	1 Paket	24.835.400	16,67	99,34	1 Paket	24.835.400	2,78	23,88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	183.000.000	0 Paket	0	2 Paket	59.280.000	1 Paket	59.217.550	50	99,89	1 Paket	59.217.550	7,69	32,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan	1.209.000.000	0 Laporan	0	50 Laporan	116.383.059	10 Laporan	108.782.985	20	93,47	10 Laporan	108.782.985	3,28	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	144.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	24.000.000	0 Dokumen	23.999.900	0	100	0 Dokumen	23.999.900	0	16,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	1.864.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	126.500.000	0 Persentase	24.550.000	0	19,41	0 Persentase	24.550.000	0	1,32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	1.153.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	87 Unit	711.000.000	0 Unit	0	6 Unit	126.500.000	0 Unit	24.550.000	0	19,41	0 Unit	24.550.000	0	3,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	1.970.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	378.000.000	25 Persentase	367.388.966	25	97,19	25 Persentase	367.388.966	25	18,65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	436.000.000	0 Laporan	0	4 Laporan	65.000.000	1 Laporan	54.496.126	25	83,84	1 Laporan	54.496.126	4,17	12,5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	1.534.000.000	0 Laporan	0	3 Laporan	313.000.000	1 Laporan	312.892.840	33,33	99,97	1 Laporan	312.892.840	5,56	20,4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	3.434.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	445.400.000	25 Persentase	413.253.665	25	92,78	25 Persentase	413.253.665	25	12,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	132 Unit	2.788.000.000	0 Unit	0	22 Unit	347.000.000	6 Unit	314.979.565	27,27	90,77	6 Unit	314.979.565	4,55	11,3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	376 Unit	310.000.000	0 Unit	0	60 Unit	48.400.000	10 Unit	48.399.100	16,67	100	10 Unit	48.399.100	2,66	15,61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	336.000.000	0 Unit	0	2 Unit	50.000.000	0 Unit	49.875.000	0	99,75	0 Unit	49.875.000	0	14,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	94,48			0	12,56				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST	SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											25,38	75,4			3,39	11,43				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR	SR	SR			SR	SR		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah yang Tercapai	100 Persentase	11.168.583.000	0 Persentase	0	75 Persentase	1.519.272.373	25 Persentase	974.560.929	33,33	64,15	25 Persentase	974.560.929	25	8,73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun	14 Dokumen	4.702.562.000	0 Dokumen	0	11 Dokumen	827.376.749	3 Dokumen	568.775.306	27,27	68,74	3 Dokumen	568.775.306	21,43	12,1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	6 Dokumen	470.256.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	106.281.802	0 Dokumen	58.090.375	0	54,66	0 Dokumen	58.090.375	0	12,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dokumen	705.384.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150.317.000	0 Dokumen	144.507.618	0	96,14	0 Dokumen	144.507.618	0	20,49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8 Berita Acara	470.256.000	0 Berita Acara	0	1 Berita Acara	42.100.027	1 Berita Acara	34.772.075	100	82,59	1 Berita Acara	34.772.075	12,5	7,39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12 Berita Acara	470.256.000	0 Berita Acara	0	2 Berita Acara	68.072.141	1 Berita Acara	31.108.250	50	45,7	1 Berita Acara	31.108.250	8,33	6,62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8 Berita Acara	940.513.000	0 Berita Acara	0	2 Berita Acara	109.966.144	1 Berita Acara	68.776.450	50	62,54	1 Berita Acara	68.776.450	12,5	7,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.01.06	Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	144 Usulan	705.384.000	0 Usulan	0	24 Usulan	67.619.111	0 Usulan	53.444.900	0	79,04	0 Usulan	53.444.900	0	7,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	14 Dokumen	940.513.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	283.020.254	0 Dokumen	178.075.638	0	62,92	0 Dokumen	178.075.638	0	18,93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.02																				

5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	54 Laporan	1.175.641.000	0 Laporan	0	4 Laporan	150.000.000	0 Laporan	98.944.750	0	65,96	0 Laporan	98.944.750	0	8,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen dan jenis data perencanaan yang disusun melalui SIPD	60 Dokumen	1.763.460.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	295.219.858	0 Dokumen	161.503.936	0	54,71	0 Dokumen	161.503.936	0	9,16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Diakses	28 Dokumen	352.692.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.880.224	0 Dokumen	83.462.925	0	82,73	0 Dokumen	83.462.925	0	23,66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	16 Dokumen	1.058.076.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	148.716.934	0 Dokumen	62.139.386	0	41,78	0 Dokumen	62.139.386	0	5,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	352.692.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	45.622.700	0 Dokumen	15.901.625	0	34,85	0 Dokumen	15.901.625	0	4,51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											33,33	64,15			25	8,73		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	R			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											12,5	59,51			2,08	9,31		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	R			SR	SR		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran RPJMD Dengan Realisasi Tahunan Bidang Sosial Budaya, Perekonomian dan Prasarana	100 Persentase	17.561.546.000	0 Persentase	0	70 Persentase	2.508.817.119	10 Persentase	2.218.193.461	14,29	88,42	10 Persentase	2.218.193.461	10	12,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persentase	5.785.848.000	0 Persentase	0	100 Persentase	804.272.373	25 Persentase	751.380.815	25	93,42	25 Persentase	751.380.815	25	12,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	392 Dokumen	557.847.000	0 Dokumen	0	6 Dokumen	104.750.000	1 Dokumen	98.956.440	16,67	94,47	1 Dokumen	98.956.440	0,26	17,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	364 Laporan	442.995.000	0 Laporan	0	6 Laporan	25.000.000	1 Laporan	17.176.300	16,67	68,71	1 Laporan	17.176.300	0,27	3,88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	504 Laporan	475.703.000	0 Laporan	0	2 Laporan	45.000.000	0 Laporan	36.308.799	0	80,69	0 Laporan	36.308.799	0	7,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan	11 Laporan	778.570.000	0 Laporan	0	1 Laporan	165.000.000	0 Laporan	161.519.205	0	97,89	0 Laporan	161.519.205	0	20,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	196 Dokumen	516.184.000	0 Dokumen	0	9 Dokumen	55.672.373	2 Dokumen	49.130.560	22,22	88,25	2 Dokumen	49.130.560	1,02	9,52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	196 Laporan	447.476.000	0 Laporan	0	9 Laporan	25.000.000	2 Laporan	15.880.925	22,22	63,52	2 Laporan	15.880.925	1,02	3,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	252 Laporan	734.889.000	0 Laporan	0	9 Laporan	151.600.000	2 Laporan	143.884.750	22,22	94,91	2 Laporan	143.884.750	0,79	19,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan	1.832.184.000	0 Laporan	0	1 Laporan	232.250.000	0 Laporan	228.523.836	0	98,4	0 Laporan	228.523.836	0	12,47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Subsidi Bidang Perekonomian dan SDA)	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persentase	4.617.000.000	0 Persentase	0	100 Persentase	646.272.373	25 Persentase	579.182.951	25	89,62	25 Persentase	579.182.951	25	12,54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52 Dokumen	459.993.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	72.100.000	1 Dokumen	49.659.251	25	68,88	1 Dokumen	49.659.251	1,92	10,8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48 Laporan	180.207.000	0 Laporan	0	4 Laporan	15.000.000	0 Laporan	14.886.450	0	99,24	0 Laporan	14.886.450	0	8,26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	72 Laporan	364.600.000	0 Laporan	0	4 Laporan	52.450.000	1 Laporan	51.528.225	25	98,24	1 Laporan	51.528.225	1,39	14,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Perekonomian	24 Laporan	411.015.000	0 Laporan	0	4 Laporan	165.950.000	0 Laporan	149.454.375	0	90,06	0 Laporan	149.454.375	0	36,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52 Dokumen	685.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	91.775.600	0	91,78	0 Dokumen	91.775.600	0	13,4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	48 Laporan	178.000.000	0 Laporan	0	2 Laporan	15.000.000	1 Laporan	14.872.325	50	99,15	1 Laporan	14.872.325	2,08	8,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	72 Laporan	361.450.000	0 Laporan	0	2 Laporan	52.450.000	0 Laporan	51.404.150	0	98,01	0 Laporan	51.404.150	0	14,22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang SDA	48 Laporan	1.976.735.000	0 Laporan	0	2 Laporan	173.322.373	0 Laporan	155.602.575	0	89,78	0 Laporan	155.602.575	0	7,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Indikator Capaian Program Perangkat Daerah yang Tercapai Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persentase	7.158.698.000	0 Persentase	0	100 Persentase	1.058.272.373	25 Persentase	887.629.695	25	83,88	25 Persentase	887.629.695	25	12,4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40 Dokumen	651.150.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	151.800.000	1 Dokumen	135.932.939	25	89,55	1 Dokumen	135.932.939	2,5	20,88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	70 Laporan	510.000.000	0 Laporan	0	4 Laporan	99.200.000	1 Laporan	57.229.840	25	57,69	1 Laporan	57.229.840	1,43	11,22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	70 Laporan	850.350.000	0 Laporan	0	4 Laporan	54.272.373	1 Laporan	51.138.750	25	94,23	1 Laporan	51.138.750	1,43	6,01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	20 Laporan	1.117.600.000	0 Laporan	0	4 Laporan	76.000.000	1 Laporan	55.628.742	25	73,2	1 Laporan	55.628.742	5	4,98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40 Dokumen	625.000.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	427.000.000	0 Dokumen	407.997.314	0	95,55	0 Dokumen	407.997.314	0	65,28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	70 Laporan	510.000.000	0 Laporan	0	4 Laporan	75.000.000	0 Laporan	39.155.300	0	52,21	0 Laporan	39.155.300	0	7,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	70 Laporan	589.500.000	0 Laporan	0	4 Laporan	60.000.000	0 Laporan	52.281.000	0	87,14	0 Laporan	52.281.000	0	8,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	20 Laporan	2.305.098.000	0 Laporan	0	4 Laporan	115.000.000	0 Laporan	88.265.810	0	76,75	0 Laporan	88.265.810	0	3,83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											14,29	88,42			10	12,63		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	T			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											12,5	85,35			0,8	14,05		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	T			SR	SR		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Ketersediaan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persentase	4.378.669.000	0 Persentase	0	50 Persentase	585.272.373	10 Persentase	550.471.930	20	94,05	10 Persentase	550.471.930	10	12,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketersediaan Penelitian dan Pengembangan Penyusunan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Serta Data/Informasi Pembangunan	100 Persentase	2.990.020.000	0 Persentase	0	70 Persentase	324.216.446	10 Persentase	297.351.514	14,29	91,71	10 Persentase	297.351.514	10	9,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.05.02.2.01.01	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	6 Laporan	350.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.05.02.2.01.02	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6 Laporan	1.080.020.000	0 Laporan	0	1 Laporan	64.246.446	0 Laporan	56.099.434	0	87,32	0 Laporan	56.099.434	0	5,19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.05.02.2.01.04	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	4 Laporan	20.000.000	0 Laporan	0	2 Laporan	121.920.000	0 Laporan	111.908.680	0	91,79	0 Laporan	111.908.680	0	559,54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

5.05.02.2.01.00_05	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	4 Laporan	160.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	34.050.000	0 Laporan	30.685.875	0	90,12	0 Laporan	30.685.875	0	19,18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.01.00_07	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	6 Laporan	70.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.01.00_08	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	6 Laporan	70.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.01.00_11	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	3 Laporan	60.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.01.00_12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola secara Baik	11 Laporan	1.075.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	104.000.000	0 Laporan	98.657.525	0	94,86	0 Laporan	98.657.525	0	9,18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.01.00_14	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	18 Laporan	105.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kebudayaan	100 Dokumen	225.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.02.00_01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	4 Dokumen	40.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.02.00_03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	5 Dokumen	65.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.02.00_05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	4 Dokumen	45.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.02.00_06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	6 Dokumen	60.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.02.00_10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persentase	205.000.000	0 Persentase	0	70 Persentase	116.105.927	10 Persentase	114.964.875	14,29	99,02	10 Persentase	114.964.875	10	56,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.03.00_01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.03.00_02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.03.00_04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	4 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	116.105.927	0 Dokumen	114.964.875	0	99,02	0 Dokumen	114.964.875	0	574,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.03.00_05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	70.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.03.00_11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.03.00_12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	35.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.03.00_13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	4 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Ketersediaan Data, Informasi Inovasi Serta Teknologi Hasil Kelitbangan	100 Persentase	958.649.000	0 Persentase	0	70 Persentase	144.950.000	10 Persentase	138.155.541	14,29	95,31	10 Persentase	138.155.541	10	14,41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.04.00_01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	105 Dokumen	360.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	144.950.000	0 Dokumen	138.155.541	0	95,31	0 Dokumen	138.155.541	0	38,38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.04.00_02	Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Repikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Repikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.04.00_03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Laporan	200.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.04.00_04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	6 Laporan	340.795.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.04.00_05	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	5 Laporan	47.854.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										20	94,05		10	12,57			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	ST		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	21,48		0	46,4			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										13,52	87,12		9	11,81			
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										SR	I		SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	4,3		0	9,28			
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		SR	SR			

5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5.02	KEUANGAN																
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	356.706.475.298	0 %	0	100 %	23.801.979.435	0 %	44.097.979.174	0	185,27	0 %	44.097.979.174	0	12,36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya terbit perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	100 %	1.770.479.000	0 %	0	100 %	32.520.875	0 %	104.100.000	0	320,1	0 %	104.100.000	0	5,88	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.00_01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	549.459.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	7.847.514	8 Dokumen	25.000.000	400	318,57	8 Dokumen	25.000.000	80	4,55	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.00_02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	244.204.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.379.027	4 Dokumen	16.700.000	400	199,31	4 Dokumen	16.700.000	80	6,84	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.00_03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	244.204.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.106.855	4 Dokumen	29.800.000	400	367,59	4 Dokumen	29.800.000	80	12,2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.00_04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	244.204.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.00_05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	244.204.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.00_06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	244.204.000	0 Laporan	0	1 Laporan	8.187.479	4 Laporan	32.600.000	400	398,17	4 Laporan	32.600.000	80	13,35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 %	317.413.553.114	0 %	0	0 %	10.816.653.164	0 %	31.767.275.223	0	293,69	0 %	31.767.275.223	0	10,01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.00_01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan	310.690.863.122	0 Orang/bulan	0	60 Orang/bulan	9.909.383.970	240 Orang/bulan	29.500.265.223	400	297,7	240 Orang/bulan	29.500.265.223	80	9,5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.00_02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	2.671.103.352	0 Dokumen	0	12 Dokumen	474.841.000	48 Dokumen	981.720.000	400	206,75	48 Dokumen	981.720.000	80	38,75	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.00_03	Pelaksanaan Petausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Petausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	3.532.653.140	0 Dokumen	0	12 Dokumen	413.640.000	48 Dokumen	1.198.390.000	400	289,72	48 Dokumen	1.198.390.000	80	33,92	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.00_05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	244.204.000	0 Laporan	0	1 Laporan	9.488.194	4 Laporan	42.900.000	400	452,14	4 Laporan	42.900.000	80	17,57	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.00_07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	5 Laporan	274.729.500	0 Laporan	0	1 Laporan	9.300.000	4 Laporan	44.000.000	400	473,12	4 Laporan	44.000.000	80	16,02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	1.261.087.735	0 %	0	0 %	155.955.600	0 %	484.022.596	0	310,36	0 %	484.022.596	0	38,38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05.00_02	Pengadaan Pakaiam Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiam Dinas beserta Atribut Kelengkapan	550 Paket	425.577.735	0 Paket	0	110 Paket	105.555.600	440 Paket	337.111.800	400	319,37	440 Paket	337.111.800	80	79,21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05.00_03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	225.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05.00_09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang	610.510.000	0 Orang	0	60 Orang	50.400.000	240 Orang	146.910.796	400	291,49	240 Orang	146.910.796	80	24,06	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 %	11.594.671.201	0 %	0	0 %	8.770.868.742	0 %	2.258.921.222	0	25,75	0 %	2.258.921.222	0	19,48	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.00_01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	366.296.585	0 Paket	0	12 Paket	107.459.469	48 Paket	353.700.000	400	329,15	48 Paket	353.700.000	80	96,56	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	6.463.946.538	0 Paket	0	6 Paket	63.913.791	24 Paket	267.000.000	400	417,75	24 Paket	267.000.000	80	4,13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	115 Paket	862.324.886	0 Paket	0	23 Paket	8.169.515.500	92 Paket	359.732.000	400	4,4	92 Paket	359.732.000	80	41,72	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	115 Paket	442.493.022	0 Paket	0	0 Paket	0	12 Paket	34.000.000	0	0	12 Paket	34.000.000	10,43	7,68	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	115 Paket	909.895.501	0 Paket	0	31 Paket	121.823.982	124 Paket	545.707.700	400	447,95	124 Paket	545.707.700	107,83	59,97	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dokumen	610.510.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	120 Laporan	457.882.500	0 Laporan	0	24 Laporan	75.406.000	96 Laporan	232.300.000	400	308,07	96 Laporan	232.300.000	80	50,73	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	1.481.320.169	0 Laporan	0	25 Laporan	232.750.000	100 Laporan	466.481.522	400	200,42	100 Laporan	466.481.522	80	31,49	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	4.074.088.974	0 %	0	0 %	1.615.468.000	0 %	3.726.481.000	0	230,68	0 %	3.726.481.000	0	91,47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	2.500.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	1.565.468.000	8 Unit	3.726.481.000	400	238,04	8 Unit	3.726.481.000	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	824.088.974	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	750.000.000	0 Unit	0	2 Unit	50.000.000	8 Unit	0	400	0	8 Unit	0	80	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	10.116.704.286	0 %	0	0 %	1.564.313.682	0 %	3.779.559.211	0	241,61	0 %	3.779.559.211	0	37,36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	170.275.366	0 Laporan	0	12 Laporan	71.778.172	48 Laporan	284.900.000	400	396,92	48 Laporan	284.900.000	80	167,32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	150 Laporan	4.334.621.000	0 Laporan	0	30 Laporan	468.150.950	120 Laporan	1.161.929.591	400	248,2	120 Laporan	1.161.929.591	80	26,81	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	5.611.807.920	0 Laporan	0	12 Laporan	1.024.384.560	48 Laporan	2.332.729.620	400	227,72	48 Laporan	2.332.729.620	80	41,57	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	10.475.899.988	0 %	0	0 %	846.199.372	0 %	1.977.619.922	0	233,71	0 %	1.977.619.922	0	18,88	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	110 Unit	2.991.099.439	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	0 Unit	0	22 Unit	469.570.000	88 Unit	1.179.973.892	400	251,29	88 Unit	1.179.973.892	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	2.344.358.400	0 Unit	0	30 Unit	47.644.750	120 Unit	191.799.730	400	402,56	120 Unit	191.799.730	80	8,18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	2.567.133.499	0 Unit	0	3 Unit	243.984.622	12 Unit	296.146.300	400	121,38	12 Unit	296.146.300	80	11,54	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	2.573.299.650	0 Unit	0	9 Unit	85.000.000	36 Unit	309.700.000	400	364,35	36 Unit	309.700.000	80	12,04	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	185,27			0	12,36		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										305,88	222,71			57,6	23,93		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	ST			R	SR		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersusunnya penyusunan rencana anggaran daerah	0 %	#####	0 %	0	0 %	447.586.507.756	0 %	184.206.270.656	0	41,16	0 %	184.206.270.656	0	7,25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya penyusunan rencana anggaran daerah	0 %	18.565.828.830	0 %	0	0 %	2.557.600.106	0 %	6.427.755.954	0	251,32	0 %	6.427.755.954	0	34,62	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	1.095.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	155.841.650	8 Dokumen	412.488.800	400	264,68	8 Dokumen	412.488.800	80	37,67	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	1.095.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	205.416.435	8 Dokumen	308.020.200	400	149,95	8 Dokumen	308.020.200	80	26,13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	255 Dokumen	763.137.500	0 Dokumen	0	51 Dokumen	68.695.075	204 Dokumen	68.695.075	400	177,97	204 Dokumen	68.695.075	80	9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	255 Dokumen	763.137.500	0 Dokumen	0	51 Dokumen	151.000.000	204 Dokumen	318.750.850	400	211,09	204 Dokumen	318.750.850	80	41,77	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	255 Dokumen	610.510.000	0 Dokumen	0	51 Dokumen	31.267.100	204 Dokumen	125.375.175	400	400,98	204 Dokumen	125.375.175	80	20,54	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	255 Dokumen	610.510.000	0 Dokumen	0	51 Dokumen	80.581.376	204 Dokumen	256.904.050	400	318,81	204 Dokumen	256.904.050	80	42,08	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	255 Dokumen	4.250.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	785.372.000	12 Dokumen	2.198.094.273	400	279,88	12 Dokumen	2.198.094.273	4,71	51,72	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	15 Dokumen	2.250.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	336.276.796	12 Dokumen	916.847.546	400	272,65	12 Dokumen	916.847.546	80	40,75	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	2.747.295.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	262.702.842	9 Dokumen	835.309.406	450	317,97	9 Dokumen	835.309.406	90	30,4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5 Dokumen	1.115.218.830	0 Dokumen	0	1 Dokumen	41.117.300	4 Dokumen	149.596.200	400	363,83	4 Dokumen	149.596.200	80	13,41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 Dokumen	1.095.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	136.559.160	4 Dokumen	270.184.011	400	197,85	4 Dokumen	270.184.011	80	24,67	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Dokumen	1.221.020.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	130.000.000	4 Dokumen	277.594.050	400	213,53	4 Dokumen	277.594.050	80	22,73	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	950.000.000	0 Orang	0	60 Orang	202.865.632	240 Orang	289.896.318	400	142,9	240 Orang	289.896.318	80	30,52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksanannya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	0 %	11.115.761.640	0 %	0	0 %	1.880.600.000	0 %	4.736.179.294	0	251,84	0 %	4.736.179.294	0	42,61	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.320 Dokumen	1.053.722.945	0 Dokumen	0	264 Dokumen	220.366.284	1.056 Dokumen	604.087.817	400	274,13	1.056 Dokumen	604.087.817	80	57,33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.03	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3.060 Dokumen	1.053.722.945	0 Dokumen	0	612 Dokumen	266.769.132	2.448 Dokumen	529.663.626	400	198,55	2.448 Dokumen	529.663.626	80	50,27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	300 Dokumen	2.000.000.000	0 Dokumen	0	60 Dokumen	275.878.501	240 Dokumen	612.365.301	400	221,97	240 Dokumen	612.365.301	80	30,62	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3.500 Dokumen	2.250.000.000	0 Dokumen	0	700 Dokumen	287.702.918	2.800 Dokumen	711.818.153	400	247,41	2.800 Dokumen	711.818.153	80	31,64	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5 Laporan	997.085.625	0 Laporan	0	1 Laporan	126.889.784	4 Laporan	402.184.986	400	316,96	4 Laporan	402.184.986	80	40,34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	60 Dokumen	631.129.095	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	60 Dokumen	100.987.900	0	0	60 Dokumen	100.987.900	100	16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	60 Dokumen	1.130.101.030	0 Dokumen	0	12 Dokumen	244.406.868	48 Dokumen	528.062.668	400	216,06	48 Dokumen	528.062.668	80	46,73	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	60 Dokumen	800.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	43.200.000	0	0	12 Dokumen	43.200.000	20	5,4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	510 Orang	1.200.000.000	0 Orang	0	102 Orang	458.586.513	408 Orang	1.203.808.843	400	262,5	408 Orang	1.203.808.843	80	100,32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	0 %	5.780.752.285	0 %	0	0 %	1.304.131.100	0 %	3.177.179.893	0	243,62	0 %	3.177.179.893	0	54,96	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5.02.02.2.03.00.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Reban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Reban	5 Dokumen	857.472.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	219.974.420	4 Dokumen	549.624.150	400	249,86	4 Dokumen	549.624.150	80	64,1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.00.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15 Laporan	777.541.085	0 Laporan	0	3 Laporan	169.520.017	12 Laporan	349.844.205	400	206,37	12 Laporan	349.844.205	80	44,99	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.00.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	1.071.681.015	0 Laporan	0	1 Laporan	211.066.580	4 Laporan	676.728.485	400	320,62	4 Laporan	676.728.485	80	63,15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	557.289.900	0 Dokumen	0	1 Dokumen	187.005.100	4 Dokumen	424.848.125	400	227,19	4 Dokumen	424.848.125	80	76,23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.00.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	753.192.085	0 Dokumen	0	1 Dokumen	162.658.000	4 Dokumen	384.128.676	400	236,16	4 Dokumen	384.128.676	80	51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.00.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	1.176.772.600	0 Dokumen	0	1 Dokumen	54.589.483	4 Dokumen	126.554.066	400	231,83	4 Dokumen	126.554.066	80	10,75	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.00.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	586.803.600	0 Orang	0	60 Orang	299.317.500	240 Orang	665.452.186	400	222,32	240 Orang	665.452.186	80	113,4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.04.00.08	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksanannya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	0 %	#####	0 %	0	0 %	441.603.707.650	0 %	169.392.419.046	0	38,36	0 %	169.392.419.046	0	6,76	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.04.00.08	Analisis Perencanaan dan Penyakuran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	30 Laporan	#####	0 Laporan	0	6 Laporan	441.603.707.650	24 Laporan	169.392.419.046	400	38,36	24 Laporan	169.392.419.046	80	6,76	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.05.00.02	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan data dan implementasi system informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	0 %	1.056.772.600	0 %	0	0 %	240.468.900	0 %	472.736.469	0	196,59	0 %	472.736.469	0	44,73	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.05.00.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 Dokumen	1.056.772.600	0 Dokumen	0	1 Dokumen	240.468.900	4 Dokumen	472.736.469	400	196,59	4 Dokumen	472.736.469	80	44,73	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	41,16		0	7,25					
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										375,81	225,13		76,6	40,23					
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	ST		T	SR					
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 %	16.074.284.190	0 %		0	0 %	2.384.532.000	0 %	5.374.005.305	0	225,37	0 %	5.374.005.305	0	33,43	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 %	16.074.284.190	0 %		0	0 %	2.384.532.000	0 %	5.374.005.305	0	225,37	0 %	5.374.005.305	0	33,43	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.00.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	10 Dokumen	1.625.399.825	0 Dokumen		0	2 Dokumen	218.000.000	8 Dokumen	413.767.750	400	189,8	8 Dokumen	413.767.750	80	25,46	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.00.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	2.760.257.995	0 Laporan		0	1 Laporan	376.400.000	4 Laporan	777.856.010	400	206,66	4 Laporan	777.856.010	80	28,18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.00.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	3.187.091.580	0 Laporan		0	1 Laporan	587.000.000	4 Laporan	1.601.557.213	400	272,84	4 Laporan	1.601.557.213	80	50,25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.00.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah-tangnan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tangnan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	3.667.984.000	0 Dokumen		0	2 Dokumen	536.532.000	8 Dokumen	1.123.263.821	400	209,36	8 Dokumen	1.123.263.821	80	30,62	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.00.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10 Laporan	2.872.790.290	0 Laporan		0	2 Laporan	316.600.000	8 Laporan	946.985.556	400	299,11	8 Laporan	946.985.556	80	32,96	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.00.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	1.960.760.500	0 Orang		0	60 Orang	350.000.000	240 Orang	510.574.955	400	145,88	240 Orang	510.574.955	80	26,04	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	225,37		0	33,43					
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	ST		SR	SR					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										400	220,61		80	32,25					
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	ST		T	SR					
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	150,6		0	17,68					
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										SR	ST		SR	SR					
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										360,56	222,82		71,4	32,14					
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										ST	ST		S	SR					

5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5.02	KEUANGAN																	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	155.151.804.978	0 %	0	100 %	112.745.815.005	41,66 %	33.248.480.654	41,66	29,49	41,66 %	33.248.480.654	41,66	21,43	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.449.845.533	0 %	0	100 %	62.849.824	10,54 %	25.314.133	10,54	40,28	10,54 %	25.314.133	10,54	1,75	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	313.533.392	0 Dokumen	0	2 Dokumen	7.847.514	3 Dokumen	4.328.000	150	55,15	3 Dokumen	4.328.000	50	1,38	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	202.542.366	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.379.027	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.01.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	99.463.058	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.106.855	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.01.00.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	99.463.058	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.975.342	1 Dokumen	2.628.335	100	37,68	1 Dokumen	2.628.335	16,67	2,64	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.01.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	99.463.058	0 Dokumen	0	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	14.875.998	100	99,17	1 Dokumen	14.875.998	16,67	14,96	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	298.388.822	0 Laporan	0	3 Laporan	8.187.479	5 Laporan	1.633.000	166,67	19,95	5 Laporan	1.633.000	27,78	0,55	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.01.00.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	336.991.779	0 Laporan	0	1 Laporan	8.353.607	3 Laporan	1.848.800	300	22,13	3 Laporan	1.848.800	50	0,55	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	46.564.434.202	0 %	0	100 %	88.671.297.947	40,72 %	10.264.666.372	40,72	11,58	40,72 %	10.264.666.372	40,72	22,04	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.280 Orang/bulan	41.317.956.861	0 Orang/bulan	0	456 Orang/bulan	88.194.862.690	82 Orang/bulan	9.711.888.085	17,98	11,01	82 Orang/bulan	9.711.888.085	3,6	23,51	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	3.212.192.586	0 Dokumen	0	1 Dokumen	202.800.263	8 Dokumen	256.630.905	800	126,54	8 Dokumen	256.630.905	133,33	7,99	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	1.304.889.001	0 Dokumen	0	1 Dokumen	194.146.800	8 Dokumen	214.288.130	800	110,37	8 Dokumen	214.288.130	133,33	16,42	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.02.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	165.771.762	0 Dokumen	0	1 Dokumen	205.135.262	8 Dokumen	25.135.262	800	125,68	8 Dokumen	25.135.262	133,33	15,16	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	232.080.466	0 Laporan	0	2 Laporan	9.488.194	3 Laporan	10.741.949	150	113,21	3 Laporan	10.741.949	25	4,63	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.02.00.06	Pengelolaan dan Penyalpan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	132.617.410	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	8 Dokumen	16.457.628	800	82,29	8 Dokumen	16.457.628	133,33	12,41	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.02.00.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	99.463.058	0 Laporan	0	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	14.868.085	100	99,12	2 Laporan	14.868.085	16,67	14,95	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.02.00.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	99.463.058	0 Dokumen	0	1 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	14.656.328	200	97,71	2 Dokumen	14.656.328	33,33	14,74	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.652.177.828	0 %	0	100 %	83.510.000	28,44 %	90.102.335	28,44	107,89	28,44 %	90.102.335	28,44	5,45	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.03.00.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	180.841.922	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	7.778.760	100	77,79	1 Dokumen	7.778.760	16,67	4,3	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.03.00.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	90.420.960	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	21.580.578	300	107,9	3 Dokumen	21.580.578	50	23,87	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.03.00.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan	580.864.254	0 Laporan	0	1 Laporan	27.800.000	1 Laporan	21.268.155	100	77,06	1 Laporan	21.268.155	16,67	3,66	Badan Pendapatan Daerah	

5.02.01.2.03.00.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	180.841.922	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.03.00.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	198.926.114	0 Laporan	0	1 Laporan	15.000.000	4 Laporan	13.639.742	400	90,93	4 Laporan	13.639.742	66,67	6,86	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	239.440.734	0 Laporan	0	1 Laporan	10.910.000	3 Laporan	25.835.100	300	236,8	3 Laporan	25.835.100	50	10,79	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.03.00.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	180.841.922	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.00.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.721.193.285	0 %	0	100 %	203.947.962	2,84 %	163.975.796	2,84	80,4	2,84 %	163.975.796	2,84	9,53	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.00.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6 Unit	90.420.960	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	726 Paket	165.771.762	0 Paket	0	121 Paket	55.642.880	110 Paket	53.840.000	90,91	96,76	110 Paket	53.840.000	15,15	32,48	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.00.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	40.230.600	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	30.140.320	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.00.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	30.140.320	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.00.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	30 Orang	30.140.320	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.00.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	6 Laporan	30.140.320	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.00.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	30 Orang	30.140.320	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.00.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	58.810.646	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.00.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	180.841.922	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.00.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	1.034.415.795	0 Orang	0	5 Orang	148.305.082	10 Orang	110.135.796	200	74,26	10 Orang	110.135.796	8,33	10,65	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.00.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.164.543.531	0 %	0	100 %	451.941.451	26,05 %	403.663.134	26,05	89,32	26,05 %	403.663.134	26,05	7,82	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	530.457.058	0 Paket	0	3 Paket	32.798.103	11 Paket	50.264.130	366,67	153,25	11 Paket	50.264.130	61,11	9,48	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	795.688.826	0 Paket	0	3 Paket	78.636.726	8 Paket	86.587.285	266,67	110,11	8 Paket	86.587.285	44,44	10,88	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	66.308.704	0 Paket	0	3 Paket	19.616.132	8 Paket	12.512.552	266,67	63,79	8 Paket	12.512.552	44,44	18,87	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	66.308.704	0 Paket	0	3 Paket	14.307.332	11 Paket	16.080.450	366,67	112,39	11 Paket	16.080.450	61,11	24,25	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	367.997.314	0 Paket	0	3 Paket	51.490.187	8 Paket	43.132.696	266,67	83,77	8 Paket	43.132.696	44,44	11,72	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	139.798.487	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.112.971	11 Dokumen	3.981.760	1,1	55,98	11 Dokumen	3.981.760	183,33	2,85	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.00.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18 Paket	90.420.960	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.00.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	165.771.762	0 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	11 Laporan	24.425.360	1,1	122,13	11 Laporan	24.425.360	183,33	14,73	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2.881.511.076	0 Laporan	0	1 Laporan	227.980.000	8 Laporan	166.678.921	800	73,11	8 Laporan	166.678.921	133,33	5,78	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.00.10	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	30.140.320	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.00.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	30.140.320	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.00.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Daerah	100 %	8.318.728.413	0 %	0	100 %	1.273.801.416	17,12 %	1.249.016.955	17,12	98,05	17,12 %	1.249.016.955	17,12	15,01	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.00.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	2.712.628.832	0 Unit	0	1 Unit	125.052.345	3 Unit	124.353.500	300	99,44	3 Unit	124.353.500	50	4,58	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.00.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	4.521.048.054	0 Unit	0	5 Unit	460.540.000	11 Unit	457.185.500	220	99,27	11 Unit	457.185.500	183,33	10,11	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.00.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	6 Unit	30.140.320	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.00.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	6 Unit	30.140.320	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.00.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	90.420.960	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	602.806.407	0 Unit	0	10 Unit	269.619.651	12 Unit	260.045.000	120	96,45	12 Unit	260.045.000	40	43,14	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.00.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 Unit	30.140.320	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.00.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	6 Unit	30.140.320	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.00.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	90.420.960	0 Unit	0	1 Unit	313.274.420	1 Unit	308.332.620	100	98,42	1 Unit	308.332.620	16,67	341	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.00.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	90.420.960	0 Unit	0	1 Unit	105.315.000	1 Unit	99.100.335	100	94,1	1 Unit	99.100.335	16,67	109,6	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.00.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	90.420.960	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	86.330.309.764	0 %	0	100 %	21.680.539.099	44,74 %	20.809.497.491	44,74	95,98	44,74 %	20.809.497.491	44,74	24,1	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	46.409.462	0 Laporan	0	1 Laporan	7.745.186	8 Laporan	8.990.540	800	116,08	8 Laporan	8.990.540	133,33	19,37	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	77.968.865.967	0 Laporan	0	1 Laporan	19.638.156.639	8 Laporan	18.657.835.409	800	95,01	8 Laporan	18.657.835.409	133,33	23,93	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	90.420.960	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	8.224.613.375	0 Laporan	0	1 Laporan	2.034.637.274	8 Laporan	2.142.671.542	800	105,31	8 Laporan	2.142.671.542	133,33	26,05	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.00.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	3.950.572.422	0 %	0	100 %	317.927.306	21,59 %	242.244.438	21,59	76,19	21,59 %	242.244.438	21,59	6,13	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	30 Unit	1.843.906.477	0 Unit	0	5 Unit	49.092.345	5 Unit	39.362.650	100	80,18	5 Unit	39.362.650	16,67	2,13	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	972.691.010	0 Unit	0	2 Unit	190.410.307	14 Unit	128.524.788	700	67,5	14 Unit	128.524.788	116,67	13,21	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.00.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit	90.420.960	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.00.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit	90.420.960	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.00.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	90.420.960	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	320.186.295	0 Unit	0	1 Unit	58.143.374	29 Unit	54.875.500	2,9	94,38	29 Unit	54.875.500	48,33	17,14	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.00.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	90.420.960	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.00.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit	90.420.960	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	90.420.960	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	19.480.500	0	0	1 Unit	19.480.500	16,67	21,54	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.00.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	90.420.960	0 Unit	0	1 Unit	20.281.280	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.00.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	90.420.960	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.00.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	6 Ha	90.420.960	0 Ha	0	0 Ha	0	0 Ha	0	0	0	0 Ha	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)																			

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)														245,76	50,45		37,42	13,42	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN														ST	SR		SR		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pencapaian Target Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	43.470.134.940	0 %	0	100 %	5.492.571.279	16,61 %	4.529.356.246	16,61	82,46	16,61 %	4.529.356.246	16,61	10,42	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	43.470.134.940	0 %	0	100 %	5.492.571.279	16,61 %	4.529.356.246	16,61	82,46	16,61 %	4.529.356.246	16,61	10,42	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Dokumen	1.218.228.937	0 Dokumen	0	1 Dokumen	36.076.251	7 Dokumen	32.296.475	700	89,52	7 Dokumen	32.296.475	116,67	2,65	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	48 Dokumen	1.401.678.410	0 Dokumen	0	8 Dokumen	302.531.300	8 Dokumen	218.885.615	100	72,35	8 Dokumen	218.885.615	16,67	15,62	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	1.466.219.348	0 Laporan	0	1 Laporan	580.726.312	8 Laporan	315.895.463	800	54,4	8 Laporan	315.895.463	133,33	21,54	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	4.849.224.104	0 Unit	0	1 Unit	226.700.000	10 Unit	135.210.571	1	59,64	10 Unit	135.210.571	166,67	2,79	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	6 Laporan	2.408.295.107	0 Laporan	0	1 Laporan	271.783.361	8 Laporan	218.924.587	800	80,55	8 Laporan	218.924.587	133,33	9,09	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6 Laporan	5.823.594.018	0 Laporan	0	1 Laporan	1.048.399.005	8 Laporan	1.031.880.083	800	98,42	8 Laporan	1.031.880.083	133,33	17,72	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	3.000 Obyek Pajak	2.581.069.681	0 Obyek Pajak	0	500 Obyek Pajak	205.000.000	107 Obyek Pajak	157.140.988	21,4	76,65	107 Obyek Pajak	157.140.988	3,57	6,09	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keetapan Pajak Daerah	6 Dokumen	3.072.151.643	0 Dokumen	0	1 Dokumen	475.135.800	8 Dokumen	429.679.190	800	90,43	8 Dokumen	429.679.190	133,33	13,99	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	54 Layanan	2.857.073.786	0 Layanan	0	9 Layanan	246.400.000	11 Layanan	222.979.533	122,22	90,49	11 Layanan	222.979.533	20,37	7,8	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	60 Dokumen	3.612.402.937	0 Dokumen	0	10 Dokumen	251.967.935	8 Dokumen	227.739.491	80	90,38	8 Dokumen	227.739.491	13,33	6,3	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	6 Dokumen	5.424.581.405	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.028.800.400	8 Dokumen	877.350.867	800	85,28	8 Dokumen	877.350.867	133,33	16,17	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	6 Dokumen	2.459.026.060	0 Dokumen	0	1 Dokumen	199.274.300	8 Dokumen	178.387.319	800	89,52	8 Dokumen	178.387.319	133,33	7,25	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	6 Dokumen	2.476.244.365	0 Dokumen	0	1 Dokumen	236.164.587	8 Dokumen	231.122.654	800	97,87	8 Dokumen	231.122.654	133,33	9,33	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Laporan	2.602.116.202	0 Laporan	0	1 Laporan	331.019.684	8 Laporan	200.289.504	800	60,51	8 Laporan	200.289.504	133,33	7,7	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	6 Laporan	1.218.228.937	0 Laporan	0	1 Laporan	52.592.344	8 Laporan	51.573.906	800	98,06	8 Laporan	51.573.906	133,33	4,23	Badan Pendapatan Daerah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)														16,61	82,46		16,61	10,42	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM														SR	T		SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)														614,91	82,27		102,48	9,88	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN														ST	T		ST	SR	
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)														29,14	55,98		29,14	15,93	
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM														SR	R		SR	SR	
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)														436,33	66,36		69,95	11,65	
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN														ST	S		S	SR	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5.03	KEPEGAWAIAN																		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	8.155.652.066	0 %	0	100 %	7.138.130.978	24,5 %	6.686.563.872	24,5	93,67	24,5 %	6.686.563.872	24,5	81,99	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	133.042.350	0 %	0	100 %	39.742.969	17,3 %	35.577.422	17,3	89,52	17,3 %	35.577.422	17,3	26,74	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	34.549.800	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.847.514	3 Dokumen	7.143.500	100	91,03	3 Dokumen	7.143.500	100	20,68	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	47.257.550	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.379.027	3 Dokumen	8.102.222	300	96,7	3 Dokumen	8.102.222	300	17,14	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.391.500	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.891.500	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.975.342	3 Dokumen	6.811.000	300	97,64	3 Dokumen	6.811.000	300	98,83	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.891.500	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8.945.500	0 Laporan	0	8 Laporan	8.187.479	8 Laporan	5.661.800	100	69,15	8 Laporan	5.661.800	100	63,29	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.115.000	0 Laporan	0	4 Laporan	8.353.607	4 Laporan	7.858.900	100	94,08	4 Laporan	7.858.900	100	39,07	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.930.609.716	0 %	0	100 %	5.149.704.661	30,4 %	5.018.571.139	30,4	97,45	30,4 %	5.018.571.139	30,4	84,62	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.268.071.816	0 Orang/bulan	0	37 Orang/bulan	4.755.073.950	144 Orang/bulan	4.639.766.189	389,19	97,58	144 Orang/bulan	4.639.766.189	389,19	88,07	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	81.297.400	0 Dokumen	0	4 Dokumen	156.561.585	4 Dokumen	155.778.650	100	99,5	4 Dokumen	155.778.650	80	191,62	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	528.240.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	215.707.308	12 Dokumen	201.283.700	100	93,31	12 Dokumen	201.283.700	100	38,1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.500.500	0 Laporan	0	1 Laporan	9.488.194	2 Laporan	8.974.400	200	94,58	2 Laporan	8.974.400	200	94,46	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.02.006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	6.500.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	6.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	12.873.624	12 Laporan	12.768.200	100	99,18	12 Laporan	12.768.200	100	212,8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	6.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	207.000.000	0 %	0	100 %	22.761.626	8,5 %	22.570.885	8,5	99,16	8,5 %	22.570.885	8,5	10,9	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.03.003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	150.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
5.03.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	10.929.842	12 Laporan	10.815.685	100	98,96	12 Laporan	10.815.685	100	72,1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		

5.03.01.2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	32.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	11.831.784	12 Laporan	11.755.200	100	99,35	12 Laporan	11.755.200	100	36,74	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	317.000.000	0 %	0	100 %	66.123.000	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaiannya beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiannya beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	60.000.000	0 Paket	0	45 Paket	44.955.000	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.05.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	7.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	100.000.000	0 Orang	0	1 Orang	21.168.000	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.05.00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	75.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	75.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	665.000.000	0 %	0	100 %	990.683.717	10,2 %	891.222.217	10,2	89,96	10,2 %	891.222.217	10,2	134,02	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	0 Paket	0	12 Paket	16.393.368	12 Paket	16.378.153	100	99,91	12 Paket	16.378.153	600	109,19	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	0 Paket	0	5 Paket	516.124.879	5 Paket	469.207.295	100	90,91	5 Paket	469.207.295	250	312,8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	43.000.000	0 Paket	0	12 Paket	43.309.528	12 Paket	43.243.905	100	99,85	12 Paket	43.243.905	600	100,57	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	0 Paket	0	12 Paket	17.311.538	12 Paket	17.290.200	100	99,88	12 Paket	17.290.200	600	115,27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	45.000.000	0 Paket	0	12 Paket	60.037.125	12 Paket	26.495.000	100	44,13	12 Paket	26.495.000	600	58,88	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	27.720.000	6 Dokumen	27.720.000	150	100	6 Dokumen	27.720.000	120	110,88	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.06.00 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	12.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	350.000.000	0 Laporan	0	15 Laporan	303.070.000	15 Laporan	284.215.464	100	93,78	15 Laporan	284.215.464	50	81,2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	6.717.279	4 Dokumen	6.672.200	100	99,33	4 Dokumen	6.672.200	80	66,72	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	100 %	60.000.000	0 %	0	100 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	60.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	383.000.000	0 %	0	100 %	473.397.905	16,2 %	392.192.422	16,2	82,85	16,2 %	392.192.422	16,2	102,4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	115.245.440	12 Laporan	70.192.402	100	60,91	12 Laporan	70.192.402	100	56,15	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	358.152.465	12 Laporan	322.000.020	100	89,91	12 Laporan	322.000.020	100	128,8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	460.000.000	0 %	0	0 %	395.717.100	12,1 %	326.429.787	0	82,49	12,1 %	326.429.787	12,1	70,96	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	300.000.000	0 Unit	0	11 Unit	278.490.000	11 Unit	215.775.787	100	77,48	11 Unit	215.775.787	100	71,93	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	60.000.000	0 Unit	0	15 Unit	36.463.500	15 Unit	36.404.000	100	99,84	15 Unit	36.404.000	100	60,67	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	0 Unit	0	1 Unit	80.763.600	1 Unit	74.250.000	100	91,93	1 Unit	74.250.000	100	74,25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											24,5	93,67	24,5				81,99
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST	SR				T
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											83,48	56,97	134,23				58,01
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											T	R	ST				R
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pegawai sesuai formasi, kelengkapan data pegawai, peningkatan kompetensi pegawai, dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 %	6.582.314.400	0 %	0	0 %	2.974.522.532	15,2 %	1.631.556.562	0	54,85	15,2 %	1.631.556.562	0	24,79	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase penyelesaian Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	90 %	2.833.630.000	0 %	0	0 %	1.220.567.073	11,2 %	770.773.529	0	63,15	11,2 %	770.773.529	12,44	27,2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.02.2.01.00 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	43.500.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	20.370.600	3 Dokumen	18.295.000	150	89,81	3 Dokumen	18.295.000	150	42,06	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.02.2.01.00 03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	1.750.000.000	0 Dokumen	0	400 Dokumen	986.052.100	361 Dokumen	588.526.407	90,25	59,69	361 Dokumen	588.526.407	7,22	33,63	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.02.2.01.00 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 Laporan	150.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.02.2.01.00 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	3 Dokumen	195.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.02.2.01.00 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	550 Dokumen	195.000.000	0 Dokumen	0	550 Dokumen	97.108.147	457 Dokumen	61.960.345	83,09	63,81	457 Dokumen	61.960.345	83,09	31,77	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.02.2.01.00 08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	75.000.000	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.02.2.01.00 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	8.500 Dokumen	225.130.000	0 Dokumen	0	8.500 Dokumen	47.906.900	8.500 Dokumen	46.930.477	100	97,96	8.500 Dokumen	46.930.477	100	20,85	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.02.2.01.00 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	8.500 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	0	8.500 Dokumen	36.842.326	7.888 Dokumen	23.391.200	92,8	63,49	7.888 Dokumen	23.391.200	92,8	23,39	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.03.02.2.01.00 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	100.000.000	0 Laporan	0	8.500 Laporan	32.287.000	8.500 Laporan	31.670.100	100	98,09	8.500 Laporan	31.670.100	170	31,67	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penyelesaian Mutasi dan Promosi ASN	90 %	1.730.000.000	0 %	0	90 %	1.120.561.164	11,3 %	354.748.834	12,56	31,66	11,3 %	354.748.834	12,56	20,51	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	300 Dokumen	180.000.000	0 Dokumen	0	267 Dokumen	97.505.225	111 Dokumen	36.348.900	41,57	37,28	111 Dokumen	36.348.900	37	20,19	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Naikkan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Naikkan Pangkat ASN	1.500 Dokumen	350.000.000	0 Dokumen	0	1.650 Dokumen	121.467.939	1.200 Dokumen	73.873.053	72,73	60,82	1.200 Dokumen	73.873.053	80	21,11	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	89 Dokumen	1.200.000.000	0 Dokumen	0	93 Dokumen	901.588.000	86 Dokumen	244.526.881	92,47	27,12	86 Dokumen	244.526.881	96,63	20,38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	90 %	1.343.684.400	0 %	0	90 %	350.019.929	24,4 %	231.389.460	27,11	66,11	24,4 %	231.389.460	27,11	17,22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	104 Orang	420.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	220 Orang	239.820.000	0 Orang	0	220 Orang	118.026.400	114 Orang	33.104.600	51,82	28,05	114 Orang	33.104.600	51,82	13,8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4 Dokumen	180.000.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	172.113.929	4 Dokumen	171.085.260	100	99,4	4 Dokumen	171.085.260	100	95,05	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	17 Dokumen	203.864.400	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.03.14	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	120 Orang	300.000.000	0 Orang	0	150 Orang	59.879.600	156 Orang	27.199.600	104	45,42	156 Orang	27.199.600	130	9,07	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penyelesaian Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	90 %	675.000.000	0 %	0	90 %	283.374.366	22,5 %	274.644.739	25	96,92	22,5 %	274.644.739	25	40,69	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	135.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8.500 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen	0	8.500 Dokumen	73.246.900	8.006 Dokumen	59.345.612	94,19	81,02	8.006 Dokumen	59.345.612	94,19	39,56	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	450 Orang	60.000.000	0 Orang	0	400 Orang	46.173.852	672 Orang	31.744.618	168	68,75	672 Orang	31.744.618	149,33	52,91	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan	130.000.000	0 Laporan	0	10 Laporan	152.269.400	9 Laporan	174.417.809	90	114,55	9 Laporan	174.417.809	60	134,17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	0	5 Dokumen	11.684.214	9 Dokumen	9.136.700	180	78,2	9 Dokumen	9.136.700	60	9,14	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	15 Laporan	100.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	54,85		0	24,79			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	R		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											70,04	48,41		7.761,08	26,03			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	SR		ST	SR			
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur	90 %	2.600.000.000	0 %	0	100 %	356.602.162	8,7 %	277.562.610	8,7	77,84	8,7 %	277.562.610	9,67	10,68	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	90 %	600.000.000	0 %	0	100 %	245.180.273	0 %	193.483.100	0	78,91	0 %	193.483.100	0	32,25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	600.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	245.180.273	2 Dokumen	193.483.100	200	78,91	2 Dokumen	193.483.100	200	32,25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	90 %	2.000.000.000	0 %	0	100 %	111.421.889	0 %	84.079.510	0	75,46	0 %	84.079.510	0	4,2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.04.02.2.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkecil dengan Baik	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkecil dengan Baik	20 Lembaga	1.050.000.000	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	110 Laporan	950.000.000	0 Laporan	0	3 Laporan	111.421.889	4 Laporan	84.079.510	133,33	75,46	4 Laporan	84.079.510	3,64	8,85	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											8,7	77,84		9,67	10,68			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	T		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											111,11	51,46		67,88	13,7			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	R		S	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											11,07	75,45		11,39	39,15			
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											37,04	17,15		22,63	4,57			
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR		SR	SR			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	19.348.371.559	0 %	0	100 %	2.392.426.261	175 %	3.694.611.629	175	154,43	175 %	3.694.611.629	175	19,1	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan di tingkat kecamatan	100 %	28.447.399	0 %	0	100 %	3.863.100	100 %	2.978.100	100	77,09	100 %	2.978.100	100	10,47	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	28.447.399	0 Dokumen	0	3 Dokumen	3.863.100	3 Dokumen	2.978.100	100	77,09	3 Dokumen	2.978.100	100	10,47	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	17.816.727.524	0 %	0	100 %	2.104.445.301	175 %	3.405.666.529	175	161,83	175 %	3.405.666.529	175	19,11	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	17.276.631.361	0 Orang/bulan	0	25 Orang/bulan	2.048.125.301	63 Orang/bulan	3.317.286.529	252	161,97	63 Orang/bulan	3.317.286.529	252	19,2	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	410.637.964	0 Dokumen	0	3 Dokumen	41.080.000	12 Dokumen	64.250.000	400	156,4	12 Dokumen	64.250.000	400	15,65	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	129.458.199	0 Dokumen	0	2 Dokumen	15.240.000	6 Dokumen	24.130.000	300	158,33	6 Dokumen	24.130.000	300	18,64	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 %	54.894.780	0 %	0	100 %	9.400.000	175 %	13.041.100	175	138,74	175 %	13.041.100	0	23,76	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	54.894.780	0 Laporan	0	1 Laporan	9.400.000	3 Laporan	13.041.100	300	138,74	3 Laporan	13.041.100	100	23,76	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Kepegawaian pada SKPD	100 %	115.823.745	0 %	0	100 %	13.050.000	100 %	10.800.000	100	82,76	100 %	10.800.000	100	9,32	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	99.116.145	0 Paket	0	31 Paket	13.050.000	31 Paket	10.800.000	100	82,76	31 Paket	10.800.000	100	10,9	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	16.707.600	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi umum pada SKPD	100 %	512.886.280	0 %	0	100 %	114.616.900	175 %	90.274.500	175	78,76	175 %	90.274.500	175	17,6	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	36.678.605	0 Paket	0	7 Paket	8.930.000	8 Paket	7.570.000	114,29	84,77	8 Paket	7.570.000	114,29	20,64	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	115.850.745	0 Paket	0	22 Paket	24.290.000	23 Paket	25.580.000	104,55	105,31	23 Paket	25.580.000	104,55	22,08	Kecamatan Pekalongan	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	80.352.930	0 Paket	0	4 Paket	14.396.900	6 Paket	18.000.000	150	125,03	6 Paket	18.000.000	150	22,4	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.06.00.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	280.004.000	0 Laporan	0	13 Laporan	67.000.000	14 Laporan	39.124.500	107,69	58,39	14 Laporan	39.124.500	107,69	13,97	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	25.420.400	0 %	0	100 %	15.000.000	175 %	14.200.000	175	94,67	175 %	14.200.000	175	55,86	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.420.400	0 Unit	0	1 Unit	15.000.000	3 Unit	14.200.000	300	94,67	3 Unit	14.200.000	300	55,86	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPD	100 %	589.435.003	0 %	0	100 %	75.580.960	175 %	108.406.400	175	143,43	175 %	108.406.400	175	18,39	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41.470.192	0 Laporan	0	1 Laporan	5.920.000	1 Laporan	1.218.500	100	20,58	1 Laporan	1.218.500	100	2,94	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	547.964.811	0 Laporan	0	6 Laporan	69.660.960	8 Laporan	107.187.900	133,33	153,87	8 Laporan	107.187.900	133,33	19,56	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	204.736.428	0 %	0	100 %	56.470.000	175 %	49.245.000	175	87,21	175 %	49.245.000	175	24,05	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakajnya	2 Unit	150.506.720	0 Unit	0	2 Unit	37.370.000	4 Unit	32.400.000	200	86,7	4 Unit	32.400.000	200	21,53	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	28.309.905	0 Unit	0	1 Unit	12.000.000	10 Unit	10.755.000	1	89,63	10 Unit	10.755.000	500	37,99	Kecamatan Pekalongan	
7.01.01.2.09.00.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	25.919.803	0 Unit	0	4 Unit	7.100.000	4 Unit	6.090.000	100	85,77	4 Unit	6.090.000	100	23,5	Kecamatan Pekalongan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											175	154,43			175	19,1		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	SR			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											221,29	98,62			180,11	19,95		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	SR			ST	SR		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	98.090.727	0 %	0	100 %	15.000.000	125 %	1.500.000	125	10	125 %	1.500.000	125	1,53	Kecamatan Pekalongan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase tersedianya pelayanan perizinan di SKPD	100 %	98.090.727	0 %	0	100 %	15.000.000	125 %	1.500.000	125	10	125 %	1.500.000	125	1,53	Kecamatan Pekalongan	
7.01.02.2.04.00.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Pertizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	98.090.727	0 Dokumen	0	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	1.500.000	100	10	4 Dokumen	1.500.000	100	1,53	Kecamatan Pekalongan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											125	10			125	1,53		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	SR			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	10			100	1,53		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	SR			ST	SR		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Koordinasi Keteteraman dan Ketertiban Umum	100 %	99.471.400	0 %	0	100 %	77.945.455	150 %	14.212.500	150	18,23	150 %	14.212.500	150	14,29	Kecamatan Pekalongan	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase tersedianya sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Umum	100 %	99.471.400	0 %	0	100 %	77.945.455	150 %	14.212.500	150	18,23	150 %	14.212.500	150	14,29	Kecamatan Pekalongan	
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	99.471.400	0 Laporan	0	4 Laporan	77.945.455	4 Laporan	14.212.500	100	18,23	4 Laporan	14.212.500	100	14,29	Kecamatan Pekalongan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											150	18,23			150	14,29		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	SR			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	18,23			100	14,29		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	SR			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											150	60,89			150	11,64		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											ST	R			ST	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											140,43	42,35			126,7	11,92		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											ST	SR			ST	SR		
7	UNSUR KEMILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	12.466.139.877	0 %	0	100 %	1.870.816.594	100 %	1.799.044.463	100	96,16	100 %	1.799.044.463	100	14,43	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	21.315.300	0 %	0	100 %	7.847.514	100 %	3.275.000	100	41,73	100 %	3.275.000	100	15,36	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	21.315.300	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.847.514	3 Dokumen	3.275.000	100	41,73	3 Dokumen	3.275.000	18,75	15,36	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	11.099.840.221	0 %	0	100 %	1.561.014.160	100 %	1.530.594.463	100	98,05	100 %	1.530.594.463	100	13,79	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	10.524.761.370	0 Orang/bulan	0	14 Orang/bulan	1.507.222.830	14 Orang/bulan	1.477.674.463	100	98,04	14 Orang/bulan	1.477.674.463	14,74	14,04	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	386.869.342	0 Dokumen	0	3 Dokumen	4.800.000	3 Dokumen	4.350.000	100	90,63	3 Dokumen	4.350.000	16,67	1,12	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	188.209.509	0 Dokumen	0	1 Dokumen	48.591.330	1 Dokumen	48.570.000	100	99,14	1 Dokumen	48.570.000	16,67	25,81	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	100 %	53.288.250	0 %	0	100 %	7.500.000	100 %	7.500.000	100	100	100 %	7.500.000	100	14,07	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	53.288.250	0 Laporan	0	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	7.500.000	100	100	12 Laporan	7.500.000	16,67	14,07	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terbit	100 %	92.768.850	0 %	0	100 %	9.000.000	100 %	8.550.000	100	95	100 %	8.550.000	100	9,22	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakaiin Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiin Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6 Paket	92.768.850	0 Paket	0	1 Paket	9.000.000	1 Paket	8.550.000	100	95	1 Paket	8.550.000	16,67	9,22	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	397.928.515	0 %	0	100 %	81.770.355	100 %	67.419.800	100	82,45	100 %	67.419.800	100	16,94	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	25.208.293	0 Paket	0	1 Paket	4.293.480	1 Paket	3.446.000	100	80,26	1 Paket	3.446.000	16,67	13,67	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	103.267.904	0 Paket	0	1 Paket	16.679.195	1 Paket	15.062.000	100	90,3	1 Paket	15.062.000	16,67	14,59	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.06.00.03	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	97.671.678	0 Paket	0	1 Paket	11.957.180	1 Paket	11.951.800	100	96,4	1 Paket	11.951.800	16,67	12,24	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.06.00.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	171.774.640	0 Laporan	0	12 Laporan	48.400.000	12 Laporan	36.960.000	100	76,36	12 Laporan	36.960.000	16,67	21,52	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100 %	4.750.000	0 %	0	100 %	30.321.426	100 %	27.850.000	100	91,85	100 %	27.850.000	100	586,32	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	4.750.000	0 Unit	0	4 Unit	30.321.426	4 Unit	27.850.000	100	91,85	4 Unit	27.850.000	33,33	586,32	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	554.846.448	0 %	0	100 %	114.665.143	100 %	114.169.500	100	99,57	100 %	114.169.500	100	20,58	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	85.438.827	0 Laporan	0	12 Laporan	15.425.000	12 Laporan	15.367.500	100	99,63	12 Laporan	15.367.500	16,67	17,99	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	469.407.621	0 Laporan	0	12 Laporan	99.240.143	12 Laporan	98.802.000	100	99,56	12 Laporan	98.802.000	16,67	21,05	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	241.402.293	0 %	0	100 %	58.697.996	100 %	39.685.700	100	67,61	100 %	39.685.700	100	16,44	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakajnya	24 Unit	164.739.683	0 Unit	0	4 Unit	44.770.000	4 Unit	27.783.700	100	62,06	4 Unit	27.783.700	16,67	16,87	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	39.594.634	0 Unit	0	10 Unit	7.750.000	10 Unit	6.800.000	100	87,74	10 Unit	6.800.000	16,67	17,17	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	37.067.976	0 Unit	0	1 Unit	6.177.996	1 Unit	5.102.000	100	82,58	1 Unit	5.102.000	16,67	13,76	Kecamatan Purbolinggo	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	96,16			100	14,43		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	SR			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	86,96			17,72	50,93		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	T			SR	SR		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	94.013.262	0 %	0	100 %	2.340.036	100 %	2.135.000	100	91,24	100 %	2.135.000	100	2,27	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Perizinan di Kecamatan	100 %	94.013.262	0 %	0	100 %	2.340.036	100 %	2.135.000	100	91,24	100 %	2.135.000	100	2,27	Kecamatan Purbolinggo	

7.01.02.2.04.00.01	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	94.013.262	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.340.036	4 Dokumen	2.135.000	100	91,24	4 Dokumen	2.135.000	16,67	2,27	Kecamatan Purbolinggo	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)																		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)																		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertiraman, Keindahan)	100 %	266.192.263	0 %	0	100 %	75.345.455	100 %	51.745.000	100	68,68	100 %	51.745.000	100	19,44	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	266.192.263	0 %	0	100 %	75.345.455	100 %	51.745.000	100	68,68	100 %	51.745.000	100	19,44	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	266.192.263	0 Laporan	0	4 Laporan	75.345.455	4 Laporan	51.745.000	100	68,68	4 Laporan	51.745.000	16,67	19,44	Kecamatan Purbolinggo	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)																		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)																		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Purbolinggo	
7.01.06.2.01.00.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Purbolinggo	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)																		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)																		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)																		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM																		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)																		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN																		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENKOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	17.471.803.771	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	23.146.830	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	23.146.830	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	15.563.821.230	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	14.865.944.305	0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	0	0	0 Orang/bulan	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	471.269.459	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	226.607.466	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	100 %	59.024.417	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	59.024.417	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tertib	100 %	82.418.850	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6 Paket	82.418.850	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	845.437.966	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	63.174.643	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	188.794.033	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	107.385.860	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	486.083.430	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100 %	47.488.250	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	47.488.250	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	461.625.718	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	92.780.210	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	368.845.508	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	388.840.510	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	271.701.348	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	32.559.874	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	84.579.288	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)																		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)																		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	103.369.885	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Perizinan di Kecamatan	0 %	103.369.885	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.02.2.04.00.01	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	103.369.885	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)																		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)																		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentas tingkat penyelenggaraan k3 (Ketertiban, Ketertiraman, Keindahan)	100 %	108.018.540	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	108.018.540	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	108.018.540	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)																		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)																		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara	

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Raman Utara
7.01.06.2.01.00.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Raman Utara
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		SR	SR			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.01	KECAMATAN																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Way Bungur
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										0	0	0	0	0	0	0	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Way Bungur
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										0	0	0	0	0	0	0	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBATAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Way Bungur
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										0	0	0	0	0	0	0	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Way Bungur
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										0	0	0	0	0	0	0	
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		SR	SR			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.01	KECAMATAN																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	19.970.184.727	0 %	0	100 %	1.912.899.031	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	20.446.367	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.847.514	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	20.446.367	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.847.514	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100 %	18.206.178.702	0 %	0	100 %	1.548.724.381	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	17.456.684.347	0 Orang/bulan	0	16 Orang/bulan	1.487.424.381	0 Orang/bulan	0	0	0	0 Orang/bulan	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	485.620.493	0 Dokumen	0	3 Dokumen	4.800.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90 Dokumen	263.873.862	0 Dokumen	0	1 Dokumen	56.500.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Laporan	57.867.075	0 Laporan	0	12 Laporan	8.289.000	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	57.867.075	0 Laporan	0	12 Laporan	8.289.000	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Peralatan Pengadministrasian Umum	100 Bulan	695.032.472	0 Bulan	0	12 Bulan	81.122.781	0 Bulan	0	0	0	0 Bulan	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	48.129.975	0 Paket	0	1 Paket	9.690.855	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	149.682.834	0 Paket	0	1 Paket	18.878.926	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	116.371.459	0 Paket	0	1 Paket	13.353.000	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	280.848.204	0 Laporan	0	12 Laporan	39.200.000	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	62.184.420	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.07.00.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	31.092.210	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	31.092.210	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	772.494.589	0 Laporan	0	12 Laporan	156.560.935	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	92.777.124	0 Laporan	0	12 Laporan	11.248.000	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	679.717.465	0 Laporan	0	12 Laporan	145.312.935	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	100 Unit	318.165.522	0 Unit	0	4 Unit	48.170.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	15 Unit	208.162.528	0 Unit	0	4 Unit	41.070.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	53.546.333	0 Unit	0	8 Unit	7.100.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 Unit	56.456.661	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Sukadana
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		SR	SR			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	78.944.578	0 %	0	100 %	2.055.000	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Persentase Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 %	78.944.578	0 %	0	0 %	2.055.000	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Sukadana
7.01.02.2.04.00.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	78.944.578	0 Dokumen	0	3 Dokumen	2.055.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Sukadana
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0	0	0	0	0	0	
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		SR	SR			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBATAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 %	108.018.540	0 %	0	100 %	108.018.540	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Sukadana

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	20 Kegiatan	108.018.540	0 Kegiatan	0	20 Kegiatan	108.018.540	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	Kecamatan Sukadana	
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	108.018.540	0 Laporan	0	20 Laporan	108.018.540	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Sukadana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0	0	0	0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0	0	0	0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Sukadana	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0	0	0	0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0	0	0	0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0	0	0	0	0		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0	0	0	0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAK	Persentase meningkatnya layanan penunjang unsur pemerintah daerah	100 %	9.760.216.404	0 %	0	0 %	1.675.596.847	0 %	3.235.010.387	0	193,07	0 %	3.235.010.387	0	33,14	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	21.062.595	0 %	0	0 %	7.847.514	0 %	4.988.700	0	63,57	0 %	4.988.700	0	23,69	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	21.062.595	0 Dokumen	0	2 Dokumen	7.847.514	4 Dokumen	4.988.700	200	63,57	4 Dokumen	4.988.700	25	23,69	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	8.544.290.725	0 %	0	0 %	1.333.404.042	0 %	2.755.527.887	0	206,65	0 %	2.755.527.887	0	32,25	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	8.095.565.875	0 Orang/bulan	0	14 Orang/bulan	1.277.228.048	56 Orang/bulan	2.644.021.187	400	207,01	56 Orang/bulan	2.644.021.187	84,85	32,66	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	304.400.286	0 Dokumen	0	12 Dokumen	6.120.996	3 Dokumen	10.508.700	25	171,68	3 Dokumen	10.508.700	16,67	3,45	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	144.324.564	0 Dokumen	0	12 Dokumen	50.055.000	4 Dokumen	100.998.000	33,33	201,77	4 Dokumen	100.998.000	66,67	69,98	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	0 %	53.114.370	0 %	0	0 %	11.364.129	0	13.060.100	0	114,92	0 %	13.060.100	0	24,59	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	53.114.370	0 Laporan	0	1 Laporan	11.364.129	3 Laporan	13.060.100	300	114,92	3 Laporan	13.060.100	4,17	24,59	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tertib	0 %	43.200.000	0 %	0	0 %	7.200.000	0 %	7.200.000	0	100	0 %	7.200.000	0	16,67	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	43.200.000	0 Paket	0	1 Paket	7.200.000	1 Paket	7.200.000	100	100	1 Paket	7.200.000	16,67	16,67	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	0 %	276.141.976	0 %	0	0 %	79.115.005	0 %	89.791.900	0	113,5	0 %	89.791.900	0	32,52	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	18.094.906	0 Paket	0	1 Paket	4.600.617	3 Paket	5.296.000	300	115,11	3 Paket	5.296.000	50	29,27	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	58.819.146	0 Paket	0	1 Paket	17.515.309	3 Paket	21.519.600	300	122,86	3 Paket	21.519.600	50	25,08	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	63.709.771	0 Paket	0	1 Paket	15.449.079	3 Paket	14.010.900	300	90,69	3 Paket	14.010.900	50	21,99	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	108.518.153	0 Laporan	0	1 Laporan	41.550.000	14 Laporan	48.965.400	1,4	117,85	14 Laporan	48.965.400	19,44	45,12	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	0 %	56.655.328	0 %	0	0 %	48.370.470	0 %	43.500.000	0	89,93	0 %	43.500.000	0	76,78	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.07.00.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	9 Unit	15.191.460	6 Unit	12.120.000	66,67	79,78	6 Unit	12.120.000	0	0	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	56.655.328	0 Unit	0	4 Unit	33.179.010	3 Unit	31.380.000	75	94,58	3 Unit	31.380.000	25	55,39	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	0 %	544.733.897	0 %	0	0 %	133.038.701	0 %	249.151.900	0	187,28	0 %	249.151.900	0	45,74	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	43.262.204	0 Laporan	0	2 Laporan	13.916.360	4 Laporan	16.942.900	200	121,75	4 Laporan	16.942.900	5,56	39,16	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	501.471.693	0 Laporan	0	1 Laporan	119.122.341	4 Laporan	232.209.000	400	194,93	4 Laporan	232.209.000	5,56	46,31	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	0 %	221.017.513	0 %	0	0 %	55.256.986	0 %	71.789.900	0	129,92	0 %	71.789.900	0	32,48	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	172.891.548	0 Unit	0	3 Unit	37.370.000	5 Unit	53.869.900	166,67	144,15	5 Unit	53.869.900	41,67	31,16	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	13.125.965	0 Unit	0	4 Unit	2.840.000	5 Unit	3.325.000	125	117,08	5 Unit	3.325.000	8,33	25,33	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	35.000.000	0 Unit	0	2 Unit	15.046.986	1 Unit	14.595.000	50	97	1 Unit	14.595.000	16,67	41,7	Kecamatan Marga Tiga	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	193,07		0	33,14			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											261,27	126,75		28,6	31,27			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	ST		SR	SR			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	0 %	113.554.860	0 %	0	0 %	2.815.845	0 %	2.452.500	0	87,1	0 %	2.452.500	0	2,16	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.02.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Perizinan di Kecamatan	0 %	113.554.860	0 %	0	0 %	2.815.845	0 %	2.452.500	0	87,1	0 %	2.452.500	0	2,16	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.02.2.04.00.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	113.554.860	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.815.845	4 Dokumen	2.452.500	100	87,1	4 Dokumen	2.452.500	16,67	2,16	Kecamatan Marga Tiga	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	87,1		0	2,16			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	T		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	87,1		16,67	2,16			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	T		SR	SR			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Keterlibatan, Ketertarikan, Kelindahan)	0 %	134.887.300	0 %	0	0 %	67.586.664	0 %	63.570.000	0	94,06	0 %	63.570.000	0	47,13	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	persentase sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 %	134.887.300	0 %	0	0 %	67.586.664	0 %	63.570.000	0	94,06	0 %	63.570.000	0	47,13	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	134.887.300	0 Laporan	0	13 Laporan	67.586.664	1 Laporan	63.570.000	7,69	94,06	1 Laporan	63.570.000	4,17	47,13	Kecamatan Marga Tiga	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	94,06		0	47,13			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											7,69	94,06		4,17	47,13			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	ST		SR	SR			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan permintaan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Marga Tiga	
7.01.06.2.01.00.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Marga Tiga	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0		0	0			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0		0	0			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	93,56		0	20,61			
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	ST		SR	SR			

RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													92.24	76.98			12.36	20.14		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN													ST	T			SR	SR		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7.01	KECAMATAN																			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NKOTA	Persentase meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	0 %	9.668.714.695	0 %	0	0 %	1.903.914.127	0 %	1.772.126.297	0	93,08	0 %	1.772.126.297	0	18,33	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan Daerah	0 %	39.440.755	0 %	0	0 %	872.000	0 %	872.500	0	100,06	0 %	872.500	0	2,21	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	39.440.755	0 Dokumen	0	3 Dokumen	872.000	12 Dokumen	872.500	400	100,06	12 Dokumen	872.500	80	2,21	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 %	7.722.496.155	0 %	0	0 %	1.518.949.809	0 %	1.381.254.496	0	90,93	0 %	1.381.254.496	0	17,89	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	7.362.088.655	0 Orang/bulan	0	16 Orang/bulan	1.451.568.309	67 Orang/bulan	1.328.572.996	418,75	91,53	67 Orang/bulan	1.328.572.996	89,33	18,05	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80 Dokumen	118.407.500	0 Dokumen	0	3 Dokumen	11.581.500	12 Dokumen	2.881.500	400	24,88	12 Dokumen	2.881.500	20	2,48	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	244.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	55.800.000	37 Dokumen	49.800.000	3,7	89,25	37 Dokumen	49.800.000	61,67	20,41	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Penatausaha Barang Milik Daerah Pada SKPD	0 %	12.160.890	0 %	0	0 %	7.097.200	0 %	7.043.300	0	99,24	0 %	7.043.300	0	57,92	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.03.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	12.160.890	0 Laporan	0	12 Laporan	7.097.200	48 Laporan	7.043.300	400	99,24	48 Laporan	7.043.300	80	57,92	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	44.955.000	0 %	0	0 %	17.200.000	0 %	17.200.000	0	100	0 %	17.200.000	0	38,26	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	44.955.000	0 Paket	0	1 Paket	17.200.000	43 Paket	17.200.000	4,3	100	43 Paket	17.200.000	53,75	38,26	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 %	590.389.420	0 %	0	0 %	141.009.530	0 %	138.491.470	0	98,21	0 %	138.491.470	0	23,46	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	82.238.600	0 Paket	0	1 Paket	23.376.902	4 Paket	21.296.300	400	91,1	4 Paket	21.296.300	6,67	25,9	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	49.600.905	0 Paket	0	1 Paket	10.614.248	4 Paket	10.472.000	400	98,66	4 Paket	10.472.000	6,67	21,11	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	54.135.951	0 Paket	0	1 Paket	18.992.380	4 Paket	18.912.450	400	99,58	4 Paket	18.912.450	6,67	34,94	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.06.04	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	404.414.000	0 Laporan	0	12 Laporan	88.026.000	48 Laporan	87.810.720	400	99,76	48 Laporan	87.810.720	80	21,71	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 %	170.221.275	0 %	0	0 %	35.265.588	0 %	35.265.588	0	100	0 %	35.265.588	0	20,72	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	170.221.275	0 Unit	0	2 Unit	35.265.588	20 Unit	35.265.588	1	100	20 Unit	35.265.588	80	20,72	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	706.915.600	0 %	0	0 %	132.740.000	0 %	130.602.583	0	98,39	0 %	130.602.583	0	18,47	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	91.060.000	0 Laporan	0	12 Laporan	11.840.000	8 Laporan	10.116.583	66,67	85,44	8 Laporan	10.116.583	13,33	11,11	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	615.855.600	0 Laporan	0	12 Laporan	120.900.000	48 Laporan	120.486.000	400	99,66	48 Laporan	120.486.000	80	19,56	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	382.135.600	0 %	0	0 %	50.780.000	0 %	61.396.360	0	120,91	0 %	61.396.360	0	16,07	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit	382.135.600	0 Unit	0	3 Unit	37.370.000	16 Unit	48.025.860	533,33	128,51	16 Unit	48.025.860	80	12,57	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	3.410.000	20 Unit	3.370.500	333,33	98,84	20 Unit	3.370.500	0	0	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	10.000.000	4 Unit	10.000.000	400	100	4 Unit	10.000.000	0	0	Kecamatan Sekampung Udik			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	93,08			0	18,33		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													872,01	94,16			46,13	19,18		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN													ST	ST			SR	SR		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0 %	4.365.610	0 %	0	0 %	900.000	0 %	900.000	0	100	0 %	900.000	0	20,62	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Non Perizinan	0 %	4.365.610	0 %	0	0 %	900.000	0 %	900.000	0	100	0 %	900.000	0	20,62	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	60 Dokumen	4.365.610	0 Dokumen	0	4 Dokumen	900.000	16 Dokumen	900.000	400	100	16 Dokumen	900.000	26,67	20,62	Kecamatan Sekampung Udik			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	100			0	20,62		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													400	100			26,67	20,62		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN													ST	ST			SR	SR		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	0 %	96.505.790	0 %	0	0 %	77.695.500	0 %	59.205.000	0	76,2	0 %	59.205.000	0	61,35	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Sosialisasi Kamtibmas	0 %	96.505.790	0 %	0	0 %	77.695.500	0 %	59.205.000	0	76,2	0 %	59.205.000	0	61,35	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.04.2.01.01	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	96.505.790	0 Laporan	0	4 Laporan	77.695.500	24 Laporan	59.205.000	600	76,2	24 Laporan	59.205.000	120	61,35	Kecamatan Sekampung Udik			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	76,2			0	61,35		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													SR	T			SR	R		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													600	76,2			120	61,35		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN													ST	T			ST	R		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Desa	0 %	50.000.400	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa	0 %	50.000.400	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Sekampung Udik			
7.01.06.2.01.01	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	50.000.400	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Sekampung Udik			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN													SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	67,32			0	25,08		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM													SR	S			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													468	67,99			48,2	25,29		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN													ST	S			SR	SR		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7.01	KECAMATAN																			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	15.103.980.345	0 %	0	100 %	1.632.404.479	100 %	1.431.795.464	100	87,71	100 %	1.431.795.464	100	9,48	Kecamatan Labuhan Ratu			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	23.858.209	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.847.514	1 Dokumen	4.222.000	33,33	53,8	1 Dokumen	4.222.000	5	17,7	Kecamatan Labuhan Ratu			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	23.858.209	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.847.514	4 Dokumen	4.222.000	133,33	53,8	4 Dokumen	4.222.000	20	17,7	Kecamatan Labuhan Ratu			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100 %	13.438.194.199	0 %	0	100 %	1.332.473.079	78 %	1.176.216.564	78	88,27	78 %	1.176.216.564	78	8,75	Kecamatan Labuhan Ratu			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	960 Orang/bulan	12.722.147.013	0 Orang/bulan	0	12 Orang/bulan	1.266.633.079	144 Orang/bulan	1.112.626.564	1,2	87,84	144 Orang/bulan	1.112.626.564	15	8,75	Kecamatan Labuhan Ratu			
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	394.074.781	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.200.000	4 Dokumen	4.950.000	133,33	68,75	4 Dokumen	4.950.000	4	1,26	Kecamatan Labuhan Ratu			
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80 Dokumen	321.972.405	0 Dokumen	0	1 Dokumen	58.640.000	8 Dokumen	58.640.000	800	100	8 Dokumen	58.640.000	8,89	18,21	Kecamatan Labuhan Ratu			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	57.867.075	0 Laporan	0	0 Laporan	9.600.000	6 Laporan	9.600.000	0	100	6 Laporan	9.600.000	10	16,59	Kecamatan Labuhan Ratu			

7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	57.867.075	0 Laporan	0	12 Laporan	9.600.000	8 Laporan	9.600.000	66,67	100	8 Laporan	9.600.000	13,33	16,59	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Peralatan Pengadministrasian Umum	60 Bulan	779.157.790	0 Bulan	0	0 Bulan	111.410.211	12 Bulan	104.814.600	0	94,08	12 Bulan	104.814.600	20	13,45	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	48.129.975	0 Paket	0	1 Paket	10.480.953	2 Paket	10.480.000	200	99,99	2 Paket	10.480.000	40	21,77	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	160.205.383	0 Paket	0	1 Paket	35.689.358	3 Paket	32.349.000	300	90,64	3 Paket	32.349.000	60	20,19	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	146.849.662	0 Paket	0	1 Paket	16.439.900	3 Paket	16.439.600	300	100	3 Paket	16.439.600	60	11,19	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	423.972.770	0 Laporan	0	12 Laporan	48.800.000	10 Laporan	45.546.000	83,33	93,33	10 Laporan	45.546.000	16,67	10,74	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	17.514.435	0 Unit	0	0 Unit	25.000.530	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	17.514.435	0 Unit	0	2 Unit	25.000.530	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	412.410.928	0 Laporan	0	0 Laporan	96.883.145	13 Laporan	94.883.600	0	97,94	13 Laporan	94.883.600	21,67	23,01	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	92.777.124	0 Laporan	0	12 Laporan	12.609.600	9 Laporan	11.558.800	75	91,67	9 Laporan	11.558.800	15	12,46	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	319.633.804	0 Laporan	0	12 Laporan	84.273.545	9 Laporan	83.324.800	75	98,87	9 Laporan	83.324.800	75	26,07	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	15 Unit	374.977.709	0 Unit	0	0 Unit	49.190.000	11 Unit	42.058.700	0	85,5	11 Unit	42.058.700	73,33	11,22	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	15 Unit	286.552.354	0 Unit	0	4 Unit	41.070.000	8 Unit	36.378.700	200	88,58	8 Unit	36.378.700	53,33	12,7	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	74.224.168	0 Unit	0	10 Unit	8.120.000	9 Unit	5.680.000	90	69,95	9 Unit	5.680.000	15	7,65	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	14.201.187	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Labuhan Ratu	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	87,71		100	9,48			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											243,78	76,23		26,41	12,35			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	T		SR	SR			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	0 %	162.962.942	0 %	0	0 %	5.800.000	25 %	5.800.000	0	100	25 %	5.800.000	0	3,56	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Persentase Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	162.962.942	0 Dokumen	0	0 Dokumen	5.800.000	3 Dokumen	5.800.000	0	100	3 Dokumen	5.800.000	20	3,56	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	162.962.942	0 Dokumen	0	4 Dokumen	5.800.000	2 Dokumen	5.800.000	50	100	2 Dokumen	5.800.000	13,33	3,56	Kecamatan Labuhan Ratu	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	100		0	3,56			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											50	100		13,33	3,56			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	ST		SR	SR			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 %	108.018.540	0 %	0	0 %	68.400.000	25 %	20.910.000	0	30,57	25 %	20.910.000	25	19,36	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.04.2.01	Kegiatan Utama Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	55 Kegiatan	108.018.540	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	68.400.000	4 Kegiatan	20.910.000	0	30,57	4 Kegiatan	20.910.000	7,27	19,36	Kecamatan Labuhan Ratu	
7.01.04.2.01.01	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55 Laporan	108.018.540	0 Laporan	0	4 Laporan	68.400.000	2 Laporan	20.910.000	50	30,57	2 Laporan	20.910.000	3,64	19,36	Kecamatan Labuhan Ratu	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	30,57		25	19,36			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											50	30,57		3,64	19,36			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR		SR	SR			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0	0	Kecamatan Labuhan Ratu	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0		0	0			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0		0	0			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											25	54,57		31,25	8,1			
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	R		SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0		0	0			
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR		SR	SR			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 %	10.865.709.348	0 %	0	0 %	2.236.763.107	0 %	3.409.182.146	0	152,42	0 %	3.409.182.146	0	31,38	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase realisasi anggaran yang mencapai target yang ditetapkan.	0 %	24.382.634	0 %	0	0 %	8.379.027	0 %	13.596.800	0	162,27	0 %	13.596.800	0	55,76	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	24.382.634	0 Laporan	0	3 Laporan	8.379.027	6 Laporan	13.596.800	200	162,27	6 Laporan	13.596.800	40	55,76	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	0 %	9.525.972.571	0 %	0	0 %	1.860.625.639	7 %	2.947.811.081	0	158,43	7 %	2.947.811.081	0	30,94	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	9.251.609.933	0 Orang/bulan	0	20 Orang/bulan	1.798.187.625	57 Orang/bulan	2.850.774.381	285	158,54	57 Orang/bulan	2.850.774.381	58,16	30,81	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	181.255.940	0 Dokumen	0	3 Dokumen	38.397.970	8 Dokumen	63.745.000	266,67	166,01	8 Dokumen	63.745.000	53,33	35,17	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	93.106.698	0 Dokumen	0	4 Dokumen	24.040.044	8 Dokumen	33.291.700	200	138,48	8 Dokumen	33.291.700	53,33	35,76	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	56.176.632	0 %	0	0 %	23.013.586	0 %	34.706.000	0	150,81	0 %	34.706.000	0	61,78	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	56.176.632	0 Laporan	0	4 Laporan	23.013.586	8 Laporan	34.706.000	200	150,81	8 Laporan	34.706.000	13,33	61,78	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	13.950.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakaian Dasar beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dasar beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	13.950.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 %	332.882.992	0 %	0	0 %	120.911.254	0 %	123.084.600	0	101,8	0 %	123.084.600	0	36,98	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	98.132.433	0 Paket	0	1 Paket	28.750.518	2 Paket	29.575.000	200	102,87	2 Paket	29.575.000	40	30,14	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	65.796.351	0 Paket	0	1 Paket	24.408.600	1 Paket	24.408.400	100	100	1 Paket	24.408.400	20	37,1	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	168.954.208	0 Laporan	0	3 Laporan	67.752.136	15 Laporan	69.101.200	500	101,99	15 Laporan	69.101.200	25	40,9	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	727.349.344	0 %	0	0 %	156.628.026	0 %	226.283.565	0	144,47	0 %	226.283.565	0	31,11	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	78.201.918	0 Laporan	0	4 Laporan	19.754.400	9 Laporan	23.189.365	225	117,39	9 Laporan	23.189.365	15	29,65	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	649.147.426	0 Laporan	0	8 Laporan	136.874.626	18 Laporan	203.094.200	225	148,38	18 Laporan	203.094.200	30	31,29	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	184.995.175	0 %	0	0 %	67.204.575	0 %	63.700.100	0	94,79	0 %	63.700.100	0	34,43	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	5 Unit	155.075.175	0 Unit	0	1 Unit	67.204.575	2 Unit	63.700.100	200	94,79	2 Unit	63.700.100	40	41,08	Kecamatan Way Jepara	
7.01.01.2.09.00.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.920.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Way Jepara	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	152,42		0	31,38			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											200,13	110,89		29,86	33,03			

PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	ST			SR	SR			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Posentase peningkatan koordinasi dan kerjasama, peningkatan kesuksesan dalam operasi gabungan, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan peningkatan efektivitas dalam penanganan berbagai masalah keamanan dan non-keamanan	0 %	63.366.802	0 %	0	0 %	18.323.118	0 %	18.275.400	0	99,74	0 %	18.275.400	0	28,84	Kecamatan Way Jepara	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Posentase penyelenggara pelayanan yang telah menetapkan standar pelayanan	0 %	63.366.802	0 %	0	0 %	18.323.118	0 %	18.275.400	0	99,74	0 %	18.275.400	0	28,84	Kecamatan Way Jepara	
7.01.02.2.04.00.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	63.366.802	0 Dokumen	0	4 Dokumen	18.323.118	3 Dokumen	18.275.400	75	99,74	3 Dokumen	18.275.400	30	28,84	Kecamatan Way Jepara	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	99,74	0		28,84				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	ST	SR		SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										75	99,74	30		28,84				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										S	ST	SR		SR				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Posentase Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	0 %	269.798.146	0 %	0	0 %	76.763.073	0 %	57.478.000	0	74,88	0 %	57.478.000	0	21,3	Kecamatan Way Jepara	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Posentase Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 %	269.798.146	0 %	0	0 %	76.763.073	0 %	57.478.000	0	74,88	0 %	57.478.000	0	21,3	Kecamatan Way Jepara	
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	269.798.146	0 Laporan	0	3 Laporan	76.763.073	16 Laporan	57.478.000	533,33	74,88	16 Laporan	57.478.000	26,67	21,3	Kecamatan Way Jepara	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	74,88	0		21,3				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	S	SR		SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										533,33	74,88	26,67		21,3				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	S	SR		SR				
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Posentase Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	0 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Way Jepara	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Posentase Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Way Jepara	
7.01.06.2.01.00.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Way Jepara	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0	0		0				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR	SR		SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0	0		0				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR	SR		SR				
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	81,76	0		20,38				
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										SR	T	SR		SR				
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										202,11	71,38	21,63		20,79				
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										ST	S	SR		SR				
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	15.551.054.340	0 %	0	100 %	1.708.304.718	100 %	1.483.832.810	100	86,86	100 %	1.483.832.810	100	9,54	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.847.514	2 Dokumen	7.840.000	66,67	99,9	2 Dokumen	7.840.000	10	31,36	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.847.514	3 Dokumen	7.840.000	100	99,9	3 Dokumen	7.840.000	15	31,36	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100 %	14.254.179.954	0 %	0	100 %	1.425.348.718	100 %	1.243.557.050	100	87,25	100 %	1.243.557.050	100	8,72	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 Orang/bulan	13.506.537.345	0 Orang/bulan	0	13 Orang/bulan	1.368.448.718	153 Orang/bulan	1.189.097.050	1.176,92	86,89	153 Orang/bulan	1.189.097.050	17	8,8	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	481.917.001	0 Dokumen	0	3 Dokumen	5.100.000	31 Dokumen	3.600.000	1.033,33	70,59	31 Dokumen	3.600.000	31	0,75	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120 Dokumen	265.725.608	0 Dokumen	0	1 Dokumen	51.800.000	40 Dokumen	50.860.000	4	98,19	40 Dokumen	50.860.000	33,33	19,14	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	300 Laporan	57.867.075	0 Laporan	0	12 Laporan	11.264.400	12 Laporan	8.550.000	100	75,9	12 Laporan	8.550.000	4	14,78	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	300 Laporan	57.867.075	0 Laporan	0	12 Laporan	11.264.400	12 Laporan	8.550.000	100	75,9	12 Laporan	8.550.000	4	14,78	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	73.000.000	0 Paket	0	1 Paket	9.450.000	1 Paket	9.450.000	100	100	1 Paket	9.450.000	20	12,95	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	73.000.000	0 Paket	0	1 Paket	9.450.000	1 Paket	9.450.000	100	100	1 Paket	9.450.000	20	12,95	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Peralatan Pengadministrasian Umum	60 Bulan	644.318.246	0 Bulan	0	12 Bulan	67.569.205	12 Bulan	62.115.000	100	91,93	12 Bulan	62.115.000	20	9,64	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	42.046.217	0 Paket	0	1 Paket	10.480.953	6 Paket	6.900.000	600	65,83	6 Paket	6.900.000	120	16,41	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	166.955.770	0 Paket	0	1 Paket	25.938.884	12 Paket	21.065.000	1,2	81,21	12 Paket	21.065.000	240	12,62	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	120.519.371	0 Paket	0	1 Paket	15.349.368	6 Paket	14.250.000	600	92,84	6 Paket	14.250.000	120	11,82	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	314.796.888	0 Laporan	0	12 Laporan	15.800.000	11 Laporan	19.900.000	91,67	125,95	11 Laporan	19.900.000	18,33	6,32	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	52.478.250	0 Unit	0	2 Unit	26.257.716	3 Unit	26.140.500	150	99,55	3 Unit	26.140.500	20	49,81	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.07.00.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	52.478.250	0 Unit	0	2 Unit	26.257.716	3 Unit	26.140.500	150	99,55	3 Unit	26.140.500	20	49,81	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	209.001.987	0 Laporan	0	12 Laporan	109.517.165	12 Laporan	103.930.260	100	94,9	12 Laporan	103.930.260	20	49,73	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	42.046.217	0 Laporan	0	12 Laporan	12.580.000	12 Laporan	11.146.500	100	88,6	12 Laporan	11.146.500	20	26,51	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	166.955.770	0 Laporan	0	12 Laporan	96.937.165	12 Laporan	92.783.760	100	95,72	12 Laporan	92.783.760	20	55,57	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	235.208.828	0 Unit	0	4 Unit	51.050.000	7 Unit	22.250.000	175	43,58	7 Unit	22.250.000	46,67	9,46	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	186.986.285	0 Unit	0	4 Unit	41.070.000	5 Unit	20.100.000	125	48,94	5 Unit	20.100.000	33,33	10,75	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	48.222.563	0 Unit	0	10 Unit	9.980.000	3 Unit	2.150.000	30	21,54	3 Unit	2.150.000	20	4,46	Kecamatan Braja Seলেখ	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										100	86,86	100		9,54				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										ST	T	ST		SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										633,79	83,44	48,8		18,8				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	T	SR		SR				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	0 %	144.676.946	0 %	0	100 %	7.110.000	75 %	4.880.000	75	66,64	75 %	4.880.000	0	3,37	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Persentase Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	144.676.946	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.110.000	5 Dokumen	4.880.000	166,67	66,64	5 Dokumen	4.880.000	33,33	3,37	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.02.2.04.00.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	144.676.946	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.110.000	5 Dokumen	4.880.000	166,67	66,64	5 Dokumen	4.880.000	33,33	3,37	Kecamatan Braja Seলেখ	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										75	66,64	0		3,37				
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										S	S	SR		SR				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										166,67	66,64	33,33		3,37				
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	S	SR		SR				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100 %	108.018.540	0 %	0	100 %	50.218.182	100 %	41.480.000	100	82,6	100 %	41.480.000	100	38,4	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	35 Kegiatan	108.018.540	0 Kegiatan	0	7 Kegiatan	50.218.182	7 Kegiatan	41.480.000	100	82,6	7 Kegiatan	41.480.000	20	38,4	Kecamatan Braja Seলেখ	
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35 Laporan	108.018.540	0 Laporan	0	7 Laporan	50.218.182	7 Laporan	41.480.000	100	82,6	7 Laporan	41.480.000	20	38,4	Kecamatan Braja Seলেখ	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										100	82,6	100		38,4				

PREDIKAT KINERJA PROGRAM													ST	T	ST	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													100	82,5		20	38,4
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN													ST	T		SR	SR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Braja Selebah
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan stunting di Pemerintahan Desa	2 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Braja Selebah
7.01.06.2.01.00.01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Braja Selebah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	0		0	0
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													SR	SR		SR	SR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													0	0		0	0
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN													SR	SR		SR	SR
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													68,75	59,53		50	12,83
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM													S	R		SR	SR
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													225,12	58,67		25,53	15,14
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN													ST	R		SR	SR
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.01	KECAMATAN																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perangkat Daerah	0 %	10.454.564.100	0 %	0	100 %	1.833.841.614	0 %	1.671.940.369	0	91,17	0 %	1.671.940.369	0	15,99	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	0 %	0	0 %	0	100 %	7.847.514	0 %	5.213.000	0	66,43	0 %	5.213.000	0	0	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.847.514	3 Dokumen	5.213.000	100	66,43	3 Dokumen	5.213.000	0	0	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	0 %	8.430.846.425	0 %	0	100 %	1.536.536.818	0 %	1.407.675.659	0	91,61	0 %	1.407.675.659	0	16,7	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	8.196.346.425	0 Orang/bulan	0	16 Orang/bulan	1.484.236.818	64 Orang/bulan	1.358.265.659	400	91,51	64 Orang/bulan	1.358.265.659	80	16,57	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	12.500.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.500.000	2 Dokumen	2.610.000	200	47,45	2 Dokumen	2.610.000	13,33	20,88	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	222.000.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	46.800.000	14 Dokumen	46.800.000	350	100	14 Dokumen	46.800.000	70	21,08	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	0 %	36.000.000	0 %	0	0 %	7.200.000	0 %	7.200.000	0	100	0 %	7.200.000	0	20	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	36.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	7.200.000	2 Laporan	7.200.000	200	100	2 Laporan	7.200.000	40	20	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian yang tertib	0 %	59.940.000	0 %	0	0 %	10.950.000	0 %	21.300.000	0	194,52	0 %	21.300.000	0	35,54	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	59.940.000	0 Paket	0	1 Paket	10.350.000	25 Paket	20.700.000	2,5	200	25 Paket	20.700.000	500	34,53	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.05.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	100	100	1 Dokumen	600.000	0	0	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	0 %	488.438.975	0 %	0	0 %	81.510.808	0 %	52.985.160	0	65	0 %	52.985.160	0	10,85	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	59.295.645	0 Paket	0	1 Paket	11.857.131	3 Paket	8.332.000	300	70,27	3 Paket	8.332.000	60	14,05	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	155.036.830	0 Paket	0	1 Paket	24.592.577	4 Paket	21.571.000	400	87,71	4 Paket	21.571.000	80	13,91	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	43.240.000	0 Paket	0	1 Paket	8.611.100	3 Paket	8.384.000	300	97,36	3 Paket	8.384.000	60	19,39	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	230.866.500	0 Laporan	0	2 Laporan	36.450.000	6 Laporan	14.698.160	300	40,32	6 Laporan	14.698.160	17,14	6,37	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 %	395.325.945	0 %	0	0 %	8.047.500	0 %	31.146.600	0	387,03	0 %	31.146.600	0	7,88	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.07.00.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	59.940.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	335.385.945	0 Unit	0	1 Unit	8.047.500	6 Unit	31.146.600	600	387,03	6 Unit	31.146.600	17,14	9,29	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa pendukung urusan pemerintahan daerah	0 %	649.377.755	0 %	0	0 %	131.450.974	0 %	105.721.950	0	80,43	0 %	105.721.950	0	16,28	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	85.622.520	0 Laporan	0	2 Laporan	17.125.000	7 Laporan	13.298.750	350	77,66	7 Laporan	13.298.750	70	15,53	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	563.755.235	0 Laporan	0	1 Laporan	114.325.974	7 Laporan	92.423.200	700	80,84	7 Laporan	92.423.200	70	16,39	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	0 %	394.635.000	0 %	0	0 %	50.298.000	0 %	40.698.000	0	80,91	0 %	40.698.000	0	10,31	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	5 Unit	202.275.000	0 Unit	0	1 Unit	41.070.000	4 Unit	37.355.000	400	90,95	4 Unit	37.355.000	80	18,47	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	41.400.000	0 Unit	0	7 Unit	8.280.000	7 Unit	2.398.000	100	28,96	7 Unit	2.398.000	140	5,79	Kecamatan Mataram Baru
7.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	150.960.000	0 Unit	0	1 Unit	948.000	1 Unit	945.000	100	99,68	1 Unit	945.000	20	0,63	Kecamatan Mataram Baru
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	91,17		0	15,99
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													SR	ST		SR	SR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													411,11	98,12		73,2	12,94
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN													ST	ST		S	SR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	0 %	5.462.310	0 %	0	0 %	1.096.500	0 %	1.041.000	0	94,94	0 %	1.041.000	0	19,06	Kecamatan Mataram Baru
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pelayanan perizinan di Kecamatan	0 %	5.462.310	0 %	0	0 %	1.096.500	0 %	1.041.000	0	94,94	0 %	1.041.000	0	19,06	Kecamatan Mataram Baru
7.01.02.2.04.00.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	5.462.310	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.096.500	1 Dokumen	1.041.000	100	94,94	1 Dokumen	1.041.000	20	19,06	Kecamatan Mataram Baru
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	94,94		0	19,06
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													SR	ST		SR	SR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													100	94,94		20	19,06
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN													ST	ST		SR	SR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keterlibatan, Ketentraman dan Keindahan)	0 %	144.800.000	0 %	0	0 %	43.918.182	0 %	25.280.000	0	57,56	0 %	25.280.000	0	17,46	Kecamatan Mataram Baru
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	persentase sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 %	144.800.000	0 %	0	0 %	43.918.182	0 %	25.280.000	0	57,56	0 %	25.280.000	0	17,46	Kecamatan Mataram Baru
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	144.800.000	0 Laporan	0	1 Laporan	43.918.182	3 Laporan	25.280.000	300	57,56	3 Laporan	25.280.000	60	17,46	Kecamatan Mataram Baru
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	57,56		0	17,46
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													SR	R		SR	SR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													300	57,56		60	17,46
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN													ST	R		R	SR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 %	50.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Mataram Baru
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintahan Desa	0 %	50.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Mataram Baru
7.01.06.2.01.00.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	50.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Mataram Baru
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	0		0	0
PREDIKAT KINERJA PROGRAM													SR	SR		SR	SR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)													0	0		0	0
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN													SR	SR		SR	SR
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)													0	69,92		0	13,13

PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	R		SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											202,78	62,66		38,3	12,38		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											ST	R		SR	SR		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.01	KECAMATAN																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	15.040.657.147	0 %	0	100 %	1.454.033.092	100 %	1.468.027.581	100	100,96	100 %	1.468.027.581	100	9,76	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	23.212.413	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.847.514	4 Dokumen	7.404.000	133,33	94,35	4 Dokumen	7.404.000	20	31,9	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	23.212.413	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.847.514	4 Dokumen	7.404.000	133,33	94,35	4 Dokumen	7.404.000	20	31,9	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100 %	13.153.147.569	0 %	0	100 %	1.134.410.772	100 %	1.198.865.317	100	105,68	100 %	1.198.865.317	100	9,11	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	960 Orang/bulan	12.450.872.747	0 Orang/bulan	0	16 Orang/bulan	1.072.510.772	162 Orang/bulan	1.144.765.317	1.012,5	106,74	162 Orang/bulan	1.144.765.317	16,88	9,19	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	439.326.833	0 Dokumen	0	3 Dokumen	5.100.000	7 Dokumen	4.500.000	233,33	88,24	7 Dokumen	4.500.000	7	1,02	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120 Dokumen	262.947.989	0 Dokumen	0	2 Dokumen	56.800.000	10 Dokumen	49.600.000	500	87,32	10 Dokumen	49.600.000	8,33	18,86	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	300 Dokumen	94.902.003	0 Dokumen	0	12 Dokumen	7.800.000	12 Dokumen	7.800.000	100	100	12 Dokumen	7.800.000	4	8,22	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.03.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	300 Laporan	94.902.003	0 Laporan	0	12 Laporan	7.800.000	10 Laporan	7.800.000	83,33	100	10 Laporan	7.800.000	3,33	8,22	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	68.043.195	0 Paket	0	1 Paket	9.000.000	1 Paket	9.000.000	100	100	1 Paket	9.000.000	20	13,23	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	68.043.195	0 Paket	0	1 Paket	9.000.000	1 Paket	9.000.000	100	100	1 Paket	9.000.000	20	13,23	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Peralatan Pengadministrasian Umum	60 Bulan	365.304.815	0 Bulan	0	12 Bulan	99.588.971	12 Bulan	70.562.700	100	70,85	12 Bulan	70.562.700	20	19,32	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	36.263.367	0 Paket	0	1 Paket	12.137.739	2 Paket	6.300.000	200	51,9	2 Paket	6.300.000	40	17,37	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	106.071.892	0 Paket	0	1 Paket	35.896.332	4 Paket	29.737.700	400	82,84	4 Paket	29.737.700	80	28,04	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	45.510.526	0 Paket	0	1 Paket	10.554.900	3 Paket	7.430.000	300	70,39	3 Paket	7.430.000	60	16,33	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	177.459.030	0 Laporan	0	12 Laporan	41.000.000	5 Laporan	27.095.000	41,67	66,09	5 Laporan	27.095.000	8,33	15,27	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	48.854.250	0 Unit	0	2 Unit	20.500.590	3 Unit	31.143.270	150	151,91	3 Unit	31.143.270	20	63,75	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	48.854.250	0 Unit	0	2 Unit	20.500.590	4 Unit	31.143.270	200	151,91	4 Unit	31.143.270	26,67	63,75	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.092.550.437	0 Laporan	0	12 Laporan	133.255.245	12 Laporan	117.951.144	100	88,52	12 Laporan	117.951.144	20	10,8	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	92.777.124	0 Laporan	0	12 Laporan	11.248.000	9 Laporan	9.511.544	75	84,56	9 Laporan	9.511.544	15	10,25	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	999.773.313	0 Laporan	0	12 Laporan	122.007.245	12 Laporan	108.439.600	100	88,88	12 Laporan	108.439.600	20	10,85	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	0 Unit	194.642.465	0 Unit	0	3 Unit	41.630.000	6 Unit	25.301.150	200	60,78	6 Unit	25.301.150	0	13	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	15 Unit	98.643.302	0 Unit	0	3 Unit	37.370.000	6 Unit	19.450.000	200	52,05	6 Unit	19.450.000	40	19,72	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	64.811.124	0 Unit	0	10 Unit	4.260.000	3 Unit	5.851.150	30	137,35	3 Unit	5.851.150	20	9,03	Kecamatan Jabung
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	31.188.039	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Jabung
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											100	100,96		100	9,76		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	SR		SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											225,57	85,16		24,1	17,06		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	T		SR	SR		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	34.562.847	0 %	0	100 %	4.110.000	2 %	1.500.000	2	36,5	2 %	1.500.000	2	4,34	Kecamatan Jabung
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Persentase Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	34.562.847	0 Dokumen	0	0 Dokumen	4.110.000	3 Dokumen	1.500.000	0	36,5	3 Dokumen	1.500.000	20	4,34	Kecamatan Jabung
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	34.562.847	0 Dokumen	0	4 Dokumen	4.110.000	3 Dokumen	1.500.000	75	36,5	3 Dokumen	1.500.000	20	4,34	Kecamatan Jabung
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											2	36,5		2	4,34		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR		SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											75	36,5		20	4,34		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											S	SR		SR	SR		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 %	89.501.076	0 %	0	100 %	86.581.818	98 %	67.500.000	98	77,96	98 %	67.500.000	98	75,42	Kecamatan Jabung
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	75 Kegiatan	89.501.076	0 Kegiatan	0	15 Kegiatan	86.581.818	15 Kegiatan	67.500.000	100	77,96	15 Kegiatan	67.500.000	20	75,42	Kecamatan Jabung
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75 Laporan	89.501.076	0 Laporan	0	15 Laporan	86.581.818	15 Laporan	67.500.000	100	77,96	15 Laporan	67.500.000	20	75,42	Kecamatan Jabung
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											98	77,96		98	75,42		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	T		SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	77,96		20	75,42		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	T		SR	SR		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	50.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Jabung
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan stunting di Pemerintahan Desa	10 Laporan	50.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Jabung
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Jabung
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0		0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR		SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0		0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR		SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											50	53,88		50	22,38		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	R		SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100,14	49,91		16,02	24,21		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											ST	SR		SR	SR		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.01	KECAMATAN																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator Kebutuhan	0 %	9.583.062.790	0 %	0	0 %	1.458.093.007	0 %	1.482.723.643	0	101,69	0 %	1.482.723.643	0	15,47	Kecamatan Gunung Pelindung
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	0 %	39.237.570	0 %	0	0 %	7.847.514	0 %	5.404.700	0	68,87	0 %	5.404.700	0	13,77	Kecamatan Gunung Pelindung
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	5 %	39.237.570	0 %	0	0 %	7.847.514	0 %	5.404.700	0	68,87	0 %	5.404.700	0	13,77	Kecamatan Gunung Pelindung
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	39.237.570	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.847.514	12 Dokumen	5.404.700	400	68,87	12 Dokumen	5.404.700	400	13,77	Kecamatan Gunung Pelindung
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	0 Tahun	7.902.635.215	0 Tahun	0	0 Tahun	1.126.598.522	0 Tahun	1.167.256.149	0	103,61	0 Tahun	1.167.256.149	0	14,77	Kecamatan Gunung Pelindung
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	0 Laporan	7.902.635.215	0 Laporan	0	0 Laporan	1.126.598.522	0 Laporan	1.167.256.149	0	103,61	0 Laporan	1.167.256.149	0	14,77	Kecamatan Gunung Pelindung

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	0 Dokumen	7.902.635.215	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.126.598.522	0 Dokumen	1.167.256.149	0	103,61	0 Dokumen	1.167.256.149	0	14,77	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	7.340.409.665	0 Orang/bulan	0	9 Orang/bulan	1.064.489.807	36 Orang/bulan	1.113.411.149	400	104,6	36 Orang/bulan	1.113.411.149	45	15,17	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	294.025.550	0 Dokumen	0	3 Dokumen	8.468.715	12 Dokumen	7.715.000	400	91,1	12 Dokumen	7.715.000	60	2,62	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	268.200.000	0 Dokumen	0	5 Dokumen	53.640.000	20 Dokumen	46.130.000	400	86	20 Dokumen	46.130.000	2	17,2	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Kecamatan Yang Disusun	0 %	41.236.525	0 %	0	0 %	8.964.805	0 %	8.939.000	0	99,71	0 %	8.939.000	0	21,68	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	41.236.525	0 Laporan	0	12 Laporan	8.964.805	48 Laporan	8.939.000	400	99,71	48 Laporan	8.939.000	1,6	21,68	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Tertib	0 %	99.920.000	0 %	0	0 %	19.984.000	0 %	11.992.000	0	60,01	0 %	11.992.000	0	12	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	99.920.000	0 Paket	0	3 Paket	19.984.000	12 Paket	11.992.000	400	60,01	12 Paket	11.992.000	15	12	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan perangkat Daerah	0 %	309.772.415	0 %	0	0 %	56.645.953	0 %	59.298.300	0	104,68	0 %	59.298.300	0	19,14	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.673.500	0 Paket	0	1 Paket	7.734.700	4 Paket	9.700.500	400	125,42	4 Paket	9.700.500	400	25,08	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	101.165.340	0 Paket	0	2 Paket	20.233.068	8 Paket	24.731.000	400	122,23	8 Paket	24.731.000	400	24,45	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	26.542.650	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.400.800	0 Paket	0	2 Paket	6.480.160	8 Paket	9.449.800	400	145,83	8 Paket	9.449.800	800	29,17	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	110.990.125	0 Laporan	0	3 Laporan	22.198.025	12 Laporan	15.417.000	400	69,45	12 Laporan	15.417.000	400	13,89	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	0 %	292.105.115	0 %	0	5 %	58.421.023	0 %	58.421.023	0	100	0 %	58.421.023	0	20	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	292.105.115	0 Unit	0	5 Unit	58.421.023	20 Unit	58.421.023	400	100	20 Unit	58.421.023	80	20	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	729.805.950	0 %	0	0 %	145.961.190	0 %	138.547.394	0	94,92	0 %	138.547.394	0	18,98	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	79.997.400	0 Laporan	0	3 Laporan	15.999.480	12 Laporan	8.645.494	400	54,04	12 Laporan	8.645.494	1,2	10,81	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	649.808.550	0 Laporan	0	12 Laporan	129.961.710	48 Laporan	129.901.900	400	99,95	48 Laporan	129.901.900	400	19,99	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0 %	168.350.000	0 %	0	0 %	33.670.000	0 %	32.865.077	0	97,61	0 %	32.865.077	0	19,52	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	2 Unit	168.350.000	0 Unit	0	2 Unit	33.670.000	6 Unit	32.865.077	300	97,61	6 Unit	32.865.077	300	19,52	Kecamatan Gunung Pelindung	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	101,69		0	15,47			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											366,67	88,32		540	16,36			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	T		SR	SR			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0 %	14.478.000	0 %	0	0 %	2.895.600	0 %	2.895.600	0	100	0 %	2.895.600	0	20	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelayanan Perizinan Di Kecamatan	0 %	14.478.000	0 %	0	0 %	2.895.600	0 %	2.895.600	0	100	0 %	2.895.600	0	20	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.02.2.04.00.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	14.478.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.895.600	6 Dokumen	2.895.600	300	100	6 Dokumen	2.895.600	200	20	Kecamatan Gunung Pelindung	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	100		0	20			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											300	100		200	20			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	ST		ST	SR			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	0 %	170.526.365	0 %	0	0 %	34.105.273	0 %	25.355.000	0	74,34	0 %	25.355.000	0	14,87	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Sinergitas Dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 %	170.526.365	0 %	0	0 %	34.105.273	0 %	25.355.000	0	74,34	0 %	25.355.000	0	14,87	Kecamatan Gunung Pelindung	
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	170.526.365	0 Laporan	0	5 Laporan	34.105.273	20 Laporan	25.355.000	400	74,34	20 Laporan	25.355.000	400	14,87	Kecamatan Gunung Pelindung	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	74,34		0	14,87			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	S		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											400	74,34		400	14,87			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	S		ST	SR			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0		0	0			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0		0	0			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	69,01		0	12,59			
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	S		SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0		0	0			
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR		SR	SR			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan Daerah	0 %	9.974.534.370	0 %	0	0 %	1.568.231.967	0 %	1.488.645.356	0	94,93	0 %	1.488.645.356	0	14,92	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan	0 %	0	0 %	0	0 %	3.000.000	0 %	6.000.000	0	200	0 %	6.000.000	0	0	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	6.000.000	100	200	12 Dokumen	6.000.000	0	0	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 %	8.715.412.110	0 %	0	0 %	1.537.415.607	1 %	1.288.779.604	0	83,83	1 %	1.288.779.604	0	14,79	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	8.435.053.725	0 Orang/bulan	0	11 Orang/bulan	1.480.415.607	44 Orang/bulan	1.233.528.210	400	83,32	44 Orang/bulan	1.233.528.210	366,67	14,62	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	190.898.385	0 Dokumen	0	12 Dokumen	38.760.000	39 Dokumen	38.760.000	325	100	39 Dokumen	38.760.000	325	20,3	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	89.460.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	18.240.000	48 Dokumen	16.491.394	400	90,41	48 Dokumen	16.491.394	400	18,43	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Penatausaha Barang Milik Daerah	0 %	31.500.000	0 %	0	0 %	6.000.000	2 %	6.000.000	0	100	2 %	6.000.000	0	19,05	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.03.00.01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersediannya Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	31.500.000	0 %	0	0 %	6.000.000	2 %	6.000.000	0	100	2 %	6.000.000	0	19,05	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	31.500.000	0 Laporan	0	12 Laporan	6.000.000	48 Laporan	6.000.000	400	100	48 Laporan	6.000.000	400	19,05	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan	0 %	144.495.370	0 %	0	0 %	21.816.360	0 %	40.646.064	0	186,31	0 %	40.646.064	0	28,13	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	270.000	4 Paket	233.000	400	86,3	4 Paket	233.000	0	0	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	119.495.370	0 Paket	0	6 Paket	21.546.360	34 Paket	21.544.064	566,67	99,99	34 Paket	21.544.064	283,33	18,03	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	25.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	48 Paket	5.369.000	0	0	48 Paket	5.369.000	0	0	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	48 Laporan	13.500.000	0	0	48 Laporan	13.500.000	0	0	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya pemeliharaan barang milik daerah di kecamatan	0 %	132.090.000	0 %	0	0 %	0	0 %	3.510.000	0	0	0 %	3.510.000	0	2,66	Kecamatan Marga Sekampung	

7.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	132.090.000	0 Unit	0	0 Unit	0	11 Unit	3.510.000	0	0	11 Unit	3.510.000	550	2,66	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediaannya Pelayanan Umum Kantor Kecamatan	0 %	540.018.500	0 %	0	0 %	0	0 %	98.546.188	0	0	0 %	98.546.188	0	18,25	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62.092.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	48 Laporan	6.566.188	0	0	48 Laporan	6.566.188	400	10,57	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	477.926.500	0 Laporan	0	0 Laporan	0	41 Laporan	91.980.000	0	0	41 Laporan	91.980.000	820	19,25	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang milik Daerah di Kecamatan	0 %	411.018.390	0 %	0	0 %	0	0 %	45.163.500	0	0	0 %	45.163.500	0	10,99	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	204.300.000	0 Unit	0	0 Unit	0	12 Unit	37.370.000	0	0	12 Unit	37.370.000	400	18,29	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.09.00.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	43.760.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	162.958.390	0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	7.793.500	0	0	4 Unit	7.793.500	400	4,78	Kecamatan Marga Sekampung	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	94,93			0	14,92			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	ST			SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										161,98	47,5			271,66	9,12			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	SR			ST	SR			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase meningkatnya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0 %	110.750.000	0 %	0	0 %	0	0 %	19.000.000	0	0	0 %	19.000.000	0	17,16	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksanannya Perizinan Di Wilayah Kecamatan	0 %	15.750.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.02.2.01.00.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	15.750.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilmppahkan kepada Camat	Terlaksanannya Perizinan Diwilayah Kecamatan	0 %	95.000.000	0 %	0	0 %	0	12 %	19.000.000	0	0	12 %	19.000.000	0	20	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.02.2.04.00.01	Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	95.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	48 Dokumen	19.000.000	0	0	48 Dokumen	19.000.000	400	20	Kecamatan Marga Sekampung	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0			0	17,16			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR			SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0			200	10			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR			ST	SR			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	0 %	221.830.005	0 %	0	0 %	0	0 %	44.362.804	0	0	0 %	44.362.804	0	20	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksanannya Koordinasi Ketertiban dan Keamanan di wilayah Kecamatan	0 %	221.830.005	0 %	0	0 %	0	0 %	44.362.804	0	0	0 %	44.362.804	0	20	Kecamatan Marga Sekampung	
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40 Laporan	221.830.005	0 Laporan	0	0 Laporan	0	27 Laporan	44.362.804	0	0	27 Laporan	44.362.804	67,5	20	Kecamatan Marga Sekampung	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0			0	20			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR			SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0			67,5	20			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR			S	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	31,64			0	17,36			
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										SR	SR			SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										53,99	15,83			179,69	13,04			
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										R	SR			ST	SR			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	0 %	9.452.488.132	0 %	0	0 %	1.623.880.821	0 %	1.531.936.664	0	94,34	0 %	1.531.936.664	0	16,21	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	0 %	39.237.570	0 %	0	0 %	7.847.514	0 %	7.752.600	0	98,79	0 %	7.752.600	0	19,76	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	39.237.570	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.847.514	1 Dokumen	7.752.600	100	98,79	1 Dokumen	7.752.600	20	19,76	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah laporan administrasi perangkat daerah	0 %	7.628.320.202	0 %	0	0 %	1.323.746.726	0 %	1.251.343.360	0	94,53	0 %	1.251.343.360	0	16,4	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	6.984.500.860	0 Orang/bulan	0	12 Orang/bulan	1.262.671.526	48 Orang/bulan	1.193.721.160	400	94,54	48 Orang/bulan	1.193.721.160	80	17,09	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	386.869.342	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.275.000	1 Dokumen	3.822.000	100	52,54	1 Dokumen	3.822.000	6,67	0,99	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	256.950.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	53.800.200	4 Dokumen	53.800.200	400	100	4 Dokumen	53.800.200	80	20,94	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah laporan pengelolaan administrasi barang milik daerah	0 %	53.288.250	0 %	0	0 %	6.900.000	0 %	6.900.000	0	100	0 %	6.900.000	0	12,95	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.03.00.08	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	53.288.250	0 Laporan	0	1 Laporan	6.900.000	5 Laporan	6.900.000	500	100	5 Laporan	6.900.000	8,33	12,95	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah koordinasi sistem kepegawaian serta pakaian dinas pegawai	0 %	97.268.850	0 %	0	0 %	18.900.000	0 %	18.900.000	0	100	0 %	18.900.000	0	19,43	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	92.768.850	0 Paket	0	2 Paket	18.000.000	40 Paket	18.000.000	2	100	40 Paket	18.000.000	800	19,4	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.05.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	4.500.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	900.000	1 Dokumen	900.000	100	100	1 Dokumen	900.000	20	20	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase jumlah peralatan dan perlengkapan pada administrasi umum	0 %	427.979.422	0 %	0	0 %	72.998.006	0 %	61.913.383	0	84,82	0 %	61.913.383	0	14,47	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	55.259.200	0 Paket	0	1 Paket	10.353.414	2 Paket	9.833.037	200	94,97	2 Paket	9.833.037	40	17,79	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	103.267.904	0 Paket	0	1 Paket	18.213.827	2 Paket	16.930.346	200	92,95	2 Paket	16.930.346	40	16,39	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	97.677.678	0 Paket	0	1 Paket	9.030.765	2 Paket	9.000.000	200	99,66	2 Paket	9.000.000	40	9,21	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	171.774.640	0 Laporan	0	1 Laporan	35.400.000	2 Laporan	26.150.000	200	73,87	2 Laporan	26.150.000	3,33	15,22	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah	0 %	297.613.072	0 %	0	0 %	39.352.608	0 %	38.918.400	0	98,9	0 %	38.918.400	0	13,08	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.07.00.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	136.569.072	0 Unit	0	14 Unit	11.780.208	14 Unit	11.400.000	100	96,77	14 Unit	11.400.000	70	8,35	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	161.044.000	0 Unit	0	4 Unit	27.572.400	3 Unit	27.518.400	75	99,8	3 Unit	27.518.400	15	17,09	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah penyediaan pelayanan umum serta layanan listrik	0 %	554.846.449	0 %	0	0 %	108.263.767	0 %	102.903.821	0	95,05	0 %	102.903.821	0	18,55	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	85.438.828	0 Laporan	0	2 Laporan	17.236.000	6 Laporan	11.904.050	300	69,07	6 Laporan	11.904.050	10	13,93	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	469.407.621	0 Laporan	0	1 Laporan	91.027.767	4 Laporan	90.999.771	400	99,97	4 Laporan	90.999.771	6,67	19,39	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pemeliharaan dan perawatan barang milik daerah	0 %	353.934.317	0 %	0	0 %	45.872.200	0 %	43.305.100	0	94,4	0 %	43.305.100	0	12,24	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	164.739.683	0 Unit	0	2 Unit	33.670.000	4 Unit	33.650.100	200	99,94	4 Unit	33.650.100	26,67	20,43	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.09.00.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	39.594.634	0 Unit	0	8 Unit	4.590.000	4 Unit	2.760.000	50	60,13	4 Unit	2.760.000	8	6,97	Kecamatan Melinting	
7.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	149.600.000	0 Unit	0	2 Unit	7.612.200	2 Unit	6.895.000	100	90,58	2 Unit	6.895.000	20	4,61	Kecamatan Melinting	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	94,34			0	16,21			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	ST			SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										312,5	90,2			71,93	14,47			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	SR			S	SR			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	0 %	94.013.262	0 %	0	0 %	707.505	0 %	667.300	0	94,32	0 %	667.300	0	0,71	Kecamatan Melinting	

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase jumlah kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat	0 %	94.013.262	0 %	0	0 %	707.505	0 %	667.300	0	94,32	0 %	667.300	0	0,71	Kecamatan Melinting	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	94.013.262	0 Dokumen	0	1 Dokumen	707.505	1 Dokumen	667.300	100	94,32	1 Dokumen	667.300	20	0,71	Kecamatan Melinting	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	94,32			0	0,71		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											100	94,32			20	0,71		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	ST			SR	SR		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	0 %	266.192.263	0 %	0	0 %	41.272.816	0 %	24.456.400	0	59,26	0 %	24.456.400	0	9,19	Kecamatan Melinting	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah kesadaran masyarakat akan ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan	0 %	266.192.263	0 %	0	0 %	41.272.816	0 %	24.456.400	0	59,26	0 %	24.456.400	0	9,19	Kecamatan Melinting	
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	266.192.263	0 Laporan	0	4 Laporan	41.272.816	2 Laporan	24.456.400	50	59,26	2 Laporan	24.456.400	10	9,19	Kecamatan Melinting	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	59,26			0	9,19		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	R			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											50	59,26			10	9,19		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	R			SR	SR		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah koordinasi dan pembinaan pamarintahan	0 %	50.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Melinting	
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah hasil koordinasi pendampingan dan pembinaan di desa desa	0 %	50.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Melinting	
7.01.06.2.01.00.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	50.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Melinting	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	61,98			0	6,53		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											SR	R			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											115,63	60,94			25,48	6,09		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											ST	R			SR	SR		
7	UNSUR KEMILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan Pemerintahan	12 %	8.911.911.900	0 %	0	0 %	1.635.482.666	0 %	1.483.566.804	0	90,71	0 %	1.483.566.804	0	16,65	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	7.337.400	0 Laporan/Dokumen	3.170.735	0	43,21	0 Laporan/Dokumen	3.170.735	0	0	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.337.400	4 Dokumen	3.170.735	400	43,21	4 Dokumen	3.170.735	0	0	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 %	7.094.211.900	0 %	0	0 %	1.307.197.886	0 %	1.213.368.809	0	92,82	0 %	1.213.368.809	0	17,1	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.854.211.900	0 Orang/bulan	0	8 Orang/bulan	1.255.955.666	40 Orang/bulan	1.164.238.809	500	92,7	40 Orang/bulan	1.164.238.809	80	16,99	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	6.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.442.220	4 Dokumen	2.330.000	400	52,45	4 Dokumen	2.330.000	133,33	38,83	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	234.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	46.800.000	4 Dokumen	46.800.000	400	100	4 Dokumen	46.800.000	33,33	20	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	0 Laporan/Dokumen	36.000.000	0 Laporan/Dokumen	0	1 Laporan/Dokumen	7.200.000	0 Laporan/Dokumen	7.200.000	0	100	0 Laporan/Dokumen	7.200.000	0	20	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	36.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	7.200.000	33 Laporan	7.200.000	3,3	100	33 Laporan	7.200.000	275	20	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Unit/Paket	81.000.000	0 Unit/Paket	0	0 Unit/Paket	12.987.000	0 Unit/Paket	11.488.500	0	88,46	0 Unit/Paket	11.488.500	0	14,18	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	81.000.000	0 Paket	0	1 Paket	12.987.000	4 Paket	11.488.500	400	88,46	4 Paket	11.488.500	20	14,18	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 %	203.700.000	0 %	0	0 %	95.195.271	0 %	36.907.745	0	38,77	0 %	36.907.745	0	18,12	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	38.500.000	0 Paket	0	12 Paket	12.525.000	22 Paket	6.515.850	183,33	52,02	22 Paket	6.515.850	183,33	16,92	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000	0 Paket	0	1 Paket	35.942.311	4 Paket	17.452.035	400	48,56	4 Paket	17.452.035	400	53,7	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.700.000	0 Paket	0	1 Paket	12.177.960	4 Paket	3.189.860	400	26,19	4 Paket	3.189.860	400	17,06	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	114.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	34.550.000	4 Laporan	9.750.000	400	28,22	4 Laporan	9.750.000	133,33	8,55	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	476.500.000	0 Unit	0	0 Unit	47.560.565	0 Unit	90.957.840	0	191,25	0 Unit	90.957.840	0	19,09	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	257.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.07.00.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	219.000.000	0 Unit	0	1 Unit	47.560.565	6 Unit	90.957.840	600	191,25	6 Unit	90.957.840	200	41,53	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan/Dokumen	559.000.000	0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	108.814.544	0 Laporan/Dokumen	99.483.555	0	91,42	0 Laporan/Dokumen	99.483.555	0	17,8	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	16.367.000	27 Laporan	16.161.455	225	98,74	27 Laporan	16.161.455	225	17,19	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	465.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	92.447.544	6 Laporan	83.322.100	50	90,13	6 Laporan	83.322.100	24	17,92	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0 %	461.500.000	0 %	0	0 %	49.190.000	0 %	20.989.620	0	42,67	0 %	20.989.620	0	4,55	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	214.000.000	0 Unit	0	3 Unit	41.070.000	9 Unit	18.069.620	300	44	9 Unit	18.069.620	60	8,44	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	37.500.000	0 Unit	0	1 Unit	8.120.000	4 Unit	2.920.000	400	35,96	4 Unit	2.920.000	26,67	7,79	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	210.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Bandar Sribhawono	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	90,71			0	16,65		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											491,67	64,23			129,06	17,59		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											ST	R			ST	SR		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	0 %	12.500.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan	0 Laporan/Dokumen	12.500.000	0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	0	0	0	0 Laporan/Dokumen	0	0	0	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.02.2.04.00.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	12.500.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Bandar Sribhawono	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Keindahan)	0 %	80.000.000	0 %	0	0 %	53.418.182	0 %	19.200.000	0	35,94	0 %	19.200.000	0	24	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Laporan/Dokumen	80.000.000	0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	53.418.182	0 Laporan/Dokumen	19.200.000	0	35,94	0 Laporan/Dokumen	19.200.000	0	24	Kecamatan Bandar Sribhawono	
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	80.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	53.418.182	4 Laporan	19.200.000	400	35,94	4 Laporan	19.200.000	80	24	Kecamatan Bandar Sribhawono	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	35,94		0	24			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										400	35,94		80	24			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	SR		T	SR			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 Laporan/Dokumen	50.000.000	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0	0	0	0 Laporan/Dokumen	0	0	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan/Dokumen	50.000.000	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0 Laporan/Dokumen	0	0	0	0 Laporan/Dokumen	0	0	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7.01.06.2.01.00.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	50.000.000	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0		0	0			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0		0	0			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	31,66		0	10,16			
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										222,92	25,04		52,26	10,4			
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										ST	SR		R	SR			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.01	KECAMATAN																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pemerintahan	100 %	8.834.205.525	0 %	0	0 %	1.370.844.154	400 %	1.301.363.206	0	94,93	400 %	1.301.363.206	400	14,73	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	13.923.000	0 %	0	0 %	7.847.514	100 %	1.287.800	0	16,41	100 %	1.287.800	100	9,25	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	13.923.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.847.514	3 Dokumen	1.287.800	100	16,41	3 Dokumen	1.287.800	25	9,25	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100 %	7.259.870.170	0 %	0	0 %	1.022.407.917	400 %	984.009.785	0	96,24	400 %	984.009.785	400	13,55	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	6.801.050.322	0 Orang/bulan	0	7 Orang/bulan	969.395.959	28 Orang/bulan	936.597.885	400	96,62	28 Orang/bulan	936.597.885	46,67	13,77	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	291.663.042	0 Dokumen	0	3 Dokumen	4.803.900	1 Dokumen	2.103.900	33,33	43,8	1 Dokumen	2.103.900	6,67	0,72	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	167.156.806	0 Dokumen	0	1 Dokumen	48.208.058	9 Dokumen	45.308.000	900	93,98	9 Dokumen	45.308.000	180	27,11	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	100 %	53.112.393	0 %	0	0 %	7.650.000	400 %	7.620.000	0	99,61	400 %	7.620.000	400	14,35	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	53.112.393	0 Laporan	0	12 Laporan	7.650.000	10 Laporan	7.620.000	83,33	99,61	10 Laporan	7.620.000	16,67	14,35	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian yang tertib	100 %	50.914.015	0 %	0	0 %	7.650.000	100 %	7.650.000	0	100	100 %	7.650.000	100	15,03	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaiannya	5 Paket	46.704.015	0 Paket	0	1 Paket	7.650.000	1 Paket	7.650.000	100	100	1 Paket	7.650.000	20	16,38	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.05.00.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4.210.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	322.879.682	0 %	0	0 %	88.346.334	300 %	67.213.500	0	76,08	300 %	67.213.500	300	20,82	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	3.659.559	2 Paket	3.249.500	200	88,79	2 Paket	3.249.500	0	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	99.171.906	0 Paket	0	1 Paket	14.548.303	3 Paket	13.926.000	300	95,72	3 Paket	13.926.000	60	14,04	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	41.836.925	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	51.258.341	0 Paket	0	1 Paket	8.138.472	2 Paket	5.678.000	200	69,77	2 Paket	5.678.000	40	11,08	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	130.612.510	0 Laporan	0	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	44.360.000	100	71,55	12 Laporan	44.360.000	20	33,96	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100 %	134.650.950	0 %	0	0 %	36.531.654	200 %	35.892.587	0	98,25	200 %	35.892.587	200	26,66	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	134.650.950	0 Unit	0	9 Unit	36.531.654	7 Unit	35.892.587	77,78	98,25	7 Unit	35.892.587	23,33	26,66	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa pendukung urusan pemerintahan daerah	100 %	814.241.240	0 %	0	0 %	148.922.487	400 %	146.453.534	0	98,34	400 %	146.453.534	400	17,99	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	78.506.240	0 Laporan	0	12 Laporan	11.430.040	7 Laporan	9.511.234	58,33	83,21	7 Laporan	9.511.234	11,67	12,12	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	735.735.000	0 Laporan	0	12 Laporan	137.492.447	15 Laporan	136.942.300	125	99,6	15 Laporan	136.942.300	25	18,61	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksanannya pemeliharaan barang milik daerah	100 %	184.614.075	0 %	0	0 %	51.488.248	300 %	51.236.000	0	99,51	300 %	51.236.000	300	27,75	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakajnya	20 Unit	184.614.075	0 Unit	0	3 Unit	37.370.000	3 Unit	37.370.000	100	100	3 Unit	37.370.000	15	20,24	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	3.530.000	2 Unit	3.290.000	40	93,2	2 Unit	3.290.000	0	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	10.588.248	1 Unit	10.576.000	50	99,88	1 Unit	10.576.000	0	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	94,93		400	14,73			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	ST		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										159,32	75,02		27,22	12,13			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	SR		SR	SR			
7.01.02	PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	107.215.533	0 %	0	0 %	3.286.845	100 %	3.279.500	0	99,78	100 %	3.279.500	100	3,06	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pelayanan perizinin di kecamatan	100 %	107.215.533	0 %	0	0 %	3.286.845	100 %	3.279.500	0	99,78	100 %	3.279.500	100	3,06	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.02.2.04.00.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen	107.215.533	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.286.845	3 Dokumen	3.279.500	75	99,78	3 Dokumen	3.279.500	15	3,06	Kecamatan Labuhan Maringgai
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	99,78		100	3,06			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	ST		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										75	99,78		15	3,06			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										S	ST		SR	SR			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, keindahan)	100 %	241.271.245	0 %	0	0 %	70.800.000	100 %	57.337.500	0	80,99	100 %	57.337.500	100	23,76	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase sinergitas dengan polri, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	100 %	241.271.245	0 %	0	0 %	70.800.000	100 %	57.337.500	0	80,99	100 %	57.337.500	100	23,76	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	241.271.245	0 Laporan	0	4 Laporan	70.800.000	11 Laporan	57.337.500	275	80,99	11 Laporan	57.337.500	55	23,76	Kecamatan Labuhan Maringgai
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	80,99		100	23,76			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	T		ST	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										275	80,99		55	23,76			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	T		R	SR			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase pencapaian pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pemenuhan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
7.01.06.2.01.00.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0		0	0			
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0		0	0			
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		SR	SR			

RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	68.93			150	10.39		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										SR	S			ST	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										127.33	63.95			24.31	9.74		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										ST	R			SR	SR		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.01	KECAMATAN																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	20.619.377.237	0 %	0	100 %	2.277.559.656	400 %	2.089.291.251	400	91.73	400 %	2.089.291.251	400	10.13	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	30.293.043	0 Dokumen	0	3 Dokumen	2.656.522	4 Dokumen	2.188.000	133.33	82.36	4 Dokumen	2.188.000	25	7.22	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	18.588.749.972	0 %	0	100 %	1.949.051.456	400 %	1.831.177.531	400	93.95	400 %	1.831.177.531	400	9.85	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	17.635.141.559	0 Orang/bulan	0	20 Orang/bulan	1.886.776.656	72 Orang/bulan	1.772.377.531	360	93.94	72 Orang/bulan	1.772.377.531	60	10.05	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	650.729.720	0 Dokumen	0	3 Dokumen	10.950.000	5 Dokumen	8.200.000	166.67	74.89	5 Dokumen	8.200.000	20.83	1.26	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	302.878.684	0 Dokumen	0	1 Dokumen	51.324.800	6 Dokumen	50.600.000	600	98.59	6 Dokumen	50.600.000	100	16.71	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	100 %	69.945.900	0 %	0	100 %	7.595.100	300 %	6.600.000	300	86.9	300 %	6.600.000	300	9.44	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	69.945.900	0 Laporan	0	12 Laporan	7.595.100	12 Laporan	6.600.000	100	86.9	12 Laporan	6.600.000	16.67	9.44	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tertib	100 %	86.109.269	0 %	0	100 %	11.250.000	200 %	9.900.000	200	88	200 %	9.900.000	200	11.5	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.05.00.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	9.900.000	0	0	1 Unit	9.900.000	0	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	162 Paket	86.109.269	0 Paket	0	25 Paket	11.250.000	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	713.904.958	0 %	0	100 %	85.242.175	200 %	55.933.000	200	65.62	200 %	55.933.000	200	7.83	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.06.00.01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	39.539.281	0 Paket	0	1 Paket	3.045.000	1 Paket	2.000.000	100	65.68	1 Paket	2.000.000	16.67	5.06	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	140.977.119	0 Paket	0	1 Paket	15.252.775	3 Paket	15.064.000	300	98.76	3 Paket	15.064.000	50	10.69	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	120.327.686	0 Paket	0	1 Paket	13.344.400	3 Paket	19.249.000	300	144.25	3 Paket	19.249.000	50	16	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	413.060.872	0 Laporan	0	13 Laporan	53.600.000	3 Laporan	19.620.000	23.08	36.6	3 Laporan	19.620.000	4.17	4.75	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100 %	65.769.000	0 %	0	100 %	33.975.120	300 %	7.410.000	300	21.81	300 %	7.410.000	300	11.27	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	65.769.000	0 Unit	0	1 Unit	33.975.120	1 Unit	7.410.000	100	21.81	1 Unit	7.410.000	16.67	11.27	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	795.443.928	0 %	0	100 %	139.720.383	300 %	132.797.720	300	95.05	300 %	132.797.720	300	16.69	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	112.146.593	0 Laporan	0	2 Laporan	17.350.000	4 Laporan	10.430.000	200	60.12	4 Laporan	10.430.000	5.56	9.3	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.08.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	20.600.000	0	0	3 Laporan	20.600.000	0	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	683.297.335	0 Laporan	0	12 Laporan	122.370.383	106 Laporan	101.767.720	883.33	83.16	106 Laporan	101.767.720	147.22	14.89	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	269.161.167	0 %	0	100 %	48.068.900	300 %	43.285.000	300	90.05	300 %	43.285.000	300	16.08	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakajnya	12 Unit	225.564.907	0 Unit	0	2 Unit	37.370.000	6 Unit	43.285.000	300	115.83	6 Unit	43.285.000	50	19.19	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	13.528.284	0 Unit	0	6 Unit	5.360.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	30.067.976	0 Unit	0	1 Unit	5.338.900	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Batanghari Nuban
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										400	91.73			400	10.13		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										ST	SR			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										198.13	59.05			31.27	7.55		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										ST	R			SR	SR		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	166.363.414	0 %	0	100 %	2.656.522	300 %	2.575.000	300	96.93	300 %	2.575.000	300	1.55	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.02.2.04.00.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pelayanan Perizinan di Kecamatan	100 %	166.363.414	0 %	0	100 %	2.656.522	300 %	2.575.000	300	96.93	300 %	2.575.000	300	1.55	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.02.2.04.00.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	18 Dokumen	166.363.414	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen	2.575.000	0	0	6 Dokumen	2.575.000	33.33	1.55	Kecamatan Batanghari Nuban
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										300	96.93			300	1.55		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										ST	SR			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0			16.67	0.78		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR			SR	SR		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100 %	131.854.088	0 %	0	100 %	70.690.910	300 %	54.600.000	300	77.24	300 %	54.600.000	300	41.41	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	131.854.088	0 %	0	100 %	70.690.910	300 %	54.600.000	300	77.24	300 %	54.600.000	300	41.41	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	131.854.088	0 Laporan	0	13 Laporan	70.690.910	2 Laporan	54.600.000	15.38	77.24	2 Laporan	54.600.000	8.33	41.41	Kecamatan Batanghari Nuban
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										300	77.24			300	41.41		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										ST	T			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										15.38	77.24			8.33	41.41		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	T			SR	SR		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	100 %	0	0	0	100 %	0	100	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.06.2.01.00.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase pemenuhan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	100 %	10.000.000	0 %	0	0 %	0	100 %	0	0	0	100 %	0	100	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.06.2.01.00.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Kecamatan Batanghari Nuban
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0			100	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR			ST	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										250	66.48			275	13.27		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										ST	S			ST	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										93.38	34.07			14.07	12.43		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										R	SR			SR	SR		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.01	KECAMATAN																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	20.619.377.237	0 %	0	100 %	2.277.559.656	400 %	2.089.291.251	400	91.73	400 %	2.089.291.251	400	10.13	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	30.293.043	0 Dokumen	0	3 Dokumen	2.656.522	4 Dokumen	2.188.000	133.33	82.36	4 Dokumen	2.188.000	25	7.22	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	18.588.749.972	0 %	0	100 %	1.949.051.456	400 %	1.831.177.531	400	93.95	400 %	1.831.177.531	400	9.85	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	17.635.141.559	0 Orang/bulan	0	20 Orang/bulan	1.886.776.656	72 Orang/bulan	1.772.377.531	360	93.94	72 Orang/bulan	1.772.377.531	60	10.05	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	650.729.720	0 Dokumen	0	3 Dokumen	10.950.000	5 Dokumen	8.200.000	166.67	74.89	5 Dokumen	8.200.000	20.83	1.26	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	302.878.684	0 Dokumen	0	1 Dokumen	51.324.800	6 Dokumen	50.600.000	600	98.59	6 Dokumen	50.600.000	100	16.71	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	100 %	69.945.900	0 %	0	100 %	7.595.100	300 %	6.600.000	300	86.9	300 %	6.600.000	300	9.44	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	69.945.900	0 Laporan	0	12 Laporan	7.595.100	12 Laporan	6.600.000	100	86.9	12 Laporan	6.600.000	16.67	9.44	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tertib	100 %	86.109.269	0 %	0	100 %	11.250.000	200 %	9.900.000	200	88	200 %	9.900.000	200	11.5	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.05.00.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	9.900.000	0	0	1 Unit	9.900.000	0	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	162 Paket	86.109.269	0 Paket	0	25 Paket	11.250.000	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	713.904.958	0 %	0	100 %	85.242.175	200 %	55.933.000	200	65.62	200 %	55.933.000	200	7.83	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.06.00.01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	39.539.281	0 Paket	0	1 Paket	3.045.000	1 Paket	2.000.000	100	65.68	1 Paket	2.000.000	16.67	5.06	Kecamatan Batanghari Nuban
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	140.977.119	0 Paket	0	1 Paket	15.252.775	3 Paket	15.064.000	300	98.76	3 Paket	15.064.000	50	10.69	Kecamatan Batanghari Nuban

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Pasir Sakti									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0		0	0												
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0		0	0												
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																										
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Pasir Sakti									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0		0	0												
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0		0	0												
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																										
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	0	Kecamatan Pasir Sakti									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0		0	0												
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0		0	0												
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN																										
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										0	0		0	0												
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM										SR	SR		SR	SR												
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0		0	0												
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		SR	SR												
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)																			0	0		0	0			
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM																			SR	SR		SR	SR			
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)																			0	0		0	0			
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN																			SR	SR		SR	SR			
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																									
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																									
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 indeks	4.246.246.563	0 indeks	0	1 indeks	0	77 indeks	566.335.984	7,7	0	77 indeks	566.335.984	97,47	13,34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	100 Persentase	39.784.022	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.01.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	18.784.022	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi keuangan	100 Persentase	3.355.438.758	0 Persentase	0	0 Persentase	0	16,7 Persentase	462.396.534	0	0	16,7 Persentase	462.396.534	16,7	13,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/bulan	3.043.512.208	0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	57 Orang/bulan	442.176.534	0	0	57 Orang/bulan	442.176.534	20,65	14,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	296.926.550	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	20.220.000	0	0	3 Dokumen	20.220.000	25	6,81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 Persentase	249.801.420	0 Persentase	0	0 Persentase	0	3 Persentase	6.733.000	0	0	3 Persentase	6.733.000	3	2,7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	131.409.850	0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	3.993.000	0	0	3 Paket	3.993.000	25	3,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.223.990	0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	240.000	0	0	3 Paket	240.000	25	7,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.056.680	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	95.610.900	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	2.500.000	0	0	3 Laporan	2.500.000	25	2,61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	379.719.535	0 Persentase	0	0 Persentase	0	15 Persentase	84.722.500	0	0	15 Persentase	84.722.500	15	22,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	22.020.281	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	4.522.500	0	0	1 Laporan	4.522.500	50	20,54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	357.699.254	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	80.200.000	0	0	3 Laporan	80.200.000	25	22,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	100 Persentase	221.502.828	0 Persentase	0	0 Persentase	0	7,8 Persentase	12.483.950	0	0	7,8 Persentase	12.483.950	7,8	5,64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	212.427.828	0 Unit	0	0 Unit	0	9 Unit	11.737.950	0	0	9 Unit	11.737.950	100	5,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	9 Unit	746.000	0	0	9 Unit	746.000	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9.075.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)										7,7	0		97,47	13,34												
PREDIKAT KINERJA PROGRAM										ST	SR		ST	SR												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)										0	0		17,39	4,88												
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN										SR	SR		SR	SR												
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persentase	4.246.246.563	0 Persentase	0	1 Persentase	0	77 Persentase	566.335.984	7,7	0	77 Persentase	566.335.984	77	13,34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	100 Persentase	39.784.022	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.01.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	18.784.022	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi keuangan	100 Persentase	3.355.438.758	0 Persentase	0	0 Persentase	0	16,7 Persentase	462.396.534	0	0	16,7 Persentase	462.396.534	16,7	13,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/bulan	3.043.512.208	0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	57 Orang/bulan	442.176.534	0	0	57 Orang/bulan	442.176.534	20,65	14,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	296.926.550	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	20.220.000	0	0	3 Dokumen	20.220.000	25	6,81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 Persentase	249.801.420	0 Persentase	0	0 Persentase	0	3 Persentase	6.733.000	0	0	3 Persentase	6.733.000	3	2,7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	131.409.850	0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	3.993.000	0	0	3 Paket	3.993.000	25	3,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.223.990	0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	240.000	0	0	3 Paket	240.000	25	7,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.056.680	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	95.610.900	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	2.500.000	0	0	3 Laporan	2.500.000	25	2,61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									

8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	379.719.535	0 Persentase	0	0 Persentase	0	15 Persentase	84.722.500	0	0	15 Persentase	84.722.500	15	22,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	22.020.281	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	4.522.500	0	0	1 Laporan	4.522.500	50	20,54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	357.699.254	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	80.200.000	0	0	3 Laporan	80.200.000	25	22,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	100 Persentase	221.502.828	0 Persentase	0	0 Persentase	0	7,8 Persentase	12.483.950	0	0	7,8 Persentase	12.483.950	7,8	5,64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	9 Unit	212.427.828	0 Unit	0	0 Unit	0	9 Unit	11.737.950	0	0	9 Unit	11.737.950	100	5,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	9 Unit	746.000	0	0	9 Unit	746.000	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9.075.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											7,7	0			77	13,34		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	SR			T	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			17,39	4,88		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja	100 Persentase	4.246.246.563	0 Persentase	0	1 Persentase	0	77 Persentase	566.335.984	7,7	0	77 Persentase	566.335.984	77	13,34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	100 Persentase	39.784.022	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.01.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	18.784.022	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi keuangan	100 Persentase	3.355.438.758	0 Persentase	0	0 Persentase	0	16,7 Persentase	462.396.534	0	0	16,7 Persentase	462.396.534	16,7	13,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/bulan	3.043.512.208	0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	57 Orang/bulan	442.176.534	0	0	57 Orang/bulan	442.176.534	20,65	14,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	296.926.550	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	20.220.000	0	0	3 Dokumen	20.220.000	25	6,81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 Persentase	249.801.420	0 Persentase	0	0 Persentase	0	3 Persentase	6.733.000	0	0	3 Persentase	6.733.000	3	2,7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	131.409.850	0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	3.993.000	0	0	3 Paket	3.993.000	25	3,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.223.990	0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	240.000	0	0	3 Paket	240.000	25	7,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.056.680	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	95.610.900	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	2.500.000	0	0	3 Laporan	2.500.000	25	2,61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	379.719.535	0 Persentase	0	0 Persentase	0	15 Persentase	84.722.500	0	0	15 Persentase	84.722.500	15	22,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	22.020.281	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	4.522.500	0	0	1 Laporan	4.522.500	50	20,54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	357.699.254	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	80.200.000	0	0	3 Laporan	80.200.000	25	22,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	100 Persentase	221.502.828	0 Persentase	0	0 Persentase	0	7,8 Persentase	12.483.950	0	0	7,8 Persentase	12.483.950	7,8	5,64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	9 Unit	212.427.828	0 Unit	0	0 Unit	0	9 Unit	11.737.950	0	0	9 Unit	11.737.950	100	5,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	9 Unit	746.000	0	0	9 Unit	746.000	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9.075.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											7,7	0			77	13,34		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											ST	SR			T	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			17,39	4,88		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah desa Berkarakter Pancasila	5 Desa	960.000.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	0 Desa	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematantan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah desa Berkarakter Pancasila	5 Desa	960.000.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	0 Desa	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02.2.01.00.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disediakan	1 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02.2.01.00.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	50.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02.2.01.00.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang	40.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02.2.01.00.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	45.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02.2.01.00.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	35 Keluarga	800.000.000	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0			0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR			SR	SR		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase potensi gangguan stabilitas politik dengan gangguan stabilitas politik yang terjadi	100 Persentase	205.000.000	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematantan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase potensi gangguan stabilitas politik dengan gangguan stabilitas politik yang terjadi	100 Persentase	205.000.000	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

8.01.03.2.01.001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	70.000.000	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.03.2.01.002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.03.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25 Orang	45.000.000	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.03.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	40.000.000	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0				0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR				SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0				0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR				SR	SR		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas terdaftar	100 Persentase	2.200.000.000	0 Persentase		0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas terdaftar	100 Persentase	2.200.000.000	0 Persentase		0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.04.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Orang	2.100.000.000	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.04.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	100.000.000	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0				0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR				SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0				0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR				SR	SR		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Penurunan penyalahgunaan NAPZA	5 Persentase	200.000.000	0 Persentase		0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penurunan penyalahgunaan NAPZA	5 Persentase	200.000.000	0 Persentase		0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase potensi konflik SARA dengan konflik SARA yang terjadi	50 Persentase	200.000.000	0 Persentase		0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350 Orang	150.000.000	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	65 Orang	50.000.000	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0				0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR				SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0				0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR				SR	SR		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik SARA dengan konflik SARA yang terjadi	50 Persentase	200.000.000	0 Persentase		0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penurunan penyalahgunaan NAPZA	5 Persentase	200.000.000	0 Persentase		0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase potensi konflik SARA dengan konflik SARA yang terjadi	50 Persentase	200.000.000	0 Persentase		0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350 Orang	150.000.000	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	65 Orang	50.000.000	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0				0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR				SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0				0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR				SR	SR		
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial dengan konflik sosial yang terjadi	50 Persentase	165.000.000	0 Persentase		0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial dengan konflik sosial yang terjadi	50 Persentase	165.000.000	0 Persentase		0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0	0	0 Persentase	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	80.000.000	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40 Orang	85.000.000	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											0	0				0	0		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM											SR	SR				SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0				0	0		
PREDIKAT KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR				SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)											2.566.67	0				27.94	4.45		
PREDIKAT TOTAL KINERJA PROGRAM											ST	SR				SR	SR		
RATA-RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (%)											0	0				5.8	1.63		
PREDIKAT TOTAL KINERJA SUB KEGIATAN											SR	SR				SR	SR		

Berdasarkan hasil evaluasi yang tertuang dalam Tabel 2.49, secara umum dapat digambarkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2024 telah menunjukkan progres yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Pada urusan wajib bidang pendidikan, sebagai contoh, realisasi anggaran pada sebagian besar program dan kegiatan sudah mendekati target tahunan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari perangkat daerah dalam mendukung program kerja sesuai dokumen perencanaan yang telah disusun. Beberapa kegiatan strategis seperti penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD, hingga penyusunan dokumen perubahan anggaran juga telah terealisasi meskipun belum sepenuhnya mencapai target secara kuantitatif. Dari sisi kinerja fisik, capaian outcome atau output pada beberapa indikator masih menunjukkan nilai yang relatif rendah jika dibandingkan dengan target tahunan maupun target akhir RPJMD. Beberapa indikator, seperti jumlah dokumen perencanaan yang disusun, masih terealisasi sebagian atau bahkan belum tercapai secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh kendala administratif, keterlambatan pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta dinamika kebijakan yang mempengaruhi proses penyusunan dokumen perencanaan.

Selain itu, kesenjangan antara realisasi keuangan dan realisasi kinerja fisik juga menunjukkan bahwa efektivitas belanja daerah masih perlu ditingkatkan, agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan output yang terukur. Dengan demikian, di samping fokus pada penyerapan anggaran, perlu juga dilakukan penguatan pada tahapan implementasi teknis dan pengendalian kegiatan agar capaian kinerja fisik dapat berjalan selaras dengan realisasi keuangan. Meskipun demikian, capaian hingga tahun berjalan tetap menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Timur masih berada pada jalur yang selaras dengan arah pembangunan jangka menengah, dengan berbagai program prioritas tetap dijalankan sesuai rencana. Progres ini diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk mempersiapkan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya, terutama untuk menjawab target-target strategis RPJMD yang harus dicapai di akhir periode.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah adalah kesenjangan antara kondisi aktual yang terjadi di masyarakat dengan kondisi ideal yang diharapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan mencakup hambatan, kekurangan, atau kendala yang memengaruhi pencapaian target pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, serta yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. permasalahan pembangunan daerah diidentifikasi melalui analisis capaian kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui forum Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD. Identifikasi permasalahan ini menjadi dasar utama dalam merumuskan prioritas pembangunan dan penyusunan rencana kerja perangkat daerah agar program yang direncanakan lebih tepat sasaran, efektif, dan berdaya guna.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026, Pemerintah Daerah telah melakukan proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah secara komprehensif dan partisipatif. Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan global yang diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada pembangunan daerah. Analisis atas perkembangan yang terjadi saat ini dan perkiraan kondisi di masa mendatang menjadi landasan utama dalam penyusunan dokumen ini. Selain itu, identifikasi berbagai tantangan dan peluang yang akan dihadapi juga menjadi aspek penting, mengingat proses transisi pemerintahan yang sedang berlangsung turut memengaruhi arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RKPD 2026 pada dasarnya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons berbagai persoalan pembangunan sekaligus berupaya mencapai target-target jangka menengah dan panjang sesuai visi pembangunan daerah. Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan sendiri dapat bersifat struktural, yang penyelesaiannya memerlukan intervensi kebijakan secara jangka menengah dan panjang. Sementara itu, untuk tantangan yang bersifat siklikal atau jangka pendek, diperlukan langkah-langkah responsif yang cepat, adaptif, serta efektif, namun tetap memperhatikan keberlanjutan dan konsistensi dengan kerangka pembangunan jangka menengah.

Adapun permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Lampung Timur meliputi:

1. Masih banyak infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan drainase yang rusak atau belum memadai sehingga menghambat aksesibilitas, distribusi barang, dan pelayanan dasar.

Pada tahun 2024, kondisi jalan Kabupaten Lampung Timur tercatat hanya 47,68 persen dalam kondisi baik dan sisanya tergolong rusak ringan hingga berat. Berdasarkan data tahun 2021, kondisi jembatan di wilayah ini juga hanya sekitar 79,29 persen yang dinyatakan layak atau baik. Selain itu, Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) untuk Daerah Irigasi di bawah Kewenangan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 hanya mencapai 47,32 persen. Kondisi ini diperburuk dengan sistem drainase yang kurang memadai di kawasan rawa yang merupakan kawasan rawan banjir.

2. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal, masih rendahnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung program prioritas.
3. Tingginya disparitas kualitas pendidikan dan kesehatan antarwilayah, kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan, serta rendahnya capaian indikator kesehatan dasar seperti stunting dan kesehatan ibu-anak.

Berdasarkan survey kesehatan indonesia, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-8 prevalensi stunting terendah di Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.



4. Rendahnya nilai tambah produk lokal, keterbatasan akses pasar, serta kurangnya inovasi untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.
Berdasarkan Skor IDSD Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 3,37, skor tersebut masih berada di bawah skor IDSD Provinsi Lampung yaitu 3,46.
5. Minimnya investasi masuk ke daerah, belum optimalnya hilirisasi sektor unggulan, serta belum berkembangnya potensi pariwisata dan ekonomi kreatif lokal secara maksimal.
Persentase peningkatan investasi menurun dari tahun sebelumnya 294,64 persen pada tahun 2023 menjadi 119,62 persen pada tahun 2024.
6. Ketidakstabilan harga pangan pokok, lemahnya kapasitas UMKM dan industri kecil, serta masih rendahnya orientasi ekspor produk lokal.
Berdasarkan data jumlah perusahaan/unit industri kecil di Kabupaten Lampung Timur terjadi kesenjangan atau ketidak merataan.
7. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, termasuk irigasi, listrik desa, dan pengelolaan air bersih.
Pada tahun 2024 skor pangan Kabupaten Lampung Timur sebesar 89,8, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan dari 91,3 pada tahun 2023.
8. Keterbatasan kapasitas kelembagaan desa dan BUMDes, lemahnya peran BUMDes dalam menggerakkan perekonomian lokal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, yang tercermin dari indeks partisipasi pemilu sebesar 47,78 persen (kategori rendah), juga mencerminkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
9. Tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan keterbatasan akses penduduk miskin terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi.
Kemiskinan di Lampung Timur pada periode 2020 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Lampung Timur meningkat mencapai 15,08 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2020 yang sebesar 14,62 persen. Tingkat kemiskinan Lampung Timur selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung.
10. Menurunnya nilai-nilai kearifan lokal, terbatasnya dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan budaya, serta masih adanya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Berdasarkan indeks kerukunan umat beragama, Kabupaten Lampung Timur hanya sebesar 74,03 pada tahun 2024.
11. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
Pada tahun 2024 TPAK Perempuan Kabupaten Lampung Timur sebesar 50,62 masih berada jauh di bawah TPAK Laki-Laki yaitu 86,73. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2024 mencapai 92

orang. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Timur mengalami pertumbuhan sebesar 0,0077 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

12. Terjadinya degradasi lingkungan, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta terbatasnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam.

Sebagai contoh telah terjadi degradasi lingkungan yaitu pada Kondisi kawasan pesisir, tepatnya di sebelah selatan TNWK, di sepanjang garis pantai mulai dari Tanjung Penet hingga sampai ke muara sungai Way Sekampung telah terjadi degradasi lingkungan yang cukup parah. Selain itu, peningkatan timbunan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat dari tahun ke tahun juga belum diimbangi dengan pengelolaan yang memadai, sehingga total timbunan sampah di Kabupaten Lampung Timur terus meningkat hingga mencapai 208.521,2 ton pada tahun 2024.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Terkait dengan identifikasi permasalahan pelaksanaan urusan pemerintah daerah, dilakukan penyelarasan dengan isu-isu dan permasalahan pembangunan di tingkat nasional maupun Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

2.3.2.1. Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), standar pelayanan minimal disusun berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang sifatnya mutlak dan dapat distandarkan, yang wajib diterima oleh setiap warga negara secara minimal sesuai jenis dan mutu pelayanan dasar, yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

2.3.2.1.1 Pendidikan

- a) Belum dapat memenuhi wajib belajar 10 tahun, yaitu 1 tahun pra-sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan menengah
- b) Implementasi kebijakan dan pemenuhan SPM di bidang pendidikan memerlukan penguatan
- c) Sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah masih belum merata, dengan beberapa daerah belum memenuhi standar dan tidak aman bencana, serta sarana transportasi khusus peserta didik masih terbatas
- d) Bantuan pembiayaan bagi peserta didik, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah dan yang memiliki prestasi, masih perlu diperluas dan ditingkatkan
- e) Regulasi dan kebijakan pengembangan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Agama Lainnya masih perlu diperkuat untuk menjadikannya sebagai Center of Excellence
- f) Masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, serta belum optimalnya pemberian bantuan/insentif khusus bagi mereka

- g) Kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah perlu diperkuat dengan fokus pada pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, serta kondisi lokal daerah

2.3.2.1.2 Kesehatan

- a) Sistem jaminan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan dengan biaya terjangkau belum terwujud
- b) Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya upaya promotif-preventif dan masih rendah kesadaran akan perilaku hidup sehat
- c) Implementasi kebijakan dan pemenuhan SPM bidang kesehatan masih memerlukan penguatan agar pelayanan kesehatan dapat merata dan efektif
- d) Pelayanan kesehatan di berbagai daerah masih belum merata, dengan adanya ketimpangan dalam kualitas dan akses layanan
- e) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap masih kurang efektif dan memerlukan pendekatan yang lebih sesuai dengan budaya lokal
- f) Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata serta adanya disparitas dalam kompetensi tenaga kesehatan di berbagai daerah menjadi tantangan tersendiri
- g) Praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang Masih Ada

2.3.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Kurangnya Regulasi untuk percepatan peningkatan infrastruktur
- b) Pengelolaan jalan di Kabupaten Lampung Timur belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan
- c) Konektivitas menuju dan dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif masih terbatas
- d) Beberapa kawasan terisolir, khususnya di Kecamatan Way Bungur menghadapi kesulitan dalam hal aksesibilitas akibat infrastruktur yang tidak memadai
- e) Keterkaitan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan yang Belum Maksimal
- f) Infrastruktur transportasi dan logistik yang ada saat ini belum memadai untuk mendukung sektor industri manufaktur dan pengolahan.
- g) Kualitas Bangunan Publik yang Kurang Estetis
- h) Keterbatasan Infrastruktur Air Baku dan Air Minum
- i) Infrastruktur Pengairan yang Rusak Berat
- j) Ketahanan Bencana yang Belum Optimal

2.3.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Kurangnya Akses ke Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Toilet)
- b) Keterbatasan Akses ke Sumber Air Minum Bersih
- c) Lingkungan Kumuh di Beberapa Kecamatan

2.3.2.1.5 Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- a) Jumlah tindak pidana terus meningkat selama sepuluh tahun terakhir
- b) Penyalahgunaan Narkoba yang Marak

- c) Konflik satwa liar dan manusia
- d) Rendahnya Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda)
- e) Kurangnya Peran Keluarga dan Desa dalam Kesadaran Hukum
- f) Mitigasi Bencana yang Belum Terimplementasi dengan Baik

2.3.2.1.6 Sosial

- a) Kemiskinan yang Masih Tinggi di Wilayah Kantong Kemiskinan
- b) Kebijakan dan Pemenuhan SPM Bidang Sosial yang Belum Optimal
- c) Keterbatasan Bantuan Sosial bagi Kelompok Marjinal dan Rentan
- d) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang Belum Optimal

2.3.2.2. Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.2.1 Tenaga Kerja

- a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang Rendah
- b) Dominasi Tenaga Kerja Berpendidikan Rendah
- c) Tingginya Proporsi Pekerja di Sektor Informal
- d) Ekspor Tenaga Kerja yang Tinggi
- e) Risiko yang Dihadapi Pekerja Migran
- f) Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja Lokal
- g) Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran

2.3.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Rendahnya Ketahanan Keluarga
- b) Kurangnya Pengarusutamaan Gender
- c) Kurangnya Perlindungan Anak dan Kelompok Rentan

2.3.2.2.3 Pangan

- a) Skor Pola Pangan Harapan yang Menurun
- b) Mutu Gizi Konsumsi Pangan yang Kurang
- c) Prevalensi Ketidacukupan Pangan yang Tinggi

2.3.2.2.4 Pertanahan

- a) Belum tersertifikasinya seluruh tanah milik pemda
- b) Alih Fungsi Hutan Lindung

2.3.2.2.5 Lingkungan Hidup

- a) Sistem Pengelolaan Sampah yang Belum Merata
- b) Kerusakan Lahan Akibat Pertambangan dan Aktivitas Masyarakat
- c) Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
- d) Kurangnya Infrastruktur Lingkungan
- e) Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Lingkungan
- f) Peluang Ekonomi dari Pengelolaan Sampah yang Belum Dimanfaatkan

2.3.2.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Kualitas dan akses layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang rendah
- b) Sarana dan Prasarana Layanan Belum Memadai

2.3.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Masih Rendahnya Jumlah Desa dengan Kategori Desa Mandiri
- b) Belum Optimalnya Peran BUMDes dalam Menggerakkan Ekonomi Desa

2.3.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Rendahnya Partisipasi KB Aktif
- b) Kurangnya Kesadaran dan Edukasi tentang KB

2.3.2.2.9 Perhubungan

- a) Keterbatasan Rambu
- b) Kerusakan Alat Uji Kendaraan Umum (KIR)

2.3.2.2.10 Komunikasi dan Informatika

- a) Kurangnya Regulasi Pengembangan Transformasi Digital Daerah
- b) Akses Internet yang Tidak Merata
- c) Literasi Digital yang Rendah

2.3.2.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a) Rendahnya Persentase Koperasi Aktif
- b) Rendahnya Kualitas Pengelola Koperasi
- c) Ketidakmampuan Bersaing dengan Lembaga Keuangan
- d) Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan untuk Pengusaha Kecil
- e) Akses Pasar yang Terbatas untuk Usaha Kecil
- f) Keterbatasan Teknologi dan Inovasi
- g) Birokrasi yang Rumit
- h) Persaingan dengan Usaha Besar

2.3.2.2.12 Penanaman Modal

- a) Ketidakpastian Kebijakan Investasi
- b) Penurunan Persentase Peningkatan Investasi
- c) Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang
- d) Fragmentasi Layanan Perizinan
- e) Citra Investasi Daerah yang Belum Maksimal

2.3.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

- a) Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga
- b) Belum Optimalnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- c) Belum Optimalnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

2.3.2.2.14 Statistik

- a) Belum Optimalnya Integrasi Data Statistik Sektoral
- b) Belum Optimalnya implementasi Sistem Satu Data Kabupaten

2.3.2.2.15 Persandian

- a) Belum terimplementasi secara optimal surat elektronik

2.3.2.2.16 Kebudayaan

- a) Terbatasnya Pembinaan Terhadap Seni dan Kebudayaan
- b) Keterbatasan Pengembangan Cagar Budaya
- c) Kurangnya Regulasi dan Dukungan Terhadap Kebudayaan Lokal



- d) Kurangnya Revitalisasi dan Pengembangan Heritage Tourism
- e) Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan

2.3.2.2.17 Perpustakaan

- a) Budaya dan Minat Baca Masyarakat yang Masih Rendah
- b) Jumlah Perpustakaan yang Belum Terakreditasi

2.3.2.2.18 Kearsipan

- a) Sarana dan Prasarana Kearsipan yang Belum Memadai
- b) Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis yang Belum Optimal

2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.3.1. Kelautan dan Perikanan

- a) Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Perikanan
- b) Keterbatasan Akses Pembiayaan Kredit Usaha Perikanan

2.3.2.3.2. Pariwisata

- a) Pengembangan Ekonomi Biru
- b) Kurangnya Atraksi dan Ancillary Pariwisata
- c) Pengembangan Agrowisata dan Desa Wisata
- d) Kurangnya Kapasitas dan Akses Informasi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
- e) Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Terbatas
- f) Kurangnya Pembangunan Individu Kreatif

2.3.2.3.3. Pertanian

- a) Kurangnya Penyediaan Benih/Bibit dan Varietas Unggul
- b) Pengendalian Hama dan Penyediaan Pupuk, Obat, dan Pakan yang Ramah Lingkungan
- c) Keterbatasan Akses Pembiayaan Kredit Usaha Pertanian
- d) Peningkatan Produktivitas Komoditas Strategis Daerah
- e) Kurangnya Diversifikasi Pertanian
- f) Terbatasnya Pengembangan Pasar Hasil Usaha Tani
- g) Minat Petani Milenial yang Rendah
- h) Kurangnya Penyediaan Bibit Ternak Unggul
- i) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peternakan
- j) Keterbatasan Akses Pembiayaan Kredit Usaha Peternakan

2.3.2.3.4. Perdagangan dan Perindustrian

- a) Pengembangan Industri Kecil dan Mikro
- b) Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor
- c) Akses Perdagangan Antar Daerah yang Terbatas
- d) Ekosistem Bisnis Lokal yang Belum Optimal

2.3.2.4. Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.4.1. Sekretariat Daerah

- a) Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur menunjukkan nilai yang belum optimal
- b) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal



- c) Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

2.3.2.4.2. Sekretariat DPRD

- a) Fungsi fasilitasi legislasi terhadap peraturan daerah dan target propemperda belum optimal

2.3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.2.5.1. Perencanaan

- a) Sistem informasi data pembangunan yang menyeluruh sebagai basis data perencanaan belum terlaksana secara optimal.
- b) Belum optimalnya perumusan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan
- c) Ketersediaan data capaian pembangunan daerah belum optimal
- d) Belum optimalnya kerjasama pembangunan daerah

2.3.2.5.2. Keuangan

- a) Implementasi transaksi non-tunai (digitalisasi) relatif rendah
- b) Kendala dalam pengadministrasian barang milik daerah
- c) Pemanfaatan aset daerah belum optimal akibat tingginya biaya operasional dibandingkan dengan potensi manfaat yang bisa diperoleh
- d) Rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah
- e) Pemenuhan belanja wajib belum optimal

2.3.2.5.3. Kepegawaian

- a) Pelaksanaan Indeks profesionalitas PNS relatif rendah
- b) Pengusulan formasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai belum terpenuhi secara optimal

2.3.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

- a) Masih kurangnya kompetensi pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi dan pelayanan masyarakat

2.3.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan

- a) Belum optimalnya implementasi hasil riset sebagai dasar kebijakan pembangunan atau program dan kegiatan perangkat daerah

2.3.2.6. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

2.3.2.6.1. Inspektorat

- a) Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah relatif belum optimal
- b) Tindak lanjut terhadap temuan BPK RI belum optimal
- c) Maturitas SPIP belum optimal

2.3.2.7. Unsur Kewilayahan

2.3.2.7.1. Kecamatan

- a) Terbatasnya Kondisi bangunan gedung kantor kecamatan yang sebagian besar perlu perbaikan
- b) Kualitas layanan publik sektor kecamatan belum optimal.



2.3.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

2.3.2.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a) Kecenderungan menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat, serta kurangnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya di generasi muda
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan demokrasi dan HAM yang mempengaruhi partisipasi politik
- c) Kasus penyalahgunaan NAPZA yang perlu dikoordinasikan dan ditangani lebih lanjut



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi dalam adalah landasan analisis ekonomi yang digunakan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur dalam satu tahun. Kerangka ini mencakup gambaran kondisi ekonomi makro daerah, potensi, tantangan, serta proyeksi ekonomi yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Keuangan Daerah adalah gambaran potensi penerimaan, alokasi belanja, serta arah kebijakan fiskal yang menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah. Kerangka keuangan daerah ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dapat dibiayai secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah adalah gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi, potensi, serta kemampuan keuangan suatu daerah. Kerangka ini menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada bab ini akan memberikan gambaran kondisi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kabupaten Lampung Timur untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Tahun 2026, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di Tahun 2026.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penetapan arah kebijakan daerah kabupaten tidak lepas dari kondisi ekonomi yang terjadi di tingkat provinsi maupun nasional, demikian pula arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2026 tidak terlepas dari pengaruh ekonomi makro Provinsi Lampung dan nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk tahun 2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029.

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

Sebagai sistem perekonomian terbuka, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tetap dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur perdagangan dan keuangan. Ketidakpastian ekonomi global masih tinggi akibat perlambatan pertumbuhan di negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan kawasan Eropa, yang menghadapi tekanan inflasi, kebijakan moneter ketat, serta ketegangan geopolitik yang



berkelanjutan. Fragmentasi ekonomi global dan gangguan rantai pasok dunia turut memberikan dampak terhadap stabilitas harga dan arus investasi internasional. Selain itu, faktor perubahan iklim global semakin memengaruhi aktivitas ekonomi, terutama pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam yang rentan terhadap bencana dan anomali cuaca. Kondisi tersebut menambah eksposur risiko terhadap stabilitas ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), transisi menuju ekonomi hijau, serta penguatan kerja sama ekonomi kawasan di Asia memberikan peluang baru bagi Indonesia untuk memperluas sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan ketahanan ekonomi yang relatif terjaga, stabilitas makroekonomi yang kuat, serta kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten, Indonesia diperkirakan mampu mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2025. Upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi produktif, serta memperkuat sektor industri dan pertanian menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika global yang masih bergejolak.

Sementara itu, dinamika harga komoditas global pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi di tengah perlambatan permintaan dunia dan tingginya ketidakpastian geopolitik. Setelah mengalami penurunan sepanjang tahun 2023, harga sejumlah komoditas utama sempat mengalami tekanan lanjutan pada tahun 2024, sebelum menunjukkan tanda-tanda stabilisasi menjelang tahun 2025. Ketidakpastian global yang bersumber dari ketegangan geopolitik, kebijakan energi negara produsen utama (OPEC+), serta gangguan rantai pasok akibat perubahan iklim masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan harga komoditas energi dan pangan. Harga minyak mentah, batu bara, dan gas alam cenderung berfluktuasi sepanjang awal tahun 2025, dipengaruhi oleh keputusan negara-negara OPEC+ dalam menahan tingkat produksi serta meningkatnya permintaan energi di beberapa kawasan. Sementara itu, harga komoditas pangan global relatif tidak stabil akibat dampak perubahan iklim dan gangguan produksi di sejumlah negara produsen utama. Fenomena El Nino yang masih berlanjut sejak tahun 2024 menyebabkan penurunan hasil panen di beberapa wilayah tropis, yang berdampak pada kenaikan harga beras, jagung, dan gula di pasar internasional. Kondisi tersebut menuntut kewaspadaan terhadap fluktuasi harga komoditas yang berpotensi memengaruhi inflasi domestik dan daya beli masyarakat. Dalam konteks nasional, stabilitas harga komoditas menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi, terutama bagi daerah dengan struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian dan komoditas primer.

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan masih lemah di tengah ketidakpastian yang tinggi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 2,7 persen, sedangkan IMF memperkirakan sekitar 3,2 persen. Perlambatan tersebut disebabkan oleh masih tingginya suku bunga global, terbatasnya ruang kebijakan fiskal, serta meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi ekonomi dunia. Kondisi suku bunga tinggi

(*high for longer*) berpotensi menimbulkan arus keluar modal, depresiasi nilai tukar, dan tekanan utang di negara berkembang. Selain itu, perubahan iklim dan ketidakstabilan harga komoditas turut memperbesar risiko terhadap stabilitas ekonomi global. Meskipun demikian, terdapat peluang pertumbuhan baru bagi negara berkembang melalui rekonfigurasi rantai pasok global, percepatan transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI), serta transisi menuju ekonomi hijau. Optimalisasi peluang ini sangat bergantung pada konsistensi reformasi struktural dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2025. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2025 tumbuh menguat sebesar 5,87 persen (yoy). Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 dibanding triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi terdalam terjadi pada Jasa Pendidikan sebesar 8,45 persen, diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,42 persen, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,97 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,74 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,92 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,52 persen.

Perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan kinerja yang tetap solid di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian eksternal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.665,9 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun. Secara tahunan (y-on-y), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87 persen, menandai kesinambungan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional pascapandemi. Namun secara triwulanan (q-to-q), ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,98 persen akibat faktor musiman, terutama penurunan pengeluaran konsumsi pemerintah dan aktivitas pertambangan.

Dari sisi produksi, hampir seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif, dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh tertinggi sebesar 10,52 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 9,84 persen, Jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,01 persen. Sementara itu, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sebesar 1,23 persen. Struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 19,25 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,22 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,66 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 6,78 persen serta Konsumsi Rumah Tangga yang tetap stabil sebesar 4,89 persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi juga tumbuh sebesar 2,12 persen, mencerminkan masih kuatnya aktivitas investasi di tengah tekanan ekonomi global. Struktur pengeluaran nasional masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan pangsa sebesar 54,53 persen, diikuti PMTB sebesar 28,03 persen, dan ekspor barang dan jasa sebesar 22,30 persen. Secara spasial, Pulau Jawa masih menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 57,43 persen dan pertumbuhan 4,99 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi tercatat di Pulau Sulawesi sebesar 6,40 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 4,85 persen, menandakan penguatan aktivitas ekonomi di wilayah luar Jawa.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih kuat pada tahun 2024, seiring dengan inflasi yang terkendali, aktivitas penyelenggaraan Pemilu-Pilkada serentak, dan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13. Indikator konsumsi seperti Indeks Penjualan Riil dan Indeks Keyakinan Konsumen pada awal tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yang menandai kuatnya optimisme permintaan domestik. Kebijakan belanja pemerintah yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamisnya harga bahan pangan serta berbagai Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dioptimalkan bagi masyarakat rentan diharapkan dapat terus mendorong ekspansi dan transformasi ekonomi. Pada triwulan I 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen (yoy).

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) pada triwulan I tahun 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,38 persen (y-on-y) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan (q-to-q), P-KP juga mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 39,89 persen, menjadi salah satu komponen pengeluaran dengan perlambatan terdalam. Kondisi ini terutama disebabkan oleh berakhirnya realisasi belanja pemerintah pada tahun anggaran 2024 yang cenderung meningkat pada triwulan IV, serta adanya penyesuaian pelaksanaan anggaran pada awal tahun 2025. Nilai P-KP atas dasar harga konstan 2010 tercatat menurun dari Rp312,5 triliun pada triwulan IV-2024 menjadi Rp187,8 triliun pada triwulan I-2025, dengan kontribusi terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar sekitar 5,88 persen. Penurunan kinerja konsumsi pemerintah pada awal tahun ini mencerminkan pola musiman realisasi anggaran, di mana belanja pemerintah umumnya meningkat pada akhir tahun anggaran dan kembali melambat pada awal tahun berikutnya. Meskipun demikian, P-KP diproyeksikan akan kembali meningkat pada triwulan-triwulan selanjutnya seiring dengan percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga, peningkatan transfer ke daerah, serta pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencerminkan aktivitas investasi pada triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 2,12 persen (y-on-y), dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 28,03 persen. Secara triwulanan, investasi mengalami

kontraksi 7,40 persen akibat pola musiman pelaksanaan proyek infrastruktur. Pertumbuhan investasi didorong oleh pembangunan di sektor konstruksi, perumahan, dan kawasan industri, serta kelanjutan proyek strategis nasional. Meskipun pertumbuhannya melambat, aktivitas investasi tetap menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas ekonomi nasional dan prospek pertumbuhan jangka menengah.

Pada triwulan I tahun 2025, perekonomian Indonesia masih ditopang oleh lima sektor utama, yaitu industri pengolahan (manufaktur), pertanian, perdagangan, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian. Sektor manufaktur menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan pangsa sekitar 19,25 persen dan tumbuh 4,13 persen (y-on-y), terutama didorong oleh subsektor industri makanan dan minuman, logam dasar, serta alat angkutan yang terus berkembang seiring kebijakan hilirisasi dan stabilnya permintaan domestik. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 12,66 persen terhadap PDB dan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen, didorong oleh membaiknya kondisi cuaca, peningkatan hasil panen, serta kenaikan produksi perikanan. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi 13,22 persen terhadap PDB, ditopang oleh aktivitas konsumsi rumah tangga yang kuat pascapemilu.

Sektor konstruksi juga menunjukkan kinerja positif dengan kontribusi 9,84 persen terhadap PDB dan pertumbuhan 4,94 persen, sejalan dengan berlanjutnya proyek strategis nasional dan peningkatan investasi infrastruktur publik maupun swasta. Adapun sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 8,99 persen terhadap PDB, meskipun mengalami kontraksi sebesar 1,23 persen akibat fluktuasi harga komoditas global dan penurunan produksi batu bara. Secara keseluruhan, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2025 masih didominasi oleh sektor-sektor riil yang berbasis produksi dan konsumsi domestik, mencerminkan fondasi ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dari sisi harga, inflasi IHK tahun 2024 menurun, namun diperkirakan akan meningkat kembali pada tahun 2025 seiring dengan kenaikan harga pangan, energi, dan upah, meskipun masih terkendali dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1$ persen. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui sinergi kebijakan moneter dan pengendalian inflasi pangan (GNPIP). Selain itu, aktivitas investasi dan transaksi ekonomi digital terus tumbuh pesat, mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, risiko eksternal seperti ketidakpastian global, tensi geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas masih perlu diantisipasi. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2024, dengan fondasi pertumbuhan yang semakin kuat melalui penguatan sektor pertanian, hilirisasi industri, investasi infrastruktur, serta digitalisasi ekonomi yang berkelanjutan.

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Provinsi Lampung

Pada triwulan I tahun 2025, perekonomian Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,47 persen (year-on-year), yang menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2024 yang tumbuh sebesar 5,32 persen (yoy). Pertumbuhan ini juga melampaui capaian rata-rata nasional dan regional Sumatera, yang masing-masing tumbuh sebesar 4,87 persen (yoy) dan 4,85 persen (yoy). Secara nominal, besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung pada periode tersebut mencapai Rp121,70 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp69,56 triliun atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

Dari sisi eksternal, kinerja net ekspor Provinsi Lampung tercatat menguat didorong oleh peningkatan ekspor antar daerah dan tetap kuanya ekspor luar negeri. Pada triwulan I 2025 kinerja net ekspor (NE) Provinsi Lampung tercatat tumbuh sebesar 52,20 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (42,42 persen; yoy). Perkembangan tersebut utamanya didukung oleh total ekspor yang tumbuh 12,96 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (12,31 persen; yoy) didorong aktivitas ekspor antar daerah dan tetap tingginya permintaan luar negeri untuk komoditas kopi robusta dan lemak & minyak nabati. Sejalan dengan itu, total impor juga menunjukkan peningkatan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,25 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,96 persen; yoy) didorong peningkatan bahan baku olahan pendukung LU utama, seperti pupuk dan limbah hasil industri makanan (bungkil kedelai).

Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung meningkat terutama didorong oleh peningkatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta LU Industri Pengolahan. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 5,42 persen (yoy), meningkat dibandingkan realisasi pada triwulan sebelumnya (3,62 persen; yoy) didukung oleh normalisasi aktivitas tanam seiring kpndisi cuaca yang lebih kondusif. Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan tetap solid dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,79 persen (yoy), walaupun melambat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya (14,16 persen;yoy) disebabkan masih kuatnya permintaan luar negeri untuk produk makanan dan minuman Lampung serta belum masuknya musim penggilingan insutri gula. Sejalan dengan itu, kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) juga mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 6,46% (yoy), meski lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya (7,02%; yoy) sejalan dengan melambatnya realisasi penjualan kendaraan bermotor.

Lebih lanjut, Peningkatan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Konstruksi turut mendukung realisasi pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih tinggi di triwulan I 2025. Kinerja LU Transportasi dan pergudangan pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh sebesar 8,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya (4,06%; yoy) sejalan dengan tingginya mobilitas masyarakat pada momentum HBKN. Adapun kinerja LU Konstruksi tercatat tumbuh 0,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi

triwulan sebelumnya (-3,38%; yoy) sejalan dengan kembali bergulirnya aktivitas investasi pasca puncak penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024.

Sementara itu, kinerja LU yang berhubungan erat dengan mobilitas tetap kuat, meski mengalami perlambatan. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat tumbuh sebesar 6,46 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya (7,02 persen; yoy) dipengaruhi normalisasi aktivitas perdagangan komoditas pangan antar daerah. Adapun pertumbuhan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tercatat tumbuh 8,20 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan sebelumnya (4,06 persen; yoy) sejalan dengan aktivitas perdagangan yang melambat. Pada triwulan I 2025, kinerja LU Konstruksi meningkat 0,96 persen (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya yaitu -3,38 persen (yoy) sejalan dengan kembali bergulirnya aktivitas investasi pasca puncak penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024. PDRB Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 masih didominasi oleh tiga LU utama, yaitu LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; LU Industri Pengolahan; dan LU Perdagangan Besar dan Eceran yang masing-masing berkontribusi sebesar 24,37%; 19,52% dan 14,95% terhadap PDRB.

Secara umum, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 5,47 persen (yoy), meningkat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,32 persen (yoy). Capaian tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah Sumatera yang masing-masing tumbuh sebesar 4,87 persen (yoy) dan 4,85 persen (yoy). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan I 2025 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing tercatat sebesar Rp121,70 triliun dan Rp69,56 triliun. Pertumbuhan ekonomi Lampung yang meningkat pada triwulan laporan terutama didukung oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga. Kinerja konsumsi rumah tangga Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 tumbuh meningkat, namun terbatas sejalan dengan realisasi penyaluran kredit konsumsi yang melambat. Kinerja penyaluran kredit konsumsi di Provinsi pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh sebesar 12,21 persen (yoy), sejalan dengan perkembangan kredit, DPK perseorangan di Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan, yaitu tumbuh 10,60 persen (yoy) pada triwulan laporan dari 7,12 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Di samping itu, tertahannya peningkatan konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh perkembangan mobilitas masyarakat yang tidak setinggi periode sebelumnya. Hal ini salah satunya tecermin dari pertumbuhan jumlah kedatangan penumpang di Bandara Radin Inten II yang meskipun menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 20,93 persen (yoy), namun melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,26 persen (yoy).

Kinerja ekspor Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 tumbuh meningkat didukung peningkatan ekspor antar daerah dan tetap kuatnya ekspor luar negeri. Total ekspor Provinsi Lampung pada triwulan laporan tumbuh sebesar 12,96 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,31 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama didukung oleh tingginya aktivitas ekspor antar daerah di tengah realisasi ekspor luar negeri non migas yang mengalami perlambatan. Berdasarkan data Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ekspor luar negeri non migas Provinsi Lampung tetap solid dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar sebesar 50,00 persen (yoy), meski lebih rendah dibandingkan 55,51 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut utamanya didukung oleh peningkatan realisasi ekspor pertanian dan pertambangan, di tengah melambatnya realisasi ekspor industri manufaktur.

Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan ini ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik dan eksternal. Kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 masing-masing tercatat tumbuh sebesar 5,06% (yoy) dan 1,26% (yoy), didukung oleh peningkatan daya beli pekerja di lapangan usaha utama dan kembali bergulirnya aktivitas penanaman modal dalam negeri pasca berakhirnya tahun Pilkada.. Lebih lanjut, kinerja net ekspor tumbuh sebesar 52,20% (yoy) didukung meningkatnya aktivitas ekspor antar daerah dan tingginya permintaan luar negeri untuk komoditas unggulan Lampung.

Kinerja konsumsi rumah tangga Provinsi Lampung tetap kuat didukung dengan terjaganya optimisme dan meningkatnya daya beli tenaga kerja di lapangan usaha utama. Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,06 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,05 persen (yoy). Tetap kuatnya kinerja konsumsi didukung oleh terjaganya optimisme konsumen, tecermin dari rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Provinsi Lampung yang terjaga dalam zona ekspansif (>100) pada triwulan laporan, yaitu sebesar 132,36. Lebih lanjut, daya beli pekerja di LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan LU utama Provinsi Lampung terindikasi mengalami kenaikan. Hal ini tecermin dari rata-rata nilai tukar petani (NTP) pada triwulan I 2025 yang mencapai 133,28, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar 128,04. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh kenaikan NTP di subsektor perkebunan rakyat (NTP-Pr), sejalan dengan perkembangan harga beberapa komoditas perkebunan unggulan Lampung yang terjaga pada level yang tinggi. Sementara itu, NTP subsektor tanaman pangan tercatat relatif terjaga, meski sedikit mengalami penurunan sejalan dengan tingginya pasokan pada periode panen raya yang berlangsung mulai bulan Maret. Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2025 sejalan dengan realisasi konsumsi listrik rumah tangga yang tumbuh 16,61 persen (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 3,04 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya seiring dengan tingginya intensitas penggunaan listrik selama periode Ramadan. Kinerja konsumsi rumah tangga Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 tumbuh meningkat, namun terbatas sejalan dengan realisasi penyaluran kredit konsumsi yang melambat. Kinerja penyaluran kredit konsumsi di Provinsi pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh sebesar 12,21 persen (yoy), sejalan dengan perkembangan kredit, DPK perseorangan di Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan, yaitu tumbuh 10,60 persen (yoy) pada triwulan laporan dari 7,12 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Di samping itu, tertahannya peningkatan konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh perkembangan mobilitas masyarakat yang tidak setinggi

periode sebelumnya. Hal ini salah satunya tecermin dari pertumbuhan jumlah kedatangan penumpang di Bandara Radin Inten II yang meskipun menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 20,93 persen (yoy), namun melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,26 persen (yoy).

Kinerja konsumsi pemerintah melambat sejalan dengan penurunan pagu belanja APBD di Provinsi Lampung. Pada triwulan I 2025, konsumsi pemerintah tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,58 persen (yoy), melambat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,16 persen (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan penurunan anggaran belanja pemerintah di Provinsi Lampung, baik APBN maupun APBD. Dari sisi APBN, pagu belanja pemerintah pusat (BPP) di Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp8,47 triliun, terkontraksi 24,30 persen (yoy) dari Rp11,19 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi pada hampir seluruh akun BPP, utamanya pagu belanja barang dan belanja modal seiring dengan normalisasi belanja dari penyelenggaraan Pemilu dan telah rampungnya beberapa proyek pemerintah bernilai besar di Provinsi Lampung. Dari sisi APBD, pagu belanja konsolidasi seluruh pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp32,27 triliun, terkontraksi 1,50 persen (yoy) dari Rp32,76 triliun pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan penurunan pagu belanja APBD juga terjadi hampir pada seluruh akun, terutama belanja modal sejalan dengan efisiensi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat. Perlambatan kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan laporan terutama disebabkan oleh penurunan realisasi APBD untuk belanja modal dan belanja lainnya. Pada triwulan I 2025, realisasi belanja modal dalam APBD tercatat mengalami kontraksi sebesar 8,77 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang terkontraksi 6,61 persen (yoy). Selain dipengaruhi oleh penurunan transfer DAK fisik dari pemerintah pusat, perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh proses pengadaan belanja modal pemerintah yang cenderung memakan waktu yang lebih lama. Sementara itu, realisasi belanja lainnya tercatat mengalami kontraksi sebesar 17,41 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang terkontraksi 6,61 persen (yoy). Perlambatan realisasi belanja lainnya tersebut utamanya disebabkan normalisasi belanja hibah pasca puncak penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, kinerja konsumsi pemerintah yang melambat juga dipengaruhi oleh penurunan realisasi BPP untuk belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial.

Kinerja investasi meningkat sejalan didukung peningkatan aktivitas penanaman modal dalam negeri. Kinerja investasi atau Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh sebesar 1,26 persen (yoy), meningkat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,34 persen (yoy). Perkembangan tersebut utamanya didukung oleh meningkatnya aktivitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 33,26 persen (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 25,50 persen (yoy). Peningkatan realisasi PMDN terutama terjadi pada sektor primer dan sekunder yang masing-masing



tercatat tumbuh 107,84 persen (yoy) dan 31,94 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (9,23 persen; yoy dan - 50,86 persen; yoy). Akselerasi aktivitas penanaman modal di sektor primer utamanya didorong oleh investasi di subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan sejalan dengan pemulihan produksi tanaman pangan. Sementara itu, penanaman modal di subsektor tersier atau jasa utamanya didorong oleh investasi di subsektor Konstruksi, serta Transportasi, Perdagangan dan Telekomunikasi sejalan dengan kembali bergulirnya beberapa proyek pembangunan perumahan dan logistik perdagangan di Provinsi Lampung.

3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kabupaten Lampung Timur

3.1.3.1. Kondisi Tahun 2024

Prospek pembangunan ekonomi di tahun 2026 ini sebagai salah satu dasar penyusunan proyeksi ekonomi merujuk pada perkembangan ekonomi daerah hingga awal tahun 2025, baik perkembangan ekonomi daerah maupun peluang ekonomi regional dan internasional yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah. Perkembangan ekonomi tahun 2024 berpedoman pada laporan perkembangan ekonomi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lampung Timur yang merupakan laporan terakhir yang tersedia.

Perkembangan ekonomi pada tahun 2024 ditinjau dari PDRB dengan migas menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 sebesar 56,85 triliun, atau meningkat sebesar 7,53 persen dari tahun 2023. Jika dilihat dari nilai tambah PDRB tanpa migas, angka PDRB atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 8,67 persen dari 41,66 triliun pada tahun 2023 menjadi 45,27 triliun pada tahun 2024. Jika ditinjau dari PDRB dengan migas, pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dari PDRB tanpa migas yakni sebesar 4,62 persen. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya produksi minyak di Lampung Timur yang selaras dengan tren penurunan produksi global, serta kondisi perdagangan migas yang tidak stabil akibat gejolak geopolitik, khususnya dampak agresi militer Israel ke Gaza. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama mengapa pertumbuhan sektor migas tertinggal dibandingkan sektor nonmigas di Kabupaten Lampung Timur.

Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2024 didorong oleh beberapa kategori yang menjadi penggerak sumber pertumbuhan. Dari tujuh belas lapangan usaha ekonomi yang ada, enam belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan di tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 31,75 persen dimana kontribusi yang diberikan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 32,84 persen. Nilai tambah yang diciptakan pada tahun 2024 mencapai 18,05 triliun rupiah. Secara nominal besaran ekonomi kategori ini meningkat sebesar 691,18 miliar rupiah. Perubahan kondisi cuaca akibat El Nino menyebabkan penurunan produksi pada mayoritas komoditas pertanian, kondisi ini membuat pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya.

Kategori pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap total perekonomian Kabupaten Lampung Timur, yaitu sebesar 22,34 persen pada tahun 2024. Kontribusi kategori ini cenderung fluktuatif sejak tahun 2020. Meskipun demikian, kategori pertambangan dan penggalian tetap menjadi salah satu kategori yang memberikan peranan tinggi dalam ekonomi Kabupaten Lampung Timur. Secara keseluruhan pada tahun 2024, kategori ini mengalami peningkatan perekonomian Kabupaten Lampung Timur sebesar 3,78 persen.

Pada tahun 2024, kegiatan ekonomi dari kategori industri pengolahan hanya mampu menciptakan nilai tambah sebesar 5,01 triliun rupiah. Nilai tambah yang tercipta tersebut secara nominal mengalami kenaikan sebesar 735,45 miliar rupiah. Kontribusi kategori ini terhadap total perekonomian Kabupaten Lampung Timur secara umum berada pada kisaran 7,95 persen hingga 8,81 persen selama 2020-2024. Pada tahun 2024, kontribusi kategori industri pengolahan sebesar 8,81%. Pertumbuhan kategori industri pengolahan selama 2020-2024 berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi dialami kategori ini pada tahun 2024, yakni sebesar 12,73 persen. Menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi memicu kenaikan pada produksi dan permintaan pasar di beberapa sub lapangan usaha industri pengolahan yang juga mempengaruhi pertumbuhan positif kategori industri tersebut.

Pada kategori pengadaan listrik dan gas, sepanjang kurun waktu 2020-2024 pertumbuhannya berfluktuatif. Kategori ini mengalami kontraksi terdalam di tahun 2024 sebesar 22,65 persen. Pada tahun 2020 dan 2021 produksi dan permintaan pada sub kategori pengadaan gas dan produksi es masih belum stabil akibatnya pertumbuhan kategori pengadaan listrik dan gas masih mengalami kontraksi yang cukup dalam. Pada tahun 2022 pertumbuhan pengadaan listrik, gas, dan produksi es menunjukkan nilai positif dibanding tahun 2021 seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kenaikan PDRB pada kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 11,09 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 sampai 2024 kategori ini kembali mengalami kontraksi sebesar 0,98 persen dan 22,65 persen. Kontraksi yang terjadi dipengaruhi oleh penurunan permintaan gas dan badai El Nino yang juga turut mempengaruhi aktivitas perikanan dan memicu penurunan produksi es balok. Peranan kategori pengadaan listrik dan gas terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2020-2024 masih kurang dari 1 persen dari total nilai tambah yang dihasilkan Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam pada kategori ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kontraksi pertumbuhan yang dialami Kabupaten Lampung Timur secara total. Kegiatan ekonomi dari kategori pengadaan listrik dan gas pada tahun 2024 mengalami penurunan sehingga hanya mampu menciptakan nilai sebesar 168,74 miliar rupiah.

Untuk kategori pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang menciptakan nilai tambah pada tahun 2024 mencapai 30,42 miliar rupiah. Sumbangsih kategori ini terhadap total perekonomian hanya sebesar 0,05-0,06 persen selama 2020-2024.

Pertumbuhan kategori ini pada tahun 2024 sebesar 0,16 persen, pertumbuhan terendah sepanjang tahun 2020-2024.

Selanjutnya, terkait kontribusi kategori konstruksi selama tahun 2020-2024 terhadap total perekonomian perlahan meningkat. Besaran kontribusi kategori tersebut selama periode tersebut berada pada kisaran 5,71 persen hingga 6,29 persen. Nilai tambah terhadap PDRB Lampung Timur yang diciptakan kategori ini pada tahun 2024 sebesar 3,48 triliun rupiah. Pertumbuhan kategori ini selama 2020-2024 cukup berfluktuatif. Titik terendah pertumbuhan terjadi pada tahun 2020, dimana kategori konstruksi mengalami kontraksi sebesar 2,08 persen. Berlanjutnya beberapa kegiatan di sektor konstruksi memicu pertumbuhan kategori konstruksi ke arah positif dimana di tahun 2021-2024 mampu tumbuh positif masing-masing sebesar 7,99 persen, 7,72 persen, 9,40 persen, dan 3,70 persen.

Kemudian, pada kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih menjadi penyumbang nilai tambah terbesar ketiga di Kabupaten Lampung Timur. Kontribusi kategori ini pada tahun 2020-2024 berada pada kisaran 8,86 persen hingga 12,04 persen. Nilai tambah yang diciptakan kategori ini pada tahun 2024 adalah sebesar 6,84 triliun rupiah atau sebesar 12,04 persen dari total nilai tambah Kabupaten Lampung Timur. Pertumbuhan yang dialami kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor selama 2020-2024 berfluktuatif. Sementara itu, pada tahun 2020 pertumbuhan kategori ini mengalami kontraksi sebesar 2,40 persen. Seiring pulihnya kondisi sosial ekonomi pasca covid-19 serta pengurangan pembatasan aktivitas masyarakat di berbagai sektor, kategori ini kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2021-2024. Pertumbuhan kategori ini pada tahun 2024 sebesar 11,49 persen.

Kategori berikutnya adalah kategori transportasi dan pergudangan yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian daerah. Meskipun selama lima tahun terakhir peranan kategori ini terhadap pembentukan nilai tambah di Kabupaten Lampung Timur hanya kurang dari 3,00 persen, tetapi keberadaan kategori ini diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi dari kategori lapangan usaha lainnya. Nilai tambah yang tercipta dari kegiatan ekonomi kategori ini pada tahun 2024 sebesar 1.687,88 miliar rupiah atau sekitar 2,97 persen dari total PDRB Kabupaten Lampung Timur. Sejalan dengan pertumbuhan kategori perdagangan pada 2024 yang tumbuh signifikan positif, pertumbuhan kategori transportasi dan pergudangan pun mengalami hal yang sama. Kategori ini mengalami pertumbuhan signifikan positif, pertumbuhan signifikan positif sebesar 12,31 persen. Nilai pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 24,19 persen.

Selanjutnya, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Sumbangsih kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap perekonomian Lampung Timur relatif kecil dibandingkan kategori-kategori lainnya selama periode 2020-2024 yakni di bawah 2,00 persen. Nilai tambah yang diciptakan kategori ini hanya sebesar 764,39 miliar rupiah lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni sebesar 695,82 miliar rupiah. Pertumbuhan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2024 juga mulai tumbuh dengan persentase lebih kecil dibanding tahun lalu. Pada tahun 2024 kategori penyediaan

akomodasi dan makan minum tubuh positif sebesar 7,11 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,61 persen.

Lebih lanjut, pada tahun 2024 kategori lainnya yaitu kategori informasi dan komunikasi sedikit mengalami kenaikan kontribusi terhadap total ekonomi di Lampung Timur dibandingkan Tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai tambah yang diciptakan kategori ini menyokong 3,65 persen PDRB titik hal ini sejalan dengan pertumbuhan yang diciptakan kategori tersebut di mana pada tahun 2024 pertumbuhan kategori ini juga mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 9,00 persen. Meningkatnya pertumbuhan kategori informasi dan komunikasi dipengaruhi dari adanya kenaikan traffic penggunaan internet sejak bergabungnya Indihome dengan Telkomsel.

Pada kategori berikutnya, kategori jasa keuangan dan asuransi menyokong perekonomian Kabupaten Lampung Timur sebesar 1,34 persen pada 2024. Peranan kategori ini terhadap total PDRB belum banyak mengalami perubahan selama periode 2020-2024 kisaran kontribusi kategori ini masih di bawah 2,00 persen selama periode tersebut. Nilai tambah yang dihasilkan kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2024 sebesar 763,18 miliar rupiah. Pertumbuhan 7,50 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,73 persen pertumbuhan positif di tahun 2024 dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan sekunder bank umum dan pendapatan jasa keuangan lainnya.

Pada kategori real estate, dimana pada dasarnya seluruh kegiatan ekonomi baik dalam bidang jasa maupun barang akan selalu membutuhkan produk properti sebagai salah satu faktor produksi. Sebagai contoh, kegiatan jasa perbankan yang memberikan Jasa Keuangan juga masih memerlukan adanya produk properti secara aktif sebagai tempat atau sarana untuk melakukan transaksi. Demikian pula, kegiatan produksi atau perdagangan maupun perkebunan/pertanian akan selalu membutuhkan produk properti sebagai sarana kegiatannya. Dengan demikian kebutuhan akan produk properti akan terus menurun sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi suatu wilayah. Kategori real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Lampung Timur. Peranan kategori selama periode 2020-2024 berada pada kisaran 1,89 persen hingga 2,21 persen, dengan peranan tertinggi pada tahun 2020 dan peranan terendah pada tahun 2023. Rata-rata nilai tambah yang dihasilkan kategori ini selama 5 tahun terakhir sebesar 975,934 miliar rupiah. Pertumbuhan kategori real estate Selama 2020-2024 memiliki trend yang fluktuatif. Kategori ini menunjukkan percepatan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 8,42 persen, namun pada tahun 2020 aktivitas ekonomi pada kategori Real Estate turut mengalami kontraksi sebesar 1,44 persen yang salah satu pengaruhnya karena pandemi covid 19. Pada tahun 2024 aktivitas real estate tumbuh positif sebesar 8,42 persen.

Selanjutnya, kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan memberikan nilai tambah sebesar 49,29 miliar atau sebesar 0,09 persen pada tahun 2024. Peranan kategori ini di tahun 2020-2024 cenderung stabil dan relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya terhadap total perekonomian Lampung Timur. Pertumbuhan kategori ini



tahun 2024 tumbuh positif sebesar 9,05 persen. Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan Tahun 2023 dengan nilai pertumbuhan sebesar 4,85 persen.

Sedangkan kategori administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib memberikan nilai tambah sebesar 1,57 triliun rupiah atau sebesar 2,76 persen pada tahun 2024. Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya nilai PDRB kategori ini pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,99 persen. Pertumbuhan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,75 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya penurunan belanja pegawai pada APBD dan APBN.

Pada kategori selanjutnya, yaitu kategori jasa pendidikan, selama 5 tahun terakhir peranan kategori jasa pendidikan terhadap total ekonomi di Kabupaten Lampung Timur cukup stabil. Nilai tambah yang dihasilkan kategori ini berada pada kisaran 2,48 persen hingga 2,77 persen terhadap total PDRB pada tahun 2024 kategori ini mengalami pertumbuhan 1,62 persen.

Kategori berikutnya yang memberikan peranan dalam perekonomian yaitu kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pada tahun 2024, kategori tersebut berkontribusi sebesar 380,56 miliar rupiah terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur dan kontribusi tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu pada nilai 344,7 miliar rupiah. Kontribusi kategori ini terhadap PDRB hanya sebesar 0,67 persen. Laju pertumbuhan pada kategori ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 7,39 persen. Sepanjang tahun 2024 program kerja di bidang kesehatan untuk masyarakat dalam pengentasan stunting terus meningkat dan mempengaruhi pertumbuhan kategori ini tumbuh positif dibanding tahun sebelumnya.

Kategori terakhir adalah kontribusi jasa lainnya. Kontribusi jasa lainnya terhadap perekonomian Lampung Timur relatif kecil yakni 718,41 miliar rupiah atau sebesar 1,26 persen di mana peranan ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami pertumbuhan signifikan sejak tahun 2022-2023 sebesar 32,63 persen dan 15,11 persen. Hal ini disebabkan tempat hiburan dan rekreasi yang mulai kembali ramai setelah 2 tahun mengalami pembatasan akibat pandemi covid-19. Fasilitas jasa perorangan seperti salon, klinik kecantikan juga mengalami peningkatan pelanggan kembali. Selain itu banyak bermunculan jasa perorangan baru setelah pandemi berakhir.

Sebagaimana diketahui, selain perkembangan PDRB dari sisi lapangan usaha, PDRB Kabupaten Lampung Timur juga dapat ditinjau dari sisi pengeluaran. Dari sisi pengeluaran perkembangan ekonomi daerah menunjukkan performa yang baik pada tahun 2024. Di tengah situasi ekonomi yang semakin membaik terjadi peningkatan PDRB ADHB yang cukup signifikan di Kabupaten Lampung Timur yakni sebesar 3,98 triliun dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan PDRB ADHB Kabupaten Lampung Timur tersebut sejalan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk harga-harga komoditas secara umum inflasi, dan



rata-rata pengeluaran per kapita. Sama halnya dengan PDRB ADHB, hampir seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK tahun 2021-2024 cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 PDRB ADHK seluruh komponen pengeluaran konsumsi di Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, PMBT dan realisasi belanja daerah Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan PDRB ADHK, pada tahun 2024 total ekonomi Kabupaten Lampung Timur meningkat sebesar 1414,22 miliar rupiah. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang terbesar ekonomi Kabupaten Lampung timur mengalami peningkatan sebesar 957,55 miliar rupiah. Berbanding terbalik dengan peningkatan pada konsumsi rumah tangga, ekspor netto produk-produk Kabupaten Lampung Timur ke luar wilayah kabupaten pada 2024 justru mengalami penurunan. Nilai ekspor netto nya menjadi bernilai minus 139,03 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa, dinilai dengan harga tahun 2010, pada tahun 2024 nilai impor Kabupaten Lampung Timur lebih besar dari nilai ekspor. Kondisi ini sejalan dengan menurunnya produksi minyak dan sebagian besar produksi komoditas pertanian akibat El Nino di wilayah Lampung Timur.

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Dalam kurun waktu 2020-2024, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal maupun riil sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode 2020-2024 cukup berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 65,05 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 60,88 persen. Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga terjadi pada seluruh komponen komoditas konsumsi akhir rumah tangga. Kondisi ini sejalan dengan adanya penetapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 terkait dengan kenaikan UMK yang diterapkan sejak awal tahun 2023.

Peranan berikutnya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Timur adalah peranan sektor konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah sangat kecil. Jika dinilai ADHK 2010, maka nilai konsumsi lembaga swasta nirlaba tahun 2020 sebesar 437,46 miliar rupiah, meningkat menjadi 557,81 miliar rupiah. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan konsumsi LNPRRT sebesar 11,49 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi LNPRRT yang cukup Signifikan pada tahun 2024 sejalan dengan meningkatnya aktivitas politik menjelang Pilkada.

Selanjutnya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Timur sektor pengeluaran, konsumsi akhir pemerintah pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,75 ditinjau dari



ADH konstan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

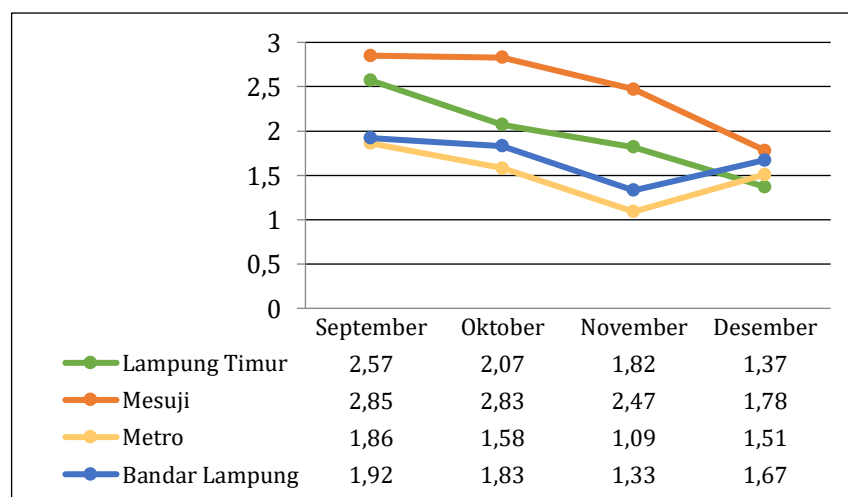
Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir rumah tangga maupun pemerintah, pembentukan modal tetap bruto juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Kontribusi komponen ini dalam PDRB Kabupaten Lampung Timur menempati posisi kedua setelah komponen konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2020-2024 berfluktuatif dan mengalami kontraksi sebesar 4,68 persen pada tahun 2020.

Sektor lainnya yaitu net ekspor di Kabupaten Lampung Timur terus bernilai negatif sejak tahun 2020 sebagai akibat adanya penurunan ekspor gas dan minyak bumi asal Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, kondisi ekspor di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 juga disebabkan oleh menurunnya produksi mayoritas komoditas pertanian akibat terjadinya El Nino.

Perkembangan ekonomi daerah tahun 2024, selain ditunjang oleh perkembangan nilai tambah PDRB juga dipengaruhi oleh perkembangan laju inflasi daerah. Terhitung tahun 2024, terdapat dua Kabupaten baru yang menjadi wilayah penyumbang Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Mesuji. Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah baru penyumbang Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Timur menyumbang sekitar 28 persen terhadap IHK gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Timur pada bulan September 2024 inflasi *year to year* sebesar 2,57 persen, atau tertinggi kedua di Provinsi Lampung. Selanjutnya pada bulan Oktober turun menjadi 2,07%. Pada bulan November 2024 turun kembali menjadi 1,82 persen dan pada bulan Desember turun menjadi 1,37 persen. Perkembangan inflasi Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.1
Perkembangan Inflasi *Year to Year* Tahun 2024

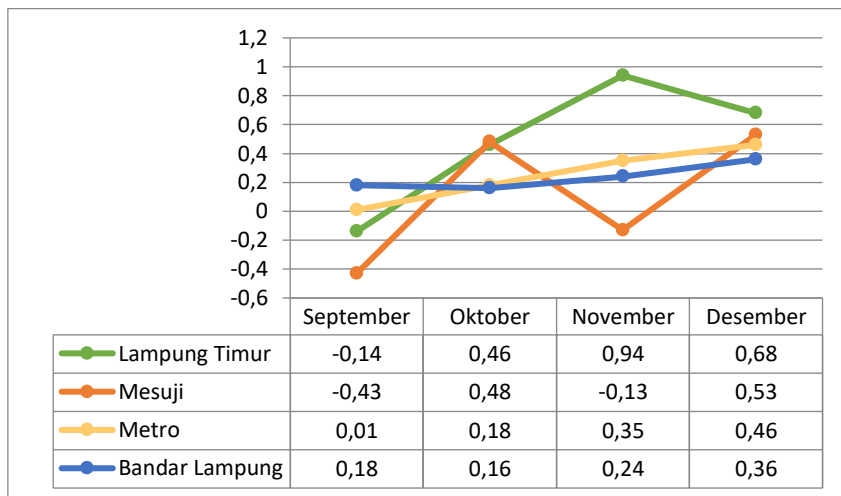


Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025



Apabila ditinjau dari perkembangan inflasi *month to month* tahun 2024, pada bulan September sebesar -0,14 persen, kemudian meningkat menjadi 0,46 persen di bulan Oktober dan 0,94 persen di bulan November 2024. Pada bulan Desember mengalami inflasi sebesar 0,68 persen.

Grafik 3.2
Perkembangan Inflasi *Month to Month* Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Selanjutnya, apabila ditinjau dari perkembangan inflasi selama tahun 2024, yaitu inflasi *year to date*, pada bulan Desember inflasi *year to date* sebesar 1,37 persen. Angka tersebut berada di urutan terakhir inflasi *year to date* ketiga kabupaten lainnya, dan berada di bawah inflasi *year to date* provinsi dan nasional sebesar 1,57 persen.

Tabel 3.1
Perkembangan Inflasi *Month to Date* Tahun 2024

Kab/Kota	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi y-to-d (%)	Inflasi m-to-m (%)
Lampung Timur	110,55	1,37	1,37	0,68
Mesuji	111,14	1,78	1,78	0,53
Metro	106,43	1,51	1,51	0,46
Bandar Lampung	107,4	1,67	1,67	0,36
Provinsi Lampung	103,43	1,57	1,57	0,47
Nasional	106,8	1,57	1,57	0,44

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Tingginya inflasi *year to year* yang terjadi banyak disebabkan oleh kenaikan harga komoditas bahan pokok masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi *year to year* pada inflasi tertinggi yaitu bulan September 2024 ditampilkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1
Komoditas dengan Andil Inflasi Terbesar September-Oktober 2024



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Inflasi yang terjadi banyak dipengaruhi oleh kenaikan bawang merah. Kenaikan tersebut dipicu oleh penurunan pasokan akibat jeda panen, cuaca tidak mendukung, dan kenaikan biaya produksi serta distribusi, yang berujung pada inflasi bahan makanan. Selain itu, komoditas bawang merah sebagian besar merupakan impor dari luar daerah menjadi komoditas yang menyumbang andil terbesar dalam inflasi di bulan September 2024.

3.1.3.2. Proyeksi Tahun 2025 dan Tahun 2026

3.1.3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 merujuk pada perkembangan ekonomi daerah hingga awal tahun 2025, baik perkembangan ekonomi daerah maupun peluang ekonomi regional dan internasional yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah. Perkembangan ekonomi tahun 2024 berpedoman pada laporan perkembangan ekonomi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lampung Timur yang merupakan laporan terakhir yang tersedia.

Perkembangan ekonomi pada tahun 2024 ditinjau dari PDRB dengan migas menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 sebesar 56,85 triliun, atau meningkat sebesar 7,53 persen dari tahun 2023. Pertumbuhan positif sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2024, setelah kurun waktu tiga tahun terakhir tumbuh negatif, diharapkan dapat terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2026. Meskipun pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian penuh risiko akibat pertumbuhan konsumsi minyak mentah dunia yang diperkirakan melambat dalam dua tahun kedepan, akibat pasokan melimpah hingga perlambatan ekonomi dunia.

Risiko pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian diharapkan dapat ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang pada tahun 2024 lalu mengalami perlambatan pertumbuhan. Prediksi cuaca yang relatif baik pada tahun 2026 diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi komoditas unggulan daerah, khususnya dalam mendorong swasembada pangan daerah. Pertumbuhan produksi komoditas pertanian dan perikanan dibayangi oleh potensi turunnya harga komoditas

pertanian di tahun 2026, terutama komoditas pangan dan energi, akibat pasokan global dan situasi geopolitik dan ekonomi.

Sebagai salah satu daerah agraris di Provinsi Lampung, sektor pertanian diprediksi tetap menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan peningkatan produktivitas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2026 diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 4,68-5,00 persen dengan didukung oleh kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan infrastruktur daerah, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan daya saing daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Kabupaten Lampung Timur diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional. Proyeksi peningkatan target pertumbuhan ekonomi daerah pada RKPD tahun 2026 sejalan proyeksi peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, serta sejalan dengan akselerasi permintaan domestik pada periode HBKN keagamaan dan peningkatan investasi daerah pasca pilkada. Dari sisi lapangan usaha, kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran diperkirakan meningkat sejalan dengan tetap kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan prospek peningkatan pendapatan. Adapun kinerja lapangan usaha pertanian di prakirakan meningkat meski masih berkontraksi sejalan dengan mundurnya puncak produksi padi. Di sisi lain, prakiraan perlambatan kinerja perekonomian terutama sejalan dengan prakiraan perlambatan kinerja lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha pertambangan. Kinerja lapangan usaha konstruksi diperkirakan meningkat seiring dengan prakiraan meningkatnya kinerja investasi pasca pilkada. Lebih lanjut, masuknya musim hujan pada triwulan I tahun 2025 diperkirakan berdampak pada termoderasinya produksi lapangan usaha pertambangan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada pada jalur positif di tengah dinamika ekonomi global yang masih menghadapi risiko ketidakpastian. Kinerja ekonomi daerah tahun 2026 didukung oleh prospek tetap kuatnya permintaan domestik, yang sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, membaiknya kepercayaan konsumen, serta optimisme pelaku usaha yang terus menguat. Selain itu, kebijakan fiskal yang ekspansif dari pemerintah daerah, terutama melalui percepatan belanja pembangunan dan perlindungan sosial, menjadi motor penggerak utama dari sisi permintaan agregat. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap tumbuh kuat seiring dengan membaiknya daya beli dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengeluaran pemerintah daerah juga diperkirakan meningkat sejalan dengan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, investasi diperkirakan menunjukkan tren peningkatan, didukung oleh perbaikan iklim usaha dan penguatan infrastruktur dasar. Dari sisi penawaran, kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran diperkirakan terus meningkat, seiring dengan prospek konsumsi swasta (rumah tangga dan LNPR) yang lebih baik. Sektor ini juga akan mendapat

dorongan dari pengembangan UMKM dan penguatan rantai pasok lokal. Sementara itu, sektor pertanian tetap menjadi andalan utama perekonomian Lampung Timur. Dengan dukungan kondisi cuaca yang lebih kondusif dan peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi pertanian, kinerja lapangan usaha pertanian diperkirakan meningkat secara moderat. Namun demikian, tantangan masih berasal dari sisi eksternal, terutama terkait dengan potensi perlambatan ekonomi global dan menurunnya permintaan dari negara tujuan ekspor maupun luar daerah terhadap beberapa komoditas unggulan. Hal ini berpotensi menahan laju pertumbuhan ekspor daerah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diversifikasi pasar dan penguatan hilirisasi komoditas lokal menjadi agenda penting dalam strategi pembangunan ekonomi daerah tahun 2026.

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2026 diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan dan terjaganya optimisme di tengah laju inflasi yang lebih terkendali. Akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga terutama didukung oleh berlanjutnya pemulihan kegiatan usaha dan maraknya investasi swasta pasca aktivitas politik pada periode pemilihan umum serentak yang mendorong peningkatan aktivitas swasta. Optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian ke depan cenderung meningkat setelah menghadapi tantangan peningkatan laju inflasi dan penurunan pendapatan ekspor pada tahun 2023 hingga 2025. Optimisme tersebut tahun konfirmasi dari hasil laporan kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi Lampung yang menunjukkan peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap penjualan dan penyerapan tenaga kerja di tengah kenaikan UMP Lampung sebesar 6,50 persen pada tahun 2025.

Kinerja konsumsi pemerintah daerah diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan pagu belanja pemerintah daerah dalam APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pagu belanja infrastruktur dan belanja sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor strategis yang akan mampu memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan sektor ekonomi daerah lainnya.

Kinerja investasi di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2026 diperkirakan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terutama didorong oleh semakin meningkatnya iklim investasi yang didorong peningkatan layanan perizinan, mulai pulihnya minat investasi swasta pasca selesainya tahun politik. Stabilitas politik dan membaiknya iklim usaha menjadi faktor kunci yang mendorong kepercayaan pelaku usaha untuk menanamkan modal, khususnya di sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan, agribisnis, dan infrastruktur pendukung. Sementara itu, sektor pertanian yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah diproyeksikan terus mencatatkan kinerja positif pada tahun 2026. Perkiraan peningkatan produksi pertanian, khususnya padi, menjadi motor utama pertumbuhan sektor ini. Dukungan infrastruktur pertanian yang telah dibangun sebagai bagian dari respons terhadap tantangan iklim pada tahun-tahun sebelumnya juga memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan produksi. Dengan demikian, sektor pertanian pada tahun 2026 diperkirakan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan

ekonomi daerah, sekaligus sebagai sumber ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di Lampung Timur.

Permintaan domestik yang tetap kuat diperkirakan akan terus menjadi pendorong utama kinerja lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2026. Akselerasi pertumbuhan sektor ini didukung oleh permintaan masyarakat yang semakin solid, baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan antara industri lokal. Stabilitas pendapatan dan meningkatnya konsumsi menjadi faktor penting dalam menopang permintaan terhadap produk-produk olahan lokal. Kebijakan belanja infrastruktur yang akan dilanjutkan dan diperkuat dalam RKPD tahun 2026 diproyeksikan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi efisiensi produksi dan distribusi barang. Peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta sarana penunjang logistik lainnya diharapkan mampu menurunkan biaya logistik secara bertahap dan meningkatkan daya saing industri pengolahan lokal di pasar regional. Selain itu, kemantapan infrastruktur juga diperkirakan akan mendorong kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang semakin terintegrasi dengan sektor industri. Sektor ini berperan penting dalam mendukung kelancaran arus barang dan distribusi hasil produksi ke luar daerah maupun ke pasar lokal. Lebih jauh, perbaikan infrastruktur juga membuka peluang untuk pengembangan potensi sektor pariwisata dan kebudayaan lokal. Aksesibilitas yang lebih baik ke destinasi wisata unggulan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, menciptakan permintaan baru atas produk-produk lokal, serta memperkuat keterkaitan antar sektor ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

3.1.3.2.2. PDRB Perkapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Timur mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreativitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasannya, indikator PDRB per kapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan PDRB per kapita tidak hanya terjadi secara riil tapi juga terjadi secara kualitas. Berdasarkan teori tersebut, dan sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2026, diproyeksikan PDRB per kapita pada tahun 2026 akan mencapai kisaran Rp.51,50-51,76 juta per kapita per tahun, atau lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi tahun 2025.

3.1.3.3. Inflasi

Perkembangan ekonomi daerah tahun 2025, selain ditunjang oleh perkembangan nilai tambah PDRB juga dipengaruhi oleh perkembangan laju inflasi daerah. Terhitung pada tahun 2024, terdapat dua Kabupaten baru yang menjadi wilayah penyumbang Indeks Harga



Konsumen (IHK) gabungan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Mesuji. Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah baru penyumbang Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Timur menyumbang sekitar 28 persen terhadap IHK gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Timur pada bulan September 2024 inflasi *year to year* sebesar 2,57 persen, atau tertinggi kedua di Provinsi Lampung. Selanjutnya pada bulan Oktober sampai Desember turun setiap periodenya secara berurutan sebesar 2,07 persen, 1,82 persen, dan 1,37 persen. Apabila ditinjau dari perkembangan inflasi *month to month* tahun 2024, pada bulan September sebesar -0,14 persen, kemudian meningkat menjadi 0,46 persen di bulan Oktober dan 0,94 persen di bulan November 2024. Kemudian pada bulan Desember terjadi inflasi sebesar 0,68 persen. Selanjutnya, apabila ditinjau dari perkembangan inflasi selama tahun 2024, yaitu inflasi *year to date*, pada bulan Desember inflasi *year to date* sebesar 1,37 persen. Angka tersebut berada di urutan terakhir inflasi *year to date* ketiga kabupaten lainnya, dan berada di bawah inflasi *year to date* provinsi dan nasional sebesar 1,57 persen.

Inflasi yang terjadi banyak dipengaruhi oleh kenaikan bawang merah. Kenaikan tersebut dipicu oleh penurunan pasokan akibat jeda panen, cuaca tidak mendukung, dan kenaikan biaya produksi serta distribusi, yang berujung pada inflasi bahan makanan. Selain itu, komoditas bawang merah sebagian besar merupakan impor dari luar daerah menjadi komoditas yang menyumbang andil terbesar dalam inflasi di bulan September 2024. Mencermati kondisi tersebut di atas, proyeksi inflasi daerah, berdasarkan capaian inflasi daerah tahun 2024 sebesar 1,37 persen dan berbagai program pengendalian inflasi oleh TPID diperkirakan pada Tahun 2026 secara kumulatif inflasi *year to year* Kabupaten Lampung Timur berada pada kisaran angka 1,36-1,35 persen.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kemajuan suatu daerah. Ketika aktivitas ekonomi daerah meningkat, berbagai sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, pertanian, dan jasa mengalami perkembangan yang signifikan. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan output dan produktivitas, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Salah satu manifestasi nyata dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan literatur diketahui bahwa peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah. Selain berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, perkembangan ekonomi skala nasional juga akan berpengaruh terhadap penerimaan negara yang pada akhirnya akan berdampak terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat ke daerah.



Mencermati kondisi dan perkembangan ekonomi nasional dan daerah pada tahun 2024-2025 di atas, serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2026, yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan asli daerah dan juga pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan Provinsi Lampung. Pada tahun 2026, pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur diproyeksikan lebih rendah dibandingkan proyeksi dalam APBD Murni 2025. Penurunan ini bersumber dari proyeksi pendapatan transfer yang diproyeksikan lebih rendah, yang diakibatkan dari belum diproyeksikannya pendapatan Dana Alokasi Fisik (DAK) baik DAK fisik maupun DAK non fisik sampai dengan terbitnya info resmi dari Kementerian Keuangan. Hal ini merujuk ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk proyeksi pendapatan bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpedoman pada alokasi tahun anggaran sebelumnya.

Pada pos Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat sebesar Rp.10.620.207.857,00 yang bersumber dari peningkatan Pajak Daerah sebesar Rp.7.740.000.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.3.496.194.492,00. Peningkatan Pajak Daerah diproyeksikan bersumber dari peningkatan pendapatan pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, dan opsen pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya untuk proyeksi peningkatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bersumber dari Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BUMD.

Lebih lanjut, pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan diproyeksikan menurun masing-masing sebesar Rp.320.900.000,00 dan Rp.295.086.635,00. Penurunan Retribusi Daerah diproyeksikan bersumber dari penurunan retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, serta retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Secara terinci, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026, dengan mengacu pada hasil Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2022 s.d Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD	Proyeksi
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.078.803.898.819,06	2.131.663.102.999,38	2.337.112.000.417,93	2.413.455.608.342,00	1.973.148.487.059,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	195.574.745.737,06	196.136.238.928,38	207.567.574.087,17	280.046.453.121,00	290.666.660.978,00
4.1.01	Pajak Daerah	75.046.328.357,01	83.816.436.780,30	83.550.226.924,00	152.870.000.000,00	160.610.000.000,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	4.227.546.505,00	4.704.579.364,00	3.749.508.473,00	110.201.453.121,00	109.880.553.121,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.757.680.393,39	3.020.927.854,18	3.204.913.365,59	6.500.000.000,00	6.204.913.365,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113.543.190.481,66	104.594.294.929,90	117.062.925.324,58	10.475.000.000,00	13.971.194.492,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.883.229.153.082,00	1.935.526.864.071,00	2.129.471.992.656,00	2.133.409.155.221,00	1.682.481.826.081,00
4.2.01	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	1.767.189.361.435,00	1.826.894.762.966,00	1.999.880.925.177,00	2.013.269.889.000,00	1.585.910.364.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.488.005.997.635,00	1.557.560.248.866,00	1.728.318.848.377,00	1.743.767.603.000,00	1.316.408.078.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	77.381.416.933,00	75.432.109.191,00	88.946.258.000,00	65.609.518.000,00	65.609.518.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	987.195.089.258,00	1.077.274.703.452,00	1.193.360.241.000,00	1.250.798.560.000,00	1.250.798.560.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	423.429.491.444,00	404.853.436.223,00	446.012.349.377,00	427.359.525.000,00	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-
4.2.01.03	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	279.183.363.800,00	269.334.514.100,00	271.562.076.800,00	269.502.286.000,00	269.502.286.000,00
4.2.02	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	116.039.791.647,00	108.632.101.105,00	129.591.067.479,00	120.139.266.221,00	96.571.462.081,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	116.039.791.647,00	108.632.101.105,00	129.591.067.479,00	120.139.266.221,00	96.571.462.081,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	72.433.674,76	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	72.433.674,76	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-

Sumber : LRA dan TAPD Kabupaten Lampung Timur, 2025

Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp1.973.148.487.059,00, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan berbagai upaya kebijakan dan strategi yang terarah dan berkelanjutan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah, peningkatan akurasi data wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung sistem pembayaran pajak dan retribusi yang lebih efektif dan transparan. Upaya peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui beberapa strategi, termasuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, peningkatan pelayanan, serta pemanfaatan teknologi.

- Ekstensifikasi Pajak:

1. Pendataan Ulang Wajib Pajak: Melakukan sensus pajak dan pemutakhiran data wajib pajak untuk memastikan semua potensi pajak tergali.
2. Perluasan Basis Pajak: Menjangkau wajib pajak baru dan objek pajak yang belum terdata.
3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga: Melibatkan pihak swasta atau LSM dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.

- Intensifikasi Pajak:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak agar mereka taat membayar pajak.
2. Penyederhanaan Sistem: Memudahkan proses pembayaran dan pelaporan pajak, misalnya melalui sistem online.
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melakukan sosialisasi dan edukasi pajak agar masyarakat memahami manfaat pajak.



- Pemanfaatan Teknologi:
 1. Sistem Pajak Online: Menerapkan sistem pembayaran dan pelaporan pajak berbasis digital untuk mempermudah wajib pajak dan meningkatkan akurasi data.
 2. Pengembangan Aplikasi: Membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran pajak.
 3. Kerjasama dengan Perbankan: Memanfaatkan layanan perbankan untuk pembayaran pajak.
- Strategi Tambahan:
 1. Penyempurnaan Peraturan Daerah: Menyesuaikan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah agar lebih efektif.
 2. Peningkatan Pengawasan: Mengoptimalkan pengawasan terhadap wajib pajak untuk mencegah kecurangan.
 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kualitas SDM di bidang perpajakan agar lebih profesional.
 4. Evaluasi dan Monitoring: Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program peningkatan pajak daerah.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan penerimaan pajak daerah dapat meningkat, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah.

Terkait Optimalisasi penerimaan daerah dari Opsen PKB yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur meliputi melakukan penagihan PKB secara door to door ke wajib pajak, memfasilitasi pelaksanaan Tim Gabungan Lalulintas terkait sosialisasi pemanfaatan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, menggerakkan bumdes-bumdes yang ada di Kabupaten Lampung Timur sebagai tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta menyusun dan menyiapkan fasilitas berupa samsat drive true yang berlokasi di Kecamatan Mataram Baru guna memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Kemudian terkait optimalisasi PKB pada Kendaraan Dinas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur pada saat Asistensi Belanja Daerah Tahun 2025 telah melakukan upaya dengan mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk menganggarkan Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan empat yang dikuasai masing-masing OPD.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan

urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Berdasarkan uraian tersebut, pada Tahun 2026 belanja daerah akan diprioritaskan pada belanja dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026.

Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Penggunaan dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal Aset tetap lainnya, belanja modal Aset lainnya dan Belanja Modal BLUD. Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Penjelasan mengenai belanja- belanja tersebut sebagaimana uraian berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja pegawai, yang meliputi:

Gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-



undang yang berlaku. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran Askes PNS. Selain itu juga sudah dianggarkan belanja pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2025 sudah diperhitungkan dengan kenaikan BPJS bagi ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

2. Belanja Bunga

Belanja bunga belum dianggarkan hingga penyusunan Rancangan RKPD 2026 Kabupaten Lampung Timur.

3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi tidak dialokasikan.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2026





C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Perkembangan realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2022 s.d Tahun 2026

Kode Rekening 1	Uraian 2	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi 3	Realisasi 4	Realisasi 5	APBD 6	Proyeksi 7
5	BELANJA DAERAH	2.064.320.644.252,00	2.096.191.300.837,69	2.309.190.574.317,60	2.430.455.608.342,00	1.978.148.487.059,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.416.649.650.454,95	1.502.632.678.655,97	1.582.938.466.132,90	1.711.473.041.675,70	1.377.430.376.486,60
5.1.01	Belanja Pegawai	817.273.946.088,70	819.359.372.551,67	877.743.801.240,51	1.022.456.922.613,00	953.430.205.613,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.588.286.384,11	445.583.187.092,82	461.577.506.441,49	534.009.010.184,02	329.463.881.406,00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	153.169.119.782,14	234.335.347.242,48	241.174.866.230,90	153.755.487.878,68	92.536.289.467,60
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.618.298.200,00	3.354.771.769,00	2.442.292.220,00	1.251.621.000,00	2.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	186.716.318.176,05	188.842.370.386,72	320.800.571.557,70	235.980.805.360,30	135.980.805.360,30
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.349.699.200,00	34.370.000,00	4.913.057.922,00	34.463.881.406,00	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	459.604.976.421,00	404.681.881.795,00	400.538.478.705,00	448.537.879.900,00	459.737.305.212,10
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.314.612.984,00	-	7.412.100.000,00	15.849.630.000,00	27.049.055.312,10
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	446.290.363.437,00	404.681.881.795,00	393.126.378.705,00	432.688.249.900,00	432.688.249.900,00

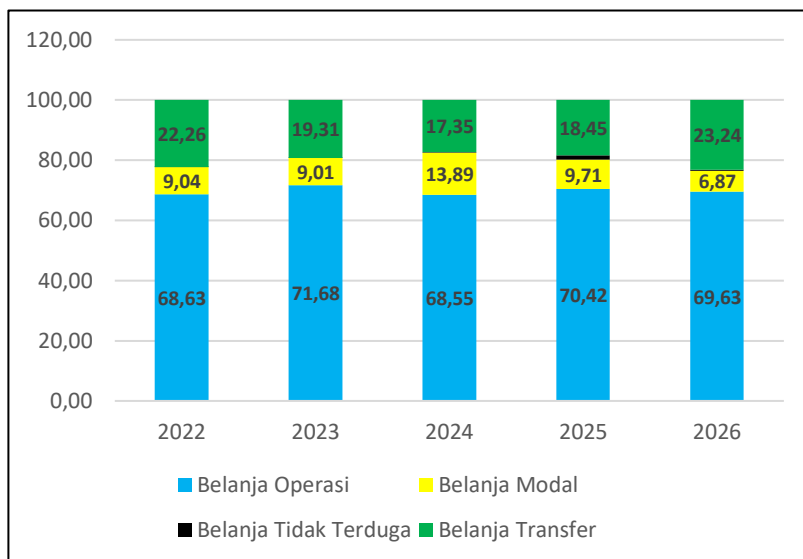
Sumber : LRA dan TAPD Kabupaten Lampung Timur, 2025

Pada tahun 2026, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp.1.978.148.487.059,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.1.377.430.376.486,60, Belanja Modal Rp.135.980.805.360,30, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.5.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.459.737.305.212,10. Belanja Daerah akan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur sebagai pendorong utama peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. penekanan belanja daerah pada tiga sektor strategis ini (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan daerah. Semua diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, dan mendorong perekonomian daerah agar lebih berdaya saing secara berkelanjutan.

Kurun waktu lima tahun terakhir, belanja operasi merupakan belanja dengan komposisi terbesar, fluktuatif dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Kontribusi belanja pegawai terhadap belanja operasi lebih dari 50 persen setiap tahunnya, dengan kecenderungan semakin menurun. Belanja Pegawai Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diproyeksikan sebesar 31 persen. Secara bertahap akan menuju alokasi belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.



Gambar 3.2
Perkembangan Komposisi Belanja Daerah Tahun 2022-2026



Sumber : LRA Kabupaten Lampung Timur, 2025

Belanja berikutnya yang berkontribusi terbesar terhadap belanja daerah adalah belanja transfer. Berdasarkan alokasinya, belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa serta belanja bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Kurun waktu lima tahun terakhir, besaran persentase belanja transfer pemerintah kabupaten ke pemerintah daerah rata-rata mencapai 20,12 persen dengan kecenderungan meningkat. Belanja yang berkontribusi terbesar berikutnya adalah belanja modal. Persentase belanja modal kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata sebesar 9,7 persen dengan kecenderungan menurun pada dua tahun terakhir.

3.2.2.1. Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi kurun waktu empat tahun terakhir rata-rata mencapai 69,82 persen, dengan komposisi tertinggi pada tahun 2023 yang mencapai 71,68 persen. Pada tahun 2026, belanja operasi diproyeksikan mencapai 69,63 persen, lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun 2025. Persentase realisasi dan proyeksi belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2022-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perkembangan Kontribusi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	%
2022	1.416.649.650.454,95	2.064.320.644.252,00	68,63
2023	1.502.632.678.655,97	2.096.191.300.837,69	71,68
2024	1.582.938.466.132,90	2.309.190.574.317,60	68,55
2025	1.711.473.041.675,70	2.430.455.608.342,00	70,42
2026	1.377.430.376.486,60	1.978.148.487.059,00	69,63

Sumber : LRA Kabupaten Lampung Timur, 2025



3.2.2.2. Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Belanja Modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Berdasarkan data, kontribusi belanja modal terhadap belanja daerah kurun waktu empat tahun terakhir rata-rata sebesar 10,41 persen, dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2024 yang mencapai 13,89 persen. Pada tahun 2026, belanja operasi diproyeksikan mencapai 6,87 persen, lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun 2025. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi dengan belum teralokasikannya belanja yang bersumber dari DAK Fisik tahun 2026. Rincian persentase belanja modal terhadap belanja daerah tahun 2022-2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Perkembangan Kontribusi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	%
2022	186.716.318.176,05	2.064.320.644.252,00	9,04
2023	188.842.370.386,72	2.096.191.300.837,69	9,01
2024	320.800.571.557,70	2.309.190.574.317,60	13,89
2025	235.980.805.360,30	2.430.455.608.342,00	9,71
2026	135.980.805.360,30	1.978.148.487.059,00	6,87

Sumber : LRA Kabupaten Lampung Timur, 2025

3.2.2.3. Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Merujuk kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja transfer yang dimaksud adalah belanja transfer dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Kontribusi belanja transfer terhadap belanja daerah kurun waktu empat tahun terakhir mencapai 19,34 persen, dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2022 yang mencapai 22,26 persen. Pada tahun 2026, belanja operasi diproyeksikan mencapai 23,24 persen, lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun 2025. Rincian persentase belanja transfer terhadap belanja daerah tahun 2022-2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Perkembangan Kontribusi Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Transfer	Belanja Daerah	%
2022	459.604.976.421,00	2.064.320.644.252,00	22,26
2023	404.681.881.795,00	2.096.191.300.837,69	19,31
2024	400.538.478.705,00	2.309.190.574.317,60	17,35
2025	448.537.879.900,00	2.430.455.608.342,00	18,45
2026	459.737.305.212,10	1.978.148.487.059,00	23,24

Sumber : LRA Kabupaten Lampung Timur, 2025



3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Penyertaan Modal/Investasi Daerah. Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 s/d 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2022 s.d Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD	Proyeksi
1	2	3	4	5	6	7
6	PEMBIAYAAN DAERAH	39.798.662.339,30	54.281.916.906,36	87.684.419.054,05	17.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	39.798.662.339,30	54.281.916.906,36	87.684.419.054,05	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	39.798.662.339,30	54.281.916.906,36		20.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	39.798.662.339,30	52.281.916.906,36	87.684.419.054,05	17.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	54.281.916.906,36	87.753.719.068,05	-	-	-

Sumber : LRA Kabupaten Lampung Timur, 2025

Tahun 2026, komponen pembiayaan daerah mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total pembiayaan daerah yang direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.12.000.000.000,00 atau 70,59 persen dari proyeksi tahun 2025 yang mencapai Rp.17.000.000.000,00. Di sisi lain, diproyeksikan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2026 meningkat, yang akan dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Lebih lanjut, dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendanaannya, dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta alternatif pendanaan lain seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang dapat dipenuhi dari sumber dana non-pemerintah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat berinovasi dalam pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif selain dari APBD dan APBN. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan pembiayaan hutang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan hutang daerah dapat terdiri dari pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah.

Inovasi pemerintah daerah untuk pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif juga merujuk dinamika dalam beberapa tahun terakhir, dimana dinamika fiskal nasional menunjukkan adanya potensi penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat ke daerah, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),



maupun Dana Transfer Lainnya. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik yang semakin kompleks. Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ekonomi lokal terus meningkat. Untuk menjawab tantangan tersebut, alternatif pembiayaan melalui pinjaman daerah menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Melalui mekanisme pinjaman, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal tambahan untuk mendanai proyek-proyek strategis dan produktif yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan pinjaman daerah, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat direalisasikan lebih cepat tanpa menunggu ketersediaan dana dari transfer pusat yang cenderung fluktuatif. Selain sebagai solusi atas keterbatasan fiskal, pinjaman daerah juga berfungsi sebagai instrumen penguatan tata kelola keuangan daerah. Proses pengajuan dan pelaksanaan pinjaman menuntut perencanaan yang matang, analisis kelayakan yang terukur, serta akuntabilitas tinggi dalam pelaksanaan dan pelaporan. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pembiayaan, tetapi juga mendorong disiplin fiskal dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemanfaatan pinjaman daerah secara tepat sasaran akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian, meningkatkan daya saing wilayah, serta mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam situasi menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, pinjaman daerah menjadi pilihan strategis dan solutif untuk menjaga momentum pembangunan, memperkuat kemandirian fiskal, serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Percepatan pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang mengamanatkan percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan inovatif daerah meliputi dan tidak terbatas pada : pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah, KPBU, BUMD, BLUD, filantropi, ziswaf, skema CSR, dan skema pendanaan lainnya. Penggunaan pendanaan alternatif pada pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pendanaan daerah dalam mengelola pelayanan publik, meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, serta meningkatkan potensi pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Lampung Timur pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Lampung demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMN 2025-2029 Dan RKP 2026

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.





7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan 2045 yaitu Indonesia Maju, RPJMN 2025-2029 menjadi dasar hukum penyusunan rencana kerja di Kementerian/Lembaga dan menjadi pedoman bagi rencana pembangunan daerah. Dengan 5 sasaran pembangunan yang berfokus pada:

1. Meningkatkan pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju
2. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

Terdapat delapan program hasil terbaik cepat ditujukan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Visualisasi uraian delapan program hasil terbaik cepat dijabarkan sebagai berikut.

1. Memberi Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil
2. Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah, dan Nasional
4. Membangun Sekolah-Sekolah Unggul Terintegrasi di Setiap Kabupaten, dan Memperbaiki Sekolah Sekolah yang Perlu Renovasi
5. Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut
6. Menaikkan Gaji ASN (Terutama Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh), TNI/POLRI, dan Pejabat Negara
7. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%

Dengan mempedomani RPJMN 2025-2029 telah dijabarkan pada RKP Tahun 2026 dengan tema ***"Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"***. Dalam pelaksanaan tema pembangunan tersebut, ditetapkan Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025– 2029 disusun dengan





memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045. Delapan Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret. Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2026 dituangkan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2026. Delapan PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2026 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya. Dalam pelaksanaan hal tersebut, pembangunan nasional di tahun 2026 memiliki sasaran pokok sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1
Indikator Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2029
Pertumbuhan PDB (%)	8,00
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,20
Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,00
Rasio Gini	0,372-0,375
Indeks Modal Manusia (IPM)	0,59
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	45,17

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

4.1.2. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung Dan RKPD Tahun 2026 Provinsi Lampung

Dalam rangka memastikan konsistensi dan sinergi antara perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih luas, penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 dilakukan dengan mengacu dan memperhatikan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa: ***“Perencanaan Pembangunan Daerah Menjadi Satu Kesatuan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”***. Memperhatikan faktor internal : Lampung memiliki modal dasar pada aspek geografis dan demografi; daya dukung dan daya tampung lingkungan, capaian pembangunan sebelumnya, yang dikombinasikan dengan perhatian terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan lingkup daerah memperhatikan faktor eksternal : tantangan dan isu strategis pembangunan pada lingkup global, arah kebijakan pembangunan nasional, dan lingkup kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.





RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 mengusung visi: ***"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas"***, yang dijabarkan ke dalam tiga misi utama atau *Tiga Cita*, yakni:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif
2. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, arah kebijakan Provinsi Lampung dalam RPJMD 2025–2029 memfokuskan pembangunan pada peningkatan produktivitas daerah, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui optimalisasi potensi lokal, serta reformasi tata kelola pemerintahan. Pemerintah Provinsi Lampung juga menekankan pentingnya peran kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026, yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD, menetapkan arah pembangunan dengan tema: ***"Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***. Prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026 mencakup penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta penguatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup.

Tabel 4. 2
Indikator Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	CAPAIAN PROVINSI 2024	TARGET PROVINSI 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	5,0-5,4
Inflasi (%)	1,50	2,5 -/+ 1,0
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	51,4 (2024)**	54,0-56,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19	3,90-4,10
Tingkat Kemiskinan (%)	10,69	9,25-9,75
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,13	73,80-74,4
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,52 (2023)*	0,56
Indeks Gini	0,301	0,285-0,295
Nilai Tukar Petani (NTP)	124,97	125-127
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif) (%)	9,15	9,95
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,11	71,20

Sumber : RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026





4.1.3. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RPJPD Lampung Timur 2025-2045

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2045 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon pelaksanaan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Lampung, sejalan dengan arah pengembangan wilayah "*Lampung Timur Bumi Agribisnis*". Tujuan pembangunan dalam RPJMD 2025-2029, yang merupakan RPJMD tahap pertama dalam RPJPD Tahun 2025-2045 mempunyai arahan untuk menciptakan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan yang merupakan sektor basis perekonomian dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat. RPJMD tahap pertama ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dasar, tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien, serta peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal. Pembangunan dirancang secara inklusif dengan mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat kelembagaan daerah, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi landasan awal untuk mewujudkan visi jangka panjang daerah, tetapi juga sebagai momentum akselerasi pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Lampung Timur.

Pembangunan daerah tahun 2026 sesuai dengan periodisasi pembangunan daerah RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 diarahkan pada misi dan sasaran pokok pembangunan daerah yang meliputi:

1. Transformasi Sosial Mewujudkan Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Inovatif
 - Kesehatan untuk semua
 - Pendidikan Berkualitas yang Merata
 - Perlindungan Sosial yang Adaptif
2. Transformasi Ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
 - Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
 - Penerapan Ekonomi Hijau
 - Transformasi Digital
 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
 - Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berintegritas dan Adaptif
 - Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4. Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta Stabilitas Daerah
 - Ketenteraman dan Ketertiban
 - Stabilitas Ekonomi Makro
 - Daya Saing Daerah
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju





- Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif
 - Lingkungan Hidup Berkualitas
 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
 - Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
 7. Sarana dan Prasarana Daerah Berkualitas dan Ramah Lingkungan
 8. Kesiambungan Pembangunan Daerah

4.1.4. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Lampung Timur 2025-2029

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Lampung Timur merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih, yaitu Hj. Ela Siti Nuryamah, M.E., M.A.P dan Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si. yang selanjutnya menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Dalam periode 2025-2029, visi pembangunan Kabupaten Lampung Timur yaitu ***“Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas”***. Interpretasi substansi visi pada kebijakan pemerintah mengandung arti bahwa kebijakan program pembangunan pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029, difokuskan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana ditunjukkan gambar sebagai berikut:



Lampung Timur yang Maju, Aman, Kolaboratif, Mandiri, Unggul, dan Religius diproyeksikan terimplementasi melalui pelaksanaan misi atau langkah-langkah umum yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi tersebut pada Tahun 2025-2029, disebut dengan ***Siwo Itou (Sembilan Cita) Menuju Kemakmuran***, terdiri dari:

1. Misi-1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi
Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pemenuhan pendidikan dasar secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah akan mendorong inovasi dalam pembangunan sektor pendidikan dasar dengan mengintegrasikan pengenalan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal sejak dini. Pendekatan ini menjadi penting mengingat masih terbatasnya pengembangan keterampilan dan inovasi yang berakar pada kekayaan sumber daya lokal. Melalui penguatan pendidikan vokasi dasar, peserta didik di jenjang pendidikan dasar diharapkan dapat memiliki minat dan kemampuan untuk berinovasi, serta kreatif dalam mengembangkan nilai tambah terhadap berbagai produk unggulan di daerahnya. Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal,



khususnya yang saat ini sebagian besar—lebih dari 75 persen—masih bekerja di sektor informal. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat mendorong transformasi struktur ketenagakerjaan menuju sektor yang lebih produktif dan berkelanjutan.

2. Misi-2 : Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat

Misi ini bertujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Timur, dimulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama hingga peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana. Penguatan sektor kesehatan menjadi elemen strategis dalam pembangunan daerah, mengingat kesehatan yang optimal merupakan fondasi utama bagi terciptanya sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, dan berkualitas. Peningkatan mutu layanan kesehatan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai pilar penting dalam mempercepat akselerasi pembangunan daerah secara menyeluruh. Di samping itu, tersedianya layanan kesehatan yang adil dan merata akan turut mendorong peningkatan angka harapan hidup serta kualitas hidup masyarakat. Melalui implementasi program Kartu Sehat, misi ini juga diarahkan untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki hak yang setara dalam memperoleh perlindungan, jaminan, dan pelayanan kesehatan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif.

3. Misi-3 : Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kemantapan dan kualitas infrastruktur wilayah secara menyeluruh, yang mencakup tidak hanya infrastruktur konektivitas seperti jalan dan jembatan, tetapi juga infrastruktur perkotaan, permukiman, sistem pengairan, serta sarana perhubungan darat. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas menjadi elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat integrasi antarwilayah di Kabupaten Lampung Timur. Penerapan misi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses yang adil terhadap fasilitas infrastruktur dasar. Akses tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti transportasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan layak, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung terciptanya wilayah yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

4. Misi-4 : Menjaga nilai-nilai religi dan budaya.

Kabupaten Lampung Timur, yang sering disebut sebagai Indonesia Mini, memiliki kekayaan keanekaragaman suku, agama, dan budaya yang menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Misi ini bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai religi dan budaya yang sudah menjadi tradisi dan identitas kuat masyarakat, yang terbukti mampu menjaga harmoni dan keberagaman dalam kehidupan





sosial. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, penting untuk menjaga nilai-nilai religi dan budaya lokal agar tidak tergerus oleh kemajuan tersebut. Digitalisasi dan modernisasi yang terus berkembang memberikan tantangan tersendiri dalam mempertahankan warisan budaya. Namun, justru di era digital ini, nilai-nilai tersebut perlu dijaga dan diintegrasikan dengan kemajuan teknologi untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengurangi identitas budaya masyarakat. Pelestarian nilai-nilai religi dan budaya tidak hanya penting sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai pendorong pembentukan karakter, identitas, dan semangat kebersamaan. Salah satu nilai budaya lokal yang perlu dijaga adalah semangat *Sakai Sambayan*, yakni semangat gotong royong yang telah menjadi pondasi kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Semangat ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga tercipta pembangunan yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan.

5. Misi-5 : Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata.

Misi ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan kekayaan lokal yang dimiliki Kabupaten Lampung Timur melalui peningkatan hilirisasi di sektor pertanian dan pariwisata. Hilirisasi dimaknai sebagai proses strategis dalam pengolahan hasil pertanian maupun potensi pariwisata menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai tambah tinggi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing komoditas lokal, tetapi juga memperkuat struktur perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan hilirisasi pertanian difokuskan pada komoditas unggulan seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dengan mendorong adopsi teknologi pengolahan, peningkatan kapasitas pelaku usaha tani, serta penguatan akses pasar. Di sektor pariwisata, hilirisasi diarahkan pada pengembangan atraksi wisata berbasis budaya dan alam, peningkatan kualitas layanan wisata, serta penciptaan rantai nilai ekonomi kreatif di sekitar destinasi. Dengan demikian, misi ini diharapkan mampu menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

6. Misi-6 : Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.

Misi ini bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan daerah yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan elemen fundamental dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, bebas dari praktik korupsi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mudah diakses. Upaya ini mencakup penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, serta penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Digitalisasi pelayanan publik diharapkan menjadi katalis dalam mempercepat transformasi birokrasi, menciptakan transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat. Dengan sistem yang berbasis teknologi, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan warga. Lebih lanjut, misi ini juga diarahkan untuk memperkuat pembangunan desa





sebagai pilar utama pembangunan daerah. Peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di tingkat desa akan didorong melalui indikator *Indeks Desa Membangun (IDM)* yang mencerminkan kemajuan dalam aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Kemajuan 264 desa di Kabupaten Lampung Timur menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah secara menyeluruh, mengingat desa memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan pembangunan wilayah.

7. Misi-7 : Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja.

Misi ini diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap dinamika serta tantangan ekonomi global. Dalam konteks pembangunan daerah, investasi berperan strategis tidak hanya sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai pendorong utama penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, serta penguatan sektor-sektor ekonomi lokal. Investasi yang masuk diharapkan mampu menjadi katalisator dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah, melalui penguatan struktur ekonomi produktif yang berbasis potensi unggulan lokal. Oleh karena itu, pembangunan iklim investasi yang kondusif menjadi tujuan utama misi ini, dengan menciptakan kepastian hukum, kemudahan perizinan, infrastruktur pendukung yang memadai, serta stabilitas sosial dan politik yang mendorong kepercayaan investor. Peningkatan investasi tidak hanya difokuskan pada sektor-sektor besar seperti infrastruktur dan industri, tetapi juga diarahkan untuk menyentuh sektor-sektor riil yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, pariwisata, serta sektor berbasis teknologi. Dengan strategi ini, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata, peningkatan produktivitas, serta perluasan lapangan kerja yang signifikan di berbagai wilayah Kabupaten Lampung Timur.

8. Misi-8 : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak merupakan kelompok strategis dalam pembangunan, namun sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan ekonomi, serta perlindungan sosial. Oleh karena itu, misi ini diarahkan untuk memperluas peran serta akses perempuan dan anak terhadap sumber daya pembangunan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka dalam suasana yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan fisik, mental, serta emosional. Perlindungan perempuan dan anak difokuskan pada pencegahan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih berkeadilan gender dan ramah anak. Selanjutnya, misi ini juga mencakup pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang terencana dan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memberikan tekanan pada sumber daya daerah dan mempersulit pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu,



Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu merumuskan kebijakan yang terintegrasi dalam pengendalian jumlah dan persebaran penduduk, guna memastikan pembangunan berjalan seimbang dengan kapasitas daya dukung lingkungan dan infrastruktur daerah. Sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia, misi ini juga mencakup peningkatan daya saing pemuda melalui pengembangan potensi dan pemberdayaan kreatif, serta penguatan sektor olahraga sebagai sarana pembinaan karakter, peningkatan kesehatan masyarakat, dan penciptaan prestasi yang membanggakan. Pemuda dan olahraga menjadi dua elemen strategis dalam membentuk generasi yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang progresif dan berkelanjutan.

9. Misi-9 : Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, aman, tangguh, serta berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Ketahanan sosial merupakan kapasitas masyarakat dalam menjaga stabilitas dan solidaritas sosial di tengah dinamika perubahan, sedangkan keamanan lingkungan menjadi elemen penting dalam menciptakan ruang hidup yang nyaman, tertib, dan produktif. Melalui pelaksanaan misi ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menargetkan penguatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko sosial seperti kemiskinan, pengangguran, konflik horizontal, serta dampak sosial dari perubahan iklim dan bencana alam. Di sisi lain, aspek keamanan lingkungan difokuskan pada penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang responsif dan inklusif.

Upaya ini juga mencakup pelestarian nilai-nilai lokal, penguatan kohesi sosial, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan, didukung oleh masyarakat yang saling menjaga, tanggap terhadap potensi krisis, serta mampu bangkit dan beradaptasi dengan perubahan.

Dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah maka dapat terwujud dengan adanya tujuan serta sasaran yang selaras. Berikut ini tabel tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur.





Tabel 4. 3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	MISI	LAMPUNG TIMUR "MAKMUR"	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN 2026	KET
LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS									
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi	Lampung Timur Unggul	T1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,05	73,8	
2.	Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat				Indeks Modal Manusia	Angka	N/A	0,55	
3.	Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas			Meningkatnya derajat pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	0,63	0,64	
4.	Menjaga nilai-nilai religi dan budaya			Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	0,83	0,83	
5.	Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata			Meningkatnya daya saing pemuda dan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,02	2,60 - 2,90	
6.	Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik	Lampung Timur Maju	T2. Terwujudnya infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas mendukung perekonomian daerah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	N/A	53	
7.	Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja			Meningkatnya kemandapan infrastruktur dan tata ruang daerah berkualitas	Indeks Infrastruktur	Angka	N/A	0,50	
8.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak	Lampung Timur Mandiri	T3. Meningkatnya ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan sektor strategis dan investasi		Kontribusi PDRB Lampung Timur terhadap PDRB Provinsi Lampung	Persen	11,65	11,75	
9.	Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan				Pendapatan per Kapita ADHB	Rp Juta/ Kapita/ Tahun	49,27	55,00	
				Meningkatnya pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,62	4,90	
				Stabilisasi pasokan dan harga pangan	Inflasi	Persen	1,37	2,5 (+-1)	
		Lampung Timur Maju dan Mandiri	T4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71,3	71,7	
				Terwujudnya reformasi birokrasi berbasis digital dan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71,3	71,7	



No	MISI	LAMPUNG TIMUR "MAKMUR"	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN 2026	KET
LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS									
			kemandirian desa						
	Lampung Timur Aman, Kolaboratif, dan Religius	T5. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat	Rasio Gini	Angka	0,278	0,270-0,280			
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,19	12,00 - 12,14		
			Terwujudnya keluarga berkualitas	Indeks Kualitas Keluarga	Angka	N/A	76,24		
			Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan demokratis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	N/A	74		
				Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	71,8	72,8		
				Indeks Risiko Bencana Daerah	Angka	166,4	148,92		
			Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Ton CO ₂ Ekuivalen	- 124.486,88	139.817,99		

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan komponen penting dalam kerangka perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai arah dan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan pembangunan daerah mencerminkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu tertentu, sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Tujuan pembangunan daerah akan menjadi bermakna apabila mampu diterjemahkan secara konkret ke dalam strategi dan arah kebijakan yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah disusun sebagai langkah sistematis untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan daerah merupakan upaya komprehensif yang mengintegrasikan potensi, tantangan, dan peluang yang dimiliki daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan. Sementara itu, arah kebijakan menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran





pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan

Visi : LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS		
Misi I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<i>Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia</i>	Meningkatnya derajat pendidikan Masyarakat	1. Meningkatkan tata kelola pendidikan dasar yang merata dan berkeadilan 2. Mencetak lulusan berkompeten dan berdaya saing dengan pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang adaptif dan berbasis teknologi. 3. Meningkatkan kompetensi pendidik yang inovatif dan adaptif teknologi memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 4. Mengintegrasikan nilai keagamaan dan budaya melalui penguatan kelembagaan pendidikan berbasis agama dan kearifan lokal
		1. Meningkatkan sarana, prasarana, dan digitalisasi perpustakaan sebagai pusat layanan literasi Masyarakat 2. Meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan
	Meningkatnya daya saing pemuda dan angkatan kerja	1. Memperkuat regulasi dan tata kelola ketenagakerjaan untuk menciptakan ekosistem kerja yang adil dan berkelanjutan 2. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan penempatan yang sesuai kebutuhan pasar kerja. 3. Memperkuat sistem perlindungan, pengawasan dan pemberdayaan tenaga kerja, termasuk pekerja migran dan purna migran
		1. Penguatan kebijakan dan fasilitasi pengembangan pemuda untuk berperan strategis dalam pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing 2. Memperkuat pembinaan pemuda serta mendorong peningkatan prestasi
		1. Meningkatkan ekosistem keolahragaan melalui penguatan regulasi, peningkatan pembinaan dan kualitas SDM olahraga, serta penyediaan fasilitas olahraga 2. Mendorong partisipasi aktif atlet daerah melalui penyelenggaraan dan keikutsertaan aktif dalam <i>event</i> olahraga daerah dan nasional
	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1. Memperkuat tata kelola dan kebijakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan minimum 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas, integrasi layana dan komptensi tenaga kesehatan 3. Mendorong kemandirian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan
<i>Terwujudnya infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas mendukung perekonomian daerah</i>	Meningkatnya kemantapan infrastruktur dan tata ruang daerah berkualitas	1. Meningkatkan kemantapan infrastruktur dasar dan pembangunan wilayah strategis. • Meningkatkan konektivitas infrastruktur jalan pada kawasan strategis • Peningkatan kemantapan jalan desa dan irigasi sebagai fondasi untuk



		meningkatkan konektivitas dan produktivitas sumber daya pertanian Lampung Timur. 2. Meningkatkan kualitas tata ruang dan citra kota melalui perbaikan lingkungan • City beautification dan penguatan layanan publik dalam rangka memperkuat <i>dignity</i> kota • pengentasan kawasan kumuh dan peningkatan dan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman 3. Meningkatkan ketersediaan dan akses air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh Masyarakat melalui pengembangan infrastruktur air minum dan sumber air mandiri
		1. Penguatan sistem transportasi terintegrasi, terjangkau, dan berkualitas dalam meningkatkan aksesibilitas
<i>Meningkatnya ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan sektor strategis dan investasi</i>	Meningkatnya pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah	1. Memantapkan kebijakan dan regulasi dalam mendukung hilirisasi dan penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang berkelanjutan 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui dukungan sarana, kelembagaan, dan akses usaha yang menyeluruh 3. Mendorong inovasi, diversifikasi, dan modernisasi sistem pertanian dan perikanan guna memperkuat ketahanan pangan dan mendukung penurunan stunting 4. Mengembangkan kawasan strategis pertanian dan penyediaan benih/bibit unggul untuk memperkuat swasembada pangan daerah
		1. Pengembangan kawasan industri berbasis potensi unggulan daerah yang terintegrasi dari hulu ke hilir • Pengembangan ekonomi biru kawasan industri minapolitan Labuhan Maringgai • pengembangan klaster industri lokal berbasis potensi unggulan desa 2. Meningkatkan daya saing produk lokal melalui optimalisasi rantai pasok, konektivitas pasar, dan standarisasi mutu 3. Pengembangan IKM,UMKM dan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan penyerapan tenaga kerja
		1. Penguatan sistem perdagangan lokal dan regional melalui penataan pasar, pengembangan sentra ekonomi desa, serta integrasi rantai nilai antarwilayah 2. Peningkatan kapasitas ekspor produk unggulan daerah melalui perluasan akses pasar dan promosi dagang
		1. Penguatan daya tarik dan infrastruktur destinasi wisata secara kolaboratif, partisipatif, dan berbasis potensi lokal. 2. Peningkatan promosi pariwisata melalui event, media, dan kemitraan usaha dilakukan secara terpadu dengan promosi UMKM yang konsisten dan informatif, 3. Penguatan kapasitas SDM dan pelaku ekonomi kreatif pariwisata melalui pendidikan, teknologi terapan, dan pengembangan ekonomi kreatif desa
		1. Penguatan kemandirian UMKM dan koperasi melalui peningkatan akses pembiayaan,



		teknologi, pemasaran, dan kemitraan usaha 2. Pengembangan koperasi sektor produksi dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan daerah 3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
	Stabilisasi pasokan dan harga pangan	1. pengendalian inflasi melalui regulasi, pengendalian stok dan subsidi logistik guna menjaga stabilitas harga 2. Perluasan cakupan dan efektivitas operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat.
		1. Memperkuat regulasi dan tata kelola untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan 2. Mengembangkan sistem cadangan, distribusi, dan keamanan pangan berbasis desa dan komunitas.
<i>Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah</i>	Terwujudnya reformasi birokrasi berbasis digital dan kemandirian desa	1. Penguatan tata kelola dan digitalisasi pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. 2. Optimalisasi kapasitas fiskal dan kerja sama antar daerah untuk mendukung efektivitas pembangunan.
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan internal
		Mengembangkan infrastruktur TIK, meningkatkan kompetensi digital dan penggunaan TIK
		Meningkatkan implementasi prinsip merit dalam manajemen ASN
		1. Penguatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan desa untuk mendukung kemandirian dan pelayanan dasar masyarakat desa 2. Pengembangan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan regulasi, tata kelola, profesionalisme, dan konektivitas usaha
		Menciptakan ekosistem investasi yang kondusif melalui digitalisasi layanan serta promosi sebagai pendorong transformasi ekonomi
<i>Meningkatnya pemerataan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat</i>	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Penguatan regulasi dan tata kelola yang mendukung ketahanan keluarga dan kesetaraan gender 2. Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi 3. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kebijakan kewirausahaan yang responsif gender.
	Terwujudnya keluarga berkualitas	1. Penguatan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera berbasis kearifan lokal untuk mendukung kualitas hidup dan keseimbangan pertumbuhan penduduk
	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan demokratis	1. Penguatan sistem perlindungan sosial melalui pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran 2. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan kelompok rentan melalui penguatan regulasi, kelembagaan, dan inovasi pemberdayaan komunitas



		3. perluasan akses pendidikan berkualitas yang inklusif berbasis vokasi dan <i>boarding school</i>
		1. Penguatan nilai budaya lokal dan karakter kebangsaan berlandaskan Pancasila dalam kehidupan sosial Masyarakat 2. Meningkatkan kohesi sosial dan kerukunan melalui regulasi dan fasilitasi kehidupan antar-etnis, agama, dan golongan yang harmonis 3. Mendorong pemenuhan hak sipil dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis yang setara dan inklusif
		1. Meningkatkan pelestarian, regenerasi, dan pemberdayaan kesenian tradisional melalui peningkatan fasilitas dan dukungan kepada penggiat/komunitas budaya 2. Melestarikan dan mengelola museum serta cagar budaya secara berkelanjutan dan edukatif
		1. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis sosial budaya, hukum lokal, dan partisipasi aktif masyarakat 2. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui kolaboratif masyarakat dengan pemerintah
		1. Penguatan kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana berbasis komunitas dalam menghadapi risiko alam dan perubahan iklim 2. Penguatan kebijakan perlindungan dan mitigasi konflik manusia dan satwa liar
	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	1. Pengendalian Pencemaran Berbasis Ekologis 2. Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat dan Circular Economy 3. Pengembangan Energi Baru Terbarukan yang Mandiri dan Berkelanjutan

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah secara menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menerjemahkan setiap misi ke dalam bentuk prioritas pembangunan daerah di tahun 2026 yang terukur dan operasional. Prioritas ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan tantangan strategis yang dihadapi, serta mengacu pada prinsip pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, program prioritas pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk memfokuskan upaya pembangunan pada sektor-sektor yang dianggap paling penting dan mendesak, guna mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu. Program prioritas pembangunan daerah disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan kepala daerah terpilih. Program prioritas diskenariokan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, agar tercipta sinergi yang kuat dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemetaan





Program Perangkat Daerah sebagai upaya untuk penguatan implementasi program prioritas jangka menengah disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. 5
Integrasi Program Prioritas ke dalam Program Perangkat Daerah

KLASTER PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR OPD	OPD PENGAMPU
LAMPUNG TIMUR MAJU	Peningkatan kemantapan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Unit Reaksi Cepat Preservasi Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<i>City Beautification</i> Kawasan Strategis	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Jalan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
LAMTIM AMAN	Program POL PP SIGAP dan Peningkatan Siskamling	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan Layanan Pemadam Kebakaran : Zonasi Kecamatan	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Peningkatan Layanan Persampahan Perkotaan Kecamatan dan Hilirisasi Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Fasilitasi Pengembangan Desa Ramah Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Fasilitasi Penanganan Konflik Satwa Liar dan Manusia	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Command Center Terintegrasi	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Implementasi Semangat Sakai Sambayan Membangun Lampung Timur	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
LAMTIM KOLABORATIF		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



KLASTER PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR OPD	OPD PENGAMPU
	Program Desa Makmur	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
LAMTIM MANDIRI	Pengembangan Hilirisasi Perikanan Kec. Labuhan Maringgai dan sekitarnya	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Peningkatan Produktivitas Komoditas Strategis	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan
	Pengembangan Pupuk Organik dan Pertanian Organik	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan
	Pengembangan Hilirisasi Lada, Kopi dan Kelapa	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	KUR Daerah IKM dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
	Pembangunan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Pengembangan Aplikasi Si BADA Masuk Desa	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Pengembangan Zonasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dan Program PESONA	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Gerakan Pangan Murah dan Kios Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan
	Operasi Pasar dan Pasar Murah	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Supporting Festival Wisata Unggulan Daerah	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Pengembangan Sentra IKM dan UMKM (Eksisting dan Baru)	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Peningkatan Daya Saing Produk IKM dan UMKM : Peningkatan Akses Produk Lokal	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Peningkatan Saprasi Pasar Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



KLASTER PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR OPD	OPD PENGAMPU
LAMTIM UNGGUL	Beasiswa Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Peningkatan Cakupan Layanan Kedaruratan RSUD Sukadana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Rumah Sakit Lengkap Berkualitas RSUD Sukadana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Bantuan Pangan	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Peningkatan Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
LAMTIM RELIGIUS	Pengembangan Kawasan Seni dan Budaya Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Pelayanan Jasa Pendidikan Keagamaan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

4.1.4.1. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Permendagri 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa dalam Musrenbang Kabupaten dilaksanakan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD. Pada pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025, telah disampaikan pokok-pokok pikiran DPRD yang terdiri dari saran, pendapat, dan masukan Anggota maupun Pimpinan DPRD terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang perlu ditampung dalam RKPD Tahun 2026.

Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut mencakup berbagai bidang prioritas, antara lain:

1. Bidang Pemerintahan dan Ketertiban Umum
 - a. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan sehingga lebih bermanfaat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Pemerintah Daerah agar lebih memprioritaskan gaji perangkat desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.
 - c. Mengoptimalkan kembali fungsi Linmas di desa sebagai garda pengamanan di tingkat desa dalam rangka menjaga ketertiban umum.



- d. Menginstruksikan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Lampung Timur untuk berperan aktif serta berkoordinasi dengan lembaga vertikal dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur.
 - e. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan tentang pengelolaan Bank Sampah bagi masyarakat.
2. Bidang Perekonomian dan Pertanian.
- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari:
 - Sektor pajak
 - Sektor pariwisata
 - Sektor pertambangan dan air mineral
 - Sektor perindustrian
 - Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan yang menjadi komoditi utama Lampung Timur
 - b. Memudahkan pelayanan perizinan bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Timur.
 - c. Mendukung dan memberi peran kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berfungsi optimal untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - d. Menerbitkan kembali seluruh Asset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan menerbitkan sertifikat kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
 - e. Mengoptimalkan pengelolaan seluruh Asset Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur guna menunjang kegiatan dan kelancaran pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.
 - f. Mengembangkan, mendukung serta pembinaan secara intensif dan menjadikan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam membangun dan mempromosikan sentra-sentra Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) unggulan bagi masyarakat.
 - g. Mengembangkan potensi yang dimiliki seluruh desa di Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
 - h. Peningkatan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Lampung Timur agar lebih dioptimalkan.
 - i. Program pemberian bantuan jalan usaha tani dan bantuan alat/mesin pertanian kepada masyarakat melalui gabungan kelompok tani.
 - j. Pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terhadap harga padi, jagung, dan komoditas singkong.
3. Bidang Pembangunan dan Infrastruktur
- a. Memberikan prioritas program pembangunan untuk Kota Sukadana yang menjadi ibu kota kabupaten.
 - b. Program penanganan masalah kebersihan dan keasrian Ibu Kota Kabupaten supaya dilakukan perawatan dan pemeliharaan dengan baik. Selain itu, perlu dianggarkan





- penambahan gerobak motor sampah setiap pasar, baik pasar daerah maupun pasar desa.
- c. Program pembangunan saluran irigasi, drainase, talud, dan siring untuk jalan penghubung antar desa dan jalan kabupaten.
 - d. Program Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan di antaranya adalah:
 - Pengaspalan jalan penghubung antar desa.
 - Pembuatan jembatan penghubung antar desa.
 - Peningkatan jalan sampai dengan lataston untuk wilayah yang sangat membutuhkan.
 - Pembangunan jalan usaha tani dalam rangka mendukung program pertanian.
 - e. Pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan agar ditingkatkan.
 - f. Pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan penghubung antar desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
 - g. Program penanganan bencana di Kabupaten Lampung Timur perlu ditingkatkan, yaitu Sarana dan Prasarana penanggulangan secara umum. Secara khusus, terhadap bencana Kebakaran perlu penambahan Unit Pemadam Kebakaran serta fasilitasnya mengingat luasnya wilayah Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, sebagai daerah yang waspada terhadap bencana Puting Beliung dan Banjir perlu diberikan perhatian khusus dalam penanganannya.
 - h. Sinkronisasi antara program Pemerintah Daerah dengan program pembangunan desa yang berdasarkan dari Dana Desa, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Bidang Sosial, Agama dan Budaya
- a. Program pemberian bantuan bedah rumah terhadap masyarakat yang tidak mampu agar tetap dianggarkan.
 - b. Program pemberian bantuan insentif bagi pengajar/guru agama, kader posyandu, tenaga kebersihan rumah ibadah, dan tenaga kebersihan makam umum.
 - c. Program pemberian bantuan terhadap tempat-tempat ibadah dan fasilitas ibadah.
 - d. Pembinaan terhadap generasi muda, karang taruna, kelompok seni budaya, kelompok lintas agama, dan organisasi keagamaan.
 - e. Program pemberian bantuan terhadap tempat pendidikan agama dan pondok pesantren.
 - f. Program pelestarian, promosi, dan pengenalan terhadap budaya dan adat istiadat masyarakat lokal dan peninggalan situs-situs sejarah.
 - g. Program sertifikat wakaf untuk semua tempat ibadah yang berada di Kabupaten Lampung Timur.
 - h. Bantuan perlengkapan berupa seragam dan *sound system* kepada kelompok-kelompok senam lansia.





5. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

- a. Pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat yang menggunakan Kartu BPJS agar dapat diutamakan, sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang maksimal.
- b. Berkaitan sektor pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar dapat memprioritaskan fasilitas penunjang seperti perbaikan gedung sekolah, pengadaan gedung sekolah, bantuan alat peraga sekolah dan tunjangan insentif guru honor.
- c. Program pemberian bantuan dan pembangunan serta peningkatan fasilitas terhadap tempat pendidikan agama (TPA) dan tempat kegiatan pendidikan anak usia dini.
- d. Pemberian insentif kepada Guru Ngaji, Guru Honor PAUD dan TK untuk dapat dianggarkan.

Lebih lanjut, DPRD Kabupaten Lampung Timur juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan alternatif pembiayaan daerah, optimalisasi pemanfaatan potensi lokal, serta pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berdaya guna. Masukan dari DPRD ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 agar arah kebijakan pembangunan daerah semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat serta mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang ada. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu mendorong pencapaian target pembangunan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan strategis pembangunan daerah selama satu tahun ke depan. Penyusunan RKPD ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. RKPD Tahun 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, RKPD 2026 memiliki peran strategis dalam memperkuat konsolidasi capaian pembangunan tahap awal dari RPJMD, sekaligus sebagai fondasi untuk mendorong transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, partisipatif, dan berintegritas. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 difokuskan pada ***“Memacu Pembangunan Infrastruktur Dasar, Pelayanan Publik, Dan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Lampung Timur Makmur”***. Tema ini diwujudkan melalui delapan prioritas pembangunan daerah, yaitu:





1. Peningkatan kemantapan infrastruktur dasar
2. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan investasi dan hilirisasi serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas BUMDes
6. Penguatan nilai religi dan kebudayaan serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
7. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk
8. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah di atas merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan berfungsi sebagai penjabaran konkret dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga setiap program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah daerah memiliki arah yang jelas, fokus, dan terukur. Melalui penetapan prioritas pembangunan, sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan dampak pembangunan yang signifikan dan berkelanjutan. Pentingnya pelaksanaan prioritas pembangunan daerah terletak pada perannya dalam memastikan keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan. Prioritas yang dirumuskan dengan baik akan membantu pemerintah daerah menyeimbangkan kebutuhan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, pelaksanaan prioritas juga mendorong sinergi antarperangkat daerah, memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat, serta mempercepat pencapaian hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan menempatkan prioritas sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah daerah dapat mengarahkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimiliki menuju pencapaian sasaran pokok pembangunan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:





Tabel 4. 6
Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2026

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,05	73,8
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,02	2,60 - 2,90
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	N/A	53
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,62	4,90
5	Pendapatan per Kapita ADHB	Rp.Juta/ Kapita/ Tahun	49,27	55,00
6	Inflasi	(%)	1,37	2,5 (+-1)
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71,3	71,7
8	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	Angka	0,278	0,270 - 0,280
9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,19	12,00 - 12,14
10	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Ton CO ₂ Ekuivalen	-124.486,88	139.817,99

Selanjutnya, berdasarkan hasil penyesuaian dan sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026, dirumuskan arah kebijakan, urusan pengampu/pendukung pelaksanaan arah kebijakan serta program dan kegiatan pendukung prioritas dan arah kebijakan tahunan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 7
Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026

PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN	INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
Peningkatan kemantapan infrastruktur dasar	Peningkatan Kemantapan Infrastruktur Dasar	1. Meningkatnya kemantapan jalan kabupaten 2. Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan 3. Meningkatnya kemantapan jalan lingkungan 4. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dan akses hunian layak 5. Meningkatnya infrastruktur ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan (termasuk irigasi, listrik desa, dan pengelolaan air bersih) 6. Meningkatnya kondisi gedung perkantoran 7. Meningkatnya keselamatan transportasi dan kinerja pelayanan perhubungan	1. Percepatan penanganan jalan kabupaten dan desa 2. Percepatan penanganan jaringan irigasi kabupaten 3. Peningkatan sapras perkotaan dan permukiman 4. Penyediaan alat berat 5. Operasionalisasi URC jembatan dan jalan mantap 6. Operasionalisasi penangan jalan lingkungan 7. Penyediaan penerangan jalan umum 8. Penyediaan dan pemeliharaan rambu dan APILL 9. Penyediaan kamera dan voice announcer area traffic



PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN	INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
			control system (ATCS)
	Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum 2. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan	1. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 2. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik 3. Identifikasi dan fasilitasi rumah bagi masyarakat terdampak bencana dan program pemerintah
	Percepatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah	1. Tersedianya Perda RTRW 2. Tersedianya Perbup RDTR Kawasan Strategis Kabupaten 3. Meningkatnya kegiatan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	1. Percepatan penyusunan dan penetapan Perbup RDTR 2. Percepatan integrasi rencana tata ruang dalam OSS
Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah	1. Meningkatnya pendapatan asli daerah 2. Meningkatnya pendapatan transfer (DBH, DAU, dan DAK)	1. Penguatan data pajak dan retribusi daerah 2. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah 3. Peningkatan kesadaran wajib pajak dan retribusi 4. Perluasan layanan pajak dan retribusi daerah berbasis digital 5. Peningkatan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung 6. Penguatan data dan perencanaan DBH, DAU, dan DAK 7. Peningkatan tata kelola layanan BLUD
	Peningkatan Tata Kelola Pemda dan Layanan Publik Berbasis Digital	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN 3. Meningkatnya tata kelola informasi dan komunikasi publik 4. Meningkatnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil 5. Meningkatnya layanan perpustakaan dan kearsipan	1. Peningkatan kualitas regulasi daerah 2. Peningkatan tata kelola, kompetensi dan profesionalitas ASN 3. Operasionalisasi command center berbasis digital 4. Operasionalisasi Call Center (LAMTIM SIGAP) 5. Peningkatan zonasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil 6. Peningkatan literasi masyarakat 7. Peningkatan pengelolaan arsip 8. Peningkatan tata kelola aset milik daerah
	Peningkatan Kualitas	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	1. Peningkatan kualitas dokumen RKPD dan Renja



PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN	INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah 3. Meningkatnya kualitas penganggaran daerah 4. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal	OPD 2. Peningkatan kualitas inovasi, penelitian dan pengembangan daerah 3. Peningkatan kualitas dokumen KUA/PPAS dan APBD 4. Peningkatan pendampingan dan asistensi APIP
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah 2. Meningkatnya harapan lama sekolah 3. Meningkatnya keterampilan siswa SD dan SMP	1. Pembangunan ruang kelas baru PAUD, SD, dan SMP 2. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas dan sarana/prasarana sekolah PAUD, SD, dan SMP 3. Penyediaan alat praktik/peraga siswa 4. Peningkatan akses pendidikan masyarakat 5. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendidik 6. Penguatan pusat kegiatan belajar masyarakat 7. Pengembangan pendidikan inklusi 8. Peningkatan pendidikan vokasi dasar kepada siswa SD dan SMP
	Pembangunan Pemuda dan Olah Raga	1. Meningkatnya keterampilan dan kompetensi pemuda 2. Meningkatnya prestasi olah raga	1. Peningkatan cakupan pemuda kompeten dan terampil 2. Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 3. Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 4. Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan 5. Fasilitasi even olahraga masyarakat 6. Penyelenggaraan even olah raga daerah dan dukungan terhadap organisasi olah raga prestasi
	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1. Meningkatnya usia harapan hidup 2. Menurunnya AKI dan AKB 3. Menurunnya prevalensi stunting 4. Meningkatnya angka penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis	1. Peningkatan sarana, prasana dan alkes RSUD Sukadana dan Puskesmas 2. Peningkatan kuantitas, kompetensi, dan kualitas layanan tenaga kesehatan 3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan 4. Peningkatan pelayanan



PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN	INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		5. Menurunnya insiden rate kasus DBD 6. Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 7. Meningkatnya desa siaga aktif strata purnama mandiri	kesehatan promotif dan preventif 5. Peningkatan upaya penemuan dan layanan kasus tuberkulosis 6. Pencegahan dan penanggulangan DBD 7. Percepatan reaktifasi BPJS non aktif
	Peningkatan Kualitas Layanan Sosial	1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan sosial 2. Meningkatnya rehabilitasi sosial penyandang disabilitas 3. Meningkatnya cakupan pelayanan anak terlantar dan lanjut usia terlantar 4. Terkelolanya Taman Makam Pahlawan 5. Terselenggaranya Sekolah Rakyat	1. Peningkatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial 2. Peningkatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial 3. Peningkatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten 4. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial	1. Terpenuhinya SPM bidang pendidikan 2. Terpenuhinya SPM bidang kesehatan 3. Terpenuhinya SPM bidang sosial	1. Meningkatkan partisipasi warga negara dalam pendidikan menengah 2. Meningkatkan partisipasi warga negara disabilitas dalam pendidikan khusus 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan orang yang terdampak situasi kejadian luar biasa 4. Peningkatan layanan lanjut usia terlantar, korban bencana, anak terlantar, gelandangan pengemis, dan penyandang disabilitas terlantar
	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya persentase penduduk miskin	1. Peningkatan akurasi data penduduk miskin dalam DTSEN 2. Peningkatan pendapatan penduduk miskin 3. Peningkatan jaminan sosial penduduk miskin 4. Peningkatan cakupan penyediaan sarana dan prasarana wilayah kantong kemiskinan
Peningkatan investasi dan	Peningkatan Realisasi	1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	1. Peningkatan insentif dan kemudahan investasi



PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN	INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
hilirisasi serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Investasi Daerah	terhadap layanan perizinan 2. Meningkatnya realisasi investasi daerah	2. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha 3. Promosi peluang investasi daerah 4. Peningkatan akses dan layanan perizinan digital 5. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan 6. Peningkatan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat
	Peningkatan Produktivitas Sektor Produksi Unggulan Daerah	1. Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 2. Meningkatnya produksi ternak masyarakat 3. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya 4. Mendukung lokasi prioritas RPJMN	1. Peningkatan luas panen dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 2. Peningkatan tata kelola budidaya pertanian dan perkebunan 3. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian 4. Pencegahan penyakit menular strategis hewan 5. Pendampingan program IISAP 6. Peningkatan tata kelola peternakan dan perikanan 7. Fasilitasi bantuan kepada kelompok tani, kelompok ternak dan kelompok nelayan 8. Pengembangan budidaya padi, kopi dan kelapa, mendukung lokasi prioritas nasional
	Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	1. Meningkatnya nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 2. Meningkatnya nilai tambah produk perikanan dan peternakan 3. Stabilitas harga komoditas pangan 4. Meningkatnya ekspor produk olahan keluar daerah 5. Mendukung lokasi prioritas RPJMN	1. Penguatan sumber daya manusia dalam penanganan pasca panen 2. Peningkatan akses petani, kelompok tani, dan masyarakat terhadap pasar daerah 3. Peningkatan kapasitas pembiayaan dan akses pasar 4. Pengembangan ekosistem hilirisasi 5. Membangun kemitraan dengan industri pengolahan 6. Pengembangan koperasi produksi 7. Pengembangan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Labuhan Maringgai, mendukung lokasi prioritas pelabuhan perikanan modern nasional 8. Pengembangan hilirisasi



PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN	INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
			kopi dan kelapa, mendukung lokasi prioritas nasional serta hilirisasi lada hitam dan ubi kayu.
	Peningkatan Sektor Perdagangan, IKM, UMKM, dan Koperasi	1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah 2. Meningkatnya jumlah IKM 3. Meningkatnya jumlah UMKM 4. Meningkatnya jumlah koperasi aktif 5. Stabilisasi harga dan meningkatnya ekspor keluar kabupaten	1. Peningkatan sarana dan prasarana pasar daerah 2. Peningkatan kapasitas dan daya saing IKM dan UMKM 3. Peningkatan kapasitas koperasi 4. Peningkatan daya saing dan akses pasar produk IKM dan UMKM 5. Peningkatan kerjasama dengan koperasi dan BUMDes 6. Pengembangan tabungan komunal yang melibatkan masyarakat dan industri lokal 7. Pengembangan sentra wirausaha baru level desa 8. Pengembangan sentra IKM 9. Pengembangan rantai pasok dan ekosistem hilirisasi 10. Operasi pasar murah 11. Peningkatan layanan tera dan tera ulang
	Peningkatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah	1. Penguatan attraction, amenities, accessibility dan ancillary 2. Peningkatan sapras destinasi wisata prioritas daerah 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia penggiat ekonomi kreatif 4. Pemberdayaan komunitas lokal 5. Penguatan jaringan dan penyelenggaraan even berkualitas 6. Insentif wisata dan ekonomi kreatif berbasis desa
	Peningkatan Produktivitas Angkatan Kerja dan Hubungan Industrial	1. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja 2. Meningkatnya kompetensi angkatan kerja 3. Meningkatnya hubungan pengusaha, tenaga kerja, dan pemerintah 4. Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja migran	1. Peningkatan cakupan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja termasuk calon pekerja migran 2. Penguatan implementasi mutual trust, mutual respect, dan mutual benefit dalam hubungan industrial 3. Peningkatan peran pekerja migran dan purna pekerja



PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN	INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
			migran dalam pemberdayaan ekonomi lokal
	Swasembada Pangan	1. Stabilisasi pasokan dan harga pangan 2. Tertanganinya kerawanan pangan dan gizi 3. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis 4. Meningkatnya keamanan dan mutu pangan 5. Meningkatnya konsumsi pangan	1. Gerakan pangan murah 2. Pengembangan lumbung pangan desa 3. Identifikasi dan penanganan desa rawan pangan 4. Penyediaan cadangan pangan pemerintah 5. Pembentukan BUMD pangan 6. Pemantauan keamanan pangan segar asal tumbuhan
Pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas BUMDes	Program Desa Makmur	1. Meningkatnya indeks desa membangun 2. Meningkatnya kemajuan desa 3. Meningkatnya keamanan lingkungan desa 4. Meningkatnya kolaborasi dan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan 5. Meningkatnya kemandirian masyarakat 6. Meningkatnya keunggulan sumber daya masyarakat desa 7. Meningkatnya implementasi nilai religi dalam kehidupan	1. Mengidentifikasi potensi ekonomi unggulan desa untuk dikembangkan menjadi desa tematik 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa 3. Penguatan karakter positif masyarakat desa berbasis nilai religi dan kearifan lokal 4. Peningkatan pengelolaan sumber daya dan potensi desa 5. Peningkatan ekonomi skala lokal 6. Peningkatan sarana dan prasarana desa 7. Peningkatan kapasitas BUMDes
	Pengembangan Kapasitas BUMDes	1. Meningkatnya kapasitas dan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal desa 2. Meningkatnya peran BUMDes di sektor pertanian dan swasembada pangan 3. Meningkatnya profesionalisme, tata kelola, networking, dan modal BUMDes	1. Pengembangan BUMDes sebagai unit pengolahan pupuk organik, mendukung program hasil terbaik cepat Prov Lampung 2. Revitalisasi kelompok tani, koperasi desa, dan BUMDes terkait tata niaga dan penyediaan pupuk organik 3. Pengembangan rantai pasok pupuk organik melalui pemberdayaan masyarakat tani dan gapoktan 4. Pengembangan BUMDes dalam rantai pasok swasembada pangan mendukung program nasional
Penguatan nilai religi dan kebudayaan serta peningkatan ketenteraman	Penguatan Nilai Religi dan Pelestarian Kebudayaan	1. Meningkatnya implementasi nilai religi dalam kehidupan masyarakat 2. Meningkatnya pelestarian kebudayaan	1. Penguatan peran pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya 2. Penguatan peran organisasi keagamaan 3. Fasilitasi tenaga pendidik keagamaan non formal



PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN	INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
dan ketertiban masyarakat			4. Dukungan kegiatan keagamaan di masyarakat 5. Penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan 6. Fasilitasi lembaga kebudayaan dan pelestari seni tradisional 7. Penyelenggaraan even kebudayaan dan kesenian tradisional
	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Terpenuhinya SPM bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat 2. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat 3. Menurunnya potensi konflik sosial	1. Penguatan pelayanan trantibum yang terintegrasi 2. Integrasi security command center 3. Penguatan siskamling 4. Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan daerah 5. Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba
Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1. Meningkatnya indeks pembangunan gender 2. Meningkatnya perlindungan terhadap anak 3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk 4. Meningkatnya indeks kualitas keluarga	1. Penguatan anggaran responsif gender 2. Peningkatan cakupan layanan komprehensif terhadap perempuan korban kekerasan/TPPO 3. Peningkatan cakupan layanan komprehensif terhadap anak korban kekerasan 4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana
Peningkatan pelestarian lingkungan hidup & ketahanan bencana	Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati 2. Peningkatan penurunan emisi gas rumah kaca
	Peningkatan Pelayanan Persampahan	1. Meningkatnya indeks kinerja pengelolaan persampahan 2. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan 3. Meningkatnya pengelolaan persampahan di pasar daerah	1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 2. Peningkatan sistem pengelolaan sampah di TPA 3. Peningkatan pelayanan persampahan di pasar daerah 4. Pengembangan bank sampah dan pengolahan sampah berbasis masyarakat
	Peningkatan Mitigasi dan Ketahanan Bencana	1. Terpenuhinya SPM sub urusan pemadam kebakaran 2. Terpenuhinya SPM sub urusan bencana 3. Mitigasi bencana daerah 4. Meningkatnya pelayanan	1. Penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana



PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN	INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		bencana yang terintegras	3. Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 4. Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 5. Pembentukan desa tangguh bencana 6. Peningkatan tata kelola layanan tanggap darurat dan pasca bencana 7. Fasilitasi upaya pencegahan dan penanganan konflik satwa liar dan manusia

4.2.2. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan, telah diperoleh sejumlah kesepakatan terkait program dan kegiatan prioritas yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Berikut ini tabel hasil Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan.



Tabel 4. 8
Hasil Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan

No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.00 39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	2	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.00 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	250	04.01.04 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
			1.01.02.2.02.00 60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	04.04.02 Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, In Service Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja
			1.01.02.2.03.00 40	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	04.01.01 Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
			1.01.02.2.04.00 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	150	04.01.04 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.00 22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses
			1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
			1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
			1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
			1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
			1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
			1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
			1.02.02.2.02.00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis
			1.02.02.2.02.00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
			1.02.02.2.02.00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
			1.02.02.2.02.00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
			1.02.02.2.02.00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
			1.02.02.2.02.00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
			1.02.02.2.02.00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
			1.02.02.2.02.00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
			1.02.02.2.02.00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
			1.02.02.2.02.00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	33	04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
			1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	33	04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
			1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	33	04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
			1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	33	04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
			1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	33	04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.00 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0	
			1.03.02.2.02.00 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	3	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.00 28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	40	02.12.05 Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir
			1.03.03.2.01.00 32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	02.12.05 Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir
	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.00 10	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	
			1.03.12.2.01.00 11	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.00 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	50	06.06.01 Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
			1.04.04.2.01.00 04	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	1	06.06.01 Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.00 11	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	30	06.06.01 Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
			1.04.05.2.01.00 12	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	300	06.06.01 Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.00 27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	
			1.05.03.2.04.00 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	0	
	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.00 15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	12	
			1.05.02.2.02.00 11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.00 13	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	
	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.00 27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	
			1.05.03.2.04.00 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	
	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.00 15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	-	
			1.05.02.2.02.00 11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	-	



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.00 13	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Laporan	1	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.00 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20	
			1.06.02.2.03.00 14	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	27	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.00 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	
			1.06.05.2.02.00 06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.00 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	55	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.00 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	30	
			2.07.05.2.02.00 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	10000	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.00 11	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	51	
			2.08.02.2.02.00 09	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	50	



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
				Kabupaten/Kota				
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.00 07	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	6	
			2.08.07.2.02.00 13	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	60	
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.00 07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	0	
			2.09.03.2.01.00 08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	1	



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.00 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
			2.09.04.2.02.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	0	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.00 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
			2.10.06.2.01.00 06	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	1	
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.00 07	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	10	02.17.01 Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau
			2.11.03.2.01.00 12	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	1	02.17.01 Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.00 12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	1564.94	02.18.02 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR
			2.11.11.2.01.00 16	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	50	02.18.02 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR
			2.11.11.2.01.00 17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	1564.94	02.18.01 Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan
			2.11.11.2.01.00 20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regiona	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	1564.94	02.18.02 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR

2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.00 01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	
			2.12.02.2.03.00 03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	1	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.00 02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	0	
			2.12.03.2.02.00 06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	

2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.00 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	0	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.00 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	21	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.00 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	
			2.14.03.2.04.00 05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	24	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.00 16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	1	



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
			2.14.04.2.01.00 28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	15	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.00 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	50	
			2.15.02.2.03.00 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.00 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	0	



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
			2.15.03.2.13.00 11	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	0	
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.00 17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	2	
			2.16.02.2.01.00 21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	148	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.00 34	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	1	
			2.16.03.2.02.00 38	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.00 16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi	Laporan	0	07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
			2.16.02.2.01.00 19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	2	07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.00 25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	5	07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
			2.16.03.2.02.00 36	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	51	07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.00 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	40	
			2.17.07.2.01.00 15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	100	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.00 03	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	10	03.03.01 Pengembangan Koperasi Sektor Produksi



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
				Dalam Pengembangan Ekonomi				
			2.17.06.2.01.00 09	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	20	03.03.01 Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	20	
			2.18.05.2.01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	100	
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.00 11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	30	



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
			2.19.02.2.02.00 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	20	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05.00 10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	5	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.00 06	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	300	04.09.03 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
			2.19.03.2.03.00 09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	50	04.09.03 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.00 18	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	80	
			2.20.02.2.01.00 19	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	40	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.00 07	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	25	
			2.21.02.2.01.00 08	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	5	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.00 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	4	08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
			2.22.02.2.01.00 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	0	08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.00 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	3	08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
			2.22.05.2.02.00 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	2	08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.00 13	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan		
			2.23.02.2.01.00 14	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	27554	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.00 03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang		



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
			2.23.03.2.01.00 04	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	0	
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.00 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		
			2.24.02.2.03.00 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	100	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.00 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kec	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	20	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
			3.25.03.2.02.00 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	10	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
			3.25.03.2.02.00 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	5	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.00 04	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	20	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
			3.25.05.2.01.00 06	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	15	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
			3.25.05.2.01.00 07	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	5	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
			3.25.05.2.01.00 12	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	0	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02.00 08	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	120	
			3.26.02.2.03.00 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	10	



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
				Kabupaten/Kota				
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.00 09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	
			3.26.04.2.02.00 12	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	1	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.00 06	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi		03.05.01 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta Prambanan
			3.26.02.2.01.00 09	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen		03.05.05 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Gili Tramena
			3.26.02.2.03.00 01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi		03.05.08 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
			3.26.02.2.03.00 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen		03.05.10 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.00 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit		03.05.01 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta Prambanan
			3.26.04.2.02.00 02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen		03.05.05 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Gili Tramena
			3.26.04.2.02.00 16	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen		03.05.08 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
			3.26.04.2.02.00 22	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk		03.05.10 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.00 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
			3.27.02.2.01.00 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
			3.27.02.2.01.00 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokas	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
			3.27.02.2.01.00 03	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
			3.27.02.2.01.00 03	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
			3.27.02.2.01.00 03	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
			3.27.03.2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
			3.27.03.2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
			3.27.03.2.01.00 05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	0	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
			3.27.03.2.01.00 05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	0	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
			3.27.03.2.01.00 05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	0	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.00 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	1	
			3.30.02.2.07.00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	1	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.00 02	Pameran Dagang Nasiona	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	5	
			3.30.05.2.01.00 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	1	



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.00 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	
			3.31.02.2.01.00 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
			3.31.03.2.01.00 04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.00 10	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang	0	
			3.32.03.2.01.00 20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	0	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.00 01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	0	
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								



No.	OUTCOME	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	300	08.02.01 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	300	08.02.01 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa



4.2.3. Pemetaan Tema, Sasaran dan Program Pembangunan Tahun 2026

Pemetaan program prioritas daerah Tahun 2026 diperlukan untuk memastikan keterkaitan yang sistematis antara capaian program dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan, selain itu juga akan memudahkan dalam evaluasi kinerja dan penentuan pagu atau plotting anggaran.

4.2.3.1. Pemetaan Tema, Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Penjabaran tema pembangunan dan prioritas pembangunan ke dalam program prioritas, disajikan pada tabel di bawah ini. Perlu dimaklumi bersama, bahwa program prioritas bukanlah nomenklatur program yang tercantum pada APBD. Program prioritas adalah penekanan (*streeching*) yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan urusan pembangunan yang relevan.

Tabel 4. 9
Pemetaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026

ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA
Memacu Pembangunan Infrastruktur Dasar, Pelayanan Publik, Dan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Lampung Timur Makmur	Prioritas 1. Peningkatan kemantapan infrastruktur dasar	Peningkatan kemantapan infrastruktur dasar	Peningkatan Kemantapan Infrastruktur Dasar: 1. Program Penyelenggaraan jalan 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Penataan Bangunan Gedung 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 6. Program Kawasan Permukiman 7. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 8. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. PUPR 2. DLHPKP 3. DISHUB
			Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan	1. PUPR 2. DLHPKP



ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA
			Sistem Air Limbah 3. Program Pengembangan Perumahan 4. Program Pengembangan Permukiman 5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 6. Program Pengembangan Perumahan	
			Percepatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah: 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1. PUPR
	Prioritas 2. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, pemenuhan SPM, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah	Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah: 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. BPD 2. BPKD 3. OPD pengampu Pajak dan Retribusi 4. OPD BLUD 5. OPD pengelola DAK fisik dan non fisik 6. OPD pengelola DAU dan DBH SG 7. Kecamatan 8. Satpol PP
			Peningkatan Tata Kelola Pemda dan Layanan Publik Berbasis Digital: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 3. Program Kepegawaian Daerah 4. Program Informasi dan Komunikasi Publik 5. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 6. Program Pendaftaran Penduduk 7. Program Pembinaan Perpustakaan 8. Program Pengelolaan	1. SEKDA 2. Sekretaris DPRD 3. BKPPD 4. Kominfo 5. BPKAD 6. Kecamatan



ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA
			Barang Milik Daerah 9. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 10. Program Pencatatan Sipil 11. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 12. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 13. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 14. Program Pengelolaan Arsip 15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah: 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Program Penyelenggaraan Pengawasan 6. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 8. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 9. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. BPPD 2. BPKAD 3. Inspektorat



ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA
	Prioritas 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan	a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan layanan kesehatan b. Percepatan penurunan kemiskinan	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan: 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. DIKBUD
			Pembangunan Pemuda dan Olah Raga: 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Keolahragaan	1. DISPARPORA
			Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan: 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. DINKES 2. RSUD Sukadana 3. Puskemas
			Peningkatan Kualitas Layanan Sosial: 1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Penanganan Bencana 4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1. DINSOS
			Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial: 1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. DIKBUD 2. DINKES 3. DINSOS



ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA
			2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Rehabilitasi Sosial	
			Pengentasan Kemiskinan: 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Pengelolaan Pendidikan 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Program Penataan Bangunan Gedung 6. Program Kawasan Permukiman 7. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 8. Program Pengembangan Permukiman 9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. DINSOS 2. DIKBUD 3. DINKES 4. PAPPKB 5. PUPR 6. DLH PKPP 7. DPMD 8. DISKOPNAKER
	Prioritas 4. Peningkatan investasi dan hilirisasi serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	a. Peningkatan investasi dan hilirisasi serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal b. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah c. Stabilisasi harga pangan, pengembangan kewirausahaan, UMKM dan Industri Kecil	Peningkatan Realisasi Investasi Daerah: 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pelayanan Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6. Program Pengelolaan Pelayanan 7. Program Perekonomian Dan Pembangunan	1. PTSP 2. Kecamatan



ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA
		dan Mikro serta peningkatan ekspor.	Peningkatan Produktivitas Sektor Produksi Unggulan Daerah: 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Penyuluhan Pertanian 4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 8. Program Perizinan Usaha Pertanian	1. DKPTPHP 2. DISKANNAK
			Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah: 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro 3. Program Pengembangan UMKM 4. Program Penyuluhan Pertanian 5. Program Perizinan Usaha Pertanian 6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1. DISPERINDAG 2. DISKOPNAKER 3. DKPTPHP 4. DISPERNAK
			Peningkatan Sektor Perdagangan, IKM, UMKM, dan Koperasi: 1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3. Program	1. DISPERINDAG 2. DISKOPNAKER



ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA
			Pengembangan Ekspor 4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 8. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. DISPARPORA
			Peningkatan Produktivitas Angkatan Kerja dan Hubungan Industrial: 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial 4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1. DISKOPNAKER
			Ketahanan Pangan: 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan	1. DKPTPHP



ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA
			Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	
	Prioritas 5. Pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas BUMDes	Pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kapasitas BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal	Program Desa Makmur: 1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1. DPMD
			Pengembangan Kapasitas BUMDes: 1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. DPMD
	Prioritas 6. Penguatan nilai religi dan kebudayaan serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan nilai religi dan kebudayaan serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan Nilai Religi dan Pelestarian Kebudayaan: 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Pengembangan Kebudayaan 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 4. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. SEKDA 2. DIKBUD 3. BKBP



ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA
			Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat: 1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 4. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 5. Program Perlindungan Perempuan 6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 7. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah 8. Program Penatagunaan Tanah 9. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. SATPOL PP 2. BKBP
	Prioritas 7. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk: 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Khusus Anak 3. Program Pengendalian Penduduk 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 6. Program Perlindungan Perempuan 7. Program Pembinaan	1. DP3APPKB



ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA
			Keluarga Berencana (KB) 8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
	Priorita 8. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana.	a. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana b. Penguatan swasembada pangan, energi, dan air	Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup: 1. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8. Program Penatagunaan Tanah 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 10. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1. DLHKPP
			Peningkatan Pelayanan Persampahan dan Hilirisasi Persampahan: 1. Program Pengelolaan Persampahan	1. DLHPKPP 2. PUPR



ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	INSTANSI PELAKSANA
			Peningkatan Mitigasi dan Ketahanan Bencana: 1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. BPBD

4.2.3.2. Pemetaan Dukungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Terhadap Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2026

Dalam rangka menjamin efektivitas dan keselarasan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu memastikan bahwa arah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 terintegrasi secara vertikal dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional. Hal ini penting untuk mendorong sinergi kebijakan, memperkuat efektivitas pelaksanaan program, serta mengoptimalkan dukungan pembiayaan dan sumber daya lintas tingkat pemerintahan. Upaya integratif ini mencakup proses pemetaan dan penyelarasan antara prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat. Pemetaan tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah daerah tidak berjalan sendiri, melainkan saling menguatkan dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah pemetaan prioritas daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Prioritas Provinsi Lampung dan Prioritas Nasional:

Tabel 4. 10
Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Lampung Timur Terhadap Prioritas Provinsi Lampung dan Prioritas Nasional Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (Milyar)
Prioritas 1. Peningkatan kemandapan infrastruktur dasar.	Peningkatan kemandapan infrastruktur dasar.	Peningkatan Kemandapan Infrastruktur Dasar: 1 Program Penyelenggaraan jalan 2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	PN 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	PP 1: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.	271,87



PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		Minum 3 Program Penataan Bangunan Gedung 4 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 5 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 6 Program Kawasan Permukiman 7 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 8 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 9 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3 Program Pengembangan Perumahan 4 Program Pengembangan Permukiman 5 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 6 Program Pengembangan Perumahan Percepatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah: 1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.		
Prioritas 2. Reformasi birokrasi dan	Reformasi birokrasi, peningkatan	Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah: 1 Program Pengelolaan	PN 8: Memperkuat penyelarasan	PP 3: Meningkatkan kehidupan	1.397,56



PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (Milyar)
peningkatan pelayanan publik	pelayanan publik, pemenuhan SPM, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah	Pendapatan Daerah 2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan , serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas	
		Peningkatan Tata Kelola Pemda dan Layanan Publik Berbasis Digital: 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 3 Program Kepegawaian Daerah 4 Program Informasi dan Komunikasi Publik 5 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 6 Program Pendaftaran Penduduk 7 Program Pembinaan Perpustakaan 8 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 9 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 10 Program Pencatatan Sipil 11 Program Pengelolaan Profil Kependudukan 12 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 13 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 14 Program Pengelolaan Arsip 15 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			



PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah: 1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 4 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Program Penyelenggaraan Pengawasan 6 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 7 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 8 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 9 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
Prioritas 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan	a.Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan layanan kesehatan b. Percepatan penurunan kemiskinan	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan: 1 Program Pengelolaan Pendidikan 2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pembangunan Pemuda dan Olah Raga: 1 Program Pengembangan	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	PP 1: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif PP 2: Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan	190,95



PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 3 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Keolahragaan	penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.	produktif	
		Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan: 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
		Peningkatan Kualitas Layanan Sosial: 1 Program Pemberdayaan Sosial 2 Program Rehabilitasi Sosial 3 Program Penanganan Bencana 4 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			
		Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial: 1 Program Pengelolaan Pendidikan 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3 Program Rehabilitasi Sosial			
		Pengentasan Kemiskinan: 1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2 Program Pengelolaan Pendidikan 3 Program Pemenuhan			



PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 4 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Program Penataan Bangunan Gedung 6 Program Kawasan Permukiman 7 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 8 Program Pengembangan Permukiman 9 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			
Prioritas 4. Peningkatan investasi dan hilirisasi serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	a. Peningkatan investasi dan hilirisasi serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal b. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah c. Stabilisasi harga pangan, pengembangan kewirausahaan, UMKM dan Industri Kecil dan	Peningkatan Realisasi Investasi Daerah: 1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2 Program Promosi Penanaman Modal 3 Program Pelayanan Penanaman Modal 4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6 Program Pengelolaan Pelayanan 7 Program Perekonomian Dan Pembangunan Peningkatan Produktivitas Sektor Produksi Unggulan Daerah: 1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3 Program Penyuluhan Pertanian 4 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PN 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PP 1: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif PP 2: Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif	17,25



PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (Milyar)
	Mikro serta peningkat an ekspor.	5 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 6 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 7 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 8 Program Perizinan Usaha Pertanian Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah: 1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2 Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro 3 Program Pengembangan UMKM 4 Program Penyuluhan Pertanian 5 Program Perizinan Usaha Pertanian 6 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 7 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Peningkatan Sektor Perdagangan, IKM, UMKM, dan Koperasi: 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3 Program Pengembangan Ekspor 4 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 5 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 6 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 7 Program Pendidikan dan Latihan <td></td> <td></td> <td></td>			



PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		Perkoperasian 8 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 9 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Peningkatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: 1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2 Program Pemasaran Pariwisata 3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Peningkatan Produktivitas Angkatan Kerja dan Hubungan Industrial: 1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2 Program Penempatan Tenaga Kerja 3 Program Hubungan Industrial 4 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Swasembada Pangan: 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3 Program Penanganan Kerawanan Pangan 4 Program Pengawasan Keamanan Pangan			
Prioritas 5. Pemberdayaan masyarakat desa dan desa serta	Pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan	Program Desa Makmur: 1 Program Administrasi Pemerintahan Desa 2 Program	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah	PP 1: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang	1,09



PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (Milyar)
peningkatan kapasitas BUMDes	kapasitas BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 3 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Pengembangan Kapasitas BUMDes: 1 Program Administrasi Pemerintahan Desa 2 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	inklusif, mandiri, dan inovatif PP 2: Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif	
Prioritas 6. Penguatan nilai religi dan kebudayaan serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan nilai religi dan kebudayaan serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan Nilai Religi dan Pelestarian Kebudayaan: 1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2 Program Pengembangan Kebudayaan 3 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 4 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 5 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat: 1 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	PP 3: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.	23,91



PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		Sosial, dan Budaya 4 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 5 Program Perlindungan Perempuan 6 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 7 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah 8 Program Penatagunaan Tanah 9 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
Prioritas 7. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk: 1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2 Program Perlindungan Khusus Anak 3 Program Pengendalian Penduduk 4 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 5 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 6 Program Perlindungan Perempuan 7 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 8 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 9 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam. PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	PP 2: Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif PP 3: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.	0,45
Priorita 8. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana.	c. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana d. Penguatan	Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup: 1 Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2 Program Pengendalian	PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	PP 1: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif	6,15



PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (Milyar)
	swasembada pangan, energi, dan air	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 3 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 4 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 5 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 6 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8 Program Penatagunaan Tanah 9 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 10 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Peningkatan Pelayanan Persampahan: 1 Program Pengelolaan Persampahan	kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru PN 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur		



PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (Milyar)
		Peningkatan Mitigasi dan Ketahanan Bencana: 1 Program Penanggulangan Bencana 2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 4 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian			

Pembangunan daerah merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang memerlukan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif. Sinergi pembangunan menjadi kunci dalam menyatukan arah kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program antarperangkat daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, serta masyarakat. Melalui sinergi yang kuat, setiap elemen pembangunan dapat saling melengkapi dan memperkuat, sehingga hasil yang dicapai lebih optimal, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan program unggulan daerah memegang peranan strategis sebagai penggerak utama yang menyatukan berbagai inisiatif pembangunan dalam satu kerangka tujuan bersama. Program unggulan merupakan manifestasi nyata dari visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah yang dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan daya saing daerah. Pemetaan program unggulan daerah yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi lokal, sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 11
Pemetaan Program Unggulan Daerah

No	Program Unggulan Daerah	Indikator Kinerja	Dukungan Program Perangkat Daerah	Stakeholder Utama yang Terkait	Pagu Indikatif (Miliyar)
1.	Beasiswa Makmur (PHTC)	Indeks Pendidikan	1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	• Dinas Pendidikan • Dinas Sosial • Perguruan Tinggi	119,1





No	Program Unggulan Daerah	Indikator Kinerja	Dukungan Program Perangkat Daerah	Stakeholder Utama yang Terkait	Pagu Indikatif (Miliar)
2.	Kartu Sehat Makmur (PHTC)	Indeks Kesehatan	1. Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	• Pemerintah Pusat • Pemprov Lampung • BPJS Kesehatan • RSUD • BUMD • Forum CSR • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil • Puskesmas • Klinik • Pemerintah Desa	59,3
3.	Percepatan Peningkatan Kemantapan Jalan (PHTC)	Kemantapan Jalan	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan 2. Dinas Lingkungan Hidup PKPP Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 3. Dinas Perhubungan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	• Pemerintah Pusat • Pemprov Lampung • Forum CSR • Pemerintah Desa	251,47
4.	Percepatan Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan	Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik dan layak pakai	1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Program Pengelolaan Pendidikan	• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas PUPR • Kepala sekolah & komite sekolah	94,93
5.	Percepatan Revitalisasi Infrastruktur Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan (%)	1. Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	• Kementerian Kesehatan • Dinas Kesehatan • Dinas PUPR • Puskesmas • RSUD	59.3
6.	Penyediaan dan Revitalisasi Infrastruktur Pertanian dan Perikanan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1. Dinas Ketahanan Pangan, TPHP Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Dinas Perikanan dan	• Pemprov Lampung • Dinas Ketahanan Pangan, TPHP • Dinas Perikanan dan Peternakan • Dunia usaha &	250,92



No	Program Unggulan Daerah	Indikator Kinerja	Dukungan Program Perangkat Daerah	Stakeholder Utama yang Terkait	Pagu Indikatif (Miliar)
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	Peternakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	swasta • Kelompok tani • Kelompok nelayan	
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		
7	<i>City Beautification</i> Kawasan Ibukota dan Kecamatan Strategis (PHTC)	Jumlah Destinasi	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Dinas Lingkungan Hidup PKPP Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	• Pemerintah Pusat • Pemprov Lampung • BUMN • Dinas PUPR • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • DLH • Bappeda • Forum CSR	27,8
8	Peningkatan Layanan Publik Berbasis Digital (PHTC)	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil 3. Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	• Pemerintah Pusat • Pemprov Lampung • BPN • Forum CSR • Pemerintah Desa	70,1



No	Program Unggulan Daerah	Indikator Kinerja	Dukungan Program Perangkat Daerah	Stakeholder Utama yang Terkait	Pagu Indikatif (Miliar)
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Pengendalian Izin Usaha Industri 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa 8. Badan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
9	Pengembangan Kawasan Ekonomi Desa dan Hilirisasi Produk Unggulan (PHTC)	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 2. Dinas Ketahanan Pangan, TPHP Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pengembangan UMKM, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri 5. Dinas Perikanan dan Peternakan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 6. Dinas Lingkungan Hidup, PKPP Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP	• Pemerintah Pusat • Pemprov Lampung • Perbankan • OJK • Bank Indonesia • BUMN • BUMD • Setdakab Bagian Perekonomian • Perguruan Tinggi • Pemerintah Desa	33,88



No	Program Unggulan Daerah	Indikator Kinerja	Dukungan Program Perangkat Daerah	Stakeholder Utama yang Terkait	Pagu Indikatif (Miliar)
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal 8. Sat Pol PP Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 9. Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 11. Dinas Perhubungan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 12. Setdakab Program Perekonomian Dan Pembangunan		
10	Peningkatan Perlindungan Sosial	Jumlah penerima bantuan sosial (KPM)	1. Dinas Sosial Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	• Pemerintah Pusat • Pemprov Lampung • BUMN • Dinas Sosial • Bappeda • Organisasi Keagamaan • LSM Sosial • Perguruan Tinggi	2,16
11	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah pekerja migran yang mendapatkan perlindungan (Orang)	1. Dinas Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.	• Pemerintah Pusat (Kemenaker) • Pemprov Lampung • BP2MI • BUMN • Disnakertrans • Bappeda • Bank • Serikat Buruh Migran	-
12	Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Dinas Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan	• Pemerintah Pusat (KLHK) • Pemprov Lampung • BUMN • DLH • Bappeda • NGO Lingkungan	1



No	Program Unggulan Daerah	Indikator Kinerja	Dukungan Program Perangkat Daerah	Stakeholder Utama yang Terkait	Pagu Indikatif (Miliyar)
			Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan.		
13.	Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)	Jumlah Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1. Dinas Ketahanan Pangan, TPHP Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengawasan Keamanan Pangan 2. Dinas Perikanan dan Peternakan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen 4. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pengembangan UMKM 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	• Pemerintah Pusat (BGN) • Pemprov Lampung • Bulog • PLN • BPOM • BUMN • BUMD • Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi • Posyandu • Kementerian Agama • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Kesehatan • Dinas Perhubungan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Bappeda • Pemerintah Desa	364,45



No	Program Unggulan Daerah	Indikator Kinerja	Dukungan Program Perangkat Daerah	Stakeholder Utama yang Terkait	Pagu Indikatif (Miliar)
			Masyarakat Hukum Adat 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 7. Dinas Lingkungan Hidup PKPP Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengelolaan Pendidikan 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		
14.	Dukungan Sekolah Rakyat	Jumlah Unit Sekolah Rakyat	1. Dinas Sosial Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	• Pemerintah Pusat • Kementerian Sosial • Pemprov Lampung • BUMN • BUMD • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Kesehatan • Bappeda • Pemerintah Desa	15,86
15.	Dukungan Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes dan Koperasi	Persentase BUMDes berkembang dan maju Persentase Koperasi yang Berkualitas	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 2. Dinas Ketahanan Pangan, TPHP Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pengembangan	• Pemerintah Pusat • Pemprov Lampung • Perbankan • OJK • Bank Indonesia • BUMN • BUMD • Setdakab Bagian Perekonomian • Perguruan Tinggi • Pemerintah Desa	20,73



No	Program Unggulan Daerah	Indikator Kinerja	Dukungan Program Perangkat Daerah	Stakeholder Utama yang Terkait	Pagu Indikatif (Miliar)
			UMKM 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri 5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 6. Dinas Perikanan dan Peternakan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 7. Dinas Lingkungan Hidup, PKPP Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 8. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal		
16.	Dukungan Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	Indeks Ketahanan Pangan	1. Dinas Ketahanan Pangan, TPHP Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengawasan Keamanan Pangan 2. Dinas Perikanan dan Peternakan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan	• Pemerintah Pusat • Pemprov Lampung • BULOG • BUMN • BUMD • Perguruan Tinggi • Pemerintah Desa	269,26



No	Program Unggulan Daerah	Indikator Kinerja	Dukungan Program Perangkat Daerah	Stakeholder Utama yang Terkait	Pagu Indikatif (Miliar)
			Budidaya, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen 4. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pengembangan UMKM 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 6. Dinas Lingkungan Hidup PKPP Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		
17.	Dukungan Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	1. Dinas Lingkungan Hidup PKPP Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 4. Bappeda Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 5. Setdakab Program Perekonomian	• Pemerintah Pusat • Pemprov Lampung • PLN • Pertamina • BUMN • BUMD • Perguruan Tinggi • Investor • BBWS • Forum CSR • BRIN • Pemerintah Desa	271,67



No	Program Unggulan Daerah	Indikator Kinerja	Dukungan Program Perangkat Daerah	Stakeholder Utama yang Terkait	Pagu Indikatif (Milyar)
			Dan Pembangunan		
18.	Dukungan Stabilisasi Harg Pangan dan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal	Inflasi	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen 2. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM 3. Dinas Ketahanan Pangan, TPHP Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian 4. Dinas Perikanan dan Peternakan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 5. Sat Pol PP Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 7. Dinas Perhubungan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 8. Setdakab Program Perekonomian Dan Pembangunan	• Pemerintah Pusat • Pemprov Lampung • Bank Indonesia • BUMN • BUMD • Perguruan Tinggi • Investor • Forum CSR • Pemerintah Desa	19,03



4.3. Pemetaan Program Pendukung Prioritas

4.3.1. Pemetaan Program terhadap Prioritas Nasional, Provinsi Lampung dan Daerah

Melaksanakan Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta dalam kerangka keterpaduan dengan arah pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupaya mewujudkan prioritas pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah secara konsisten. Upaya tersebut dilakukan melalui penetapan serta pengalokasian program, kegiatan, dan sub kegiatan, beserta dukungan anggaran yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah. Untuk memperjelas keterkaitan tersebut, berikut disajikan pemetaan program yang mendukung prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 4. 12
Pemetaan Program Pembangunan yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2026

NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMN TAHUN 2025-2029	KODE	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (KSPP)/LUMBUNG PANGAN LAINNYA	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2	PENGEMBANGAN PANGAN AKUATIK (BLUE FOOD)	2.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		2.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		2.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DAN NABATI	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4	PENGEMBANGAN SPAM TERINTEGRASI HULU KE HILIR	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
5	PERUBAHAN PERILAKU DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERSAMPAHAN	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
6	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
7	PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH UNGGUL	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
8	PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMN TAHUN 2025-2029	KODE	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
9	PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
10	PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
11	PENUNTASAN TBC	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
12	PRODUKSI DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
13	PENGUATAN EKOSISTEM PENDUKUNG PEMBERIAN MAKAN BERGIZI	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
14	PENGEMBANGAN HILIRISASI KELAPA	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
15.	PENYALURAN BANTUAN SOSIAL ADAPTIF DAN SUBSIDI TEPAT SASARAN MELALUI KARTU KESEJAHTERAAN	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
16.	FASILITASI PENYEDIAAN PERUMAHAN TERINTEGRASI DENGAN PSU	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
17.	PERUBAHAN PERILAKU DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERSAMPAHAN	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
18.	TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN PUBLIK PRIORITAS	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA



NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMN TAHUN 2025-2029	KODE	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
19.	PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
20.	PEMANFAATAN KHAZANAH BUDAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
21.	PENINGKATAN KETAHANAN IKLIM PESISIR DAN LAUT	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 tidak hanya ditujukan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, tetapi juga diarahkan guna memperkuat pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Lampung. Dalam hal ini, terdapat tujuh prioritas pembangunan Provinsi Lampung yang akan diakomodasi melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026.

Tabel 4. 13
Pemetaan Program Pembangunan yang mendukung Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2026

NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029	KODE	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2	LAMPUNG MENJADI LUMBUNG PANGAN NASIONAL	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT



NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029	KODE	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3	INISIASI LUMBUNG ENERGI TERBARUKAN	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
4	OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DESA DENGAN PENINGKATAN KAPASITAS BUMDES DAN KOPERASI	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
5	STABILISASI HARGA PANGAN DAN PRODUK LOKAL TERSEDIA DI PASAR LOKAL	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI,
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN



NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) RPJMD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029	KODE	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
6	PEMERATAAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
7	PENINGKATAN KEMANTAPAN JALAN PROVINSI DAN DESA	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Upaya Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah harus dapat secara tepat dilaksanakan melalui alokasi program kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi anggaran yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Berikut adalah pemetaan program pendukung prioritas daerah Kabupaten Lampung Timur :

Tabel 4. 14
Pemetaan Program Pembangunan yang mendukung Prioritas
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026

NO	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	KODE	PROGRAM
1	PENINGKATAN KEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DASAR		
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM



NO	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	KODE	PROGRAM
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
2	REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK		
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		6.01.02	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



NO	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	KODE	PROGRAM
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
3	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4	PENINGKATAN INVESTASI DAN HILIRISASI SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL



NO	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	KODE	PROGRAM
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		2.18.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM
		2.17.18	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		3.27.03	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
		2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN



NO	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	KODE	PROGRAM
			PANGAN
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA PENINGKATAN KAPASITAS BUMDES		
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		2.13.05	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
6	PENGUATAN NILAI RELIGI DAN KEBUDAYAAN SERTA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT		
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCasila DAN KARAKTER KEBANGSAAN
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN



NO	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	KODE	PROGRAM
		2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
8	PENINGKATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA		
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
		2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH



NO	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	KODE	PROGRAM
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.3.2. Pemetaan Program terhadap pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal telah mengamanatkan 29 Jenis Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota. Berikut adalah pemetaan program pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lampung Timur :

Tabel 4. 15
Pemetaan Program Pembangunan dalam Rangka Pencapaian SPM Tahun 2026

JENIS PELAYANAN DASAR SESUAI PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021	KODE	PROGRAM
BIDANG PENDIDIKAN		
1. Meningkatkan partisipasi warga negara dalam pendidikan menengah 2. Meningkatkan partisipasi warga negara disabilitas dalam pendidikan khusus	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
BIDANG KESEHATAN		
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan orang yang terdampak situasi kejadian luar biasa	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
BIDANG PEKERJAAN UMUM		
1. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 2. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT		
1. Identifikasi dan fasilitasi rumah bagi masyarakat terdampak bencana dan program pemerintah	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1. Penguatan pelayanan trantibum yang terintegrasi 2. Integrasi security command center 3. Penguatan siskamling 4. Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan daerah 5. Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL



JENIS PELAYANAN DASAR SESUAI PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021	KODE	PROGRAM
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
BIDANG SOSIAL		
1. Peningkatan layanan lanjut usia terlantar, korban bencana, anak terlantar, gelandangan pengemis, dan penyandang disabilitas terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1. Penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
2. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
3. Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
4. Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
5. Pembentukan desa tangguh bencana		
6. Peningkatan tata kelola layanan tanggap darurat dan pasca bencana		
7. Fasilitasi upaya pencegahan dan penanganan konflik satwa liar dan manusia		





BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 berpedoman pada:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan untuk kedua kali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Rencana kerja dan pendanaan daerah yang tertuang dalam RKPD disusun untuk menggambarkan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah yang selaras dengan kemampuan fiskal daerah. Program dan kegiatan yang dirancang bersumber dari APBD Kabupaten, mencakup urusan pemerintahan wajib dan pilihan, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dan kerangka pendanaan akan diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengetasan kemiskinan dengan target peningkatan usia harapan hidup manusia, kesejahteraan masyarakat serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Sementara itu, untuk program dan kegiatan yang memerlukan pendanaan dari sumber lain seperti APBN dan APBD Provinsi Lampung, proses pengusulannya masih terus berjalan dan akan disesuaikan pada tahap selanjutnya. Pengusulan kegiatan yang didanai oleh APBN dilakukan secara terintegrasi melalui sistem perencanaan nasional, yaitu aplikasi e-Musrenbang untuk mendukung prioritas nasional serta aplikasi KRISNA-DAK untuk kegiatan yang direncanakan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dasar.





BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan dokumen RKPd diamanatkan untuk menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan Indikator Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan krusial mengenai capaian kinerja yang dicapai oleh pemerintah daerah. Informasi ini berfungsi sebagai alat ukur yang objektif terhadap sejauh mana tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah berhasil direalisasikan. Melalui indikator ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selain itu, indikator kinerja menjadi dasar dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), memperkuat akuntabilitas publik, dan memastikan bahwa setiap upaya pembangunan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Merujuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan menyesuaikan dengan evaluasi kinerja daerah jangka menengah lalu, serta sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025-2029, ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada sasaran pokok pembangunan daerah yang meliputi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau IKU merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu instansi pemerintah. IKU bersifat esensial karena merepresentasikan kinerja utama yang menjadi prioritas dalam mewujudkan visi Kabupaten Lampung Timur, dengan setiap indikator disusun untuk mendukung pelaksanaan misi pembangunan yang telah dirumuskan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan, maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian pada tahun rencana disajikan dalam tabel berikut:





Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,05	73,8
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,02	2,60 - 2,90
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	N/A	53
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,62	4,90
5	Pendapatan per Kapita ADHB	Rp.Juta/ Kapita/ Tahun	49,27	55,00
6	Inflasi	(%)	1,37	2,5 (+-1)
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71,3	71,7
8	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	Angka	0,278	0,270 - 0,280
9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,19	12,00 - 12,14
10	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Ton CO ₂ Ekuivalen	-124.486,88	139.817,99

Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan daerah sebagai ukuran konkret keberhasilan pelaksanaan visi “**Lampung Timur MAKMUR**,” yakni Lampung Timur yang Maju, Aman, Kolaboratif, Mandiri, Unggul, dan Religius. Upaya pencapaian IKU ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan secara terukur, berorientasi hasil (*result oriented*), dan berdampak langsung terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat. Perwujudan Lampung Timur Maju di tahun 2026 salah satunya tercermin dari peningkatan indeks kepuasan layanan infrastruktur yang ditargetkan sebesar 53. Peningkatan indeks kepuasan layanan infrastruktur daerah merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing. Infrastruktur yang berkualitas dan layanan yang memuaskan masyarakat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana pendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik yang efektif.

Perwujudan Lampung Timur Aman, Kolaboratif dan Religius salah satunya tercermin dari nilai rasio gini yang semakin membaik, ditargetkan pada tahun 2026 rasio gini sebesar 0,270-0,280. Berdasarkan literatur, daerah yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi rendah cenderung lebih stabil dan aman, karena masyarakatnya merasakan manfaat pembangunan secara merata dan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Perbaikan nilai gini rasio di tahun 22026 diharapkan akan mendorong tumbuhnya semangat kolaboratif, di mana berbagai kelompok masyarakat dapat saling mendukung dan bekerja sama tanpa sekat sosial maupun ekonomi, yang bermuara pada perkuatan modal sosial dan rasa kebersamaan dalam membangun daerah. Selain itu, penurunan Rasio Gini juga sejalan



dengan upaya membangun masyarakat yang religius. Masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih merata akan lebih mudah menumbuhkan kehidupan sosial yang harmonis, saling menghargai, dan menjauhi konflik sosial.

Selanjutnya, Lampung Timur yang Mandiri tercermin dari pendapatan perkapita yang semakin meningkat yaitu mencapai 55 juta per kapita per tahun. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi menunjukkan meningkatnya produktivitas masyarakat, berkembangnya kegiatan ekonomi lokal, serta bertambahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan per kapita menjadi aspek penting dalam mewujudkan daerah yang mandiri, yaitu daerah yang mampu mengandalkan kekuatan ekonomi sendiri.

Lampung Timur Unggul tercermin dari semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 73,8 di tahun 2026. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu prioritas strategis dalam mewujudkan daerah yang unggul dan berdaya saing. Daerah dengan IPM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakatnya memiliki akses luas terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan yang baik, serta tingkat kesejahteraan ekonomi yang memadai. Upaya meningkatkan IPM tidak hanya sebatas meningkatkan angka statistik, tetapi juga mencerminkan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia sebagai modal utama kemajuan daerah. Dalam konteks mewujudkan daerah yang unggul, peningkatan IPM menjadi landasan bagi tumbuhnya daya saing daerah di berbagai sektor. Sumber daya manusia yang unggul akan mampu menggerakkan sektor ekonomi, mempercepat transformasi digital, dan mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif.

6.2 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah meliputi 4 (empat) aspek kinerja yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Berikut ini merupakan tabel indikator kinerja daerah per aspek kinerja:





Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Per Aspek Kinerja

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA RKPD	TARGET KINERJA RPJMD
				2026	2027
A	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,22	86	86,7
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	11,54	9,46	8,81
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	263,12	268	270
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Aman	%	8,5	9,2	9,56
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	71,47	69,06	69,31
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,61 (2023)	4,25	5,46
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	N/A	21,77	23,92
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	N/A	17	21
9	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Ton CO ₂ Ekuivalen	-124.486,88	139.817,99	152.150,51
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	166,4	148,92	140,18
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,46	0,5	0,53
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,96	0,9	0,9
13	Rasio Penduduk	%	104	103,6	103,5
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	209,2	210	210,5
15	Persentase Tutupan Lahan	%	N/A	58,7	59,7
B	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,62	4,9	5,5
2	Tingkat Kemiskinan	%	13,19	12,00 - 12,14	10,75 - 11,75
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	49,27	55	59
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,02	2,60 - 2,90	2,60 - 2,70
5	Indeks Gini	Angka	0,278	0,270 - 0,280	0,287-0,274
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,05	73,8	74,2
7	Indeks Modal Manusia	Angka	N/A	0,55	0,56
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,19	74,67	74,91



No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA RKPD	TARGET KINERJA RPJMD
				2026	2027
9	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,24	0,52	0,58
10	Prevalensi Stunting	%	11,9	10,8	10,3
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,2	8,5	8,8
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	13,98	14,48
13	Angka Literasi SMP	%	59,56	64,7	67,27
	Angka Literasi SD	%	50,28	57,96	61,8
	Angka Numerasi SMP	%	66,28	72,52	75,64
	Angka Numerasi SD	%	62,5	68,33	71,23
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	45,11	50	52,11
15	Indeks Literasi Digital	Angka	N/A	3,46	3,49
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan sosial Tenaga Kerja	%	17,4	32	34
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	N/A	74	74,6
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	57,82 (Lampung)	58	60
19	Indeks Perlindungan Anak	Angka	63,35	64	65
20	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	58,49	62	64
21	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,252	0,234	0,225
22	Indeks Pembangunan Gender	Angka	90,1	92	93
23	Indeks Pembangunan Pemuda	%	53,17 (Lampung)	53,68	53,85
24	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	N/A	87,86	88,4
25	Tingkat Produktivitas Kerja	%	N/A	87,6	87,96
26	Indeks Partisipasi Olahraga	Angka	29	29,6	30,5
27	Nilai Tukar Nelayan	Angka	111,85 (Lampung)	114,1	115,24
28	Nilai Tukar Pembudidayaan Perikanan	Angka	97,8 (Lampung)	101,04	101,55
29	Nilai Tukar Petani	%	121,18	123	124
30	Rasio Elektrifikasi	%	99,99	100	100



No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA RKPD	TARGET KINERJA RPJMD
				2026	2027
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Angka Ketergantungan	%	44,81	44,7	44,6
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,81	9,03	9,04
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,34	1,36	1,37
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	1,82 (Lampung)	1,86	1,87
5	Rasio Kewirausahaan	%	2,62	2,64	2,68
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,91	72	76
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	53,39	58,29	60,74
8	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer*	%	35,22	36,6	37
9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	N/A	5,48	5,66
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	29,56	30,28	30,65
11	Ekspor Barang dan Jasa	%	0,74	2,02	2,7
12	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	N/A	72	74
13	Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	69,43 (2023)	72	74
14	Persentase Desa Mandiri	%	16,3	17,8	18,93
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,15	0,29	0,31
16	Tingkat Inflasi	%	1,37	2,5 (+-1)	2,5 (+-1)
17	Indeks Desa Membangun	Status	Maju	Maju	Maju
18	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,04	14,06	15,39
19	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	8,81	9,03	9,04
20	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	N/A	71	73
21	Opini Laporan Keuangan	Mutu	WTP	WTP	WTP
22	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	N/A	60,4	60,8
23	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	%	-16,27	10	10
24	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	2,96	3,09	3,13



No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA RKPd	TARGET KINERJA RPJMD
				2026	2027
D	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	N/A	70	73
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,84	3	3,3
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,99	4,08	4,12
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	N/A	72	73
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	78	80	82
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	N/A	79,27	80,18
8	Indeks Rasa Aman	Angka	N/A	74	75
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	N/A	68	71
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,37	3,54	3,65
11	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Angka	N/A	67	70
12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	N/A	70	72
13	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	52,73	58,99	62,11
14	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	N/A	90	92
15	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Angka	N/A	16,1	18,15
16	Kebijakan Berbasis Bukti	%	86	90	93
17	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	3	3	3
18	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	N/A	0,78	0,8
19	Rasio Konektivitas	Angka	0,5	0,52	0,54
20	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	N/A	0,4	0,6
21	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	2,78 (Baik)	2,9	3,1
22	Indeks SPBE	Angka	2,84	3	3,3
23	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Angka	45,1	50,06	52,54
24	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71,3	73	74



Dalam rangka mewujudkan visi *"Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas"*, IKD menjadi dasar dalam menyusun dan mengarahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar tepat sasaran. Melalui IKD, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi capaian yang perlu ditingkatkan serta mengarahkan program dan anggaran secara lebih terfokus dan berdampak nyata terhadap masyarakat. Aspek geografi dan demografi memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian misi pembangunan daerah. Indikator seperti indeks ketahanan pangan, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, dan konsumsi listrik per kapita mendukung misi di bidang hilirisasi pertanian, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum layak, sanitasi aman, serta layanan pengelolaan sampah berkontribusi pada pemerataan infrastruktur dasar dan kesehatan masyarakat. Sementara itu, IKLH, tutupan lahan, serta penurunan intensitas emisi relevan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan lingkungan. Indeks risiko bencana, ketahanan daerah, serta dinamika kependudukan seperti laju dan kepadatan penduduk menjadi dasar dalam merancang tata ruang, mitigasi bencana, dan perlindungan sosial yang sejalan dengan visi Kabupaten Lampung Timur.

Aspek kesejahteraan masyarakat mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia dan ekonomi daerah. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, serta nilai tukar petani dan nelayan mendukung misi penguatan ekonomi dan hilirisasi sektor unggulan. Indeks pembangunan manusia, pendidikan, dan kesehatan seperti angka harapan hidup, stunting, serta cakupan jaminan sosial, memperkuat misi peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar. Sementara itu, indikator kesetaraan gender, perlindungan anak, indeks kebudayaan, serta literasi digital dan finansial relevan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berdaya saing.

Aspek daya saing daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Indikator seperti kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB, proporsi ekonomi kreatif, dan tingkat investasi mendukung misi peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja. Sementara itu, indeks kemudahan berusaha, infrastruktur ekonomi, serta kapasitas inovasi menjadi landasan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan. Seluruh indikator ini memperkuat upaya Lampung Timur dalam meningkatkan daya saing menuju daerah yang makmur dan berkelanjutan.

Aspek pelayanan umum berperan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif. Indikator seperti indeks reformasi birokrasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), kualitas pelayanan publik, serta pengawasan SPIP mendorong tercapainya misi reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan. Di sisi lain, penguatan partisipasi publik, demokrasi, keterbukaan informasi, serta perlindungan HAM juga menjadi fondasi bagi pelayanan yang inklusif dan berkeadilan. Seluruh indikator ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.





6.3 Indikator Kinerja Kunci Daerah

Indeks Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator terpilih yang bersifat strategis dan digunakan untuk mengukur capaian utama pembangunan daerah dalam satu tahun. IKK mencerminkan keberhasilan pelaksanaan prioritas pembangunan tahunan yang selaras dengan arah kebijakan jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD). Indikator ini bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART), serta memiliki pengaruh signifikan terhadap tujuan pembangunan daerah. IKK digunakan sebagai tolok ukur kinerja yang menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja tahunan pemerintah daerah. Keberadaan IKK membantu memastikan bahwa pelaksanaan RKPDP berjalan secara fokus, terarah, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. IKK memuat 4 (empat) urusan penyelenggaraan pemerintah yaitu: urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar IKK disusun untuk mencerminkan capaian layanan publik dasar yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Indikator-indikator pada urusan ini mencakup antara lain angka partisipasi sekolah, cakupan layanan kesehatan dasar, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni, serta cakupan air minum dan sanitasi. Pemilihan indikator ini diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, IKK difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial, pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan kapasitas masyarakat. Indikator yang digunakan antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, indeks kualitas lingkungan hidup, dan jumlah kelompok masyarakat yang terfasilitasi pemberdayaannya. Indikator pada urusan ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penguatan sistem pelayanan publik.

Urusan pemerintahan pilihan, IKK disusun berdasarkan potensi unggulan daerah yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Kabupaten Lampung Timur yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata menetapkan indikator seperti produktivitas hasil pertanian, nilai produksi perikanan, jumlah kunjungan wisatawan, dan pertumbuhan usaha mikro dan kecil. IKK ini dirancang untuk mendorong nilai tambah ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal.

Fungsi penunjang urusan pemerintahan, IKK digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Indikator yang digunakan mencakup antara lain tingkat realisasi belanja daerah, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), serta indeks kepuasan pelayanan administrasi. Fungsi penunjang ini menjadi fondasi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan lainnya secara optimal. Dengan pendekatan tersebut, penyusunan IKK dalam RKPDP Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 diharapkan dapat memperkuat integrasi antara perencanaan tahunan dengan





sasaran strategis RPJMD, serta memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara terukur, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Kunci Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA RKPD	TARGET KINERJA RPJMD
				2026	2027
	INDIKATOR KINERJA KUNCI				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	67,53	73,61	76,65
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	74,39	78	80
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96,8	98	99
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15,04	23,24	27,34
5	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	%	29	32,2	34,3
	- literasi membaca		20	22,2	24,3
	- numerasi				
2	Kesehatan				
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,35	0,38	0,4
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	83,3	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	85,06	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	83,26	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	92,98	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	91,71	100	100
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	74,86	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98,2	100	100



No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA RKPD	TARGET KINERJA RPJMD
				2026	2027
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	53,95	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	76,19	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	92,45	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100
14	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	39,7	95	95
15	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	72,55	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	N/A	21	22
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	N/A	22	23
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	3,37	10,2	13,7
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	88,18	89	90
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	88,59	88,7	89
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	%	54,7	61	65
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	11,11	11,5	11,8
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100
4	Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	83,33	85	87
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100



No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA RKPD	TARGET KINERJA RPJMD
				2026	2027
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0	40	50
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0,3	0,27	0,25
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0	7	8
5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Angka	3,43	60	70
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Angka	0,02	20	40
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Angka	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	59,38	69	74
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	21,38	15	15
6	Sosial				
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	99,263	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100
B	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
1	Tenaga Kerja				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,011	0,5	2
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	52,67	56,68	59,22
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Sala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	6,56	25	70



No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA RKPD	TARGET KINERJA RPJMD
				2026	2027
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	84,02	85	89
6	Persentase penyandang disabilitas bekerja	%	18	22	24
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	1,34	1,9	2,18
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	3,082	2,1	1,65
3	Pangan				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	25	69	79
4	Pertanahan				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	0	100	100
4	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	40	41	42
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0	100	100
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100
5	Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/kota	Indeks	71,47	69,06	69,31
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	%	0,59	4	6,5
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	93,75	100	100
4	Indeks Keanekaragaman Hayati*	Indeks	0,537	0,546	0,554
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,01	99,5	99,7



No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA RKPD	TARGET KINERJA RPJMD
				2026	2027
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	41,7	65	70
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	98,35	99,4	99,5
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	25,93	35	40
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	16,3	17,8	18,93
2	Persentase BUMDes Maju	%	N/A	2,88	3,5
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	TFR (Angka kelahiran Total)	Angka	2,21	2,2	2,18
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	71,5	72	74
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,7	10	8
4	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,56	66,3	68
9	Perhubungan				
1	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	%	0,5	0,52	0,54
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	100	100	100
10	Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	52,94	80	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	14,29	70	80
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	6,76	14,94	22,22
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	53,51	58	67
2	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	50,2	60	70
12	Penanaman Modal				
1	Persentase peningkatan investasi kabupaten/kota	%	-16,27	10	10



No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA RKPD	TARGET KINERJA RPJMD
				2026	2027
13	Kepemudaan dan Olahraga				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,04	0,1	3
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,2	2	8
3	Persentase pemuda aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan	%	6	6,98	7,28
4	Peningkatan prestasi olahraga	%	12	20	20
14	Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	43,14	58	78
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	17,65	30	48
15	Persandian				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	3,88	15	30
16	Kebudayaan				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	70	78	80
2	Persentase warisan seni dan budaya tak benda yang bersertifikat nasional	%	90	94	95
17	Perpustakaan				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	58,74	60	61
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	45,11	50	52,11
18	Kearsipan				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	%	75	98	100
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	66	98	100
3	Nilai Pengawasan Kearsipan (NHPK)	Angka	45,1	50,06	52,54
4	Tingkat digitalisasi arsip	Angka	47	55	60



No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA RKP	TARGET KINERJA RPJMD
				2026	2027
C	Urusan Pilihan				
1	Kelautan dan Perikanan				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	78.481,08	79.300	84.500
2	Pariwisata				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	32,57	34	40
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	3,71	4,8	5,5
3	Tingkat hunian akomodasi	%	12,17	14,67	15,5
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,34	1,36	1,37
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,34	1,8	2
3	Pertanian				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	kuintal/hektar	51,72	52,8	53,35
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	18,8	19	19,3
4	Perdagangan				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	0,05	0,2	0,29
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	25,44	30	40
5	Perindustrian				
1	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	20,58	20,6	20,61
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	1	30	60
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan (IPUI) Kecil dan Industri	%	100	100	100



No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA RKPD	TARGET KINERJA RPJMD
				2026	2027
	Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100
D	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
1	Perencanaan dan Keuangan				
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	9,62	9,62	9,62
2	Rasio PAD	%	8,88	10	11
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	57,99	53,5	50
6	Opini Laporan Keuangan	Mutu	WTP	WTP	WTP
2	Pengadaan				
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	3,69	35	50
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	22,56	25	30
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	114,9	20	20
3	Kepegawaian				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	74,03	74,8	75,3
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	26,33	28,8	32,76
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	50,58	56	58,9



No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA RKPD	TARGET KINERJA RPJMD
				2026	2027
4	Manajemen Keuangan				
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	1,98	1,8	1,6
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran dalam APBD	%	6,8	5	4,5
3	Manajemen Aset	%	100	100	100
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	5,06	4,8	4,7
5	Transparansi dan Partisipasi Publik				
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	89,66	91	92
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	66,67	69	72



BAB VII P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengemban misi pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2026. RKPD ini, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Timur, menjadi acuan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. RKPD Tahun 2026 mengusung tema pembangunan daerah “Memacu Pembangunan Infrastruktur Dasar, Pelayanan Publik, dan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Lampung Timur Makmur.” Tema tersebut menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk memacu akselerasi pembangunan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, dan pengembangan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, RKPD 2026 memuat sejumlah agenda strategis dan prioritas pembangunan yang dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan fokus pada pelaksanaan dan pencapaian program unggulan daerah serta Program Hasil Terbaik Cepat, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, dengan hasil yang nyata, cepat, dan berkualitas. Sinergi lintas sektor, efisiensi pelaksanaan program, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan *Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas*. Dengan semangat *Sakai Sambayan Membangun Lampung Timur*, RKPD Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman kerja yang mampu mengarahkan seluruh langkah pembangunan daerah menuju pencapaian visi daerah tersebut.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

